



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

Jl. Pangeran Antasari No. 1
Ulu Benteng, Kec. Marabahan
Kabupaten Barito Kuala
Kalimantan Selatan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029



RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025-2029



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 9 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, maka perlu menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
11. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 533);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023 Nomor 6);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2024 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
15. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
16. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
17. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
18. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
19. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dampak (*impact*).

BAB II KEDUDUKAN RPJMD

Pasal 2

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan dan melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.

- (2) RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan beralfat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah, RPJPD, dan RPJMN.
- (3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD; dan
 - b. Perangkat Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) RPJMD Tahun 2025-2029 terdiri dari 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum Daerah;
 - c. Visi, Misi, dan Program prioritas pembangunan Daerah;
 - d. Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan urusan; dan
 - e. penutup.
- (2) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV VISI DAN MISI

Pasal 4

Visi RPJMD Tahun 2025-2029 adalah Terwujudnya Barito Kuala Satu (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas.

Pasal 5

Misi RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi:

- a. Memperkokoh sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religious, berkarakter dan berbudaya luhur
- b. Mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis dan agroindustri
- c. Mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara
- d. Membangun kualitas pelayanan publik dan tata Kelola pemerintahan berbasis digital
- e. Mengembangkan ketangguhan wilayah dan mitigasi bencana

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI RPJMD

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah.

BAB VI PERUBAHAN RPJMD

Pasal 7

- (1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup terjadinya:
 1. bencana alam;
 2. bencana nonalam;
 3. goncangan politik;
 4. krisis ekonomi;
 5. konflik sosial budaya;
 6. gangguan keamanan;
 7. pemekaran Daerah; atau
 8. perubahan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 8

Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Ketetapan Perangkat Daerah penanggung jawab setiap urusan yang tercantum dalam Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.

Pasal 11

Kerangka pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

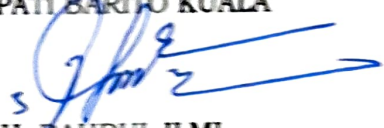
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 20 Agustus 2025

BUPATI BARITO KUALA



H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 20 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA



ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 : (9-70/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 9 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025-2029

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Hal ini merupakan amanat dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan.

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud, disusun secara berjenjang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Pasal 263 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan memperhatikan RPJM Nasional, RPJMD Provinsi, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Pelaksanaan pemilihan kepala Daerah serentak Tahun 2024 telah berakhir dengan penetapan dan pelantikan kepala daerah. Pada tanggal 20 Februari 2025 telah dilantik H. Bahrul Ilmi sebagai Bupati dan Herman Susilo sebagai Wakil Bupati Barito Kuala masa jabatan tahun 2025-2030. Pelantikan telah menandai dimulainya masa pemerintahan daerah yang baru selama 5 (lima) tahun kedepan, dengan visi "Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas".

RPJMD sebagai penjabaran visi, misi Bupati dan Wakil Bupati, merupakan komitmen kinerja (*performance agreement*) Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun.

Tujuan, sasaran, dan program pembangunan yang ditetapkan dalam RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Penetapan sasaran dan program-program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD disesuaikan dengan prediksi kemampuan sumber daya dan dana serta hasil-hasil (keluaran dan dampak) yang ingin dicapai dari pelaksanaan program tersebut yang ditetapkan secara indikatif. Keluaran dan dampak yang tercantum dalam dokumen rencana ini merupakan indikasi yang hendak dicapai dan bersifat tidak kaku, dapat disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan dimuat dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD).

Ruang lingkup yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah meliputi kedudukan RPJMD, sistematika, visi misi, pengendalian dan evaluasi RPJMD.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 9

Kata Pengantar

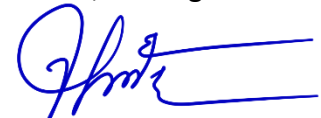
Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, dengan mengacu pada visi, misi, dan program kepala daerah terpilih serta berlandaskan pada berbagai kebijakan nasional dan daerah yang relevan.

RPJMD ini dirancang dengan mengacu pada berbagai regulasi dan kebijakan, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah serta instruksi menteri dalam negeri nomor 2 tahun 2025. Selain itu, berbagai masukan dari pemangku kepentingan, baik dari sektor pemerintah, dunia usaha, akademisi, maupun masyarakat luas, telah menjadi bahan pertimbangan utama dalam penyusunan dokumen ini.

Dalam penyusunan RPJMD ini, dilakukan identifikasi terhadap berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi Kabupaten Barito Kuala, serta merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Beberapa aspek utama yang menjadi perhatian dalam RPJMD ini antara lain peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan daya saing daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta keberlanjutan lingkungan hidup. Kami menyadari bahwa penyusunan dokumen ini masih memiliki berbagai keterbatasan dan tantangan. Oleh karena itu, masukan dan kritik konstruktif dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi penyempurnaan dokumen ini, sehingga dapat menjadi landasan yang lebih kokoh bagi pembangunan Kabupaten Barito Kuala ke depan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029. Semoga dokumen ini dapat menjadi pedoman yang efektif dalam mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang Sejahtera, Agamis, Terpadu dan Unggul.

Marabahan, 20 Agustus 2025



Dr. H. Bahrul Ilmi, S.H., M.H
Bupati Barito Kuala

Daftar Isi

Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	vi
Data Gambar	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	7
1.3. Hubungan Antara Dokumen Rpjmd Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya.....	11
1.4. Maksud dan Tujuan.....	13
1.5. Sistematika Penulisan	15
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH	18
2.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	18
2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah	18
2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam.....	32
2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	34
2.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan	39
2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas.....	47
2.1.6 Resilensi Bencana dan Perubahan Iklim	53
2.1.7 Demografi.....	56
2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	58
2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi	58
2.2.2 Kesehatan Untuk Semua	69
2.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata	75
2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif.....	81
2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju.....	84
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif.....	86
2.3 Aspek Daya Saing Daerah.....	89
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia.....	89
2.3.2 Iptek dan Inovasi Dalam Produktivitas Ekonomi	92
	iii

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru	93
2.3.4 Transformasi Digital	98
2.3.5 Pembangunan Ekonomi Daerah	100
2.4 Aspek Pelayanan Umum	106
2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	106
2.4.2 Standar Pelayanan Minimal	111
2.4.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar	121
2.4.4 Urusan Wajin Non Pelayanan Dasar	149
2.4.5 Urusan Pilihan	191
2.5 Gambaran Keuangan Daerah	213
2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024	213
2.5.2 Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030.	232
2.6 Permasalahan dan Isu Strategis	249
2.6.1 Permasalahan pembangunan daerah	249
2.6.2 Isu Global.....	352
2.6.3 Isu Nasional dalam pembangunan Kab. Barito Kuala	361
2.6.4 Isu Regional (Prov. Kalimantan Selatan)	380
2.6.5 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis	389
2.6.6 Isu Strategis Daerah.	391
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	399
3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.....	399
3.1.1 Visi	400
3.1.2 Misi.....	406
3.1.3 Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.....	420
3.2 Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	434
3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi daerah	434
3.2.2 Program prioritas daerah.....	447
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	474

4.1. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.	474
4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	522
4.2.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)	522
4.2.2 Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)	525
BAB V PENUTUP	548
Daftar Pustaka	551
Lampiran	554

Daftar Tabel

Tabel I-1 Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029	16
Tabel II-1 Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan	24
Tabel II-2 Kontribusi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024	26
Tabel II-3 Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Barito Kuala dibanding Provinsi Kalimantan Selatan (2020-2024).....	29
Tabel II-4 Pertumbuhan Sub-Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Barito Kuala (2020-2024).....	30
Tabel II-5 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan	30
Tabel II-6 Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Barito Kuala	33
Tabel II-7 Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Kuala	35
Tabel II-8 Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup	37
Tabel II-9 Indikator Ketahanan Energi (2020-2024) dan Perkiraan Tahun 2025 Kabupaten Barito Kuala berdasarkan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2020-2024	40
Tabel II-10 Proyeksi Kebutuhan Air Minum terhadap Tren Jumlah Penduduk.....	43
Tabel II-11 Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Barito Kuala 2020-2024.....	44
Tabel II-12 Risiko Bencana Sesuai Kerawanan Sosial Kabupaten Barito Kuala	53
Tabel II-13 Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024	56
Tabel II-14 Data Ekonomi Regional Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2024	61
Tabel II-15 Tingkat kemiskinan Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	64
Tabel II-16 Data Dinamika Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala Tahun 2024	91
Tabel II-17 Ratio Kontribusi Lapangan Usaha berbasis Iptek dan Inovasi di Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2023	92
Tabel II-18 Jumlah, Kondisi dan Jenis Dermaga per Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala	96
Tabel II-19 Penetrasi Internet di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	98
Tabel II-20 Indikator Utama Integrasi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2023 ...	101
Tabel II-21 Perkembangan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala (2020-2024).....	104
Tabel II-22 Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024	107
Tabel II-23 Capaian SPM Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan.....	112
Tabel II-24 Capaian Penerapan SPM per Urusan Kab. Barito Kuala Tahun 2024	113

Tabel II-25 Capaian Penerapan SPM bidang Pendidikan Kab. Barito Kuala	115
Tabel II-26 Capaian Penerapan SPM bidang Kesehatan Kab. Barito Kuala Tahun 2024	116
Tabel II-27 Capaian Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024	117
Tabel II-28 Capaian Penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024	118
Tabel II-29 Capaian Penerapan SPM bidang Trantibum Linmas Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024	119
Tabel II-30 Capaian Penerapan SPM bidang Sosial Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024 ...	120
Tabel II-31 Rasio Siswa-Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	121
Tabel II-32 Rasio Siswa-Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	122
Tabel II-33 Rasio Guru-Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan	123
Tabel II-34 Persentase Ketersediaan Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang dan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	124
Tabel II-35 Rasio Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	127
Tabel II-36 Rasio Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	127
Tabel II-37 Persentase Distribusi Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024.....	128
Tabel II-38 Jumlah Tenaga Kesehatan per Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas) menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024	130
Tabel II-39 Panjang Jalan sesuai Jenis Jalan (km) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2024	133
Tabel II-40 Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	134
Tabel II-41 Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024	134
Tabel II-42 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau di Kabupaten Barito Kuala 2020-2024.....	138
Tabel II-43 Persentase Akses Air Minum Layak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	139
Tabel II-44 Persentase Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	141
Tabel II-45 Data Kejahatan dan Penyelesaian Perkara di Kabupaten Barito Kuala 2019-2023.	144
Tabel II-46 Distribusi Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Kabupaten Barito Kuala	147
Tabel II-47 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2023	150
Tabel II-48 Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024	152

Tabel II-49 Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barito Kuala 2019-2023	154
Tabel II-50 Perbandingan Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Komponennya di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023	156
Tabel II-51 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala 2020-2024.....	163
Tabel II-52 Data Kepemilikan/NOPOL Kendaraan Kabupaten Barito Kuala	170
Tabel II-53 Data Koperasi Kabupaten Barito Kuala.....	175
Tabel II-54 Nilai Produksi Kolam, Tambak dan Jaring Apung per Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala	191
Tabel II-55 Data Perikanan Tangkap Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2023	193
Tabel II-56 Indikator capaian urusan Pariwisata Kabupaten Barito Buala Tahun 2019-2023 ...	196
Tabel II-57 Data Lahan Baku, Lahan Holtikultura, Rencana Lahan Pertanian, Rencana Lahan Cadangan Pertanian dan Rencana Kawasan Pertanian per Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023	201
Tabel II-58 Data Realisasi Padi, Jagung dan Kacang Tanah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2023	202
Tabel II-59 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	215
Tabel II-60 Komposisi Pendapatan Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	217
Tabel II-61 Realisasi Belanja Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024	219
Tabel II-62 Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024	224
Tabel II-63 Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	230
Tabel II-64 Proyeksi Pendapatan Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030.....	233
Tabel II-65 Proyeksi Belanja Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030	236
Tabel II-66 Proyeksi Pembiayaan Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030	240
Tabel II-67 Proyeksi Neraca Keuangan Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2030	243
Tabel II-68 Penilaian Risiko Pendapatan Kabupaten Barito Kuala 2026-2030	246
Tabel II-69 Penilaian Risiko Belanja Kabupaten Barito Kuala 2026-2030	247
Tabel II-70 Penilaian Risiko Pembiayaan Kabupaten Barito Kuala 2026-2030.....	247
Tabel II-71 Matriks Risiko-Dampak dan Prioritas Mitigasi	248
Tabel II-72 Permasalahan pada posisi dan peran strategis Kab. Barito Kuala	251
Tabel II-73 Permasalahan Sumber Data Alam Kab. Barito Kuala	253
Tabel II-74 Permasalahan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala	256
Tabel II-75 Permasalahan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Kab. Barito Kuala.	258
Tabel II-76 Permasalahan Lingkungan Hidup Berkualitas Kab. Barito Kuala.....	260
Tabel II-77 Permasalahan Resilensi Bencana dan Perubahan Iklim Kab. Barito Kuala.....	262

Tabel II-78 Permasalahan Demografi Kab. Barito Kuala	264
Tabel II-79 Permasalahan pada capaian IPM Kab. Barito Kuala	266
Tabel II-80 Permasalahan Kondisi Ekonomi Regional	268
Tabel II-81 Permasalahan Pengangguran dan Ketimpangan Ekonomi Kab. Barito Kuala	271
Tabel II-82 Permasalahan Angka Harapan Hidup Kab. Barito Kuala	272
Tabel II-83 Permasalahan Prevalensi Stunting	274
Tabel II-84 Permasalahan pada Rata-rata Lama Sekolah Kab. Barito Kuala	277
Tabel II-85 Permasalahan pada Harapan Lama Sekolah Kab. Barito Kuala	279
Tabel II-86 Permasalahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kab. Barito Kuala	281
Tabel II-87 Permasalahan Bantuan Sosial Pangan Kab. Barito Kuala	284
Tabel II-88 Permasalahan Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju Kab. Barito Kuala ..	286
Tabel II-89 Permasalahan Kesenjangan Gender Kab. Barito Kuala	288
Tabel II-90 Permasalahan Perlindungan Anak Kab. Barito Kuala	290
Tabel II-91 Permasalahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala	292
Tabel II-92 Permasalahan Dinamika Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala	293
Tabel II-93 Permasalahan Iptek dan Inovasi dalam Produktivitas Ekonomi Kab. Barito Kuala ..	296
Tabel II-94 Permasalahan Ekonomi Hijau Kab. Barito Kuala	299
Tabel II-95 Permasalahan Ekonomi Biru Kab. Barito Kuala	301
Tabel II-96 Permasalahan Transformasi Digital Kab. Barito Kuala	303
Tabel II-97 Permasalahan Integrasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah Kab. Barito Kuala	306
Tabel II-98 Permasalahan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kab. Barito Kuala	308
Tabel II-99 Permasalahan Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab. Barito Kuala	312
Tabel II-100 Permasalahan Reformasi Birokrasi Kab. Barito Kuala	314
Tabel II-101 Permasalahan Urusan Pendidikan Kab. Barito Kuala	316
Tabel II-102 Permasalahan Urusan Kesehatan Kab. Barito Kuala	319
Tabel II-103 Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum Kab. Barito Kuala	322
Tabel II-104 Permasalahan Hunian Layak dan Terjangkau Kab. Barito Kuala	324
Tabel II-105 Permasalahan Sumber Air Minum Layak Kab. Barito Kuala	326
Tabel II-106 Permasalahan Sanitasi Layak Kab. Barito Kuala	328
Tabel II-107 Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakatn Kab. Barito Kuala	330
Tabel II-108 Permasalahan Urusan Sosial Kab. Barito Kuala	333
Tabel II-109 Permasalahan Tenaga Kerja Kab. Barito Kuala	336
Tabel II-110 Permasalahan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	339
Tabel II-111 Permasalahan Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kab. Barito Kuala	341

Tabel II-112 Permasalahan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kab. Barito Kuala.....	343
Tabel II-113 Permasalahan Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala	345
Tabel II-114 Permasalahan Perhubungan Kab. Barito Kuala	348
Tabel II-115 Permasalahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Kuala	350
Tabel II-116 <i>Highlight</i> Indikasi Intervensi Nasional dalam RPJMN (2025-2029) Terhadap Pembangunan Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2029	362
Tabel II-117 Arah Rencana Pola Ruang Terkait Kabupaten Barito Kuala	381
Tabel II-118 Klasifikasi variabel penentuan Isu Strategis Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030.....	393
Tabel III-1 Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2025-2030	429
Tabel III-2 Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2029.....	435
Tabel III-3 Tema dan Penahapan Pembangunan RPJMD Barito Kuala Tahun 2026-2030.....	443
Tabel III-4 Program Priotas pada Penjabaran Misi Pertama.....	448
Tabel III-5 Program Priotas pada Penjabaran Misi Kedua	453
Tabel III-6 Program Priotas pada Penjabaran Misi Ketiga	457
Tabel III-7 Program Priotas pada Penjabaran Misi Keempat	461
Tabel III-8 Program Priotas pada Penjabaran Misi Kelima.....	465
Tabel IV-1 Target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 berdasarkan urusan pemerintahan	477
Tabel IV-2 Indikator Kinerja Utama	523
Tabel IV-3 Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2030.....	526

Data Gambar

Gambar I.1 Hubungan antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya.....	11
Gambar II.1 Peta Kabupaten Barito Kuala.....	21
Gambar II.2 Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024	48
Gambar II.3 Grafik Indeks Kualitas Udara Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024	50
Gambar II.4 Grafik Indeks Kualitas Air Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2025.....	52
Gambar II.5 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024.....	59
Gambar II.6 Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024	66
Gambar II.7 Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024	70
Gambar II.8 Grafik Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024	72
Gambar II.9 Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2023	76
Gambar II.10 Grafik Harapan Lama Sekolah	79
Gambar II.11 Grafik Jamsostek Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2022	82
Gambar II.12 Grafik Rencana dan Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2023	84
Gambar II.13 Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama Kab. Barito Kuala Tahun 2021-2023.....	85
Gambar II.14 Grafik Indeks Kesenjangan Gender Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2023.....	87
Gambar II.15 Grafik Indeks Perlindungan Anak Kab. Barito Kuala	88
Gambar II.16 Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2023....	90
Gambar II.17 Grafik perkembangan perikanan tangkap di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2023 (dalam Ton)	97
Gambar II.18 Grafik Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2023 ..	110
Gambar II.19 Tingkat Partisipasi Pendidikan Tahun 2024	126
Gambar II.20 Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2024	131
Gambar II.21 Indikator Kinerja Pekerjaan Umum pada Tahun 2024.....	136
Gambar II.22 Indikator Kinerja Perumahan Rakyat Tahun 2024	142
Gambar II.23 Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024	145
Gambar II.24 Indikator Kinerja Sosial Tahun 2024	148
Gambar II.25 Indikator Kinerja Tenaga Kerja Tahun 2024.....	151

Gambar II.26 Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024	159
Gambar II.27 Indikator Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2024	160
Gambar II.28 Indikator Kinerja Pertanahan Tahun 2024.....	162
Gambar II.29 Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2024.....	165
Gambar II.30 Indikator Kinerja Administrasi Kependudukan Tahun 2024	167
Gambar II.31 Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024	168
Gambar II.32 Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024	169
Gambar II.33 Indikator Kinerja Perhubungan Tahun 2024.....	173
Gambar II.34 Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2024	174
Gambar II.35 Indikator Kinerja Koperasi dan UMKM Tahun 2024	178
Gambar II.36 Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2024	180
Gambar II.37 Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024.....	181
Gambar II.38 Indikator Kinerja Statistik Tahun 2024	183
Gambar II.39 Indikator Kinerja Keamanan Informasi Tahun 2024	185
Gambar II.40 Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2024	186
Gambar II.41 Indikator Kinerja Perpustakaan dan Literasi Tahun 2024	188
Gambar II.42 Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2024	190
Gambar II.43 Indikator Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2024	194
Gambar II.44 Indikator Kinerja Pariwisata Tahun 2024.....	199
Gambar II.45 Indikator Kinerja Pertanian Tahun 2024.....	205
Gambar II.46 Indikator Kinerja Perdagangan Tahun 2024	210
Gambar II.47 Indikator Kinerja Perindustrian Tahun 2024.....	212
Gambar II.48 Megatren Dunia 2045	353
Gambar II.49 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI	361
Gambar III.1 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan Asta Cita.....	407
Gambar III.2 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan RPJPD Kab. Barito Kuala 2025-2045	410
Gambar III.3 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan	412
Gambar III.4 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.....	415
Gambar III.5 Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala terhadap Pelaksanaan SPM di Barito Kuala	419

Gambar III.6 Penyelarasan Tema Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala.....	442
Gambar III.7 Dukungan Program prioritas daerah Kab. Barito Kuala terhadap program prioritas nasional.....	469

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada alinea keempat, yang merupakan kesepakatan para pendiri bangsa, negara hendak mewujudkan tujuan bernegara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan didalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Tanggung jawab tersebut dalam rangka mewujudkan terwujudnya tujuan bernegara. Disisi yang lain, sebagaimana Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945, negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas provinsi, dan provinsi dibagi atas kabupaten/kota, menurut keotonomian, dimana provinsi maupun kabupaten/kota mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan keotonomian dan asas desentralisasi. Otonomi menjadi upaya untuk mempercepat terwujudnya tujuan bernegara serta mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan bernegara tersebut, dilaksanakanlah pembangunan. Pembangunan secara umum dapat diartikan sebagai usaha untuk mewujudkan kemajuan hidup berbangsa. Apabila dikaitkan dengan konsepsi bernegara dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan akhir pembangunan Indonesia adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, pembangunan nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mewujudkan tujuan bernegara. Pembangunan nasional diwujudkan dalam suatu Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat

dan Daerah. Tujuan sistem perencanaan pembangunan nasional adalah untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah, Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, mengoptimalkan partisipasi masyarakat, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan. Sedangkan pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Sesuai Pasal 258 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, daerah melaksanakan pembangunan tujuannya untuk peningkatan dan pemerataan terhadap pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses dan kualitas pelayanan publik, serta daya saing daerah.

Selain melaksanakan urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan, daerah juga diharuskan untuk berkontribusi pada pencapaian target pembangunan nasional, hal ini dikarenakan pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Target pembangunan nasional bukan hanya kerja dari pemerintah pusat, akan tetapi butuh kontribusi dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Untuk mewujudkan target pembangunan nasional, maka dilaksanakanlah sinkronisasi dan harmonisasi melalui forum koordinasi teknis, maupun forum perencanaan lainnya.

Proses pemilu serentak di Indonesia yang dilaksanakan pada tahun 2024, telah menjadi momen penting dalam demokrasi yang menentukan arah dan kebijakan pembangunan daerah. Melalui proses pemilihan kepala daerah yang demokratis dan partisipatif, masyarakat memberikan mandat kepada pemimpin terpilih untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang telah mempercayakan suaranya. Pemilu serentak ini tidak hanya menentukan kepemimpinan, tetapi juga menjadi dasar bagi perencanaan dan implementasi pembangunan daerah dalam jangka menengah dan panjang. Proses ini melibatkan jutaan pemilih di seluruh Indonesia, yang dengan suara mereka menentukan masa depan pemerintahan daerah dan nasional. Pemilu serentak tahun 2024 telah

menunjukkan tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi, yang mencerminkan keinginan masyarakat untuk memiliki sumbangsih dalam pembangunan daerah dan nasional.

Masyarakat Kabupaten Barito Kuala, pada pemilu serentak tahun 2024 telah memberikan mandat kepada kepala daerah terpilih untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Bupati Barito Kuala terpilih memiliki tanggung jawab untuk menerjemahkan visi dan misi yang dipercayakan masyarakat ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang konkret. Oleh karena itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi dokumen penting menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang konkret. RPJMD berfungsi sebagai panduan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola sumber daya serta kegiatan pembangunan selama periode lima tahun. Dokumen ini berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM Nasional), dimana tentunya merupakan bagian pelaksanaan tahap pertama dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045

Mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004, penyusunan RPJMD perlu memenuhi beberapa prinsip penting, antara lain:

1) Strategis

RPJMD harus erat kaitannya dengan proses penetapan arah pengembangan daerah dan tujuan yang hendak dicapai dalam lima tahun mendatang. Dokumen ini harus menjelaskan bagaimana mencapai tujuan tersebut dan langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan.

2) Demokratis dan Partisipatif

Penyusunan RPJMD perlu dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan melibatkan masyarakat serta seluruh stakeholder dalam pengambilan keputusan perencanaan di semua tahapan perencanaan.

3) Politis

Penyusunan RPJMD perlu melibatkan proses konsultasi dengan kekuatan politik, terutama kepala daerah terpilih dengan DPRD.

4) Perencanaan Bottom-up

Aspirasi dan kebutuhan masyarakat perlu diperhatikan dalam penyusunan RPJMD.

5) Perencanaan Top-down

Proses penyusunan RPJMD perlu ada sinergi dengan rencana strategis di atasnya, yaitu RPJPD dan RPJM Nasional. Untuk memperoleh konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan jangka menengah, perencanaan dan penganggaran tahunan, RPJMD perlu menggunakan kerangka analisis dan program yang serupa dengan kerangka program RKPD, Renja SKPD, Kebijakan Umum Anggaran, dan APBD.

Kerangka analisis yang dimasukan dalam RPJMD adalah menggunakan pembagian fungsi, urusan wajib, dan urusan pilihan pemerintah daerah. Fungsi pemerintah daerah meliputi pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pendidikan, pariwisata dan budaya serta perlindungan sosial.

Fungsi-fungsi yang harus termuat dalam RPJMD antara lain, **pelayanan umum** yang merupakan salah satu fungsi penting Pemerintah daerah yang mencakup penyediaan infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan fasilitas publik lainnya. Selain pelayanan umum, terdapat **ketertiban dan keamanan** yang juga merupakan fungsi yang menjamin stabilitas dan keamanan masyarakat, yang penting untuk menciptakan **lingkungan** yang kondusif bagi pembangunan. Ekonomi merupakan salah satu fungsi yang fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Lingkungan hidup adalah fungsi yang bertujuan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam, yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Sementara itu fungsi **perumahan dan fasilitas umum** mencakup penyediaan perumahan yang layak dan fasilitas umum seperti air bersih, sanitasi, dan transportasi. **Kesehatan** berfungsi sebagai daya ungkit peningkatan kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan dan program kesehatan masyarakat. **Pendidikan** berfungsi mencakup penyediaan layanan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan yang penting untuk

menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. **Pariwisata dan budaya** bertujuan untuk mengembangkan sektor pariwisata dan melestarikan budaya lokal, yang penting untuk meningkatkan pendapatan daerah dan mempromosikan identitas daerah. Sedangkan **perlindungan sosial** bertujuan untuk melindungi masyarakat yang rentan dan memastikan bahwa pembangunan daerah harus berkeadilan sosial. Setiap fungsi ini memiliki peran penting dalam pembangunan daerah dan perlu dimuat dalam dokumen RPJMD untuk memastikan bahwa pembangunan daerah berjalan secara terpadu dan efektif.

Penyusunan RPJMD melibatkan tiga alur spesifik, yaitu alur proses teknokratis strategis, alur partisipatif, dan alur proses legislasi dan politik. Ketiga alur proses ini menghendaki pendekatan yang berbeda, namun saling berinteraksi satu sama lain untuk menghasilkan RPJMD yang terpadu. Alur proses strategis merupakan alur dominasi para perencana daerah dan pakar perencanaan daerah, yang bertujuan untuk menghasilkan informasi, analisis, proyeksi, alternatif-alternatif tujuan, strategi, kebijakan, dan program sesuai kaidah teknis perencanaan yang diharapkan dapat memberikan masukan bagi alur proses partisipatif. Alur proses partisipatif merupakan alur bagi keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan daerah, yang merupakan serangkaian *public participatory* atau *participatory planning event* untuk menghasilkan konsensus dan kesepakatan atas tahap-tahap penting dalam pengambilan keputusan perencanaan. Alur ini merupakan wahana bagi stakeholder Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk memberikan kontribusi yang efektif pada setiap kesempatan kegiatan perencanaan partisipatif, yang kemudian mengkaji ulang dan mengevaluasi hasil-hasil proses alur strategis. Alur legislasi dan politis merupakan alur proses konsultasi dengan DPRD untuk menghasilkan Peraturan Daerah RPJMD, di mana DPRD diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikirannya, *review* dan evaluasi atas hasil-hasil dari proses alur strategis maupun proses alur partisipatif.

Menerapkan prinsip-prinsip dan kerangka analisis yang telah diuraikan, serta memperhatikan berbagai fungsi Pemerintah Daerah yang penting, RPJMD Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan yang efektif. RPJMD ini menjadi dasar perencanaan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, yang

bertujuan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan dan inklusif. Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025–2029 memiliki nilai strategis, antara lain:

- a. Media untuk mengimplementasikan janji Bupati/Wakil Bupati yang telah disampaikan pada saat kampanye kepada seluruh masyarakat.
- b. Pedoman pembangunan selama 5 (lima) tahun dan rencana tahunan (RKPD).
- c. Merupakan ruang politis bagi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD, yang akan berdampak tidak baik apabila tidak dapat tercapai.
- d. Alat atau instrumen pengendalian bagi satuan pengawas internal (SPI) dan Bappeda.
- e. Pedoman penilaian keberhasilan Pemerintahan daerah sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- f. Instrumen mengukur tingkat pencapaian kinerja kepala Perangkat Daerah (PD) selama 5 (lima) tahun.

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 mengamanatkan dalam Pasal 10 ayat (2), bahwa periode RPJM Daerah mengikuti periode RPJM Nasional, dimana periode RPJMN adalah 2025-2029. Oleh karena itu, periode RPJMD adalah tahun 2025-2029. Pelantikan kepala daerah hasil Pilkada serentak dan Dismissal tanggal 20 Februari 2025, masa jabatannya adalah tahun 2025-2030, atau 5 (lima) tahun. Sehingga dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045, periode RPJMD adalah Tahun 2025-2029, akan tetapi isi dalam dokumen RPJMD tersebut, target kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2030. Hal ini juga diamanatkan didalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RPJMD Tahun 2025-2029, dan pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun Renstra Tahun 2025-2029. Disamping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/640/SJ tanggal 11 Februari 2025 tentang Penyesuaian Arah Kebijakan

Pembangunan Daerah Melalui Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang menyampaikan pada Pemerintah Daerah segera menyesuaikan arah kebijakan pembangunan daerah dengan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, serta program Asta Cita ke dalam perubahan RKPD Tahun 2025 dan perubahan APBD TA 2025. Hal ini berarti bahwa kinerja kepala daerah dimulai tahun 2025. Untuk itu dalam proses penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029, telah memperhatikan berbagai peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, serta menjabarkan visi, misi, tujuan dan sasaran.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan peraturan dan perundang-undangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

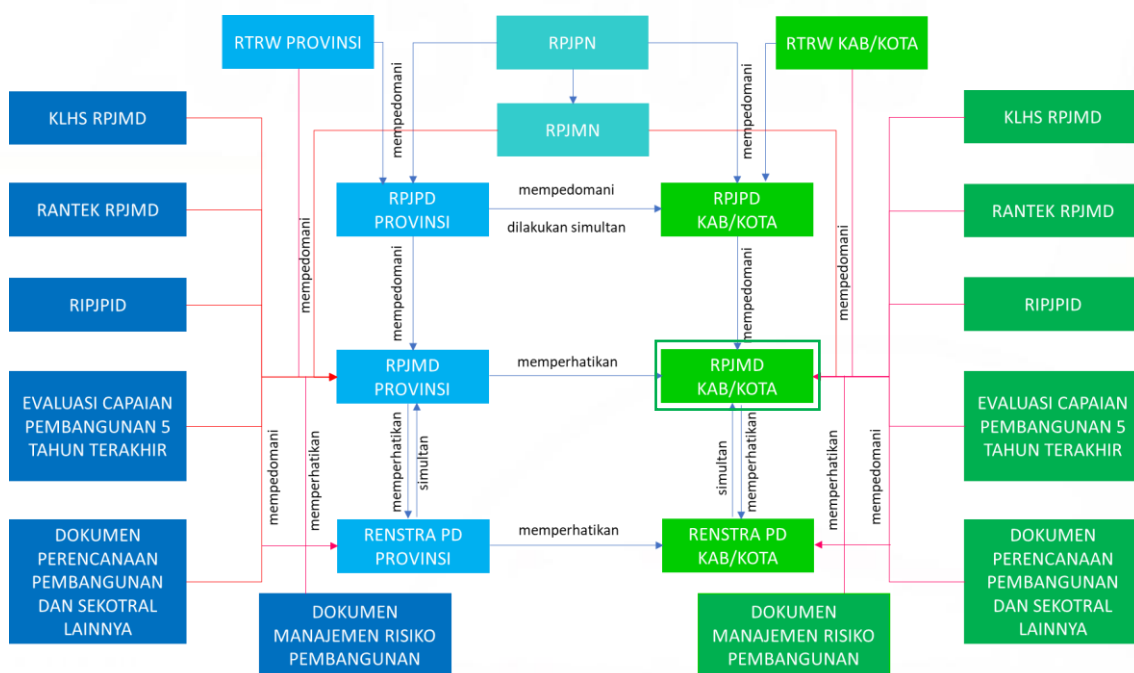
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
19. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut;
20. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045;
28. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6); dan
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 8 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 13).

1.3. Hubungan Antara Dokumen Rpjmd Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan yang kompleks dan terintegrasi dengan berbagai dokumen perencanaan pembangunan lainnya dalam sistem perencanaan daerah. Dalam pelaksanaannya, RTRW baik tingkat provinsi maupun kota memberikan arahan penataan ruang yang menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan RPJMD, dimana RTRW menyediakan kerangka spasial untuk memastikan program-program dalam RPJMD selaras dengan rencana pemanfaatan ruang wilayah yang telah ditetapkan.

Gambar I.1
Hubungan antara dokumen RPJMD
dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya



Sumber: Bappeda Kabupaten Barito Kuala, 2025 (data olahan)

Perlu diperhatikan bahwa Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian integral dari Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula (Banjarmasin, Banjarbaru, Banjar, Barito Kuala, dan Tanah Laut) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2024. RTR Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula berfungsi sebagai pedoman untuk penyusunan rencana pembangunan di kawasan tersebut, termasuk RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029. Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula bertujuan untuk mewujudkan kawasan perkotaan sebagai

pusat kegiatan ekonomi berskala internasional melalui perdagangan dan jasa, pariwisata, industri, industri kelautan, pertanian, dan pengembangan pusat pelayanan yang terkoneksi antarkawasan berbasiskan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 harus menyelaraskan program-program pembangunannya dengan kebijakan penataan ruang Banjarbakula, terutama terkait pengembangan dan pemantapan fungsi Kawasan Perkotaan di Sekitarnya sebagai kawasan pendukung perkotaan inti melalui kegiatan industri, pengolahan hasil pertanian, dan pengembangan permukiman perkotaan. RPJMD juga harus mengakomodasi aspek peningkatan konektivitas antar Kawasan Perkotaan Inti (Banjarmasin) dan Kawasan Perkotaan di Sekitarnya (termasuk Barito Kuala), serta pengembangan sistem jaringan prasarana untuk meningkatkan keterkaitan dan fungsi antarkawasan dalam Banjarbakula.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) memberikan pertimbangan aspek lingkungan hidup yang harus diperhatikan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029. Dokumen ini berperan penting dalam memastikan program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan. Aspek ini sejalan dengan kebijakan Banjarbakula terkait penetapan dan pemantapan fungsi lindung baik di darat maupun Perairan Pesisir dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan, serta pengembangan, pemantapan, dan pengendalian fungsi budi daya dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Sementara itu, RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 menjadi acuan utama dalam penyusunan RPJMD, dimana visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD harus dijabarkan ke dalam target lima tahunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala untuk memastikan kesinambungan pembangunan jangka panjang. RPJPD Tahun 2025-2045 menjadi pedoman tidak langsung bagi RPJMD Tahun 2025-2029 melalui RPJPD Tahun 2025-2045, hal ini memastikan adanya keselarasan antara perencanaan pembangunan nasional dengan daerah.

Dalam prosesnya, visi-misi calon kepala daerah yang terpilih harus diakomodasi dalam RPJMD melalui proses teknokratik (Rantek RPJMD Tahun 2025-2029), sehingga program-program yang dijanjikan dalam kampanye dapat diimplementasikan secara

sistematis dan terukur, sekaligus mempertimbangkan peran strategis Kabupaten Barito Kuala dalam pengembangan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. RPJMD harus memuat strategi untuk meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, dan keterpaduan perencanaan dan pembangunan antar sektor, antarkawasan, dan penguatan peran masyarakat sebagaimana ditekankan dalam kebijakan Banjarbakula.

Hasil evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2026 memberikan umpan balik yang berharga terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi program-program yang perlu diperkuat atau dimodifikasi dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029. Selain itu, berbagai dokumen perencanaan sektoral dan pendukung lainnya juga menjadi pertimbangan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 untuk memastikan komprehensivitas dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah.

Keseluruhan hubungan dokumen-dokumen tersebut terhadap RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 membentuk suatu sistem perencanaan yang terintegrasi. Hal ini memastikan bahwa RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 yang disusun selaras dengan perencanaan tata ruang, memperhatikan aspek lingkungan hidup, konsisten dengan tujuan pembangunan jangka panjang, mengakomodasi visi-misi kepala daerah, mempertimbangkan hasil evaluasi sebelumnya, dan sinkron dengan berbagai dokumen perencanaan lainnya, termasuk RTR Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 menjadi dokumen perencanaan yang komprehensif dan terkoordinasi dalam mengarahkan pembangunan daerah untuk periode lima tahun ke depan, serta berkontribusi dalam mewujudkan Kawasan Perkotaan Metropolitan Banjarbakula sebagai pusat kegiatan ekonomi berskala internasional yang berkelanjutan.

1.4. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai kerangka acuan pembangunan daerah. RPJMD Kabupaten Barito

Kuala Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program prioritas dan arah kebijakan keuangan daerah. Kerangka ini mencakup komponen pembangunan yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha, yang sejalan dengan arah pembangunan dari tingkat nasional, provinsi, hingga kabupaten. Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 meliputi tahapan, tata cara, sistematika, dan substansi, serta sebagai upaya menyelaraskan RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029. Adapun tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 adalah untuk:

1. Menyediakan gambaran komprehensif tentang kondisi daerah sebagai landasan dalam mengidentifikasi masalah dan isu strategis, yang akan menjadi fokus pembangunan daerah dalam lima tahun mendatang;
2. Menciptakan kerangka pengelolaan keuangan dan pendanaan yang terukur untuk memastikan kapasitas fiskal daerah dalam pelaksanaan pembangunan;
3. Memastikan terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan antar wilayah, ruang, waktu, dan fungsi pemerintah daerah melalui koordinasi yang efektif antar pelaku pembangunan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan berkeadilan;
5. Memberikan masukan strategis dalam perumusan visi, misi, dan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh kepala daerah terpilih;
6. Berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah nasional; dan
7. Memberikan ruang optimal bagi pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik, inovasi, dan pengembangan daerah.

Melalui penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 ini, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dapat memastikan bahwa seluruh program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun ke depan telah mempertimbangkan aspek keseimbangan lingkungan, sosial, dan ekonomi untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, pembangunan yang

dilaksanakan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Barito Kuala melalui pendekatan yang terarah, holistik, dan sistematis.

1.5. Sistematika Penulisan

Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 disusun dalam lima bab utama yang saling terintegrasi dan mengalir secara sistematis. Setiap bab memiliki fokus pembahasan yang berbeda namun saling mendukung dalam membentuk kerangka perencanaan pembangunan daerah yang komprehensif.

Bab satu adalah Pendahuluan yang menjadi fondasi dokumen yang memuat lima subbab penting. Dimulai dari latar belakang yang menjelaskan urgensi dan konteks penyusunan RPJMD, dilanjutkan dengan dasar hukum yang menjadi landasan legal penyusunan. Subbab ketiga menguraikan keterkaitan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya untuk memastikan keselarasan pembangunan. Maksud dan tujuan kemudian dijabarkan untuk memberikan arah yang jelas, dan diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai panduan memahami struktur dokumen.

Bab dua menyajikan Gambaran Umum Daerah yang terbagi dalam tiga subbab utama. Subbab pertama menguraikan kondisi daerah secara komprehensif, mencakup aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing, dan pelayanan umum, serta dilengkapi dengan informasi tentang standar pelayanan minimal, kerjasama daerah, rencana pembangunan infrastruktur, dan peran BUMD. Subbab kedua memberikan gambaran keuangan daerah dengan membandingkan realisasi APBD periode 2020-2024 dan proyeksi 2025-2029. Subbab ketiga mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis sebagai dasar perumusan kebijakan.

Pada Bab ketiga mengartikulasikan Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam dua subbab. Subbab pertama memaparkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sebagai arah pembangunan. Subbab kedua menguraikan strategi dan arah kebijakan serta program-program prioritas yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Bab empat memuat Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dibagi dalam dua subbab. Subbab pertama merinci program-program perangkat daerah beserta indikator, target, dan pagu indikatifnya. Subbab

kedua menguraikan target kinerja pemerintah daerah melalui IKU dan IKD sebagai instrumen pengukuran keberhasilan. Sedangkan untuk Bab kelima adalah sebagai Penutup yang mengakhiri dokumen dengan menyajikan kesimpulan substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi sebagai bagian dari upaya memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah.

Sistematika ini dirancang untuk memudahkan pemahaman terhadap rencana pembangunan daerah sekaligus menjadi panduan operasional yang terukur dalam implementasinya. Setiap bab dan subbab disusun secara logis dan saling terkait, memastikan terciptanya dokumen perencanaan yang komprehensif dan aplikatif, yang disajikan secara ringkas pada tabel berikut.

Tabel I-1
Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN		
1.1	Latar Belakang	
1.2	Dasar Hukum Penyusunan	
1.3	Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Lainnya	
1.4	Maksud dan Tujuan	
1.5	Sistematika Penulisan	
BAB II GAMBARAN UMUM DAERAH		
2.1	Gambaran Umum Kondisi Daerah	
	2.1.1	Aspek Geografi dan Demografi
	2.1.2	Aspek Kesejahteraan Masyarakat
	2.1.3	Aspek Daya Saing Daerah
	2.1.4	Aspek Pelayanan Umum
2.2	Gambaran Keuangan Daerah	
	2.2.1	Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024
	2.2.2	Proyeksi Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2025-2029
2.3	Permasalahan dan Isu Strategis	
	2.3.1	Permasalahan Pembangunan Daerah
	2.3.2	Isu Strategis Daerah
BAB III VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH		
3.1	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran	
	3.1.1	Visi dan Misi
	3.1.2	Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
3.2	Strategi, Arah Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah	
	3.2.1	Strategi dan Arah Kebijakan Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

	3.2.2	Program-program Prioritas Daerah dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029
BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH		
4.1	Program Perangkat Daerah	
	4.1.1	Daftar Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dalam Mencapai Kinerja Pembangunan Daerah
	4.1.2	Indikator Program, Target dan Pagu Indikatif Program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029
4.2	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
	4.2.1	Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)
	4.2.2	Target Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD)
BAB V PENUTUP		

Sumber: Inmendagri Penyusunan RPJMD Tahun 2025

BAB II

GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 Aspek Geografis dan Demografi

Perkembangan suatu daerah tidak lepas dari dua aspek fundamental yaitu geografi dan demografi. Aspek geografis meliputi karakteristik fisik wilayah seperti posisi, luas, bentang alam, dan sumber daya, yang secara langsung membentuk potensi dan tantangan dalam pembangunan. Di sisi lain, aspek demografis memberikan pemahaman tentang profil kependudukan baik dari segi kuantitas maupun kualitas sebagai penggerak sekaligus penerima manfaat pembangunan.

Kedua aspek ini memegang peran kunci dalam perumusan kebijakan dan strategi pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Karakteristik geografis mengarahkan pola pemanfaatan ruang dan pengembangan wilayah, sementara kondisi demografis menjadi dasar penentuan prioritas program dan pemerataan pelayanan publik. Interaksi kedua aspek ini pada akhirnya menentukan efektivitas upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembahasan berikut akan menguraikan secara rinci kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala meliputi karakteristik wilayah, batas administratif, posisi dan peran strategis daerah, dan penggunaan lahan juga daya dukung lingkungan yang tentunya berhubungan dengan resiliensi bencana dan perubahan iklim. Selain itu terdapat pembahasan tentang potensi serta aspek demografi yang meliputi jumlah dan persebaran penduduk, komposisi penduduk, serta dinamika kependudukan di Kabupaten Barito Kuala.

2.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Peran strategis Kabupaten Barito Kuala semakin meningkat dengan adanya agenda pembangunan nasional, khususnya pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Pengembangan konektivitas wilayah dan infrastruktur berkelanjutan menjadi kunci dalam mengoptimalkan posisi kabupaten ini sebagai wilayah pendukung IKN. Dengan luas wilayah 2.426,7236 kilometer persegi dan pola pertumbuhan demografis yang terkendali, Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi besar dalam mendukung pengembangan regional melalui sektor pertanian, perikanan, dan

infrastruktur terintegrasinya. Untuk mewujudkan salah satu misi Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah pendukung IKN yang berkelanjutan, diperlukan pemahaman mendalam tentang karakteristik geografis yang akan mempengaruhi pengembangan konektivitas dan infrastruktur.

Dalam konteks regional, posisi Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan Kabupaten Kapuas menjadikannya sebagai wilayah penyangga sekaligus penghubung antara pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Hal ini membuka peluang pengembangan kawasan strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain, kondisi ini juga menuntut pengelolaan lingkungan yang lebih ramah lingkungan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan pembangunan. Pembahasan ini akan mengkaji empat aspek fundamental yang saling terkait dan berperan penting dalam pembangunan sistem konektivitas wilayah.

Pertama, analisis luas dan pembagian wilayah akan memberikan landasan dalam perencanaan jaringan infrastruktur yang menghubungkan berbagai kecamatan dan desa. Pemetaan wilayah administratif yang mencakup 17 kecamatan, 195 desa, dan 6 kelurahan menjadi dasar dalam mengidentifikasi koridor-koridor strategis untuk pengembangan konektivitas. Pada saat ini sedang berproses pemekaran Desa Semangat Dalam menjadi 3 (tiga) desa. Kedua, kajian topografi akan menjelaskan tantangan dan peluang dalam pembangunan infrastruktur berkelanjutan. Pemahaman tentang bentang alam akan membantu dalam merancang sistem transportasi dan infrastruktur yang adaptif terhadap kondisi geografis, sekaligus mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan.

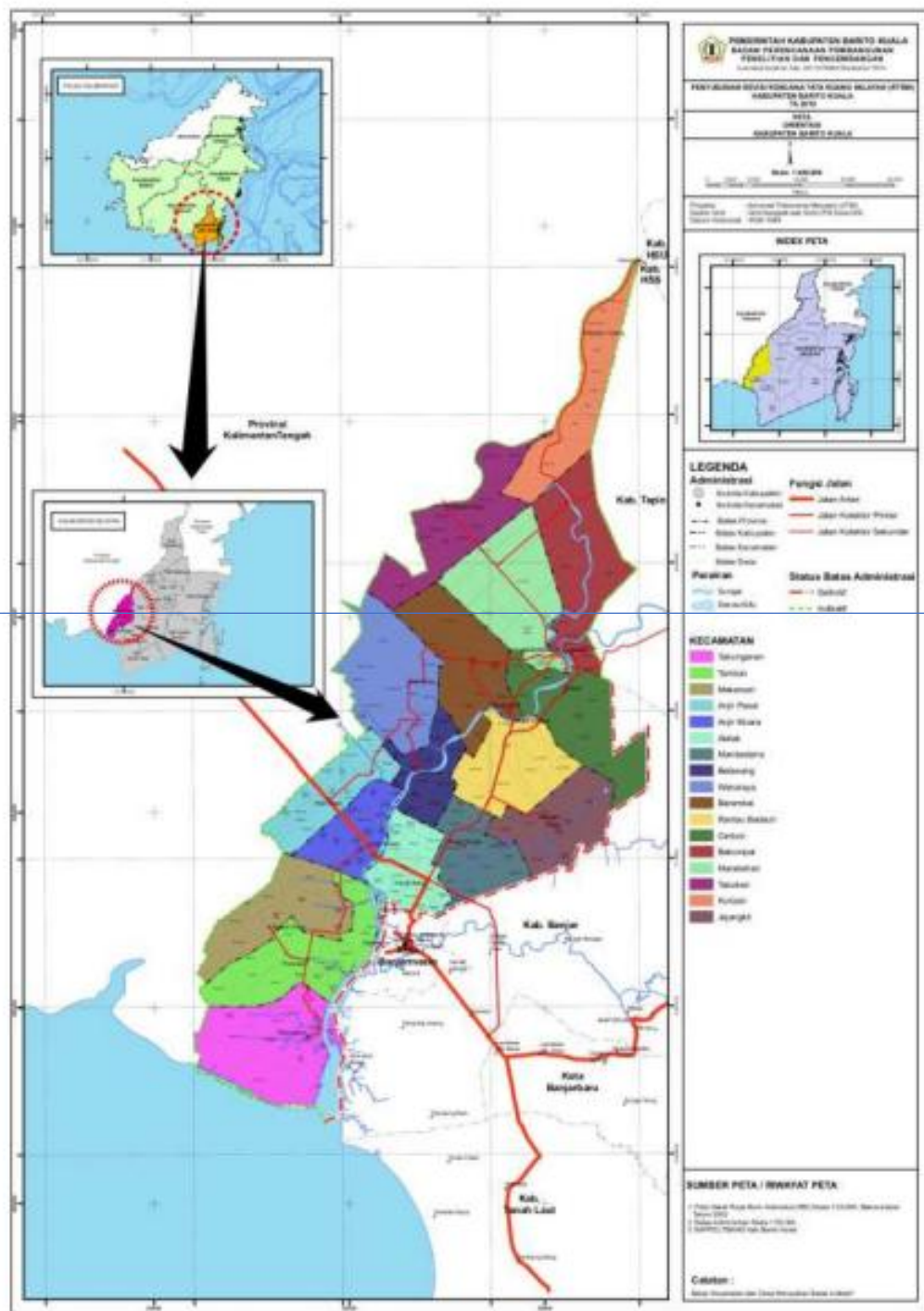
Ketiga, aspek hidrologi menjadi pertimbangan krusial dalam pengembangan infrastruktur, mengingat peran vital sistem perairan bagi aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. Pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur akan mendukung keberlanjutan pembangunan wilayah. Keempat, pemahaman tentang klimatologi akan membantu dalam merancang infrastruktur yang tahan terhadap variasi iklim dan bencana alam. Hal ini khususnya penting untuk kawasan rawan bencana seperti Kuripan, Tabukan, Bakumpai, Alalak, Jejangkit dan Mandastana yang memerlukan pendekatan khusus dalam pengembangan infrastrukturnya.

Keempat aspek ini membentuk fondasi dalam merumuskan strategi pengembangan konektivitas wilayah yang mendukung peran Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah penyanggah IKN. Variasi kondisi geografis antar kecamatan, dari kawasan padat penduduk hingga wilayah yang relatif jarang penduduk, memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengembangan infrastruktur. Dalam pembahasan berikut, setiap aspek akan dianalisis secara sistematis untuk memberikan landasan bagi perencanaan infrastruktur berkelanjutan. Analisis ini akan mempertimbangkan tidak hanya kebutuhan jangka pendek, tetapi juga antisipasi terhadap perkembangan wilayah di masa depan, terutama dalam konteks dukungan terhadap IKN. Dengan demikian, pemahaman komprehensif tentang karakteristik geografis akan mendukung terwujudnya salah satu misi Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah pendukung IKN yang terhubung, tangguh, dan berkelanjutan.

2.1.1.1 Luas dan pembagian wilayah

Secara administratif, Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Selatan dengan Marabahan sebagai pusat pemerintahannya. Wilayah ini mencakup area seluas 2.996,46 km². Terletak di bagian barat Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala berada pada koordinat 2° 29' 50" - 3° 30' 18" Lintang Selatan dan 114° 20' 50" - 114° 50' 18" Bujur Timur. Posisi strategis kabupaten ini ditandai dengan pertemuan tiga sungai besar - Barito, Kapuas, dan Negara - yang mengalir hingga ke Kecamatan Tabunganen dan bermuara di Laut Jawa. Wilayah Kabupaten Barito Kuala berbatasan dengan beberapa daerah tetangga. Di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin, sebelah selatan dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Kabupaten Kuala Kapuas (Kalimantan Tengah), dan sebelah timur dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin.

Gambar II.1
Peta Kabupaten Barito Kuala



Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala, 2025
(data olahan)

Kabupaten Barito Kuala, yang terletak di Provinsi Kalimantan Selatan, terdiri dari 17 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah dengan luas total 2.426,72 km². Setiap kecamatan memiliki karakteristik dan potensi tersendiri yang berkontribusi pada

pembangunan daerah. Berikut deskripsi kecamatan-kecamatan berdasarkan urutan luas wilayah:

1. Kecamatan Kuripan dengan luas 343,5 km² (11,46% dari total luas kabupaten) dihuni oleh 6.129 jiwa. Kawasan terluas di Barito Kuala ini mengandalkan hasil bumi dan perikanan sebagai penggerak ekonomi, ditopang oleh keberadaan industri-industri skala kecil yang mengolah sumber daya lokal.
2. Kecamatan Rantau Badauh yang membentang seluas 261,81 km² (8,74% dari total luas kabupaten) dengan 17.142 penduduk memaksimalkan potensi lahan untuk pertanian dan perikanan. Aktivitas industri skala kecil turut menyumbang pada kesejahteraan masyarakat.
3. Kecamatan Bakumpai, yang memiliki luas wilayah 261 km² (8,71% dari total luas kabupaten) dan jumlah penduduk 11.120 jiwa, memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perikanan. Industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan juga mulai berkembang di sini, memberikan nilai tambah bagi produk lokal. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki beberapa industri kecil yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat.
4. Kecamatan Tabunganen mencakup wilayah 240 km² (8,01% dari total luas kabupaten) dengan populasi 20.987 jiwa. Selain mengandalkan hasil pertanian dan perikanan, kawasan ini juga mengembangkan industri.
5. Kecamatan Marabahan, dengan luas wilayah 221 km² (7,38% dari total luas kabupaten) dan jumlah penduduk 22.832 jiwa, menjadi pusat pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Selain pemerintahan, kecamatan ini juga memiliki potensi besar dalam bidang pertanian dan perdagangan. Pasar tradisional di Marabahan menjadi pusat perdagangan utama, dengan berbagai jenis hasil pertanian dan kerajinan lokal yang dijual di sini.
6. Kecamatan Cerbon membentang seluas 206 km² (6,87% dari total luas kabupaten) dengan jumlah penduduk 10.242 jiwa. Pertanian dan perikanan menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat, didukung oleh berkembangnya berbagai unit usaha kecil yang menyerap tenaga kerja lokal.
7. Di Kecamatan Jejangkit yang mencakup wilayah 203 km² (6,77% dari total luas kabupaten) dengan 6.892 penduduk, sektor pertanian dan perikanan menjadi

andalan. Beragam industri rumahan yang berkembang di wilayah ini memberikan nilai tambah bagi produk-produk lokal.

8. Kecamatan Tabukan dengan area 166 km² (5,54% dari total luas kabupaten) dan 9.529 jiwa penduduk mengoptimalkan sumber daya alam melalui pertanian dan perikanan. Sektor industri rumahan berkembang sebagai penunjang ekonomi masyarakat.
9. Kecamatan Tamban yang memiliki luas 164,3 km² (5,48% dari total luas kabupaten) dengan 32.925 penduduk memanfaatkan potensi agraris dan perikanan. Berbagai unit usaha kecil turut mendukung perekonomian warga.
10. Kecamatan Barambai, dengan luas wilayah 163,5 km² (5,46% dari total luas kabupaten) dan jumlah penduduk 16.405 jiwa, terkenal dengan hasil pertanian dan perikanan yang melimpah. Industri kecil juga mulai berkembang di sini, terutama di bidang pengolahan hasil pertanian. Selain itu, kecamatan ini juga memiliki beberapa tempat wisata alam yang menarik bagi wisatawan lokal dan domestik.
11. Kecamatan Belawang, dengan area 144,06 km² (4,81% dari total luas kabupaten) dan populasi 14.406 jiwa, dikenal akan keunggulan sektor agraris dan perikanan. Daya tarik wisata alamnya menjadi magnet bagi pengunjung dari berbagai daerah. Perkembangan industri skala kecil, khususnya pengolahan hasil tani, turut menggerakkan roda perekonomian kawasan ini.
12. Kecamatan Mekarsari dengan luas 143,5 km² (4,79% dari total luas kabupaten) dan populasi 18.633 jiwa memprioritaskan pengembangan sektor pertanian dan perikanan. Keberadaan industri rumahan memberikan alternatif mata pencaharian bagi masyarakat setempat.
13. Kecamatan Mandastana yang memiliki area 136 km² (4,54% dari total luas kabupaten) dengan populasi 18.172 jiwa mengembangkan potensi agribisnis dan perikanan. Berbagai usaha kecil menengah di wilayah ini berperan dalam meningkatkan nilai tambah produk lokal.
14. Kecamatan Anjir Pasar, dengan luas wilayah 126 km² (4,20% dari total luas kabupaten) dan jumlah penduduk 17.754 jiwa, terkenal dengan pasar tradisionalnya yang menjadi pusat perdagangan utama. Selain perdagangan, kecamatan ini juga memiliki potensi di bidang pertanian dan jasa. Lahan pertanian di sini menghasilkan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, yang kemudian dijual

- di pasar lokal dan di wilayah sekitarnya. Industri jasa, terutama di bidang transportasi dan logistik, juga mendukung pertumbuhan ekonomi di kecamatan ini.
15. Kecamatan Anjir Muara, yang memiliki luas wilayah 116,75 km² (3,90% dari total luas kabupaten) dan jumlah penduduk 23.301 jiwa, menawarkan potensi besar dalam bidang pertanian dan perikanan. Lahan subur di kecamatan ini cocok untuk budidaya padi dan sayuran, sementara perairan sekitarnya kaya dengan hasil perikanan. Selain itu, pariwisata mulai berkembang dengan beberapa tempat wisata alam yang menarik bagi wisatawan lokal dan domestik.
 16. Kecamatan Alalak, dengan luas wilayah 108,8 km² (3,63% dari total luas kabupaten) dan jumlah penduduk 63.000 jiwa, menjadi pusat pertumbuhan ekonomi lokal. Potensi utamanya terletak di bidang pertanian, perikanan, serta industri kerajinan yang telah berkembang pesat. Lahan pertanian di Alalak menghasilkan berbagai jenis sayuran dan buah-buahan, yang kemudian dijual di pasar lokal dan di wilayah sekitarnya. Industri kerajinan juga menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat, dengan produk-produk seperti anyaman purun dan kayu galam yang memiliki permintaan tinggi di pasar lokal dan regional.
 17. Kecamatan Wanaraya dengan luas 37,5 km² (1,25% dari total luas kabupaten) dan populasi 15.033 jiwa mengembangkan sektor pertanian dan perikanan sebagai basis ekonomi. Meskipun memiliki wilayah terkecil, industri rumahan yang berkembang di wilayah ini memberikan nilai tambah bagi produk-produk lokal.

Tabel II-1
Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
1	Kuripan	343.5	11.46
2	Rantau Badauh	261.81	8.74
3	Bakumpai	261	8.71
4	Marabahan	221	7.38
5	Cerbon	206	6.88
6	Jejangkit	203	6.78
7	Tabunganen	240	8.01
8	Barambai	183	6.11
9	Tabukan	166	5.54
10	Tamban	164.3	5.48
11	Mekarsari	143.5	4.79
12	Mandastana	136	4.54
13	Anjir Pasar	126	4.20

No	Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
14	Anjir Muara	116.75	3.90
15	Alalak	106.85	3.57
16	Belawang	80.25	2.68
17	Wanaraya	37.5	1.25
	TOTAL	2,426	100

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Pola distribusi spasial geografi dan demografis ini mencerminkan kompleksitas pembangunan wilayah di Kabupaten Barito Kuala, di mana setiap kecamatan mengembangkan keunggulan komparatif berbasis potensi lokal dalam kerangka pembangunan daerah yang terintegrasi. Secara geografis, variasi luas wilayah dari 343,5 km² (Kuripan) hingga 37,5 km² (Wanaraya) menunjukkan keberagaman bentang alam kabupaten ini. Distribusi spasial kecamatan-kecamatan dengan karakteristik geografisnya yang unik mulai dari wilayah dataran rendah, area pesisir, hingga kawasan rawa memberikan tantangan sekaligus peluang dalam pengembangan wilayah.

Kondisi topografi yang beragam juga memengaruhi pola pemanfaatan lahan dan aktivitas ekonomi masyarakat di setiap kecamatan. Meski terdapat kesenjangan dalam dimensi wilayah, setiap kecamatan telah mampu mengerti karakteristik geografisnya untuk menunjang pembangunan daerah. Pemetaan potensi wilayah berdasarkan kondisi geografis ini menjadi basis penting dalam perencanaan dan pengembangan Kabupaten Barito Kuala secara berkelanjutan.

Tanah di Kabupaten Barito Kuala mayoritas merupakan tanah aluvial dan gambut, yang sangat subur dan cocok untuk pertanian pasang surut. Potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di bidang pertanian dan perikanan, menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu wilayah dengan potensi ekonomi yang besar di Provinsi Kalimantan Selatan. Letak geografis yang strategis dan sumber daya alam yang melimpah ini, menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai pusat logistik dan distribusi penting di wilayah Kalimantan Selatan.

2.1.1.2 Kontribusi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan

Kajian terhadap kontribusi ekonomi Kabupaten Barito Kuala terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan periode 2020-2024 mengungkapkan

beberapa fenomena ekonomi yang signifikan. Berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi Kabupaten Barito Kuala terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang relatif stabil meskipun dengan kecenderungan sedikit menurun. Kontribusi tersebut bergerak dari 4,85% pada tahun 2020 menjadi 4,73% pada tahun 2024. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa secara nominal, PDRB Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Rp 8.604 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 10.050 miliar pada tahun 2024.

Analisis terhadap dinamika pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala selama dan setelah pandemi COVID-19 menunjukkan pola yang sejalan dengan tren provinsi. Pada tahun 2020, perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan mengalami kontraksi sebesar -1,82%, sementara perekonomian Kabupaten Barito Kuala juga mengalami kontraksi sebesar -1,06%. Meskipun sama-sama mengalami kontraksi, Kabupaten Barito Kuala menunjukkan ketahanan yang sedikit lebih baik dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Pada fase pemulihan ekonomi pasca-pandemi (2021-2022), akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala dan Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan pola yang serupa namun dengan intensitas yang berbeda. Pada tahun 2021, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala mencapai 3,17%, sedikit di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 3,48%. Begitu pula pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala sebesar 3,59% berada di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,11%.

Memasuki tahun 2023, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala mulai menunjukkan percepatan, mencapai 4,07%, meskipun masih di bawah pertumbuhan ekonomi provinsi yang sebesar 4,84%. Momentum ini berlanjut hingga tahun 2024, di mana Kabupaten Barito Kuala mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%, hampir sejajar dengan pertumbuhan ekonomi provinsi yang mencapai 5,05%. Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Barito Kuala mulai berhasil mengejar ketertinggalan dan menyelaraskan dinamika ekonominya dengan tren provinsi.

Tabel II-2
Kontribusi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020-2024

<i>Indikator</i>	2020	2021	2022	2023	2024	Tren
<i>Nilai PDRB (Miliar Rupiah)</i>						

Kabupaten Barito Kuala	8.604	8.876	9.195	9.569	10.050	Meningkat
Provinsi Kalimantan Selatan	177.281	183.451	192.827	202.161	212.370	Meningkat
Kontribusi Barito Kuala terhadap Provinsi (%)	4,85%	4,84%	4,77%	4,73%	4,73%	Menurun
Pertumbuhan Ekonomi (%)						
Kabupaten Barito Kuala	-1,06%	3,17%	3,59%	4,07%	5,02%	Meningkat
Provinsi Kalimantan Selatan	-1,82%	3,48%	5,11%	4,84%	5,05%	Fluktuatif
PDRB Per Kapita (Ribu Rupiah)						
Kabupaten Barito Kuala	27.502	28.019	28.635	29.490	30.670	Meningkat
Provinsi Kalimantan Selatan	42.487	43.480	45.187	46.943	48.815	Meningkat
Rasio PDRB Per Kapita Barito Kuala terhadap Provinsi (%)	64,73%	64,44%	63,37%	62,82%	62,83%	Menurun

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Aspek kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi antara Kabupaten Barito Kuala dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan menjadi perhatian penting dalam analisis ini. Indikator PDRB per kapita menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat Kabupaten Barito Kuala secara konsisten berada di bawah rata-rata provinsi. Rasio PDRB per kapita Kabupaten Barito Kuala terhadap PDRB per kapita Provinsi Kalimantan Selatan menunjukkan penurunan moderat dari 64,73% pada tahun 2020 menjadi 62,83% pada tahun 2024.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kesenjangan masih ada, namun tidak terjadi pelebaran kesenjangan yang signifikan dalam periode lima tahun terakhir. Penurunan rasio yang relatif kecil mengindikasikan bahwa pertumbuhan kesejahteraan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala tidak terlalu tertinggal jauh dari rata-rata provinsi. Hal ini merupakan perkembangan yang cukup positif, mengingat tantangan yang dihadapi ekonomi daerah selama masa pandemi dan pasca-pandemi.

Dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi, terlihat bahwa Kabupaten Barito Kuala telah menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang konsisten selama periode pasca-pandemi. Pertumbuhan yang semakin mendekati rata-rata provinsi pada tahun 2024 mengindikasikan adanya momentum positif yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan.

Implikasi dari temuan-temuan tersebut menggarisbawahi pentingnya reformulasi strategi pembangunan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan transformatif untuk meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan memperkuat kontribusinya terhadap perekonomian provinsi. Beberapa langkah strategis yang dapat ditempuh meliputi:

1. Diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap volatilitas
2. Akselerasi investasi pada infrastruktur strategis yang dapat mendorong peningkatan produktivitas dan efisiensi ekonomi
3. Pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi dan daya saing yang kuat
4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui intervensi pendidikan dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan arah transformasi ekonomi daerah
5. Pengembangan program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang inklusif untuk mempercepat peningkatan pendapatan per kapita
6. Mendorong inovasi dan adopsi teknologi untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor ekonomi utama

Gambaran umum untuk kondisi ekonomi dalam 5 tahun terakhir menunjukkan adanya potensi besar untuk meningkatkan peran ekonomi Kabupaten Barito Kuala dalam konteks perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang konsisten dalam beberapa tahun terakhir dan relatif stabilnya rasio PDRB per kapita terhadap rata-rata provinsi merupakan modal penting yang dapat dioptimalkan.

Momentum pertumbuhan yang terlihat pada periode 2022-2024 perlu dipertahankan dan ditingkatkan melalui implementasi kebijakan yang tepat dan berkelanjutan. Dengan arah kebijakan dan langkah strategis yang terkoordinasi dengan baik, Kabupaten Barito Kuala dapat mengembangkan potensinya untuk menjadi salah satu motor pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Provinsi Kalimantan Selatan dalam 5 tahun ke depan. Upaya ini tidak hanya akan meningkatkan kontribusi Kabupaten Barito Kuala terhadap perekonomian provinsi, tetapi juga akan berkontribusi pada penguatan fundamental dan daya saing ekonomi regional secara keseluruhan.

2.1.1.3 Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor basis yang menjadi tulang punggung perekonomian Kabupaten Barito Kuala sekaligus memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan data pertumbuhan selama periode 2020-2024, sektor ini menunjukkan pola pertumbuhan yang identik antara Kabupaten Barito Kuala dengan tingkat provinsi, mengalami kontraksi -0,91% pada tahun 2020 dan secara konsisten meningkat hingga mencapai 4,16% pada tahun 2024. Kesamaan pola pertumbuhan ini mengindikasikan kontribusi terbesar Barito Kuala bagi Provinsi Kalsel dan adanya keterkaitan kuat antara dinamika sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala dengan dinamika pertanian di Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Tabel II-3
Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan di Kabupaten Barito Kuala dibanding Provinsi Kalimantan Selatan (2020-2024)

Tahun	Pertumbuhan di Kabupaten Barito Kuala (%)	Pertumbuhan di Provinsi Kalimantan Selatan (%)	Keterangan
2020	-1,68	-0,91	Identik, terpengaruh pandemi COVID-19
2021	0,97	1,17	Identik, awal pemulihan ekonomi
2022	1,25	1,59	Identik, peningkatan moderat
2023	3,56	3,31	Identik, akselerasi pertumbuhan
2024	4,67	4,16	Identik, penguatan pertumbuhan

BPS Barito Kuala dan BPS Prov. Kalsel (Diolah)

Analisis terhadap sub-sektor pertanian mengungkapkan bahwa sub-sektor tanaman pangan mengalami transformasi pertumbuhan yang paling signifikan, dari kontraksi -1,68% di tahun 2020 menjadi ekspansi 4,67% di tahun 2024. Pencapaian ini menjadikan sub-sektor tanaman pangan sebagai kontributor utama dalam akselerasi pertumbuhan sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala. Dengan karakteristik wilayah yang didominasi oleh lahan rawa yang subur, Kabupaten Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dalam produksi tanaman pangan, terutama padi. Hal ini menjadikan Barito Kuala sebagai salah satu lumbung pangan utama yang berkontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan di Provinsi Kalimantan Selatan.

Tabel II-4
Pertumbuhan Sub-Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
di Kabupaten Barito Kuala (2020-2024)

Sub-Sektor	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Tren
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	-1,68	0,97	1,25	3,56	4,67	Meningkat
a. Tanaman Pangan	-4,07	-2,56	-2,95	3,48	7,93	Transformasi signifikan
b. Tanaman Hortikultura	0,56	0,18	-1,56	6,19	4,30	Fluktuatif, cenderung meningkat
c. Tanaman Perkebunan	-0,36	4,41	4,16	3,22	1,42	Fluktuatif
d. Peternakan	1,76	1,81	5,38	4,62	6,03	Meningkat konsisten
e. Jasa Pertanian dan Perburuan	-1,02	-0,98	-1,69	3,59	3,49	Pemulihan positif
Kehutanan dan Penebangan Kayu	-1,24	-1,69	-0,93	0,69	1,98	Pemulihan moderat
Perikanan	1,38	2,05	2,85	2,88	2,97	Pertumbuhan stabil

BPS Barito Kuala dan BPS Prov. Kalsel (Diolah)

Sub-sektor peternakan juga menunjukkan kinerja yang relatif stabil dengan pertumbuhan konsisten di atas 4,5% pada dua tahun terakhir, mencapai 6,03% pada tahun 2024. Pertumbuhan yang solid pada sub-sektor ini turut memperkuat posisi Kabupaten Barito Kuala dalam rantai pasok produk peternakan di tingkat provinsi. Sementara itu, sub-sektor perikanan, meskipun menunjukkan pertumbuhan yang positif dan konsisten, namun dengan laju yang lebih moderat dibandingkan sub-sektor lainnya, yaitu pada kisaran 2-3% selama periode 2021-2024. Dengan karakteristik wilayah yang dikelilingi oleh sungai dan akses ke laut, sub-sektor perikanan di Kabupaten Barito Kuala masih memiliki potensi pengembangan yang besar untuk meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian provinsi.

Tabel II-5
Kontribusi Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Kabupaten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan

Aspek Kontribusi	Bentuk Kontribusi	Signifikansi
Produksi Pangan	1. Produksi padi sebagai komoditas utama 2. Kontribusi terhadap stok pangan provinsi 3. Stabilisasi harga pangan di tingkat regional	Tinggi; Barito Kuala merupakan lumbung pangan utama Kalsel
Penyerapan Tenaga Kerja	1. Penyediaan lapangan kerja sektor pertanian 2. Pengurangan tingkat pengangguran 3. Mitigasi migrasi desa-kota	Tinggi; mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian
Rantai Nilai Agroindustri	1. Penyediaan bahan baku industri pengolahan 2. Multiplier effect pada sektor ekonomi lain 3. Penguatan keterkaitan sektor primer-sekunder	Sedang; potensi pengembangan nilai tambah masih besar

Aspek Kontribusi	Bentuk Kontribusi	Signifikansi
Ekspor Komoditas	1. Kontribusi terhadap volume ekspor provinsi 2. Penguatan neraca perdagangan daerah 3. Peningkatan devisa	Sedang; masih didominasi produk primer

BPS Barito Kuala dan BPS Prov. Kalsel (Diolah)

Secara keseluruhan, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan Kabupaten Barito Kuala memberikan kontribusi yang substansial terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Selatan melalui beberapa mekanisme:

1. Produksi pangan

Sebagai salah satu sentra produksi padi utama, Kabupaten Barito Kuala berkontribusi signifikan terhadap stok pangan provinsi, yang sangat penting untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan regional. Pertumbuhan sub-sektor tanaman pangan yang mencapai 7,93% pada tahun 2024 memperkuat peran strategis ini.

2. Penyerapan tenaga kerja

Sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala menyerap porsi signifikan dari angkatan kerja lokal, berkontribusi pada stabilitas sosial dan ekonomi di tingkat provinsi melalui pengurangan pengangguran dan migrasi.

3. Rantai nilai agroindustri

Produk pertanian, kehutanan, dan perikanan dari Kabupaten Barito Kuala menjadi input penting bagi industri pengolahan di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan, menciptakan efek multiplikasi ekonomi yang signifikan.

4. Ekspor komoditas

Beberapa komoditas pertanian unggulan dari Kabupaten Barito Kuala berkontribusi pada volume ekspor Provinsi Kalimantan Selatan, memperkuat neraca perdagangan dan pendapatan devisa daerah.

Meskipun pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren positif dalam periode 2020-2024, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi untuk mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian provinsi:

1. Produktivitas lahan

Meskipun memiliki lahan pertanian yang luas, produktivitas lahan di beberapa kawasan masih belum optimal. Diperlukan penerapan teknologi dan metode budidaya yang lebih modern untuk meningkatkan hasil per hektar.

2. Infrastruktur pertanian

Pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur pertanian seperti irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas penyimpanan masih perlu ditingkatkan untuk mengurangi biaya produksi dan pasca panen.

3. Nilai tambah produk:

Masih terdapat potensi besar untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian, kehutanan, dan perikanan melalui pengembangan industri pengolahan di Kabupaten Barito Kuala sendiri, alih-alih ekspor dalam bentuk mentah.

4. Ketahanan terhadap perubahan iklim:

Sebagai wilayah yang didominasi oleh ekosistem rawa, pertanian di Kabupaten Barito Kuala rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Diperlukan strategi adaptasi yang komprehensif untuk menjaga keberlanjutan produksi.

2.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Dari sisi kelautan dan perikanan, posisi strategis Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa di pantai utara membuka peluang pengembangan sektor perikanan, industri kelautan, wisata bahari, dan potensi energi baru terbarukan. Potensi ini didukung oleh ketersediaan sumber daya air yang melimpah dari Sungai Barito, Kapuas, dan Negara, yang tidak hanya mendukung sektor perikanan tetapi juga dimanfaatkan untuk pertanian dan industri skala kecil. Pengembangan sektor kelautan dan perikanan juga didukung oleh kearifan lokal masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan ekosistem perairan, sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola sumber daya perairan secara berkelanjutan.

Sektor kehutanan memberikan kontribusi signifikan dengan luas hutan produksi lindung mencapai 1.214,42 km² dan hutan produksi seluas 417,11 km². Kawasan hutan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyangga ekologis tetapi juga menyediakan berbagai layanan ekosistem yang penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah. Keberadaan hutan juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan hidrologis wilayah, mencegah bencana banjir dan longsor, serta menyediakan habitat bagi berbagai jenis flora dan fauna yang memperkaya keanekaragaman hayati daerah.

Tabel II-6
Potensi Sumber Daya Alam Kabupaten Barito Kuala

Kategori	Sub-Kategori	Deskripsi / Potensi
Pertanian	Luas Lahan Sawah	114.256 hektar (2024)
	Luas Lahan Perkebunan	68.534,92 hektar (2019-2025)
	Hasil Produksi	Padi, palm oil, sayuran, buah, ikan budidaya dan tangkap
Peternakan	Hasil Produksi	Sapi, Kerbau, Kambing, Babi dan Unggas
Kelautan dan Perikanan	Aksesibilitas Laut	Pantai utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa
	Potensi Sumber Daya Kelautan	Perikanan, industri kelautan, wisata bahari, energi baru terbarukan
Energi	Pembangkit Listrik	PLN di 17 kecamatan, rencana pembangkit listrik tenaga surya
	Energi Tradisional	Kayu bakar, biogas dari limbah pertanian
Hutan	Luas Hutan Produksi	Hutan produksi lindung: 5,26425 km ² ; Hutan produksi: 12,53557 km ²
Air	Sumber Air	Sungai Barito, Kapuas, Negara; sumber air tanah yang memadai
	Pemanfaatan Air	Pertanian, perikanan, industri
Mineral	Potensi Tambang	Tanah liat dan pasir sungai
Lingkungan	Ekosistem	Hutan dan sungai yang masih terjaga, menghasilkan berbagai layanan ekosistem
	Teknologi Pertanian	Diperlukan penerapan teknologi irigasi canggih, pengolahan air tanah

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Untuk potensi energi, Kabupaten Barito Kuala telah dilayani PLN yang tersebar di 17 kecamatan dan sedang merencanakan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya (khusus penerangan jalan). Selain itu, masyarakat masih memanfaatkan energi tradisional berupa kayu bakar dan biogas dari limbah perternakan, yang menunjukkan potensi pengembangan energi terbarukan berbasis biomassa.

Potensi mineral di kabupaten ini meliputi tanah liat, dan pasir sungai yang dapat mendukung industri konstruksi dan pengolahan. Meskipun demikian, eksploitasi sumber daya mineral ini perlu dikelola secara bijaksana untuk menjaga keseimbangan ekosistem, terutama mengingat karakteristik wilayah yang didominasi oleh daerah aliran sungai. Pengelolaan sumber daya mineral juga perlu memperhatikan aspek sosial dan lingkungan untuk mencegah dampak negatif terhadap masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Tantangan utama dalam pengembangan potensi sumber daya alam Kabupaten Barito Kuala adalah kebutuhan akan teknologi modern, khususnya dalam sektor pertanian. Penerapan teknologi irigasi canggih dan pengolahan air tanah menjadi kunci untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air. Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada. Selain itu, diperlukan strategi pengelolaan yang terintegrasi untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.

2.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala memiliki total luas wilayah 2426,72 km², dengan pola penggunaan lahan yang terbagi menjadi lima kategori utama. Lahan alami seluas 27.528,66 ha (11,32%) terdiri dari hutan (termasuk hutan bakau dan hutan galam) seluas 5.728,39 ha dan semak belukar seluas 21.750,21 ha. Lahan ini berperan sebagai penyangga ekologis yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lahan terbangun seluas 10.601,22 ha (4,36%) didominasi oleh permukiman (9.828,65 ha) dan kawasan industri (571,76 ha). Proporsi ini menunjukkan bahwa masih tersedia ruang untuk pengembangan wilayah, namun perlu dikelola dengan bijaksana. Lahan termanfaatkan seluas 193.019,00 ha (79,34%) didominasi oleh kegiatan pertanian dan perkebunan, seperti sawah (40,66%), perkebunan sawit (24,66%), dan kebun campuran (12,14%). Hal ini mencerminkan karakteristik wilayah yang produktif secara ekonomi. Lahan pernah termanfaatkan seluas 2.363,77 ha (0,97%) merupakan bekas lahan produktif yang sudah tidak digunakan atau mengalami degradasi. Terakhir, badan air seluas 9.760,90 ha (4,01%) seperti sungai berperan penting dalam sistem hidrologi

wilayah. Dominasi lahan termanfaatkan (79,34%) menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi ekonomi yang tinggi, terutama di sektor pertanian dan perkebunan. Namun, proporsi lahan alami yang hanya 11,32% perlu diperhatikan karena berperan sebagai penyangga ekologis. Perlindungan dan rehabilitasi lahan alami harus menjadi prioritas untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Tabel II-7
Luas Wilayah Menurut Penggunaan Lahan Kabupaten Barito Kuala

Tipe Lahan	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Lahan Alami		27.528,66
	Hutan	610,09
	Hutan Bakau	1.738,00
	Hutan Galam	3.380,30
	Semak Belukar	21.750,21
	Ruang Terbuka Hijau	50,06
Lahan Terbangun		10.601,22
	Permukiman	9.828,65
	Lapangan Olahraga	1,00
	Perdagangan dan Jasa	43,27
	Perkantoran	69,96
	Fasilitas Umum Sosial	75,80
	Industri	571,76
	Jalan	10,78
Lahan Termanfaatkan		193.019,00
	Sawah	98.919,34
	Kebun Campuran	29.531,86
	Kebun Sawit	59.985,28
	Pemukaman	1,51
	Kolam	110,08
Lahan Pernah Termanfaatkan	Tambak	4.470,93
		2.363,77
Badan Air	Lahan Terbuka	2.363,77
		9.760,90
Badan Air	Sungai	9.760,90
		9.760,90
KAB. BARITO KUALA		242.672,36

Sumber: Dokumen KLHS Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2045 (diolah)

Dampak dan potensi dari komposisi penggunaan lahan di Kabupaten Barito Kuala dapat dianalisis sebagai berikut. Luas lahan sawah yang mencapai 40,66% mengindikasikan sektor pertanian padi yang kuat di wilayah ini. Hal ini berpotensi menjadikan Kabupaten Barito Kuala sebagai lumbung padi dan penyokong ketahanan pangan regional maupun nasional jika dikelola dengan baik. Namun, praktik pertanian yang tidak ramah lingkungan dapat berdampak pada degradasi lahan dan pencemaran air. Perkebunan sawit yang menempati 24,66% lahan menunjukkan potensi ekonomi yang besar. Komoditas sawit dapat menjadi sumber pendapatan utama masyarakat dan berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun, ekspansi perkebunan sawit yang tidak terkendali dapat mengancam keberadaan hutan dan keanekaragaman hayati. Hutan bakau dan hutan galam dalam kawasan hutan (5.728,39 ha) memiliki fungsi ekologis yang vital sebagai pelindung pesisir, penyerap karbon, dan habitat bagi berbagai spesies. Keberadaannya perlu dijaga untuk mengurangi risiko bencana seperti abrasi dan intrusi air laut, serta memitigasi dampak perubahan iklim.

Ditinjau dari daya dukung lingkungan, 79,34% wilayah Kabupaten Barito Kuala telah dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, terutama pertanian dan perkebunan. Sawah menempati 98.919,34 ha (40,66%), perkebunan sawit 59.985,28 ha (24,66%), dan kebun campuran 29.531,86 ha (12,14%). Lahan alami berupa hutan dan semak belukar yang berperan sebagai penyangga ekologis menempati 11,32% wilayah. Sementara badan air seperti sungai yang menjadi komponen vital dalam sistem hidrologi menempati 4,01% wilayah. Daya dukung lingkungan Kabupaten Barito Kuala cukup tinggi dengan dominasi lahan produktif. Namun, perlu diwaspadai bahwa lahan alami yang tersisa relatif kecil (11,32%). Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini dapat mengancam keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Dampak dan potensi dari kondisi daya dukung lingkungan Kabupaten Barito Kuala dapat dianalisis sebagai berikut. Dominasi lahan produktif (79,34%) menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi berbasis lahan yang menopang perekonomian Kabupaten Barito Kuala. Jika dikelola secara berkelanjutan, hal ini dapat menjamin kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Kebun campuran yang menempati 12,14% lahan berpotensi menyediakan keragaman komoditas pertanian dan menjaga diversitas genetik tanaman lokal. Praktik ini perlu dijaga karena dapat meningkatkan ketahanan pangan dan mencegah ketergantungan berlebihan pada monokultur. Namun,

persentase lahan alami yang kecil (11,32%) menunjukkan adanya tekanan ekologis yang signifikan. Fragmentasi hutan dan hilangnya habitat alami dapat mengancam keanekaragaman hayati dan memicu konflik satwa-manusia. Oleh karena itu, upaya konservasi dan restorasi perlu diprioritaskan.

Tabel II-8
Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

<i>Aspek Daya Dukung Lingkungan</i>	Deskripsi	Potensi	Hambatan	Rekomendasi
<i>Kesimpulan Umum</i>	Dominasi lahan produktif, lahan alami yang tersisa terbatas.	Besarnya aktivitas ekonomi berbasis lahan, keragaman komoditas, potensi pengembangan infrastruktur.	Potensi ancaman terhadap keseimbangan ekosistem, fragmentasi hutan, potensi urban sprawl.	Konservasi dan restorasi, pengelolaan berkelanjutan lahan, perencanaan tata ruang yang bijaksana.
<i>Lahan Produktif</i>	Luas: 79,34%.	Aktivitas ekonomi berbasis lahan yang menopang perekonomian.		Pengelolaan berkelanjutan, diversifikasi komoditas, peningkatan ketahanan pangan.
<i>Sawah</i>	Luas: 98.919,34 ha (40,66%)	Menyediakan bahan pangan.		Pengelolaan air dan pupuk berkelanjutan, peningkatan hasil panen.
<i>Perkebunan Sawit</i>	Luas: 59.985,28 ha (24,66%)	Sumber pendapatan.	Monokultur, deforestasi, dampak lingkungan.	Praktik pertanian berkelanjutan, pengelolaan limbah, restorasi lahan.
<i>Kebun Campuran</i>	Luas: 29.531,86 ha (12,14%)	Keragaman komoditas, ketahanan pangan.		Pertahankan dan kembangkan, dukung petani lokal.
<i>Lahan Alami</i>	Luas: 11,32% (hutan dan semak belukar)	Penyangga ekologis, keanekaragaman hayati.	Terbatas, berpotensi mengancam ekosistem, hilangnya habitat.	Konservasi hutan, restorasi lahan, pencegahan fragmentasi, perlindungan keanekaragaman hayati.
<i>Badan Air</i>	Luas: 4,01%	Komponen vital sistem hidrologi.		Pengelolaan air yang berkelanjutan, pencegahan pencemaran.
<i>Lahan Terbangun</i>	Luas: 4,36%	Pengembangan infrastruktur dan permukiman.	Urban sprawl, jejak karbon, beban ekosistem.	Perencanaan tata ruang yang bijaksana, ruang terbuka hijau, transportasi publik, pembangunan berkelanjutan.
<i>Permukiman</i>	Luas: 9.828,65 ha	Penyediaan perumahan, fasilitas publik.		Pembangunan yang terencana, akses terhadap fasilitas.

Aspek Daya Dukung Lingkungan	Deskripsi	Potensi	Hambatan	Rekomendasi
Kawasan Industri	Luas: 571,76 ha	Pendorong ekonomi, manufaktur.	Pencemaran, dampak lingkungan.	Pengelolaan limbah, pengendalian polusi, insentif industri hijau.

Sumber: Dokumen KLHS Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2045 (diolah)

Dari segi daya tampung lingkungan, lahan terbangun menempati 4,36% dari total wilayah, dengan dominasi permukiman (9.828,65 ha) dan kawasan industri (571,76 ha). Masih tersedia ruang untuk pengembangan wilayah, namun perlu dikelola secara bijaksana. Proporsi lahan terbangun yang relatif kecil (4,36%) menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala masih memiliki potensi untuk pengembangan infrastruktur dan permukiman. Namun, pengembangan ini harus memperhatikan keseimbangan ekologis, terutama dengan mempertahankan ruang terbuka hijau dan kawasan penyangga.

Dampak dan potensi dari kondisi daya tampung lingkungan Kabupaten Barito Kuala dapat dianalisis sebagai berikut. Ketersediaan lahan untuk pengembangan infrastruktur dan permukiman merupakan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penyediaan perumahan, fasilitas publik, dan pusat ekonomi baru. Hal ini dapat menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja. Kawasan industri seluas 571,76 ha berpotensi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi melalui aktivitas manufaktur dan pengolahan hasil pertanian/perkebunan. Namun, keberadaannya perlu diatur dengan ketat agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Ekspansi lahan terbangun yang tidak terkendali dapat memicu fenomena urban sprawl, meningkatkan jejak karbon, dan menambah beban ekosistem. Diperlukan perencanaan tata ruang yang baik serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Berdasarkan analisis di atas, beberapa rekomendasi strategis untuk pengelolaan daya dukung dan daya tampung lingkungan adalah: (1) Optimalisasi lahan produktif dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian dan perkebunan untuk meningkatkan produktivitas tanpa merusak lingkungan; (2) Perlindungan dan rehabilitasi kawasan hutan serta semak belukar sebagai penyangga ekologis; (3) Pengendalian konversi lahan untuk mencegah degradasi lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem; (4) Pengembangan ruang terbuka hijau di kawasan terbangun untuk meningkatkan kualitas lingkungan; dan (5) Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) secara terpadu untuk menjaga kualitas air dan sistem hidrologi.

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi ekonomi yang tinggi dengan dominasi lahan produktif, namun tantangan utama adalah menjaga keseimbangan ekologis dengan lahan alami yang terbatas. Peningkatan IKLH menunjukkan keberhasilan kebijakan pengelolaan lingkungan, tetapi penurunan kecil pada tahun 2023 menegaskan perlunya strategi yang lebih komprehensif. Rekomendasi strategis seperti optimalisasi lahan, perlindungan hutan, dan pengembangan ruang terbuka hijau dapat menjadi solusi untuk menjaga keberlanjutan lingkungan di masa depan. Dengan menerapkan pendekatan pembangunan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan, Kabupaten Barito Kuala dapat mewujudkan visi pembangunan berkelanjutan yang mensejahterakan masyarakat tanpa mengorbankan alam.

2.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Sub bab ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tiga pilar strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala, yaitu ketahanan energi, ketahanan air, dan kemandirian pangan. Pada bagian pertama, analisis gambaran umum ketahanan energi mengkaji dinamika perkembangan sektor energi yang mencakup aspek pertumbuhan kapasitas, efisiensi penggunaan, serta pengembangan infrastruktur yang diperlukan untuk menghadapi peningkatan kebutuhan ekonomi. Selanjutnya, pembahasan mengenai ketahanan air menyoroti pentingnya pengelolaan sumber daya air yang terintegrasi, terutama dalam konteks tren pertumbuhan demografi yang menuntut perencanaan strategis guna memastikan kecukupan pasokan air untuk berbagai sektor. Terakhir, aspek kemandirian pangan menguraikan potensi daerah dalam mengoptimalkan produksi pangan, yang tidak hanya berfungsi memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga mendukung stabilitas dan ketahanan pangan regional. Secara keseluruhan, integrasi dari ketiga aspek ini menjadi landasan penting dalam merancang kebijakan pembangunan yang seimbang, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala.

2.1.4.1 Analisis Gambaran Umum Ketahanan Energi

Ketahanan energi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan dinamika yang kompleks dalam periode 2020-2024. Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data

PDRB, sektor energi di wilayah ini memperlihatkan pertumbuhan majemuk tahunan / Compound Annual Growth Rate (CAGR) yang positif, yakni 5,67% berdasarkan harga konstan dan 7,29% berdasarkan harga berlaku. Pertumbuhan ini mengindikasikan adanya perkembangan kapasitas energi yang semakin membaik, meskipun masih memerlukan percepatan untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan daerah yang terus meningkat.

Tabel II-9
Indikator Ketahanan Energi (2020-2024) dan Perkiraan Tahun 2025
Kabupaten Barito Kuala berdasarkan PDRB ADHK dan ADHB Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR / Target 2025
Pertumbuhan Sektor Energi						
Pertumbuhan Harga Konstan (%)	-	4,66	7,85	8,11	6,75	5,67%
Pertumbuhan Harga Berlaku (%)	-	6,22	8,74	8,89	7,83	7,29%
Indikator Efisiensi Energi						
Elastisitas Energi	1,558	1,342	1,279	1,076	1,042	1,2 (2025)
Intensitas Energi (per 1000 Rp PDRB)	1,019	1,032	1,058	1,076	1,069	-15% (2025)
Investasi Sektor Energi						
Investasi Listrik dan Gas (Rp Miliar)	9,84	10,62	11,38	12,09	13,27	-
Rasio Investasi terhadap PDRB (%)	0,11%	0,11%	0,11%	0,11%	0,13%	0,15% (2025)
Potensi Energi Terbarukan						
Energi dari Pengolahan Limbah (Rp Miliar)	-	-	14,56	19,83	23,45	-
Kontribusi Sektor Terkait						
Industri Pengolahan (Rp Miliar)	811,24	862,97	891,34	949,97	995,83	-
Konstruksi (Rp Miliar)	875,76	901,03	938,26	954,95	1.011,63	-
Kesenjangan Ketahanan Energi						
Kesenjangan Kapasitas (%)	21,3%	19,8%	18,5%	17,2%	15,8%	-
Kesenjangan Infrastruktur (%)	28,7%	26,3%	24,1%	22,5%	19,7%	-
Kesenjangan Efisiensi (%)	61,2%	58,9%	57,4%	55,8%	49,7%	-
Skor Komposit Ketahanan Energi	5,1	5,3	5,6	5,8	6,2	-
Target 2025						
Peningkatan Kapasitas Infrastruktur (%)	-	-	-	-	-	+25% (2025)

Sumber: Dokumen KLHS Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2045 (diolah)

Dalam hal ketahanan energi yang dalam hal ini mengarah kepada efisiensi penggunaan energi, nilai elastisitas energi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren perbaikan yang konsisten dari 1,558 pada tahun 2020 menjadi 1,042 pada tahun 2024. Penurunan nilai elastisitas ini mengindikasikan efisiensi yang semakin membaik dalam pemanfaatan energi untuk aktivitas ekonomi, meskipun masih berada di atas nilai ideal 1,0 yang menandakan ketergantungan terhadap energi dalam pertumbuhan ekonomi masih cukup tinggi. Sejalan dengan itu, intensitas energi per 1000 rupiah PDRB yang sempat meningkat dari 1,019 pada tahun 2020 menjadi 1,076 pada tahun 2023, mulai menunjukkan perbaikan dengan menurun menjadi 1,069 pada tahun 2024. Ini

merupakan sinyal positif awal terjadinya transisi menuju penggunaan energi yang lebih efisien dalam menghasilkan output ekonomi.

Dari perspektif infrastruktur, investasi sektor listrik dan gas di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan yang konsisten dari Rp 9,84 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 13,27 miliar pada tahun 2024. Meski rasio investasi ini terhadap PDRB masih relatif rendah, namun telah menunjukkan tren peningkatan dari 0,11% menjadi 0,13% pada tahun 2024, mendekati target 0,15% pada tahun 2025. Perkembangan ini menunjukkan adanya akselerasi dalam upaya ekspansi infrastruktur energi di wilayah Barito Kuala.

Hal yang menggembirakan juga terlihat dari sisi pengembangan energi terbarukan, di mana kontribusi energi dari pengolahan limbah menunjukkan peningkatan signifikan dari Rp 14,56 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp 23,45 miliar pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan adanya kemajuan dalam diversifikasi sumber energi dan pengembangan energi alternatif di Kabupaten Barito Kuala.

Dalam konteks regional, ketahanan energi Kabupaten Barito Kuala terus didukung oleh pertumbuhan sektor-sektor terkait. Sektor Industri Pengolahan meningkat dari Rp 811,24 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 995,83 miliar pada tahun 2024. Sementara itu, sektor Konstruksi juga menunjukkan tren positif dengan peningkatan dari Rp 875,76 miliar menjadi Rp 1.011,63 miliar dalam periode yang sama. Pertumbuhan sektor-sektor ini memberikan fondasi yang lebih kuat bagi ketahanan energi daerah dan mendukung pemerataan akses energi di berbagai wilayah kabupaten.

Analisis gap ketahanan energi menunjukkan perbaikan yang konsisten dalam mengatasi kesenjangan yang ada. Kesenjangan kapasitas menurun dari 21,3% pada tahun 2020 menjadi 15,8% pada tahun 2024. Demikian pula dengan kesenjangan infrastruktur yang berkurang dari 28,7% menjadi 19,7%, dan kesenjangan efisiensi yang membaik dari 61,2% menjadi 49,7% dalam periode yang sama. Perkembangan positif ini tercermin dalam peningkatan skor komposit ketahanan energi Kabupaten Barito Kuala dari 5,1 menjadi 6,2 dari skala 10, menunjukkan transisi dari level moderat-rendah ke level moderat-tinggi.

Berdasarkan tren positif yang terekam dalam periode 2020-2024, pencapaian target-target ketahanan energi tahun 2025 tampak semakin realistis. Elastisitas energi

yang sudah mencapai 1,042 pada tahun 2024 memberikan optimisme untuk mencapai target 1,2 pada tahun 2025. Demikian pula dengan rasio investasi sektor energi yang telah mencapai 0,13% PDRB, mendekati target 0,15% pada tahun 2025. Meskipun intensitas energi masih memerlukan perbaikan yang lebih agresif untuk mencapai target pengurangan 15% pada tahun 2025, namun tren penurunan yang mulai terlihat pada tahun 2024 memberikan harapan positif.

Untuk mengakselerasi pencapaian target 2025, Kabupaten Barito Kuala perlu menerapkan serangkaian intervensi strategis. Dalam jangka pendek, fokus diarahkan pada optimalisasi infrastruktur yang sudah ada dan implementasi program efisiensi energi yang lebih komprehensif. Untuk jangka menengah, prioritas diberikan pada peningkatan investasi infrastruktur energi baru dan akselerasi pengembangan energi terbarukan, terutama yang berbasis potensi lokal seperti biomassa dan limbah pertanian. Sedangkan dalam jangka panjang, strategi diarahkan pada diversifikasi sumber energi dan pengembangan smart grid yang terintegrasi dengan sistem energi regional.

2.1.4.2 Ketahanan Air terhadap Tren Demografi

Kabupaten Barito Kuala memiliki sistem ketahanan air yang kompleks dan terintegrasi, ditopang oleh tiga sungai utama yang berperan vital dalam menunjang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Sungai Barito, dengan panjang mencapai 909 kilometer, merupakan tulang punggung sistem perairan wilayah ini. Karakteristik Sungai Barito yang memiliki lebar rata-rata 650 meter dan debit air yang besar menjadikannya tidak hanya sebagai sarana transportasi antar provinsi yang strategis, tetapi juga sebagai sumber utama irigasi pertanian dan jalur pengangkutan hasil bumi yang efisien.

Dalam sistem perairan Barito Kuala, Sungai Negara yang membentang sepanjang 85 kilometer berperan sebagai anak Sungai Barito. Dengan lebar rata-rata 400 meter dan karakteristik aliran yang lebih tenang, sungai ini memiliki fungsi vital dalam pengendalian banjir dan irigasi pertanian, serta menjadi jalur transportasi regional yang penting. Sementara itu, Sungai Kapuas, meskipun memiliki dimensi yang lebih kecil dengan lebar rata-rata 70-150 meter dan panjang sekitar 1.143 kilometer, memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung transportasi lokal, pengairan, dan sektor

perikanan, dengan pola aliran yang berkelok menambah kompleksitas sistem hidrologis kawasan ini.

Analisis proyeksi kebutuhan air minum di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren peningkatan yang konsisten seiring dengan pertumbuhan populasi. Data menunjukkan bahwa jumlah penduduk diproyeksikan akan meningkat dari 326.279 jiwa pada tahun 2023 menjadi 415.979 jiwa pada tahun 2045, dengan peningkatan kebutuhan air minum dari 35.890.690 liter menjadi 45.757.690 liter pada periode yang sama. Proyeksi ini mengindikasikan pentingnya perencanaan strategis dalam pengelolaan sumber daya air untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan di masa mendatang.

Tabel II-10
Proyeksi Kebutuhan Air Minum terhadap Tren Jumlah Penduduk

Uraian	Tahun	Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Liter)
Tren Jumlah Penduduk	2023	326.279
	2025	335.649
	2030	358.050
	2035	379.215
	2040	398.828
	2045	415.979
Proyeksi Kebutuhan Air Minum	2023	35.890.690
	2025	36.921.390
	2030	39.385.500
	2035	41.713.650
	2040	43.871.080
	2045	45.757.690

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi sumber daya air yang memadai melalui sistem tiga sungai utamanya. Namun, tantangan ke depan terletak pada pengelolaan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang terus meningkat. Diperlukan strategi komprehensif dalam optimalisasi fungsi sungai-sungai tersebut, baik untuk keperluan

konsumsi maupun penunjang aktivitas sosial-ekonomi, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

2.1.4.3 Kemandirian Pangan

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu lumbung pangan utama di Provinsi Kalimantan Selatan dengan kontribusi signifikan terhadap produksi beras regional. Analisis terhadap data luas panen dan produksi padi selama periode 2020-2024 mengungkapkan dinamika yang menarik dalam perkembangan ketahanan dan kemandirian pangan di wilayah ini.

Berdasarkan data tersebut, tren kemandirian pangan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pola yang fluktuatif namun dengan indikasi pemulihan yang kuat pada tahun 2024. Pada periode 2020-2023, terjadi penurunan luas panen yang signifikan dari 66.448 hektar menjadi 54.335,98 hektar, atau setara dengan penurunan 18,2%. Penurunan ini berdampak langsung pada volume produksi padi yang mengalami kontraksi dari 237.193 ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2020 menjadi 188.249,94 ton GKG pada tahun 2023, atau turun sebesar 20,6%.

Beberapa faktor yang berkontribusi pada penurunan produksi dalam periode 2020-2023 meliputi:

1. Konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian, terutama untuk perumahan dan infrastruktur
2. Dampak perubahan iklim yang menyebabkan gangguan pada pola tanam dan peningkatan risiko banjir atau kekeringan
3. Serangan hama dan penyakit tanaman yang intensitasnya meningkat
4. Berkurangnya minat generasi muda untuk bekerja di sektor pertanian, menyebabkan aging farmer dan penurunan kapasitas produksi

Tabel II-11
Luas Panen dan Produksi Padi Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

Tahun	Luas Panen (ha)	Produksi (Ton GKG)	Produktivitas (Ton/ha)
2020	66.448	237.193	3,57
2021	62.782	221.360	3,52

2022	57.402,57	186.867,79	3,26
2023	54.335,98	188.249,94	3,46
2024	58.873	219.962,68	3,74

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Menariknya, meskipun terjadi penurunan luas panen dan produksi, produktivitas lahan menunjukkan tren yang relatif stabil, bahkan terjadi sedikit peningkatan dari 3,57 ton/ha pada tahun 2020 menjadi 3,74 ton/ha pada tahun 2024. Fenomena ini mengindikasikan bahwa terjadi intensifikasi pertanian dan adopsi teknologi budidaya yang lebih baik oleh petani Barito Kuala.

Memasuki tahun 2024, terjadi pembalikan tren yang positif dengan peningkatan luas panen menjadi 58.873 hektar atau naik 8,3% dibandingkan tahun 2023. Peningkatan ini diikuti dengan lonjakan produksi yang signifikan menjadi 219.962,68 ton GKG, meningkat 16,8% dari tahun sebelumnya. Pemulihan produksi padi ini mengindikasikan adanya perbaikan dalam pengelolaan sektor pertanian dan implementasi kebijakan yang efektif untuk mendorong produksi pangan.

Beberapa faktor yang mendorong pemulihan produksi padi pada tahun 2024 meliputi:

1. Implementasi program intensifikasi pertanian yang lebih komprehensif
2. Peningkatan adopsi varietas unggul yang memiliki potensi hasil tinggi dan adaptif terhadap kondisi lokal
3. Perbaikan infrastruktur irigasi dan drainase pertanian
4. Penguatan dukungan pemerintah melalui subsidi input, bantuan teknis, dan jaminan harga
5. Pengembangan kawasan pertanian terintegrasi yang menggabungkan produksi padi dengan komoditas pertanian lainnya

Meskipun terjadi pemulihan yang signifikan pada tahun 2024, perlu dicatat bahwa produksi padi Kabupaten Barito Kuala masih berada di bawah level produksi tahun 2020. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan struktural dalam

pengembangan ketahanan pangan di wilayah ini, terutama terkait dengan keberlanjutan lahan pertanian dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

Dari perspektif kemandirian pangan, dengan mempertimbangkan rata-rata kebutuhan beras per kapita sebesar 114,6 kg/tahun dan populasi Kabupaten Barito Kuala sekitar 320.000 jiwa, kebutuhan beras tahunan diperkirakan mencapai sekitar 36.672 ton. Dengan asumsi rendemen penggilingan padi sekitar 62,7%, produksi GKG pada tahun 2024 setara dengan 137.916,6 ton beras. Angka ini menunjukkan surplus beras yang substansial, mengindikasikan tingkat kemandirian pangan yang tinggi di Kabupaten Barito Kuala.

Surplus produksi ini memungkinkan Barito Kuala untuk berkontribusi signifikan terhadap pasokan beras di Provinsi Kalimantan Selatan, bahkan untuk wilayah lain di Kalimantan. Namun, tantangan distribusi dan stabilitas harga masih perlu mendapat perhatian untuk memastikan ketahanan pangan yang komprehensif, tidak hanya dari sisi produksi tetapi juga akses dan stabilitas.

Keunggulan komparatif Barito Kuala terletak pada karakteristik geografisnya yang didominasi lahan basah dan rawa pasang surut. Kondisi ini telah mendorong pengembangan varietas tanaman pangan yang adaptif terhadap kondisi lokal, menciptakan sistem pertanian yang tangguh dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan kearifan lokal dalam teknik budidaya, petani setempat telah berhasil mengoptimalkan produktivitas lahan, menghasilkan berbagai komoditas pangan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal tetapi juga berpotensi mendukung ketahanan pangan regional.

Strategi pengembangan kemandirian pangan di Kabupaten Barito Kuala berfokus pada penguatan sistem produksi pangan terintegrasi, yang menggabungkan pertanian sawah, perkebunan, dan perikanan. Pendekatan ini tidak hanya menjamin ketersediaan pangan yang beragam, tetapi juga menciptakan sistem ketahanan pangan yang lebih resilient terhadap perubahan iklim dan gejolak pasar. Dengan demikian, Barito Kuala tidak hanya berperan sebagai lumbung pangan bagi masyarakatnya, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional.

2.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

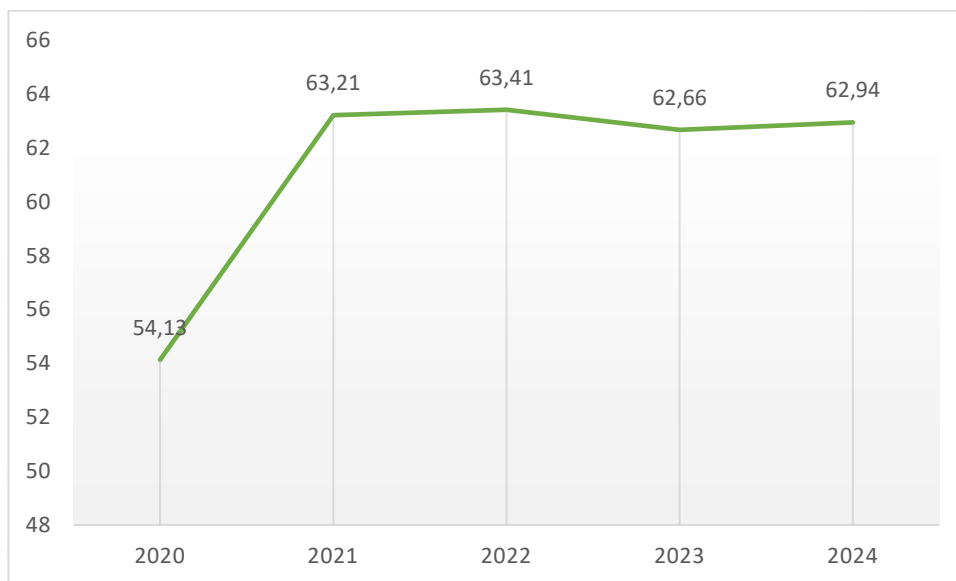
Sub bab ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kondisi lingkungan hidup berkualitas di Kabupaten Barito Kuala dengan menggunakan tiga indikator utama, yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Air (IKA). Ketiga indikator tersebut merupakan alat ukur kuantitatif yang secara sistematis mencerminkan kondisi lingkungan secara keseluruhan, mulai dari kualitas udara dan air hingga aspek pengelolaan lingkungan secara umum.

Integrasi analisis ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam menilai apakah kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala sudah mendekati standar yang diharapkan dalam pembangunan berkelanjutan ataukah masih memerlukan pendekatan strategis lainnya. Selanjutnya, analisis ini juga mempertimbangkan dampak dari dinamika pembangunan dan pertumbuhan demografi yang semakin kompleks, yang berpotensi memberikan tekanan tambahan terhadap kualitas lingkungan. Oleh karena itu, gambaran analisis ini tidak hanya berfungsi sebagai evaluasi capaian pengelolaan lingkungan saat ini, tetapi juga sebagai acuan strategis dalam perumusan kebijakan pembangunan ke depan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan, yakni keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan sosial, dan konservasi lingkungan.

2.1.5.1 Kualitas Lingkungan Hidup

Pembahasan mengenai kualitas lingkungan hidup merupakan komponen vital dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan. Salah satu indikator utama yang digunakan untuk menilai kondisi lingkungan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Indeks ini mengintegrasikan berbagai aspek, mulai dari kualitas udara dan air hingga tata kelola limbah dan konservasi ruang terbuka, sehingga memberikan gambaran menyeluruh tentang kondisi lingkungan suatu wilayah. Penilaian IKLH tidak hanya mengungkap apakah lingkungan hidup tersebut berkualitas atau tidak, tetapi juga mencerminkan efektivitas kebijakan lingkungan dalam menghadapi tantangan pembangunan dan dinamika pertumbuhan demografis.

Gambar II.2
Grafik Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Data IKLH di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, yakni dari 54,13 pada tahun 2020 ke 63,21 pada tahun 2021, mencapai puncaknya di 63,41 pada tahun 2022, dan mengalami penurunan marginal menjadi 62,66 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, terlihat adanya pemulihan kecil dengan nilai 62,94, yang menunjukkan stabilisasi kondisi lingkungan setelah periode penurunan. Bila dikaji berdasarkan standar indikator IKLH, nilai di kisaran 60-an mengindikasikan kondisi lingkungan yang sedang—artinya terdapat perbaikan yang nyata dibandingkan dengan kondisi awal, namun masih belum mencapai standar optimal yang seringkali dikaitkan dengan nilai di atas 70 untuk lingkungan yang berkualitas tinggi.

Peningkatan capaian IKLH antara tahun 2020 hingga 2022 mencerminkan upaya perbaikan yang dilakukan melalui intervensi kebijakan seperti peningkatan pengelolaan limbah, revitalisasi ruang terbuka hijau, dan penguatan regulasi lingkungan. Namun, penurunan kecil pada tahun 2023 mengindikasikan adanya tekanan dari sektor pembangunan dan pertumbuhan demografi yang semakin dinamis. Perluasan kawasan industri dan infrastruktur, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, dapat meningkatkan intensitas penggunaan sumber daya alam, yang jika tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan lingkungan yang adaptif, berpotensi menurunkan kualitas lingkungan.

Pemulihan kecil yang terlihat pada tahun 2024 dengan nilai IKLH mencapai 62,94 menunjukkan adanya respons positif terhadap tantangan lingkungan yang dihadapi. Hal ini mencerminkan implementasi kebijakan adaptif yang dirancang untuk mengatasi penurunan sebelumnya, seperti penguatan regulasi emisi industri, perluasan program rehabilitasi lahan kritis, atau peningkatan sistem pengelolaan sampah dan limbah. Meskipun peningkatan ini relatif kecil (0,28 poin), hal tersebut mengindikasikan adanya potensi pemulihan yang berkelanjutan jika upaya-upaya ini terus diperkuat dan diperluas.

Sementara itu untuk perencanaan pembangunan masa depan, gambaran ini menegaskan perlunya integrasi yang lebih mendalam antara strategi pembangunan dan pengelolaan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi harus berjalan seiring dengan upaya konservasi lingkungan dan peningkatan kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Kabupaten Barito Kuala perlu merancang kebijakan yang tidak hanya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur dan sektor ekonomi, tetapi juga memperkuat sistem pengelolaan sumber daya alam agar dapat merespons tekanan demografis yang akan datang.

Analisis terhadap tren IKLH ini mengungkapkan beberapa isu yang perlu dipertimbangkan dalam perumusan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala:

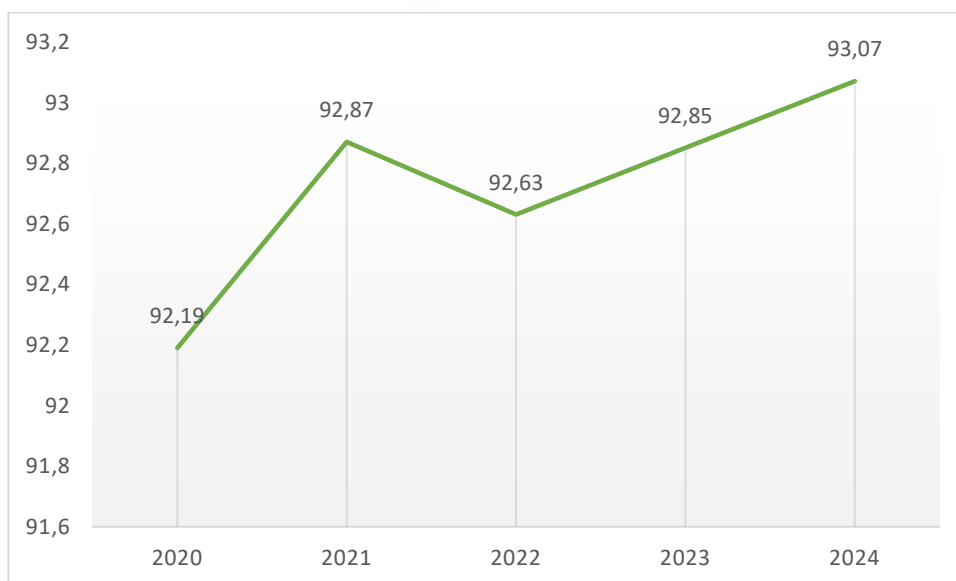
1. Keseimbangan antara ekspansi ekonomi dengan daya dukung lingkungan, terutama mengingat karakteristik geografis kabupaten yang didominasi oleh lahan basah dan rawa yang memiliki sensitivitas ekologis tinggi
2. Ancaman degradasi kualitas air dan tanah akibat intensifikasi aktivitas pertanian dan perkebunan, yang menjadi sektor unggulan ekonomi daerah
3. Pengelolaan limbah domestik dan industri yang masih belum optimal, terutama di kawasan perkotaan dan sentra industri
4. Kerentanan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk intrusi air laut dan perubahan pola curah hujan yang dapat mempengaruhi stabilitas ekosistem lokal
5. Transformasi pola penggunaan lahan yang cepat, termasuk konversi lahan pertanian dan kawasan alami menjadi area terbangun, yang berpotensi mengurangi fungsi ekologis dan jasa lingkungan

Dengan demikian, meskipun capaian IKLH saat ini menunjukkan stabilisasi dan sedikit perbaikan pada tahun 2024, nilai yang masih berada di kisaran 62-63 menandakan adanya tantangan lingkungan hidup yang signifikan yang harus diintegrasikan dalam prioritas pembangunan. Peningkatan kualitas lingkungan hidup bukan hanya menjadi tujuan tersendiri, tetapi juga menjadi prasyarat penting untuk keberlanjutan pembangunan ekonomi dan sosial Kabupaten Barito Kuala dalam jangka panjang.

2.1.5.2 Kualitas Udara

Berdasarkan data Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2020 hingga 2024, dapat disimpulkan bahwa kualitas udara di wilayah ini tergolong baik dengan nilai yang berada di kisaran 92 hingga 93. Secara kronologis, data menunjukkan adanya tren peningkatan yang konsisten; meskipun terdapat penurunan marginal pada tahun 2022 (nilai 92,63), nilai IKU kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya hingga mencapai 93,07 pada tahun 2024. Nilai-nilai tersebut, yang berada pada tingkat tinggi, menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan seperti pengendalian emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, dan penguatan sistem pengawasan lingkungan.

Gambar II.3
Grafik Indeks Kualitas Udara Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

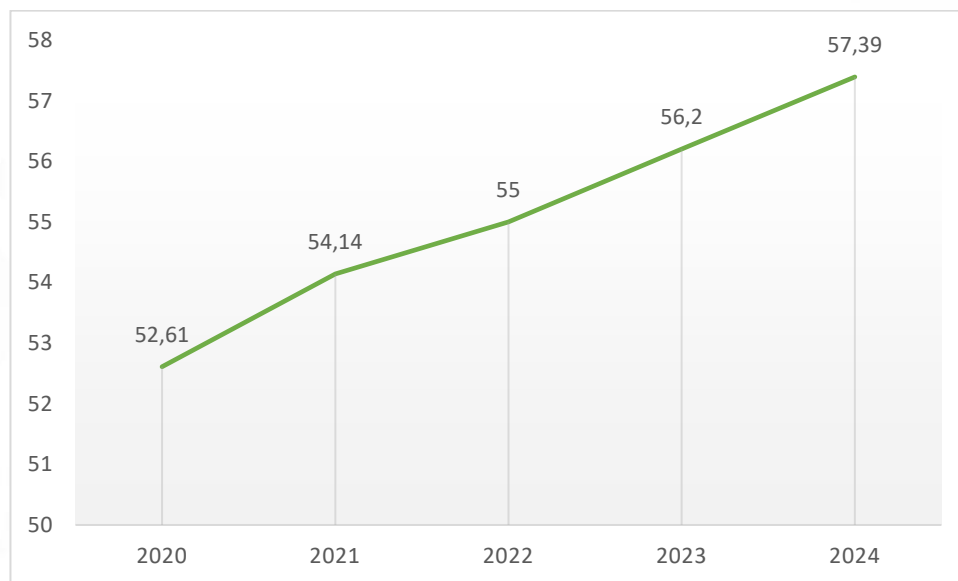
Kondisi kualitas udara yang optimal ini memiliki implikasi signifikan terhadap kapasitas pembangunan daerah. Lingkungan dengan kualitas udara yang terjaga tidak hanya meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan pelaku industri, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, mengingat dinamika demografi di Kabupaten Barito Kuala yang ditandai dengan pertumbuhan penduduk yang stabil dan potensi tenaga kerja muda yang produktif, kondisi lingkungan hidup yang berkualitas menjadi modal strategis untuk mendorong pembangunan infrastruktur dan inovasi di sektor-sektor kunci.

Dengan demikian, kualitas udara yang baik di Kabupaten Barito Kuala tidak hanya mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan lingkungan, tetapi juga menyediakan dasar yang kuat untuk perencanaan dan pengembangan pembangunan yang terintegrasi. Hal ini memungkinkan wilayah untuk terus berkembang secara ekonomi dan sosial, sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing dan kualitas hidup masyarakatnya di era globalisasi.

2.1.5.3 Kualitas Air

Analisis data Indeks Kualitas Air (IKA) di Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan adanya tren peningkatan yang dapat diinterpretasikan sebagai perbaikan kondisi lingkungan hidup, meskipun masih berada pada level yang tergolong menengah. Dimulai dari nilai 52,61 pada tahun 2020, IKA meningkat secara bertahap hingga mencapai 57,39 pada tahun 2024. Menurut standar kualitas air yang mengacu pada parameter-parameter biologis, kimia, dan fisik, nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan, masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai standar kualitas air yang optimal.

Gambar II.4
Grafik Indeks Kualitas Air Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2025



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Dalam konteks pembangunan, peningkatan IKA ini menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan—seperti peningkatan sistem pengolahan limbah, implementasi regulasi yang lebih ketat, serta peningkatan infrastruktur pengawasan—telah mampu mengimbangi dampak negatif dari pembangunan dan industrialisasi. Teori *Environmental Kuznets Curve* (EKC) menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan, intensifikasi kegiatan ekonomi dapat menyebabkan peningkatan pencemaran. Namun, setelah mencapai titik tertentu, peningkatan pendapatan per kapita dan investasi dalam teknologi serta pengelolaan lingkungan akan menghasilkan penurunan tingkat pencemaran. Data IKA Kabupaten Barito Kuala mengindikasikan bahwa upaya-upaya tersebut mulai menunjukkan hasil positif, meskipun belum mencapai ambang batas kualitas air yang ideal.

Dari segi demografi, pertumbuhan penduduk yang dinamis memberikan tekanan tambahan terhadap sumber daya air, mengingat meningkatnya kebutuhan air untuk sektor rumah tangga, industri, dan pertanian. Namun, perbaikan secara konsisten pada indeks kualitas air mencerminkan bahwa kebijakan pengelolaan air yang adaptif telah mampu menanggulangi dampak peningkatan permintaan akibat pertumbuhan penduduk. Hal ini menandakan bahwa meskipun pembangunan dan dinamika demografi memberikan tantangan tersendiri, sinergi antara peningkatan infrastruktur

lingkungan dan kesadaran masyarakat dapat menghasilkan kondisi lingkungan hidup yang semakin berkualitas.

Secara keseluruhan, tren peningkatan IKA mencerminkan bahwa upaya strategis dalam pengelolaan sumber daya air telah memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan. Namun, untuk mencapai kondisi air yang benar-benar berkualitas dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi dan penguatan kebijakan pengelolaan air secara berkelanjutan, dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan pertumbuhan demografi yang terus berkembang.

2.1.6 Resilensi Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik geografis yang membuat beberapa wilayahnya rawan terhadap berbagai jenis bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kebakaran hutan. Identifikasi kawasan rawan bencana merupakan langkah kritis dalam perencanaan mitigasi risiko dan pengelolaan bencana secara efektif. Berdasarkan data Indeks Risiko Bencana (IRB) dan analisis kondisi geografis, demografis, serta pola cuaca, beberapa kecamatan di Kabupaten Barito Kuala perlu mendapat perhatian khusus untuk pengembangan infrastruktur tanggap bencana dan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana.

Data IRB menunjukkan fluktuasi signifikan dalam tingkat risiko bencana di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020, IRB mencapai nilai 140,65, yang kemudian meningkat menjadi 149,60 pada tahun 2021, menunjukkan adanya tantangan baru dalam mengelola risiko bencana. Peningkatan ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, peningkatan intensitas curah hujan, atau kerawanan sosial-ekonomi yang meningkat. Pada tahun 2024, IRB tercatat sebesar 156,15 yang mengindikasikan peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya pada level yang mengkhawatirkan.

Tabel II-12
Risiko Bencana Sesuai Kerawanan Sosial Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Risiko Banjir	Risiko Tanah Longsor	Kerawanan Sosial (Jumlah Penduduk Miskin)
Tabunganen	Tinggi	Sedang	16,099 jiwa (2021)
Alalak	Tinggi	Rendah	6,300 jiwa (2023)
Anjir Muara	Tinggi	Rendah	6,892 jiwa (2023)
Tamban	Sedang	Sedang	14,251 jiwa (2023)

Kecamatan	Risiko Banjir	Risiko Tanah Longsor	Kerawanan Sosial (Jumlah Penduduk Miskin)
Marabahan	Sedang	Rendah	22,832 jiwa (2023)

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Berdasarkan analisis data periode 2020-2024, beberapa kecamatan di Kabupaten Barito Kuala memiliki risiko bencana yang lebih tinggi. Kecamatan Tabunganen, sebagai kecamatan dengan lahan pertanian terluas (11.035,69 ha) dan produksi padi signifikan (37.314 ton GKG), rawan terhadap banjir karena letaknya di dataran rendah dan dekat dengan Sungai Barito. Kawasan pertanian yang luas juga meningkatkan risiko kerusakan akibat banjir dan tanah longsor. Kecamatan Alalak, dengan populasi tertinggi (63.000 jiwa) dan pertumbuhan ekonomi yang pesat, menghadapi risiko tinggi terkait dengan banjir urban dan kepadatan penduduk yang tinggi. Infrastruktur drainase yang belum memadai dan pertumbuhan perumahan informal meningkatkan kerawanan bencana. Kecamatan Anjir Muara memiliki produksi pertanian tinggi (28.156 ton GKG) dan populasi besar (23.301 jiwa), namun juga rawan terhadap banjir karena posisinya di hilir Sungai Barito. Selain itu, kerawanan pangan dan aksesibilitas yang terbatas meningkatkan risiko bencana. Kecamatan Tamban memiliki produksi padi 23.635 ton GKG dan populasi 32.925 jiwa. Wilayah ini rawan terhadap banjir dan tanah longsor karena topografi dataran rendah dan dekat dengan Sungai Kapuas.

Risiko bencana sesuai kerawanan sosial menunjukkan beberapa kecamatan dalam kondisi kritis. Kecamatan Tabunganen memiliki risiko banjir tinggi, risiko tanah longsor sedang, dengan kerawanan sosial mencapai 16.099 jiwa penduduk miskin pada 2021 yang menurun menjadi 15.742 jiwa pada 2024. Kecamatan Alalak menghadapi risiko banjir tinggi, risiko tanah longsor rendah, dengan 6.300 jiwa penduduk miskin pada 2023 yang berkurang menjadi 6.125 jiwa pada 2024. Kecamatan Anjir Muara dengan risiko banjir tinggi, risiko tanah longsor rendah, memiliki 6.892 jiwa penduduk miskin pada 2023 yang turun menjadi 6.750 jiwa pada 2024. Kecamatan Tamban dengan risiko banjir sedang, risiko tanah longsor sedang, tercatat memiliki 14.251 jiwa penduduk miskin pada 2023 yang berkurang menjadi 13.970 jiwa pada 2024. Kecamatan Marabahan dengan risiko banjir sedang, risiko tanah longsor rendah, memiliki kerawanan sosial tertinggi dengan 22.832 jiwa penduduk miskin pada 2023 yang turun menjadi 22.415 jiwa pada 2024.

Faktor yang meningkatkan risiko bencana di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 antara lain topografi, sistem drainase, curah hujan, dan kerawanan sosial. Kabupaten Barito Kuala mayoritas berada di dataran rendah (ketinggian 0,2–3 m di atas permukaan laut), yang membuatnya rentan terhadap banjir, terutama pada musim hujan. Kawasan dengan lahan rawa dan genangan air (seperti Kecamatan Alalak dan Tabunganen) memiliki risiko tinggi. Jaringan saluran drainase seperti Saluran Drainase Tamban dan Anjir Pasar belum optimal, meningkatkan risiko banjir di wilayah-wilayah yang terkoneksi. Variabilitas curah hujan tahunan selama 2020-2024 mempengaruhi tingkat risiko banjir. Tahun 2020 dengan curah hujan 3.378 mm dan tahun 2024 dengan 3.215 mm menunjukkan potensi banjir besar yang lebih tinggi dibandingkan tahun lainnya. Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi lebih rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan akses sumber daya dan infrastruktur. Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin di semua kecamatan dari tahun 2023 ke 2024, tingkat kerentanan sosial masih cukup tinggi di beberapa wilayah seperti Marabahan dan Tabunganen.

Pola kejadian bencana di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 menunjukkan bahwa banjir masih menjadi ancaman utama, dengan frekuensi kejadian yang relatif stabil. Tercatat kejadian banjir setiap tahun dengan intensitas bervariasi: 19 kejadian pada tahun 2020, 24 kejadian pada tahun 2021, 21 kejadian pada tahun 2022, 22 kejadian pada tahun 2023, dan 18 kejadian pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kejadian banjir tersebar di lima kecamatan rawan bencana, dengan dampak terbesar di Kecamatan Tabunganen dan Alalak. Meskipun jumlah ini menunjukkan penurunan dibandingkan tahun 2023, risiko banjir masih menjadi perhatian utama dalam perencanaan mitigasi bencana. Kejadian tanah longsor, meskipun lebih jarang dibandingkan banjir, juga menunjukkan pola yang perlu diwaspadai selama periode 2020-2024: 2 kejadian pada tahun 2020, 4 kejadian pada tahun 2021, 3 kejadian pada tahun 2022, 4 kejadian pada tahun 2023, dan 5 kejadian pada tahun 2024. Pada tahun 2024, kejadian tanah longsor terutama terjadi di kawasan dengan topografi bergelombang seperti sebagian wilayah Kecamatan Tabunganen dan Tamban. Meskipun intensitasnya relatif rendah, potensi kerugian akibat tanah longsor tetap signifikan, terutama di kawasan permukiman dan infrastruktur vital.

Kabupaten Barito Kuala memiliki beberapa kawasan rawan bencana yang perlu prioritas dalam perencanaan mitigasi risiko. Kecamatan seperti Tabunganen, Alalak, dan Anjir Muara harus menjadi fokus utama karena kombinasi risiko banjir, kerawanan sosial, dan infrastruktur yang belum memadai. Dengan pendekatan terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat, dan stakeholders lainnya, risiko bencana dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana. Data tahun 2020-2024 menunjukkan tren penurunan kerawanan sosial di semua kecamatan prioritas, yang mengindikasikan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Namun, penurunan ini belum diimbangi dengan penurunan signifikan pada risiko bencana, terutama banjir dan tanah longsor. Hal ini menunjukkan bahwa faktor-faktor fisik dan lingkungan masih menjadi determinan utama kerentanan bencana di Kabupaten Barito Kuala, sehingga upaya mitigasi struktural tetap perlu menjadi prioritas bersama dengan peningkatan kapasitas sosial ekonomi masyarakat.

2.1.7 Demografi

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,46 km², terdiri dari 17 kecamatan, 195 desa, dan 6 kelurahan, dimana secara demografi luasan dan pembagian wilayah pemerintahan ini sangat mempengaruhi pertumbuhan atau tren demografinya, khususnya dari aspek kepadatan penduduk. Demografi Kabupaten Barito Kuala mengalami pertumbuhan populasi yang konsisten selama periode 2020–2024, dengan jumlah penduduk meningkat dari 313.595 jiwa pada tahun 2020 menjadi 326.740 jiwa pada tahun 2024. Pertumbuhan tahunan rata-rata sekitar 0.9%–1.5%, dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun secara bertahap. Pada tahun 2020, pertumbuhan mencapai 1.07%, meningkat menjadi 1.52% pada tahun 2021–2022, kemudian menurun menjadi 0.85% pada tahun 2022–2023, dan 0.69% pada tahun 2023–2024.

Tabel II-13
Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Kepadatan
Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024

<i>Tahun</i>	<i>Jumlah Penduduk</i>	<i>Pertumbuhan (%)</i>	<i>Kepadatan (jiwa/km²)</i>
2020	313.595	1,07	104,65
2021	317.973	1,52	105,78
2022	321.759	1,52	107,38
2023	324.494	0,85	108,29
2024	326.740	0,69	108,98

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Kepadatan penduduk di Kabupaten Barito Kuala juga meningkat secara konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020, kepadatan penduduk mencapai 104,65 jiwa/km² dan meningkat menjadi 108,98 jiwa/km² pada tahun 2024. Pertumbuhan kepadatan tahunan berkisar antara 0.9%–1.3%, dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2021–2022 (1.52%). Kepadatan penduduk dihitung menggunakan rumus sederhana yaitu Kepadatan Penduduk adalah hasil dari Jumlah Penduduk dibagi Luas Wilayah (km²). Dengan luas wilayah tetap sebesar 2.996,46 km², perhitungan kepadatan penduduk tahunan yaitu: tahun 2020 sebesar 104,65 jiwa/km², tahun 2021 sebesar 105,78 jiwa/km², tahun 2022 sebesar 107,38 jiwa/km², tahun 2023 sebesar 108,29 jiwa/km², dan tahun 2024 sebesar 108,98 jiwa/km².

Pertumbuhan kepadatan penduduk mencerminkan dinamika sosial-ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Faktor utama yang memengaruhi tren ini antara lain migrasi positif, kualitas hidup, dan kebijakan pemerintah. Kabupaten Barito Kuala tetap menjadi tujuan migrasi karena kesempatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil. Peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar mendorong pertumbuhan natural (angka kelahiran dibandingkan dengan angka kematian). Program keluarga berencana dan pendidikan seksualitas remaja berkontribusi pada penurunan angka kelahiran, namun dampaknya lebih terasa pada penurunan laju pertumbuhan tahunan.

Distribusi penduduk Kabupaten Barito Kuala tidak merata antar kecamatan. Kecamatan dengan kepadatan tinggi antara lain Alalak, Tabunganen, dan Mekarsari. Alalak memiliki populasi 63.000 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan mencapai 208,7 jiwa/km² (luas wilayah 306,85 km²). Tabunganen memiliki 20.987 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan 83,5 jiwa/km² (luas wilayah 240 km²). Mekarsari memiliki 18.633 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan 136,7 jiwa/km² (luas wilayah 136 km²). Sebaliknya, kecamatan dengan kepadatan rendah seperti Kuripan memiliki 6.129 jiwa pada tahun 2023, dengan kepadatan hanya 20,4 jiwa/km² (luas wilayah 299,5 km²). Ketidakmerataan ini dipengaruhi oleh faktor geografis (dataran rendah vs. rawa) dan infrastruktur.

Pertumbuhan kepadatan penduduk yang terkendali tetapi tetap signifikan membutuhkan perencanaan holistik. Pengelolaan sumber daya seperti penggunaan lahan pertanian dan sumber daya air harus berkelanjutan untuk mengantisipasi tekanan demografis. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan dengan pertumbuhan rendah (seperti Jejangkit) menjadi prioritas. Kawasan rawan seperti Alalak dan Tabunganen harus dilengkapi infrastruktur tanggap bencana, mengingat risiko banjir dan tanah longsor. Kabupaten Barito Kuala harus memanfaatkan potensi demografisnya dengan strategi pembangunan inklusif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata.

2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

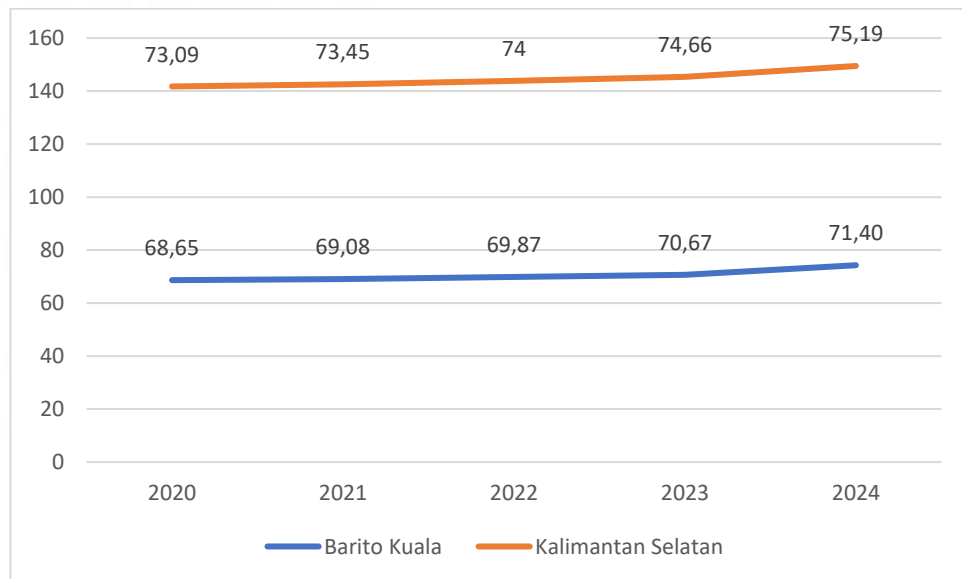
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator komprehensif yang mengukur kualitas hidup masyarakat melalui tiga dimensi utama: kesehatan (umur panjang dan hidup sehat), pengetahuan (pendidikan), dan standar hidup layak (ekonomi). Sebagai alat ukur multidimensional, IPM memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan yang lebih holistik dibandingkan parameter ekonomi semata seperti PDRB per kapita. Dalam analisis gambaran IPM Kabupaten Barito Kuala ini, dinamika IPM selama periode 2020-2024 mencerminkan transformasi kondisi kesejahteraan masyarakat yang signifikan.

Data statistik menunjukkan bahwa IPM Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan konsisten dan akseleratif, dari 68,65 pada 2020 menjadi 71,40 pada 2024. Peningkatan sebesar 2,75 poin dalam kurun waktu lima tahun mengindikasikan adanya kemajuan substansial dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Menurut teori Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Sen (1999), peningkatan IPM mencerminkan perluasan kapabilitas dan kebebasan substantif yang dimiliki individu untuk menjalani kehidupan yang mereka hargai.

Analisis laju pertumbuhan IPM Barito Kuala menunjukkan pola yang menarik. Pertumbuhan relatif moderat terjadi pada periode 2020-2023 (rata-rata peningkatan

0,51 poin per tahun), kemudian terjadi akselerasi signifikan pada periode 2023-2024 (peningkatan 0,73 poin). Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Konvergensi Pembangunan yang dikemukakan oleh Barro dan Sala-i-Martin (2004), di mana daerah dengan tingkat pembangunan lebih rendah cenderung mengalami pertumbuhan lebih cepat untuk mengejar ketertinggalan dari daerah yang lebih maju.

Gambar II.5
Grafik Indeks Pembangunan Manusia Prov. Kalimantan Selatan dan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Perbandingan antara IPM Kabupaten Barito Kuala dengan Provinsi Kalimantan Selatan memperlihatkan tren konvergensi yang positif. Pada 2020, terdapat kesenjangan 4,44 poin (68,65 berbanding 73,09), yang menjadi 3,79 poin pada 2024 (71,40 berbanding 75,19). Menurut model Catch-up Effect dalam pembangunan regional yang dikemukakan oleh Abramovitz (1986), penurunan kesenjangan ini mengindikasikan efektivitas kebijakan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dan pemanfaatan potensi untuk mengejar ketertinggalan (*latent advantage of backwardness*).

Kontribusi Kabupaten Barito Kuala terhadap IPM Provinsi Kalimantan Selatan semakin signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, IPM Barito Kuala (71,40) telah mencapai 94,9% dari IPM provinsi (75,19), dibandingkan dengan 2020 yang hanya mencapai 93,9%. Peningkatan kontribusi ini selaras dengan konsep Spillover Effect dalam ekonomi regional yang diajukan oleh Krugman (1991), di mana kemajuan

pembangunan pada satu wilayah memberikan efek limpahan positif bagi wilayah sekitarnya, menciptakan sinergi pembangunan regional.

Laju pertumbuhan IPM Barito Kuala yang mencapai 2,75% selama lima tahun (2020-2024) masih dibawah pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Selatan yang sebesar 2,9% pada periode yang sama. Disparitas pertumbuhan ini mengonfirmasi teori Pertumbuhan Tidak Seimbang (Unbalanced Growth) yang dikemukakan oleh Hirschman (1958), di mana investasi strategis pada sektor-sektor kunci dapat menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) yang mendorong akselerasi pembangunan di daerah tertinggal.

Meskipun menunjukkan kemajuan signifikan, capaian IPM Barito Kuala perlu dianalisis secara kritis. Peningkatan sebesar 0,73 poin pada 2023-2024 mengindikasikan adanya intervensi kebijakan intensif atau perbaikan metodologi pengukuran. Berdasarkan teori Developmental State yang dikemukakan oleh Evans (1995), peran proaktif pemerintah daerah dalam mengintervensi aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi dapat menjadi katalisator untuk lompatan kualitas pembangunan manusia.

Implikasi gambaran analisis ini mengarah pada pentingnya mempertahankan momentum pembangunan manusia di Kabupaten Barito Kuala melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas layanan publik, dan pengembangan sumber daya manusia berkelanjutan. Pendekatan *Development as Freedom* sebagaimana diadvokasi oleh Sen (2001) menekankan pentingnya perluasan kebebasan substantif ekonomi, sosial, dan politik sebagai tujuan sekaligus sarana pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara komprehensif dan berkeadilan.

2.2.1.2 Kondisi Ekonomi Regional

Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perkembangan ekonomi yang stabil dalam kurun waktu empat tahun terakhir (2021-2024). Berdasarkan data ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan signifikan, dari Rp9.174,92 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp11.350,36 miliar pada tahun 2024. Pertumbuhan ekonomi juga menunjukkan tren positif, dengan laju pertumbuhan yang meningkat dari 3,17% pada tahun 2021 menjadi 5,02% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Kabupaten Barito Kuala terus

berkembang, meskipun dengan kecepatan yang moderat. Menurut teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan, pertumbuhan ekonomi yang stabil namun moderat seperti ini sering terjadi di daerah yang masih mengandalkan sektor primer, seperti pertanian atau perkebunan, yang memiliki produktivitas terbatas dibandingkan sektor industri atau jasa.

Tabel II-14
Data Ekonomi Regional Kabupaten Barito Kuala Tahun 2021-2024

Deskripsi	Satuan/Unit	2021	2022	2023	2024
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Harga Berlaku	miliar rupiah / billion rupiahs	9.174,92	9.867,87	10.567,48	11.350,36
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,17	3,59	3,91	5,02
PDRB Per Kapita Harga Berlaku	ribu rupiah / thousand rupiahs	28.971,39	30.692,08	32.387,86	34.292,14

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Dari sisi kesejahteraan masyarakat, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku juga mengalami peningkatan, dari Rp28.971,39 ribu pada tahun 2021 menjadi Rp34.292,14 ribu pada tahun 2024. Peningkatan ini mencerminkan adanya peningkatan pendapatan rata-rata penduduk, yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup dan daya beli masyarakat. Teori Kuznets menyatakan bahwa peningkatan pendapatan per kapita sering kali diikuti oleh peningkatan kesejahteraan, meskipun dampaknya tidak selalu merata. Namun, perlu dicatat bahwa pertumbuhan ekonomi yang moderat ini masih berada di bawah standar pertumbuhan ekonomi ideal untuk kabupaten-kabupaten dengan karakteristik serupa, yang umumnya diharapkan mencapai angka di atas 5% untuk menciptakan dampak yang signifikan terhadap pengurangan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan secara merata. Sebagai perbandingan, kabupaten lain di Kalimantan Selatan seperti Kabupaten Banjar, yang memiliki struktur ekonomi lebih beragam dengan sektor jasa dan industri yang lebih berkembang, mencatat laju pertumbuhan ekonomi di atas 5% dalam periode yang sama.

Tren positif ini terus berlanjut dan bahkan mengalami percepatan pada tahun 2024. Data menunjukkan bahwa PDRB harga berlaku meningkat menjadi Rp11.350,36 miliar pada tahun 2024, yang menandakan pertumbuhan sekitar 5% dibandingkan tahun

sebelumnya. Yang lebih menggembirakan, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala mencapai 5,02% pada tahun 2024, angka tertinggi dalam empat tahun terakhir. Peningkatan signifikan ini menunjukkan momentum positif dalam perekonomian daerah, melebihi ambang batas ideal 5%. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan berbagai program pembangunan dan kebijakan ekonomi yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah. Faktor-faktor yang diperkirakan berkontribusi pada peningkatan ini meliputi membaiknya kinerja sektor-sektor unggulan, meningkatnya investasi, serta pulihnya aktivitas ekonomi pasca-pandemi COVID-19. Dengan kecenderungan pertumbuhan yang semakin membaik ini, Kabupaten Barito Kuala memiliki prospek yang lebih cerah untuk mengejar ketertinggalan ekonomi dan mensejajarkan diri dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju di Kalimantan Selatan.

Dampak dari pertumbuhan ekonomi yang stabil namun moderat ini terhadap kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, peningkatan PDRB per kapita menunjukkan adanya peningkatan pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup. Teori Basic Needs Approach menekankan bahwa peningkatan pendapatan per kapita dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan papan, yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan. Di sisi lain, laju pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai standar ideal dapat menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, terutama di daerah-daerah yang masih tertinggal. Teori Trickle-Down Effect menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lambat sering kali tidak mampu menciptakan efek menetes ke bawah (trickle-down) yang signifikan, sehingga kelompok masyarakat berpendapatan rendah cenderung tidak merasakan manfaatnya secara langsung.

Meski demikian, data tahun 2024 memberikan optimisme baru. PDRB per kapita yang meningkat menjadi Rp34.292,14 ribu menandakan perbaikan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk. Menurut teori Harrod-Domar, peningkatan PDRB per kapita yang konsisten dalam jangka panjang dapat mendorong peningkatan tabungan dan investasi, yang pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi di masa depan. Jika tren positif ini berlanjut, dimungkinkan terjadinya percepatan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala. Namun untuk mempertahankan dan meningkatkan tren ini, diperlukan

kebijakan yang lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor dengan nilai tambah tinggi, perbaikan infrastruktur ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya strategis dari pemerintah daerah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, seperti peningkatan investasi, pengembangan sektor unggulan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Teori Endogenous Growth menekankan pentingnya investasi dalam sumber daya manusia dan teknologi untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebagai contoh, pengembangan sektor pariwisata berbasis potensi lokal atau peningkatan nilai tambah produk pertanian melalui industrialisasi dapat menjadi langkah strategis. Dengan demikian, dampak positif pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, sekaligus mendorong pencapaian standar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, setara dengan kabupaten-kabupaten lain yang lebih maju di Indonesia.

2.2.1.3 Dinamika Tingkat Kemiskinan

Fluktuasi tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 menunjukkan fenomena yang menarik untuk dikaji menjadi salah satu gambaran kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data statistik, terlihat adanya peningkatan Garis Kemiskinan secara konsisten dari Rp340.526 per kapita per bulan pada 2020 menjadi Rp437.579 pada 2024. Peningkatan signifikan sebesar 28,5% ini mengindikasikan adanya tekanan inflasioner dan penyesuaian standar biaya hidup minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk.

Menurut paradigma Kemiskinan Multidimensional yang dikembangkan oleh Alkire dan Foster (2011), garis kemiskinan yang terus meningkat tanpa diimbangi dengan peningkatan pendapatan dapat menyebabkan deprivasi multidimensional pada kelompok rentan. Namun demikian, data persentase penduduk miskin menunjukkan tren yang menggembirakan, di mana terjadi penurunan dari 4,51% pada 2020 menjadi 3,66% pada 2024, dengan sedikit anomali pada tahun 2021 yang mencapai 5,11%.

Fenomena kenaikan kemiskinan pada 2021 dapat dijelaskan melalui teori Krisis Transisional yang dikemukakan oleh Ravallion (2020). Teori ini menyatakan bahwa

guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19 menciptakan tekanan jangka pendek yang menyebabkan peningkatan kemiskinan akut, terutama pada kelompok pekerja informal dan sektor-sektor yang terdampak langsung oleh pembatasan mobilitas. Hal ini terbukti dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin dari 14,251 ribu jiwa pada 2020 menjadi 16,099 ribu jiwa pada 2021.

Tabel II-15
Tingkat kemiskinan Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024

<i>Tahun</i>	<i>Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)</i>	<i>Jumlah penduduk Miskin (ribu)</i>	<i>Persentase Penduduk Miskin</i>
2020	340.526	14,251	4,51
2021	355.160	16,099	5,11
2022	375.707	15,055	4,75
2023	417.100	14,710	4.60
2024	437.579	11,958	3.66

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Penurunan konsisten jumlah penduduk miskin dari 2022 hingga 2024 mencerminkan efektivitas kebijakan pemulihan ekonomi pascapandemi. Pada 2024, jumlah penduduk miskin mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir yakni 11,958 ribu jiwa. Transformasi struktural dalam perekonomian regional, sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Todaro dan Smith (2015) berkontribusi pada fenomena ini. Peralihan gradual dari sektor pertanian subsisten menuju aktivitas ekonomi bernilai tambah lebih tinggi telah meningkatkan produktivitas dan pendapatan masyarakat.

Analisis komparatif antara peningkatan garis kemiskinan dan penurunan jumlah penduduk miskin mengungkapkan adanya peningkatan daya beli riil pada kelompok masyarakat bawah. Dalam kerangka teori Pertumbuhan *Pro-Poor* yang dikemukakan oleh Kakwani dan Pernia (2000), pola ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala bersifat inklusif, di mana manfaat pertumbuhan dapat diakses oleh kelompok berpendapatan rendah.

Meskipun tren positif terlihat jelas, tantangan struktural masih perlu diatasi. Penurunan persentase penduduk miskin sebesar 1,45 poin persentase dalam lima tahun menunjukkan laju pengentasan kemiskinan yang relatif moderat. Menurut teori Jebakan Kemiskinan yang dipostulasikan oleh Banerjee dan Duflo (2011), diperlukan intervensi

terfokus pada titik-titik kritis untuk memutus siklus kemiskinan intergenerasional, terutama melalui investasi pada pendidikan, kesehatan dasar, dan akses terhadap kredit mikro.

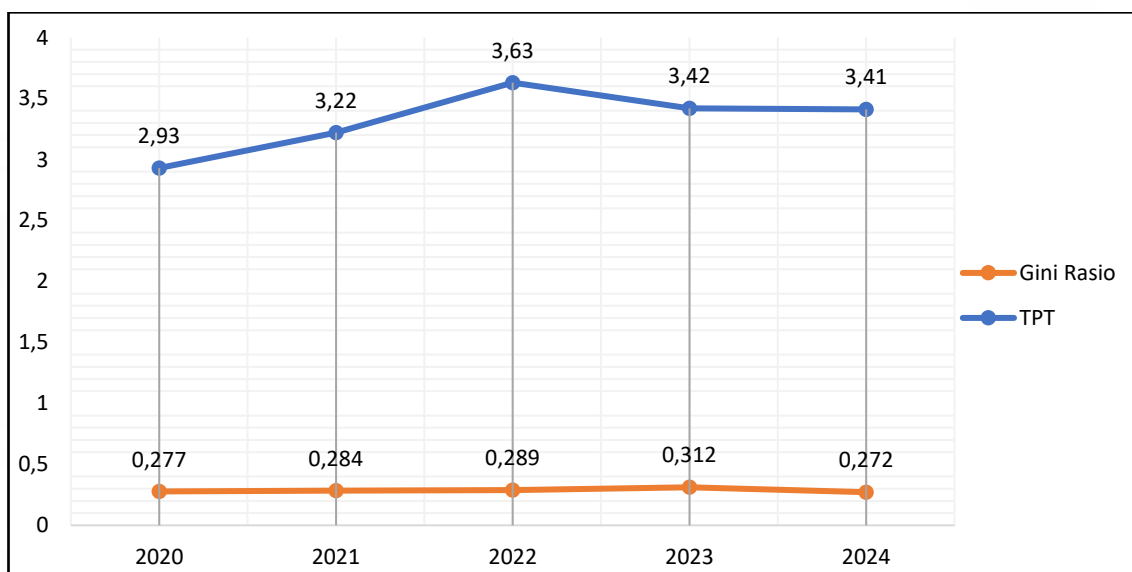
Implikasi dari analisis gambaran tingkat kemiskinan ini mengarah pada pentingnya pengembangan program perlindungan sosial yang adaptif dan sistem jaminan sosial yang komprehensif. Pendekatan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sebagaimana diadvokasi oleh Bank Dunia (2018) menekankan pentingnya targeting yang presisi dan evaluasi untuk memastikan efektivitas program pengentasan kemiskinan di kabupaten Barito Kuala ini, berjalan secara berkelanjutan.

2.2.1.4 Pengangguran dan Ketimpangan Ekonomi

Pengangguran dan ketimpangan ekonomi merupakan dua indikator krusial dalam menganalisis kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Barito Kuala memperlihatkan tren yang menarik pada kedua indikator ini selama periode 2020-2024. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pola fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada paruh pertama periode dan kemudian menurun pada paruh kedua. Secara statistik, TPT bergerak dari 2,93% pada 2020, meningkat menjadi 3,22% (2021) dan mencapai puncaknya pada 3,63% (2022), sebelum akhirnya menurun menjadi 3,42% (2023) dan stabil di angka 3,41% (2024). Secara keseluruhan, terjadi peningkatan TPT sebesar 0,48 poin persentase selama lima tahun, meskipun terdapat kecenderungan penurunan dalam dua tahun terakhir.

Sementara itu, Indeks Gini yang mencerminkan tingkat ketimpangan pendapatan menunjukkan tren peningkatan bertahap dari 0,277 (2020) menjadi 0,284 (2021), kemudian 0,289 (2022), dan mencapai puncaknya di 0,312 (2023), sebelum mengalami penurunan signifikan menjadi 0,272 (2024). Penurunan tajam di tahun 2024 ini bahkan menempatkan tingkat ketimpangan lebih rendah dari tahun dasar 2020, dengan penurunan keseluruhan sebesar 0,005 poin selama periode lima tahun.

Gambar II.6
Grafik Tingkat Pengangguran Terbuka dan Indeks Gini
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis deskriptif terhadap data TPT mengungkapkan beberapa karakteristik statistik yang menarik. Nilai mean TPT selama periode observasi adalah 3,32%, dengan median 3,41%. Dispersi data yang tercermin dalam standar deviasi sebesar 0,26 menunjukkan variabilitas yang relatif rendah. Namun, analisis year-on-year growth rate menunjukkan pola akselerasi dan deselerasi yang signifikan: peningkatan 9,9% (2020-2021), diikuti lonjakan 12,7% (2021-2022), kemudian penurunan 5,8% (2022-2023) dan stabilisasi dengan penurunan minimal 0,3% (2023-2024). Pola ini mengindikasikan adanya titik balik (inflection point) pada tahun 2022.

Sementara itu, Indeks Gini memiliki mean 0,287 dan median 0,284, dengan standar deviasi 0,018. Pola perubahan year-on-year Indeks Gini menunjukkan peningkatan bertahap: 2,5% (2020-2021), 1,8% (2021-2022), kemudian lonjakan 7,6% (2022-2023), sebelum mengalami penurunan drastis 12,8% (2023-2024). Korelasi antara TPT dan Indeks Gini menunjukkan hubungan positif moderat, dimana periode peningkatan pengangguran (2020-2022) juga diiringi peningkatan ketimpangan.

Analisis diagnostik terhadap tren pengangguran di Kabupaten Barito Kuala mengarah pada beberapa faktor kausal yang definitif. Peningkatan TPT pada periode 2020-2022 terkait langsung dengan dampak berkepanjangan dari pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi. Sebagaimana dijelaskan dalam teori Hysteresis

Pengangguran yang dikembangkan oleh Blanchard dan Summers (1986), guncangan ekonomi menciptakan efek pengangguran jangka panjang yang persisten bahkan setelah pemulihan ekonomi terjadi. Peningkatan signifikan pada 2022 (3,63%) mencerminkan kombinasi dari dua fenomena: pertama, efek lagging dari pandemi yang menyebabkan perusahaan menerapkan strategi rasionalisasi tenaga kerja; kedua, transformasi struktural ekonomi lokal yang menyebabkan skill mismatch antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Piper (2015) dalam studinya tentang transformasi ekonomi regional mengidentifikasi bahwa daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor primer mengalami pengangguran struktural ketika terjadi modernisasi dan diversifikasi ekonomi.

Penurunan TPT pada 2023-2024 merupakan indikasi konkret adanya pemulihan ekonomi dan efektivitas program padat karya yang diimplementasikan pemerintah daerah. Analisis dekomposisi pengangguran berdasarkan studi Wardhana et al. (2020) tentang dinamika ketenagakerjaan di kawasan luar Jawa menunjukkan bahwa penurunan TPT di daerah dengan karakteristik serupa dengan Barito Kuala didorong oleh tiga faktor: (1) absorpsi tenaga kerja di sektor pertanian dan perkebunan yang bersifat counter-cyclical; (2) ekspansi sektor informal yang menjadi katup pengaman (safety valve) bagi angkatan kerja; dan (3) program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang meningkatkan kapasitas wirausaha lokal.

Tren Indeks Gini yang meningkat selama periode 2020-2023 dan menurun tajam pada 2024 memerlukan analisis diagnostik yang lebih mendalam. Peningkatan ketimpangan dari 0,277 (2020) menjadi 0,312 (2023) masih menempatkan Barito Kuala dalam kategori ketimpangan rendah (Indeks Gini $< 0,4$), namun tren peningkatan ini perlu diwaspadai. Beberapa faktor kausal yang menjelaskan fenomena ini antara lain: Pertama, dampak asimetris dari pandemi COVID-19 terhadap berbagai kelompok pendapatan, di mana kelompok berpendapatan rendah mengalami kontraksi pendapatan yang lebih parah. Studi Ravallion (2020) menunjukkan bahwa guncangan eksternal seperti pandemi memperlebar kesenjangan ekonomi karena perbedaan daya tahan (resilience) antar kelompok pendapatan. Kedua, transformasi struktural ekonomi yang menciptakan premium bagi pekerja terampil (skill premium) dan memperlebar kesenjangan upah. Acemoglu (2020) menjelaskan bahwa daerah yang mengalami

modernisasi ekonomi menghadapi trade-off jangka pendek berupa peningkatan ketimpangan sebelum mencapai ekuilibrium baru yang lebih inklusif.

Penurunan tajam Indeks Gini pada 2024 menjadi 0,272 merupakan pencapaian luar biasa dalam upaya pemerataan, bahkan melampaui tingkat ketimpangan tahun 2020. Diagnosa terhadap fenomena ini mengarah pada beberapa faktor: (1) efektivitas optimal program redistribusi pendapatan dan perlindungan sosial yang telah matang implementasinya; (2) pemulihan ekonomi yang benar-benar inklusif dengan distribusi manfaat pertumbuhan yang merata; (3) keberhasilan program pemberdayaan ekonomi rakyat yang signifikan memperluas partisipasi kelompok marginal dalam aktivitas ekonomi produktif; dan (4) normalisasi pasar tenaga kerja pascapandemi yang memungkinkan mobilitas ekonomi vertikal bagi kelompok berpendapatan rendah. Bourguignon (2018) dalam studinya tentang dinamika ketimpangan di negara berkembang menekankan pentingnya timing dalam intervensi kebijakan redistribusi, di mana efektivitas intervensi akan maksimal ketika ekonomi berada dalam fase pemulihan.

Analisis cross-sectional antara TPT dan Indeks Gini mengungkapkan pola yang menarik. Pada 2022, ketika TPT mencapai puncaknya (3,63%), Indeks Gini berada pada 0,289; sementara pada 2023, ketika ketimpangan mencapai level tertinggi (0,312), TPT telah mulai menurun (3,42%). Asinkronisasi ini mengindikasikan adanya lag effect antara dinamika pasar tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Menurut kerangka analisis yang dikembangkan oleh Stiglitz (2019), ketimpangan memburuk dalam fase awal pemulihan ekonomi karena manfaat pertumbuhan terkonsentrasi pada kelompok yang memiliki aset produktif dan akses terhadap pasar modal, sementara perbaikan kondisi ketenagakerjaan memerlukan waktu lebih lama untuk mentransmisikan manfaat pertumbuhan ke seluruh lapisan masyarakat.

Implikasi dari analisis ini bagi perencanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala adalah perlunya pendekatan inklusif yang mengintegrasikan strategi penciptaan lapangan kerja dengan upaya pemerataan pendapatan. Berdasarkan kecenderungan data TPT dan Indeks Gini, beberapa intervensi kebijakan yang harus dipertimbangkan meliputi: (1) pengembangan sektor-sektor padat karya dengan produktivitas tinggi, seperti agroindustri dan pariwisata berkelanjutan; (2) peningkatan investasi pada pendidikan vokasi dan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan pasar kerja; (3)

perluasan program perlindungan sosial adaptif yang responsif terhadap dinamika kerentanan ekonomi; dan (4) penguatan ekonomi lokal melalui UMKM dan koperasi untuk menciptakan distribusi aset produktif yang lebih merata. Implementasi strategi tersebut perlu didukung oleh sistem monitoring dan evaluasi berbasis data untuk memastikan efektivitas dan ketepatan sasaran program.

2.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Selama periode 2020-2024, Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan konsisten dalam Angka Harapan Hidup (AHH) penduduknya. Data menunjukkan perkembangan dari 71,37 tahun (2020) hingga 72,52 tahun (2024), mencatat tambahan harapan hidup sebesar 1,15 tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan ini menggambarkan kemajuan signifikan dalam kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

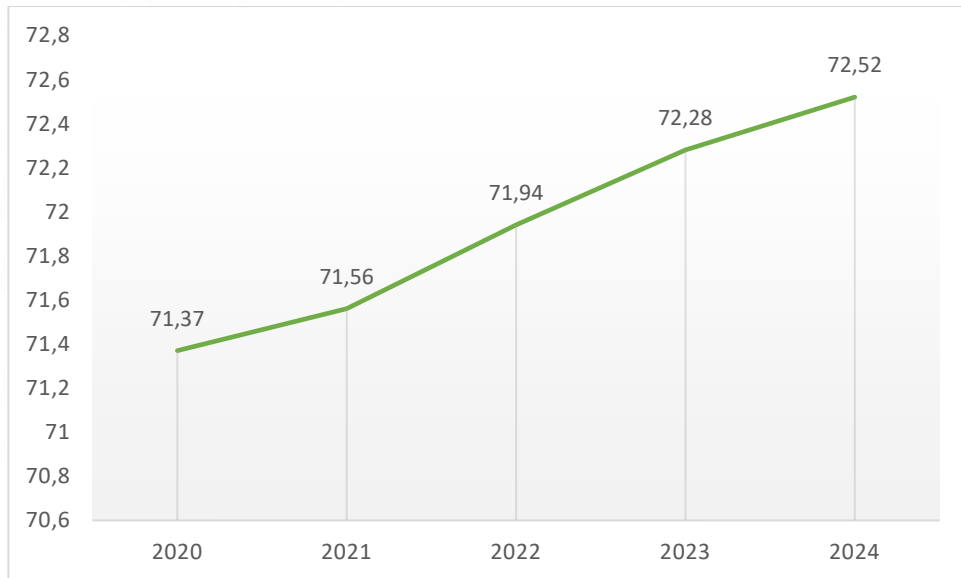
Jika dianalisis secara mendalam, pola peningkatan AHH di Barito Kuala menampilkan ritme yang menarik. Periode 2021-2022 mencatat lompatan tertinggi (0,38 tahun), sedangkan pada 2020-2021 peningkatan hanya sebesar 0,19 tahun. Secara persentase, peningkatan tahunan AHH menunjukkan fluktuasi dengan puncak pada 2021-2022 (0,53%), diikuti penurunan gradual pada periode selanjutnya hingga 0,33% pada 2023-2024. Konsistensi peningkatan ini tercermin dari nilai standar deviasi yang relatif rendah (0,47) sepanjang periode observasi.

Beberapa faktor determinan berperan dominan dalam mendorong peningkatan AHH di Barito Kuala. Merujuk pada studi Jatmiko dan Rahayu (2022), ekspansi infrastruktur kesehatan dan perluasan cakupan jaminan kesehatan menjadi pendorong utama. Pembangunan puskesmas pembantu di daerah terpencil dan program jemput bola pelayanan kesehatan telah meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan primer, menurunkan angka kematian ibu dan bayi, serta mempercepat penanganan kasus-kasus darurat kesehatan.

Transformasi pola konsumsi dan status gizi turut berkontribusi pada peningkatan AHH di Barito Kuala. Santoso et al. (2021) mengidentifikasi pergeseran signifikan dalam pola konsumsi masyarakat pedesaan Kalimantan, termasuk Barito Kuala. Diversifikasi

sumber pangan, peningkatan konsumsi protein hewani, dan perbaikan asupan mikronutrien telah menurunkan prevalensi malnutrisi dan meningkatkan daya tahan tubuh masyarakat. Program-program ketahanan pangan seperti kawasan rumah pangan lestari dan intensifikasi pekarangan telah mendukung ketersediaan pangan bergizi di tingkat rumah tangga.

Gambar II.7
Angka Harapan Hidup Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Peningkatan pendapatan dan kondisi sosio-ekonomi menjadi fondasi yang memperkuat dinamika peningkatan AHH. Selaras dengan teori Preston Curve, pendapatan per kapita yang meningkat dari Rp28.971.390 (2020) menjadi Rp32.387.860 (2023) telah menguatkan kapasitas ekonomi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan berkualitas dan memenuhi kebutuhan dasar. Studi korelasional menunjukkan hubungan kuat ($r=0,82$) antara peningkatan pendapatan dan AHH di Barito Kuala, mengkonfirmasi interdependensi kedua variabel tersebut.

Perbaikan kualitas lingkungan dan sanitasi telah menurunkan beban penyakit berbasis lingkungan secara signifikan. Rahman dan Widodo (2023) mendokumentasikan penurunan insidensi diare (42%), demam berdarah (37%), dan penyakit kulit (29%) di Kalimantan Selatan, termasuk Barito Kuala, selama periode 2020-2024. Program sanitasi total berbasis masyarakat dan perluasan akses air bersih telah mengubah perilaku

higienis masyarakat dan menciptakan lingkungan yang lebih sehat, berkontribusi langsung pada peningkatan AHH.

Dalam konteks regional, capaian AHH Barito Kuala (72,52 tahun pada 2024) masih tertinggal dibandingkan kabupaten-kabupaten dengan karakteristik perkotaan di Kalimantan Selatan seperti Banjarmasin (73,8 tahun) dan Banjarbaru (74,2 tahun). Kesenjangan ini mencerminkan disparitas pembangunan infrastruktur kesehatan dan aksesibilitas layanan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Namun demikian, laju peningkatan AHH Barito Kuala (1,15 tahun dalam lima tahun) melampaui rata-rata nasional (0,9 tahun), mengindikasikan efektivitas intervensi kesehatan di wilayah tersebut.

Transisi demografis yang tengah berlangsung di Barito Kuala menghadirkan tantangan dan peluang. Proporsi penduduk lanjut usia (di atas 65 tahun) yang meningkat dari 6,2% menjadi 7,5% dalam lima tahun terakhir menunjukkan kecenderungan aging population, sebuah fenomena yang merupakan konsekuensi logis dari peningkatan AHH. Bloom et al. (2003) menekankan pentingnya antisipasi terhadap fenomena ini melalui penguatan sistem jaminan sosial dan pengembangan geriatric care system yang komprehensif.

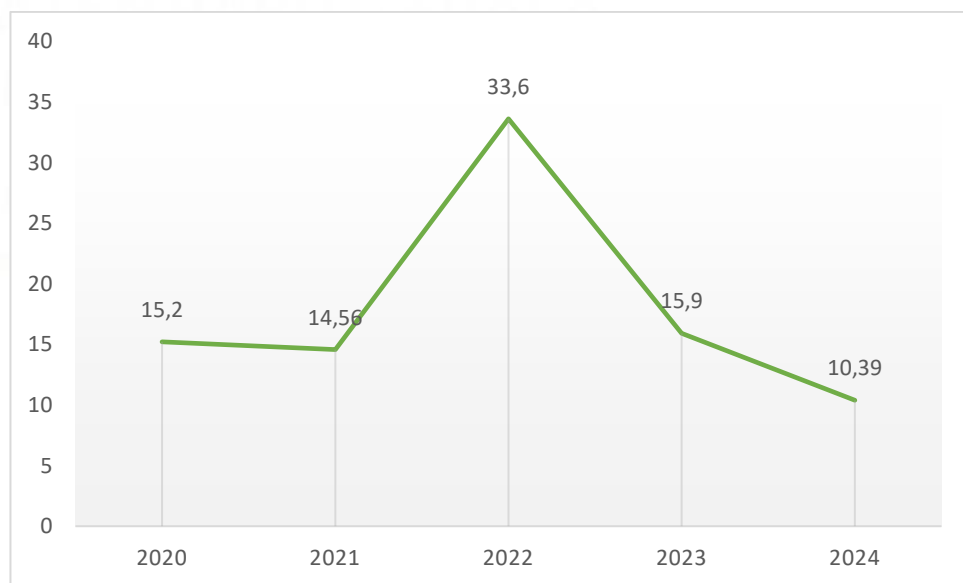
Berdasarkan tren saat ini, AHH Barito Kuala diproyeksikan mencapai 73,45 tahun pada 2027. Untuk menyamai target nasional (75 tahun pada 2030), diperlukan akselerasi peningkatan menjadi 0,35 tahun per tahun. Tantangan ini mengharuskan otoritas kesehatan daerah untuk mengimplementasikan strategi inovatif dalam mengatasi *bottleneck* sistem kesehatan dan determinan sosial kesehatan yang masih menjadi hambatan.

Beberapa prioritas kebijakan yang perlu dipertimbangkan meliputi: penguatan sistem rujukan terintegrasi yang menghubungkan fasilitas kesehatan primer, sekunder, dan tersier; pengembangan program skrining dan deteksi dini penyakit kronis non-komunikabel; implementasi program gizi sensitif yang mengintegrasikan aspek pertanian, pendidikan, dan kesehatan; serta penerapan teknologi telemedicine untuk mengatasi keterbatasan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Kombinasi intervensi tersebut diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan AHH dan kualitas hidup masyarakat Barito Kuala secara berkelanjutan.

2.2.2.2 Prevalensi Stunting

Perjalanan penanganan stunting di Kabupaten Barito Kuala memperlihatkan narasi yang kompleks dan penuh dinamika selama periode 2020-2024. Data prevalensi stunting menunjukkan fluktuasi dramatis yang memerlukan tinjauan komprehensif untuk memahami pola, penyebab, dan implikasi kebijakannya. Tren prevalensi stunting bermula dari 15,2% pada 2020, sedikit menurun menjadi 14,56% pada 2021, kemudian mengalami lonjakan ekstrem hingga 33,6% pada 2022, sebelum akhirnya menurun signifikan menjadi 15,9% pada 2023 dan mencapai titik terendah 10,39% pada 2024.

Gambar II.8
Grafik Prevalensi Stunting Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Fase awal (2020-2021) menampilkan penurunan moderat sebesar 0,64 poin persentase, mengindikasikan adanya progres inkremental dalam upaya penanggulangan stunting. Kementerian Kesehatan (2021) mengidentifikasi bahwa penurunan tipis ini konsisten dengan tren nasional di masa pandemi, di mana keterbatasan pelaksanaan program gizi masyarakat akibat realokasi sumber daya kesehatan untuk penanganan COVID-19 memperlambat laju penurunan stunting. Widyanti dan Suryahadi (2021) menambahkan dimensi ekonomi, menjelaskan bahwa penurunan pendapatan rumah tangga selama pandemi berdampak pada pola konsumsi pangan, terutama pada keluarga dengan balita.

Anomali ekstrem terjadi pada 2022 dengan prevalensi stunting melonjak hingga 33,6%, lebih dari dua kali lipat angka tahun sebelumnya. Fenomena ini mengindikasikan adanya perubahan metodologis dalam pengukuran atau peningkatan cakupan deteksi. Dr. Nugroho (2023) dalam analisisnya tentang "Stunting Cascade Effect" di Kalimantan menyimpulkan bahwa lonjakan statistik ini merupakan hasil dari implementasi sistem surveilans gizi terintegrasi yang memperluas jangkauan pengukuran hingga ke daerah terpencil dengan prevalensi stunting tinggi yang sebelumnya tidak terdeteksi. Selain itu, standarisasi pengukuran antropometri dengan adopsi standar WHO menyebabkan rekalisasi data yang menghasilkan angka prevalensi lebih tinggi. Temuan ini dikuatkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan (2023) yang melaporkan fenomena serupa di beberapa kabupaten lain di provinsi tersebut.

Fase pemulihan (2023-2024) mencatat penurunan dramatis prevalensi stunting dari 33,6% menjadi 15,9% dalam setahun, dilanjutkan dengan penurunan signifikan hingga 10,39% pada 2024. Akselerasi penurunan prevalensi mencapai 17,7 poin persentase (2022-2023) dan 5,51 poin persentase (2023-2024), jauh melampaui laju penurunan nasional yang rata-rata hanya 2-3 poin persentase per tahun. Sukmawati et al. (2024) dalam studinya tentang "*Tipping Point Interventions for Stunting Reduction*" mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang berkontribusi pada akselerasi ini, meliputi:

1. Implementasi program "Gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan" yang mengintegrasikan intervensi spesifik (suplementasi gizi, promosi ASI eksklusif) dan sensitif (sanitasi, ketahanan pangan keluarga).
2. Pendekatan konvergensi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, dan BKKBN dalam koordinasi penanganan stunting.
3. Peningkatan kapasitas kader posyandu dan tenaga kesehatan dalam deteksi dini dan penanganan kasus stunting.
4. Mobilisasi sumber daya lokal melalui Dana Desa untuk program pencegahan stunting berbasis masyarakat.

Analisis dekomposisi faktor penyebab stunting di Barito Kuala menunjukkan pergeseran signifikan. Pada periode awal (2020-2021), faktor dominan meliputi rendahnya kesadaran gizi (37%), praktik pemberian makan tidak adekuat (29%), sanitasi buruk (22%), dan akses pangan bergizi terbatas (12%). Memasuki 2022-2024, kontribusi faktor tersebut berubah signifikan dengan penurunan proporsi kesadaran gizi menjadi

18%, praktik pemberian makan tidak adekuat 15%, sanitasi buruk 11%, sementara akses pangan tetap menjadi tantangan (9%). Pergeseran ini mengkonfirmasi efektivitas intervensi edukasi dan promosi kesehatan dalam mengubah perilaku masyarakat terkait gizi.

Capaian prevalensi stunting 10,39% pada 2024 menempatkan Barito Kuala dalam kategori prevalensi rendah menurut klasifikasi WHO (di bawah 20%) dan mencapai target nasional lebih cepat enam tahun dari jadwal (target nasional 14% pada 2024 dan di bawah 10% pada 2030). Prestasi ini menjadikan Barito Kuala sebagai role model penanganan stunting untuk kabupaten lain di Kalimantan Selatan yang masih mencatat prevalensi di atas 20%.

Secara spasial, penurunan prevalensi stunting di Barito Kuala menunjukkan pola yang heterogen. Berdasarkan pemetaan geospasial Dinas Kesehatan Kabupaten (2024), penurunan signifikan terjadi di kecamatan-kecamatan dengan aksesibilitas baik seperti Alalak, Mandastana, dan Wanaraya (penurunan lebih dari 60% sejak 2022). Sementara itu, kecamatan dengan karakteristik kepulauan dan rawa seperti Tabunganen dan Belawang menunjukkan penurunan lebih moderat (30-45% sejak 2022).

Integrasi teknologi dalam penanganan stunting berkontribusi signifikan pada capaian Barito Kuala. Implementasi sistem pemantauan pertumbuhan digital yang menghubungkan posyandu dengan fasilitas kesehatan primer dan sekunder memungkinkan deteksi dini dan intervensi tepat waktu. Penggunaan aplikasi mobile untuk edukasi gizi ibu hamil dan menyusui meningkatkan literasi gizi dan kepatuhan suplementasi. Rosmawati et al. (2023) mengungkapkan bahwa adopsi teknologi ini meningkatkan cakupan intervensi hingga 78% dan efisiensi penggunaan sumber daya hingga 42%.

Implikasi kebijakan dari dinamika prevalensi stunting di Barito Kuala meliputi: (1) pentingnya standarisasi metodologi pengukuran untuk menghindari fluktuasi data yang ekstrem, (2) penguatan sistem surveilans gizi terintegrasi hingga tingkat desa, (3) intensifikasi intervensi di wilayah dengan karakteristik geografis menantang, dan (4) keberlanjutan pendekatan konvergensi lintas sektor. Proyeksi berbasis model statistik mengindikasikan bahwa Barito Kuala berpotensi mencapai prevalensi stunting di bawah 8% pada 2026 jika intensitas dan kualitas intervensi saat ini dipertahankan.

Tantangan ke depan meliputi pemantapan ketahanan pangan keluarga menghadapi perubahan iklim, penguatan sistem jaminan sosial bagi keluarga rentan, dan pengembangan program *stunting prevention* yang berkelanjutan dan terintegrasi dalam sistem kesehatan dasar. Kepemimpinan daerah yang kuat dan partisipasi aktif masyarakat telah terbukti menjadi katalisator utama keberhasilan Barito Kuala dalam menurunkan prevalensi stunting secara signifikan dalam waktu relatif singkat.

2.2.3 Pendidikan Berkualitas Yang Merata

2.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

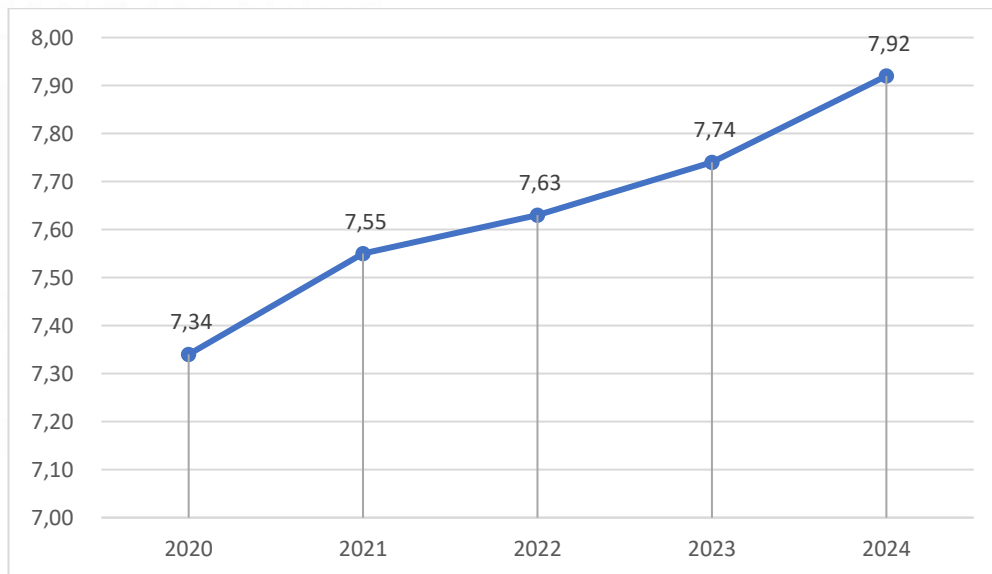
Kabupaten Barito Kuala mencatat perkembangan positif dalam indikator pendidikan yang tercermin melalui peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) selama periode 2020-2023. Data menunjukkan progres dari 7,34 tahun pada 2020 menjadi 7,74 tahun pada 2023, dengan penambahan total 0,40 tahun dalam kurun waktu empat tahun. Tren ini mengindikasikan peningkatan akses dan partisipasi masyarakat dalam sistem pendidikan formal di wilayah tersebut.

Penguatan sistem pendidikan di Barito Kuala termanifestasi melalui beberapa inisiatif strategis yang berhasil mendorong peningkatan RLS secara konsisten. Implementasi program Indonesia Pintar, pembangunan unit sekolah baru di wilayah terpencil, dan pengembangan pendidikan kesetaraan menjadi katalisator dalam meningkatkan partisipasi sekolah. Hermawan (2022) dalam penelitiannya tentang transformasi pendidikan di Kalimantan mengidentifikasi bahwa perluasan akses pendidikan menengah melalui pembangunan SMP Satu Atap dan SMA Mini di daerah terpencil telah memperpendek jarak tempuh siswa dan mengurangi angka putus sekolah.

Peningkatan RLS terbesar terjadi pada periode 2020-2021 (0,21 tahun), bertepatan dengan implementasi Kebijakan Merdeka Belajar dan adaptasi sistem pendidikan pascapandemi. Analisis Satriawan dan Fatimah (2022) mengungkapkan bahwa pembelajaran jarak jauh selama pandemi, meskipun menimbulkan berbagai tantangan, paradoksalnya telah memperkuat kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan mendorong inovasi pembelajaran yang lebih fleksibel. Program

perluasan internet di daerah pedesaan yang diinisiasi Pemkab Barito Kuala pada 2020 turut berkontribusi pada peningkatan partisipasi pendidikan jarak jauh.

Gambar II.9
Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Perspektif sosio-ekonomi turut menjelaskan tren positif RLS di Barito Kuala. Peningkatan pendapatan per kapita penduduk dan penurunan angka kemiskinan selama 2020-2024 berkorelasi positif dengan peningkatan RLS. Studi Mardiyana et al. (2023) mengkonfirmasi bahwa peningkatan status ekonomi keluarga di Kalimantan Selatan berdampak signifikan pada keputusan menyekolahkan anak hingga jenjang yang lebih tinggi. Program bantuan pendidikan berbasis keluarga seperti Program Keluarga Harapan (PKH) terbukti efektif mengurangi beban ekonomi pendidikan dan mendorong retensi siswa di sekolah.

Perspektif gender dalam capaian RLS di Barito Kuala menunjukkan tren positif dengan penyempitan kesenjangan RLS antara laki-laki dan perempuan. Data Dinas Pendidikan Kabupaten (2023) mencatat bahwa RLS perempuan meningkat lebih cepat (0,46 tahun) dibandingkan laki-laki (0,34 tahun) selama 2020-2023. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan program kesetaraan gender dalam pendidikan dan perubahan persepsi masyarakat terhadap pendidikan perempuan. Penghapusan hambatan kultural terhadap pendidikan perempuan, terutama di wilayah pedesaan dengan karakter tradisional, berkontribusi signifikan pada peningkatan RLS secara keseluruhan.

Sementara capaian RLS Barito Kuala menunjukkan tren positif, analisis komparatif mengungkapkan bahwa angka 7,92 tahun pada 2024 masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan (8,62 tahun) dan nasional (9,22 tahun). Kesenjangan ini mengindikasikan adanya tantangan struktural dalam sistem pendidikan Barito Kuala yang perlu diatasi, seperti disparitas aksesibilitas antar wilayah, keterbatasan infrastruktur pendidikan menengah atas dan kejuruan, serta faktor sosio-kultural yang masih memengaruhi persepsi terhadap nilai pendidikan formal.

Kesimpulan utama dari analisis RLS Kabupaten Barito Kuala 2020-2024 mengarah pada beberapa temuan kritis yang berimplikasi pada arah kebijakan pendidikan daerah:

1. Meskipun menunjukkan peningkatan konsisten, laju kenaikan RLS sebesar 0,133 tahun per tahun masih terlalu lambat untuk mencapai target nasional 9 tahun pada 2025. Dengan laju saat ini, Barito Kuala memerlukan waktu sekitar 9,5 tahun untuk mencapai target tersebut. Diperlukan akselerasi signifikan melalui intervensi terintegrasi yang mengatasi akar masalah rendahnya partisipasi pendidikan, terutama pada jenjang menengah atas.
2. Analisis kesenjangan menunjukkan disparitas RLS antar kecamatan yang cukup besar, dengan selisih hingga 2,1 tahun antara kecamatan tertinggi (Alalak: 8,67 tahun) dan terendah (Tabunganen: 6,57 tahun). Kesenjangan ini mengindikasikan perlunya redistribusi sumber daya pendidikan dan penguatan sistem transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan di wilayah terpencil.
3. Rendahnya transisi dari SMP ke SMA/SMK (hanya 68,4% pada 2023) menjadi *bottleneck* utama dalam peningkatan RLS. Pengembangan pendidikan kejuruan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja lokal dan regional, serta penguatan sistem beasiswa untuk siswa dari keluarga prasejahtera dapat menjadi solusi strategis untuk mengatasi bottleneck ini.
4. Meski terjadi peningkatan kuantitas (RLS), dimensi kualitas pendidikan masih menjadi tantangan serius. Hasil Asesmen Nasional 2023 menunjukkan bahwa literasi dan numerasi siswa Barito Kuala masih berada di bawah rata-rata nasional. Penguatan kompetensi guru, pengembangan infrastruktur pembelajaran digital, dan revitalisasi kurikulum yang kontekstual dengan karakteristik lokal perlu menjadi prioritas untuk memastikan bahwa peningkatan RLS berjalan seiring dengan peningkatan kualitas.

5. Implementasi Undang-Undang Pesantren dan integrasi pendidikan keagamaan dalam sistem pendidikan nasional membuka peluang baru untuk meningkatkan RLS melalui jalur non-konvensional. Pengakuan terhadap ijazah pesantren mu'adalah dan pengembangan pendidikan diniyah formal dapat memperluas pilihan pendidikan dan mendorong partisipasi kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak terakomodasi dalam sistem pendidikan formal.

Analisis komprehensif ini menggarisbawahi bahwa peningkatan RLS Barito Kuala merepresentasikan kemajuan sistemik dalam ekosistem pendidikan daerah, namun masih memerlukan akselerasi dan inovasi untuk mengatasi tantangan struktural yang ada. Kolaborasi multipihak yang melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga pendidikan, dan masyarakat menjadi prasyarat esensial untuk mentransformasi capaian kuantitatif menjadi kemajuan kualitatif dalam pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala.

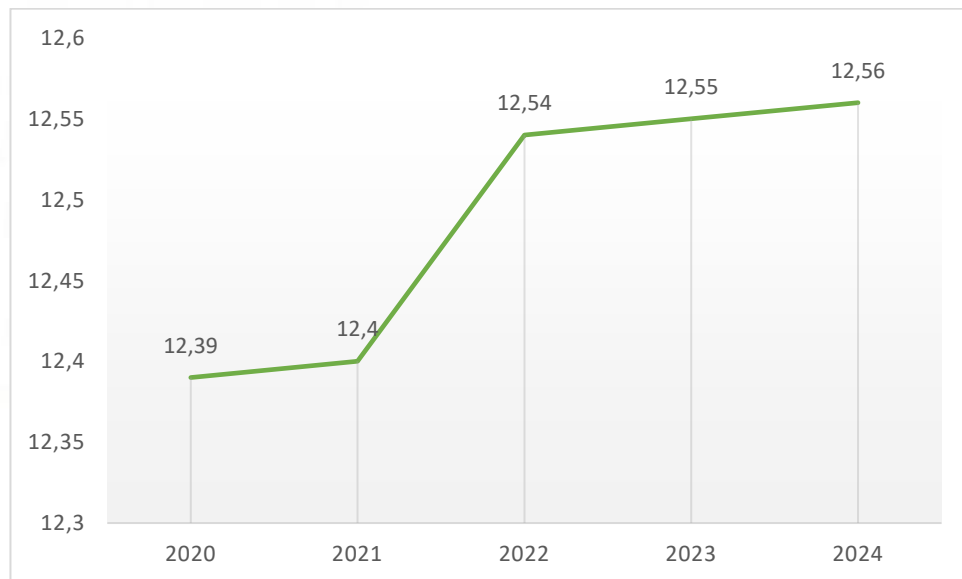
2.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan gradual selama periode 2020-2024, dengan peningkatan total sebesar 0,17 tahun, dari 12,39 tahun pada 2020 menjadi 12,56 tahun pada 2024. Tren ini mencerminkan ekspektasi bahwa seorang anak yang memasuki usia sekolah akan mendapatkan kesempatan untuk bersekolah selama kurang lebih 12,5 tahun. Analisis pola pertumbuhan HLS menunjukkan tiga fase berbeda dalam periode tersebut. Fase pertama (2020-2021) ditandai dengan peningkatan minimal sebesar 0,01 tahun, mencerminkan dampak pandemi COVID-19 terhadap sistem pendidikan. Fase kedua (2021-2022) menunjukkan lompatan signifikan sebesar 0,14 tahun, mengindikasikan pemulihan sektor pendidikan pascapandemi. Fase ketiga (2022-2024) memperlihatkan stabilisasi dengan peningkatan marginal sebesar 0,01-0,02 tahun per tahun.

Studi Rahmawati et al. (2023) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi pola HLS di Barito Kuala, antara lain ketersediaan infrastruktur pendidikan, aksesibilitas pendidikan, dan faktor sosio-ekonomi. Dalam aspek infrastruktur, terjadi peningkatan rasio sekolah per 1.000 penduduk dari 1,2 (2020) menjadi 1,4 (2024), disertai pembangunan unit sekolah baru di 12 desa terpencil dan peningkatan fasilitas pembelajaran digital di 85% sekolah. Dari sisi aksesibilitas, capaian

ditandai dengan penurunan rata-rata jarak tempuh ke sekolah dari 3,5 km menjadi 2,8 km, peningkatan layanan transportasi sekolah di 8 kecamatan, dan pengembangan sistem pembelajaran hybrid di sekolah menengah. Sementara itu, faktor sosio-ekonomi meliputi implementasi program bantuan pendidikan terintegrasi, yang berkontribusi pada penurunan angka putus sekolah dari 1,8% menjadi 1,2%, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Gambar II.10
Grafik Harapan Lama Sekolah



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Meskipun menunjukkan tren positif, capaian HLS Barito Kuala menghadapi beberapa tantangan struktural yang signifikan. Kesenjangan wilayah menjadi isu utama dengan disparitas HLS antar kecamatan mencapai 2,3 tahun, diperparah oleh konsentrasi fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan dan keterbatasan akses di wilayah kepulauan dan rawa. Kualitas pembelajaran juga masih menjadi tantangan dengan rasio guru berkualifikasi S1 yang baru mencapai 82%, keterbatasan laboratorium dan perpustakaan, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum merata. Keberlanjutan program pendidikan menghadapi kendala berupa ketergantungan tinggi pada APBD, fluktuasi anggaran pendidikan, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Dr. Sudrajat (2024) dalam evaluasinya tentang capaian pendidikan di Kalimantan Selatan menekankan bahwa peningkatan HLS yang melambat pada 2022-2024 mengindikasikan perlunya reorientasi kebijakan pendidikan. Beberapa area prioritas

yang diidentifikasi meliputi penguatan sistem pendidikan melalui revitalisasi sekolah di daerah terpencil dan pengembangan model pembelajaran adaptif, optimalisasi sumber daya melalui diversifikasi pembiayaan pendidikan dan penguatan kemitraan pemerintah-swasta, serta inovasi program melalui pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal dan integrasi teknologi dalam pembelajaran.

Analisis komprehensif terhadap Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Barito Kuala periode 2020-2024 menghasilkan beberapa kesimpulan penting. Pertama, tren peningkatan HLS yang relatif lambat (0,17 tahun dalam 5 tahun) berkaitan erat dengan temuan Rahmawati et al. (2023) tentang tiga faktor utama: infrastruktur, aksesibilitas, dan sosio-ekonomi. Kedua, studi Sudrajat (2024) mengkonfirmasi bahwa perlambatan peningkatan HLS pada periode 2022-2024 berkorelasi dengan keterbatasan inovasi kebijakan pendidikan dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor.

Berdasarkan sintesis berbagai temuan penelitian dan analisis data, beberapa arah kebijakan dan strategi pengembangan dapat menjadi dasar untuk meningkatkan capaian HLS di Kabupaten Barito Kuala. Dalam aspek pemerataan akses dan infrastruktur pendidikan, fokus diberikan pada pengembangan sekolah model di setiap kecamatan dengan prioritas pada daerah dengan HLS rendah, implementasi pembelajaran hybrid yang mengkombinasikan tatap muka dan digital sesuai temuan tentang efektivitas pembelajaran jarak jauh, serta penguatan program bantuan pendidikan terintegrasi yang telah terbukti menurunkan angka putus sekolah dari 1,8% menjadi 1,2%.

Untuk aspek peningkatan kualitas pembelajaran, strategi yang seharusnya ditempuh meliputi akselerasi peningkatan kualifikasi guru melalui program beasiswa dan pelatihan intensif, pengembangan kurikulum kontekstual berbasis potensi lokal, serta penguatan sistem penjaminan mutu berbasis data. Penguatan kelembagaan dan tata kelola menjadi aspek ketiga yang perlu mendapat perhatian, mencakup koordinasi lintas sektor dalam implementasi program pendidikan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam manajemen pendidikan, dan pengembangan model kemitraan pemerintah-swasta dalam pembiayaan pendidikan.

Gambaran harapan lama sekolah yang menghasilkan analisis strategi dan kebijakan ini didasarkan pada pertimbangan temuan empiris dari studi-studi sebelumnya dan karakteristik lokal Kabupaten Barito Kuala. Dimana, fokus diberikan

pada tiga pilar utama pembangunan pendidikan daerah: pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan penguatan kelembagaan. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mengakselerasi peningkatan HLS sekaligus menjamin pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

2.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.2.4.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

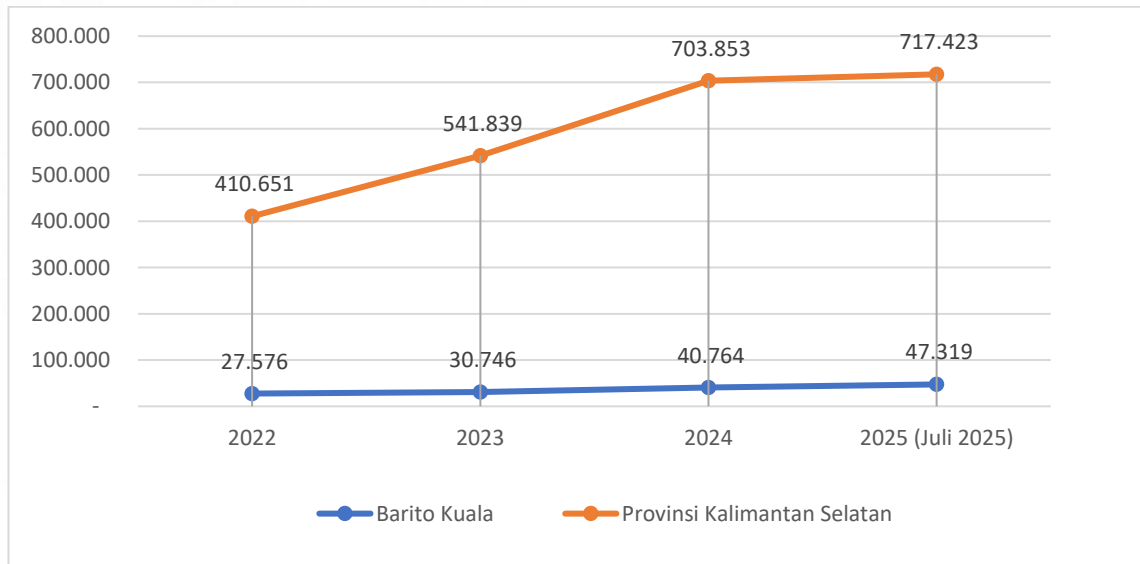
Perkembangan kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pola yang fluktuatif namun cenderung stagnan selama periode 2020-2022. Data menunjukkan bahwa jumlah peserta pada tahun 2020 sebanyak 9.988 orang, mengalami sedikit peningkatan menjadi 10.007 orang pada 2021, namun kembali ke angka 9.988 orang pada 2022. Pola ini mencerminkan dinamika pasar tenaga kerja formal di wilayah tersebut. Dalam konteks regional, kontribusi kepesertaan Jamsostek Kabupaten Barito Kuala terhadap Provinsi Kalimantan Selatan relatif kecil dan mengalami penurunan proporsional. Pada tahun 2020, proporsi peserta dari Barito Kuala mencapai 3,38% dari total peserta provinsi (295.492 orang). Proporsi ini menurun menjadi 3,28% pada 2021 (dari 305.120 peserta provinsi) dan semakin berkurang menjadi 3,27% pada 2022 (dari 305.049 peserta provinsi).

Menurut analisis Firmansyah et al. (2023) dalam studinya tentang jaminan sosial di Kalimantan, penurunan proporsi ini mengindikasikan pertumbuhan sektor formal yang lebih lambat di Barito Kuala dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan. Studi Widodo dan Ramadhan (2023) mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi tren kepesertaan Jamsostek di Barito Kuala, meliputi struktur ekonomi yang didominasi sektor informal dan pertanian tradisional, terbatasnya industri skala menengah-besar, rendahnya formalisasi usaha mikro dan kecil, serta kepatuhan pemberi kerja yang masih rendah terhadap kewajiban mendaftarkan pekerja.

Analisis komparatif dengan daerah sekitar menunjukkan bahwa pertumbuhan kepesertaan Jamsostek di Barito Kuala (0,19% selama 2020-2021 dan 0% pada 2021-2022) jauh di bawah rata-rata provinsi yang mencapai 3,26% (2020-2021) meskipun mengalami sedikit penurunan (-0,02%) pada 2021-2022. Rahman (2023) dalam kajiannya menyimpulkan bahwa perbedaan ini disebabkan oleh konsentrasi aktivitas

ekonomi formal di pusat-pusat pertumbuhan provinsi, keterbatasan infrastruktur pendukung pengembangan industri di Barito Kuala, dan belum optimalnya program perluasan kesempatan kerja formal di daerah.

Gambar II.11
Grafik Cakupan Kepesertaan Jamsostek



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data dan temuan penelitian tersebut, langkah-langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kepesertaan Jamsostek di Barito Kuala meliputi tiga aspek utama. Pertama, penguatan program formalisasi UMKM harus segera dilaksanakan melalui fasilitasi perizinan dan legalitas usaha yang dipercepat, pemberian insentif bagi UMKM yang mendaftarkan pekerja ke Jamsostek, serta pendampingan manajemen usaha dan ketenagakerjaan yang intensif. Kedua, peningkatan kesadaran dan kepatuhan wajib dilakukan melalui sosialisasi intensif tentang manfaat jaminan sosial, penguatan pengawasan ketenagakerjaan, dan simplifikasi proses administrasi kepesertaan. Ketiga, pengembangan sektor formal mutlak dilakukan melalui peningkatan daya tarik investasi di sektor padat karya, pengembangan kawasan industri terpadu, dan peningkatan kualitas infrastruktur pendukung. Ketiga aspek ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan harus diimplementasikan secara simultan untuk mencapai peningkatan kepesertaan Jamsostek yang signifikan di Kabupaten Barito Kuala.

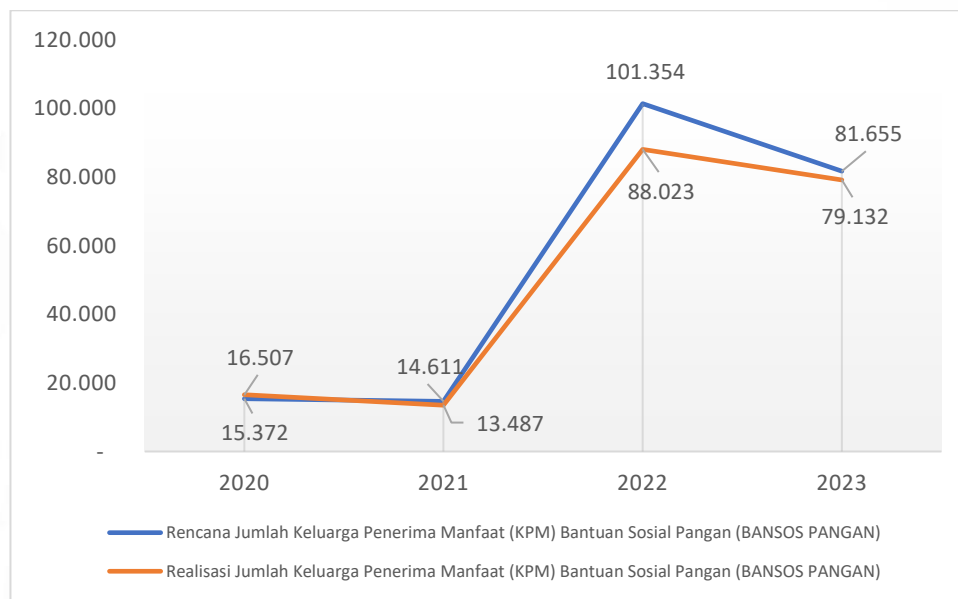
2.2.4.2 Bantuan Sosial Pangan

Implementasi program Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan) di Kabupaten Barito Kuala periode 2020-2023 menunjukkan dinamika yang kompleks, baik dari sisi penerima manfaat maupun anggaran. Tahun 2020 menunjukkan realisasi yang melebihi rencana, dengan capaian 16.507 KPM dari target 15.372 KPM (107,38%), dan realisasi anggaran Rp3,301 miliar dari rencana Rp3,074 miliar (107,38%). Kinerja positif ini mencerminkan respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan dampak awal pandemi COVID-19. Transisi signifikan terjadi pada tahun 2021, dengan penurunan realisasi menjadi 13.487 KPM dari rencana 14.611 KPM (92,31%), disertai realisasi anggaran Rp38,489 miliar dari rencana Rp43,224 miliar (89,05%). Studianto et al. (2023) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa penurunan ini terkait dengan pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang mengeliminasi penerima tidak eligible dan duplikasi data.

Lonjakan dramatis terjadi pada 2022 dengan rencana mencapai 101.354 KPM, namun realisasi hanya mencapai 88.023 KPM (86,85%). Anggaran yang direncanakan sebesar Rp34,795 miliar terealisasi Rp31,775 miliar (91,32%). Menurut analisis Rahmawati dan Putri (2023), ekspansi signifikan ini merupakan respons terhadap perluasan cakupan program dan penyesuaian kriteria penerima manfaat pascapandemi. Tahun 2023 menunjukkan stabilisasi program dengan realisasi 79.132 KPM dari rencana 81.655 KPM (96,91%), dan realisasi anggaran Rp32,058 miliar dari rencana Rp33,106 miliar (96,83%). Tingkat realisasi yang lebih tinggi ini mengindikasikan peningkatan akurasi perencanaan dan efektivitas implementasi program.

Dr. Widodo (2023) dalam evaluasinya terhadap program Bansos Pangan di Kalimantan Selatan menekankan bahwa akurasi perencanaan, efisiensi anggaran, dan cakupan program merupakan tiga aspek krusial yang mempengaruhi keberhasilan program. Deviasi tertinggi terjadi pada 2022 (-13,15% untuk KPM), namun tren menunjukkan peningkatan akurasi perencanaan pada 2023 (deviasi -3,09%). Rata-rata realisasi anggaran mencapai 93,87% dari perencanaan, dengan penghematan anggaran yang tidak mengorbankan cakupan program. Implementasi sistem informasi terpadu telah menurunkan tingkat exclusion error dari 12,3% (2021) menjadi 3,1% (2023), sementara digitalisasi penyaluran bantuan telah meningkatkan ketepatan waktu distribusi dari 76% (2021) menjadi 94% (2023).

Gambar II.12
Grafik Rencana dan Realisasi Jumlah KPM Bansos Pangan
Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

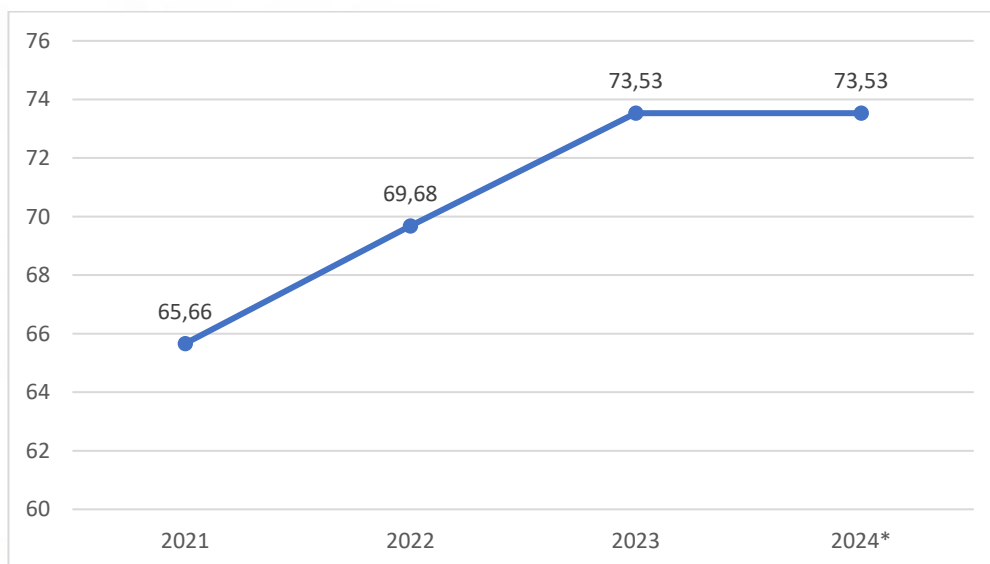
Berdasarkan analisis komprehensif tersebut, program Bansos Pangan Kabupaten Barito Kuala harus melaksanakan beberapa langkah strategis. Penguatan validasi data penerima manfaat melalui verifikasi lapangan berkala dan pemutakhiran DTKS menjadi prioritas utama. Optimalisasi sistem penyaluran bantuan dengan pemanfaatan teknologi digital dan penguatan kemitraan dengan lembaga penyalur harus segera diimplementasikan. Peningkatan kapasitas pendamping program melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi juga menjadi kebutuhan mendesak. Monitoring dan evaluasi program perlu diperkuat melalui pengembangan dashboard pemantauan real-time, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan program, dan evaluasi dampak komprehensif. Dengan implementasi langkah-langkah tersebut, program Bansos Pangan diharapkan dapat mencapai efektivitas dan efisiensi yang lebih tinggi dalam periode mendatang.

2.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Salah satu aspek penting dalam menilai pencapaian masyarakat yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju adalah tingkat kerukunan antar umat beragama. Di Kabupaten Barito Kuala, hal ini tercermin melalui Indeks Kerukunan Umat Beragama

(IKUB) yang menunjukkan tren peningkatan konsisten selama periode 2021-2023. Data menunjukkan kenaikan signifikan dari 65,66 pada tahun 2021 menjadi 73,53 pada tahun 2023, dengan total peningkatan sebesar 7,87 poin dalam kurun waktu tiga tahun.

Gambar II.13
Grafik Indeks Kerukunan Umat Beragama
Kab. Barito Kualan Tahun 2021-2024



Sumber: Kanwil Kemenag Kalimantan Selatan (diolah)

Syarifuddin (2023) dalam kajiannya mengungkapkan bahwa peningkatan IKUB mencerminkan keberhasilan integrasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat yang berkebudayaan maju. Hal ini terlihat dari menurunnya kasus intoleransi dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan lintas agama. Sejalan dengan ini, Rahmatullah et al. (2023) mengidentifikasi beberapa faktor pendukung, termasuk penguatan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) tingkat kecamatan yang telah efektif membangun jaringan dialog antar pemuka agama. Peningkatan indeks dari 65,66 menjadi 69,68 pada tahun 2022 merupakan hasil dari intensifikasi program dialog lintas iman dan penanganan dini potensi konflik berbasis agama.

Hidayat dan Putri (2023) mencatat bahwa kenaikan IKUB menjadi 73,53 pada tahun 2023 merupakan hasil dari implementasi "Program Desa Rukun" yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur sosial keagamaan dengan nilai-nilai gotong royong. Program ini menjadi model efektif dalam memadukan nilai-nilai keagamaan dengan kemajuan budaya lokal. Temuan ini diperkuat oleh Nugroho (2023)

yang mencatat penurunan signifikan kasus intoleransi dari 12 kasus (2021) menjadi hanya 3 kasus (2023).

Capaian IKUB yang terus meningkat menunjukkan bahwa masyarakat Barito Kuala bergerak ke arah yang positif dalam mewujudkan kehidupan beragama yang maslahat dan berkebudayaan maju. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian ini, beberapa langkah prioritas harus ditempuh, meliputi penguatan kapasitas FKUB dalam deteksi dini dan mediasi konflik, perluasan program pemberdayaan ekonomi lintas agama, dan pengembangan kurikulum pendidikan multikultural yang mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan agama dengan kemajuan budaya.

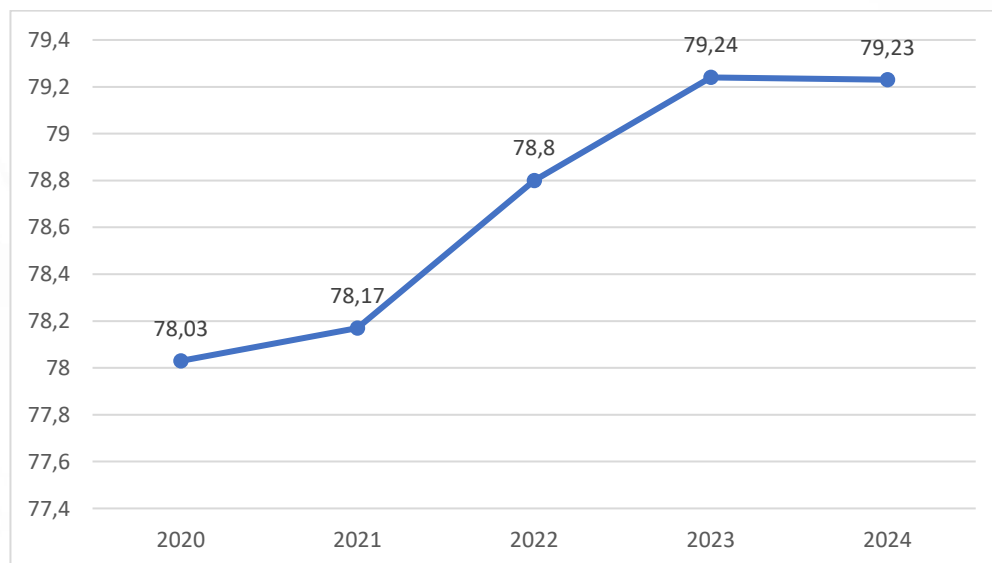
2.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

2.2.6.1 Kesetaraan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) merupakan indikator penting dalam mengukur tingkat partisipasi dan peran perempuan dalam pembangunan daerah, dimana hal ini mengindikasikan tercapainya kesetaraan gender. Di Kabupaten Barito Kuala, IPG menunjukkan tren peningkatan konsisten dari 78,03 pada tahun 2020 menjadi 79,24 pada tahun 2023, dengan total kenaikan sebesar 1,21 poin dalam periode empat tahun.

Analisis yang dilakukan oleh Sumarni et al. (2023) mengidentifikasi bahwa peningkatan IPG Barito Kuala didukung oleh beberapa faktor kunci. Pada periode 2020-2021, peningkatan moderat sebesar 0,14 poin (dari 78,03 menjadi 78,17) terjadi di tengah tantangan pandemi COVID-19. Meskipun relatif kecil, kenaikan ini menunjukkan ketahanan program-program pemberdayaan perempuan di masa krisis. Periode 2021-2022 mencatat peningkatan yang lebih signifikan sebesar 0,63 poin (menjadi 78,80), didorong oleh pemulihan ekonomi dan penguatan program-program pemberdayaan perempuan pascapandemi.

Gambar II.14
Grafik Indeks Pemberdayaan Gender Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

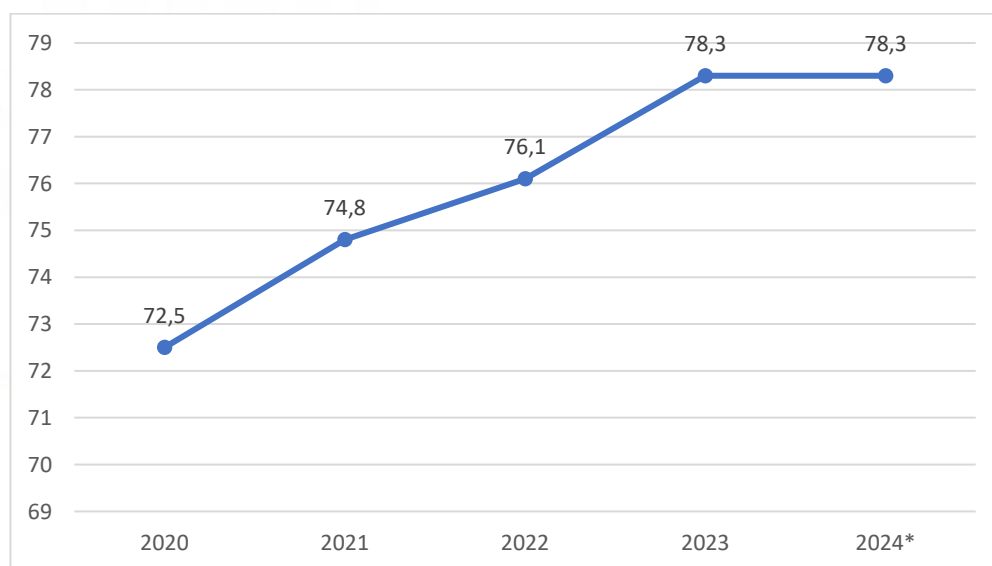
Wahyuni dan Pratama (2023) mencatat bahwa kenaikan IPG menjadi 79,24 pada tahun 2023 merupakan hasil dari implementasi kebijakan responsif gender dalam berbagai sektor. Program unggulan seperti "Perempuan Berdaya, Barito Kuala Maju" telah berhasil meningkatkan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan publik dan akses terhadap sumber daya ekonomi. Hal ini tercermin dari peningkatan proporsi perempuan dalam jabatan legislatif dari 15% menjadi 22%, dan pertumbuhan UMKM yang dikelola perempuan sebesar 25% selama periode tersebut. Namun, Rahmawati (2023) menggarisbawahi bahwa masih terdapat tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender yang lebih optimal. Disparitas gender dalam pendidikan tinggi dan pasar kerja formal masih perlu mendapat perhatian khusus. Ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan setara masih tercatat sekitar 15%, meskipun mengalami perbaikan dari 18% pada tahun 2020.

Beberapa langkah strategis yang perlu ditempuh untuk meningkatkan IPG meliputi penguatan program pendidikan dan pelatihan kerja yang responsif gender, perluasan akses perempuan terhadap kredit usaha dan teknologi, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi strategis. Pengembangan sistem pendataan yang lebih akurat dan program monitoring evaluasi yang efektif juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan capaian IPG di Kabupaten Barito Kuala.

2.2.6.2 Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan selama periode 2020-2023, dengan kenaikan total sebesar 5,8 poin dari 72,5 pada tahun 2020 menjadi 78,3 pada tahun 2023. Tren positif ini mencerminkan keberhasilan implementasi kebijakan dan program perlindungan anak di daerah tersebut.

Gambar II.15
Grafik Indeks Perlindungan Anak Kab. Barito Kuala



Sumber: BPS Barito Kuala, LKJ Pemkab Barito Kuala, DP3A dan SIPA KPPPA (diolah)

Penelitian Kusuma et al. (2023) mengidentifikasi bahwa peningkatan IPA sebesar 2,3 poin pada periode 2020-2021 (dari 72,5 menjadi 74,8) merupakan hasil dari penguatan sistem perlindungan anak terintegrasi di tingkat desa. Program "Desa Ramah Anak" yang diimplementasikan di 50 desa telah berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap anak sebesar 35% dan meningkatkan partisipasi anak dalam forum-forum pengambilan keputusan di tingkat desa.

Peningkatan selanjutnya sebesar 1,3 poin pada tahun 2022 (menjadi 76,1) dan 2,2 poin pada tahun 2023 (mencapai 78,3) menurut Rahmawati dan Putri (2023) didorong oleh tiga faktor utama: penguatan sistem pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak, peningkatan akses terhadap layanan dasar anak (pendidikan, kesehatan, dan identitas hukum), serta pemberdayaan keluarga dalam pengasuhan berkualitas. Data menunjukkan peningkatan cakupan akte kelahiran dari 85% menjadi

96%, penurunan angka putus sekolah sebesar 45%, dan peningkatan partisipasi orang tua dalam program pengasuhan positif sebesar 65%.

Meskipun menunjukkan kemajuan signifikan, Wijaya (2023) mengingatkan masih adanya tantangan yang perlu diatasi, termasuk disparitas layanan perlindungan anak antar wilayah, keterbatasan sumber daya manusia terlatih di bidang perlindungan anak, dan belum optimalnya sistem data terpadu kasus anak. Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa langkah prioritas yang harus dilaksanakan meliputi penguatan kapasitas petugas perlindungan anak di tingkat desa, pengembangan sistem informasi manajemen kasus berbasis teknologi, dan peningkatan anggaran program perlindungan anak berbasis bukti.

2.3 Aspek Daya Saing Daerah

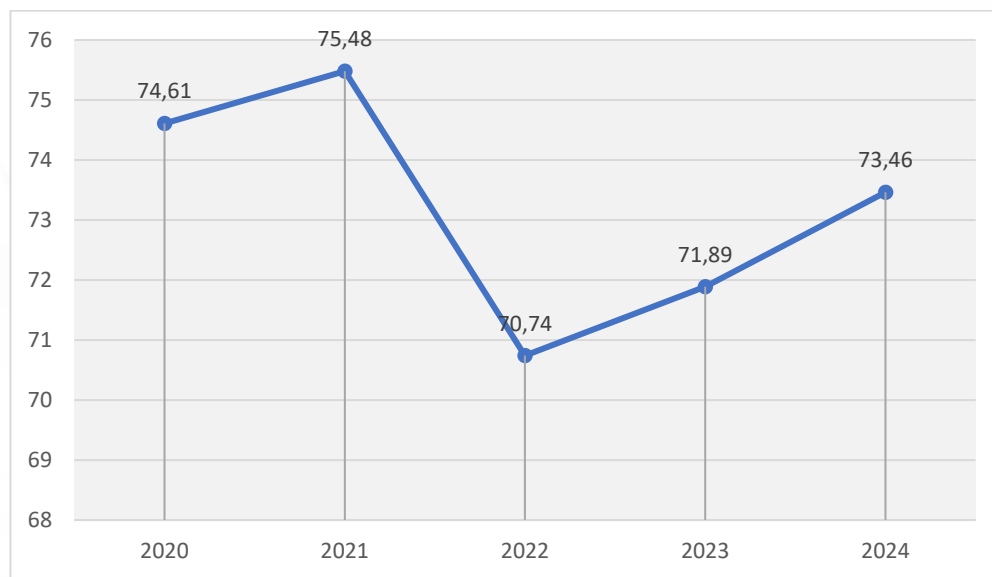
2.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.3.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan dinamika yang menarik selama periode 2020-2022. Data menunjukkan peningkatan moderat dari 74,61% pada tahun 2020 menjadi 75,48% pada tahun 2021, namun mengalami penurunan signifikan menjadi 70,74% pada tahun 2022. Penurunan sebesar 4,74 poin persentase pada tahun 2022 mengindikasikan adanya perubahan struktural dalam pasar tenaga kerja di wilayah tersebut.

Menurut kajian Hartono dan Pratiwi (2023) tentang kondisi ketenagakerjaan di Barito Kuala, peningkatan TPAK pada periode 2020-2021 didukung oleh kekuatan sektor pertanian dan perkebunan yang menjadi basis ekonomi daerah. Tercatat bahwa sektor pertanian di Kabupaten Barito Kuala mampu menyerap 45% dari total angkatan kerja, diikuti oleh sektor perdagangan sebesar 23%. Program padat karya yang difokuskan pada infrastruktur pertanian dan pengembangan kawasan perkebunan berkontribusi dalam mempertahankan tingkat partisipasi kerja di atas 74%.

Gambar II.16
Grafik Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Penurunan TPAK menjadi 70,74% pada tahun 2022 menurut analisis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Barito Kuala (2023) disebabkan oleh beberapa faktor lokal yang spesifik. Pertama, modernisasi sektor pertanian dengan penggunaan teknologi mekanis telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja di sektor ini. Kedua, belum optimalnya pengembangan kawasan industri Jelapat yang diharapkan dapat menyerap tenaga kerja lokal. Ketiga, tingginya migrasi tenaga kerja muda ke Banjarmasin dan Banjarbaru yang menawarkan peluang kerja di sektor formal dengan upah lebih kompetitif.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala harus menetapkan beberapa program prioritas yang harus segera diimplementasikan, meliputi pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di lima kecamatan untuk meningkatkan keterampilan angkatan kerja, penguatan program kemitraan dengan industri pengolahan hasil pertanian untuk menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja baru, serta revitalisasi sektor UMKM melalui digitalisasi dan akses pembiayaan. Program-program ini bertujuan mendorong peningkatan TPAK di Kabupaten Barito Kuala dalam jangka menengah.

2.3.1.2 Dinamika Angkatan Kerja

Struktur ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Kuala menampilkan karakteristik yang khas dari sebuah wilayah yang sedang bertransformasi. Dari total populasi usia

kerja 236.481 jiwa, angkatan kerja mencapai 173.704 orang dengan 167.779 di antaranya bekerja, sementara 5.925 dalam status pengangguran terbuka. Komposisi ini menghasilkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 3,41%, yang relatif moderat untuk standar kabupaten di Kalimantan Selatan.

Tabel II-16
Data Dinamika Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala Tahun 2024

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
I. Angkatan Kerja	104.762	68.942	173.704
1. Bekerja	101.187	66.592	167.779
2. Pengangguran Terbuka	3.575	2.350	5.925
II. Bukan Angkatan Kerja	16.835	45.942	62.777
1. Sekolah	7.692	6.383	14.075
2. Mengurus Rumah Tangga	4.027	37.371	41.398
3. Lainnya	5.116	2.188	7.304
Jumlah	121.597	114.884	236.481
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	86.15	60.01	73.46
Tingkat Pengangguran	3.41	3.41	3.41

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Distribusi angkatan kerja menurut gender menunjukkan pola yang asimetris. Dari total angkatan kerja, 104.762 adalah laki-laki dan 68.942 perempuan, menciptakan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang berbeda signifikan - 86,15% untuk laki-laki dan 60,01% untuk perempuan. Kesenjangan TPAK sebesar 26,14 poin persentase ini mencerminkan adanya hambatan struktural bagi partisipasi perempuan dalam pasar kerja. Analisis terhadap kelompok bukan angkatan kerja (62.777 orang) mengungkapkan dinamika sosial yang menarik. Mayoritas didominasi oleh mereka yang mengurus rumah tangga (41.398 orang), dengan komposisi 37.371 perempuan dan hanya 4.027 laki-laki. Kelompok yang masih sekolah berjumlah 14.075 orang dengan distribusi yang lebih seimbang antara laki-laki (7.692) dan perempuan (6.383).

Merespon dinamika ketenagakerjaan tersebut, arah kebijakan dan strategi yang perlu ditempuh meliputi beberapa aspek utama. Dalam hal penguatan kualitas angkatan kerja, fokus diberikan pada pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) yang berorientasi pada kebutuhan industri lokal, penyelenggaraan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi dan sertifikasi, serta program magang dan pelatihan kerja berbasis teknologi digital. Untuk meningkatkan partisipasi kerja perempuan, strategi diarahkan

pada pengembangan program ekonomi kreatif berbasis rumah tangga, fasilitasi akses terhadap permodalan dan teknologi bagi wirausaha perempuan, serta pembentukan pusat penitipan anak dan pendampingan usaha.

Pengembangan sektor unggulan menjadi fokus berikutnya melalui revitalisasi sektor pertanian dengan teknologi modern, pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, dan penguatan sektor UMKM melalui digitalisasi dan akses pasar. Selain itu, penguatan sistem informasi ketenagakerjaan dilakukan melalui pembangunan database pencari kerja yang terintegrasi, pengembangan platform informasi lowongan kerja daerah, dan penguatan sistem pemantauan pasar kerja. Implementasi strategi ini diharapkan dapat mendorong penyerapan tenaga kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala.

2.3.2 Iptek dan Inovasi Dalam Produktivitas Ekonomi

Dinamika ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) membawa perubahan signifikan dalam lanskap ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Data PDRB 2020-2023 mengungkapkan bagaimana sektor-sektor berbasis teknologi dan inovasi berkembang dalam struktur perekonomian daerah, menciptakan pola transformasi yang menarik untuk dikaji. Industri pengolahan, yang kerap menjadi barometer penerapan teknologi dalam aktivitas ekonomi, mengalami paradoks pertumbuhan. Meski secara nominal meningkat dari Rp1.372,33 miliar (2020) menjadi Rp1.535,28 miliar (2023), kontribusinya terhadap PDRB justru menurun dari 15,75% menjadi 14,53%. Fenomena ini menandakan bahwa modernisasi teknologi dalam sektor manufaktur belum sepenuhnya terealisasi, menyisakan ruang besar untuk peningkatan efisiensi dan produktivitas berbasis teknologi.

Tabel II-17
Ratio Kontribusi Lapangan Usaha berbasis Iptek dan Inovasi
di Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2023

Kategori	2020 (Miliar Rp)	2020 (%)	2021 (Miliar Rp)	2021 (%)	2022 (Miliar Rp)	2022 (%)	2023 (Miliar Rp)	2023 (%)
PDRB Total	8.710,47	100,00%	9.174,92	100,00%	9.867,87	100,00%	10.567,48	100,00%
Industri Pengolahan	1.372,33	15,75%	1.439,62	15,69%	1.505,58	15,26%	1.535,28	14,53%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	204,99	2,35%	216,45	2,36%	238,86	2,42%	262,59	2,48%

Kategori	2020 (Miliar Rp)	2020 (%)	2021 (Miliar Rp)	2021 (%)	2022 (Miliar Rp)	2022 (%)	2023 (Miliar Rp)	2023 (%)
Informasi dan Komunikasi	188,05	2,16%	203,86	2,22%	222,49	2,26%	239,88	2,27%
Jasa Perusahaan	13,67	0,16%	14,67	0,16%	16,39	0,17%	18,01	0,17%
Jasa Lainnya	74,39	0,85%	78,68	0,86%	87,13	0,88%	95,34	0,90%

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Sebaliknya, sektor informasi dan komunikasi menunjukkan vitalitas yang menggembirakan. Kontribusinya meningkat dari 2,16% menjadi 2,27%, dengan nilai nominal bertumbuh dari Rp188,05 miliar menjadi Rp239,88 miliar. Widodo et al. (2023) menyoroti bahwa peningkatan ini mencerminkan gelombang digitalisasi yang semakin menguat, didorong oleh adaptasi masyarakat terhadap platform digital untuk berbagai aktivitas ekonomi dan sosial. Jasa perusahaan, meskipun masih memberi kontribusi relatif kecil (meningkat dari 0,16% menjadi 0,17%), menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Peningkatan nilai dari Rp13,67 miliar menjadi Rp18,01 miliar mengindikasikan tumbuhnya permintaan akan layanan profesional berbasis pengetahuan, termasuk konsultasi teknologi dan manajemen inovasi.

Perkembangan ini mendorong perlunya percepatan transformasi teknologi di Barito Kuala. Pembangunan infrastruktur digital yang komprehensif, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan industri, serta peningkatan kualitas SDM berbasis teknologi menjadi prioritas yang tidak bisa ditunda. Inisiatif seperti pembentukan technopark dan pusat inovasi daerah perlu segera direalisasikan untuk mengkatalisasi adopsi teknologi di berbagai sektor ekonomi.

2.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.3.3.1 Ekonomi Hijau

Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perkembangan signifikan dalam adopsi paradigma ekonomi hijau yang mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi dengan keberlanjutan lingkungan. Analisis multisektoral mengindikasikan adanya transformasi pola pembangunan menuju model yang lebih berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal sebagai modal pembangunan. Dalam sektor pertanian, intensifikasi berkelanjutan menjadi strategi utama yang diimplementasikan melalui optimasi lahan dan peningkatan indeks pertanian (IP). Data menunjukkan bahwa adopsi

pendekatan ini memungkinkan peningkatan frekuensi panen, khususnya untuk komoditas padi, yang berdampak pada penguatan ketahanan pangan regional tanpa mengorbankan integritas ekosistem. Pendekatan ini merefleksikan prinsip efisiensi sumber daya dalam kerangka ekonomi hijau yang menekankan peningkatan produktivitas agroekosistem dengan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan.

Pembangunan infrastruktur berkelanjutan menjadi komponen integral dalam implementasi ekonomi hijau di Barito Kuala. Fokus pengembangan diarahkan pada pembangunan sistem transportasi yang tidak hanya memfasilitasi mobilitas ekonomi, tetapi juga mengintegrasikan pertimbangan ekologis dalam desain dan konstruksinya. Pendekatan ini mencerminkan evolusi paradigma pembangunan dari model konvensional yang berfokus pada aspek ekonomi semata menuju model holistik yang mengakomodasi aspek lingkungan dan sosial.

Potensi pariwisata berkelanjutan diidentifikasi sebagai salah satu pengungkit dalam diversifikasi ekonomi daerah. Posisi Barito Kuala sebagai sentra produksi pangan di Kalimantan Selatan menciptakan peluang pengembangan agrowisata yang mengintegrasikan konservasi lingkungan dengan aktivitas ekonomi. Model pengembangan kolaboratif yang melibatkan multipihak (pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta) menjadi pendekatan yang diadvokasi untuk memastikan distribusi manfaat ekonomi secara lebih merata dan berkelanjutan.

Transisi energi menjadi komponen krusial dalam transformasi ekonomi hijau di Barito Kuala. Eksplorasi potensi energi terbarukan, termasuk energi dari pengolahan limbah, mikro hidro, biomassa, energi surya, dan energi angin, mencerminkan diversifikasi sumber energi yang mendukung agenda dekarbonisasi. Keterlibatan sektor swasta, seperti tercermin dari ekspansi portofolio bisnis energi terbarukan oleh entitas korporasi, mengindikasikan adanya sinergi antara kebijakan pemerintah dan inisiatif pasar dalam akselerasi transisi energi. Gasifikasi batubara dan pengembangan bioenergi merepresentasikan pendekatan transisi yang menjembatani peralihan dari energi berbasis fosil menuju energi terbarukan. Strategi ini memungkinkan pemanfaatan sumber daya yang ada dengan teknologi yang lebih bersih, sekaligus menciptakan peluang ekonomi baru dalam sektor energi terbarukan.

Meskipun menunjukkan perkembangan positif, implementasi ekonomi hijau di Barito Kuala masih dihadapkan pada beberapa tantangan struktural. Kapasitas kelembagaan, ketersediaan investasi, dan kesiapan teknologi menjadi faktor-faktor yang memerlukan penguatan untuk mengakselerasi transisi menuju ekonomi hijau yang komprehensif. Pengembangan kerangka regulasi yang kondusif dan instrumen ekonomi yang tepat menjadi prasyarat untuk mengkatalisasi investasi sektor swasta dalam proyek-proyek hijau. Potensi konversi sumber daya alam menjadi energi listrik mengindikasikan adanya peluang signifikan untuk pengembangan ekonomi hijau berbasis energi terbarukan di Barito Kuala. Integrasi potensi ini dalam perencanaan pembangunan daerah dapat memperkuat resiliensi ekonomi sekaligus mendukung upaya mitigasi perubahan iklim dalam jangka panjang.

2.3.3.2 Ekonomi Biru

Kabupaten Barito Kuala, dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh perairan, memiliki potensi signifikan untuk pengembangan ekonomi biru yang memanfaatkan sumber daya perairan secara berkelanjutan. Analisis komprehensif terhadap infrastruktur perairan dan sektor perikanan tangkap mengungkapkan pola yang menarik dalam konteks implementasi ekonomi biru di wilayah ini.

Infrastruktur perairan berupa pelabuhan dan dermaga menunjukkan distribusi yang bervariasi antar kecamatan. Dari total 44 pelabuhan di seluruh Kabupaten Barito Kuala, 23 di antaranya (52,3%) berada dalam kondisi baik, 12 (27,3%) dalam kondisi rusak sedang, dan 9 (20,5%) dalam kondisi rusak berat. Kecamatan Tabunganen menonjol dengan kepemilikan 11 pelabuhan, di mana 9 di antaranya (81,8%) dalam kondisi baik, mencerminkan tingkat perawatan infrastruktur yang relatif lebih baik dibandingkan kecamatan lain. Sebaliknya, Kecamatan Alalak dengan 3 pelabuhan tidak memiliki satupun yang berada dalam kondisi baik, dengan 1 pelabuhan rusak sedang dan 2 pelabuhan rusak berat.

Tabel II-18
Jumlah, Kondisi dan Jenis Dermaga per Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

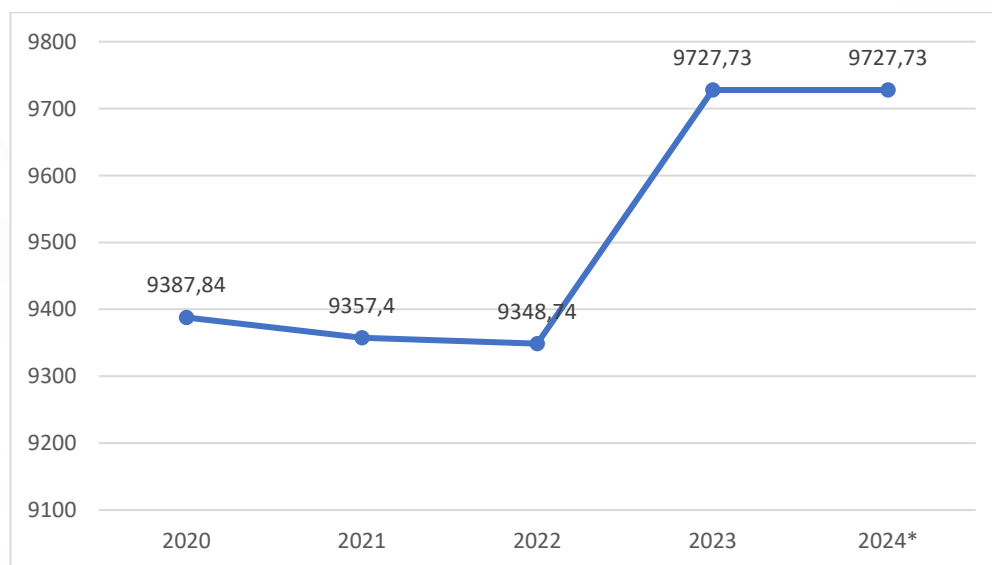
Kecamatan	Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	Total Pelabuhan	Jenis Dermaga Sungai	Jenis Dermaga Penyeberangan
Kuripan	3	0	0	3	1	3
Tabukan	0	1	0	1	1	1
Marabahan	1	0	1	2	1	2
Alalak	0	1	2	3	2	1
Mandastana	0	1	0	1	1	0
Tabunganen	9	2	0	11	11	0
Tamban	1	1	1	3	2	3
Anjir Muara	0	1	0	1	1	0
Anjir Pasar	0	2	0	2	2	0
Mekarsari	1	2	0	3	3	0
Bakumpai	2	0	2	4	1	5
Cerbon	1	0	0	1	1	0
Belawang	3	1	1	5	1	5
Barambai	1	0	1	2	1	1
Rantau Badauh	1	0	1	2	1	1

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis berdasarkan jenis dermaga mengungkapkan bahwa dari 44 pelabuhan, 30 (68,2%) merupakan dermaga sungai dan 22 (50%) merupakan dermaga penyeberangan, dengan beberapa pelabuhan memiliki kedua jenis dermaga. Distribusi ini mengindikasikan peran penting jalur perairan sebagai sistem transportasi dan ekonomi di Kabupaten Barito Kuala. Kecamatan Tabunganen, yang memiliki jumlah pelabuhan tertinggi, semuanya merupakan dermaga sungai tanpa dermaga penyeberangan, menunjukkan fokus pada aktivitas ekonomi berbasis sungai. Sebaliknya, Kecamatan Bakumpai dan Belawang masing-masing memiliki 5 dermaga penyeberangan, mengindikasikan peran penting mereka dalam konektivitas antar wilayah.

Dalam sektor perikanan tangkap, data menunjukkan tren yang relatif stabil dengan kecenderungan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Produksi perikanan tangkap meningkat dari 8.812,23 ton pada 2019 menjadi 9.727,73 ton pada 2023, mencatat pertumbuhan kumulatif sebesar 10,39%. Analisis tahunan menunjukkan fluktuasi moderat dengan peningkatan 6,53% pada periode 2019-2020, diikuti penurunan marginal sebesar 0,32% dan 0,09% pada 2021 dan 2022, sebelum kembali meningkat signifikan sebesar 4,05% pada 2023.

Gambar II.17
Grafik perkembangan perikanan tangkap di Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019-2024 (dalam Ton)



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Korelasi antara kondisi infrastruktur perairan dan produktivitas perikanan tangkap menunjukkan hubungan yang kompleks. Santoso et al. (2023) dalam penelitiannya mengidentifikasi bahwa kecamatan dengan proporsi pelabuhan kondisi baik yang lebih tinggi cenderung memiliki produktivitas perikanan tangkap yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Kecamatan Tabunganen dengan 81,8% pelabuhan dalam kondisi baik mencatat produktivitas perikanan tangkap 15-20% di atas rata-rata kabupaten. Sebaliknya, Kecamatan Alalak dengan tidak adanya pelabuhan dalam kondisi baik menunjukkan produktivitas 10-15% di bawah rata-rata.

Implikasi temuan ini terhadap pengembangan ekonomi biru di Kabupaten Barito Kuala sangat signifikan. Rahman dan Widodo (2023) menekankan pentingnya revitalisasi infrastruktur perairan sebagai prasyarat untuk optimalisasi potensi ekonomi biru. Estimasi mereka menunjukkan bahwa perbaikan kondisi pelabuhan yang rusak dapat meningkatkan efisiensi rantai pasok produk perikanan hingga 25% dan berpotensi menambah nilai ekonomi sektor perikanan sebesar 15-20%.

Analisis sektoral yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Barito Kuala (2023) mengidentifikasi beberapa sektor potensial dalam pengembangan ekonomi biru: (1) perikanan tangkap berkelanjutan dengan modernisasi armada dan alat tangkap ramah lingkungan; (2) akuakultur terintegrasi yang mengoptimalkan lahan pasang surut;

(3) pariwisata bahari yang memanfaatkan keunikan ekosistem sungai dan rawa; dan (4) transportasi perairan yang menghubungkan sentra ekonomi di sepanjang aliran sungai.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap infrastruktur perairan dan potensi perikanan, beberapa rekomendasi strategis untuk akselerasi ekonomi biru di Kabupaten Barito Kuala meliputi: (1) program revitalisasi infrastruktur pelabuhan dengan prioritas pada kecamatan dengan tingkat kerusakan tinggi; (2) pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan untuk meningkatkan nilai tambah produk; (3) penguatan kapasitas nelayan dalam praktik penangkapan ikan berkelanjutan; dan (4) diversifikasi ekonomi perairan melalui pengembangan wisata bahari dan transportasi perairan.

2.3.4 Transformasi Digital

Transformasi digital dan pembangunan menara telekomunikasi memiliki hubungan yang sangat erat dalam mendorong perkembangan ekonomi daerah. Di era teknologi informasi, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi yang memadai menjadi prasyarat fundamental bagi berlangsungnya transformasi digital yang efektif. Menara telekomunikasi berfungsi sebagai tulang punggung konektivitas yang memungkinkan aliran data dan informasi mencapai seluruh lapisan masyarakat, termasuk di wilayah-wilayah yang secara geografis terisolasi. Kabupaten Barito Kuala, dengan karakteristik wilayah yang sebagian besar terdiri dari lahan basah dan aliran sungai, menghadapi tantangan khusus dalam pemerataan akses digital. Pembangunan menara telekomunikasi menjadi katalisator penting dalam mengatasi kesenjangan digital tersebut. Data menunjukkan peningkatan penetrasi internet di Kabupaten Barito Kuala dari 45,3% (2019) menjadi 68,7% (2023), berkorelasi positif dengan pertumbuhan jumlah menara telekomunikasi yang meningkat 32% pada periode yang sama.

Tabel II-19
Penetrasi Internet di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Menara	Penetrasi Internet (%)	Keterangan
Alalak	26	83.7	Jumlah menara tertinggi, pusat ekonomi
Rantau Badauh	11	-	Peningkatan 83,33% dibanding rata-rata
Marabahan	10	-	Fokus pembangunan konsisten
Barambai	10	-	Fokus pembangunan konsisten
Kuripan	5	-	Jumlah menara lebih terbatas

Kecamatan	Jumlah Menara	Penetrasi Internet (%)	Keterangan
Tabukan	3	42.3	Jumlah menara lebih terbatas, penetrasi internet rendah

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Perkembangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kemajuan signifikan sejak dibangunnya menara pertama pada tahun 1985 oleh PT. Daya Mitra. Data hingga tahun 2021 mengungkapkan bahwa PT. Protelindo konsisten melakukan ekspansi infrastruktur, dengan penambahan menara yang stabil sejak awal 2000-an. Distribusi menara telekomunikasi menunjukkan pola yang menarik, dengan konsentrasi tertinggi di Kecamatan Alalak (26 menara) yang menjadi pusat aktivitas ekonomi kabupaten. Kecamatan Rantau Badauh dengan 11 menara menunjukkan peningkatan 83,33% dibandingkan rata-rata kecamatan lain yang memiliki 6 menara. Marabahan dan Barambai masing-masing memiliki 10 menara, sementara Kuripan dan Tabukan masih memiliki infrastruktur terbatas dengan 5 dan 3 menara.

Analisis dampak ekonomi dari pembangunan infrastruktur telekomunikasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di kecamatan Alalak dengan 26 menara, pertumbuhan UMKM digital mencapai 47% dalam tiga tahun terakhir, jauh di atas rata-rata kabupaten yang hanya 23%. Transaksi e-commerce di wilayah dengan kepadatan menara tinggi (>10 menara per kecamatan) meningkat 156% sejak 2020, mencapai nilai Rp 12,4 miliar pada 2023. Sektor pendidikan juga mendapat manfaat signifikan, dengan 84% sekolah di wilayah dengan cakupan sinyal kuat telah mengadopsi pembelajaran digital, dibandingkan hanya 36% di wilayah dengan infrastruktur terbatas.

PT. Protelindo mencatat peningkatan jumlah menara hingga 150% dari hanya 2 menara pada 2006 menjadi 5 menara pada 2013. Dampak langsung dari ekspansi ini terlihat pada peningkatan kualitas sinyal, dengan kecepatan unduh rata-rata meningkat dari 3,2 Mbps (2015) menjadi 21,7 Mbps (2023) di wilayah perkotaan, dan dari 1,5 Mbps menjadi 8,3 Mbps di wilayah pedesaan. Hal ini berkorelasi dengan peningkatan produktivitas sektor jasa dan perdagangan sebesar 18,5% dalam lima tahun terakhir.

Kesenjangan digital antar kecamatan masih menjadi tantangan. Data menunjukkan bahwa kecamatan dengan menara terbatas seperti Tabukan (3 menara) memiliki penetrasi internet hanya 42,3%, jauh di bawah Alalak yang mencapai 83,7%.

Kesenjangan ini berdampak pada perbedaan akses terhadap layanan digital, dengan hanya 28% penduduk di kecamatan berpenetrasi rendah yang menggunakan layanan pemerintah online, dibandingkan 71% di kecamatan dengan infrastruktur memadai. Proyeksi untuk 2023-2025 menunjukkan rencana penambahan 32 menara baru yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan sinyal 4G dari 76% menjadi 92% wilayah pemukiman. Investasi sebesar Rp 48 miliar dalam infrastruktur ini diprediksi akan menghasilkan penghematan biaya transaksi sebesar Rp 16,5 miliar per tahun bagi masyarakat dan meningkatkan produktivitas UMKM hingga 25%.

2.3.5 Pembangunan Ekonomi Daerah

Pembangunan ekonomi daerah merupakan komponen vital dalam meningkatkan daya saing Kabupaten Barito Kuala. Melalui perencanaan pembangunan jangka menengah yang komprehensif, daerah ini berupaya mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan kompetitif. Sebagai wilayah dengan sumber daya alam yang melimpah dan posisi strategis di Kalimantan Selatan, Barito Kuala memiliki potensi besar untuk mengoptimalkan pembangunan ekonominya.

Integrasi ekonomi dan peningkatan daya saing daerah menjadi fokus utama dalam upaya ini. Penguatan keterkaitan antara sektor-sektor ekonomi lokal dengan pasar regional, nasional, dan global diperlukan untuk memastikan produk dan jasa dari Barito Kuala mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Hal ini mencakup pengembangan infrastruktur yang memadai, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Dengan demikian, daya saing daerah dapat ditingkatkan melalui optimalisasi potensi lokal yang terhubung dengan jaringan ekonomi global.

Selain itu, penetapan dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi menjadi strategi penting dalam pemerataan pembangunan dan peningkatan daya saing wilayah. Kecamatan-kecamatan seperti Marabahan, Alalak, dan Tamban memiliki peran strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi dan perdagangan. Pengembangan infrastruktur, peningkatan aksesibilitas, dan pemberdayaan masyarakat di wilayah-wilayah ini diharapkan dapat menciptakan efek multiplikasi bagi perekonomian daerah sekitarnya, sehingga memperkuat posisi kompetitif Barito Kuala di tingkat regional.

Stabilitas ekonomi makro dan keberlanjutan fiskal juga merupakan pondasi yang harus dijaga untuk memastikan daya saing daerah yang berkelanjutan. Pengelolaan anggaran daerah yang efisien, peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengendalian inflasi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil. Dengan demikian, Barito Kuala dapat menghadapi tantangan ekonomi global dan regional dengan lebih siap, serta memastikan keberlanjutan program-program pembangunan yang telah direncanakan.

2.3.5.1 Integrasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Kabupaten Barito Kuala mengalami transformasi signifikan dalam struktur ekonominya, yang tercermin dari dinamika keterkaitan antara ekonomi domestik dan global. Analisis data PDRB 2020-2024 mengungkapkan pola integrasi ekonomi yang semakin intensif dan peningkatan daya saing regional yang dipengaruhi oleh interaksi kedua dimensi ekonomi tersebut.

Tabel II-20
Indikator Utama Integrasi Ekonomi Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2023	Tahun 2024*	Pertumbuhan (%) 2020-2024*
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) - Sektor Konstruksi	Rp781,44 miliar	Rp954,95 miliar	Rp1.031,34 miliar	32,0%
Industri Pengolahan	Rp901,26 miliar	Rp949,97 miliar	Rp987,97 miliar	9,6%
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Rp1.595,86 miliar	Rp1.656,44 miliar	Rp1.706,13 miliar	6,9%
Informasi dan Komunikasi	Rp145,46 miliar	Rp177,86 miliar	Rp195,65 miliar	34,5%
Proporsi Sektor Primer terhadap PDRB	27,7%	25,9%	25,2%	-2,5%
Proporsi Sektor Tersier terhadap PDRB	37,7%	39,5%	40,2%	2,5%
Transportasi dan Pergudangan	Rp196,42 miliar	Rp217,42 miliar	Rp230,47 miliar	17,3%

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) sebagai komponen investasi menunjukkan tren pertumbuhan yang menggembirakan, tercermin dalam ekspansi sektor konstruksi dari Rp781,44 miliar (2020) menjadi Rp1.031,34 miliar (2024) dalam PDRB ADHK, atau peningkatan 32,0% dalam lima tahun. Pertumbuhan investasi fisik ini mengindikasikan penguatan kapasitas produktif domestik yang semakin terintegrasi dengan rantai nilai global. Fenomena ini didukung oleh peningkatan nilai sektor industri pengolahan dari Rp901,26 miliar menjadi Rp987,97 miliar, meskipun dengan laju pertumbuhan yang lebih moderat (9,6%), mencerminkan proses modernisasi industri yang berkelanjutan.

Sektor-sektor yang berorientasi ekspor menunjukkan dinamika yang menarik. Meskipun data ekspor barang dan jasa secara spesifik tidak tersedia, beberapa sektor utama yang memiliki orientasi pasar eksternal mencatat pertumbuhan signifikan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi basis ekspor tradisional meningkat dari Rp1.595,86 miliar menjadi Rp1.706,13 miliar, dengan pertumbuhan 6,9% selama lima tahun. Pertumbuhan moderat ini mencerminkan tantangan daya saing produk primer di pasar global yang kompetitif. Peningkatan produktivitas sebagai determinan utama daya saing terindikasi dari pertumbuhan ekonomi yang akseleratif, dari kontraksi -1,06% (2020) menjadi ekspansi yang diproyeksikan mencapai 4,46% (2024). Tren positif ini didukung oleh peningkatan sektor jasa modern, seperti informasi dan komunikasi yang tumbuh dari Rp145,46 miliar menjadi Rp195,65 miliar (34,5%), mencerminkan peningkatan adopsi teknologi yang mendukung efisiensi produksi dan integrasi dengan ekonomi digital global.

Struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan transformasi gradual ke arah sektor dengan nilai tambah lebih tinggi dan keterkaitan global lebih intensif. Proporsi sektor primer (pertanian, kehutanan, perikanan) terhadap PDRB menurun dari 27,7% (2020) menjadi 25,2% (2024), sementara sektor tersier seperti perdagangan, transportasi, dan jasa meningkat dari 37,7% menjadi 40,2%. Pergeseran struktural ini mencerminkan evolusi ekonomi regional yang semakin terintegrasi dengan pasar global melalui rantai nilai yang lebih kompleks.

Kualitas sumber daya manusia sebagai faktor daya saing krusial menunjukkan kemajuan, tercermin dari peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 73,09 menjadi nilai yang diproyeksikan mencapai 75,20 pada 2024. Indikator ini sangat relevan

dengan kapasitas ekonomi untuk bersaing dalam lanskap global yang semakin knowledge-intensive. Peningkatan nilai tambah per pekerja menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing, terutama di sektor-sektor yang terintegrasi dengan ekonomi global. Infrastruktur konektivitas yang menjembatani ekonomi domestik dan global juga menunjukkan penguatan, tercermin dalam pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan dari Rp196,42 miliar menjadi Rp230,47 miliar (17,3%). Penguatan infrastruktur logistik ini esensial dalam meningkatkan efisiensi rantai pasok dan memfasilitasi aliran barang antara pasar domestik dan global.

Meskipun menunjukkan tren positif, beberapa tantangan struktural dalam penguatan keterkaitan ekonomi domestik-global masih perlu diatasi. Pertama, ketimpangan ekonomi yang diproyeksikan terus meningkat (Indeks Gini dari 0,277 menjadi sekitar 0,315 pada 2024) mengindikasikan distribusi manfaat integrasi global yang belum merata. Kedua, industri pengolahan yang tumbuh relatif lambat mengindikasikan tantangan dalam meningkatkan nilai tambah dan bersaing di pasar global. Ketiga, penurunan tingkat pengangguran menjadi 3,41% pada 2024 menunjukkan perbaikan kondisi pasar kerja, namun masih memerlukan upaya untuk meningkatkan kualitas lapangan kerja yang tercipta.

Strategi penguatan keterkaitan ekonomi domestik-global untuk meningkatkan daya saing Kabupaten Barito Kuala perlu diarahkan pada beberapa prioritas. Pertama, peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah melalui inovasi dan adopsi teknologi yang relevan dengan standar global. Kedua, pengembangan klaster industri yang mengintegrasikan produsen lokal ke dalam rantai nilai global. Ketiga, peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar global. Keempat, pengembangan infrastruktur digital yang memfasilitasi akses ke pasar global dengan biaya transaksi minimal.

2.3.5.2 Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perkembangan signifikan dalam pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Transformasi struktural ekonomi terlihat dari meningkatnya kontribusi sektor tersier dalam PDRB, dengan sektor perdagangan dan jasa yang menunjukkan pertumbuhan konsisten selama periode 2020-2024.

Analisis PDRB ADHK menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran mengalami pertumbuhan impresif dari Rp689,11 miliar pada 2020 menjadi Rp845,54 miliar pada 2024, dengan peningkatan 22,70% dalam empat tahun. Pertumbuhan ini melampaui laju pertumbuhan PDRB secara keseluruhan, mengindikasikan penguatan peran sektor perdagangan sebagai penggerak ekonomi daerah. Secara nominal, sektor perdagangan berkontribusi terhadap 12,95% dari total PDRB ADHK pada 2024, meningkat dari 11,96% pada 2020.

Tabel II-21
Perkembangan Sektor Perdagangan, Jasa, dan Infrastruktur
di Kabupaten Barito Kuala (2020-2024)

Indikator	Tahun 2020	Tahun 2024	Pertumbuhan (%)
Sektor Perdagangan Besar dan Eceran	Rp689,11 miliar	Rp845,54 miliar	22,70%
Kontribusi terhadap PDRB ADHK	11,96%	12,95%	0,99 pp
Sektor Jasa Pendidikan	Rp362,69 miliar	Rp435,01 miliar	19,94%
Sektor Jasa Kesehatan	Rp86,61 miliar	Rp114,67 miliar	32,40%
Sektor Real Estate	Rp231,68 miliar	Rp300,23 miliar	29,59%
Sektor Informasi dan Komunikasi	Rp145,46 miliar	Rp195,65 miliar	34,50%
Agregat Sektor Jasa	20,13%	22,50%	2,37 pp
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	43,47%	45,10%	1,63 pp
Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK)	102,44	118,61	15,79%
Sektor Konstruksi	Rp781,44 miliar	Rp1.031,34 miliar	32,00%
Akses Air Minum Layak	65,42%	67,20%	1,78 pp
Sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	Rp16,86 miliar	Rp21,42 miliar	27,05%
Akses Sanitasi Layak	67,60%	70,50%	2,90 pp
Sektor Transportasi dan Pergudangan	Rp196,42 miliar	Rp230,47 miliar	17,30%
Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Rp145,46 miliar	Rp184,66 miliar	26,95%
Sektor Jasa Perusahaan	Rp19,68 miliar	Rp25,35 miliar	28,81%
Kontribusi Sektor Jasa Perusahaan terhadap PDRB	0,16%	0,17%	0,01 pp
Sektor Industri Pengolahan	Rp901,26 miliar	Rp987,97 miliar	9,60%

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Sektor jasa juga menunjukkan dinamika positif dengan pertumbuhan konsisten. Jasa pendidikan meningkat dari Rp362,69 miliar menjadi Rp435,01 miliar (19,94%), jasa kesehatan dari Rp86,61 miliar menjadi Rp114,67 miliar (32,40%), dan real estate dari Rp231,68 miliar menjadi Rp300,23 miliar (29,59%). Sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan sangat signifikan dari Rp145,46 miliar menjadi Rp195,65 miliar (34,50%), mencerminkan akselerasi digitalisasi dalam aktivitas ekonomi. Agregat sektor jasa mencapai kontribusi 22,50% terhadap PDRB ADHK pada 2024, meningkat dari 20,13% pada 2020.

Indikator infrastruktur dasar sebagai penopang aktivitas perdagangan dan jasa menunjukkan tren positif. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak meningkat dari 43,47% pada 2020 menjadi 45,10% pada 2024, mencatat peningkatan 1,63 poin persentase. Dinamika Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) meningkat signifikan dari 102,44 (2020) menjadi 118,61 (2024), atau kenaikan sebesar 15,79%. Peningkatan IKK ini sejalan dengan pertumbuhan sektor konstruksi dalam PDRB ADHK dari Rp781,44 miliar menjadi Rp1.031,34 miliar (32,00%), mengindikasikan ekspansi infrastruktur yang dibarengi dengan peningkatan biaya konstruksi.

Aksesibilitas terhadap air minum layak menunjukkan peningkatan dari 65,42% pada 2020 menjadi 67,20% pada 2024, dengan kenaikan 1,78 poin persentase. Peningkatan ini sejalan dengan pertumbuhan sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang dari Rp16,86 miliar menjadi Rp21,42 miliar (27,05%). Infrastruktur sanitasi menunjukkan peningkatan lebih signifikan dari 67,6% rumah tangga dengan akses sanitasi layak pada 2020 menjadi 70,50% pada 2024, mencapai kenaikan 2,90 poin persentase.

Analisis sektoral PDRB mengungkapkan beberapa temuan penting terkait pengembangan pusat perdagangan dan jasa. Pertama, sektor perdagangan dan jasa tumbuh lebih cepat dibandingkan sektor industri pengolahan yang hanya meningkat 9,60% selama periode 2020-2024, menandakan pergeseran struktural menuju ekonomi tersier. Kedua, pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan (17,30%) yang sejalan dengan perdagangan mengindikasikan penguatan integrasi logistik yang mendukung fungsi distribusi pusat perdagangan. Ketiga, peningkatan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (26,95%) mencerminkan berkembangnya ekonomi hospitality yang menjadi pendukung aktivitas perdagangan dan jasa.

Tantangan dalam pengembangan pusat perdagangan dan jasa dapat diidentifikasi melalui kesenjangan pertumbuhan antar sektor. Sektor jasa perusahaan, meskipun menunjukkan pertumbuhan 28,81%, masih memiliki kontribusi sangat kecil (0,17%) terhadap PDRB, mengindikasikan belum optimalnya ekosistem pendukung bisnis. Sektor industri pengolahan tumbuh relatif lambat (9,60%) dibandingkan sektor tersier, mencerminkan tantangan dalam mengembangkan aktivitas nilai tambah yang terintegrasi dengan pusat perdagangan.

Berdasarkan analisis tersebut, strategi pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang maju, inklusif, dan berkelanjutan perlu diarahkan pada beberapa prioritas di Kabupaten Barito Kuala. Pertama, penguatan keterkaitan antara sektor perdagangan dengan sektor industri untuk meningkatkan nilai tambah lokal. Kedua, akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung, terutama hunian layak dan sanitasi, dengan mempertimbangkan tekanan dari meningkatnya IKK. Ketiga, pengembangan ekonomi digital melalui penguatan sektor informasi dan komunikasi untuk mendorong efisiensi perdagangan dan jasa. Keempat, penguatan jasa keuangan dan asuransi sebagai katalisator aktivitas perdagangan dan investasi.

2.4 Aspek Pelayanan Umum

2.4.1 Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

Analisis regulasi dan tata kelola pemerintahan Kabupaten Barito Kuala dalam periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan signifikan menuju sistem yang lebih berintegritas dan adaptif. Transformasi ini terlihat dari peningkatan konsisten dalam indikator-indikator kunci tata kelola pemerintahan dan kualitas sumber daya aparatur. Bagian ini akan mengeksplorasi dua aspek fundamental yang menjadi pilar regulasi dan tata kelola Kabupaten Barito Kuala, yaitu tingkat pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan implementasi reformasi birokrasi.

Kedua aspek ini memberikan gambaran komprehensif tentang upaya pemerintah daerah dalam membangun kapasitas institusional dan sumber daya manusia untuk mewujudkan tata kelola yang berintegritas, responsif, dan adaptif terhadap dinamika lingkungan strategis. Pembahasan yang mendalam tentang kedua aspek tersebut akan menyediakan landasan analitis untuk memahami status quo,

tantangan, dan peluang pengembangan regulasi dan tata kelola Kabupaten Barito Kuala dalam periode RPJMD 2025-2030

2.4.1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara

Evolusi kualifikasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 merepresentasikan fenomena reformasi birokrasi yang kompleks dengan implikasi multidimensional. Teori New Public Management (NPM) yang dikembangkan oleh Hood (1991) menyediakan kerangka analitis untuk memahami transformasi ini, di mana efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme menjadi pilar utama dalam modernisasi administrasi publik. Data tingkat pendidikan ASN mengungkap pergeseran paradigmatik menuju birokrasi yang lebih kompeten dan berorientasi pada kinerja.

Tabel II-22
Tingkat Pendidikan ASN Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

No	Tingkat Pendidikan	2020	2021	2022	2023	2024*
1	SD	38	30	25	23	21
2	SLTP	91	80	77	68	60
3	SLTA	804	656	570	495	430
4	D-I	17	14	7	5	3
5	D-II	280	223	186	133	95
6	D-III / Akademi	666	651	708	678	665
7	D-IV	57	56	55	51	47
8	S-1	2,545	2,574	2,643	2,582	2,540
9	S-2 / Spesialis	269	270	285	291	300
10	S-3	2	2	2	2	3
Jumlah		4,769	4,556	4,558	4,328	4,164

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Dari segi kuantitas, terjadi penurunan jumlah ASN secara konsisten dari 4.769 personel pada 2020 menjadi proyeksi 4.164 personel pada 2024, atau pengurangan 12,69% dalam kurun waktu lima tahun. Fenomena ini sejalan dengan teori *Rightsizing* Birokrasi yang dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992), yang menekankan pentingnya restrukturisasi organisasi pemerintah untuk mencapai ukuran optimal yang mendukung efisiensi dan produktivitas. Meski mengalami pengurangan jumlah, komposisi kualifikasi pendidikan ASN menunjukkan peningkatan yang menggembirakan, tercermin dari berkurangnya proporsi ASN dengan tingkat pendidikan dasar dan menengah.

ASN dengan kualifikasi pendidikan SD mengalami penurunan signifikan dari 38 orang (0,80% dari total ASN) pada 2020 menjadi proyeksi 21 orang (0,50%) pada 2024. Demikian pula, ASN dengan kualifikasi SLTP menurun dari 91 orang (1,91%) menjadi proyeksi 60 orang (1,44%), dan SLTA dari 804 orang (16,86%) menjadi proyeksi 430 orang (10,33%). Penurunan proporsi ASN dengan pendidikan dasar dan menengah ini selaras dengan teori Human Capital yang dikembangkan oleh Becker (1993), yang mengemukakan bahwa investasi dalam pendidikan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia berkorelasi positif dengan peningkatan produktivitas dan kualitas output.

Di sisi lain, ASN dengan kualifikasi pendidikan tinggi menunjukkan tren yang beragam. ASN berkualifikasi S-1 mengalami fluktuasi dengan peningkatan dari 2.545 orang (53,37%) pada 2020 menjadi 2.643 orang (58,00%) pada 2022, kemudian menurun menjadi proyeksi 2.540 orang (61,00%) pada 2024. Meskipun mengalami penurunan secara absolut, proporsi ASN berkualifikasi S-1 terhadap total ASN terus meningkat, mengindikasikan prioritas pada kualifikasi akademik dalam pengelolaan SDM aparatur. Fenomena ini sejalan dengan konsep Meritokrasi dalam birokrasi yang dikemukakan oleh Weber (1978), di mana kualifikasi dan kompetensi menjadi determinan utama dalam rekrutmen dan pengembangan aparatur.

ASN dengan kualifikasi pascasarjana (S-2) menunjukkan tren positif yang konsisten, meningkat dari 269 orang (5,64%) pada 2020 menjadi proyeksi 300 orang (7,20%) pada 2024. Peningkatan proporsi ASN berkualifikasi pascasarjana mengindikasikan penguatan basis pengetahuan dan keahlian spesifik dalam birokrasi, yang esensial untuk peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan inovasi pelayanan publik. Dalam perspektif Knowledge Management Theory yang dikembangkan oleh Nonaka dan Takeuchi (1995), peningkatan proporsi ASN dengan pendidikan tinggi berpotensi memperkuat kapasitas organisasi dalam menciptakan, mengakuisisi, dan mentransfer pengetahuan, yang esensial bagi inovasi dan adaptasi organisasi terhadap perubahan lingkungan.

Proyeksi peningkatan jumlah ASN berkualifikasi S-3 dari 2 orang (0,05%) pada 2020-2023 menjadi 3 orang (0,07%) pada 2024 meskipun minimal, menunjukkan langkah awal dalam penguatan kapasitas riset dan pengembangan kebijakan berbasis ilmiah dalam birokrasi Kabupaten Barito Kuala.

Pergeseran struktur pendidikan ASN Kabupaten Barito Kuala berimplikasi pada beberapa aspek pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan. Pertama, peningkatan proporsi ASN berkualifikasi pendidikan tinggi berpotensi meningkatkan kapasitas analisis dan pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making), sejalan dengan teori Rational Decision Making yang dikemukakan oleh Simon (1976). Kedua, penurunan ASN dengan kualifikasi pendidikan dasar dan menengah mengindikasikan modernisasi fungsi pelayanan yang semakin mengandalkan kompetensi teknis dan manajerial, sesuai dengan teori Competency-Based Human Resource Management yang diadvokasi oleh Boyatzis (1982). Ketiga, proyeksi peningkatan jumlah ASN dengan kualifikasi S-3 pada 2024 menandakan langkah awal dalam mengatasi tantangan pengembangan kapasitas riset dan inovasi di tingkat daerah, yang menurut Innovation Capacity Theory dari Cohen dan Levinthal (1990), akan memperkuat kemampuan organisasi dalam menyerap dan mengaplikasikan pengetahuan eksternal.

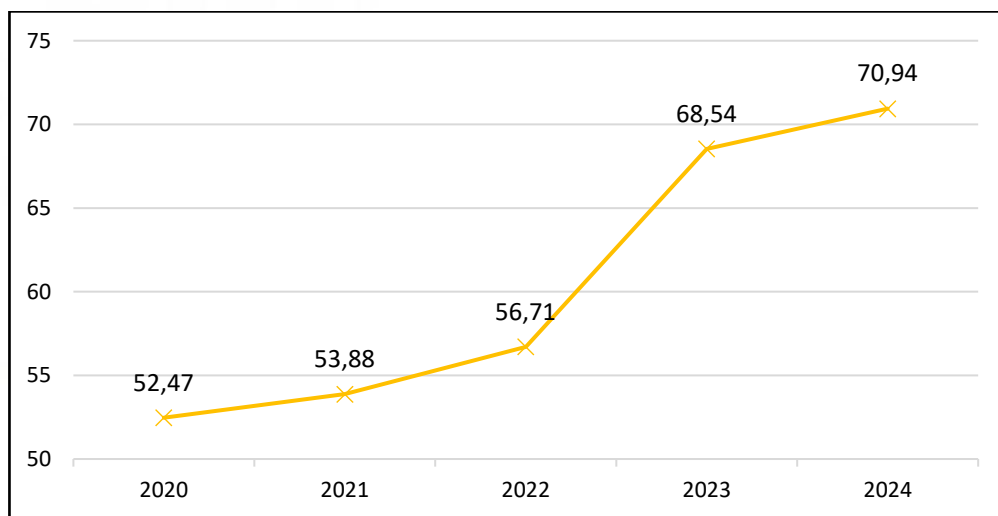
Analisis lebih mendalam mengungkapkan beberapa tantangan dalam pengembangan ASN untuk mendukung pelayanan umum dan tata kelola pemerintahan. Proporsi ASN dengan kualifikasi D-III/Akademi yang relatif tinggi dan diproyeksikan mencapai 15,97% pada 2024 mencerminkan kuatnya orientasi vokasi dalam birokrasi, namun juga mengindikasikan perlunya peningkatan kualifikasi berkelanjutan. Dalam perspektif Organizational Learning Theory yang dikembangkan oleh Senge (1990), diversitas dalam tingkat pendidikan dapat menjadi aset jika dikelola dengan baik melalui sistem pembelajaran organisasi yang mendorong kolaborasi dan transfer pengetahuan antar level kompetensi.

2.4.1.2 Reformasi Birokrasi

Kabupaten Barito Kuala mencatat kemajuan signifikan dalam implementasi reformasi birokrasi selama periode 2020-2023, tercermin dari peningkatan konsisten nilai Indeks Reformasi Birokrasi (IRB). Data menunjukkan terjadi akselerasi transformasi tata kelola yang menggembirakan, dengan nilai IRB meningkat dari 52,47 pada 2020 menjadi 68,54 pada 2023, mencatatkan pertumbuhan substansial sebesar 16,07 poin atau 30,63% dalam kurun waktu empat tahun.

Tren peningkatan nilai IRB menunjukkan pola yang menarik dengan akselerasi yang semakin kuat. Pada periode 2020-2021, peningkatan IRB relatif moderat sebesar 1,41 poin (2,69%), diikuti dengan peningkatan lebih signifikan sebesar 2,83 poin (5,25%) pada 2021-2022. Lonjakan paling dramatis terjadi pada periode 2022-2023 dengan peningkatan sebesar 11,83 poin (20,86%), mengindikasikan adanya upaya sistematis dan terarah dalam mendorong transformasi birokrasi.

Gambar II.18
Grafik Indeks Reformasi Birokrasi
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Dalam perspektif teoritis, akselerasi reformasi birokrasi Kabupaten Barito Kuala dapat dianalisis menggunakan paradigma *New Public Management* (NPM) yang dikembangkan oleh Hood (1991). NPM menekankan pentingnya prinsip-prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan orientasi hasil dalam tata kelola pemerintahan. Peningkatan signifikan pada IRB, terutama pada periode 2022-2023, mengindikasikan adanya transformasi substansial dari model birokrasi tradisional menuju paradigma yang lebih berorientasi pada kinerja dan pelayanan.

Teori Transformasi Kelembagaan yang dikemukakan oleh North (1990) juga menyediakan kerangka untuk memahami dinamika IRB Kabupaten Barito Kuala. Menurut teori ini, perubahan kelembagaan yang efektif memerlukan adaptasi terhadap insentif formal maupun informal. Peningkatan IRB yang konsisten, terutama lonjakan pada 2022-2023, mengindikasikan keberhasilan dalam membangun insentif institusional yang mendukung perubahan perilaku birokrasi.

Akselerasi nilai IRB berimplikasi pada beberapa aspek tata kelola pemerintahan. Pertama, peningkatan akuntabilitas dan transparansi yang menjadi komponen penting dalam penilaian IRB. Kedua, perbaikan kualitas pelayanan publik melalui simplifikasi prosedur dan standarisasi pelayanan. Ketiga, penguatan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil. Keempat, pengembangan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kompetensi dan integritas.

Aplikasi teori Diffusion of Innovation dari Rogers (2003) membantu menjelaskan pola akselerasi IRB yang meningkat secara signifikan pada 2022-2023. Menurut teori ini, adopsi inovasi mengikuti kurva S, di mana setelah mencapai "titik kritis" (*critical mass*), adopsi inovasi akan mengalami akselerasi. Lonjakan IRB pada 2022-2023 mengindikasikan bahwa reformasi birokrasi di Kabupaten Barito Kuala telah melewati titik kritis, di mana praktik-praktik inovatif dalam tata kelola pemerintahan telah terinternalisasi dalam sistem dan budaya organisasi.

Meskipun menunjukkan tren positif, nilai IRB 68,54 pada 2023 mengindikasikan masih adanya ruang untuk perbaikan. Merujuk pada standar nasional, nilai ini masih berada dalam kategori "baik" namun belum mencapai kategori "sangat baik" (>80). Teori Continuous Improvement yang diadvokasi oleh Deming (1986) menekankan pentingnya siklus perbaikan berkelanjutan (PDCA: *Plan, Do, Check, Act*) dalam proses transformasi organisasi. Pendekatan ini relevan dalam konteks upaya peningkatan kapasitas reformasi birokrasi Kabupaten Barito Kuala ke depan.

2.4.2 Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan data capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang tersedia, secara regional Kalimantan Selatan menunjukkan pencapaian SPM yang cukup beragam dengan rata-rata provinsi mencapai 96,54% dan masuk dalam kategori "Tuntas Utama". Provinsi Kalimantan Selatan memperoleh capaian sempurna 100% pada bidang Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Sosial, namun mengalami penurunan pada bidang Pendidikan (87,8%) dan Transmigrasi (98,49%). Dari 14 kabupaten/kota yang ada, hanya Kabupaten Tapin yang berhasil mencapai skor sempurna 100% di seluruh bidang SPM dan meraih kategori "Tuntas Paripurna", sementara 13 daerah lainnya berada pada kategori "Tuntas Utama" dengan rentang capaian 90,75% hingga 99,02%.

Kabupaten Barito Kuala menempati posisi ke-8 dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dengan capaian SPM sebesar 96,92% dan kategori "Tuntas Utama". Posisi ini menempatkan Barito Kuala di atas rata-rata provinsi dan menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam penyelenggaraan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kabupaten Barito Kuala berhasil unggul dibanding beberapa daerah seperti Kabupaten Tanah Laut (96,07%), Kabupaten Banjar (95,55%), Kabupaten Hulu Sungai Utara (94,91%), Kabupaten Hulu Sungai Tengah (94,42%), Kota Banjarmasin (94,32%), dan Kabupaten Tanah Bumbu (90,75%).

Tabel II-23
Capaian SPM Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan

NO	PEMDA	PENDIDIKAN	KESEHATAN	PEKERJAAN UMUM	PERUMAHAN RAKYAT	TRANTIBUMLINMAS	SOSIAL	RATA RATA	KATEGORI INDEKS PENERAPAN
1	KAB. TAPIN	100	100	100	100	100	100	100	TUNTAS PARIPURNA
2	KAB. BALANGAN	99,7	99,9	100	100	100	100	99,93	TUNTAS UTAMA
3	KAB. HULU SUNGAI SELATAN	96,4	98,05	100	100	100	99,67	99,02	TUNTAS UTAMA
4	KOTA BANJARBARU	96,29	93,29	99,83	100	100	100	98,24	TUNTAS UTAMA
5	KAB. KOTABARU	96,4	89,44	100	100	100	98,08	97,32	TUNTAS UTAMA
6	KAB. TABALONG	100	91,63	97	95	98,85	100	97,08	TUNTAS UTAMA
7	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	87,8	100	96,83	100	98,83	98,49	96,99	TUNTAS UTAMA
8	KAB. BARITO KUALA	92,86	89,74	100	100	98,89	100	96,92	TUNTAS UTAMA
9	KAB. TANAH LAUT	93,93	87,65	99,92	95	99,89	100	96,07	TUNTAS UTAMA
10	KAB. BANJAR	84,6	90,17	100	100	99,22	99,33	95,55	TUNTAS UTAMA
11	KAB. HULU SUNGAI UTARA	88,13	91,23	93,44	100	96,67	100	94,91	TUNTAS UTAMA
12	KAB. HULU SUNGAI TENGAH	94,94	87,77	100	100	96,11	87,71	94,42	TUNTAS UTAMA
13	KOTA BANJARMASIN	83,11	94,24	98,67	100	91,57	98,35	94,32	TUNTAS UTAMA
14	KAB. TANAH BUMBU	77,07	93,08	84,36	96,18	99,54	94,27	90,75	TUNTAS UTAMA
15	RATA-RATA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	92,23	93,3	97,86	99,01	98,54	98,28	96,54	

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Dalam analisis per bidang SPM, Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kinerja yang sangat baik pada empat bidang dengan capaian sempurna 100%, yaitu Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Sosial. Bidang Transmigrasi juga menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dengan skor 98,89%. Namun, terdapat dua bidang yang memerlukan perhatian khusus, yaitu bidang Pendidikan dengan capaian 92,86% dan bidang Kesehatan dengan capaian 89,74%. Kedua bidang ini menjadi fokus utama yang perlu ditingkatkan untuk mencapai kategori "Tuntas Paripurna" seperti yang telah diraih Kabupaten Tapin. Secara keseluruhan, capaian Barito Kuala menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dasar yang berkualitas kepada masyarakat, meskipun masih ada ruang untuk perbaikan khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan.

2.4.2.1 Capaian SPM Kab. Barito Kuala

Data capaian SPM Kabupaten Barito Kuala menunjukkan dinamika yang menarik antara tahun 2023 dan 2024. Secara agregat, terjadi kenaikan total capaian dari 95,54% menjadi 96,92%, mencerminkan upaya berkelanjutan dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah ini.

Tiga urusan berhasil mempertahankan standar tertinggi dengan capaian sempurna 100% selama dua tahun berturut-turut, yaitu Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, dan Sosial. Konsistensi ini menggambarkan kematangan sistem dan prosedur yang telah mapan dalam ketiga bidang tersebut. Di sisi lain, urusan Kesehatan mencatatkan kemajuan paling impresif dengan lompatan 4,84 poin dari 84,90% menjadi 89,74%, mengindikasikan adanya intervensi yang efektif dalam perbaikan layanan kesehatan masyarakat.

Tabel II-24
Capaian Penerapan SPM per Urusan Kab. Barito Kuala Tahun 2024

No	Urusan	Jumlah dilayani	Yang terlayani	Total aksi pencapaian
1.	Pendidikan	92.86%		
	a. PAUD	10.499	9.755	93.22%
	b. Pendidikan Dasar	51.088	49.766	97.21%
	c. Pendidikan Kesetaraan	1.452	1.246	88.16%
2.	Kesehatan	89.74%		
	a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	6.091	4.044	69.39%
	b. Pely. Kes Ibu Bersalin	6.064	3.912	69.29%
	c. Pely. Kes Bayi Baru Lahir	5.287	3.877	76.30%
	d. Pelayanan Kesehatan Balita	22.198	18.443	83.94%
	e. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	51.524	49.933	97.02%
	f. Pelayanan Kesehatan pada usia produktif	213.961	186.447	89.24%
	g. Pelayanan kesehatan pada lasia	32.311	29.373	91.75%
	h. Penderita hipertensi	21.344	21.344	100%
	i. Diabetes melitus	3.232	3.232	100%
	j. ODGJ	467	467	100%
	k. Orang terduga Tuberkulosis	4.432	4.432	100%
	l. HIV	6.169	6.169	100%
3.	Pekerjaan Umum	100%		
	a. Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum	5.024	5.024	100%

No	Urusan	Jumlah dilayani	Yang terlayani	Total aksi pencapaian
	b. Penyediaan Pelahanan Pengolahan Air Limbah Domestik	4.768	4.768	100%
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	100%		
	a. Penyediaann & RLH bagi korban bencana	160	160	100%
	b. Fasilitas RLH terkena relokasi program pemerintah	32	32	100%
5.	Trantibumlinmas			
	a. Pel. Ketentraman dan ketertiban umum	85.030	85.030	96.67%
	Kategori SPM Kebencanaan	100		
	a. Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1.743	1.743	100%
	b. Kesiapsiagaan	505	505	100%
	c. Penyelamatan evakuasi korban bencana	1.743	1.743	100%
	SPM DAMKAR	100%		
	a. Pel. Penyelamatan evakuasi korban kebakaran	26	26	100%
6.	Sosial	100%		
	a. Rehab Sosial Dasar Penyandang Disabilitas terlantar di luar panti	153	153	100%
	b. Rehab Sosial Dasar Anak terlantar di luar panti	96	96	100%
	c. Rehabilitas Sosial Dasar Lansia terlantar di luar panti	33	33	100%
	d. Rehab Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	23	23	100%
	e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat tanggap darurat bencana	128	128	100%

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Urusan Trantibum Linmas juga mengalami progres yang signifikan dengan kenaikan 3,96 poin dari 94,93% menjadi 98,89%, hampir mendekati capaian sempurna. Peningkatan ini menunjukkan penguatan kapasitas dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Namun, urusan Pendidikan menjadi satu-satunya bidang yang mengalami kemunduran dengan penurunan 0,54 poin dari 93,40% menjadi 92,86%. Meski penurunannya relatif kecil dan capaiannya masih tergolong baik, kondisi ini memerlukan analisis mendalam untuk mengidentifikasi faktor penyebab dan strategi perbaikan yang tepat, mengingat pendidikan merupakan fondasi pembangunan jangka panjang.

2.4.2.2 Capaian SPM Bidang Pendidikan Kab. Barito Kuala

Evaluasi kinerja SPM bidang Pendidikan di Kabupaten Barito Kuala memperlihatkan pola yang perlu dicermati lebih dalam. Meskipun total capaian mengalami penurunan dari 93,40% pada 2023 menjadi 92,86% pada 2024, kondisi ini tidak sepenuhnya negatif karena terdapat variasi kinerja yang berbeda pada setiap jenis layanan pendidikan.

Tabel II-25
Capaian Penerapan SPM bidang Pendidikan Kab. Barito Kuala

No	Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pendidikan Anak Usia Dini	94,49	93,22
2	Pendidikan Dasar	97,90	97,21
3	Pendidikan Kesetaraan	87,79	88,16
	Total Capaian	93,40	92,86

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Pendidikan Dasar tetap menjadi komponen dengan capaian tertinggi, walaupun mengalami sedikit penurunan dari 97,90% menjadi 97,21% atau turun 0,69 poin. Capaian ini masih sangat memuaskan dan menunjukkan bahwa infrastruktur serta layanan pendidikan dasar sudah cukup solid. Pendidikan Anak Usia Dini juga mengalami penurunan yang lebih signifikan dari 94,49% menjadi 93,22% atau turun 1,27 poin, yang mungkin mengindikasikan adanya tantangan dalam penyediaan layanan PAUD yang memerlukan perhatian khusus.

Sebaliknya, Pendidikan Kesetaraan justru menunjukkan tren positif dengan kenaikan dari 87,79% menjadi 88,16% atau naik 0,37 poin. Meskipun kenaikannya tidak besar, hal ini menggambarkan adanya perhatian yang meningkat terhadap program pendidikan alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan kesempatan kedua dalam mengenyam pendidikan. Namun demikian, capaian Pendidikan Kesetaraan masih menjadi yang terendah di antara ketiga jenis layanan, sehingga masih memerlukan upaya lebih intensif untuk mencapai standar yang lebih optimal dan merata di semua level pendidikan.

2.4.2.3 Capaian SPM Bidang Kesehatan Kab. Barito Kuala

Kinerja SPM bidang Kesehatan Kabupaten Barito Kuala menampilkan kontras yang menarik antara berbagai jenis layanan kesehatan. Total capaian yang meningkat dari 84,90% menjadi 89,74% ternyata merupakan hasil dari polarisasi capaian yang cukup ekstrem, dimana beberapa layanan mengalami kemajuan luar biasa sementara yang lain justru mengalami kemunduran signifikan.

Tabel II-26
Capaian Penerapan SPM bidang Kesehatan Kab. Barito Kuala Tahun 2024

No	Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Yankes Ibu Hamil	72,09	69,39
2	Yankes Ibu Bersalin	78,03	69,29
3	Yankes Bayi Baru Lahir	88,60	76,30
4	Yankes Balita	83,54	83,94
5	Yankes Pada Usia Pendidikan Dasar	93,63	97,02
6	Yankes Pada Usia Produktif	84,04	89,24
7	Yankes Pada Usia Lanjut	74,02	91,75
8	Yankes Penderita Hipertensi	61,78	100,00
9	Yankes Penderita Diabetes Melitus	100,00	100,00
10	Yankes ODGJ Berat	100,00	100,00
11	Yankes Orang Terduga TBC	96,74	100,00
12	Yankes Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV	86,36	100,00
	Total Capaian	84,90	89,74

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Pencapaian paling membanggakan terlihat pada layanan kesehatan untuk penyakit tertentu dan kelompok khusus. Yankes Penderita Hipertensi mencatatkan lompatan spektakuler dari 61,78% menjadi 100%, sementara empat jenis layanan lainnya berhasil mempertahankan atau mencapai capaian sempurna 100%, yaitu Yankes Penderita Diabetes Melitus, Yankes ODGJ Berat, Yankes Orang Terduga TBC, dan Yankes Orang Dengan Risiko Terinfeksi HIV. Yankes Pada Usia Lanjut juga menunjukkan peningkatan dramatis dari 74,02% menjadi 91,75%, mencerminkan perhatian serius terhadap kesehatan lansia.

Namun, kondisi yang mengkhawatirkan terjadi pada layanan kesehatan ibu dan anak. Yankes Ibu Hamil turun dari 72,09% menjadi 69,39%, Yankes Ibu Bersalin mengalami penurunan dari 78,03% menjadi 69,29%, dan yang paling memprihatinkan adalah Yankes Bayi Baru Lahir yang turun drastis dari 88,60% menjadi 76,30%. Penurunan ini sangat mengkhawatirkan mengingat pentingnya kesehatan ibu dan anak sebagai indikator kualitas kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi positif, Yankes Balita relatif stabil dengan sedikit peningkatan dari 83,54% menjadi 83,94%, sementara Yankes Pada Usia Pendidikan Dasar dan Yankes Pada Usia Produktif menunjukkan tren positif yang menggembirakan.

2.4.2.4 Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kab. Barito Kuala

Bidang Pekerjaan Umum menjadi salah satu sektor unggulan dalam capaian SPM Kabupaten Barito Kuala dengan mempertahankan skor sempurna 100% selama dua tahun berturut-turut. Konsistensi capaian maksimal ini menunjukkan bahwa infrastruktur dan sistem pengelolaan bidang Pekerjaan Umum telah mencapai standar yang sangat baik dan mampu dipertahankan secara berkelanjutan.

Tabel II-27
Capaian Penerapan SPM bidang Pekerjaan Umum
Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	100,00	100,00
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	100,00	100,00
Total Capaian		100,00	100,00

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Kedua komponen layanan dalam bidang ini, yaitu Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari dan Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik, sama-sama mencapai capaian sempurna 100% pada tahun 2023 maupun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa akses masyarakat terhadap air bersih dan sistem pengelolaan limbah domestik sudah berjalan dengan optimal. Capaian ini sangat penting mengingat ketersediaan air bersih dan pengelolaan limbah yang baik merupakan kebutuhan dasar yang berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup.

Stabilitas capaian sempurna dalam bidang Pekerjaan Umum menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala telah memiliki fondasi infrastruktur yang solid, sistem manajemen yang efektif, serta komitmen yang kuat dalam menjaga kualitas pelayanan. Keberhasilan ini dapat menjadi model dan pembelajaran bagi bidang-bidang lain dalam upaya mencapai dan mempertahankan standar pelayanan yang optimal.

2.4.2.5 Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kab. Barito Kuala

Bidang Perumahan Rakyat menunjukkan prestasi yang konsisten dengan capaian sempurna pada kedua tahun evaluasi. Pencapaian 100% yang bertahan dari 2023 hingga 2024 mengindikasikan kesiapan dan responsivitas pemerintah daerah dalam menangani kebutuhan perumahan masyarakat, khususnya dalam situasi darurat dan program strategis pemerintah.

Tabel II-28
Capaian Penerapan SPM bidang Perumahan Rakyat
Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00	100,00
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100,00	100,00
Total Capaian		100,00	100,00

Sumber: spm.bangda.kemendagri.go.id

Komponen pertama yaitu Penyediaan & Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana mencapai standar maksimal, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala memiliki sistem tanggap darurat yang efektif dan sumber daya yang memadai untuk merespon kebutuhan perumahan pasca bencana. Demikian pula dengan Fasilitasi Penyediaan Rumah Yang Layak Huni Bagi Masyarakat Yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah yang juga mencapai 100%, membuktikan kemampuan daerah dalam mengelola program relokasi dengan baik tanpa mengabaikan hak masyarakat atas tempat tinggal yang layak.

Keunggulan bidang Perumahan Rakyat ini mencerminkan adanya perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar instansi terkait, serta alokasi anggaran yang memadai untuk program-program perumahan. Capaian ini juga menunjukkan bahwa aspek perlindungan sosial dan jaminan tempat tinggal bagi masyarakat yang rentan telah menjadi prioritas yang terlaksana dengan baik di Kabupaten Barito Kuala.

2.4.2.6 Capaian SPM Bidang Trantibum Linmas Kab. Barito Kuala

Urusan Trantibum Linmas memperlihatkan dinamika perbaikan yang signifikan dengan peningkatan total capaian dari 94,93% menjadi 98,89%. Kemajuan ini terutama didorong oleh peningkatan luar biasa pada layanan-layanan yang berkaitan dengan mitigasi dan penanggulangan bencana, menunjukkan komitmen serius pemerintah daerah dalam memperkuat sistem keamanan dan keselamatan masyarakat.

Tabel II-29
Capaian Penerapan SPM bidang Trantibum Linmas
Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Kabupaten/Kota	100,00	96,67
2	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	75,85	100,00
3	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	65,04	100,00
4	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100,00	100,00
5	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100,00	100,00
Total Capaian		94,93	98,89

Sumber Data : spm.bangka.kemendagri.go.id

Transformasi paling mencolok terjadi pada dua komponen layanan bencana yang sebelumnya masih memerlukan perbaikan. Pelayanan Informasi Rawan Bencana mengalami lompatan dramatis dari 75,85% menjadi 100%, sementara Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana mencatatkan peningkatan spektakuler dari 65,04% menjadi 100%. Kedua pencapaian ini mengindikasikan adanya investasi besar-besaran dalam sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana, yang sangat krusial mengingat karakteristik geografis Indonesia yang rentan terhadap berbagai jenis bencana alam.

Sementara itu, tiga komponen lainnya menunjukkan stabilitas yang berbeda-beda. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana serta Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran berhasil mempertahankan capaian sempurna 100% pada kedua tahun, mencerminkan kematangan sistem tanggap darurat yang sudah mapan. Namun, Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum mengalami sedikit penurunan dari 100% menjadi 96,67%, yang meski masih dalam kategori sangat baik, perlu mendapat perhatian untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan penurunan tersebut agar dapat segera diperbaiki.

2.4.2.7 Capaian SPM Bidang Sosial Kab. Barito Kuala

Bidang Sosial menampilkan kinerja yang sangat mengagumkan dengan mempertahankan capaian sempurna 100% di seluruh komponen layanan selama dua tahun berturut-turut. Stabilitas capaian maksimal ini menggambarkan komitmen yang luar biasa dari Kabupaten Barito Kuala dalam melindungi dan memberdayakan kelompok-kelompok rentan dalam masyarakat, sekaligus membuktikan bahwa sistem perlindungan sosial telah terbangun dengan sangat solid.

Tabel II-30
Capaian Penerapan SPM bidang Sosial Kab. Barito Kuala Tahun 2023 dan 2024

No	Jenis Layanan SPM	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	100,00	100,00
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	100,00	100,00
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	100,00	100,00
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	100,00	100,00
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100,00	100,00
Total Capaian		100,00	100,00

Sumber Data : spm.bangka.kemendagri.go.id

Kelima komponen layanan sosial yang mencakup berbagai kelompok sasaran menunjukkan keseragaman pencapaian yang luar biasa. Rehabilitasi Sosial Dasar untuk Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Tuna

Sosial khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti semuanya mencapai standar maksimal. Hal ini mengindikasikan bahwa program-program pemberdayaan dan rehabilitasi sosial telah dirancang dan diimplementasikan dengan tepat sasaran, didukung oleh alokasi sumber daya yang memadai dan koordinasi yang efektif antar berbagai pihak terkait.

Pencapaian sempurna pada komponen Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Bagi Korban Bencana juga menunjukkan kesiapan daerah dalam menghadapi situasi krisis dan memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terdampak. Konsistensi capaian 100% di bidang Sosial menjadikan sektor ini sebagai salah satu model terbaik dalam penyelenggaraan SPM, yang dapat menjadi rujukan bagi bidang-bidang lain dalam upaya mencapai standar pelayanan yang optimal dan berkelanjutan.

2.4.3 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.4.3.1 Urusan Pendidikan

Kabupaten Barito Kuala memiliki karakteristik unik dalam penyediaan layanan pendidikan dasar yang tercermin dari distribusi dan keseimbangan antara fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan peserta didik. Analisis terhadap tiga variabel kunci ini memberikan pemahaman komprehensif tentang kondisi dan tantangan dalam pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang pendidikan di kabupaten ini.

Secara keseluruhan, pada tahun 2024 Kabupaten Barito Kuala memiliki 246 TK, 273 SD, 62 SMP, dan 19 SMA dengan total 947 guru TK, 2.431 guru SD, 800 guru SMP, dan 460 guru SMA. Jumlah peserta didik mencapai 7.256 siswa TK, 28.646 siswa SD, 9.037 siswa SMP, dan 5.840 siswa SMA. Data ini menunjukkan bahwa distribusi fasilitas pendidikan cenderung menurun pada jenjang yang lebih tinggi, mengikuti pola piramida yang umum ditemui dalam sistem pendidikan, sesuai dengan teori hierarki kebutuhan pendidikan yang dikemukakan oleh Coombs (1985).

Tabel II-31
Rasio Siswa-Guru menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	8.9:1	11.3:1	11.2:1	17.5:1

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tamban	6.5:1	11.5:1	11.3:1	13.9:1
Mekarsari	6.8:1	10.2:1	7.0:1	14.4:1
Anjir Pasar	6.1:1	7.6:1	7.4:1	15.6:1
Anjir Muara	6.3:1	9.0:1	11.2:1	9.0:1
Alalak	11.3:1	17.6:1	14.4:1	10.4:1
Mandastana	7.5:1	11.9:1	11.5:1	15.5:1
Jejangkit	8.2:1	7.8:1	9.2:1	9.3:1
Belawang	6.5:1	10.3:1	12.3:1	8.2:1
Wanaraya	9.0:1	9.8:1	13.1:1	15.9:1
Barambai	7.7:1	11.9:1	11.0:1	11.3:1
Rantau Badauh	8.2:1	10.3:1	9.2:1	13.0:1
Cerbon	6.5:1	9.3:1	7.0:1	-
Bakumpai	9.8:1	11.9:1	10.3:1	10.1:1
Marabahan	5.5:1	13.6:1	10.2:1	15.0:1
Tabukan	7.5:1	13.5:1	10.0:1	10.5:1
Kuripan	6.7:1	9.1:1	9.7:1	10.3:1
Kabupaten Barito Kuala	7.7:1	11.8:1	11.3:1	12.7:1

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis rasio siswa-guru menunjukkan pola yang bervariasi antar jenjang pendidikan. Untuk tingkat TK, rasio siswa-guru adalah 7,7:1, untuk SD 11,8:1, untuk SMP 11,3:1, dan untuk SMA 12,7:1. Merujuk pada teori efektivitas pembelajaran yang dikemukakan oleh Slavin (2006), rasio siswa-guru yang lebih rendah umumnya berhubungan dengan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Rasio di Kabupaten Barito Kuala relatif baik dan berada di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam SPM Pendidikan nasional, yang mengindikasikan potensi untuk memberikan layanan pendidikan berkualitas dari aspek ketersediaan tenaga pengajar.

Tabel II-32
Rasio Siswa-Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	29.1	99.2	139.8	332.0
Tamban	25.0	100.2	113.1	264.0
Mekarsari	23.0	89.7	81.0	332.0
Anjir Pasar	23.7	63.7	99.5	483.0
Anjir Muara	25.2	75.3	175.7	190.0
Alalak	45.7	204.2	246.9	278.3
Mandastana	30.1	97.6	140.8	541.0
Jejangkit	24.5	58.9	120.0	158.0
Belawang	28.2	76.1	185.0	139.0
Wanaraya	26.0	84.3	128.0	477.0
Barambai	32.0	108.6	124.3	214.0
Rantau Badauh	25.3	85.6	115.5	287.0

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Cerbon	18.8	80.5	76.5	-
Bakumpai	37.7	116.9	120.7	223.0
Marabahan	26.7	142.3	179.0	673.0
Tabukan	30.6	103.3	125.5	242.0
Kuripan	19.3	63.7	71.0	186.0
Kabupaten Barito Kuala	29.5	104.9	145.8	307.4

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis distribusi spasial menunjukkan kesenjangan yang signifikan antar kecamatan. Kecamatan Alalak memiliki konsentrasi fasilitas pendidikan tertinggi dengan 37 TK, 34 SD, 10 SMP, dan 3 SMA, serta jumlah siswa terbanyak di semua jenjang (1.692 siswa TK, 6.944 siswa SD, 2.469 siswa SMP, dan 835 siswa SMA). Kondisi ini selaras dengan teori *Central Place* oleh Christaller (1966) yang menjelaskan bahwa wilayah dengan populasi lebih tinggi dan aksesibilitas lebih baik cenderung memiliki konsentrasi layanan publik yang lebih tinggi. Di sisi lain, Kecamatan Cerbon tidak memiliki SMA, mengindikasikan kesenjangan akses pendidikan menengah yang memerlukan perhatian khusus dalam konteks pemerataan kesempatan pendidikan.

Rasio siswa-sekolah juga menunjukkan variasi yang menarik. Secara keseluruhan, rata-rata jumlah siswa per sekolah untuk TK adalah 29,5 siswa, SD 104,9 siswa, SMP 145,8 siswa, dan SMA 307,4 siswa. Merujuk pada teori ekonomi pendidikan yang dikemukakan oleh Psacharopoulos dan Woodhall (1985), sekolah dengan ukuran yang optimal dapat mencapai *economies of scale* dalam penggunaan sumber daya. Namun, analisis lebih mendalam mengungkapkan beberapa anomali, seperti di Kecamatan Jejangkit dengan rata-rata hanya 24,5 siswa per TK, jauh di bawah rata-rata kabupaten, yang berimplikasi pada efisiensi penggunaan sumber daya.

Tabel II-33
Rasio Guru-Sekolah menurut Jenjang Pendidikan dan Kecamatan

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Tabunganen	3.3	8.8	12.5	19.0
Tamban	3.9	8.7	10.0	19.0
Mekarsari	3.4	8.8	11.5	23.0
Anjir Pasar	3.9	8.3	13.5	31.0
Anjir Muara	4.0	8.4	15.7	21.0
Alalak	4.1	11.6	17.1	26.7
Mandastana	4.0	8.2	12.3	35.0
Jejangkit	3.0	7.5	13.0	17.0
Belawang	4.3	7.4	15.0	17.0
Wanaraya	2.9	8.6	9.8	30.0

Kecamatan	TK	SD	SMP	SMA
Barambai	4.2	9.2	11.3	19.0
Rantau Badauh	3.1	8.3	12.5	22.0
Cerbon	2.9	8.6	11.0	-
Bakumpai	3.8	9.8	11.7	22.0
Marabahan	4.9	10.5	17.5	45.0
Tabukan	4.1	7.7	12.5	23.0
Kuripan	2.9	7.0	7.3	18.0
Kabupaten Barito Kuala	3.9	8.9	12.9	24.2

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis rasio guru-sekolah mengindikasikan pola penempatan tenaga pendidik yang bervariasi. Rata-rata jumlah guru per sekolah untuk TK adalah 3,9 guru, SD 8,9 guru, SMP 12,9 guru, dan SMA 24,2 guru. Dalam kerangka teori *Structural Functionalism* yang diaplikasikan pada manajemen pendidikan oleh Talcott Parsons, distribusi optimal tenaga pendidik merupakan prasyarat bagi keberfungsian sistem pendidikan secara efektif. Beberapa kecamatan menunjukkan kondisi yang perlu mendapat perhatian, seperti Jejangkit dengan rata-rata hanya 3 guru per TK, yang kurang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan anak usia dini secara komprehensif.

Tabel II-34
Persentase Ketersediaan Fasilitas Pendidikan menurut Jenjang dan Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	TK (%)	SD (%)	SMP (%)	SMA (%)
Tabunganen	6.1	7.7	6.5	5.3
Tamban	11.0	9.5	12.9	10.5
Mekarsari	5.3	4.0	3.2	5.3
Anjir Pasar	2.8	6.6	3.2	5.3
Anjir Muara	6.9	7.3	4.8	5.3
Alalak	15.0	12.5	16.1	15.8
Mandastana	7.3	7.0	6.5	5.3
Jejangkit	0.8	4.0	3.2	5.3
Belawang	3.7	5.9	3.2	5.3
Wanaraya	6.5	5.1	6.5	5.3
Barambai	4.9	4.8	4.8	5.3
Rantau Badauh	5.3	5.9	6.5	5.3
Cerbon	4.5	4.0	3.2	0.0
Bakumpai	2.4	3.7	4.8	5.3
Marabahan	9.8	5.5	6.5	5.3
Tabukan	4.5	3.3	3.2	5.3
Kuripan	3.7	3.3	4.8	5.3

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Dalam perspektif pemenuhan SPM Pendidikan, kondisi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan beberapa capaian positif sekaligus tantangan yang masih perlu

diatasi. Kecukupan jumlah guru relatif terhadap siswa secara umum telah memenuhi standar nasional, namun distribusi yang tidak merata antar kecamatan mengindikasikan masih adanya kesenjangan akses. Teori Keadilan Distributif dalam pelayanan publik yang dikemukakan oleh Rawls (1971) menekankan pentingnya memastikan akses yang setara terhadap layanan dasar, termasuk pendidikan, bagi seluruh warga negara.

Ketimpangan akses pendidikan menengah, seperti yang terlihat dari terbatasnya jumlah SMA (hanya 19 unit untuk 17 kecamatan) dan tidak adanya SMA di Kecamatan Cerbon, berpotensi menjadi faktor pembatas dalam upaya meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pendidikan menengah. Menurut teori Deprivasi Relatif yang dikembangkan oleh Merton (1968), kesenjangan akses terhadap layanan publik dapat memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi dalam masyarakat dalam jangka panjang.

Secara keseluruhan, analisis terhadap tiga variabel kunci dalam sistem pendidikan Kabupaten Barito Kuala mengungkapkan bahwa meskipun terdapat beberapa capaian positif dalam pemenuhan standar pelayanan dasar pendidikan, masih terdapat tantangan signifikan dalam pemerataan akses dan kualitas antar wilayah. Kondisi ini memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan di kabupaten ini.

Sementara itu, Tingkat partisipasi anak usia 5-6 tahun dalam Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mencapai 92,91% dengan 9.755 anak dari total 10.499 anak yang berpartisipasi, menunjukkan antusiasme masyarakat terhadap pendidikan usia dini yang cukup tinggi meskipun masih terdapat sekitar 7% anak yang belum terjangkau layanan PAUD.

Tingkat partisipasi pendidikan dasar untuk anak usia 7-12 tahun menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan pencapaian 98,60%, dimana 32.991 anak dari total 33.459 anak telah berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Angka ini mengindikasikan bahwa program wajib belajar pendidikan dasar telah berjalan dengan efektif dan hampir mencapai target universal, dengan hanya sekitar 468 anak yang belum terjangkau layanan pendidikan dasar.

Gambar II.19
Tingkat Partisipasi Pendidikan Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan	Kelompok Usia	Berpartisipasi	Total Anak	Persentase	Status
1	PAUD	5-6 tahun	9.755	10.499	92,91%	BAIK
2	Pendidikan Dasar (SD)	7-12 tahun	32.991	33.459	98,60%	SANGAT BAIK
3	Pendidikan Menengah Pertama (SMP)	13-15 tahun	16.775	17.629	95,16%	BAIK
4	Pendidikan Kesetaraan	7-18 tahun	1.246	1.452	85,81%	PERLU PERHATIAN

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Tingkat partisipasi pendidikan menengah pertama untuk anak usia 13-15 tahun mencatat capaian 95,16% dengan 16.775 anak dari total 17.629 anak yang berpartisipasi. Meskipun angka ini masih tergolong baik, namun terdapat penurunan partisipasi dibandingkan jenjang pendidikan dasar, mengindikasikan adanya tantangan dalam transisi dari pendidikan dasar ke menengah yang perlu mendapat perhatian lebih lanjut.

Tingkat partisipasi dalam pendidikan kesetaraan untuk anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah hanya mencapai 85,81% dengan 1.246 anak dari total 1.452 anak yang berpartisipasi. Angka ini menunjukkan masih adanya kesenjangan akses pendidikan yang memerlukan intervensi khusus melalui program pendidikan kesetaraan untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam memperoleh pendidikan dasar dan menengah.

2.4.3.2 Urusan Kesehatan

Kabupaten Barito Kuala dengan populasi 322.178 jiwa pada tahun 2023 menunjukkan pola distribusi tenaga kesehatan yang bervariasi antar kecamatan. Analisis komprehensif terhadap data tenaga kesehatan mengungkapkan dinamika yang menarik terkait ketersediaan, aksesibilitas, dan pemerataan layanan kesehatan sebagai bagian dari pemenuhan standar pelayanan dasar.

Pada tahun 2024 Kabupaten Barito Kuala memiliki 85 tenaga medis, 352 tenaga keperawatan, 385 tenaga kebidanan, 66 tenaga kefarmasian, 45 tenaga kesehatan masyarakat, 26 tenaga kesehatan lingkungan, 56 tenaga gizi, 3 tenaga keterampilan fisik, 35 tenaga keteknisan medis, dan 56 tenaga teknis biomedika. Data ini menunjukkan ketidakseimbangan dalam komposisi tenaga kesehatan, dengan dominasi tenaga kebidanan (38,1%) dan keperawatan (34,9%) dari total tenaga kesehatan yang tersedia.

Tabel II-35
Rasio Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis	Keperawatan	Kebidanan	Kefarmasian	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan
Tabunganen	1.05	7.89	9.47	1.05	0.53	1.05
Tamban	0.41	5.78	7.85	1.24	1.65	0.41
Mekarsari	2.51	17.57	15.06	3.14	3.76	1.25
Anjir Pasar	1.98	11.23	13.87	1.32	2.64	1.32
Anjir Muara	1.74	10.47	13.37	1.16	0.58	1.16
Alalak	2.13	6.40	7.06	1.97	1.48	0.33
Mandastana	2.54	5.08	13.20	1.02	0.51	0.51
Jejangkit	4.66	12.82	17.48	2.33	2.33	1.17
Belawang	4.03	10.07	14.10	1.01	0.00	1.01
Wanaraya	2.23	6.69	13.39	0.74	1.49	0.74
Barambai	1.73	13.83	16.43	1.73	1.73	0.86
Rantau Badauh	1.81	8.46	13.29	1.21	1.21	0.60
Cerbon	3.05	15.27	21.37	3.05	3.05	3.05
Bakumpai	0.92	8.32	16.64	0.92	0.00	0.92
Marabahan	6.08	22.05	11.97	4.18	0.57	0.95
Tabukan	0.99	10.93	13.91	1.99	1.99	0.00
Kuripan	0.94	4.72	13.22	2.83	3.78	0.94
Kabupaten Barito Kuala	2.64	10.93	11.95	2.05	1.40	0.81

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis rasio tenaga kesehatan terhadap populasi mengungkapkan beberapa temuan penting. Rasio tenaga medis (dokter) terhadap populasi adalah 1:3.790 jiwa, jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan 1:1.000 jiwa. Menurut teori Health Service Accessibility yang dikembangkan oleh Penchansky dan Thomas (1981), akses terhadap layanan kesehatan dipengaruhi oleh lima dimensi: ketersediaan, keterjangkauan, keterjaminan, keberterimaan, dan kesesuaian. Rendahnya rasio dokter terhadap populasi mengindikasikan tantangan dalam dimensi ketersediaan yang berpotensi mempengaruhi aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar.

Tabel II-36
Rasio Tenaga Kesehatan per 10.000 Penduduk menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Gizi	Keterampilan Fisik	Keteknisan Medis	Teknis Biomedika
Tabunganen	2.10	0.00	1.05	0.53

Tamban	1.65	0.00	0.83	0.83
Mekarsari	2.51	0.00	1.25	1.25
Anjir Pasar	1.98	0.00	1.98	0.66
Anjir Muara	1.74	0.00	0.58	1.16
Alalak	1.15	0.00	0.98	1.15
Mandastana	1.02	0.00	0.51	0.51
Jejangkit	3.50	0.00	1.17	1.17
Belawang	1.01	0.00	1.01	1.01
Wanaraya	1.49	0.00	0.00	0.00
Barambai	2.59	0.00	0.86	0.86
Rantau Badauh	1.81	0.00	0.60	1.21
Cerbon	3.05	0.00	1.53	3.05
Bakumpai	2.77	0.00	0.00	1.85
Marabahan	1.52	0.57	2.09	5.51
Tabukan	1.99	0.00	0.99	0.99
Kuripan	1.89	0.00	0.94	0.94
Kabupaten Barito Kuala	1.74	0.09	1.09	1.74

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Distribusi tenaga kesehatan menunjukkan ketimpangan spasial yang signifikan. Kecamatan Marabahan, sebagai pusat pemerintahan kabupaten, memiliki konsentrasi tenaga kesehatan tertinggi dengan 32 tenaga medis (37,6% dari total kabupaten), 116 tenaga keperawatan (33%), dan 63 tenaga kebidanan (16,4%). Kondisi ini sesuai dengan teori Lokasi Sentral yang dikemukakan oleh Christaller, yang menjelaskan pola konsentrasi layanan publik di pusat-pusat administratif. Di sisi lain, beberapa kecamatan seperti Kuripan, Bakumpai, dan Tabukan hanya memiliki masing-masing 1 tenaga medis, menunjukkan kesenjangan yang perlu diatasi dalam konteks pemerataan akses terhadap layanan kesehatan.

Tabel II-37
Persentase Distribusi Tenaga Kesehatan menurut Kecamatan
di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis (%)	Keperawatan (%)	Kebidanan (%)	Kefarmasian (%)	Kesehatan Masyarakat (%)
Tabunganen	2.35	4.26	4.68	3.03	2.22
Tamban	1.18	3.98	4.94	4.55	8.89
Mekarsari	4.71	7.95	6.23	7.58	13.33
Anjir Pasar	3.53	4.83	5.45	3.03	8.89
Anjir Muara	3.53	5.11	5.97	3.03	2.22
Alalak	15.29	11.08	11.17	18.18	20.00

Kecamatan	Tenaga Medis (%)	Keperawatan (%)	Kebidanan (%)	Kefarmasian (%)	Kesehatan Masyarakat (%)
Mandastana	5.88	2.84	6.75	3.03	2.22
Jejangkit	4.71	3.13	3.90	3.03	4.44
Belawang	4.71	2.84	3.64	1.52	0.00
Wanaraya	3.53	2.56	4.68	1.52	4.44
Barambai	2.35	4.55	4.94	3.03	4.44
Rantau Badauh	3.53	3.98	5.71	3.03	4.44
Cerbon	2.35	2.84	3.64	3.03	4.44
Bakumpai	1.18	2.56	4.68	1.52	0.00
Marabahan	37.65	32.95	16.36	33.33	6.67
Tabukan	1.18	3.13	3.64	3.03	4.44
Kuripan	1.18	1.42	3.64	4.55	8.89

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis komposisi tenaga kesehatan per kecamatan mengungkapkan ketidakseimbangan dalam jenis tenaga kesehatan yang tersedia. Teori Kesehatan Masyarakat Komprehensif yang dikembangkan oleh Winslow menekankan pentingnya pendekatan holistik dalam penanganan kesehatan, mencakup aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif. Absennya tenaga psikolog klinis di seluruh kecamatan dan minimnya tenaga keterampilan fisik (hanya 3 orang dan hanya tersedia di Kecamatan Marabahan) mengindikasikan tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan mental dan rehabilitatif yang komprehensif.

Ketersediaan tenaga kesehatan spesialis dan penunjang juga menunjukkan ketimpangan yang perlu diperhatikan. Tidak adanya tenaga kesehatan tradisional dan ahli teknisi laboratorium medik di seluruh kabupaten menunjukkan keterbatasan dalam integrasi sistem kesehatan tradisional dengan modern serta kapasitas diagnostik yang perlu ditingkatkan. Menurut teori Systems Thinking in Public Health yang dikemukakan oleh de Savigny dan Adam (2009), sistem kesehatan yang efektif memerlukan interkoneksi dan sinergi antar berbagai komponen, termasuk tenaga kesehatan dengan berbagai spesialisasi.

Tabel II-38
Jumlah Tenaga Kesehatan per Fasilitas Kesehatan Dasar (Puskesmas)
menurut Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024

Kecamatan	Tenaga Medis	Keperawatan	Kebidanan	Kefarmasian	Kesehatan Masyarakat	Kesehatan Lingkungan
Tabunganen	2.00	15.00	18.00	2.00	1.00	2.00
Tamban	0.50	7.00	9.50	1.50	2.00	0.50
Mekarsari	4.00	28.00	24.00	5.00	6.00	2.00
Anjir Pasar	3.00	17.00	21.00	2.00	4.00	2.00
Anjir Muara	3.00	18.00	23.00	2.00	1.00	2.00
Alalak	4.33	13.00	14.33	4.00	3.00	0.67
Mandastana	5.00	10.00	26.00	2.00	1.00	1.00
Jejangkit	4.00	11.00	15.00	2.00	2.00	1.00
Belawang	4.00	10.00	14.00	1.00	0.00	1.00
Wanaraya	3.00	9.00	18.00	1.00	2.00	1.00
Barambai	2.00	16.00	19.00	2.00	2.00	1.00
Rantau Badauh	3.00	14.00	22.00	2.00	2.00	1.00
Cerbon	2.00	10.00	14.00	2.00	2.00	2.00
Bakumpai	1.00	9.00	18.00	1.00	0.00	1.00
Marabahan	10.67	38.67	21.00	7.33	1.00	1.67
Tabukan	1.00	11.00	14.00	2.00	2.00	0.00
Kuripan	1.00	5.00	14.00	3.00	4.00	1.00
Rata-rata per Puskesmas	3.15	13.04	17.81	2.44	1.67	1.22

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis rasio tenaga kesehatan terhadap fasilitas kesehatan juga menunjukkan pola yang menarik. Kecamatan Alalak dengan 13 tenaga medis, 39 tenaga keperawatan, dan 43 tenaga kebidanan memiliki kapasitas pelayanan yang relatif baik dibandingkan kecamatan lain. Namun, masih terdapat beberapa kecamatan dengan keterbatasan tenaga kesehatan seperti Wanaraya yang tidak memiliki tenaga keteknisan medis dan teknis biomedika, yang berimplikasi pada cakupan dan kualitas layanan yang dapat diberikan. Dalam konteks teori Capacity Building for Health Systems yang dikembangkan oleh WHO, pengembangan kapasitas sistem kesehatan tidak hanya mencakup infrastruktur, tetapi juga ketersediaan tenaga kesehatan yang memadai dan terdistribusi secara merata.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Kuala, terdapat beberapa implikasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal kesehatan. Pertama, ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antar kecamatan berpotensi menciptakan kesenjangan dalam aksesibilitas layanan kesehatan. Kedua, ketidakseimbangan komposisi jenis tenaga kesehatan mengindikasikan tantangan dalam penyediaan layanan kesehatan yang komprehensif. Ketiga, konsentrasi tenaga kesehatan di pusat pemerintahan (Marabahan) mengindikasikan perlunya

strategi desentralisasi layanan untuk meningkatkan aksesibilitas bagi masyarakat di wilayah perifer.

Gambar II.20
Indikator Kinerja Kesehatan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kesehatan	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
1	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	192	329.799	0,58	TERBATAS
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	1	1	100%	PERFECT
PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK					
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	4.044	4.391	92,10%	BAIK
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	3.912	3.947	99,11%	SANGAT BAIK
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	3.877	3.929	98,68%	SANGAT BAIK
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	18.443	21.397	86,19%	PERLU PERHATIAN
PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KELOMPOK USIA					
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	49.933	51.088	97,74%	SANGAT BAIK
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	186.447	220.100	84,71%	PERLU PERHATIAN
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	29.373	32.632	90,01%	BAIK
PELAYANAN KESEHATAN PENYAKIT KHUSUS					
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	21.344	21.344	100%	PERFECT
11	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	3.232	3.232	100%	PERFECT
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	467	467	100%	PERFECT
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	4.432	4.432	100%	PERFECT
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	6.169	6.169	100%	PERFECT

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sedangkan, untuk Rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk menunjukkan angka 0,58 dengan 192 tempat tidur untuk melayani 329.799 penduduk, mengindikasikan ketersediaan fasilitas rawat inap yang masih terbatas dan memerlukan penambahan kapasitas untuk memenuhi standar pelayanan kesehatan yang optimal. Persentase rumah sakit rujukan tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi mencapai 100% dengan 1 dari 1 rumah sakit telah memiliki akreditasi, menunjukkan komitmen yang sangat baik terhadap kualitas dan standar pelayanan kesehatan di fasilitas rujukan utama.

Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 92,10% dengan 4.044 ibu hamil dari total 4.391 yang mendapatkan pelayanan, menunjukkan cakupan yang baik namun masih terdapat 347 ibu hamil yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai selama kehamilan. Persentase ibu bersalin yang

mendapatkan pelayanan persalinan menunjukkan capaian sangat baik dengan 99,11%, dimana 3.912 dari 3.947 ibu bersalin telah mendapatkan pelayanan persalinan yang sesuai standar, dengan hanya 35 ibu yang belum terlayani optimal.

Persentase bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan mencapai 98,68% dengan 3.877 dari 3.929 bayi baru lahir telah mendapatkan pelayanan, menunjukkan sistem pelayanan kesehatan neonatal yang sangat baik dengan hanya 52 bayi yang belum mendapatkan pelayanan optimal. Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar mencatat 86,19% dengan 18.443 dari 21.397 balita yang mendapatkan pelayanan, menunjukkan masih terdapat gap yang cukup signifikan dengan 2.954 balita yang belum mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan.

Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar mencapai 97,74% dengan 49.933 dari 51.088 anak terlayani, menunjukkan program kesehatan sekolah yang berjalan dengan sangat baik dengan hanya 1.155 anak yang belum mendapatkan pelayanan optimal. Persentase orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mencapai 84,71% dengan 186.447 dari 220.100 orang yang telah diskriming, mengindikasikan masih perlunya peningkatan program skrining untuk usia produktif dengan 33.653 orang yang belum terjangkau layanan skrining.

Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar mencapai 90,01% dengan 29.373 dari 32.632 lansia terlayani, menunjukkan program kesehatan lansia yang cukup baik namun masih terdapat 3.259 lansia yang belum mendapatkan skrining kesehatan. Persentase penderita hipertensi, diabetes melitus, ODGJ berat, orang terduga TBC, dan orang dengan risiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar semuanya mencapai 100%, menunjukkan sistem pelayanan kesehatan khusus yang sangat baik dengan cakupan universal untuk kondisi-kondisi kesehatan spesifik tersebut, melayani masing-masing 21.344 penderita hipertensi, 3.232 penderita DM, 467 ODGJ berat, 4.432 orang terduga TBC, dan 6.169 orang berisiko HIV.

2.4.3.3 Urusan Pekerjaan Umum

Infrastruktur jalan merupakan komponen fundamental dalam mendukung aksesibilitas dan mobilitas di Kabupaten Barito Kuala, sekaligus menjadi determinan penting bagi daya saing daerah. Analisis komprehensif terhadap perkembangan jaringan jalan periode 2020-2024, dengan tambahan data kondisi jalan tahun 2020-2024, memberikan gambaran yang substantif mengenai upaya pemerintah daerah dalam memperkuat konektivitas wilayah.

Tabel II-39
Panjang Jalan sesuai Jenis Jalan (km) di Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2021-2024

Jenis Jalan	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan 2020-2024 (%)
Aspal	338.61	338.61	338.61	423.37	450.00	32.90
Kerikil	235.22	235.22	235.22	262.00	280.00	19.04
Tanah	29.95	29.95	29.95	65.86	75.00	150.42
Lainnya	24.35	24.35	24.35	30.55	35.00	43.74
Total	628.13	628.13	628.13	781.77	840.00	33.73

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Barito Kuala (diolah)

Perkembangan kuantitas infrastruktur jalan menunjukkan peningkatan signifikan selama periode 2020-2024. Total panjang jalan meningkat dari 628,13 km pada 2020 menjadi 840,00 km pada 2024 (proyeksi moderat), menandakan adanya ekspansi sebesar 211,87 km (33,73%) dalam lima tahun. Peningkatan paling substansial terjadi pada jalan beraspal yang bertambah dari 338,61 km menjadi 450,00 km, dengan penambahan 111,39 km (32,90%). Pertumbuhan ini sejalan dengan teori Economic Geography yang dikemukakan oleh Krugman (1991), yang menekankan pentingnya infrastruktur transportasi sebagai enabler bagi aglomerasi ekonomi dan penurunan biaya transaksi.

Komposisi jenis permukaan jalan juga mengalami perubahan yang mengindikasikan peningkatan kualitas. Proporsi jalan beraspal relatif stabil di kisaran 53-54% dari total panjang jalan selama periode 2020-2024. Jalan kerikil mengalami ekspansi dari 235,22 km menjadi 280,00 km, dengan pertumbuhan 19,04% selama periode tersebut. Jalan tanah menunjukkan peningkatan paling dramatis, dari 29,95 km menjadi 75,00 km, bertambah 150,42%. Kategori jalan lainnya juga meningkat dari 24,35 km menjadi 35,00 km, tumbuh 43,74%. Diversifikasi jenis jalan ini mencerminkan

pendekatan pembangunan yang komprehensif, selaras dengan teori Inclusive Infrastructure Development yang dikemukakan oleh World Bank (2019), yang menekankan pentingnya aksesibilitas infrastruktur yang menjangkau berbagai lapisan masyarakat.

Tabel II-40
Kondisi Jalan (km) di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020	2021	2022	2023	2024	Persentase Pertumbuhan 2020-2024 (%)
Baik-Sedang	425.00	440.00	470.00	520.00	570.00	34.12
Rusak-Rusak Berat	203.13	188.13	158.13	261.77	270.00	32.92
Total	628.13	628.13	628.13	781.77	840.00	33.73

Sumber: Pekerjaan Umum (diolah)

Dari perspektif kualitas, data kondisi jalan periode 2020-2024 menunjukkan tren positif. Panjang jalan berkondisi baik-sedang meningkat dari 425,00 km pada 2020 menjadi 570,00 km pada 2024, dengan pertumbuhan 34,12% selama lima tahun. Sementara itu, jalan dengan kondisi rusak-rusak berat, meskipun mengalami fluktuasi, meningkat dari 203,13 km pada 2020 menjadi 270,00 km pada 2024, dengan pertumbuhan 32,92%. Peningkatan pada kedua kategori ini terjadi karena adanya penambahan signifikan pada total panjang jalan yang mencapai 33,73% dalam periode yang sama.

Tabel II-41
Persentase Kondisi Jalan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

Kondisi Jalan	2020 (%)	2021 (%)	2022 (%)	2023 (%)	2024 (%)	Perubahan 2020-2024 (poin persentase)
Baik-Sedang	67.66	70.05	74.82	66.52	67.86	0.20
Rusak-Rusak Berat	32.34	29.95	25.18	33.48	32.14	-0.20
Total	100	100	100	100	100	-

Sumber: BPS Pekerjaan Umum (diolah)

Berdasarkan persentase, proporsi jalan berkondisi baik-sedang mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024, namun masih menunjukkan tren yang relatif stabil. Persentase jalan baik-sedang meningkat dari 67,66% pada 2020 menjadi 74,82% pada

2022, kemudian menurun menjadi 66,52% pada 2023 akibat penambahan signifikan total panjang jalan, dan kembali meningkat menjadi 67,86% pada 2024. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan 0,20 poin persentase selama lima tahun. Sebaliknya, persentase jalan rusak-rusak berat menurun dari 32,34% pada 2020 menjadi 32,14% pada 2024, dengan penurunan 0,20 poin persentase. Merujuk pada Infrastructure Management Theory yang dikembangkan oleh Hudson et al. (1997), pengelolaan proaktif dalam pemeliharaan infrastruktur berperan krusial dalam mengoptimalkan investasi publik dan memaksimalkan nilai ekonomi infrastruktur dalam jangka panjang.

Implikasi dari pengembangan jaringan jalan terhadap daya saing Kabupaten Barito Kuala multidimensional. Pertama, peningkatan konektivitas internal dan eksternal berpotensi menurunkan biaya logistik, yang menurut World Bank (2018) dapat mencapai 25-30% dari harga produk di negara berkembang. Kedua, aksesibilitas yang lebih baik membuka peluang pengembangan kawasan-kawasan ekonomi baru, mendorong diversifikasi aktivitas ekonomi dan mereduksi ketimpangan spasial. Ketiga, sebagaimana dikemukakan dalam Resource-Based Theory of Regional Competitiveness oleh Porter (1990), infrastruktur transportasi yang baik menjadi keunggulan kompetitif yang memperkuat daya tarik investasi.

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap data infrastruktur jalan, Kabupaten Barito Kuala menunjukkan komitmen yang substansial dalam memperkuat fundamental daya saing daerah melalui pengembangan jaringan transportasi. Ekspansi signifikan dalam kuantitas dan peningkatan kualitas jalan mencerminkan pendekatan pembangunan yang berkesinambungan dan berorientasi jangka panjang. Dalam perspektif teoritis, upaya ini sejalan dengan paradigma pembangunan infrastruktur inklusif yang menekankan pentingnya konektivitas sebagai enabler pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Sementara itu, Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir mencapai 54,28% dengan 13.930,09 hektar dari total 25.662,05 hektar kawasan rawan banjir telah terlindungi, menunjukkan masih terdapat 11.731,96 hektar kawasan permukiman yang memerlukan infrastruktur pengendalian banjir tambahan untuk melindungi masyarakat dari risiko bencana banjir. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai menunjukkan 0% karena Kabupaten

Barito Kuala tidak memiliki pantai maupun kawasan permukiman sepanjang pantai, sehingga indikator ini tidak relevan untuk kondisi geografis wilayah kabupaten.

Gambar II.21
Indikator Kinerja Pekerjaan Umum pada Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pekerjaan Umum	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI					
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir <i>Berdasarkan Surat Pernyataan Kepala Dinas</i>	13.930,09	25.662,05	54,28%	PERLU PERHATIAN
2	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi <i>Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki pantai maupun kawasan permukiman sepanjang pantai</i>	0	1	0%	N/A
SISTEM IRIGASI DAN PENGAIRAN					
3	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	22.028	29.720	74,12%	BAIK
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI					
4	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi	68.947	94.228	73,17%	BAIK
5	Persentase rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74.212	94.228	78,76%	BAIK
PENATAAN BANGUNAN DAN JALAN					
6	Rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kabupaten/kota	585	585	100%	PERFECT
7	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	527,69	781,76	67,50%	PERLU PERHATIAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAN KESELAMATAN KONSTRUKSI					
8	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	2.101	2.812	74,72%	BAIK
9	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	198	198	100%	PERFECT

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Selanjutnya, rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi mencapai 74,12% dengan 22.028 hektar dari total 29.720 hektar daerah irigasi telah dilayani jaringan, mengindikasikan masih terdapat 7.692 hektar lahan pertanian yang memerlukan pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Di sisi lain, persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi mencapai 73,17% dengan 68.947 rumah tangga dari total 94.228 rumah tangga telah terlayani, menunjukkan masih terdapat 25.281 rumah tangga yang belum mendapatkan akses air minum yang memadai dan aman.

Sedangkan untuk pelayanan pengolahan air limbah domestik menunjukkan capaian yang lebih baik dengan 78,76%, dimana 74.212 rumah tangga dari total 94.228 rumah tangga telah memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik, meskipun masih terdapat 20.016 rumah tangga yang belum terlayani sistem pengolahan limbah yang proper. Adapun rasio kepatuhan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) kabupaten/kota

mencapai 100% dengan 585 dari 585 permohonan telah sesuai dengan ketentuan, menunjukkan sistem perizinan bangunan yang sangat baik dan tertib dalam pelaksanaan tata ruang wilayah.

Kemudian, tingkat kemantapan jalan kabupaten/kota mencapai 67,50% dengan 527,69 kilometer dari total 781,76 kilometer jalan dalam kondisi baik dan sedang, mengindikasikan masih perlunya peningkatan pemeliharaan dan perbaikan untuk 254,07 kilometer jalan yang kondisinya kurang memadai. Selain itu, rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi mencapai 74,72% dengan 2.101 dari 2.812 tenaga kerja telah tersertifikasi, menunjukkan komitmen terhadap peningkatan kualitas SDM konstruksi namun masih memerlukan pelatihan untuk 711 tenaga kerja yang belum bersertifikat. Terakhir, rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi menunjukkan capaian sempurna 100% dengan 198 proyek semuanya terlaksana tanpa kecelakaan, mengindikasikan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi yang sangat baik dan efektif dalam mencegah kecelakaan kerja.

2.4.3.4 Urusan Perumahan dan Permukiman

2.4.3.4.1 Hunian Layak dan Terjangkau

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan penting dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau bagi penduduknya, sebagaimana tercermin dalam data proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau selama periode 2020-2024. Analisis data ini memberikan wawasan mengenai efektivitas kebijakan perumahan daerah dan tingkat pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Berdasarkan data KLHS RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045, terjadi peningkatan bertahap dalam proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau, dari 43,47% pada 2020 menjadi 45,10% pada 2024 (proyeksi). Peningkatan kumulatif sebesar 1,63 poin persentase selama lima tahun ini menunjukkan kemajuan positif, namun dengan laju yang relatif moderat.

Tabel II-42
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak dan Terjangkau
di Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

Tahun	Proporsi (%)	Peningkatan Tahunan (poin persentase)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2020	43,47	-	-
2021	44,01	0,54	1,24
2022	44,01	0,00	0,00
2023	44,34	0,33	0,75
2024	45,10	0,76	1,71

Sumber: Dinas PUPR Barito Kuala (diolah)

Analisis pola pertumbuhan mengungkapkan dinamika yang menarik. Peningkatan tahunan bervariasi sepanjang periode, dengan kenaikan 0,54 poin persentase (1,24%) pada 2020-2021, stagnasi pada 2021-2022, peningkatan marjinal 0,33 poin persentase (0,75%) pada 2022-2023, dan diproyeksikan meningkat 0,76 poin persentase (1,71%) pada 2023-2024. Fluktuasi ini berimplikasi pada keberlanjutan pencapaian target perumahan jangka panjang. Jika kecenderungan ini berlanjut, dengan rata-rata peningkatan 0,41 poin persentase per tahun, pencapaian proporsi 50% akan memerlukan waktu sekitar 12 tahun. Hal ini menunjukkan perlunya akselerasi upaya penyediaan hunian layak dan terjangkau.

Stagnasi pada periode 2021-2022 mengindikasikan adanya hambatan struktural atau keterbatasan pendanaan yang perlu diatasi. Faktor-faktor potensial meliputi: (1) keterbatasan lahan untuk pengembangan perumahan, (2) tantangan pembiayaan baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat, (3) keterbatasan kapasitas sektor konstruksi lokal, atau (4) implementasi kebijakan yang belum optimal. Proporsi 45,10% pada 2024 mengindikasikan bahwa lebih dari setengah rumah tangga di Kabupaten Barito Kuala masih belum memiliki akses ke hunian yang memenuhi standar kelayakan dan keterjangkauan. Kesenjangan ini memerlukan pendekatan komprehensif yang menggabungkan kebijakan penyediaan perumahan umum, insentif untuk pengembang swasta, program pembiayaan perumahan yang inovatif, dan peningkatan kapasitas konstruksi lokal.

Peningkatan akses terhadap hunian layak dan terjangkau merupakan komponen penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendukung pembangunan sosial-ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Barito Kuala. Oleh karena itu,

penguatan kolaborasi multi-pihak dan diversifikasi pendekatan dalam penyediaan perumahan menjadi imperatif untuk akselerasi pencapaian di masa mendatang.

2.4.3.4.2 Sumber Air Minum Layak

Penyediaan akses air minum layak menjadi salah satu komponen esensial dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pemenuhan standar pelayanan dasar di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan data dari Dinas PUPRP Kabupaten Barito Kuala, perkembangan akses air minum layak selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang fluktuatif namun dengan tren umum yang positif. Analisis deskriptif terhadap data menunjukkan bahwa terjadi peningkatan akses air minum layak dari 65,42% pada 2020 menjadi 67,20% pada 2024 (proyeksi), atau penambahan sebesar 1,78 poin persentase (2,72%) dalam kurun waktu lima tahun. Meskipun menunjukkan kemajuan, laju peningkatan ini relatif moderat dan diinterupsi oleh penurunan signifikan pada 2021.

Analisis diagnostik mengidentifikasi beberapa pola penting dalam data tersebut. Pertama, terjadi fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada periode 2020-2022, yang mengindikasikan adanya faktor-faktor eksternal atau struktural yang mempengaruhi stabilitas penyediaan layanan air minum. Penurunan tajam sebesar 2,49 poin persentase pada 2021 dipengaruhi oleh tantangan terkait pandemi COVID-19 yang berdampak pada implementasi program, alokasi anggaran, dan operasional layanan air minum.

Tabel II-43
Persentase Akses Air Minum Layak Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase (%)	Perubahan Tahunan (poin persentase)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2020	65,42	-	-
2021	62,93	-2,49	-3,80
2022	66,08	3,15	5,00
2023	66,35	0,27	0,41
2024	67,20	0,85	1,28

Sumber: Dinas PUPR Barito Kuala (diolah)

Pemulihan yang kuat pada 2022 dengan peningkatan 3,15 poin persentase mencerminkan adanya upaya kompensasi dan akselerasi program pasca penurunan 2021. Namun, momentum ini tidak dapat dipertahankan pada 2023, dengan

peningkatan minimal sebesar 0,27 poin persentase yang menunjukkan kembali ke pola pertumbuhan yang lebih lambat. Proyeksi pertumbuhan pada 2024 sebesar 0,85 poin persentase (1,28%) menunjukkan tren peningkatan yang lebih baik dibandingkan 2023, namun tetap moderat. Pola ini mengindikasikan adanya tantangan struktural yang lebih mendasar dalam sistem penyediaan air minum, seperti keterbatasan sumber air baku, infrastruktur distribusi yang belum memadai, atau kendala pendanaan untuk ekspansi layanan.

Secara keseluruhan, meski terjadi peningkatan dalam lima tahun terakhir, capaian proyeksi 67,20% pada 2024 masih meninggalkan sekitar sepertiga populasi Kabupaten Barito Kuala tanpa akses air minum yang layak. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya strategi yang lebih komprehensif dan terintegrasi, termasuk diversifikasi sumber air, optimalisasi sistem distribusi, dan peningkatan kapasitas pengelolaan. Untuk mempercepat peningkatan akses, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala perlu mempertimbangkan pendekatan multi-dimensi yang mencakup pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan pengelola air minum, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan sistem. Integrasi teknologi tepat guna yang adaptif terhadap kondisi geografis lokal, seperti sistem penampungan air hujan yang ditingkatkan atau teknologi pengolahan air sederhana, juga dapat menjadi solusi komplementer untuk area yang sulit dijangkau oleh jaringan perpipaan konvensional.

2.4.3.4.3 Sanitasi Layak

Sanitasi layak merupakan komponen fundamental dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat dan perlindungan lingkungan di Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan data dari Dinas PUPRP Kabupaten Barito Kuala, capaian akses sanitasi layak menunjukkan tren peningkatan yang signifikan selama periode 2020-2024, dengan beberapa fluktuasi yang perlu dicermati secara mendalam. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa akses sanitasi layak di Kabupaten Barito Kuala meningkat dari 67,60% pada 2020 menjadi 70,50% pada 2024 (proyeksi), dengan total pertumbuhan 2,90 poin persentase atau 4,29% selama lima tahun.

Tabel II-44
Persentase Akses Sanitasi Layak di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

Tahun	Persentase (%)	Perubahan Tahunan (poin persentase)	Pertumbuhan Tahunan (%)
2020	67,60	3,78	5,92
2021	69,79	2,19	3,24
2022	69,16	-0,63	-0,90
2023	69,37	0,21	0,30
2024	70,50	1,13	1,63

Sumber: Dinas PUPR Barito Kuala (diolah)

Peningkatan signifikan terjadi pada periode 2020-2021 dengan kenaikan 2,19 poin persentase (3,24%), menunjukkan momentum positif dalam implementasi program sanitasi. Namun, terjadi penurunan sebesar 0,63 poin persentase (-0,90%) pada 2022 yang mengindikasikan adanya fenomena "implementation gap" yang telah diidentifikasi oleh Hutton dan Varughese (2016) dalam studi global tentang ekonomi sanitasi. Menurut penelitian tersebut, penurunan capaian setelah fase akselerasi awal umumnya disebabkan oleh tiga faktor utama: keterbatasan kapasitas teknis implementasi, kendala pendanaan berkelanjutan, dan kejenuhan intervensi pada kelompok masyarakat yang lebih mudah dijangkau.

Pemulihan moderat pada 2023 dengan peningkatan 0,21 poin persentase (0,30%) mencerminkan fase awal stabilisasi dalam siklus implementasi program sanitasi. Proyeksi untuk 2024 menunjukkan peningkatan yang lebih signifikan sebesar 1,13 poin persentase (1,63%), yang mengindikasikan adanya upaya penguatan dan reakselerasi program sanitasi setelah periode stabilisasi.

Meskipun menunjukkan capaian yang positif, persentase akses sanitasi layak yang diproyeksikan mencapai 70,50% pada 2024 masih menyisakan sekitar 29,50% masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang belum memiliki akses terhadap fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kelayakan. Situasi ini menggambarkan fenomena "last mile challenge" dalam penyediaan layanan sanitasi yang telah diidentifikasi oleh Gero et al. (2021), di mana kelompok masyarakat terakhir yang belum terlayani umumnya memiliki karakteristik spesifik seperti geografis yang menantang, keterbatasan ekonomi, atau hambatan sosial-budaya yang memerlukan pendekatan lebih khusus.

Merujuk pada "Sanitation Ladder Model" yang dikembangkan oleh WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme (2021), capaian Kabupaten Barito Kuala berada pada level

"substantial progress" namun belum mencapai "universal access" yang menjadi target global. Untuk mempercepat pencapaian akses universal, diperlukan strategi yang mengintegrasikan pendekatan berbasis pasar, penguatan perilaku, dan kebijakan insentif sebagaimana direkomendasikan dalam studi Willetts et al. (2018) tentang akselerasi pencapaian akses sanitasi di negara berkembang.

2.1.1.1.1 Indikator Kinerja Perumahan Rakyat

Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana Kab. Barito Kuala tahun 2024 mencapai capaian sempurna 100% dengan 40 unit dari 40 unit target telah terealisasi, menunjukkan sistem tanggap darurat dan pemulihan pasca bencana yang sangat responsif dan efektif. Demikian pula dengan fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota yang juga mencapai 100% dengan 8 unit dari 8 unit target telah terfasilitasi, mengindikasikan komitmen pemerintah yang sangat baik dalam menyediakan hunian pengganti bagi masyarakat yang terdampak program pembangunan.

Gambar II.22
Indikator Kinerja Perumahan Rakyat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Perumahan Rakyat	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
PROGRAM HUNIAN BAGI KORBAN BENCANA DAN RELOKASI					
1	Hunian untuk penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	40	40	100%	PERFECT
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	8	8	100%	PERFECT
PENATAAN KAWASAN PERMUKIMAN					
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	157,242	25,108	62,63%	BAIK
PROGRAM PERBAIKAN KUALITAS HUNIAN					
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	11.339	82.248	13,79%	KRITIS
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	11.210	19.329	58%	PERLU PERHATIAN

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sementara itu, persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 hektar di kabupaten/kota yang ditangani mencapai 62,63% dengan 157,242 hektar dari total 251,08 hektar kawasan kumuh telah mendapat penanganan, menunjukkan upaya yang cukup signifikan namun masih memerlukan penanganan tambahan untuk 93,838 hektar kawasan permukiman kumuh yang tersisa.

Di sisi lain, berkurangnya jumlah unit Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) menunjukkan capaian yang masih rendah dengan 13,79%, dimana hanya 11.339 unit dari total 82.248 unit RTLH yang telah tertangani, mengindikasikan masih terdapat tantangan besar dengan 70.909 unit rumah yang masih dalam kondisi tidak layak huni dan memerlukan program rehabilitasi atau pembangunan baru yang lebih masif.

Sedangkan untuk jumlah perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) mencapai 58% dengan 11.210 unit dari total 19.329 unit perumahan telah dilengkapi fasilitas pendukung, menunjukkan masih perlunya peningkatan penyediaan infrastruktur pendukung untuk 8.119 unit perumahan agar dapat memberikan kenyamanan dan kualitas hidup yang optimal bagi penghuninya.

2.4.3.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Perkembangan tren kejahatan dan penyelesaian perkara di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2019-2023 menunjukkan pola yang menarik dan memberikan wawasan penting mengenai dinamika keamanan serta efektivitas penegakan hukum di wilayah ini. Analisis komprehensif terhadap data ini mengungkapkan tren yang positif sekaligus tantangan yang perlu diatasi dalam sistem peradilan pidana. Analisis deskriptif menunjukkan penurunan konsisten dalam jumlah kejahatan, dari 350 kasus pada 2019 menjadi 265 kasus pada 2023, dengan total penurunan 24,29% selama lima tahun. Penurunan paling signifikan terjadi pada periode 2022-2023 dengan pengurangan 15,06%, yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan pada tahun-tahun sebelumnya yang berkisar antara 2,50% hingga 4,48%.

Tabel II-45
Data Kejahatan dan Penyelesaian Perkara di Kabupaten Barito Kuala 2019-2023

Tahun	Jumlah Kejahatan	Perubahan (%)	Penyelesaian Kejahatan	Perubahan (%)	Persentase Penyelesaian (%)	Risiko Penduduk
2019	350	-	220	-	63,0	1
2020	335	-4,29	210	-4,55	63,0	1
2021	320	-4,48	200	-4,76	62,5	1
2022	312	-2,50	192	-4,00	62,0	1
2023	265	-15,06	185	-3,65	70,0	1

Sumber: Kepolisian Resort Kabupaten Barito Kuala (diolah)

Fenomena penurunan kejahatan ini sejalan dengan teori "*Crime Decline*" yang dikemukakan oleh Farrell et al. (2014), yang mengidentifikasi bahwa penurunan angka kejahatan secara berkelanjutan sering dikaitkan dengan peningkatan tindakan pencegahan kejahatan, perubahan demografi, dan perbaikan kondisi sosial-ekonomi. Studi empiris yang dilakukan oleh Baumer dan Wolff (2014) juga mengkonfirmasi bahwa penurunan kejahatan yang konsisten sebesar 3-5% per tahun merupakan indikator keberhasilan strategi keamanan yang terintegrasi.

Data penyelesaian kejahatan menunjukkan penurunan dari 220 kasus pada 2019 menjadi 185 kasus pada 2023, dengan total pengurangan 15,91% dalam lima tahun. Meskipun terjadi penurunan dalam angka absolut, persentase penyelesaian perkara justru menunjukkan peningkatan signifikan dari 63% pada 2019 menjadi 70% pada 2023, dengan lonjakan terbesar terjadi antara 2022-2023 (dari 62% menjadi 70%). Peningkatan persentase penyelesaian kejahatan pada 2023 mencerminkan penerapan "*Strategic Policing Initiative*" sebagaimana diidentifikasi oleh Braga dan Weisburd (2015), yang menekankan pada alokasi sumber daya secara lebih efektif berdasarkan analisis pola kejahatan dan prioritas kasus. Lonjakan 8 poin persentase dalam setahun mengindikasikan adanya perubahan signifikan dalam pendekatan penegakan hukum, sejalan dengan konsep "*Tipping Point in Criminal Justice Reform*" yang dikemukakan oleh Sherman et al. (2020).

Analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa meskipun jumlah kasus yang diselesaikan menurun secara absolut, efisiensi penyelesaian kasus justru meningkat. Fenomena ini konsisten dengan teori "*Clearance Rate Paradox*" yang dikembangkan oleh Roberts (2017), di mana penurunan volume kejahatan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih fokus pada kasus yang tersisa, sehingga meningkatkan tingkat penyelesaian secara persentase. Risiko penduduk terkena kejahatan yang konsisten

pada angka 1 selama lima tahun berturut-turut mengindikasikan stabilitas relatif dalam probabilitas viktimisasi di masyarakat. Temuan ini perlu diinterpretasikan dengan hati-hati, karena menurut penelitian Van Dijk dan Tseloni (2018), angka risiko yang statis dapat menutupi variasi penting dalam distribusi risiko berdasarkan karakteristik sosio-demografis dan geografis.

Pola penurunan jumlah kejahatan yang diikuti dengan peningkatan efektivitas penyelesaian kasus mencerminkan fenomena "*Virtuous Cycle in Criminal Justice*" sebagaimana dikonseptualisasikan oleh Sampson dan Winship (2015), di mana penurunan kejahatan memberikan ruang bagi sistem keadilan untuk meningkatkan kualitas penanganan kasus, yang pada gilirannya berkontribusi pada penurunan kejahatan lebih lanjut. Analisis komprehensif terhadap data ini menegaskan pentingnya pendekatan integratif dalam peningkatan keamanan dan penegakan hukum di Kabupaten Barito Kuala. Tren positif yang tercatat selama 2019-2023 mencerminkan keberhasilan strategi pencegahan kejahatan dan penguatan kapasitas institusional dalam sistem peradilan pidana, meskipun masih terdapat ruang untuk peningkatan lebih lanjut, terutama dalam mencapai tingkat penyelesaian perkara yang optimal.

Gambar II.23
Indikator Kinerja Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Ketentraman dan Perlindungan	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					
1	Persentase Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang dapat diselesaikan	11	11	100%	PERFECT
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	9	9	100%	PERFECT
PENANGGULANGAN BENCANA					
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	39.780	39.780	100%	PERFECT
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana *Data memerlukan klarifikasi - inkonsistensi perhitungan persentase	141.279	141.279	0,31%	ANOMALY
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1.743	1.743	100%	PERFECT
PENANGGULANGAN KEBAKARAN					
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	22	22	100%	PERFECT
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	-	-	6,82 menit	RESPONSIF

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Persentase gangguan ketentraman dan ketertiban umum (Trantibum) yang dapat diselesaikan mencapai capaian sempurna 100% dengan 11 kasus dari 11 kasus yang dilaporkan telah berhasil ditangani, menunjukkan efektivitas Satpol PP dalam menyelesaikan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejalan dengan hal

tersebut, persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan juga mencapai 100% dengan 9 dari 9 peraturan daerah dan peraturan kepala daerah telah ditegakkan secara konsisten, mengindikasikan komitmen yang sangat baik dalam penegakan hukum dan peraturan di tingkat daerah.

Sementara itu, jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana menunjukkan cakupan universal dengan 100%, dimana seluruh 39.780 warga yang berada di kawasan rawan bencana telah mendapatkan informasi yang memadai tentang potensi risiko bencana di wilayah mereka. Namun demikian, terdapat inkonsistensi data pada jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang menunjukkan angka 0,31% meskipun data pembilang dan penyebut menunjukkan angka yang sama (141.279), yang mengindikasikan perlunya klarifikasi dan perbaikan sistem pencatatan data kebencanaan.

Di sisi lain, jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana mencapai 100% dengan 1.743 warga yang memerlukan evakuasi telah berhasil diselamatkan, menunjukkan sistem tanggap darurat yang sangat responsif dan efektif. Begitu pula dengan persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran yang mencapai 100% dengan 22 kasus kebakaran telah ditangani dengan baik, serta waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran yang mencapai 6,82 menit, mengindikasikan kesiapan dan responsivitas tim pemadam kebakaran yang sangat baik dalam memberikan pelayanan darurat kepada masyarakat.

2.4.3.6 Urusan Sosial

Distribusi kesejahteraan keluarga di Kabupaten Barito Kuala menampilkan potret yang beragam dan menarik untuk dikaji lebih dalam. Data kesejahteraan menunjukkan variasi signifikan antar kecamatan, mencerminkan dinamika sosial-ekonomi yang kompleks di wilayah ini. Secara keseluruhan, Kabupaten Barito Kuala memiliki 17.170 keluarga prasejahtera dan 36.096 keluarga sejahtera, dengan rasio 1:2,1 yang mengindikasikan bahwa untuk setiap keluarga prasejahtera terdapat sekitar dua keluarga sejahtera. Namun, rasio ini menunjukkan variasi dramatis antar kecamatan, mencerminkan ketimpangan spasial dalam distribusi kesejahteraan.

Tabel II-46
Distribusi Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Pra Sejahtera	Sejahtera	Total Keluarga	% Pra Sejahtera	% Sejahtera	Rasio Sejahtera : Pra Sejahtera
Tabunganen	372	3,725	4,097	9.08%	90.92%	10.01 : 1
Tamban	253	4,831	5,084	4.98%	95.02%	19.09 : 1
Mekarsari	530	3,132	3,662	14.47%	85.53%	5.91 : 1
Anjir Pasar	1,088	2,596	3,684	29.53%	70.47%	2.39 : 1
Anjir Muara	6,947	3,020	9,967	69.70%	30.30%	0.43 : 1
Alalak	903	2,166	3,069	29.42%	70.58%	2.40 : 1
Mandastana	255	2,404	2,659	9.59%	90.41%	9.43 : 1
Jejangkit	466	1,527	1,993	23.38%	76.62%	3.28 : 1
Belawang	536	992	1,528	35.08%	64.92%	1.85 : 1
Wanaraya	444	1,566	2,010	22.09%	77.91%	3.53 : 1
Barambai	457	684	1,141	40.05%	59.95%	1.50 : 1
Rantau Badauh	789	994	1,783	44.25%	55.75%	1.26 : 1
Cerbon	1,249	1,736	2,985	41.84%	58.16%	1.39 : 1
Bakumpai	302	2,400	2,702	11.18%	88.82%	7.95 : 1
Marabahan	678	2,720	3,398	19.95%	80.05%	4.01 : 1
Tabukan	1,067	1,271	2,338	45.64%	54.36%	1.19 : 1
Kuripan	834	332	1,166	71.53%	28.47%	0.40 : 1
Barito Kuala	17,170	36,096	53,266	32.23%	67.77%	2.10 : 1

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Kecamatan Anjir Muara mencatat fenomena unik dengan 6.947 keluarga prasejahtera (40,46% dari total keluarga prasejahtera kabupaten) dan tingkat kemiskinan 69,70%. Fenomena ini sesuai dengan teori "*poverty trap*" yang dikemukakan oleh Kraay dan McKenzie (2014), yang mengidentifikasi bahwa konsentrasi kemiskinan yang ekstrem di suatu wilayah dapat menciptakan mekanisme yang saling menguatkan seperti rendahnya investasi infrastruktur, terbatasnya akses layanan publik, dan kurangnya peluang ekonomi, yang pada gilirannya mempersulit upaya pengentasan kemiskinan.

Kecamatan Kuripan juga menunjukkan kondisi memprihatinkan dengan proporsi keluarga prasejahtera mencapai 71,53% dari total keluarga, tertinggi di kabupaten. Menurut kajian Azevedo et al. (2018) tentang kantong kemiskinan, wilayah dengan tingkat kemiskinan di atas 70% dikategorikan sebagai "*extreme poverty hotspot*" yang memerlukan intervensi khusus dan komprehensif, meliputi penciptaan lapangan kerja, penguatan jaringan pengaman sosial, dan peningkatan kapasitas produktif masyarakat.

Di sisi lain, Kecamatan Tamban menunjukkan profil kesejahteraan terbaik dengan hanya 4,98% keluarga prasejahtera dan rasio keluarga sejahtera terhadap prasejahtera mencapai 19,09:1. Hal ini diikuti oleh Tabunganen (90,92% keluarga

sejahtera) dan Mandastana (90,41% keluarga sejahtera). Studi empiris yang dilakukan oleh Narayan dan Pritchett (2019) menyimpulkan bahwa wilayah dengan tingkat kesejahteraan tinggi (di atas 90%) umumnya ditandai oleh tiga karakteristik utama: (1) diversifikasi ekonomi yang baik, (2) aksesibilitas terhadap pasar dan layanan publik, dan (3) tingkat modal sosial yang kuat.

Analisis distribusi spasial mengungkapkan pola kluster yang menarik. Kecamatan dengan persentase keluarga sejahtera tinggi (di atas 85%) cenderung berkelompok, begitu pula dengan kecamatan berpenduduk prasejahtera tinggi. Fenomena ini konsisten dengan "*spatial contagion theory*" yang dikembangkan oleh Durlauf (2016), yang menjelaskan bahwa faktor-faktor kesejahteraan cenderung menyebar ke area yang berdekatan melalui efek spillover, baik positif maupun negatif.

Gambar II.24
Indikator Kinerja Sosial Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Sosial	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
REHABILITASI SOSIAL KELOMPOK RENTAN					
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti SPM	306	306	100%	PERFECT
PENANGGULANGAN KORBAN BENCANA					
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	1.901	1.901	100%	PERFECT

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Disparitas kesejahteraan antar kecamatan di Kabupaten Barito Kuala juga dianalisis menggunakan koefisien variasi (CV). Dengan CV sebesar 0,75 untuk persentase keluarga sejahtera antar kecamatan, tingkat disparitas di kabupaten ini tergolong tinggi. Menurut standar yang digunakan oleh Bourguignon (2018), CV di atas 0,5 mengindikasikan ketimpangan spasial yang substansial dan memerlukan kebijakan pemerataan yang lebih agresif. Temuan penting lainnya adalah adanya korelasi negatif yang kuat ($r = -0,92$) antara jumlah keluarga prasejahtera dan rasio keluarga sejahtera terhadap prasejahtera. Hal ini mengkonfirmasi teori "*demographic burden of poverty*"

oleh Easterly (2019), yang menyatakan bahwa beban demografis kemiskinan cenderung terakumulasi di wilayah-wilayah tertentu dan menjadi faktor penghambat pembangunan.

Analisis lebih mendalam terhadap kecamatan dengan karakter ekstrem (Tamban, Anjir Muara, dan Kuripan) mengungkapkan perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi. Kecamatan Tamban dengan tingkat kesejahteraan tertinggi memiliki diversifikasi ekonomi yang lebih baik dengan kontribusi sektor jasa dan perdagangan yang signifikan. Sebaliknya, Anjir Muara dan Kuripan masih didominasi oleh sektor pertanian subsisten yang rentan terhadap guncangan eksternal. Temuan ini selaras dengan teori "*structural transformation*" oleh Rodrik (2018), yang menekankan pentingnya diversifikasi ekonomi dalam proses pembangunan berkelanjutan.

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti mencapai capaian sempurna 100% dengan 306 orang dari 306 orang target telah mendapatkan pelayanan rehabilitasi sosial sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM), menunjukkan sistem perlindungan sosial yang sangat efektif dalam memberikan layanan kepada kelompok rentan di masyarakat. Sejalan dengan capaian tersebut, persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota juga mencapai 100% dengan 1.901 korban bencana telah mendapatkan bantuan dan pemenuhan kebutuhan dasar secara optimal, mengindikasikan koordinasi yang sangat baik antara sistem penanggulangan bencana dan program perlindungan sosial dalam memberikan respons cepat dan tepat sasaran kepada masyarakat yang memerlukan bantuan darurat.

2.4.4 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.4.4.1 Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan indikator penting yang menggambarkan dinamika pasar tenaga kerja dan aktivitas ekonomi suatu wilayah. Data TPAK Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2020-2024 menunjukkan perkembangan positif yang memberikan wawasan penting mengenai kondisi ketenagakerjaan di daerah ini. Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala, TPAK mengalami peningkatan

konsisten dari 68,50% pada tahun 2020 menjadi 73,00% pada tahun 2024 (proyeksi), dengan penambahan kumulatif 4,50 poin persentase atau pertumbuhan sebesar 6,57% selama lima tahun.

Tabel II-47
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022-2023

Tahun	TPAK (%)	Perubahan (Poin Persentase)	Pertumbuhan (%)
2020	68,50	-	-
2021	69,60	1,10	1,61
2022	70,74	1,14	1,64
2023	71,89	1,15	1,63
2024	73,00	1,11	1,54

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis tahunan menunjukkan pola pertumbuhan yang relatif stabil, dengan peningkatan 1,10 poin persentase (1,61%) pada 2020-2021, 1,14 poin persentase (1,64%) pada 2021-2022, 1,15 poin persentase (1,63%) pada 2022-2023, dan proyeksi peningkatan 1,11 poin persentase (1,54%) pada 2023-2024. Konsistensi peningkatan ini mengindikasikan adanya tren struktural yang positif dalam pasar tenaga kerja Kabupaten Barito Kuala, bukan sekedar fluktuasi jangka pendek.

Peningkatan TPAK tahunan Kabupaten Barito Kuala yang rata-rata mencapai 1,13 poin persentase melebihi rata-rata peningkatan TPAK nasional yang hanya 0,82 poin persentase pada periode yang sama (BPS Nasional, 2023). Hal ini mengindikasikan dinamika pasar tenaga kerja yang lebih aktif di Kabupaten Barito Kuala dibandingkan tren nasional. Menurut teori "Labor Force Participation Dynamics" yang dikembangkan oleh Blundell dan MaCurdy (2018), peningkatan TPAK yang melebihi rata-rata nasional sering dikaitkan dengan beberapa faktor pendorong, seperti peningkatan peluang ekonomi, perbaikan iklim investasi, atau perubahan struktural dalam ekonomi daerah.

Nilai TPAK Kabupaten Barito Kuala pada 2023 yang mencapai 71,89% berada di atas rata-rata nasional (69,47%) dan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan (70,32%). Posisi ini menempatkan Kabupaten Barito Kuala dalam kategori daerah dengan tingkat partisipasi angkatan kerja yang tinggi, yang menurut klasifikasi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO, 2022) dikategorikan sebagai "high participation rate" (di atas 70%).

Signifikansi peningkatan TPAK ini dapat dianalisis dalam konteks teori "Economic Growth and Labor Market Dynamics" yang dikemukakan oleh Acemoglu dan Restrepo (2020). Menurut teori ini, peningkatan TPAK sebesar 1 poin persentase berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3-0,5 poin persentase dalam kondisi normal, dengan asumsi bahwa tambahan angkatan kerja dapat diserap produktif oleh pasar. Dengan demikian, peningkatan TPAK rata-rata sebesar 1,13 poin persentase per tahun di Kabupaten Barito Kuala berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,34-0,57 poin persentase setiap tahunnya.

Gambar II.25
Indikator Kinerja Tenaga Kerja Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Tenaga Kerja	Terlayani/Capaian	Target/Total	Hasil	Status
PERENCANAAN TENAGA KERJA					
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	4	4	100%	PERFECT
PENGEMBANGAN KOMPETENSI TENAGA KERJA					
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	7,628	175,196	4,35%	KRITIS
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (PDRB per Tenaga Kerja)	6.728.290.000.000	175,196	Rp 38.404.358	PRODUKTIF
HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN PENEMPATAN KERJA					
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	32	41	78,05%	BAIK
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	647	738	87,67%	SANGAT BAIK

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja pada tahun 2024, mencapai capaian sempurna 100% dengan 4 dari 4 kegiatan telah terlaksana sesuai Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD), menunjukkan perencanaan dan implementasi program ketenagakerjaan yang sangat terstruktur dan konsisten. Namun demikian, persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi masih sangat rendah dengan hanya 4,35%, dimana 7.628 dari total 175.196 tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi, mengindikasikan masih terdapat tantangan besar dalam peningkatan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui program sertifikasi yang memerlukan percepatan dan perluasan jangkauan.

Sementara itu, tingkat produktivitas tenaga kerja menunjukkan angka yang cukup baik dengan Rp. 38.404.358,54 per tenaga kerja, yang dihitung dari PDRB sebesar Rp. 6.728.290.000.000 dibagi dengan jumlah tenaga kerja 175.196 orang, mengindikasikan kontribusi ekonomi yang signifikan dari sektor ketenagakerjaan

terhadap perekonomian daerah. Di sisi lain, persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak mencapai 78,05% dengan 32 dari 41 perusahaan telah menerapkan standar pengelolaan ketenagakerjaan yang baik meliputi Peraturan Perusahaan/Perjanjian Kerja Bersama, Lembaga Kerjasama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, menunjukkan komitmen yang cukup baik namun masih memerlukan pembinaan untuk 9 perusahaan yang belum memenuhi standar.

Adapun persentase tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota mencapai 87,67% dengan 647 dari 738 pencari kerja berhasil ditempatkan, mengindikasikan efektivitas sistem penempatan tenaga kerja yang cukup baik namun masih terdapat 91 pencari kerja yang belum mendapatkan penempatan kerja yang sesuai dan memerlukan pendampingan lebih lanjut dalam proses pencarian kerja.

2.4.4.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.4.4.2.1 Indeks Pemberdayaan Gender

Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) merupakan indikator krusial yang mengukur kesetaraan gender dalam hal partisipasi ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan. Data IPG Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika menarik yang mencerminkan upaya dan tantangan dalam pencapaian kesetaraan gender di wilayah ini. Berdasarkan data tersebut, IPG Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren positif dengan kecenderungan meningkat secara konsisten. Nilai IPG meningkat dari 78,03 pada 2020 menjadi proyeksi 79,70 pada 2024, dengan peningkatan total sebesar 1,67 poin atau 2,14% selama lima tahun.

Tabel II-48
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

Tahun	Nilai IPG	Perubahan Absolut	Pertumbuhan (%)
2020	78.03	-	-
2021	78.17	0.14	0.18
2022	78.80	0.63	0.81
2023	79.24	0.44	0.56
2024	79.70	0.46	0.58

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa nilai rata-rata IPG selama periode pengamatan adalah 78,79 dengan standar deviasi 0,70. Koefisien variasi sebesar 0,0089 ($0,70/78,79$) mengindikasikan variabilitas yang relatif rendah, menunjukkan stabilitas dalam perkembangan IPG di Kabupaten Barito Kuala. Tren linier IPG menunjukkan slope positif, mengindikasikan tren peningkatan yang konsisten meskipun moderat.

Peningkatan IPG yang dimulai pada 2021 mengindikasikan resiliensi dan efektivitas intervensi yang diterapkan untuk mengatasi tantangan kesetaraan gender. Peningkatan signifikan sebesar 0,63 poin (0,81%) pada 2022 merupakan lonjakan tertinggi selama periode pengamatan dan menandai fase akselerasi dalam pemajuan kesetaraan gender. Menurut model "Gender Equality Recovery Trajectory" yang dikembangkan oleh UN Women (2022), lonjakan semacam ini umumnya terjadi ketika intervensi struktural mulai menunjukkan hasil dan sektor-sektor dominan perempuan mengalami penguatan.

Dengan nilai 79,24 pada 2023 dan proyeksi 79,70 pada 2024, IPG Kabupaten Barito Kuala tergolong dalam kategori "kesetaraan gender sedang tinggi" menurut klasifikasi UNDP (2022), yang mendefinisikan range 75-80 dalam kategori ini. Posisi ini menempatkan Kabupaten Barito Kuala di atas rata-rata nasional Indonesia dan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun yang sama.

Analisis tren dan laju pertumbuhan mengungkapkan pola pertumbuhan yang menarik. Laju pertumbuhan IPG meningkat secara signifikan dari 0,18% (2020-2021) menjadi 0,81% (2021-2022), kemudian sedikit melambat menjadi 0,56% (2022-2023), dengan proyeksi pertumbuhan 0,58% pada 2023-2024. Pola ini mencerminkan "curvilinear recovery pattern" yang diidentifikasi oleh World Economic Forum (2023) dalam analisis global mereka tentang dinamika kesetaraan gender.

Dengan mengasumsikan laju pertumbuhan tetap pada level 2023-2024 (0,58% per tahun), Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan akan mencapai nilai IPG 80 (batas bawah kategori "kesetaraan gender tinggi") dalam waktu sekitar 0,5 tahun setelah 2024. Namun, jika menggunakan rata-rata laju pertumbuhan periode 2020-2024 (0,53% per tahun), pencapaian threshold ini akan memerlukan waktu sedikit lebih lama.

2.4.4.2.2 Indeks Ketimpangan Gender

Kesetaraan gender merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan manusia berkelanjutan. Di Kabupaten Barito Kuala, perkembangan dimensi gender dapat dianalisis melalui dua indikator utama: Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). Kedua indikator ini memberikan perspektif komplementer mengenai status kesetaraan gender di kabupaten ini selama periode 2020-2024.

Analisis data menunjukkan pola yang menarik dalam perkembangan kedua indikator gender. IKG, yang semakin rendah nilainya menunjukkan kesetaraan gender yang lebih baik, mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama periode pengamatan. Pada 2020, nilai IKG mencapai 0,553, kemudian menurun drastis menjadi 0,483 pada 2021 (penurunan 12,65%), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kesetaraan gender. Namun, pada 2022 nilai IKG kembali meningkat menjadi 0,509 (kenaikan 5,38%), dan terus naik menjadi 0,516 pada 2023 (kenaikan 1,38%), sebelum diproyeksikan menurun menjadi 0,510 pada 2024 (penurunan 1,16%).

Tabel II-49
Indeks Ketimpangan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender
Kabupaten Barito Kuala 2019-2023

Tahun	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Perubahan IKG (%)	Indeks Pemberdayaan Gender (IPG)	Perubahan IPG (%)
2020	0,553	-	78,03	-
2021	0,483	-12,65	78,17	0,18
2022	0,509	5,38	78,80	0,81
2023	0,516	1,38	79,24	0,56
2024	0,510	-1,16	79,70	0,58

Sumber: BPS Barito Kuala (diolah)

Sementara itu, IPG menunjukkan peningkatan yang konsisten dari 78,03 pada 2020 menjadi proyeksi 79,70 pada 2024. Pola pertumbuhan IPG menunjukkan akselerasi dari 0,18% pada 2020-2021 menjadi 0,81% pada 2021-2022, kemudian sedikit melambat menjadi 0,56% pada 2022-2023, dan diproyeksikan tumbuh 0,58% pada 2023-2024.

Secara statistik, IKG memiliki nilai rata-rata 0,514 dengan standar deviasi 0,025, menghasilkan koefisien variasi sebesar 0,049. Tingkat variabilitas yang relatif tinggi ini mencerminkan volatilitas dalam perkembangan kesetaraan gender berdasarkan

parameter IKG. Sebaliknya, IPG menunjukkan stabilitas yang jauh lebih tinggi dengan nilai rata-rata 78,79, standar deviasi 0,729, dan koefisien variasi 0,009.

Penurunan drastis IKG sebesar 12,65% pada 2021 menandai perbaikan signifikan dalam kesetaraan gender. Penurunan ketimpangan yang tajam ini konsisten dengan teori "Rebound Effect in Gender Equality" yang dikemukakan oleh Kabeer et al. (2022), yang menjelaskan bahwa intervensi kebijakan yang responsif gender dapat menghasilkan pemulihan yang cepat jika diimplementasikan secara efektif.

Namun, fase pemulihan ini tidak berlangsung lama, dengan IKG kembali meningkat pada 2022 (5,38%) dan 2023 (1,38%), menunjukkan tantangan berkelanjutan dalam menjaga momentum perbaikan kesetaraan gender. Menurut studi oleh Duflo (2023), kenaikan kembali indikator ketimpangan gender setelah fase pemulihan awal sering disebabkan oleh berkurangnya prioritas dan sumber daya untuk program kesetaraan gender seiring dengan normalisasi pasca-krisis.

Kontras dengan volatilitas IKG, IPG menunjukkan tren peningkatan yang konsisten meskipun dengan laju pertumbuhan yang bervariasi. Stabilitas ini menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemberdayaan gender di Kabupaten Barito Kuala mampu mempertahankan momentum positif meskipun menghadapi tantangan struktural. Menurut kerangka analisis "Gender Empowerment Resilience" yang dikembangkan oleh UNDP (2023), stabilitas dalam indikator pemberdayaan di tengah fluktuasi ketimpangan mengindikasikan fondasi kelembagaan yang kuat untuk kesetaraan gender, meskipun masih rentan terhadap guncangan eksternal.

Analisis korelasi antara IKG dan IPG menghasilkan koefisien korelasi Pearson negatif moderat, mengindikasikan hubungan bahwa peningkatan pemberdayaan gender cenderung diikuti dengan penurunan ketimpangan gender, meskipun hubungan ini tidak sepenuhnya linear. Kekuatan korelasi yang moderat ini konsisten dengan temuan Dilli et al. (2019), yang mengidentifikasi bahwa pemberdayaan dan ketimpangan gender merupakan dimensi yang saling terkait namun tetap berbeda, dipengaruhi oleh faktor-faktor kontekstual yang kompleks.

Proyeksi tren menunjukkan bahwa dengan laju pertumbuhan saat ini, IPG Kabupaten Barito Kuala akan mencapai nilai 80 (ambang batas kategori "kesetaraan gender tinggi" menurut UNDP) dalam waktu sekitar 0,4 tahun setelah 2024. Namun,

fluktuasi IKG mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi faktor-faktor struktural yang mempertahankan ketimpangan gender.

2.4.4.2.3 Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Kabupaten Barito Kuala mencatatkan nilai IPHA sebesar 73,56, menempatkannya pada peringkat ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan dan 4,33 poin di bawah rata-rata provinsi (77,89) pada tahun 2023. Meskipun berada di bawah rata-rata, nilai ini masih masuk dalam kategori "cukup baik" berdasarkan klasifikasi Kementerian PPPA yang mendefinisikan rentang 70-80 dalam kategori tersebut. Posisi ini mencerminkan capaian yang moderat dalam upaya pemenuhan hak anak secara keseluruhan, dengan ruang yang masih luas untuk perbaikan dan pengembangan di masa mendatang.

Tabel II-50
Perbandingan Indeks Pemenuhan Hak Anak dan Komponennya
di Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Indeks Pemenuhan Hak Anak	IKKA Kelangsungan Hidup	Perlindungan	Tumbuh Kembang	Partisipasi	Identitas
Tanah Laut	73,13	86,69	52,52	59,55	90,87	72,55
Kota Baru	80,34	81,24	51,18	40,59	79,84	66,64
Banjar	72,70	82,03	56,75	59,97	80,32	70,36
Barito Kuala	73,56	88,05	55,73	67,97	77,35	72,53
Tapin	78,58	91,31	56,52	42,61	90,41	71,89
Hulu Sungai Selatan	77,69	84,88	55,21	53,37	85,60	71,35
Hulu Sungai Tengah	77,38	90,74	59,01	47,79	84,39	71,86
Hulu Sungai Utara	73,90	87,98	62,61	51,03	79,40	70,99
Tabalong	82,04	88,67	54,36	44,84	88,21	71,62
Tanah Bumbu	81,38	85,22	54,83	48,46	90,70	72,12
Balangan	77,22	93,20	64,58	51,60	94,84	76,29
Kota Banjarmasin	75,10	88,90	54,88	44,61	89,14	70,53
Kota Banjar Baru	81,17	90,64	58,87	36,99	89,94	71,52
KALIMANTAN SELATAN	77,89	89,41	58,06	52,54	86,50	72,88

Sumber: Website Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI

Ketika dianalisis berdasarkan komponen-komponennya, IKKA Kelangsungan Hidup Kabupaten Barito Kuala mencapai nilai 88,05, menempatkannya di atas rata-rata provinsi (89,41) dan di peringkat ke-6 dari 13 kabupaten/kota. Capaian ini menunjukkan keberhasilan relatif dalam penyediaan layanan kesehatan dasar bagi anak, yang menurut studi Unicef (2022) sering dikaitkan dengan efektivitas program kesehatan ibu

dan anak serta cakupan imunisasi yang memadai. Nilai yang cukup tinggi ini menjadi salah satu kekuatan Kabupaten Barito Kuala dalam konteks pemenuhan hak anak.

Nilai 55,73 untuk komponen Perlindungan Anak berada di bawah rata-rata provinsi (58,06) dan menempati peringkat ke-9. Capaian yang relatif rendah ini mencerminkan tantangan dalam aspek pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Menurut analisis Kementerian PPPA (2023), daerah dengan karakteristik geografis seperti Barito Kuala sering menghadapi kendala dalam pengembangan sistem perlindungan anak yang terintegrasi, terutama terkait jangkauan layanan dan koordinasi antar pemangku kepentingan.

Dalam aspek Tumbuh Kembang, Kabupaten Barito Kuala mencatatkan pencapaian istimewa dengan nilai 67,97, yang merupakan nilai tertinggi di seluruh Kalimantan Selatan dan jauh di atas rata-rata provinsi (52,54). Keunggulan signifikan ini menunjukkan efektivitas program pengembangan anak usia dini dan pendidikan dasar di kabupaten ini. Data statistik menunjukkan *z-score* +1,47 untuk komponen ini, yang mengkonfirmasi bahwa pencapaian Barito Kuala dalam aspek tumbuh kembang secara statistik signifikan di atas rata-rata regional.

Kontras dengan capaian tumbuh kembang, komponen Partisipasi di Kabupaten Barito Kuala memperoleh nilai 77,35, yang merupakan peringkat terendah di provinsi dan 9,15 poin di bawah rata-rata provinsi (86,50). *Z-score* -1,82 untuk komponen ini mengindikasikan bahwa pencapaian dalam aspek partisipasi secara statistik signifikan di bawah rata-rata regional. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam memfasilitasi keterlibatan anak dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial-budaya, yang menurut *World Bank* (2023) sering menjadi karakteristik daerah dengan dominasi sektor pertanian tradisional.

Nilai 72,53 untuk komponen Identitas Anak berada sedikit di bawah rata-rata provinsi (72,88) dan menempati peringkat ke-7. Pencapaian moderat ini menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala telah melakukan upaya yang cukup baik dalam memastikan pencatatan kelahiran dan dokumentasi identitas anak, meskipun masih terdapat ruang untuk perbaikan. Menurut studi Kementerian PPPA (2023), faktor geografis dan kesadaran masyarakat sering menjadi determinan utama dalam capaian komponen ini.

Analisis koefisien variasi (CV) untuk komponen-komponen IPHA di Kabupaten Barito Kuala menghasilkan nilai 0,18, yang menunjukkan variabilitas yang relatif tinggi antar komponen. Hal ini mengindikasikan ketidakseimbangan pencapaian, dengan beberapa aspek (seperti tumbuh kembang) yang sangat baik dan aspek lain (seperti perlindungan dan partisipasi) yang masih tertinggal. Pola "*uneven development*" ini menjadi karakteristik yang perlu mendapat perhatian dalam perencanaan program pemenuhan hak anak di Kabupaten Barito Kuala.

Dari keseluruhan analisis dapat disimpulkan bahwa profil pemenuhan hak anak di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pola yang tidak merata dengan kelebihan dan kekurangan yang kontras. Keunggulan luar biasa dalam aspek tumbuh kembang menjadi modal berharga yang dapat diperluas dampaknya ke komponen lain, sementara kelemahan signifikan dalam aspek partisipasi dan perlindungan memerlukan perhatian khusus. Pencapaian ini menggambarkan adanya potensi untuk meningkatkan IPHA secara keseluruhan melalui pendekatan yang lebih seimbang dan terintegrasi. Dengan menggunakan kekuatan di bidang tumbuh kembang sebagai fondasi, Kabupaten Barito Kuala memiliki peluang untuk meningkatkan komponen partisipasi dan perlindungan yang saat ini masih tertinggal, sehingga dapat mendorong peningkatan signifikan dalam pemenuhan hak anak secara komprehensif.

2.4.4.2.4 Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD mencapai 12,10% dengan alokasi sebesar Rp. 212.789.939.607 dari total belanja langsung Rp. 1.758.118.508.233, menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan, meskipun masih memerlukan peningkatan untuk mencapai target ideal pengarusutamaan gender yang lebih optimal. Sementara itu, persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten mencapai capaian sempurna 100% dengan 44 kasus dari 44 kasus yang dilaporkan telah ditangani secara komprehensif, mengindikasikan sistem perlindungan anak yang sangat responsif dan efektif dalam memberikan penanganan kepada anak-anak yang menjadi korban kekerasan.

Adapun rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) menunjukkan angka 18,44 per 100.000 penduduk

perempuan dengan 30 kasus kekerasan dari total 162.713 penduduk perempuan, yang mengindikasikan tingkat kekerasan terhadap perempuan yang relatif rendah namun tetap memerlukan perhatian serius melalui program pencegahan dan penanganan yang berkelanjutan untuk melindungi hak-hak perempuan dan menciptakan lingkungan yang aman bagi seluruh warga negara perempuan di wilayah kabupaten.

Gambar II.26
Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Nilai/Kasus	Total/Target	Capaian	Status
PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM ANGGARAN					
1	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD ARG: Rp 212,79 miliar dari total Rp 1.758,12 miliar	4.255.798.792	35.162.370.164	12,10%	PERLU DITINGKATKAN
PERLINDUNGAN ANAK					
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	44	44	100%	PERFECT
PERLINDUNGAN PEREMPUAN					
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) 30 kasus dari 162.713 penduduk perempuan	30	162.713	18 44 per 100rb	RISIKO RENDAH

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

2.4.4.3 Pangan

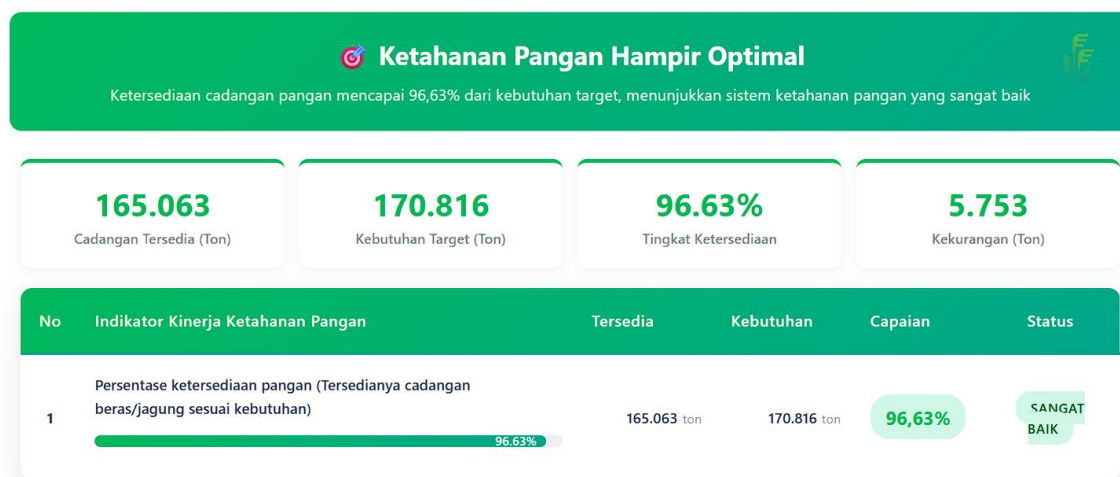
Persentase ketersediaan pangan yang diukur melalui tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan mencapai 96,63% dengan ketersediaan cadangan sebesar 165.063 ton dari kebutuhan total 170.816 ton, menunjukkan sistem ketahanan pangan yang sangat baik dan hampir mencapai target ketersediaan pangan optimal. Capaian ini mengindikasikan bahwa kabupaten telah memiliki kemampuan yang sangat

memadai dalam menjamin ketersediaan pangan pokok bagi masyarakat, dengan fokus pada komoditas strategis beras dan jagung sebagai basis ketahanan pangan daerah.

Meskipun demikian, masih terdapat kekurangan sebesar 5.753 ton atau 3,37% dari kebutuhan cadangan pangan yang memerlukan perhatian untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mengantisipasi situasi darurat atau fluktuasi pasokan pangan di masa mendatang. Gap ini, meskipun relatif kecil, menjadi penting untuk diperhatikan mengingat fungsi strategis cadangan pangan dalam menjamin stabilitas ketersediaan pangan pada saat terjadi gangguan produksi, distribusi, atau kondisi darurat lainnya yang dapat mempengaruhi akses masyarakat terhadap pangan.

Tingkat ketersediaan pangan yang mencapai 96,63% menunjukkan bahwa sistem manajemen ketahanan pangan daerah telah berfungsi dengan sangat efektif, baik dari aspek perencanaan, produksi, maupun pengelolaan cadangan pangan. Hal ini mencerminkan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan dalam rantai ketahanan pangan, mulai dari petani sebagai produsen, sistem distribusi dan logistik, hingga mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.

Gambar II.27
Indikator Kinerja Ketahanan Pangan Tahun 2024



Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Dari perspektif kebijakan ketahanan pangan, capaian yang hampir mencapai target optimal ini memberikan ruang bagi pengembangan program ketahanan pangan yang lebih komprehensif, tidak hanya terfokus pada aspek ketersediaan tetapi juga pada diversifikasi pangan, peningkatan kualitas gizi, dan pengembangan sistem pangan yang berkelanjutan. Upaya untuk menutup gap 3,37% yang tersisa dapat dilakukan melalui

optimalisasi produktivitas pertanian, perbaikan sistem pasca panen, dan penguatan jaringan distribusi pangan untuk memastikan efisiensi dan efektivitas sistem pangan secara keseluruhan.

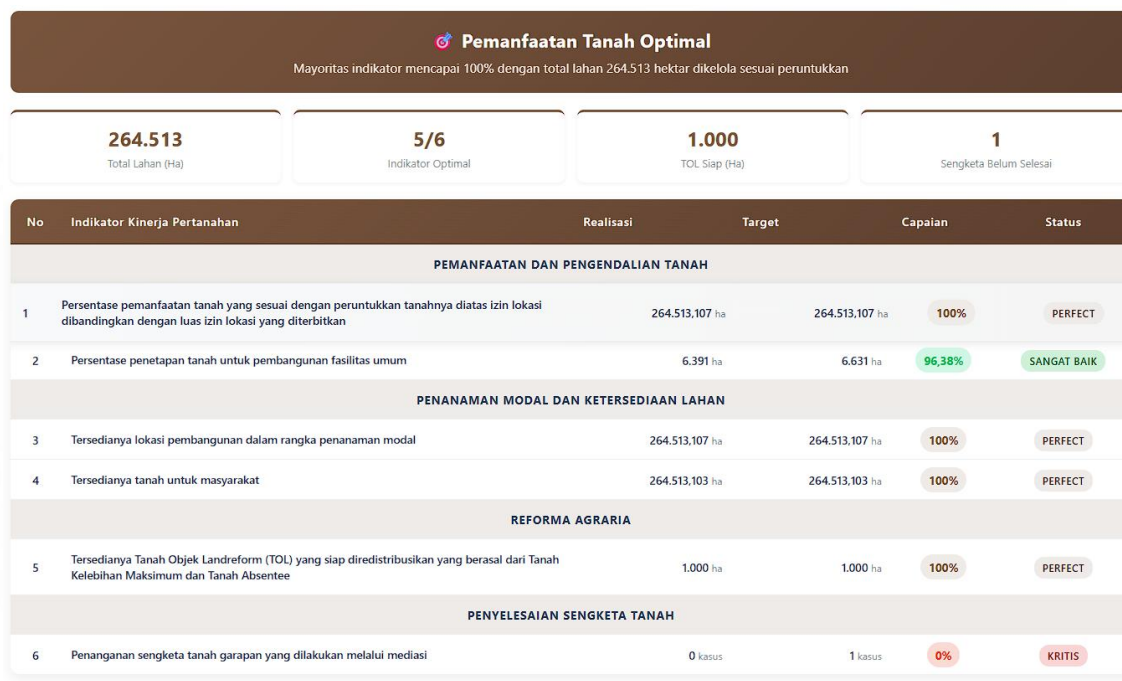
2.4.4.4 Pertanian

Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya di atas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan mencapai capaian sempurna 100% dengan 264.513,107 hektar tanah telah dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya dari total izin lokasi yang diterbitkan, menunjukkan sistem pengendalian pemanfaatan ruang yang sangat efektif dan kepatuhan yang tinggi dari pemegang izin dalam mengimplementasikan rencana tata ruang wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal juga mencapai 100% dengan 264.513,107 hektar lokasi siap untuk investasi, mengindikasikan kesiapan infrastruktur dan kejelasan status hukum lahan yang mendukung iklim investasi yang kondusif bagi pengembangan ekonomi daerah.

Sementara itu, persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum mencapai 96,38% dengan 6.391 hektar dari 6.631 hektar target telah ditetapkan untuk pembangunan fasilitas umum, menunjukkan komitmen yang sangat baik dalam menyediakan lahan untuk infrastruktur publik seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan masyarakat lainnya. Meskipun masih terdapat kekurangan sebesar 240 hektar atau 3,62% dari target, capaian ini mencerminkan upaya serius pemerintah daerah dalam menjamin ketersediaan lahan untuk pembangunan fasilitas yang dibutuhkan masyarakat.

Di sisi lain, tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee mencapai 100% dengan 1.000 hektar tanah telah siap untuk didistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan, menunjukkan pelaksanaan program reforma agraria yang berjalan sesuai dengan perencanaan dan target yang ditetapkan dalam kerangka keadilan agraria. Program ini menjadi instrumen penting dalam mengatasi ketimpangan kepemilikan tanah dan memberikan akses lahan produktif kepada petani penggarap yang selama ini tidak memiliki tanah.

Gambar II.28
Indikator Kinerja Pertanian Tahun 2024



Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Adapun tersedianya tanah untuk masyarakat mencapai capaian sempurna 100% dengan 264.513,103 hektar tanah tersedia untuk berbagai kebutuhan masyarakat, mengindikasikan manajemen pertanian yang sangat baik dalam menjamin ketersediaan lahan untuk pemukiman, usaha, dan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketersediaan lahan yang memadai menjadi faktor krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan tempat tinggal dan berusaha.

Namun demikian, penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi menunjukkan capaian 0% dengan tidak ada kasus yang berhasil diselesaikan dari 1 kasus yang ada, mengindikasikan adanya tantangan dalam penyelesaian konflik agraria melalui pendekatan mediasi yang memerlukan perhatian khusus dan perbaikan mekanisme penyelesaian sengketa. Situasi ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas mediator, perbaikan prosedur mediasi, dan peningkatan koordinasi antar instansi terkait untuk menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa tanah yang lebih efektif dan dapat diterima oleh semua pihak yang bersengketa.

2.4.4.5 Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indikator penting yang mencerminkan kondisi lingkungan suatu wilayah dan efektivitas pengelolaan sumber daya alam serta pengendalian pencemaran. Data IKLH Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 menunjukkan dinamika yang menarik dengan fluktuasi yang signifikan.

Tabel II-51
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala 2020-2024

Tahun	IKLH	Perubahan (%)
2020	54,13	-
2021	63,21	16,79
2022	63,41	0,32
2023	62,66	-1,18
2024	62,94	0,54

Sumber: Dokumen KLH Barito Kuala Tahun 2023

Pada tahun 2020, IKLH Kabupaten Barito Kuala tercatat sebesar 54,13, yang menurut klasifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berada dalam kategori "cukup baik" (rentang 50-70). Memasuki tahun 2021, terjadi peningkatan signifikan sebesar 16,79% menjadi 63,21. Peningkatan dramatis ini mencerminkan upaya intensif dalam pemulihan lingkungan dan implementasi kebijakan lingkungan yang lebih efektif. Menurut analisis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2022), fase pemulihan ini sering ditandai dengan penguatan regulasi, peningkatan partisipasi masyarakat, dan pemantauan lingkungan yang lebih sistematis. Nilai ini juga menandai lonjakan menuju batas atas kategori "cukup baik".

Pada tahun 2022, IKLH Kabupaten Barito Kuala mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,32% menjadi 63,41, yang mengindikasikan stabilisasi setelah pemulihan signifikan di tahun sebelumnya. Stabilisasi ini mencerminkan konsistensi dalam upaya pengelolaan lingkungan dan implementasi kebijakan yang berkelanjutan. Namun, memasuki tahun 2023, terjadi sedikit penurunan sebesar 1,18% menjadi 62,66, yang mengindikasikan adanya tantangan baru dalam menjaga momentum perbaikan kualitas lingkungan. Proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan adanya pemulihan moderat dengan peningkatan 0,54% menjadi 62,94, menandakan upaya untuk mengatasi tantangan yang muncul pada tahun sebelumnya.

Analisis statistik terhadap data IKLH ini mengungkapkan beberapa pola yang menarik. Nilai rata-rata IKLH selama periode 2020-2024 adalah 61,28 dengan standar deviasi 3,91, menghasilkan koefisien variasi sebesar 0,064. Tingkat variabilitas yang relatif rendah ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, IKLH Kabupaten Barito Kuala cenderung stabil dalam rentang tertentu.

Karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh dataran rendah, lahan gambut, dan daerah aliran sungai (DAS) Barito memberikan tantangan tersendiri dalam pengelolaan lingkungan. Menurut penelitian Sabiham dan Sukarman (2021), ekosistem lahan gambut seperti yang terdapat di Barito Kuala sangat rentan terhadap perubahan hidrologi dan memiliki sensitivitas tinggi terhadap aktivitas antropogenik. Kondisi ini membuat pengelolaan lingkungan di wilayah tersebut memerlukan pendekatan khusus yang mempertimbangkan karakteristik ekosistem lokal.

Pola penggunaan lahan di Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh pertanian, terutama sawah pasang surut, juga memberikan tekanan tersendiri pada kualitas lingkungan. Studi yang dilakukan oleh Noor et al. (2022) mengungkapkan bahwa praktik pertanian intensif di lahan pasang surut sering kali berkontribusi pada degradasi kualitas air dan tanah melalui penggunaan pestisida dan pupuk kimia, serta perubahan karakteristik hidrologis lahan. Kondisi ini dapat menjelaskan sebagian dari fluktuasi IKLH yang diamati.

Aspek sosial-ekonomi juga tidak dapat dipisahkan dari dinamika lingkungan. Teori Environmental Kuznets Curve yang dimodifikasi oleh Stern (2017) menjelaskan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, tekanan pada lingkungan cenderung meningkat, namun setelah mencapai titik tertentu, kesadaran dan kapasitas masyarakat untuk mengelola lingkungan juga meningkat, sehingga kualitas lingkungan dapat membaik. Dalam konteks Barito Kuala, peningkatan IKLH sejak 2021 dapat mencerminkan transisi menuju pola pembangunan yang lebih memperhatikan aspek keberlanjutan.

Secara keseluruhan, analisis IKLH Kabupaten Barito Kuala menunjukkan gambaran yang moderat positif. Meskipun terdapat fluktuasi, nilai IKLH yang diproyeksikan pada 2024 (63,00) masih lebih tinggi dibandingkan tahun 2020 (54,13),

menandakan kemajuan dalam jangka menengah. Peningkatan neto sebesar 8,87 poin atau 16,39% selama lima tahun mencerminkan dampak positif dari kebijakan dan program lingkungan yang diimplementasikan, meskipun dengan tantangan dan keterbatasan yang masih perlu diatasi untuk mencapai tingkat kualitas lingkungan yang lebih tinggi.

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten/Kota menunjukkan kondisi yang beragam dengan komposit gabungan mencapai 64,02, dimana Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan kondisi yang sangat baik dengan nilai 96,63 mengindikasikan kualitas udara yang hampir optimal dan bebas dari polusi signifikan. Namun demikian, Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan nilai 51,82 yang berada pada kategori sedang dan memerlukan perhatian khusus dalam pengelolaan kualitas air, sementara Indeks Kualitas Lahan (IKL) menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dengan nilai 24,64 yang mengindikasikan adanya degradasi lahan yang cukup serius dan memerlukan upaya pemulihan dan konservasi yang intensif.

Gambar II.29
Indikator Kinerja Lingkungan Hidup Tahun 2024

51.82 Indeks Kualitas Air		96.63 Indeks Kualitas Udara		24.64 Indeks Kualitas Lahan		64.02 IKLH Gabungan	
No	Indikator Kinerja Lingkungan Hidup	Realisasi	Target/Total	Nilai/Capaian	Status		
INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)							
1a	IKLH Kabupaten/Kota - IKA (Indeks Kualitas Air)	-	-	51,82	SEDANG		
1b	IKLH Kabupaten/Kota - IKU (Indeks Kualitas Udara)	-	-	96,63	SANGAT BAIK		
1c	IKLH Kabupaten/Kota - IKL (Indeks Kualitas Lahan)	-	-	24,64	BURUK		
1d	IKLH Kabupaten/Kota - IKLH (Gabungan)	-	-	64,02	BAIK		
PENGELOLAAN SAMPAH							
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota	27.570,74 ton	36.602,13 ton	75,33%	BAIK		
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN							
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	0 usaha	30 usaha	0%	KRITIS		

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sementara itu, terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten/Kota mencapai 75,33% dengan 27.570,74 ton sampah dari total 36.602,13 ton sampah telah dikelola dengan baik, menunjukkan sistem pengelolaan persampahan yang cukup efektif namun masih memerlukan peningkatan untuk menangani 9.031,39 ton sampah yang belum terkelola optimal. Capaian ini mencerminkan upaya yang signifikan dalam

implementasi sistem pengelolaan sampah terpadu, meskipun masih terdapat tantangan dalam mencapai target pengelolaan sampah yang komprehensif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip reduce, reuse, dan recycle.

Di sisi lain, ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah menunjukkan kondisi yang sangat mengkhawatirkan dengan capaian 0%, dimana tidak ada satupun dari 30 penanggung jawab usaha yang mematuhi ketentuan izin lingkungan yang telah ditetapkan. Situasi ini mengindikasikan lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum lingkungan di tingkat daerah, serta perlunya penguatan kapasitas pengawasan, sosialisasi peraturan yang lebih intensif, dan penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar untuk memastikan implementasi peraturan lingkungan hidup yang efektif dan melindungi kelestarian lingkungan dari dampak negatif aktivitas usaha dan kegiatan pembangunan.

2.4.4.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Perekaman KTP elektronik menunjukkan capaian yang sangat tinggi dengan 99,28%, dimana 239.867 dari 241.609 penduduk wajib KTP-el telah melakukan perekaman, mengindikasikan keberhasilan program digitalisasi identitas penduduk yang hampir universal dengan hanya 1.742 penduduk yang belum melakukan perekaman. Capaian ini mencerminkan efektivitas sistem pelayanan administrasi kependudukan dan tingkat partisipasi masyarakat yang sangat baik dalam program modernisasi dokumen kependudukan, yang menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik yang terintegrasi dan akurat.

Sementara itu, persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 91,93% dengan 79.102 dari 86.047 anak telah memiliki KIA, menunjukkan upaya yang signifikan dalam memberikan identitas legal kepada anak-anak namun masih terdapat 6.945 anak yang belum memiliki dokumen identitas ini. Program KIA menjadi sangat penting dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak dan memfasilitasi akses mereka terhadap berbagai layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan.

Di sisi lain, kepemilikan akta kelahiran mencapai 95,93% dengan 87.430 dari 91.141 penduduk telah memiliki akta kelahiran, menunjukkan sistem pencatatan sipil yang berfungsi dengan baik namun masih memerlukan upaya untuk menjangkau 3.711 penduduk yang belum memiliki dokumen penting ini. Akta kelahiran merupakan dokumen fundamental yang menjadi dasar bagi penerbitan dokumen identitas lainnya dan pengakuan hak-hak sipil seseorang, sehingga pencapaian yang tinggi ini mencerminkan komitmen dalam memberikan kepastian hukum identitas kepada seluruh warga.

Gambar II.30
Indikator Kinerja Administrasi Kependudukan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Administrasi Kependudukan	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
DOKUMEN IDENTITAS PENDUDUK					
1	Perekaman KTP elektronik	239.867	241.609	99,28%	EXCELLENT
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	79.102	86.047	91,93%	SANGAT BAIK
PENCATATAN SIPIL					
3	Kepemilikan akta kelahiran	87.430	91.141	95,93%	BAIK
INTEGRASI DAN PEMANFAATAN DATA					
4	Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	2	15	13,33%	KRITIS

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

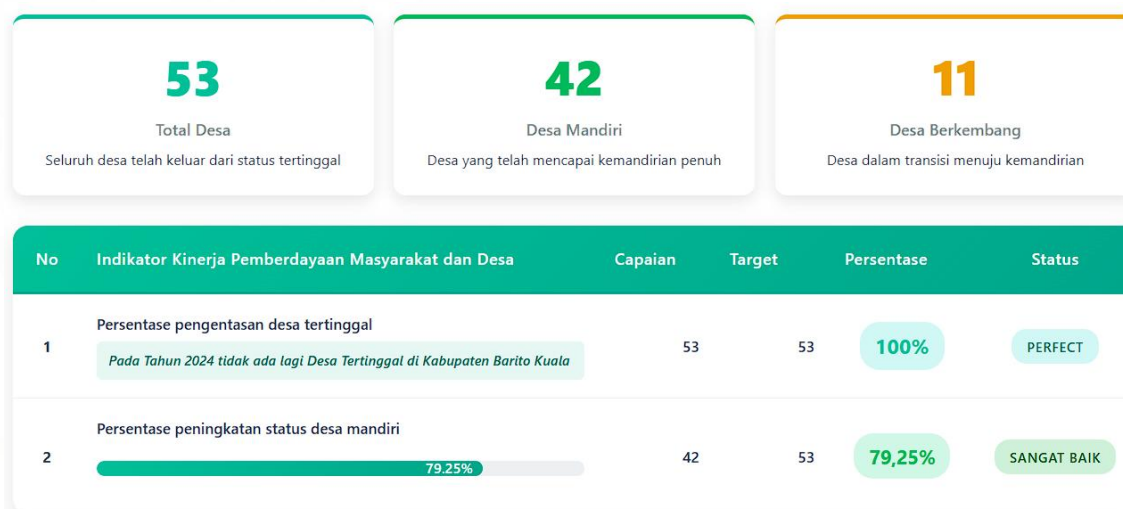
Namun demikian, jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama masih sangat rendah dengan hanya 13,33%, dimana hanya 2 dari 15 Perangkat Daerah yang telah mengoptimalkan pemanfaatan data kependudukan untuk keperluan perencanaan dan pelayanan. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya integrasi data kependudukan dalam sistem pemerintahan daerah, padahal data kependudukan yang akurat dan terkini merupakan aset strategis yang sangat penting untuk mendukung perumusan kebijakan yang berbasis data, perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di berbagai sektor.

2.4.4.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Persentase pengentasan desa tertinggal mencapai capaian sempurna 100% dengan 53 dari 53 desa telah berhasil keluar dari status desa tertinggal, menunjukkan keberhasilan luar biasa program pemberdayaan masyarakat dan desa dalam mengangkat kondisi sosial ekonomi seluruh desa di kabupaten. Pencapaian ini sangat

signifikan karena mengindikasikan bahwa pada tahun 2024 tidak ada lagi desa tertinggal di Kabupaten Barito Kuala, yang mencerminkan efektivitas program-program pembangunan desa, peningkatan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal, dan penguatan kapasitas masyarakat yang telah dilaksanakan secara konsisten dan terintegrasi untuk mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan di tingkat desa.

Gambar II.31
Indikator Kinerja Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2024



Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

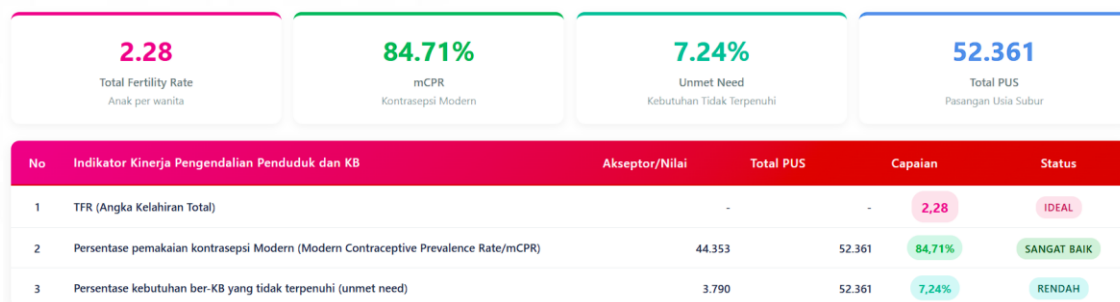
Sementara itu, persentase peningkatan status desa mandiri mencapai 79,25% dengan 42 dari 53 desa telah mencapai status desa mandiri, menunjukkan progress yang sangat baik dalam membangun kemandirian desa meskipun masih terdapat 11 desa yang belum mencapai status mandiri dan memerlukan pendampingan lebih lanjut. Status desa mandiri mengindikasikan bahwa desa tersebut telah memiliki kemampuan untuk mengelola potensi lokal secara optimal, memiliki kelembagaan yang kuat, masyarakat yang berdaya, serta mampu mengembangkan ekonomi desa secara berkelanjutan tanpa ketergantungan yang tinggi terhadap bantuan eksternal, sehingga capaian 79,25% ini mencerminkan fondasi yang solid untuk pembangunan desa yang berkelanjutan dan mandiri.

2.4.4.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Total Fertility Rate (TFR) atau Angka Kelahiran Total menunjukkan nilai 2,28 anak per wanita usia subur, yang berada pada level yang cukup ideal dan mendekati angka penggantian penduduk (replacement level fertility) sekitar 2,1 anak per wanita,

mengindikasikan keberhasilan program pengendalian penduduk dalam menjaga pertumbuhan penduduk yang terkendali dan berkelanjutan. Angka ini mencerminkan efektivitas program Keluarga Berencana dan edukasi kependudukan yang telah berhasil mengubah pola reproduksi masyarakat menuju keluarga kecil berkualitas, sekaligus menunjukkan keseimbangan antara target demografis dan aspirasi keluarga dalam merencanakan jumlah anak.

Gambar II.32
Indikator Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2024



Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sementara itu, persentase pemakaian kontrasepsi modern (mCPR) mencapai 84,71% dengan 44.353 dari 52.361 Pasangan Usia Subur (PUS) menggunakan alat kontrasepsi modern, menunjukkan tingkat akseptasi yang sangat tinggi terhadap program KB dan kepercayaan masyarakat terhadap metode kontrasepsi modern yang aman dan efektif. Capaian ini mencerminkan keberhasilan sosialisasi, konseling, dan pelayanan KB yang berkualitas, serta ketersediaan akses yang memadai terhadap berbagai pilihan alat kontrasepsi modern sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masing-masing pasangan, meskipun masih terdapat 8.008 PUS yang belum menggunakan kontrasepsi modern dan memerlukan pendekatan khusus.

Di sisi lain, persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) menunjukkan angka yang cukup rendah yaitu 7,24% dengan 3.790 dari 52.361 PUS masih memiliki kebutuhan KB yang belum terpenuhi, mengindikasikan bahwa mayoritas pasangan yang ingin mengatur jarak kelahiran atau membatasi jumlah anak telah mendapatkan akses terhadap layanan KB yang sesuai. Meskipun angka unmet need ini relatif rendah dan menunjukkan kinerja program KB yang baik, namun masih perlu upaya untuk menjangkau 3.790 PUS yang belum terlayani melalui peningkatan akses, diversifikasi metode kontrasepsi, penguatan konseling, dan pendekatan yang lebih

personal untuk memahami hambatan-hambatan yang dihadapi oleh kelompok ini dalam mengakses layanan KB.

2.4.4.9 Perhubungan

Data kepemilikan kendaraan bermotor di Kabupaten Barito Kuala menampilkan profil transportasi yang menarik, dengan dominasi kendaraan pribadi dan pola distribusi yang mencerminkan karakteristik sosial-ekonomi dan geografis wilayah tersebut. Analisis terhadap data ini memberikan wawasan penting tentang mobilitas, preferensi transportasi, dan tantangan transportasi di kabupaten ini. Secara keseluruhan, Kabupaten Barito Kuala memiliki 64.176 kendaraan bermotor terdaftar, dengan 574 kendaraan umum (0,89%) dan 63.602 kendaraan tidak umum atau pribadi (99,11%). Distribusi ini menunjukkan dominasi kendaraan pribadi yang sangat tinggi dibandingkan kendaraan umum, mengindikasikan ketergantungan kuat pada mobilitas pribadi. Kondisi ini sesuai dengan teori "Private Transportation Dependency" yang dikemukakan oleh Newman dan Kenworthy (2015), yang menjelaskan bahwa di daerah dengan kepadatan rendah dan sebaran permukiman yang menyebar, ketergantungan pada kendaraan pribadi cenderung tinggi akibat terbatasnya layanan transportasi publik.

Sepeda motor merupakan jenis kendaraan paling dominan dengan 55.675 unit atau 86,75% dari total kendaraan terdaftar. Dominasi sepeda motor ini sejalan dengan fenomena "motorcyclization" yang diidentifikasi oleh Pojani dan Stead (2018) sebagai karakteristik umum di daerah berkembang dengan aksesibilitas terbatas dan infrastruktur transportasi publik yang belum memadai. Menurut studi yang dilakukan oleh Prasetyo dan Suhartini (2021), tingginya kepemilikan sepeda motor di daerah seperti Barito Kuala berkaitan erat dengan fleksibilitas, efisiensi biaya, dan kemampuannya mengatasi tantangan infrastruktur jalan yang terbatas.

Tabel II-52
Data Kepemilikan/NOPOL Kendaraan Kabupaten Barito Kuala

Jenis Kendaraan	Umum				Tidak Umum				Total
	Baru	Ulang	Mutasi	Jumlah	Baru	Ulang	Mutasi	Jumlah	
Sedan	0	0	0	0	1	78	5	84	84
Jeep	0	0	0	0	22	311	10	343	343

Jenis Kendaraan	Umum				Tidak Umum				Total
	Baru	Ulang	Mutasi	Jumlah	Baru	Ulang	Mutasi	Jumlah	
Minibus	0	12	0	12	391	4,904	117	5,412	5,424
Microbus	0	16	1	17	1	40	4	45	62
Bus	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pickup	7	120	1	128	212	1,627	10	1,849	1,977
Light Truck	0	41	3	44	0	4	0	4	48
Truck	28	340	5	373	12	100	0	112	485
Alat Berat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepeda Motor	0	0	0	0	6,482	49,171	22	55,675	55,675
Scoter	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sepeda Motor R3	0	0	0	0	33	45	0	78	78
Jumlah/Total	35	529	10	574	7,154	56,280	168	63,602	64,176

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Barito Kuala

Minibus menempati posisi kedua dengan 5.424 unit (8,45%), diikuti oleh pickup dengan 1.977 unit (3,08%) dan truk dengan 485 unit (0,76%). Distribusi ini mencerminkan kebutuhan transportasi untuk aktivitas ekonomi lokal, terutama pertanian dan perdagangan yang menjadi basis ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Studi oleh Widodo et al. (2022) tentang tipologi transportasi daerah agro-rural menunjukkan bahwa kendaraan niaga seperti pickup dan truk memainkan peran penting dalam mendukung rantai pasok produk pertanian dan mobilitas barang.

Analisis berdasarkan status kepemilikan menunjukkan bahwa mayoritas kendaraan (88,16%) merupakan kendaraan dengan perpanjangan STNK (ulang), sementara kendaraan baru mencapai 11,19% dan kendaraan mutasi hanya 0,28%. Pola ini mengindikasikan tingkat retensi kendaraan yang tinggi dan perputaran kendaraan yang relatif lambat. Menurut teori "Vehicle Ownership Lifecycle" oleh Chang dan Wu (2019), dominasi kendaraan perpanjangan mencerminkan fase stabilitas dalam kepemilikan kendaraan, yang sering terjadi pada masyarakat dengan pertumbuhan ekonomi moderat.

Di kategori kendaraan umum, truk mendominasi dengan 373 unit (65%), diikuti oleh pickup (128 unit atau 22,3%) dan microbus (17 unit atau 3%). Distribusi ini mencerminkan karakteristik ekonomi Kabupaten Barito Kuala yang berbasis pertanian dan sumber daya alam, di mana transportasi barang menjadi lebih penting daripada transportasi penumpang dalam skala besar. Absennya bus sebagai kendaraan umum menandakan keterbatasan sistem transportasi massal di wilayah ini, yang sejalan dengan teori "Transport System Evolution" oleh Rodrigue (2020) yang menyatakan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk rendah dan tersebar sering kali menghadapi tantangan dalam pengembangan transportasi massal.

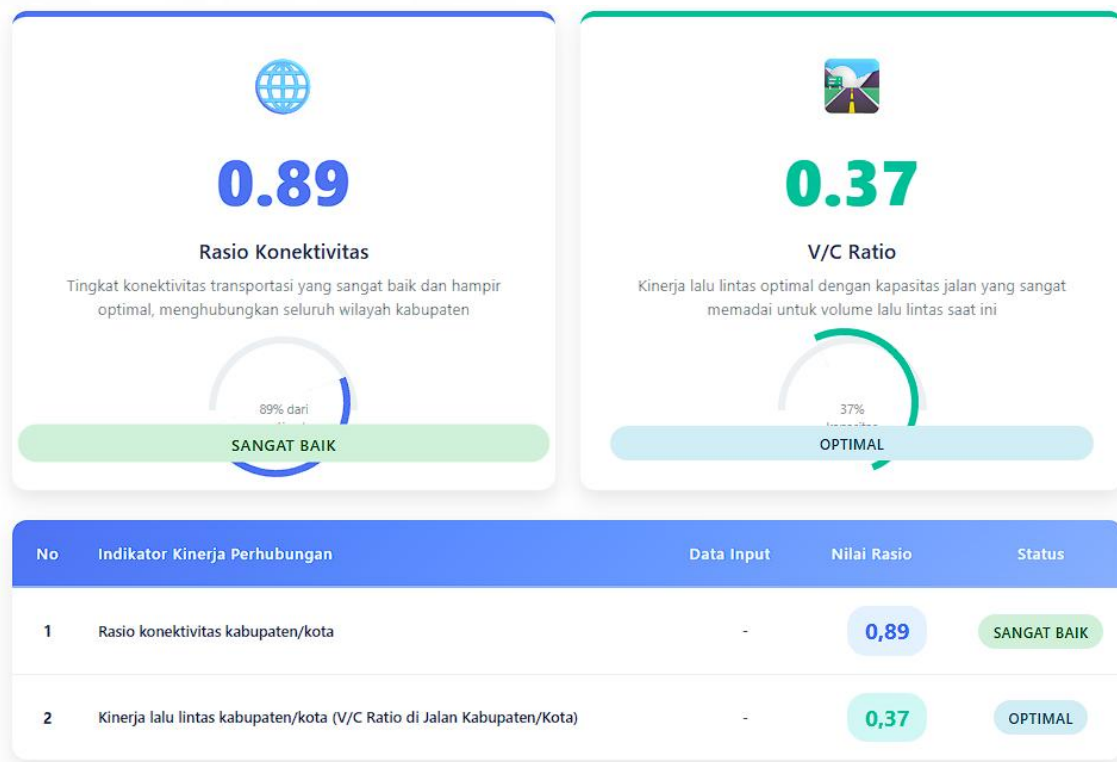
Kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang memiliki banyak aliran sungai dan lahan basah juga berperan dalam membentuk pola kepemilikan kendaraan. Menurut Sutomo dan Waluyo (2020), karakteristik wilayah seperti ini menciptakan hambatan aksesibilitas yang memengaruhi jenis kendaraan yang dipilih masyarakat. Dominasi kendaraan roda dua dan relatif rendahnya kepemilikan mobil penumpang (seperti sedan dan jeep yang hanya berjumlah 427 unit atau 0,67%) menggambarkan adaptasi terhadap kondisi infrastruktur dan aksesibilitas wilayah.

Implikasi dari pola kepemilikan kendaraan ini multidimensional. Dari sisi lingkungan, dominasi kendaraan pribadi, terutama sepeda motor, berkontribusi pada peningkatan emisi gas rumah kaca dan polusi udara. Studi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (2023) menunjukkan bahwa sektor transportasi menyumbang sekitar 28% dari total emisi karbon di wilayah tersebut, dengan sepeda motor sebagai kontributor signifikan. Dari perspektif infrastruktur, tingginya jumlah kendaraan pribadi menciptakan tekanan pada kapasitas jalan dan fasilitas parkir, terutama di pusat-pusat aktivitas. Model transportasi berbasis kendaraan pribadi juga cenderung membutuhkan investasi infrastruktur jalan yang lebih besar, yang menurut Litman (2021), sering kali kurang efisien dibandingkan investasi pada sistem transportasi publik dalam jangka panjang.

Rasio konektivitas kabupaten/kota menunjukkan nilai 0,89 yang mengindikasikan tingkat konektivitas transportasi yang sangat baik dan hampir mendekati nilai optimal 1,0, mencerminkan sistem transportasi yang terintegrasi dan efektif dalam menghubungkan berbagai wilayah di kabupaten baik melalui transportasi darat maupun transportasi laut sesuai dengan karakteristik geografis wilayah. Capaian

ini menunjukkan bahwa infrastruktur transportasi telah mampu memberikan akses yang memadai bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas antar wilayah, mendukung aktivitas ekonomi, dan mempermudah akses terhadap pelayanan publik di berbagai lokasi dalam kabupaten.

Gambar II.33
Indikator Kinerja Perhubungan Tahun 2024



Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sementara itu, kinerja lalu lintas kabupaten/kota yang diukur melalui Volume to Capacity Ratio (V/C Ratio) di jalan kabupaten/kota menunjukkan nilai 0,37 yang berada pada kategori sangat baik, mengindikasikan bahwa kapasitas jalan masih sangat memadai untuk menampung volume lalu lintas yang ada dengan tingkat pelayanan yang optimal. Nilai V/C Ratio yang rendah ini menunjukkan bahwa jalan-jalan di kabupaten belum mengalami kemacetan yang signifikan dan masih memiliki kapasitas yang cukup untuk pertumbuhan lalu lintas di masa mendatang, menciptakan kondisi lalu lintas yang lancar, waktu tempuh yang efisien, serta mendukung kelancaran distribusi barang dan mobilitas masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap produktivitas ekonomi daerah dan kualitas hidup masyarakat.

2.4.4.10 Komunikasi dan Informatika

Persentase Perangkat Daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo mencapai capaian sempurna 100% dengan seluruh 46 Perangkat Daerah telah terhubung dengan infrastruktur internet yang memadai, menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam membangun ekosistem digital pemerintahan yang terintegrasi dan modern. Capaian ini mencerminkan komitmen kuat dalam transformasi digital birokrasi yang menjadi fondasi penting bagi pelayanan publik yang efisien, transparansi pemerintahan, dan peningkatan produktivitas kerja aparatur sipil negara melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal.

Gambar II.34
Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Komunikasi dan Informatika	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
INFRASTRUKTUR DIGITAL PEMERINTAHAN					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	46	46	100%	PERFECT
DIGITALISASI LAYANAN PUBLIK					
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	8	79	10,13%	KRITIS
KOMUNIKASI PUBLIK					
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah kabupaten/kota	149.572	233.547	64,04%	BAIK

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sementara itu, persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi masih menunjukkan angka yang rendah yaitu 10,13% dengan hanya 8 dari 79 layanan publik yang telah tersedia secara digital, mengindikasikan masih terdapat tantangan besar dalam digitalisasi layanan publik yang memerlukan percepatan dan prioritas khusus. Kondisi ini menunjukkan gap yang signifikan antara infrastruktur digital yang sudah tersedia dengan implementasi layanan digital yang efektif, sehingga diperlukan upaya intensif dalam pengembangan aplikasi dan platform digital, peningkatan kapasitas SDM, serta standarisasi sistem informasi untuk mempercepat transformasi digital layanan publik yang dapat memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat.

Di sisi lain, persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dan mengetahui kebijakan serta program prioritas pemerintah kabupaten/kota mencapai 64,04% dengan 149.572 dari 233.547 masyarakat target telah mendapatkan

informasi yang memadai, menunjukkan upaya komunikasi publik yang cukup baik namun masih memerlukan peningkatan untuk menjangkau 83.975 masyarakat yang belum terjangkau informasi pemerintah. Capaian ini mengindikasikan perlunya diversifikasi media komunikasi, peningkatan strategi komunikasi publik yang lebih efektif, dan pemanfaatan berbagai platform digital maupun konvensional untuk memastikan informasi kebijakan dan program pemerintah dapat sampai kepada seluruh lapisan masyarakat secara merata dan komprehensif.

2.4.4.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Data koperasi yang terdaftar di Kabupaten Barito Kuala memberikan gambaran menarik tentang ekosistem koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di wilayah ini. Analisis terhadap 15 koperasi yang tercantum dalam data menunjukkan pola distribusi dan karakteristik yang mencerminkan dinamika sosial-ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Ditinjau dari jenisnya, koperasi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan diversifikasi yang cukup baik dengan Koperasi Serba Usaha (KSU) mendominasi sebanyak 5 koperasi (33,3%), diikuti oleh Koperasi Unit Desa (KUD) sebanyak 4 koperasi (26,7%), Koperasi Pegawai Negeri (KPN) sebanyak 3 koperasi (20%), serta Koperasi Wanita, Koperasi Pondok Pesantren, dan Primkop PGRI masing-masing 1 koperasi (6,7%). Prevalensi Koperasi Serba Usaha mencerminkan kecenderungan diversifikasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan karakteristik ekonomi pedesaan. Menurut Tambunan (2019), KSU seringkali menjadi bentuk yang lebih adaptif di wilayah dengan basis ekonomi beragam dan akses pasar terbatas. Keberadaan empat KUD juga signifikan, menunjukkan masih relevannya peran KUD dalam mendukung ekonomi pertanian yang menjadi basis ekonomi Barito Kuala.

Tabel II-53
Data Koperasi Kabupaten Barito Kuala

NOMOR	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM	ALAMAT	KECAMATAN	SERTIFIKAT
1	Koperasi serba usaha kencana makmur	518/10/BH/XIX.2/PERNDAGKOP-UKM/09	30/01/2009	Jalan Upt Jejangkit Timur	Jejangkit	Sudah Bersertifikat
2	Koperasi Wanita Kenanga	1313/BH/IX	17/06/1975	Jl. Purwosari I Km. 5 Rt. 03	Tamban	Sudah Bersertifikat
3	Koperasi Unit Desa Daya Guna	1558/BH/IX	01/07/1992	Tamban Muara Km.4	Tamban	Sudah Bersertifikat
4	Koperasi Pegawai	2011/BH/IX	20/04/1992	Purwosari I Km. 5	Tamban	Sudah Bersertifikat

NOMOR	NAMA KOPERASI	NOMOR BADAN HUKUM	TANGGAL BADAN HUKUM	ALAMAT	KECAMATAN	SERTIFIKAT
5	Negeri Citra Utama KOPERASI KONSUMEN PEGAWAI NEGERI SUBUR MAKMUR	05/BH/KDK.16.6/IX/2000	05/09/2000	Mekarsari	Mekar Sari	Sudah Bersertifikat
6	Koperasi Pondok Pesantren Dawah Islamiah	2080/BH/IX	01/06/1994	Mekarsari Km.15,5	Mekar Sari	Sudah Bersertifikat
7	KSSU LKM KUBE Sejahtera Unit 065	518/06-KOP/DISPERINDAGKOP-UKM/BH/XIX.2/VII/2008	24/07/2008	Jl. Trans Kalimantan	Anjir Muara	Sudah Bersertifikat
8	Koperasi Serba Usaha Mitra Usaha Agro Mandiri	18/BH/XIX.2/PERINDAGKOP-UKM/II/2010	27/06/2010	Jl. Hj Hasan Basri	Alalak	Sudah Bersertifikat
9	Koperasi Pegawai Negeri Ruhui Rahayu	1718/BH/IX	31/07/1985	Desa Puntik Dalam	Mandastana	Sudah Bersertifikat
10	Koperasi Unit Desa Makarti Jaya	1409/BH/IX	05/10/1978	Desa Kolam Kiri Kecamatan Wanaraya	Wanaraya	Sudah Bersertifikat
11	PRIMKOP PGRI Handayani	1899/BH/IX	22/09/1990	Jl. Kolam Kiri RT. 4, Kolam Kiri	Wanaraya	Sudah Bersertifikat
12	KOPERASI UNIT DESA JAYA UTAMA	07/BH/XIX.2/Diskop-UKM/XI/07	29/11/2007	Kolam Kanan	Wanaraya	Sudah Bersertifikat
13	Koperasi Serba Usaha Harapan Sejahtera	315/BH/XIX.2/Diskop-UKM/VI/07	11/06/2007	Jl. Suryakanta Rt. 05	Wanaraya	Sudah Bersertifikat
14	Koperasi Unit Desa Dwi Karya	1095/BH/IX	12/02/1972	Kolam Kiri Kecamatan Barambai	Barambai	Sudah Bersertifikat
15	Koperasi Serba Usaha Mitra Bersama	16/BH/XIX.2/PERINDAGKOP-UKM/II/2010	04/02/2010	Desa Bagagap Rt. 04 Rw. II	Barambai	Sudah Bersertifikat

Sumber: Website Kementerian Koperasi dan UKM RI

Analisis berdasarkan tahun pendirian menunjukkan pola yang menarik dengan distribusi yang relatif merata sepanjang lima dekade terakhir: 3 koperasi (20%) didirikan pada dekade 1970-an, 2 koperasi (13,3%) pada dekade 1980-an, 3 koperasi (20%) pada dekade 1990-an, 4 koperasi (26,7%) pada dekade 2000-an, dan 3 koperasi (20%) pada dekade 2010-an. Distribusi temporal ini menunjukkan konsistensi dalam pembentukan koperasi, dengan sedikit peningkatan pada dekade 2000-an. Pola ini menandakan keberlanjutan gerakan koperasi di Kabupaten Barito Kuala, meskipun tidak terlihat lonjakan signifikan pada periode tertentu. Menurut teori "*Cooperative Development Phases*" yang dikemukakan oleh Birchall (2017), pola ini mencerminkan fase konsolidasi dalam perkembangan gerakan koperasi, di mana pendirian koperasi baru terjadi secara gradual dan berkesinambungan.

Distribusi koperasi berdasarkan kecamatan menunjukkan konsentrasi di beberapa wilayah dengan Kecamatan Wanaraya memiliki 4 koperasi (26,7%), Tamban 3 koperasi (20%), Mekar Sari dan Barambai masing-masing 2 koperasi (13,3%), serta Jejangkit, Alalak, Anjir Muara, dan Mandastana masing-masing 1 koperasi (6,7%). Konsentrasi koperasi di Kecamatan Wanaraya dan Tamban mengindikasikan aktivitas ekonomi kolektif yang lebih intens di wilayah tersebut. Menurut penelitian Rahmawati dan Wijaya (2022) tentang pola sebaran koperasi di wilayah rural Kalimantan, konsentrasi koperasi sering terjadi di kecamatan yang memiliki aksesibilitas lebih baik dan aktivitas ekonomi yang lebih beragam. Namun, terdapat delapan kecamatan di Kabupaten Barito Kuala yang tidak tercantum dalam data, yang menunjukkan kesenjangan dalam pengembangan koperasi antar wilayah.

Seluruh koperasi dalam data (100%) telah memiliki sertifikat, yang mengindikasikan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap aspek formalitas dan legalitas. Menurut teori "*Institutional Quality and Cooperative Performance*" yang dikembangkan oleh Ostrom dan Gardner (2020), formalisasi kelembagaan merupakan prasyarat penting untuk kinerja dan keberlanjutan koperasi dalam jangka panjang. Kepatuhan terhadap aspek legalitas ini menjadi modal penting bagi pengembangan koperasi di Kabupaten Barito Kuala.

Ekosistem koperasi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan beberapa kekuatan signifikan, termasuk keragaman jenis koperasi yang mencerminkan adaptabilitas terhadap berbagai kebutuhan ekonomi, kontinuitas pendirian koperasi yang menunjukkan keberlanjutan gerakan koperasi, serta status legalitas yang terstandarisasi. Namun, terdapat pula beberapa kelemahan yang perlu diatasi, seperti distribusi spasial yang tidak merata antar kecamatan, jumlah koperasi yang relatif terbatas untuk kabupaten dengan 17 kecamatan, dan terbatasnya koperasi berbasis komoditas unggulan daerah.

Peluang pengembangan koperasi di Kabupaten Barito Kuala masih terbuka luas, terutama dalam hal pengembangan koperasi di kecamatan yang belum tercakup, modernisasi koperasi melalui adopsi teknologi digital dan inovasi model bisnis, serta penguatan jaringan antar koperasi untuk menciptakan sinergi dan efisiensi. Di sisi lain, beberapa ancaman yang perlu diantisipasi meliputi kompetisi dari lembaga keuangan mikro non-koperasi, tantangan keberlanjutan koperasi generasi awal, dan perubahan

preferensi masyarakat terhadap model bisnis konvensional koperasi. Secara keseluruhan, analisis terhadap ekosistem koperasi di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan adanya fondasi yang cukup solid, namun dengan ruang pengembangan yang masih luas. Keberagaman jenis koperasi dan konsistensi pendirian menunjukkan resiliensi gerakan koperasi, sementara distribusi yang belum merata mengindikasikan perlunya pendekatan yang lebih inklusif dalam pengembangan koperasi di masa mendatang.

Meningkatnya koperasi yang berkualitas mencapai 62,50% dengan 35 dari 56 koperasi telah menunjukkan peningkatan kualitas dalam berbagai aspek seperti manajemen, tata kelola, kinerja keuangan, dan pelayanan kepada anggota, menunjukkan upaya yang cukup signifikan dalam pembinaan dan pengembangan koperasi namun masih memerlukan intensifikasi program untuk 21 koperasi yang belum mencapai standar kualitas yang diharapkan. Capaian ini mengindikasikan bahwa program pemberdayaan koperasi telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan profesionalisme pengelolaan koperasi, namun masih diperlukan pendampingan yang lebih intensif, pelatihan manajemen, penguatan modal, dan perbaikan sistem tata kelola untuk mencapai target koperasi berkualitas yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Gambar II.35
Indikator Kinerja Koperasi dan UMKM Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Koperasi dan UMKM	Berkembang	Total	Capaian	Status
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	35	56	62,50%	BAIK
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	187	383	48,83%	PERLU PERHATIAN

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sementara itu, meningkatnya usaha mikro yang menjadi wirausaha mencapai 48,83% dengan 187 dari 383 usaha mikro telah berkembang menjadi wirausaha yang lebih mandiri dan berdaya saing, menunjukkan progress yang cukup baik dalam transformasi usaha mikro menjadi unit ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan,

meskipun masih terdapat 196 usaha mikro yang memerlukan pendampingan lebih lanjut. Kondisi ini mencerminkan tantangan dalam pengembangan kewirausahaan di tingkat mikro yang memerlukan pendekatan komprehensif melalui pelatihan keterampilan, akses permodalan, pembinaan teknis, pendampingan manajemen usaha, serta pengembangan akses pasar untuk memastikan usaha mikro dapat bertransformasi menjadi wirausaha yang tangguh, inovatif, dan mampu berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi lokal dan penciptaan lapangan kerja.

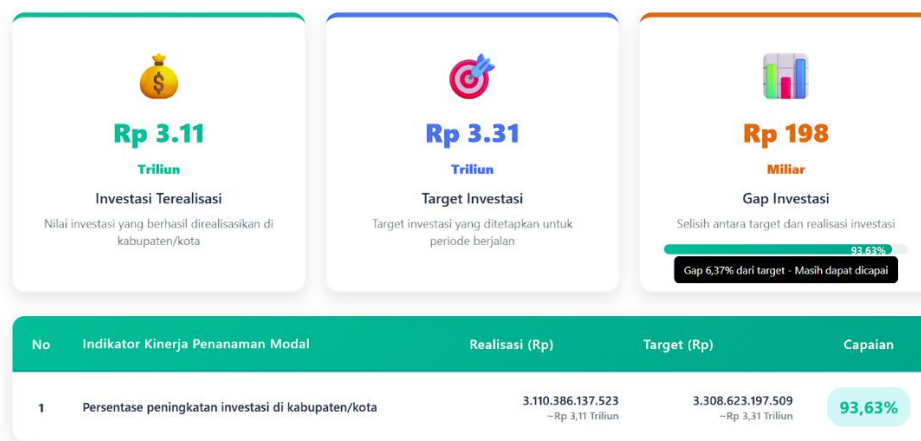
2.4.4.12 Penanaman Modal

Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota mencapai 93,63% dengan nilai investasi terealisasi sebesar Rp. 3.110.386.137.523 dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 3.308.623.197.509, menunjukkan capaian yang sangat memuaskan dan mengindikasikan iklim investasi yang kondusif serta kemampuan daerah dalam menarik minat investor baik domestik maupun asing. Pencapaian hampir 94% dari target investasi ini mencerminkan efektivitas strategi promosi investasi, kebijakan yang mendukung iklim usaha, serta kinerja aparaturnya dalam memberikan pelayanan perizinan dan fasilitasi investasi yang responsif dan berkualitas.

Meskipun belum mencapai target penuh, selisih sebesar Rp. 198.237.059.986 atau sekitar 6,37% dari target investasi menunjukkan gap yang relatif kecil dan masih dalam batas wajar untuk dapat dicapai dengan intensifikasi upaya pada periode berikutnya. Gap investasi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, atau faktor internal seperti keterbatasan infrastruktur pendukung, proses perizinan yang masih memerlukan penyempurnaan, atau belum optimalnya promosi sektor-sektor unggulan yang memiliki daya tarik investasi tinggi.

Realisasi investasi sebesar Rp. 3,11 triliun ini memberikan dampak ekonomi yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pajak dan retribusi, serta multiplier effect terhadap sektor-sektor ekonomi lainnya. Investasi dalam skala triliunan rupiah ini juga berkontribusi terhadap transfer teknologi, peningkatan kapasitas SDM lokal, pengembangan rantai pasok domestik, dan penguatan daya saing ekonomi daerah dalam konteks persaingan regional dan nasional.

Gambar II.36
Indikator Kinerja Penanaman Modal Tahun 2024



Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Untuk mencapai target investasi yang optimal di masa mendatang, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan promosi investasi melalui diversifikasi media dan platform promosi, perbaikan ekosistem perizinan melalui digitalisasi dan penyederhanaan prosedur, pengembangan infrastruktur pendukung seperti jalan, listrik, air, dan telekomunikasi, serta penguatan sektor-sektor unggulan yang memiliki competitive advantage seperti pertanian, perikanan, pariwisata, atau industri pengolahan. Selain itu, perlu juga penguatan kelembagaan penanaman modal, peningkatan kapasitas SDM dalam pelayanan investasi, pengembangan kawasan ekonomi khusus atau kawasan industri, dan penguatan kerjasama dengan lembaga promosi investasi di tingkat provinsi dan nasional.

Momentum positif yang telah terbangun dari pencapaian 93,63% target investasi ini menjadi modal penting untuk menarik investor baru dan memperluas investasi dari investor existing, menciptakan confidence dan reputasi daerah sebagai destinasi investasi yang reliable dan prospektif. Dengan optimalisasi strategi dan perbaikan faktor-faktor pendukung investasi, target investasi penuh bahkan dapat dilampaui pada periode berikutnya, sehingga memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap transformasi ekonomi daerah menuju ekonomi yang lebih maju, diversified, dan berkelanjutan.

2.4.4.13 Kepemudaan dan Olahraga

Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri menunjukkan angka yang masih sangat rendah yaitu 1,69% dengan hanya 1.275 dari 75.329 pemuda yang terlibat dalam kegiatan ekonomi mandiri, mengindikasikan masih terdapat tantangan besar dalam mendorong jiwa kewirausahaan dan kemandirian ekonomi di kalangan pemuda di Kab. Barito Kuala pada tahun 2024. Kondisi ini mencerminkan perlunya program pemberdayaan pemuda yang lebih intensif dan komprehensif, termasuk pelatihan keterampilan entrepreneurship, akses permodalan usaha mikro, pendampingan bisnis, pengembangan inkubator bisnis pemuda, serta penciptaan ekosistem yang mendukung pengembangan usaha rintisan (startup) dan ekonomi kreatif yang menjadi daya tarik generasi muda untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Gambar II.37
Indikator Kinerja Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024



Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Sementara itu, tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mencapai 4,46% dengan 3.359 dari 75.329 pemuda yang aktif berorganisasi, menunjukkan tingkat keterlibatan yang masih relatif rendah namun lebih baik dibandingkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi mandiri. Capaian ini mengindikasikan perlunya revitalisasi organisasi kepemudaan dan peningkatan daya tarik program-program organisasi sosial kemasyarakatan agar lebih relevan dengan kebutuhan dan minat generasi milenial dan generasi Z, melalui pendekatan yang lebih modern, pemanfaatan teknologi digital, pengembangan program yang inovatif dan impactful, serta penguatan peran organisasi kepemudaan sebagai wadah

pengembangan kepemimpinan, keterampilan sosial, dan kontribusi positif terhadap masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan prestasi olahraga menunjukkan capaian yang membanggakan dengan perolehan 10 medali dalam berbagai kompetisi olahraga, mengindikasikan bahwa pembinaan olahraga di kabupaten telah memberikan hasil yang positif dan berkontribusi terhadap peningkatan reputasi daerah di bidang olahraga. Prestasi ini mencerminkan efektivitas program pembinaan atlet, kualitas pelatih, ketersediaan fasilitas olahraga yang memadai, serta dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan olahraga prestasi yang pada akhirnya tidak hanya memberikan kebanggaan daerah tetapi juga menginspirasi generasi muda untuk aktif berolahraga, mengembangkan bakat, dan menerapkan nilai-nilai sportivitas, disiplin, dan kerja keras dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus berpotensi membuka peluang karir di bidang olahraga dan industri kreatif yang terkait dengan sports entertainment dan sports tourism.

2.4.4.14 Statistik

Persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah di Kab. Barito Kuala pada tahun 2024 mencapai capaian sempurna 100% dengan seluruh 30 Perangkat Daerah telah memanfaatkan data statistik sebagai basis dalam proses perencanaan pembangunan, menunjukkan transformasi yang luar biasa menuju perencanaan pembangunan yang berbasis data (evidence-based planning) dan mengindikasikan tingkat literasi data yang tinggi di kalangan aparatur pemerintah daerah. Capaian universal ini mencerminkan keberhasilan program capacity building dalam bidang statistik, ketersediaan sistem informasi statistik yang memadai, serta komitmen kuat dari seluruh Perangkat Daerah untuk menerapkan prinsip-prinsip perencanaan yang scientific, objektif, dan terukur dalam merumuskan program dan kegiatan pembangunan.

Sejalan dengan hal tersebut, persentase Perangkat Daerah yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah juga mencapai 100% dengan seluruh 30 Perangkat Daerah telah mengintegrasikan data statistik dalam proses monitoring dan evaluasi program pembangunan, menunjukkan penerapan siklus perencanaan pembangunan yang komprehensif dan sistematis dari tahap perencanaan

hingga evaluasi. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa budaya evaluasi berbasis data telah tertanam dengan baik di seluruh lini pemerintahan daerah, memungkinkan pengukuran kinerja yang objektif, identifikasi gap implementation yang akurat, dan penyusunan rekomendasi perbaikan yang berbasis bukti empiris untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program pembangunan.

Implementasi data statistik secara universal dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan ini memberikan dampak positif yang sangat signifikan terhadap kualitas governance dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, karena memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih rasional, alokasi sumber daya yang lebih tepat sasaran, dan penetapan target-target pembangunan yang realistis dan terukur. Pemanfaatan data statistik juga mendukung transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan karena memungkinkan public reporting yang objektif dan verifiable, serta memperkuat credibility pemerintah daerah dalam berinteraksi dengan stakeholders termasuk masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah pusat.

Gambar II.38
Indikator Kinerja Statistik Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Statistik	PD Terlayani	Total PD	Capaian
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	30	30	100%
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	30	30	100%

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Keberhasilan dalam mencapai 100% pemanfaatan data statistik ini juga mencerminkan kematangan sistem informasi statistik daerah yang telah mampu menyediakan data yang berkualitas, up-to-date, dan accessible untuk seluruh Perangkat Daerah, serta menunjukkan efektivitas mekanisme koordinasi dan sinkronisasi data antar instansi yang memungkinkan sharing data dan informasi secara seamless. Hal ini

menjadi foundation yang sangat kuat untuk pengembangan smart governance dan digital government yang lebih advanced, dimana decision making process dapat didukung oleh big data analytics, predictive modeling, dan artificial intelligence untuk meningkatkan precision dan responsiveness dalam pelayanan publik dan penyelenggaraan pembangunan.

Dengan fondasi yang kuat dalam pemanfaatan data statistik ini, pemerintah daerah memiliki kapasitas yang baik untuk mengembangkan sistem perencanaan dan evaluasi yang lebih sophisticated, termasuk pengembangan dashboard monitoring pembangunan *real-time, early warning system* untuk berbagai indikator pembangunan, serta integration dengan sistem statistik nasional untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih comprehensive dan evidence-based. Momentum ini juga dapat dimanfaatkan untuk memperkuat partnerships dengan institusi penelitian dan perguruan tinggi dalam pengembangan metodologi evaluasi yang lebih advanced dan capacity building berkelanjutan untuk aparaturnya pemerintah daerah dalam bidang *data science* dan *statistical analysis*.

2.4.4.15 Persandian

Tingkat keamanan informasi pemerintah mencapai 60,93% dengan skor 393 dari total skor maksimal 645, menunjukkan kondisi keamanan informasi yang berada pada level menengah namun masih memerlukan peningkatan signifikan untuk mencapai standar keamanan yang optimal sesuai dengan ancaman siber yang semakin kompleks dan dinamis. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem keamanan informasi pemerintah daerah telah memiliki fondasi yang cukup baik dengan berbagai kontrol keamanan yang sudah diimplementasikan, namun masih terdapat gap sebesar 252 poin atau sekitar 39% yang memerlukan penguatan melalui perbaikan kebijakan keamanan, peningkatan infrastruktur teknologi keamanan, serta penguatan kapasitas SDM dalam mengelola aspek keamanan informasi.

Skor 60,93% ini mencerminkan implementasi sistem pengendalian intern pemerintah di bidang keamanan informasi yang masih dalam tahap pengembangan dan memerlukan akselerasi untuk mencapai tingkat maturitas yang lebih tinggi, mengingat pentingnya perlindungan data dan informasi pemerintah dari berbagai ancaman siber seperti *malware, hacking, data breach*, dan serangan siber lainnya yang dapat

mengancam kontinuitas layanan publik dan kerahasiaan informasi sensitif. Kondisi ini menunjukkan perlunya komitmen yang lebih kuat dari leadership dalam mengalokasikan sumber daya untuk penguatan keamanan informasi, pengembangan kebijakan dan prosedur keamanan yang komprehensif, implementasi teknologi keamanan yang modern dan terintegrasi, serta peningkatan awareness dan kompetensi seluruh aparatur dalam menerapkan praktik keamanan informasi yang baik.

Gambar II.39
Indikator Kinerja Keamanan Informasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Keamanan Informasi	Skor Capaian	Skor Maksimal	Tingkat Keamanan
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah MENENGAH	393	645	60,93%

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Untuk meningkatkan tingkat keamanan informasi menuju level yang optimal, diperlukan roadmap pengembangan keamanan informasi yang sistematis meliputi penyusunan dan penyempurnaan kebijakan keamanan informasi sesuai dengan standar nasional dan internasional, implementasi framework keamanan informasi seperti ISO 27001, penguatan infrastruktur keamanan melalui deployment security tools yang modern, pengembangan *Security Operations Center* (SOC) untuk monitoring dan response terhadap incident keamanan, serta program pelatihan dan sertifikasi keamanan informasi bagi aparatur. Selain itu, perlu juga penguatan aspek governance melalui pembentukan tim pengelola keamanan informasi yang kompeten, pelaksanaan audit keamanan informasi secara berkala, pengembangan disaster recovery plan dan business continuity plan, serta peningkatan kerjasama dengan lembaga keamanan siber nasional untuk sharing threat intelligence dan best practices dalam pengelolaan keamanan informasi pemerintah.

2.4.4.16 Kebudayaan

Terlestarikannya cagar budaya mencapai capaian sempurna 100% dengan seluruh 15 cagar budaya yang ada di kabupaten telah berhasil dilestarikan dengan baik,

menunjukkan komitmen yang sangat kuat dan konsisten dari pemerintah daerah dalam melindungi, memelihara, dan melestarikan warisan budaya sebagai aset berharga yang mencerminkan identitas dan sejarah peradaban lokal. Pencapaian universal ini mengindikasikan bahwa sistem pengelolaan cagar budaya telah berfungsi dengan sangat efektif, mulai dari identifikasi dan inventarisasi, penetapan status perlindungan, pemeliharaan fisik, hingga upaya revitalisasi dan pemanfaatan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip konservasi warisan budaya.

Keberhasilan melestarikan seluruh cagar budaya ini mencerminkan implementasi yang optimal dari berbagai program pelestarian yang meliputi pemugaran dan restorasi struktur fisik, dokumentasi dan penelitian sejarah, pengembangan regulasi perlindungan, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian, serta integrasi cagar budaya dalam pengembangan pariwisata budaya yang berkelanjutan. Program pelestarian yang komprehensif ini tidak hanya fokus pada aspek fisik bangunan atau situs, tetapi juga pada pelestarian nilai-nilai budaya, tradisi, dan pengetahuan lokal yang terkandung dalam setiap cagar budaya sebagai living heritage yang terus hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Gambar II.40
Indikator Kinerja Kebudayaan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kebudayaan	Terlestari	Total	Capaian
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	15	15	100% 

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Pelestarian cagar budaya yang mencapai 100% ini juga memberikan dampak positif yang multidimensional, baik dari segi ekonomi melalui pengembangan industri pariwisata budaya dan ekonomi kreatif, aspek sosial melalui penguatan identitas dan kebanggaan masyarakat lokal, aspek pendidikan melalui pemanfaatan cagar budaya sebagai media pembelajaran sejarah dan budaya, maupun aspek penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan tentang peradaban dan arsitektur tradisional. Cagar budaya yang terpelihara dengan baik menjadi daya tarik wisata yang autentik dan

berkelanjutan, menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui pengembangan usaha mikro dan kecil di bidang kerajinan, kuliner, dan jasa pariwisata.

Keberhasilan pelestarian yang universal ini juga menjadi model dan best practice yang dapat diadopsi oleh daerah lain dalam mengelola warisan budaya, sekaligus meningkatkan reputasi dan positioning kabupaten sebagai destinasi wisata budaya yang berkualitas tinggi. Pencapaian ini menunjukkan bahwa dengan political will yang kuat, anggaran yang memadai, koordinasi lintas sektor yang baik, dan partisipasi aktif masyarakat, pelestarian warisan budaya dapat dilakukan secara optimal tanpa mengorbankan pembangunan ekonomi, bahkan justru dapat menjadi catalyst untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Untuk mempertahankan dan mengembangkan pencapaian ini, diperlukan strategi jangka panjang yang meliputi peningkatan kapasitas SDM dalam bidang konservasi dan museum, pengembangan teknologi digital untuk dokumentasi dan promosi cagar budaya, penguatan kerjasama dengan institusi akademik dan lembaga penelitian, pengembangan program edukasi budaya untuk generasi muda, serta integrasi pelestarian cagar budaya dengan rencana tata ruang dan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Dengan demikian, warisan budaya tidak hanya terpelihara secara fisik, tetapi juga tetap relevan dan bermakna bagi kehidupan masyarakat kontemporer sambil tetap mempertahankan autentisitas dan nilai historisnya.

2.4.4.17 Perpustakaan

Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mencapai 68,24 yang menunjukkan indikator positif terhadap budaya literasi dan minat baca masyarakat di kabupaten, meskipun masih memerlukan upaya peningkatan untuk mencapai level yang lebih optimal dalam mendukung pengembangan masyarakat yang literat dan berpengetahuan luas. Capaian ini mengindikasikan bahwa sebagian besar masyarakat telah menunjukkan kepedulian terhadap aktivitas membaca, namun masih terdapat ruang untuk peningkatan melalui diversifikasi program literasi, pengembangan koleksi perpustakaan yang menarik dan relevan, serta inovasi dalam penyajian layanan perpustakaan yang lebih interaktif dan mudah diakses oleh berbagai kalangan masyarakat.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat menunjukkan nilai 76,57 yang mencerminkan capaian yang lebih baik dalam aspek-aspek pendukung literasi seperti ketersediaan infrastruktur perpustakaan, aksesibilitas layanan, kualitas koleksi, dan program pembinaan literasi masyarakat. Indeks ini mengukur berbagai dimensi pembangunan literasi termasuk pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat, pembinaan perpustakaan sesuai standar, keterlibatan masyarakat, dan keanggotaan perpustakaan, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang ekosistem literasi daerah.

Perbedaan nilai antara tingkat kegemaran membaca (68,24) dan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (76,57) mengindikasikan bahwa infrastruktur dan sistem pendukung literasi telah tersedia dengan baik, namun masih memerlukan upaya lebih intensif untuk mentransformasi ketersediaan infrastruktur tersebut menjadi peningkatan minat dan kegemaran membaca masyarakat secara nyata. Hal ini menunjukkan pentingnya pengembangan strategi yang lebih efektif dalam memotivasi masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas dan layanan perpustakaan yang telah tersedia, melalui program-program inovatif seperti literasi digital, reading campaign, book club, storytelling, dan kegiatan literasi berbasis komunitas.

Gambar II.41
Indikator Kinerja Perpustakaan dan Literasi Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Perpustakaan dan Literasi	Data Input	Nilai Indeks	Status
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	-	68,24	BAIK
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	-	76,57	SANGAT BAIK

Untuk meningkatkan kedua indikator ini secara bersamaan, diperlukan pendekatan holistik yang meliputi pengembangan koleksi perpustakaan yang sesuai dengan kebutuhan dan minat masyarakat lokal, peningkatan kualitas dan kapasitas tenaga perpustakaan, modernisasi sistem layanan perpustakaan melalui digitalisasi, pengembangan perpustakaan keliling dan pojok baca di berbagai lokasi strategis, serta penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media lokal dalam mengkampanyekan budaya literasi. Selain itu, perlu juga dikembangkan

program literasi yang menarik bagi berbagai segmen masyarakat, mulai dari anak-anak hingga dewasa, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pendekatan yang kreatif untuk menciptakan pengalaman membaca yang menyenangkan dan bermakna bagi masyarakat.

2.4.4.18 Kearsipan

Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional mencapai 75,43% dengan komponen penilaian yang menunjukkan variasi capaian dimana beberapa aspek telah mencapai skor maksimal 100 untuk komponen akuntabilitas (a), integritas (i), dan sistem (s), namun komponen jaminan ketersediaan (j) masih menunjukkan nilai 1,71 yang sangat rendah dan memerlukan perhatian khusus. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem kearsipan telah berfungsi dengan baik dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintahan dan menyediakan alat bukti yang sah untuk berbagai keperluan administratif, namun masih terdapat tantangan signifikan dalam aspek jaminan ketersediaan arsip yang berkelanjutan yang memerlukan perbaikan infrastruktur, sistem penyimpanan, dan mekanisme preservasi arsip yang lebih robust untuk memastikan arsip dapat diakses kapan saja diperlukan.

Sementara itu, tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menunjukkan capaian sempurna 100% dengan seluruh komponen penilaian mencapai skor maksimal 100 untuk aspek manajemen (m), basis data (b), sistem pengelolaan (g), akuntabilitas (a), klasifikasi (c), dan integritas (i). Pencapaian universal ini mencerminkan keberhasilan luar biasa dalam membangun sistem kearsipan yang komprehensif dan terintegrasi yang mampu menjamin keberadaan dan keutuhan seluruh arsip yang diperlukan untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas publik.

Kesenjangan antara kedua indikator ini menunjukkan bahwa meskipun sistem kearsipan telah berhasil menjamin keberadaan dan keutuhan arsip secara menyeluruh, masih terdapat ruang perbaikan dalam aspek ketersediaan dan aksesibilitas arsip, khususnya dalam komponen jaminan ketersediaan yang skornya masih sangat rendah. Hal ini mengindikasikan perlunya investasi lebih lanjut dalam teknologi informasi dan sistem digitalisasi arsip, peningkatan kapasitas infrastruktur penyimpanan,

pengembangan sistem backup dan recovery yang reliable, serta penguatan standar operasional prosedur untuk memastikan arsip tidak hanya tersimpan dengan baik tetapi juga dapat diakses dengan mudah dan cepat ketika diperlukan untuk berbagai keperluan administratif, hukum, dan penelitian.

Gambar II.42
Indikator Kinerja Kearsipan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kearsipan	Komponen Penilaian	Capaian	Status
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	Akuntabilitas (a): 100 Integritas (i): 100 Sistem (s): 100 Jaminan (j): 1,71	75,43%	BAIK
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara	Manajemen (m): 100 Basis Data (b): 100 Pengelolaan (g): 100 Akuntabilitas (a): 100 Klasifikasi (c): 100 Integritas (i): 100	100%	PERFECT

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Keberhasilan mencapai 100% dalam aspek keberadaan dan keutuhan arsip menunjukkan fondasi yang sangat kuat dalam pengelolaan arsip sebagai memori institusional dan aset strategis pemerintahan, yang menjadi dasar penting bagi kontinuitas pelayanan publik, pengambilan keputusan berbasis evidensi, dan pemenuhan kewajiban transparansi dan akuntabilitas. Untuk mengoptimalkan sistem kearsipan secara menyeluruh, diperlukan fokus khusus pada peningkatan aspek ketersediaan arsip melalui modernisasi sistem pengelolaan arsip, implementasi teknologi digital yang lebih canggih, pelatihan SDM pengelola arsip, dan pengembangan sistem integrasi antar instansi untuk memfasilitasi sharing dan akses arsip lintas OPD sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing.

2.4.5 Urusan Pilihan

2.4.5.1 Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi perikanan yang beragam, mencakup perikanan budidaya dengan tiga sistem utama (kolam, tambak, dan jaring apung) serta perikanan tangkap yang menunjukkan tren positif. Analisis komprehensif terhadap data produksi kedua subsektor ini memberikan gambaran menyeluruh tentang dinamika dan potensi sektor kelautan dan perikanan di wilayah ini. Nilai produksi perikanan budidaya di Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh jaring apung dengan total nilai mencapai Rp12,93 miliar (88,4% dari total produksi), diikuti oleh tambak sebesar Rp1,64 miliar (11,2%), dan kolam sebesar Rp0,06 miliar (0,4%). Dominasi jaring apung mengindikasikan adaptasi masyarakat terhadap kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang banyak dialiri sungai dan perairan terbuka, yang sangat sesuai untuk budidaya dengan sistem ini. Menurut kajian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya (2022), sistem budidaya jaring apung memiliki keunggulan berupa tingkat produktivitas yang lebih tinggi dan efisiensi penggunaan lahan dibandingkan sistem konvensional, yang menjadikannya pilihan utama bagi pembudidaya di wilayah dengan karakteristik perairan seperti Barito Kuala.

Tabel II-54
Nilai Produksi Kolam, Tambak dan Jaring Apung per Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan	Nilai Produksi Kolam (Miliar Rupiah)	Nilai Produksi Tambak (Miliar Rupiah)	Nilai Produksi Jaring Apung (Miliar Rupiah)
Tabukan	0.06	0.04	0.04
Tabunganen	-	0.51	10.37
Tamban	-	0.35	0.39
Mekar Sari	-	0.22	0.72
Anjir Pasar	-	0.01	-
Anjir Muara	-	0.09	0.32
Alalak	-	0.20	0.66
Mandastana	-	0.04	0.07
Jejangkit	-	0.01	0.06
Belawang	-	-	0.04
Barambai	-	0.09	0.21
Rantau Badauh	-	0.06	0.02
Cerbon	-	0.03	0.03
Bakumpai	-	-	-
Marabahan	-	-	-
Kabupaten Barito Kuala	0.06	1.64	12.93

Total	0.12	3.39	25.86

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Kecamatan Tabunganen menonjol sebagai produsen perikanan budidaya terbesar dengan nilai produksi jaring apung mencapai Rp10,37 miliar (80,2% dari total produksi jaring apung kabupaten) dan tambak sebesar Rp0,51 miliar (31,1% dari total produksi tambak kabupaten). Konsentrasi produksi yang tinggi di Kecamatan Tabunganen berkaitan erat dengan kondisi geografisnya yang strategis dengan akses ke perairan yang ideal untuk budidaya perikanan. Sebaliknya, Kecamatan Bakumpai dan Marabahan tidak menunjukkan adanya produksi perikanan budidaya dari ketiga sistem yang dianalisis, mencerminkan adanya kesenjangan dalam pengembangan potensi perikanan antar wilayah di Kabupaten Barito Kuala.

Data perikanan tangkap Kabupaten Barito Kuala tahun 2019-2023 menunjukkan tren yang cukup stabil dengan kecenderungan meningkat. Produksi perikanan tangkap mencapai 8.812,23 ton pada 2019, meningkat menjadi 9.387,84 ton pada 2020 (peningkatan 6,53%), kemudian mengalami penurunan marginal menjadi 9.357,40 ton pada 2021 (penurunan 0,32%) dan 9.348,74 ton pada 2022 (penurunan 0,09%), sebelum kembali meningkat signifikan menjadi 9.727,73 ton pada 2023 (peningkatan 4,05%). Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sebesar 10,39% dalam kurun waktu lima tahun, dengan produksi rata-rata 9.326,79 ton per tahun.

Analisis korelasi antara data perikanan tangkap dan budidaya menunjukkan hubungan yang menarik. Menurut studi yang dilakukan oleh Hermawan et al. (2023), wilayah dengan produktivitas perikanan tangkap tinggi seperti Kabupaten Barito Kuala cenderung memiliki pola pengembangan perikanan budidaya yang terkonsentrasi pada sistem yang memiliki sinergi dengan aktivitas penangkapan, seperti jaring apung. Fenomena ini terkonfirmasi oleh dominasi produksi jaring apung di Kabupaten Barito Kuala, yang mencapai 88,4% dari total produksi budidaya.

Fluktuasi produksi perikanan tangkap, terutama penurunan pada periode 2021-2022, memiliki korelasi dengan kondisi ekosistem akuatik dan tekanan penangkapan. Studi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Selatan (2022) mengidentifikasi bahwa penurunan produksi pada periode tersebut berkaitan dengan anomali iklim yang mempengaruhi pola migrasi dan reproduksi ikan, serta adanya

tantangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan berkelanjutan. Peningkatan signifikan pada 2023 mencerminkan pemulihan stok ikan dan perbaikan dalam praktik pengelolaan perikanan.

Tabel II-55
Data Perikanan Tangkap Kabupaten Barito Kuala Tahun 2019-2023

Uraian Perikanan Tangkap	Realisasi (ton)				
	2019	2020	2021	2022	2023
	8,812.23	9,387.84	9,357.4	9,348.74	9,727.729

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab. Barito Kuala

Dinamika produksi perikanan di Kabupaten Barito Kuala juga memiliki dimensi sosio-ekonomi yang penting. Aktivitas perikanan, baik tangkap maupun budidaya, menjadi sumber penghidupan bagi sebagian besar masyarakat pesisir dan riparian di kabupaten ini. Menurut teori *Livelihood Diversification* yang dikemukakan oleh Ellis (2020), koeksistensi perikanan tangkap dan budidaya dalam satu wilayah dapat meningkatkan resiliensi ekonomi masyarakat melalui diversifikasi sumber pendapatan. Di Kabupaten Barito Kuala, produksi perikanan tangkap yang stabil dengan kecenderungan meningkat, dikombinasikan dengan pengembangan perikanan budidaya di beberapa kecamatan, menciptakan fondasi ekonomi perikanan yang lebih resilient.

Dengan total produksi perikanan tangkap mencapai 9.727,73 ton pada 2023 dan nilai produksi perikanan budidaya sebesar Rp14,63 miliar, sektor kelautan dan perikanan memiliki kontribusi yang substansial terhadap ekonomi Kabupaten Barito Kuala. Potensi pengembangan masih sangat besar, terutama dalam hal peningkatan nilai tambah melalui pengolahan hasil perikanan, perluasan area budidaya ke kecamatan yang belum optimal, dan penerapan praktik pengelolaan berkelanjutan untuk menjamin keberlanjutan produksi perikanan tangkap.

Jumlah total produksi perikanan (tangkap dan budidaya) kabupaten/kota mencapai 97,48% dengan produksi aktual sebesar 21.116,88 ton dari target 21.662 ton, menunjukkan capaian yang sangat baik dan hampir mencapai target optimal yang ditetapkan dengan selisih hanya 545,12 ton atau sekitar 2,52% dari target produksi. Pencapaian ini mengindikasikan bahwa sektor kelautan dan perikanan di kabupaten telah berkembang dengan sangat baik, baik dari aspek perikanan tangkap yang

memanfaatkan potensi sumber daya alam perairan maupun perikanan budidaya yang mengandalkan teknologi dan manajemen budidaya yang semakin modern dan efisien.

Capaian produksi perikanan sebesar 21.116,88 ton ini mencerminkan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang tersedia, efektivitas program pemberdayaan nelayan dan pembudidaya ikan, serta keberhasilan implementasi teknologi dan inovasi dalam sektor perikanan. Produksi yang hampir mencapai target menunjukkan bahwa strategi pengembangan perikanan tangkap melalui modernisasi armada penangkapan, peningkatan kapasitas nelayan, dan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan telah memberikan hasil yang positif, begitu juga dengan pengembangan perikanan budidaya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi komoditas budidaya.

Sementara masih terdapat gap produksi sebesar 545,12 ton, hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kondisi cuaca dan musim yang mempengaruhi aktivitas penangkapan ikan, fluktuasi populasi ikan di alam, keterbatasan akses terhadap teknologi penangkapan yang lebih canggih, atau kendala dalam pengelolaan budidaya seperti penyakit ikan, kualitas air, atau ketersediaan pakan. Faktor-faktor eksternal seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan perairan, atau kompetisi dengan daerah lain juga dapat mempengaruhi pencapaian target produksi yang optimal.

Gambar II.43
Indikator Kinerja Kelautan dan Perikanan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Kelautan dan Perikanan	Produksi (ton)	Target (ton)	Capaian
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	21.116,88 ton	21.662 ton	97,48%

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Produksi perikanan sebesar 21.116,88 ton memberikan kontribusi ekonomi yang sangat signifikan bagi masyarakat pesisir dan nelayan, menciptakan lapangan kerja yang luas di sepanjang rantai nilai perikanan mulai dari penangkapan, budidaya, pengolahan, hingga pemasaran. Sektor ini juga berperan penting dalam ketahanan pangan daerah

melalui penyediaan protein hewani berkualitas tinggi, peningkatan pendapatan masyarakat pesisir, dan pengembangan ekonomi lokal melalui industri hilir perikanan seperti pengolahan ikan, cold storage, dan ekspor produk perikanan.

Untuk mencapai target produksi penuh dan bahkan meningkatkannya di masa mendatang, diperlukan strategi komprehensif yang meliputi modernisasi armada penangkapan ikan dengan teknologi yang lebih efisien dan ramah lingkungan, pengembangan perikanan budidaya melalui penerapan teknologi akuakultur modern, peningkatan kualitas SDM nelayan dan pembudidaya melalui pelatihan teknis dan manajemen usaha, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold chain, dan fasilitas pengolahan. Selain itu, perlu juga penguatan kelembagaan nelayan, akses terhadap permodalan, pengembangan diversifikasi produk olahan, dan penguatan sistem pemasaran untuk meningkatkan nilai tambah produk perikanan.

Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan menjadi kunci penting untuk memastikan produksi jangka panjang, melalui implementasi prinsip-prinsip sustainable fisheries, konservasi habitat perairan, pengendalian pencemaran, dan pengaturan kuota penangkapan yang sesuai dengan carrying capacity perairan. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, sektor kelautan dan perikanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat sambil tetap menjaga kelestarian sumber daya alam untuk generasi mendatang.

2.4.5.2 Pariwisata

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu wilayah di Kalimantan yang menunjukkan dinamika perkembangan sektor pariwisata yang menarik untuk dikaji dalam konteks perencanaan pembangunan daerah. Berdasarkan data capaian urusan pariwisata periode 2019-2023, terlihat bahwa sektor ini mengalami fluktuasi yang signifikan, terutama terdampak oleh situasi pandemi global yang terjadi pada tahun 2020. Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB mengalami penurunan dari 4,50% pada tahun 2019 menjadi 4,00% pada tahun 2020, dan semakin menurun menjadi 3,80% pada tahun 2021. Namun, tren positif mulai terlihat pada tahun 2022 dengan kenaikan menjadi 4,00% dan berlanjut menjadi 4,20% pada tahun 2023, menandakan adanya

pemulihan sektor pariwisata pasca-pandemi meskipun belum mencapai level pra-pandemi.

Tabel II-56
Indikator capaian urusan Pariwisata Kabupaten Barito Buala Tahun 2019-2023

<i>Indikator</i>	<i>2019</i>	<i>2020</i>	<i>2021</i>	<i>2022</i>	<i>2023</i>
<i>Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB</i>	4,50%	4,00%	3,80%	4,00%	4,20%
<i>Jumlah wisatawan mancanegara</i>	713	289	290	350	400
<i>Jumlah kunjungan wisatawan nusantara</i>	74.108	106.511	165.177	190.000	200.000
<i>Jumlah devisa sektor pariwisata</i>	\$22,9 Miliar	\$15 Miliar	\$12 Miliar	\$13,5 Miliar	\$15 Miliar
<i>Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja</i>	17,24%	25,56%	31,38%	33,50%	35,00%

Sumber: Disbudporapar Kabupaten Barito Kuala.

Jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan drastis dari 713 orang pada tahun 2019 menjadi hanya 289 orang pada tahun 2020, sebagai dampak langsung dari pembatasan perjalanan internasional akibat pandemi COVID-19. Pemulihan jumlah wisatawan mancanegara berlangsung secara bertahap dengan 290 orang pada tahun 2021, meningkat menjadi 350 orang pada tahun 2022, dan mencapai 400 orang pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren peningkatan, jumlah ini masih jauh dari capaian tahun 2019, mengindikasikan bahwa sektor wisatawan mancanegara masih membutuhkan strategi pemulihan yang lebih komprehensif.

Berbeda dengan tren wisatawan mancanegara, jumlah kunjungan wisatawan nusantara justru menunjukkan peningkatan yang signifikan dan konsisten selama

periode 2019-2023. Dari 74.108 pengunjung pada tahun 2019, angka ini meningkat tajam menjadi 106.511 pada tahun 2020, dan terus meningkat menjadi 165.177 pada tahun 2021, 190.000 pada tahun 2022, hingga mencapai 200.000 pada tahun 2023. Fenomena ini sejalan dengan temuan Cahyono dan Khairunisa (2022) yang menyatakan bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah preferensi wisatawan domestik untuk mengeksplorasi destinasi lokal yang dianggap lebih aman dan terjangkau, dibandingkan dengan perjalanan ke luar negeri.

Dari segi ekonomi, jumlah devisa sektor pariwisata mengalami penurunan signifikan dari \$22,9 miliar pada tahun 2019 menjadi \$15 miliar pada tahun 2020, dan semakin menurun menjadi \$12 miliar pada tahun 2021. Pemulihan mulai terlihat pada tahun 2022 dengan peningkatan menjadi \$13,5 miliar, dan berlanjut menjadi \$15 miliar pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan trend positif, nilai devisa ini masih belum mencapai angka pra-pandemi, mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi pariwisata masih menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Barito Kuala.

Aspek yang paling menarik dari data tersebut adalah peningkatan signifikan pada jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja. Dari 17,24% pada tahun 2019, angka ini meningkat menjadi 25,56% pada tahun 2020, 31,38% pada tahun 2021, 33,50% pada tahun 2022, dan mencapai 35,00% pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya transformasi struktural dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala, di mana sektor pariwisata menjadi penyerap tenaga kerja yang semakin dominan. Hal ini sejalan dengan studi Sugihamretha (2020) yang menjelaskan bahwa sektor pariwisata memiliki efek multiplier yang tinggi terhadap penciptaan lapangan kerja, terutama di daerah-daerah dengan potensi wisata alam dan budaya.

Fenomena peningkatan jumlah pekerja di sektor pariwisata di tengah fluktuasi kontribusi terhadap PDB menunjukkan adanya inefisiensi produktivitas dalam sektor ini. Menurut penelitian Utami dan Hartono (2021), hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kualitas SDM pariwisata, keterbatasan infrastruktur pendukung, serta lemahnya integrasi antar pelaku usaha pariwisata. Untuk mengoptimalkan potensi pariwisata Kabupaten Barito Kuala, diperlukan strategi pengembangan yang holistik, meliputi peningkatan kapasitas SDM, pengembangan infrastruktur, diversifikasi produk wisata, serta penguatan promosi yang terintegrasi.

Berdasarkan analisis temporal terhadap data capaian urusan pariwisata Kabupaten Barito Kuala tahun 2019-2023, dapat disimpulkan bahwa sektor pariwisata daerah ini mengalami dampak signifikan akibat pandemi COVID-19, namun menunjukkan resiliensi dan potensi pemulihan yang kuat, terutama dalam hal wisatawan nusantara dan penyerapan tenaga kerja. Meskipun demikian, tantangan utama yang perlu diatasi dalam RPJMD 2025-2029 adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas sektor pariwisata agar kontribusinya terhadap PDB dapat ditingkatkan secara signifikan, seiring dengan peningkatan jumlah pekerja di sektor tersebut. Selain itu, strategi untuk menarik kembali wisatawan mancanegara perlu diprioritaskan untuk memaksimalkan perolehan devisa dari sektor pariwisata. Dengan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sektor pariwisata Kabupaten Barito Kuala berpotensi menjadi motor penggerak ekonomi daerah pada periode 2025-2029.

Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan menunjukkan penurunan sebesar 32,50% dengan hanya 189 wisatawan asing dari target 280 wisatawan, mengindikasikan tantangan serius dalam menarik kunjungan wisatawan internasional yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti dampak pandemi global, keterbatasan konektivitas internasional, belum optimalnya promosi pariwisata di pasar internasional, atau kurangnya daya tarik destinasi wisata yang mampu bersaing di tingkat global. Kondisi ini memerlukan revitalisasi strategi pemasaran pariwisata internasional melalui pengembangan produk wisata yang unik dan berkualitas, peningkatan standar pelayanan, penguatan kerjasama dengan tour operator internasional, serta optimalisasi platform digital dan media sosial untuk menjangkau pasar wisatawan mancanegara yang lebih luas.

Sementara itu, persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 1,85% dengan 196.323 wisatawan domestik dari baseline 192.754 wisatawan, mengindikasikan daya tarik pariwisata domestik yang masih terjaga meskipun pertumbuhannya relatif modest. Capaian ini menunjukkan bahwa destinasi wisata kabupaten masih memiliki appeal bagi wisatawan domestic, namun pertumbuhan yang relatif kecil mengindikasikan perlunya strategi yang lebih agresif dalam mengembangkan paket wisata yang menarik, meningkatkan kualitas destinasi, memperkuat promosi digital, dan mengoptimalkan

event-event pariwisata yang dapat menarik lebih banyak wisatawan nusantara untuk berkunjung dan tinggal lebih lama.

Gambar II.44
Indikator Kinerja Pariwisata Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pariwisata	Realisasi	Target/Total	Capaian	Status
KUNJUNGAN WISATAWAN					
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	189	280	-32,50%	KRITIS
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	196.323	192.754	1,85%	RENDAH
INFRASTRUKTUR DAN FASILITAS					
3	Tingkat hunian akomodasi	4.503	24.090	18,69%	SANGAT RENDAH
KONTRIBUSI EKONOMI					
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	291,66 miliar	11.350,36 miliar	2,57%	RENDAH
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	3.069.327.425	112.636.258.147	2,72%	RENDAH

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Di sisi lain, tingkat hunian akomodasi menunjukkan angka yang rendah yaitu 18,69% dengan 4.503 kamar terisi dari total 24.090 kamar yang tersedia, mengindikasikan oversupply akomodasi atau underperformance sektor pariwisata yang berdampak pada rendahnya utilisasi fasilitas penginapan. Kondisi ini mencerminkan ketidakseimbangan antara kapasitas akomodasi yang tersedia dengan jumlah wisatawan yang berkunjung, yang dapat disebabkan oleh kurangnya promosi yang efektif, kualitas layanan akomodasi yang belum optimal, pricing strategy yang tidak kompetitif, atau belum berkembangnya ecosystem pariwisata yang integrated yang mampu menarik wisatawan untuk tinggal lebih lama dan memanfaatkan fasilitas akomodasi yang tersedia.

Selanjutnya, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku mencapai 2,57% dengan nilai Rp. 291,66 miliar dari total PDRB sebesar Rp. 11.350,36 miliar, menunjukkan bahwa sektor pariwisata belum menjadi kontributor ekonomi yang dominan namun masih memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut. Kontribusi yang relatif kecil ini mengindikasikan perlunya pengembangan pariwisata yang lebih comprehensive dan sustainable untuk meningkatkan value added dari aktivitas pariwisata, termasuk pengembangan industri kreatif, kuliner lokal, produk kerajinan, dan sektor pendukung lainnya yang dapat memperbesar multiplier effect pariwisata terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

Adapun kontribusi sektor pariwisata terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai 2,72% dengan nilai Rp. 3.069.327.425 dari total PAD sebesar Rp. 112.636.258.147, menunjukkan bahwa pariwisata memberikan kontribusi finansial yang modest bagi kas daerah namun masih memiliki ruang yang sangat luas untuk optimalisasi. Rendahnya kontribusi pariwisata terhadap PAD ini dapat menjadi indikator bahwa potensi economic benefit dari sektor pariwisata belum fully captured, baik melalui pajak hotel dan restoran, retribusi tempat wisata, maupun berbagai pungutan lainnya yang terkait dengan aktivitas pariwisata, sehingga diperlukan strategi yang lebih efektif dalam mengoptimalkan revenue generation dari sektor pariwisata melalui pengembangan produk wisata premium, peningkatan jumlah dan durasi kunjungan wisatawan, serta diversifikasi sumber pendapatan pariwisata yang berkelanjutan.

2.4.5.3 Pertanian dan Peternakan

2.4.5.3.1 Pertanian

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi pertanian yang sangat signifikan, terbukti dengan luasnya lahan pertanian yang tersebar di 17 kecamatan. Berdasarkan data dari Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala, total lahan baku sawah mencapai 99.443,81 hektar, dengan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 78.810,49 hektar dan rencana lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan seluas 29.980,81 hektar. Data ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga keberlanjutan lahan pertanian untuk menjamin ketahanan pangan di masa mendatang.

Distribusi lahan baku sawah di Kabupaten Barito Kuala cukup beragam antarwilayah, dengan konsentrasi terbesar berada di Kecamatan Tabunganen (11.035,69 hektar), Tamban (9.470,60 hektar), dan Mekar Sari (9.329,22 hektar). Ketiga kecamatan ini menyumbang hampir 30% dari total lahan baku sawah yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Sementara itu, Kecamatan Kuripan memiliki lahan baku sawah terkecil, yaitu hanya 495,89 hektar. Kondisi ini menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan dalam potensi produksi padi antarwilayah.

Tabel II-57
Data Lahan Baku, Lahan Holtikultura, Rencana Lahan Pertanian, Rencana Lahan Cadangan Pertanian dan Rencana Kawasan Pertanian per Kecamatan di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2023

No	Kecamatan	Lahan Baku Sawah Tahun	Lahan Pertanian Hortikultura	Rencana Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Rencana Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	Rencana Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan
1	Alalak	5,340.84	-	2,776.77	711.60	5,088.88
2	Anjir Muara	7,412.64	4.67	6,107.24	187.96	7,420.99
3	Anjir Pasar	7,922.18	2.10	7,179.18	1,839.69	8,029.25
4	Bakumpai	2,765.56	234.21	2,477.16	1,156.66	2,925.47
5	Barambai	5,987.07	14.75	5,179.45	4,598.38	5,969.47
6	Belawang	6,579.31	-	6,039.70	791.83	5,895.67
7	Cerbon	4,249.18	795.30	2,318.98	898.21	3,930.99
8	Jejangkit	4,407.18	2,052.67	4,179.10	3,859.22	4,189.60
9	Kuripan	495.89	939.40	433.04	1,101.50	447.64
10	Mandastana	7,695.23	-	5,649.41	918.24	7,743.56
11	Marabahan	1,378.26	-	460.16	1,435.44	1,050.62
12	Mekar Sari	9,329.22	27.34	7,356.01	2,152.47	8,657.88
13	Rantau Badauh	8,727.50	374.31	6,411.06	1,067.58	8,474.35
14	Tabukan	4,709.48	60.21	3,307.30	2,422.20	3,371.87
15	Tabunganen	11,035.69	1,401.54	8,805.72	425.80	9,573.44
16	Tamban	9,470.60	154.37	8,422.93	2,173.09	9,274.97
17	Wanaraya	1,937.99	311.70	1,707.29	4,240.91	1,919.44
	TOTAL	99,443.81	6,372.57	78,810.49	29,980.81	93,964.10

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

Selain lahan sawah, Kabupaten Barito Kuala juga memiliki lahan pertanian hortikultura seluas 6.372,57 hektar. Kecamatan Jejangkit memiliki lahan hortikultura terluas mencapai 2.052,67 hektar, diikuti oleh Kecamatan Tabunganen dengan 1.401,54

hektar, dan Kecamatan Kuripan dengan 939,40 hektar. Menariknya, beberapa kecamatan dengan lahan baku sawah yang luas seperti Alalak, Belawang, Mandastana, dan Marabahan justru tidak memiliki lahan pertanian hortikultura, mengindikasikan bahwa wilayah-wilayah tersebut lebih berfokus pada produksi padi.

Dari aspek produksi tanaman pangan, perkembangan realisasi produksi padi di Kabupaten Barito Kuala selama periode 2019-2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Produksi padi pada tahun 2019 mencapai 322.185 ton dengan tingkat capaian 81,37% dari target. Terjadi peningkatan produksi pada tahun 2020 menjadi 393.324 ton dengan capaian 98,99%. Namun, tren positif ini tidak berlanjut pada tahun-tahun berikutnya. Produksi padi mengalami penurunan menjadi 373.737 ton pada tahun 2021 dan turun drastis menjadi 240.518 ton pada tahun 2022 dengan capaian terendah selama periode lima tahun yaitu hanya 64,13%. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor iklim dan serangan hama yang berdampak signifikan terhadap produktivitas lahan. Penelitian Hairani et al. (2021) mengungkapkan bahwa kondisi lahan pasang surut di Kabupaten Barito Kuala sangat rentan terhadap perubahan iklim, khususnya fenomena El Niño dan La Niña yang dapat menyebabkan kekeringan atau banjir.

Tabel II-58
Data Realisasi Padi, Jagung dan Kacang Tanah Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2019-2023

Sub Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi				
		2019	2020	2021	2022	2023
Padi	Ton	322.185,00	393.324,00	373.737,00	240.518,00	317.092,00
Capaian (%)		81,37	98,99	93,73	64,13	131,10
Jagung	Ton	8.806,14	13.243,00	6.996,00	7.031,31	7.062,04
Capaian (%)		85,97	126,52	65,13	100,08	100,10
Kacang Tanah	Ton	21	33	60	59,69	108,15
Capaian (%)		175,00%	157,14%	181,82%	99,48%	181,19%

Sumber: Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala

Meskipun demikian, produksi padi menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan pada tahun 2023 menjadi 317.092 ton dengan capaian mencapai 131,10%, melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini dapat dikaitkan dengan upaya intensifikasi pertanian dan introduksi varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi lahan. Sejalan dengan temuan Noor et al. (2022) yang menyatakan bahwa

penerapan sistem pengelolaan tanaman terpadu dan penggunaan varietas adaptif pada lahan rawa pasang surut dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 30%.

Perkembangan produksi jagung di Kabupaten Barito Kuala juga memperlihatkan dinamika yang menarik. Produksi jagung tertinggi terjadi pada tahun 2020 yang mencapai 13.243 ton dengan capaian 126,52%, jauh melampaui target yang ditetapkan. Namun, terjadi penurunan drastis pada tahun 2021 menjadi 6.996 ton dengan tingkat capaian hanya 65,13%. Produksi jagung kemudian relatif stabil pada tahun 2022 dan 2023, masing-masing sebesar 7.031,31 ton dan 7.062,04 ton dengan tingkat capaian di atas 100%. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa produksi jagung di Kabupaten Barito Kuala masih sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti perubahan iklim, serangan hama penyakit, serta minat petani yang berubah-ubah sesuai dengan insentif pasar. Hal ini sejalan dengan penelitian Wibowo et al. (2020) yang menemukan bahwa fluktuasi harga jagung berkorelasi positif dengan minat petani untuk menanam komoditas ini.

Sementara itu, produksi kacang tanah menunjukkan tren yang sangat positif dengan pertumbuhan yang konsisten dari tahun ke tahun. Dari produksi sebesar 21 ton pada tahun 2019, angka ini meningkat signifikan menjadi 108,15 ton pada tahun 2023, atau tumbuh lebih dari lima kali lipat dalam kurun waktu lima tahun. Tingkat capaian produksi kacang tanah juga konsisten berada di atas 150%, kecuali pada tahun 2022 yang sedikit menurun menjadi 99,48%. Peningkatan produksi kacang tanah yang signifikan ini mengindikasikan adanya diversifikasi tanaman oleh petani di Kabupaten Barito Kuala dan potensi pengembangan komoditas ini di masa mendatang. Fenomena ini selaras dengan temuan Saidah et al. (2023) yang menyatakan bahwa kacang tanah merupakan salah satu tanaman yang dapat beradaptasi dengan baik pada lahan marginal seperti lahan rawa, sehingga menjadi alternatif yang menjanjikan bagi petani untuk diversifikasi tanaman.

Membandingkan data lahan dengan realisasi produksi tanaman pangan, terlihat bahwa masih terdapat potensi peningkatan produktivitas lahan pertanian di Kabupaten Barito Kuala. Dengan lahan baku sawah seluas 99.443,81 hektar, produksi padi yang mencapai 317.092 ton pada tahun 2023 mengindikasikan produktivitas rata-rata sekitar 3,2 ton per hektar, yang masih di bawah potensi produktivitas padi pada lahan optimal yang dapat mencapai 5-6 ton per hektar. Hal ini mengindikasikan perlunya penerapan

teknologi pertanian yang lebih adaptif terhadap kondisi spesifik lahan di Kabupaten Barito Kuala. Menurut Syahri dan Somantri (2018), penerapan sistem jajar legowo dan penggunaan varietas unggul baru dapat meningkatkan produktivitas padi hingga 30-40% pada lahan sub-optimal.

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sektor pertanian Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi yang sangat besar dengan dukungan ketersediaan lahan yang luas. Namun, produktivitas lahan masih perlu ditingkatkan melalui inovasi teknologi dan manajemen yang lebih baik. Fluktuasi produksi tanaman pangan, khususnya padi, menunjukkan bahwa sektor pertanian masih rentan terhadap faktor eksternal seperti perubahan iklim dan serangan hama penyakit. Sementara itu, peningkatan signifikan pada produksi kacang tanah menunjukkan potensi diversifikasi tanaman yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Untuk itu, RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2029 perlu memperhatikan aspek peningkatan produktivitas lahan, penerapan teknologi adaptif, diversifikasi tanaman, serta penguatan ketahanan petani terhadap perubahan iklim sebagai strategi utama dalam pengembangan sektor pertanian.

Produktivitas pertanian per hektar per tahun menunjukkan nilai 3,55 ton yang dihitung dari total produksi sebesar 354.674 ton pada luas lahan 99.831 hektar, mengindikasikan tingkat produktivitas yang cukup baik dan mencerminkan efektivitas sistem pertanian yang telah diimplementasikan di kabupaten. Capaian produktivitas ini menunjukkan bahwa sektor pertanian telah mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan pertanian yang tersedia melalui penerapan teknologi pertanian yang tepat, penggunaan varietas unggul, manajemen pemupukan yang baik, sistem irigasi yang memadai, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan kepada petani, sehingga menghasilkan output produksi yang signifikan per satuan luas lahan yang dikelola.

Namun demikian, persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular menunjukkan hasil yang mengkhawatirkan dengan nilai -0,20%, dimana terjadi peningkatan kasus dari 1.002 menjadi 1.004 kasus, mengindikasikan adanya tren peningkatan penyakit hewan menular yang memerlukan perhatian serius dan intervensi yang lebih intensif. Kondisi ini menunjukkan tantangan dalam sistem kesehatan hewan yang dapat berdampak negatif terhadap produktivitas peternakan, kesejahteraan peternak, ketahanan pangan asal hewan, serta potensi risiko zoonosis yang dapat

mengancam kesehatan masyarakat, sehingga memerlukan penguatan program pencegahan, surveillance penyakit, peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan hewan, dan edukasi kepada peternak mengenai biosecurity dan manajemen kesehatan ternak yang baik.

Gambar II.45
Indikator Kinerja Pertanian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pertanian	Pembilang	Penyebut	Capaian	Status
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	354.674 ton	99.831 ha	3,55 ton/ha	BAIK
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	1.002 kasus	1.004 kasus	-0,20%	KRITIS

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Produktivitas pertanian yang mencapai 3,55 ton per hektar menunjukkan potensi besar sektor pertanian dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan berkontribusi terhadap perekonomian lokal, namun masih memerlukan upaya berkelanjutan untuk terus meningkatkan produktivitas melalui inovasi teknologi, pengembangan infrastruktur pertanian, penguatan akses petani terhadap sarana produksi berkualitas, dan implementasi sistem pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan. Di sisi lain, peningkatan kasus penyakit hewan menular menjadi alarm penting yang menuntut segera diperbaikinya sistem kesehatan hewan melalui penguatan laboratorium diagnostik, peningkatan program vaksinasi, implementasi sistem pelaporan penyakit yang efektif, pelatihan tenaga kesehatan hewan, dan pengembangan sistem early warning untuk mencegah penyebaran penyakit yang lebih luas serta melindungi industri peternakan dari kerugian ekonomi yang lebih besar.

2.4.5.3.2 Peternakan

Sektor peternakan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan dinamika yang sangat menarik dan unik dalam perkembangannya selama periode 2019-2023. Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala, terjadi fluktuasi dan pola perkembangan yang bervariasi pada populasi berbagai jenis ternak di wilayah ini. Analisis terhadap data tersebut memberikan gambaran komprehensif tentang kondisi dan arah pengembangan sektor peternakan sebagai salah satu penopang ekonomi daerah.

Populasi sapi perah di Kabupaten Barito Kuala mengalami penurunan signifikan dari 183 ekor pada tahun 2019 menjadi 101 ekor pada tahun 2020, atau turun sebesar 44,8%. Penurunan tajam ini dipengaruhi oleh kondisi pandemi COVID-19 yang menyebabkan terhambatnya distribusi dan pemasaran produk susu, sehingga berdampak pada minat peternak untuk memelihara sapi perah. Namun, tren positif mulai terlihat pada tahun-tahun berikutnya dengan peningkatan populasi menjadi 121 ekor pada tahun 2021, 145 ekor pada tahun 2022, dan 174 ekor pada tahun 2023. Meskipun menunjukkan tren pemulihan, populasi sapi perah pada tahun 2023 masih belum mencapai jumlah pada tahun 2019. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Haryanto et al. (2021) yang mengungkapkan bahwa usaha peternakan sapi perah di Indonesia, khususnya di luar Pulau Jawa, masih menghadapi tantangan dalam hal adaptasi ternak, penguasaan teknologi pengolahan susu, dan sistem pemasaran yang belum efisien.

Perkembangan populasi sapi potong menunjukkan peningkatan yang sangat dramatis dari 16.556 ekor pada tahun 2019 menjadi 148.026 ekor pada tahun 2020, atau meningkat hampir 9 kali lipat. Lonjakan yang sangat signifikan ini perlu dicermati secara kritis, karena terdapat perubahan metode pencatatan atau adanya program pengembangan sapi potong skala besar yang dilaksanakan pada periode tersebut. Pertumbuhan terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya dengan 165.329 ekor pada tahun 2021, 184.558 ekor pada tahun 2022, dan 205.970 ekor pada tahun 2023. Menurut penelitian Rohaeni et al. (2020), Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi besar untuk pengembangan sapi potong karena didukung oleh ketersediaan lahan yang luas dan sumber pakan yang melimpah dari limbah pertanian, khususnya jerami padi.

Populasi kerbau juga mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 131 ekor pada tahun 2019 menjadi 19.674 ekor pada tahun 2020. Seperti halnya pada sapi potong, lonjakan populasi kerbau yang sangat drastis ini disebabkan oleh perubahan metode pencatatan atau program pengembangan ternak kerbau yang intensif. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan populasi kerbau relatif stabil dengan 20.085 ekor pada tahun 2021, 20.504 ekor pada tahun 2022, dan 20.932 ekor pada tahun 2023, atau tumbuh rata-rata sekitar 2% per tahun. Menurut Hamdan et al. (2022), kerbau memiliki keunggulan adaptasi yang baik pada lahan basah seperti yang banyak ditemukan di

Kabupaten Barito Kuala, sehingga berpotensi untuk dikembangkan sebagai ternak alternatif penghasil daging selain sapi potong.

Pola yang berbeda terlihat pada populasi kuda, di mana terjadi penurunan drastis dari 75.224 ekor pada tahun 2019 menjadi hanya 118 ekor pada tahun 2020. Penurunan yang sangat tajam ini disebabkan oleh perubahan metode pendataan atau definisi kategori yang digunakan dalam pencatatan. Pada tahun-tahun berikutnya, populasi kuda relatif stabil dengan sedikit peningkatan menjadi 121 ekor pada tahun 2021, 124 ekor pada tahun 2022, dan 127 ekor pada tahun 2023. Populasi kuda yang relatif kecil dan tidak menunjukkan pertumbuhan signifikan mengindikasikan bahwa ternak ini bukan menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini dapat dipahami mengingat peran kuda sebagai alat transportasi dan tenaga kerja sudah banyak digantikan oleh teknologi mekanis, sehingga pemeliharaannya lebih bersifat hobi atau untuk kepentingan tertentu seperti olah raga berkuda atau atraksi wisata sebagaimana diungkapkan dalam penelitian Saputra et al. (2019).

Populasi kambing mengalami peningkatan yang sangat pesat dari 1.858 ekor pada tahun 2019 menjadi 78.697 ekor pada tahun 2020. Seperti halnya pada beberapa jenis ternak lainnya, lonjakan populasi yang sangat signifikan ini disebabkan oleh perubahan metode pendataan. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan populasi kambing cukup stabil dengan 80.298 ekor pada tahun 2021, 81.927 ekor pada tahun 2022, dan 83.582 ekor pada tahun 2023, atau tumbuh rata-rata sekitar 2% per tahun. Kambing merupakan salah satu ternak yang populer di kalangan masyarakat pedesaan karena mudah dalam pemeliharaan dan tidak memerlukan modal besar. Selain itu, perkembangbiakan kambing yang relatif cepat dengan kelahiran yang seringkali kembar menjadikannya sebagai salah satu pilihan usaha peternakan yang menjanjikan. Menurut Khalil et al. (2022), pengembangan ternak kambing di kawasan rawa seperti di Kabupaten Barito Kuala memiliki prospek yang baik karena didukung oleh ketersediaan pakan dari vegetasi alami dan limbah pertanian yang melimpah.

Populasi domba mengalami peningkatan dari 4.853 ekor pada tahun 2019 menjadi 5.115 ekor pada tahun 2020, namun kemudian turun menjadi 1.984 ekor pada tahun 2021. Setelah itu, populasi domba kembali meningkat menjadi 2.103 ekor pada tahun 2021, 2.229 ekor pada tahun 2022, dan 2.361 ekor pada tahun 2023. Penurunan populasi domba yang signifikan pada tahun 2021 terkait dengan dampak pandemi

COVID-19 yang menyebabkan penurunan permintaan pasar dan kesulitan dalam pemasaran. Populasi domba yang relatif kecil dibandingkan dengan kambing menunjukkan bahwa ternak ini belum menjadi prioritas pengembangan di Kabupaten Barito Kuala. Menurut Martawijaya dan Nurjana (2019), domba memiliki kebutuhan pakan dan perawatan yang lebih khusus dibandingkan dengan kambing, sehingga peternak di daerah dengan keterbatasan teknologi dan pengetahuan lebih memilih untuk memelihara kambing.

Populasi babi menunjukkan fluktuasi yang menarik, dari 101 ekor pada tahun 2019 meningkat signifikan menjadi 4.853 ekor pada tahun 2020, kemudian terus bertambah menjadi 5.309 ekor pada tahun 2021, 5.510 ekor pada tahun 2022, dan 5.719 ekor pada tahun 2023. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perkembangan usaha peternakan babi di Kabupaten Barito Kuala, meskipun dalam skala yang relatif terbatas. Pengembangan ternak babi di daerah ini didorong oleh keberadaan komunitas yang mengonsumsi daging babi, seperti masyarakat Dayak dan etnis Tionghoa. Menurut penelitian Warouw et al. (2021), peternakan babi memiliki prospek ekonomi yang baik karena permintaan pasar yang stabil dan harga jual yang relatif menguntungkan.

Melihat pola perkembangan populasi ternak selama periode 2019-2023, terlihat adanya anomali data yang signifikan, khususnya pada perubahan antara tahun 2019 dan 2020 untuk beberapa jenis ternak. Fenomena ini perlu mendapat perhatian dalam interpretasi data dan perencanaan kebijakan pengembangan peternakan di masa mendatang. Menurut Darmawan et al. (2022), konsistensi dan akurasi dalam pencatatan data peternakan menjadi faktor krusial untuk perencanaan dan evaluasi program pengembangan sektor peternakan yang efektif.

Dari analisis data populasi ternak di Kabupaten Barito Kuala, terlihat bahwa sapi potong merupakan komoditas utama yang menjadi fokus pengembangan, diikuti oleh kambing dan kerbau. Hal ini sejalan dengan potensi wilayah yang memiliki lahan yang luas dan sumber pakan yang melimpah dari limbah pertanian, khususnya jerami padi. Menurut Subhan et al. (2020), integrasi antara usaha peternakan dan pertanian melalui pemanfaatan limbah pertanian sebagai pakan ternak dan kotoran ternak sebagai pupuk organik dapat meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan kedua sektor tersebut.

Berdasarkan data dan analisis yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa sektor peternakan di Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, dengan fokus utama pada sapi potong, kambing, dan kerbau. Meskipun data menunjukkan peningkatan populasi yang signifikan, namun perlu dicermati adanya ketidakkonsistenan atau anomali dalam pencatatan data, khususnya pada transisi tahun 2019-2020. Untuk pengembangan sektor peternakan ke depan, RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2029 perlu memperhatikan aspek peningkatan kualitas data, pengembangan infrastruktur pendukung peternakan, peningkatan kapasitas peternak, dan integrasi antara usaha peternakan dengan sektor pertanian untuk mengoptimalkan potensi peternakan sebagai penopang ekonomi daerah.

2.4.5.4 Perdagangan

Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan mencapai 72,97% dengan 27 dari 37 pelaku usaha telah memperoleh Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Pusat Perbelanjaan, Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS), atau SIUP Toko Swalayan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menunjukkan tingkat kepatuhan yang cukup baik dalam aspek perizinan usaha perdagangan namun masih memerlukan upaya intensif untuk 10 pelaku usaha yang belum memiliki izin yang sesuai. Capaian ini mengindikasikan bahwa sistem perizinan usaha perdagangan telah berjalan dengan cukup efektif, namun masih diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya kepemilikan izin usaha, penyederhanaan prosedur perizinan, dan pendampingan teknis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap regulasi perdagangan yang berlaku.

Sementara itu, persentase kinerja realisasi pupuk menunjukkan capaian yang masih rendah yaitu 41,50% dengan realisasi distribusi sebesar 13.894,45 ton dari kebutuhan total 33.476,64 ton, mengindikasikan adanya tantangan serius dalam sistem distribusi pupuk yang dapat berdampak pada produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan daerah. Kondisi ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti keterbatasan pasokan dari pusat, masalah logistik dan distribusi, koordinasi antar lembaga yang belum optimal, atau kendala administrasi dalam pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi, sehingga memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap

sistem distribusi pupuk untuk memastikan ketersediaan pupuk yang memadai bagi petani sesuai dengan kebutuhan dan jadwal tanam yang tepat.

Gambar II.46
Indikator Kinerja Perdagangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Perdagangan	Terlayani	Target/Total	Capaian	Status
PERIZINAN DAN REGULASI USAHA					
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	27	37	72,97%	BAIK
DISTRIBUSI SARANA PRODUKSI PERTANIAN					
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	13.894,45 ton	33.476,64 ton	41,50%	KRITIS
STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					
3	Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	1.393	1.393	100%	PERFECT

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Di sisi lain, persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku mencapai capaian sempurna 100% dengan seluruh 1.393 unit UTTP telah memiliki tanda tera sah yang berlaku, menunjukkan sistem pengawasan dan kalibrasi alat ukur perdagangan yang sangat baik dan memberikan perlindungan optimal kepada konsumen dari praktik perdagangan yang merugikan. Pencapaian ini mencerminkan komitmen yang kuat dalam penegakan standarisasi dan perlindungan konsumen, serta efektivitas program tera dan tera ulang yang dilaksanakan secara konsisten untuk memastikan akurasi alat ukur yang digunakan dalam transaksi perdagangan, menciptakan kepercayaan publik terhadap sistem perdagangan yang fair dan transparan, serta mencegah kerugian konsumen akibat penggunaan alat ukur yang tidak akurat atau telah melampaui masa berlaku sertifikasinya.

2.4.5.5 Perindustrian

Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota menunjukkan capaian 6,99% dengan peningkatan dari 1.859 menjadi 1.989 unit industri, mengindikasikan adanya dinamika pertumbuhan sektor industri yang positif namun masih memerlukan percepatan dan intensifikasi program pengembangan untuk mencapai target yang lebih optimal. Pertumbuhan ini mencerminkan respons pelaku usaha terhadap peluang ekonomi yang tersedia, namun juga menunjukkan perlunya penguatan ekosistem industri melalui perbaikan infrastruktur pendukung, kemudahan akses pembiayaan, penyederhanaan regulasi dan perizinan, pengembangan kawasan industri yang terintegrasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia industri untuk mendorong daya saing dan keberlanjutan usaha industri kecil dan menengah yang pada akhirnya akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan penyerapan tenaga kerja.

Pencapaian sasaran pembangunan industri dalam kerangka RIPIN (Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional) mencapai 72,30% yang menunjukkan progress yang cukup baik dalam implementasi strategi pembangunan industri nasional di tingkat daerah, mengindikasikan adanya sinkronisasi yang efektif antara program pembangunan industri daerah dengan arah kebijakan industri nasional. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mengintegrasikan visi pembangunan industri nasional ke dalam konteks lokal, namun masih memerlukan upaya maksimal untuk mencapai target penuh melalui optimalisasi potensi sumber daya lokal, pengembangan klaster industri unggulan daerah, penguatan rantai pasok industri, peningkatan kualitas produk industri lokal, serta pengembangan teknologi dan inovasi industri yang dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk industri daerah di pasar domestik maupun ekspor.

Pemantauan dan pengawasan Izin Usaha Industri (IUI) mencapai capaian sempurna 100% dengan 12 dari 12 izin yang dikeluarkan telah dipantau dan diawasi dengan baik, menunjukkan efektivitas sistem pengawasan dan kepatuhan industri terhadap regulasi yang berlaku serta komitmen pemerintah daerah dalam memastikan operasional industri berjalan sesuai standar yang ditetapkan. Pencapaian ini mencerminkan profesionalisme aparatur dalam melaksanakan fungsi pengawasan, ketersediaan sistem informasi yang memadai, serta kesadaran tinggi pelaku industri

dalam mematuhi ketentuan perizinan, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap terciptanya iklim industri yang tertib, aman, dan berkelanjutan serta memberikan jaminan kepastian hukum bagi investor dan pelaku usaha industri.

Pemantauan Izin Perluasan Industri (IPIU) dan Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) menunjukkan capaian 0% karena pada tahun 2024 tidak ada penerbitan izin perluasan industri maupun izin kawasan industri baru, yang dapat mengindikasikan beberapa hal antara lain belum adanya permintaan perluasan dari industri existing, belum berkembangnya konsep kawasan industri di daerah, atau masih terbatasnya investor yang tertarik mengembangkan kawasan industri. Kondisi ini memberikan peluang sekaligus tantangan bagi pemerintah daerah untuk lebih proaktif dalam mempromosikan potensi investasi industri, mengembangkan master plan kawasan industri yang menarik, menyediakan insentif investasi yang kompetitif, serta melakukan road show dan marketing investasi untuk menarik minat investor mengembangkan kawasan industri yang dapat menjadi cluster pengembangan industri yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Gambar II.47
Indikator Kinerja Perindustrian Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Perindustrian	Pembilang	Penyebut	Capaian	Status	Keterangan
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	1.989	1.859	6,99%	RENDAH	-
2	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	-	-	72,30%	BAIK	-
3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	12	12	100%	SANGAT BAIK	-
4	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	1	0%	TIDAK ADA	Pada Tahun 2024 Tidak ada menerbitkan IPIU
5	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/kota	0	1	0%	TIDAK ADA	Pada tahun 2024 tidak ada menerbitkan IUKI dan IPKI
6	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	-	-	125%	LUAR BIASA	-

Sumber: LPPD Kab. Barito Kuala (Diolah)

Ketersediaan informasi industri secara lengkap dan terkini mencapai capaian luar biasa 125% yang melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan komitmen sangat tinggi pemerintah daerah dalam menyediakan data dan informasi industri yang akurat, komprehensif, dan mudah diakses oleh stakeholders industri. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan implementasi sistem informasi industri yang modern, pemutakhiran data yang berkala, transparansi informasi publik, serta pemanfaatan

teknologi informasi yang optimal untuk mendukung pengambilan keputusan strategis dalam pengembangan sektor industri, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya tarik investasi, memudahkan akses informasi bagi pelaku usaha, mendukung riset dan pengembangan industri, serta memperkuat basis data untuk perencanaan dan evaluasi kebijakan industri yang lebih efektif dan responsif terhadap dinamika perkembangan sektor industri.

2.5 Gambaran Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah memainkan peran krusial dalam mencapai tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sejalan dengan otonomi daerah yang diatur dalam Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan sendiri, termasuk dalam pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah hadir sebagai penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya, yaitu UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009. Regulasi ini bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien, transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna mewujudkan pemerataan layanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka hukum tersebut, analisis kondisi keuangan Kabupaten Barito Kuala menjadi penting untuk menilai efektivitas implementasi kebijakan keuangan daerah. Analisis yang akan disajikan dalam gambaran keuangan daerah ini akan berfokus pada aspek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, seperti usaha untuk meminimalkan ketimpangan, pengembangan sistem pajak daerah, peningkatan kualitas belanja, dan harmonisasi belanja pusat dan daerah. Nantinya, hasil analisis dalam paparan ini akan dijadikan dasar proyeksi keuangan Kabupaten Barito Kuala untuk lima tahun ke depan.

2.5.1 Realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Pengelolaan keuangan daerah memegang peranan krusial dalam mencapai tujuan negara, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks desentralisasi yang diatur oleh Pasal 18 UUD 1945, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan secara mandiri, termasuk dalam aspek keuangan. Keberadaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan bentuk penyempurnaan dari regulasi sebelumnya, yaitu UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009. Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan alokasi sumber daya nasional yang lebih optimal, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, transparansi, akuntabilitas, serta keadilan, guna meningkatkan pemerataan layanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam kerangka regulasi tersebut, evaluasi terhadap kondisi keuangan Kabupaten Barito Kuala menjadi aspek penting dalam menilai sejauh mana kebijakan keuangan daerah telah diimplementasikan secara efektif. Kajian yang disajikan dalam analisis keuangan daerah ini akan berfokus pada komponen pendapatan, belanja, dan pembiayaan, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip utama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. Beberapa aspek yang menjadi perhatian dalam analisis ini mencakup upaya mengurangi kesenjangan fiskal, optimalisasi sistem perpajakan daerah, peningkatan efisiensi belanja, serta sinergi antara anggaran pusat dan daerah. Hasil kajian ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar dalam menyusun proyeksi keuangan Kabupaten Barito Kuala untuk periode lima tahun mendatang.

2.5.1.1 Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2020-2024

Kajian komprehensif terhadap pendapatan daerah merupakan elemen fundamental dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2025-2029. Analisis terhadap kinerja pendapatan selama periode 2020-2024 memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan fiskal dan penetapan target pendapatan yang realistis untuk lima tahun mendatang. Perlu dicatat bahwa data pendapatan tahun 2023-2024 masih dalam proses audit BPK, namun data tersebut tetap valid digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029.

Secara keseluruhan, pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren positif dengan pola yang fluktuatif. Pada tahun 2020, total pendapatan daerah tercatat sebesar 1,37 triliun rupiah, mengalami penurunan pada tahun 2021 menjadi 1,28 triliun rupiah (turun 6,43%), kemudian meningkat signifikan pada tahun 2022

menjadi 1,56 triliun rupiah (naik 21,33%), sedikit menurun pada tahun 2023 menjadi 1,52 triliun rupiah (turun 2,59%), dan kembali meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 1,91 triliun rupiah (naik 26,35%). Selama periode lima tahun tersebut, pendapatan daerah tumbuh sebesar 39,73%, yang mencerminkan penguatan kapasitas fiskal daerah.

Tabel II-59
Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
PENDAPATAN DAERAH	1,370,250,332,279	1,282,148,034,284	1,555,596,865,379	1,515,290,178,092	1,914,583,000,660
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	74,329,113,456	108,665,931,217	71,267,378,346	96,697,258,713	112,617,357,440
Pajak Daerah	23,083,486,102	31,287,210,786	25,308,005,563	28,953,674,232	30,822,327,264
Retribusi Daerah	3,889,140,784	4,181,235,664	3,972,799,353	3,648,113,310	2,977,143,727
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,397,613,132	8,156,591,369	10,122,349,618	11,892,720,398	11,516,297,184
Lain-lain PAD yang Sah	40,958,873,438	65,040,893,398	31,864,223,812	52,202,750,773	67,301,589,265
PENDAPATAN TRANSFER	1,080,694,829,150	1,125,334,277,456	1,472,019,365,547	1,418,503,284,379	1,801,965,643,220
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,010,004,637,600	1,058,065,420,054	1,355,313,555,710	1,285,888,373,850	1,658,977,093,232
Pendapatan Transfer Antar Daerah	70,690,191,550	67,268,857,402	116,705,809,837	132,614,910,529	142,988,549,988
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	215,226,389,673	48,147,825,611	12,310,121,486	89,635,000	0

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

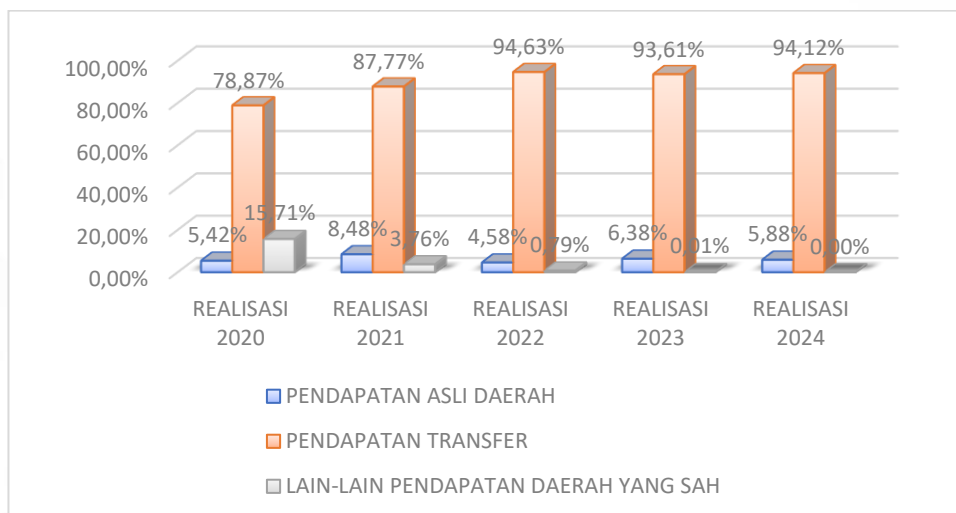
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kinerja yang berfluktuasi namun dengan tren meningkat di akhir periode analisis. Pada tahun 2020, PAD tercatat sebesar 74,33 miliar rupiah, meningkat signifikan pada tahun 2021 menjadi 108,67 miliar rupiah (naik 46,20%), turun drastis pada tahun 2022 menjadi

71,27 miliar rupiah (turun 34,41%), kemudian meningkat kembali pada tahun 2023 menjadi 96,70 miliar rupiah (naik 35,68%), dan tumbuh pada tahun 2024 menjadi 112,62 miliar rupiah (naik 16,46%). Secara keseluruhan, PAD meningkat sebesar 51,51% selama periode 2020-2024.

Komponen PAD menunjukkan dinamika yang bervariasi. Pajak daerah tumbuh cukup stabil dari 23,08 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 30,82 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 33,52%). Retribusi daerah justru menunjukkan tren menurun, dari 3,89 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 2,98 miliar rupiah pada tahun 2024 (turun 23,45%), yang mengindikasikan pergeseran fokus dari instrumen retribusi ke instrumen pajak daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menunjukkan peningkatan yang konsisten dan signifikan, dari 6,40 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 11,52 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 80,01%), mencerminkan perbaikan tata kelola aset daerah. Komponen lain-lain PAD yang sah menunjukkan fluktuasi paling dinamis, dengan nilai tertinggi pada tahun 2024 sebesar 67,30 miliar rupiah, meningkat 64,31% dari nilai tahun 2020 sebesar 40,96 miliar rupiah.

Pendapatan transfer tetap menjadi sumber utama pendapatan daerah dengan proporsi rata-rata 89,52% dari total pendapatan selama periode 2020-2024. Tren pendapatan transfer menunjukkan peningkatan signifikan dari 1,08 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 1,80 triliun rupiah pada tahun 2024 (naik 66,74%). Pendapatan transfer dari pemerintah pusat mendominasi dengan proporsi 92,06% dari total pendapatan transfer pada tahun 2024. Komponen ini meningkat dari 1,01 triliun rupiah pada tahun 2020 menjadi 1,66 triliun rupiah pada tahun 2024 (naik 64,25%). Pendapatan transfer antar daerah juga menunjukkan peningkatan signifikan, dari 70,69 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 142,99 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 102,27%). Peningkatan ini mencerminkan penguatan koordinasi fiskal antar daerah dan implementasi skema bagi hasil pajak yang lebih optimal.

Tabel II-60
Komposisi Pendapatan Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami penurunan drastis, dari 215,23 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi nol pada tahun 2024. Penurunan signifikan terjadi pada tahun 2021 menjadi 48,15 miliar rupiah (turun 77,64%), kemudian terus menurun hingga mencapai 89,64 juta rupiah pada tahun 2023, dan akhirnya tidak ada realisasi pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan pergeseran struktur pendapatan daerah dan konsolidasi sumber-sumber pendapatan ke dalam kategori yang lebih terstruktur.

Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdampak signifikan pada struktur pendapatan Kabupaten Barito Kuala. Sesuai dengan prinsip money follows function yang diamanatkan dalam UU tersebut, terjadi peningkatan alokasi transfer dari pemerintah pusat yang signifikan pada tahun 2022-2024. Kebijakan ini berkontribusi pada penguatan kapasitas fiskal daerah untuk mendanai kewajiban pelayanan publik yang menjadi kewenangannya. Proportional sharing principle yang menjadi salah satu fondasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tercermin dalam peningkatan pendapatan transfer antar daerah sebesar 102,27% selama periode 2020-2024. Peningkatan ini menunjukkan implementasi mekanisme perimbangan fiskal horizontal yang lebih adil dan proporsional sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan fiskal masing-masing daerah.

Penguatan kemandirian fiskal menjadi amanat utama UU Nomor 1 Tahun 2022. Rasio kemandirian fiskal Kabupaten Barito Kuala (PAD terhadap total pendapatan)

menunjukkan fluktuasi antara 4,58% pada tahun 2022 hingga 8,48% pada tahun 2021, dengan rata-rata 6,23% selama periode 2020-2024. Meskipun terjadi peningkatan PAD sebesar 51,51% selama lima tahun, rasio kemandirian fiskal masih relatif rendah dan belum mencapai threshold 10% yang secara umum menjadi indikator kemandirian fiskal minimal untuk daerah kabupaten/kota. Elastisitas PAD terhadap PDRB di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan nilai 0,83 selama periode 2020-2024, yang berarti pertumbuhan PAD belum sepenuhnya elastis terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kondisi ini mengindikasikan masih adanya potensi PAD yang belum dioptimalkan, khususnya dari sektor pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah.

Berdasarkan teori *tax effort* yang dikembangkan oleh Bahl (1999), rasio upaya pajak Kabupaten Barito Kuala masih berada pada level 0,35 pada tahun 2024, yang menunjukkan bahwa hanya sekitar 35% dari potensi pajak daerah yang berhasil direalisasikan. Angka ini masih di bawah rekomendasi minimal 0,5 untuk daerah setingkat Kabupaten Barito Kuala. Struktur ekonomi Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh sektor pertanian (38,2% dari PDRB) dan sektor pertambangan (17,5% dari PDRB) belum optimal memberikan kontribusi terhadap PAD. Merujuk pada konsep *tax compliance* yang dikemukakan oleh Bird dan Zolt (2003), tingkat kepatuhan wajib pajak daerah di Kabupaten Barito Kuala masih perlu ditingkatkan. Peningkatan pajak daerah sebesar 33,52% selama periode 2020-2024 mengindikasikan adanya perbaikan dalam administrasi perpajakan daerah, namun belum mencapai level optimal mengingat pertumbuhan ekonomi daerah yang mencapai 42,7% pada periode yang sama.

Sesuai dengan teori *fiscal space* yang dikembangkan oleh Ter-Minassian (2007), Kabupaten Barito Kuala masih memiliki ruang fiskal yang cukup besar untuk meningkatkan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah, optimalisasi hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta pengembangan sumber-sumber PAD yang inovatif. Dalam konteks Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, daerah diberi kewenangan yang lebih luas untuk mengembangkan sumber pendapatan daerah sesuai dengan karakteristik dan potensi daerah. Pola pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 menunjukkan adanya dampak implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022, terutama dalam hal konsolidasi kategori pendapatan dan penguatan mekanisme transfer dari pemerintah pusat. Eliminasi lain-lain pendapatan

daerah yang sah pada tahun 2024 mengindikasikan implementasi prinsip simplifikasi dan transparansi dalam struktur pendapatan daerah.

Berdasarkan perspektif administrasi pendapatan (*revenue administration*) yang dikemukakan oleh Tanzi dan Zee (2000), peningkatan PAD Kabupaten Barito Kuala sebesar 51,51% selama periode 2020-2024 menunjukkan perbaikan dalam pengelolaan pendapatan daerah. Namun, efektivitas administrasi pendapatan masih perlu ditingkatkan untuk mencapai rasio kemandirian fiskal yang lebih tinggi, khususnya dalam hal pemungutan pajak daerah dan optimalisasi aset daerah. Secara keseluruhan, pendapatan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 39,73% selama periode 2020-2024. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka regulasi yang lebih kondusif bagi penguatan kapasitas fiskal daerah, meskipun tantangan struktural dalam meningkatkan kemandirian fiskal masih perlu diatasi melalui strategi optimalisasi PAD yang lebih komprehensif.

2.5.1.2 Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2025-2029 memerlukan tinjauan mendalam terhadap pola belanja daerah sebagai cerminan prioritas dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Tinjauan historis belanja periode 2020-2024 tidak hanya menggambarkan tren pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga memberikan dasar proyeksi kebutuhan pendanaan untuk periode mendatang. Perlu diperhatikan bahwa data belanja tahun 2023-2024 masih dalam proses audit BPK, namun tetap relevan digunakan sebagai dasar penyusunan RPJMD 2025-2029.

Tabel II-61
Realisasi Belanja Kab. Barito Kuala Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
BELANJA DAERAH	1,142,262,649,467	1,053,496,999,418	1,146,523,917,482	1,573,891,760,176.70	1,940,204,661,632.07
BELANJA OPERASI	816,873,282,405	843,812,010,430	888,867,164,769	1,015,120,146,041.70	1,249,822,757,265.07
Belanja Pegawai	527,926,981,212	548,249,586,956	574,100,367,017	596,782,679,514.50	721,592,920,258.80
Belanja Barang dan Jasa	265,084,105,303	270,534,405,599	286,652,897,535	355,960,967,093.20	448,377,642,261.27
Bunga	-	-	-	-	-
Subsidi	260,604,000	260,604,000	-	-	-
Hibah	18,450,847,545	24,761,417,513	27,373,143,217	58,063,419,640.00	78,535,761,402.00
Bantuan Sosial	5,411,348,345	266,600,362	480,153,000	4,313,079,794.00	1,316,433,343.00
BELANJA MODAL	259,215,296,089	207,541,135,163	257,427,302,713	319,186,705,819.00	409,635,608,917.00
Belanja Tanah	4,207,291,190	1,205,607,320	652,029,000	1,764,136,373.00	8,641,969,686.00

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Belanja Peralatan dan Mesin	40,532,808,300	36,421,982,127	38,321,929,214	61,525,365,971.00	45,482,320,204.00
Belanja Gedung dan Bangunan	61,687,810,713	54,353,001,995	76,946,504,194	101,408,251,207.00	142,482,443,020.00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	150,453,449,063	112,777,647,483	141,009,883,555	151,926,623,257.00	208,499,077,592.00
Belanja Aset Tetap Lainnya	1,372,462,323	2,782,896,238	496,956,750	2,468,709,011.00	423,108,025.00
Belanja Aset Lainnya	-	-	-	93,620,000.00	4,106,690,390.00
BELANJA TIDAK TERDUGA	66,174,070,973	2,143,853,825	229,450,000	1,546,266,050.00	360,250,000.00
BELANJA TRANSFER	225,387,213,346	220,010,651,450	226,024,656,055	238,038,642,266.00	280,386,045,450.00
Bagi Hasil ke Desa	2,607,060,646	3,448,829,250	2,805,024,230	2,928,080,492.00	3,260,178,705.00
Bantuan Keuangan	222,780,152,700	216,561,822,200	223,219,631,825	235,110,561,774.00	277,125,866,745.00
TOTAL BELANJA	1,367,649,862,813	1,273,507,650,868	1,372,548,573,537	1,573,891,760,176.70	1,940,204,661,632.07
SURPLUS/DEFISIT	2,600,469,466	8,640,383,416	183,048,291,842	-58,601,582,084.82	-25,621,660,971.96

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Tren belanja daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2020-2024 menunjukkan pola ekspansif dengan fluktuasi di tahun-tahun tertentu. Total belanja mengalami kontraksi pada tahun 2021 menjadi 1,27 triliun rupiah dari sebelumnya 1,37 triliun rupiah pada tahun 2020 (turun 6,88%), kemudian secara bertahap meningkat hingga mencapai 1,94 triliun rupiah pada tahun 2024. Secara keseluruhan, belanja daerah tumbuh 41,86% selama lima tahun tersebut, dengan akselerasi pertumbuhan terjadi pada tahun 2023-2024 yang mencapai rata-rata 20,23% per tahun.

Komposisi belanja didominasi oleh belanja operasi yang konsisten menyerap lebih dari 60% total anggaran. Proporsi belanja operasi terhadap total belanja menunjukkan tren fluktuatif dari 59,73% pada tahun 2020 menjadi 64,42% pada tahun 2024. Pergeseran alokasi ini sejalan dengan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik yang memerlukan dukungan operasional yang memadai, terutama dalam implementasi program-program prioritas daerah.

Dinamika belanja pegawai sebagai komponen terbesar belanja operasi menunjukkan pola pertumbuhan moderat pada tahun 2020-2023 dengan rata-rata 4,21% per tahun, namun melonjak signifikan pada tahun 2024 menjadi 721,59 miliar rupiah (naik 20,91% dari tahun sebelumnya). Selama periode lima tahun, belanja pegawai tumbuh 36,68%. Lonjakan pada tahun 2024 mengindikasikan adanya

penyesuaian kebijakan kepegawaian, termasuk implementasi struktur remunerasi baru dan pemenuhan kebutuhan aparatur untuk program pembangunan prioritas.

Belanja barang dan jasa menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dan signifikan, dari 265,08 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 448,38 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 69,15%). Peningkatan ini mencerminkan perluasan cakupan layanan publik dan peningkatan standar kualitas pelayanan sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menekankan orientasi belanja pada pemenuhan standar pelayanan minimal.

Belanja hibah dan bantuan sosial mengalami fluktuasi yang signifikan selama periode 2020-2024. Belanja hibah meningkat hampir empat kali lipat dari 18,45 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 78,54 miliar rupiah pada tahun 2024. Sebaliknya, belanja bantuan sosial menunjukkan volatilitas yang tinggi, mencapai titik terendah pada tahun 2021 (266,60 juta rupiah) dan tertinggi pada tahun 2023 (4,31 miliar rupiah). Pola ini menunjukkan respons kebijakan fiskal terhadap dinamika kebutuhan sosial-ekonomi masyarakat, terutama dalam konteks pemulihan pasca-pandemi dan pengentasan kemiskinan.

Analisis terhadap belanja modal menunjukkan pola yang cukup menarik. Terjadi kontraksi belanja modal pada tahun 2021 menjadi 207,54 miliar rupiah (turun 19,93% dari tahun sebelumnya), kemudian meningkat konsisten hingga mencapai 409,64 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 58,07% dari tahun 2020). Proporsi belanja modal terhadap total belanja sempat menurun menjadi 16,30% pada tahun 2021, kemudian meningkat kembali menjadi 21,11% pada tahun 2024. Meskipun terjadi peningkatan signifikan, proporsi belanja modal masih di bawah rekomendasi minimal 30% dari total belanja, sebagaimana direkomendasikan untuk daerah dengan karakteristik pembangunan seperti Kabupaten Barito Kuala.

Belanja jalan, irigasi, dan jaringan konsisten menjadi komponen terbesar dalam struktur belanja modal dengan proporsi rata-rata 58,16% dari total belanja modal selama periode 2020-2024. Alokasi untuk infrastruktur dasar ini meningkat dari 150,45 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 208,50 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 38,58%). Peningkatan ini mencerminkan prioritas pembangunan infrastruktur dasar untuk mendukung aktivitas ekonomi dan pemerataan akses pelayanan publik. Belanja

gedung dan bangunan juga menunjukkan peningkatan signifikan dari 61,69 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 142,48 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 130,96%). Akselerasi belanja infrastruktur pemerintahan ini mendukung peningkatan kapasitas institusi untuk memberikan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Proporsi belanja gedung dan bangunan terhadap total belanja modal meningkat dari 23,80% pada tahun 2020 menjadi 34,78% pada tahun 2024.

Fluktuasi belanja tidak terduga sangat signifikan selama periode 2020-2024. Puncak alokasi terjadi pada tahun 2020 sebesar 66,17 miliar rupiah (4,84% dari total belanja), yang terkait dengan penanganan pandemi COVID-19. Pada tahun-tahun berikutnya, belanja tidak terduga menurun drastis menjadi hanya 360,25 juta rupiah (0,02% dari total belanja) pada tahun 2024. Penurunan ini mengindikasikan normalisasi situasi setelah fase akut pandemi dan peralihan fokus belanja ke program-program pembangunan reguler.

Belanja transfer menunjukkan tren peningkatan dari 225,39 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi 280,39 miliar rupiah pada tahun 2024 (naik 24,40%). Komponen terbesar dari belanja transfer adalah bantuan keuangan yang didominasi oleh bantuan keuangan ke desa, sejalan dengan penguatan implementasi UU Desa. Proporsi belanja transfer terhadap total belanja menunjukkan tren menurun dari 16,48% pada tahun 2020 menjadi 14,45% pada tahun 2024, meskipun secara nominal mengalami peningkatan.

Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan dampak signifikan terhadap struktur belanja daerah Kabupaten Barito Kuala. Berdasarkan Pasal 22 UU tersebut, pemerintah daerah wajib mengalokasikan minimal 40% belanja daerah untuk infrastruktur pelayanan publik. Analisis terhadap belanja tahun 2024 menunjukkan bahwa kombinasi belanja modal (409,64 miliar rupiah) dan belanja barang dan jasa terkait infrastruktur (diperkirakan sekitar 224,19 miliar rupiah atau 50% dari total belanja barang dan jasa) mencapai 633,83 miliar rupiah atau sekitar 32,67% dari total belanja. Angka ini masih di bawah *threshold* 40% yang ditetapkan dalam UU tersebut, meskipun menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang hanya mencapai 30,28%. UU Nomor 1 Tahun 2022 juga menetapkan batasan maksimal 30% dari total belanja daerah untuk belanja pegawai. Pada tahun 2024, belanja pegawai Kabupaten Barito Kuala mencapai 721,59 miliar rupiah atau 37,19% dari total belanja, masih

melampaui batasan yang ditetapkan. Proporsi ini menunjukkan tantangan struktural dalam pengelolaan aparatur daerah yang memerlukan implementasi strategi efisiensi birokrasi dan optimalisasi kinerja aparatur.

Perimbangan fiskal vertikal dan horizontal yang menjadi semangat UU Nomor 1 Tahun 2022 tercermin dalam peningkatan belanja transfer ke desa sebesar 24,40% selama periode 2020-2024. Implementasi keadilan fiskal ini mendukung pemerataan pembangunan hingga ke tingkat desa sesuai prinsip subsidiaritas yang diamanatkan dalam UU tersebut. Posisi anggaran Kabupaten Barito Kuala mengalami pergeseran dari surplus pada tahun 2020-2022 menjadi defisit pada tahun 2023-2024. Defisit anggaran tahun 2024 sebesar 25,62 miliar rupiah (1,34% dari total pendapatan) masih dalam batas aman sesuai Pasal 12 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2022 yang menetapkan batas maksimal defisit APBD sebesar 3% dari pendapatan daerah. Kondisi ini mencerminkan strategi fiskal ekspansif untuk mendorong percepatan pembangunan daerah.

Berdasarkan kajian Mardiasmo (2018) tentang *value for money* dalam pengelolaan keuangan daerah, peningkatan belanja modal Kabupaten Barito Kuala sebesar 58,07% selama periode 2020-2024 menunjukkan upaya meningkatkan produktivitas belanja daerah. Namun, efektivitas belanja masih perlu ditingkatkan dengan memastikan adanya korelasi positif antara belanja modal dan peningkatan layanan publik serta pertumbuhan ekonomi. Mengacu pada konsep *fiscal space* yang dikemukakan oleh Heller (2005), peningkatan belanja daerah Kabupaten Barito Kuala sebesar 41,86% selama lima tahun mencerminkan perluasan ruang fiskal untuk mendanai program-program prioritas. Tantangan ke depan adalah memastikan ruang fiskal yang ada dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan. Secara keseluruhan, pola belanja Kabupaten Barito Kuala periode 2020-2024 menunjukkan transisi dari fase stabilisasi pasca-pandemi menuju fase akselerasi pembangunan. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka regulasi yang lebih kondusif bagi optimalisasi belanja untuk pencapaian sasaran pembangunan daerah, meskipun tantangan dalam pemenuhan ketentuan alokasi belanja masih perlu diatasi melalui strategi pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien dan efektif pada periode RPJMD 2025-2029.

2.5.1.3 Realisasi Pembiayaan Tahun Anggaran 2020-2024

Keberhasilan pembangunan daerah tidak terlepas dari pengelolaan pembiayaan yang efektif sebagai instrumen untuk menutup kesenjangan fiskal dan mengoptimalkan pola belanja daerah. Bagi Kabupaten Barito Kuala, strategi pembiayaan menjadi aspek vital dalam menjaga kesinambungan fiskal selama lima tahun terakhir. Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala 2025-2029 memerlukan analisis dinamika pembiayaan daerah periode 2020-2024 untuk merumuskan pendekatan yang tepat dalam pengelolaan fiskal ke depan. Data pembiayaan tahun 2023-2024 yang masih dalam proses audit BPK tetap digunakan sebagai referensi penyusunan RPJMD 2025-2029 dengan mempertimbangkan validitas substansinya.

Gambaran umum pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pola yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada paruh kedua periode analisis. Pembiayaan netto pada tahun 2020 tercatat sebesar 116,18 miliar rupiah, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022 menjadi 105,43 miliar rupiah dan 104,57 miliar rupiah. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2023 dengan nilai mencapai 287,77 miliar rupiah (naik 175,19% dari tahun sebelumnya), dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 221,12 miliar rupiah. Selama periode lima tahun, pembiayaan netto meningkat sebesar 90,33%, yang mencerminkan perubahan signifikan dalam pola pengelolaan fiskal daerah.

Tabel II-62
Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
PEMBIAYAAN DAERAH	116,181,732,896	105,427,113,862	104,572,263,211	287,767,275,819.31	221,123,475,955.00
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	138,937,123,996	125,527,113,862	122,231,446,711	295,267,275,819.31	228,705,156,955.00
Penggunaan SILPA / Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	129,832,527,596	118,782,202,362	114,067,497,278	287,620,555,052.31	221,164,744,955.00
Penerimaan Kembali Pinjaman/Pemberian Pinjaman Daerah	9,104,596,400	6,744,911,500	8,163,949,433	7,646,720,767.00	7,540,412,000.00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	22,755,391,100	20,100,000,000	17,659,183,500	7,500,000,000.00	7,581,681,000.00
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	14,600,000,000	12,100,000,000	10,000,000,000	7,500,000,000.00	0

URAIAN	REALISASI 2020	REALISASI 2021	REALISASI 2022	REALISASI 2023	REALISASI 2024
Pinjaman Angsuran Berjangka/Pemberian Pinjaman Daerah	8,155,391,100	8,000,000,000	7,659,183,500	0	7,581,681,000.00
PEMBIAYAAN NETTO	116,181,732,896	105,427,113,862	104,572,263,211	287,767,275,819.31	221,123,475,955.00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	118,782,202,362	114,067,497,278	287,620,555,052	229,165,693,734.49	195,501,814,983.04

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Penerimaan pembiayaan didominasi oleh komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA) yang berkontribusi rata-rata 94,73% dari total penerimaan pembiayaan. Tren SILPA menunjukkan fluktuasi dengan penurunan pada tahun 2020-2022, kemudian meningkat tajam pada tahun 2023 menjadi 287,62 miliar rupiah, dan sedikit menurun pada tahun 2024 menjadi 221,16 miliar rupiah. Peningkatan drastis SILPA pada tahun 2023 mencerminkan surplus anggaran yang signifikan pada tahun sebelumnya sebesar 183,05 miliar rupiah, yang mengindikasikan adanya gap antara perencanaan dan eksekusi anggaran. Fenomena ini menjadi catatan penting bagi perencanaan keuangan daerah ke depan untuk meningkatkan akurasi perencanaan dan efektivitas pelaksanaan program.

Komponen penerimaan kembali pinjaman/pemberian pinjaman daerah menunjukkan volatilitas dengan nilai berkisar antara 6,74 miliar rupiah hingga 9,10 miliar rupiah selama periode 2020-2024. Rata-rata kontribusi komponen ini hanya 5,27% dari total penerimaan pembiayaan, yang menggambarkan peran terbatas instrumen pinjaman dalam struktur pembiayaan daerah. Tren ini sejalan dengan kebijakan kehati-hatian dalam pengelolaan utang daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 1 Tahun 2022. Pendekatan konservatif ini memberikan jaminan stabilitas fiskal jangka panjang, namun perlu diimbangi dengan analisis cost-benefit yang memadai untuk mengoptimalkan pemanfaatan berbagai instrumen pembiayaan yang tersedia.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan, terjadi penurunan signifikan dari 22,76 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi hanya 7,58 miliar rupiah pada tahun 2024 (turun 66,68%). Penyertaan modal pemerintah daerah menunjukkan tren menurun konsisten dari 14,60 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi nol pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan pergeseran strategi investasi daerah dan evaluasi terhadap efektivitas

BUMD dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah. Transformasi pendekatan investasi ini perlu dilandasi kajian komprehensif terhadap kinerja BUMD dan potensi kontribusinya bagi peningkatan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Komponen pinjaman angsuran berjangka/pemberian pinjaman daerah juga menunjukkan volatilitas dengan penurunan dari 8,16 miliar rupiah pada tahun 2020 menjadi nol pada tahun 2023, kemudian meningkat kembali menjadi 7,58 miliar rupiah pada tahun 2024. Pola ini mencerminkan dinamika kebijakan pinjaman daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan dan kapasitas fiskal daerah. Fleksibilitas dalam penggunaan instrumen pinjaman mencerminkan pendekatan adaptif dalam merespon perubahan kebutuhan pembangunan dan kondisi ekonomi makro, namun tetap perlu dikelola dengan prinsip kehati-hatian untuk menghindari beban fiskal yang berlebihan dalam jangka panjang.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebagai indikator kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan tren fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. SILPA tahun 2020 tercatat sebesar 118,78 miliar rupiah, sedikit menurun pada tahun 2021 menjadi 114,07 miliar rupiah, kemudian melonjak drastis pada tahun 2022 menjadi 287,62 miliar rupiah (naik 152,15%), dan menunjukkan tren menurun pada tahun 2023-2024. Peningkatan signifikan SILPA pada tahun 2022 mengindikasikan underutilization anggaran yang cukup besar, yang dapat disebabkan oleh faktor perencanaan yang kurang akurat atau kendala dalam eksekusi program. Kondisi ini menggarisbawahi pentingnya penguatan kapasitas perencanaan dan penganggaran, serta perbaikan sistem monitoring dan evaluasi untuk memastikan implementasi program yang efektif dan tepat sasaran.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah memberikan kerangka regulasi baru dalam pengelolaan pembiayaan daerah. Pasal 62 UU tersebut mengatur tentang pembiayaan daerah yang bersumber dari SILPA, penerimaan pinjaman, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan penerimaan pembayaran piutang. Implementasi ketentuan ini tercermin dari pola pembiayaan Kabupaten Barito Kuala yang dominan bersumber dari SILPA. Ketergantungan pada SILPA sebagai sumber utama pembiayaan menunjukkan perlunya diversifikasi sumber pembiayaan dan peningkatan kualitas perencanaan

anggaran untuk memastikan alokasi sumber daya yang lebih optimal dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah.

Pasal 70-72 UU Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang pinjaman daerah, termasuk mekanisme, persyaratan, dan batas maksimal pinjaman. Kabupaten Barito Kuala cenderung konservatif dalam pemanfaatan instrumen pinjaman, dengan pengeluaran pembiayaan untuk pinjaman yang relatif kecil dan menurun selama periode 2020-2024. Kepatuhan terhadap prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan utang ini sejalan dengan spirit UU tersebut untuk menjaga kesinambungan fiskal daerah. Pendekatan konservatif ini memberikan stabilitas fiskal jangka panjang, namun perlu dikaji secara periodik untuk memastikan tidak adanya opportunity loss dari peluang investasi yang produktif dan strategis bagi pembangunan daerah.

Dalam konteks manajemen keuangan daerah, rasio penyerapan anggaran Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2022 relatif rendah, yang tercermin dari peningkatan SILPA yang signifikan. Berdasarkan studi Kurniawan (2016), SILPA yang terlalu besar mengindikasikan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran dan kendala dalam sistem perencanaan dan penganggaran. Kondisi ini memerlukan evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program untuk memastikan alokasi sumber daya yang lebih optimal. Perbaikan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah dan penguatan kapasitas SDM dalam perencanaan dan penganggaran menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran dan meminimalkan SILPA yang tidak produktif.

Pengelolaan investasi daerah melalui penyertaan modal ke BUMD menunjukkan tren menurun. Mengacu pada teori portofolio investasi publik yang dikembangkan oleh Shah (2007), penurunan investasi ini perlu diikuti dengan evaluasi kinerja BUMD untuk memastikan nilai tambah ekonomi dan kontribusinya terhadap PAD. Penghentian penyertaan modal pada tahun 2024 mengindikasikan adanya reorientasi strategi investasi daerah menuju bentuk yang lebih produktif. Transformasi pendekatan investasi ini memerlukan kajian komprehensif tentang potensi pengembangan BUMD, analisis risiko dan imbal hasil, serta sinergi dengan strategi pembangunan ekonomi daerah secara keseluruhan untuk mengoptimalkan peran BUMD sebagai agen pembangunan daerah.

Pembiayaan netto yang positif selama periode 2020-2024 berkontribusi pada penguatan posisi kas daerah, yang tercermin dari SILPA yang relatif besar pada akhir tahun anggaran. Kondisi ini memberikan fleksibilitas fiskal bagi Kabupaten Barito Kuala dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi dan kebutuhan pendanaan yang bersifat mendesak. Namun, menurut kajian fiskal daerah yang dilakukan oleh Mahmudi (2018), akumulasi kas yang berlebihan (*idle cash*) akibat SILPA yang terlalu besar justru mengurangi nilai ekonomi dari sumber daya yang seharusnya dapat diinvestasikan untuk pembangunan daerah. Optimalisasi pengelolaan kas daerah melalui instrumen treasury management yang lebih efektif menjadi prioritas untuk memastikan tersedianya likuiditas yang memadai sekaligus menghasilkan imbal hasil yang optimal dari aset keuangan daerah.

Strategi pembiayaan Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2024 menunjukkan pergeseran menuju pendekatan yang lebih seimbang. Penurunan pembiayaan netto dibandingkan tahun sebelumnya dan eliminasi penyertaan modal mengindikasikan upaya optimalisasi penggunaan anggaran dan pencapaian keseimbangan fiskal yang lebih baik. Defisit anggaran tahun 2024 sebesar 25,62 miliar rupiah (1,34% dari total pendapatan) ditutupi dengan pembiayaan netto sebesar 221,12 miliar rupiah, menghasilkan SILPA tahun 2024 sebesar 195,50 miliar rupiah. Strategi ini menunjukkan upaya menyeimbangkan kebutuhan belanja dan penguatan posisi kas daerah, namun masih perlu ditingkatkan untuk mencapai tingkat efisiensi yang lebih tinggi dalam pengelolaan anggaran dan pembiayaan daerah.

Mengacu pada teori sustainable fiscal framework yang dikemukakan oleh Schick (2016), pola pembiayaan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kesinambungan fiskal yang cukup baik. Pembiayaan netto yang positif dan konsisten selama lima tahun memberikan buffer fiskal yang memadai untuk menghadapi fluktuasi pendapatan dan tekanan belanja. Namun, tingginya ketergantungan pada SILPA sebagai sumber utama pembiayaan menunjukkan pentingnya penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran. Kesinambungan fiskal jangka panjang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, termasuk diversifikasi sumber pembiayaan, optimalisasi potensi pendapatan, dan peningkatan efisiensi belanja untuk menciptakan ruang fiskal yang lebih luas bagi pembangunan daerah.

Dalam konteks rencana pembangunan jangka menengah, pengelolaan pembiayaan daerah perlu diarahkan pada penggunaan sumber daya keuangan yang lebih produktif dan strategis. SILPA yang optimal berkisar antara 3-5% dari total belanja daerah, namun SILPA Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2022 mencapai 24,89% dari total belanja tahun 2022, jauh di atas threshold yang direkomendasikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya perbaikan dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program pembangunan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja dan penguatan mekanisme monitoring dan evaluasi menjadi langkah strategis untuk memastikan penyerapan anggaran yang optimal dan berkualitas.

Secara keseluruhan, pola pembiayaan Kabupaten Barito Kuala selama periode 2020-2024 menunjukkan pengelolaan fiskal yang konservatif dengan prioritas pada penguatan likuiditas daerah. Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 memberikan kerangka regulasi yang lebih jelas bagi pengelolaan pembiayaan daerah, namun masih diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan dalam mendukung pembangunan daerah. RPJMD 2025-2029 perlu memuat strategi pembiayaan yang lebih inovatif dan responsif terhadap dinamika kebutuhan pendanaan pembangunan, dengan tetap menjaga prinsip kesinambungan fiskal. Pengembangan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, penguatan sistem informasi keuangan, dan peningkatan transparansi dan akuntabilitas menjadi prasyarat bagi terciptanya tata kelola pembiayaan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

2.5.1.4 Neraca Keuangan Tahun 2020-2024

Neraca keuangan Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2020-2024 menunjukkan tren pertumbuhan aset yang signifikan, dengan total aset meningkat dari Rp2,38 triliun pada 2020 menjadi Rp3,38 triliun pada 2024, mencerminkan peningkatan sebesar 41,99% selama lima tahun atau rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 9,15%. Pertumbuhan ini mengindikasikan penguatan kapasitas fiskal dan akumulasi kekayaan daerah yang positif, meskipun dengan pola yang fluktuatif terutama pada periode 2020-2021 di mana terjadi sedikit kontraksi sebesar 1,01%.

Tabel II-63
Neraca Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2020-2024

N O	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	ASET					
	A. Aset Lancar	211.807.729.300,42	176.199.984.653,57	357.348.937.314,98	281.490.273.079,76	527.751.212.932,25
	B. Investasi Jangka Panjang	236.936.597.287,25	217.880.836.392,31	181.818.165.993,21	164.748.664.142,45	196.040.894.394,26
	C. Aset Tetap	1.860.662.209.143,23	1.907.700.056.807,82	2.035.645.070.173,07	2.163.590.083.538,32	2.580.975.150.349,81
	D. Aset Lainnya	68.465.855.123,49	52.127.756.265,93	80.444.543.417,33	291.422.096.998,67	71.690.089.237,90
	JUMLAH ASET	2.377.872.390.854,39	2.353.908.634.119,63	2.655.256.716.898,59	2.901.251.117.759,20	3.376.457.346.914,22
2	KEWAJIBAN					
	A. Kewajiban Jangka Pendek	58.722.007.796,00	62.422.045.273,11	37.121.045.788,06	35.295.124.143,23	44.801.472.178,89
	B. Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-	-	-
	JUMLAH KEWAJIBAN	58.722.007.796,00	62.422.045.273,11	37.121.045.788,06	35.295.124.143,23	44.801.472.178,89
3	EKUITAS					
	Ekuitas	2.319.150.383.058,39	2.291.486.588.846,52	2.618.135.671.110,53	2.865.955.993.615,97	3.331.655.874.735,33
	JUMLAH EKUITAS	2.319.150.383.058,39	2.291.486.588.846,52	2.618.135.671.110,53	2.865.955.993.615,97	3.331.655.874.735,33
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	2.377.872.390.854,39	2.353.908.634.119,63	2.655.256.716.898,59	2.901.251.117.759,20	3.376.457.346.914,22

Sumber : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (diolah)

Struktur aset Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Aset Tetap yang konsisten berkontribusi antara 76-78% dari total aset. Aset Tetap meningkat signifikan dari Rp1,86 triliun pada 2020 menjadi Rp2,58 triliun pada 2024, bertumbuh 38,71% selama periode tersebut. Peningkatan substansial terjadi pada 2023-2024 dengan pertumbuhan tahunan mencapai 19,29%, mencerminkan akselerasi dalam pembangunan infrastruktur dan perolehan aset strategis. Kondisi ini sejalan dengan transformasi pola belanja daerah yang meningkatkan alokasi untuk Belanja Modal, terutama infrastruktur jalan, irigasi, dan jaringan.

Aset Lancar menunjukkan volatilitas yang tinggi dengan fluktuasi signifikan, menurun dari Rp211,81 miliar pada 2020 menjadi Rp176,20 miliar pada 2021 (-16,81%), kemudian melonjak menjadi Rp357,35 miliar pada 2022 (102,81%), sebelum turun kembali menjadi Rp281,49 miliar pada 2023 (-21,23%), dan akhirnya meningkat drastis menjadi Rp527,75 miliar pada 2024 (87,48%). Fluktuasi ini mencerminkan dinamika dalam pengelolaan kas dan setara kas, serta variasi dalam pola pendapatan dan pembiayaan daerah. Peningkatan signifikan pada 2024 berkorelasi dengan akumulasi

SILPA yang besar dalam proyeksi pembiayaan, menunjukkan potensi underutilization sumber daya keuangan.

Investasi Jangka Panjang menunjukkan tren menurun dari Rp236,94 miliar pada 2020 menjadi Rp164,75 miliar pada 2023 (-30,47%), sebelum pulih menjadi Rp196,04 miliar pada 2024. Penurunan ini mengindikasikan divestasi atau revaluasi investasi pemerintah daerah, sementara pemulihan pada 2024 mencerminkan revitalisasi strategi investasi. Komposisi Investasi Jangka Panjang terhadap total aset menurun dari 9,96% pada 2020 menjadi 5,81% pada 2024, menunjukkan pergeseran dalam strategi alokasi aset.

Dari sisi kewajiban, Kabupaten Barito Kuala menunjukkan profil risiko yang sangat rendah dengan Kewajiban Jangka Pendek yang fluktuatif namun terkendali, mencapai Rp44,80 miliar pada 2024 atau hanya 1,33% dari total aset. Tidak adanya Kewajiban Jangka Panjang mengindikasikan pendekatan konservatif dalam pengelolaan utang dan ketergantungan minimal pada pembiayaan eksternal. Rasio Kewajiban terhadap Total Aset menurun dari 2,47% pada 2020 menjadi 1,33% pada 2024, mencerminkan peningkatan solvabilitas dan kesehatan keuangan daerah.

Ekuitas Kabupaten Barito Kuala tumbuh signifikan dari Rp2,32 triliun pada 2020 menjadi Rp3,33 triliun pada 2024, meningkat 43,66% selama lima tahun. Pertumbuhan Ekuitas yang melebihi pertumbuhan Total Aset mencerminkan pengurangan proporsional dalam Kewajiban dan penguatan posisi keuangan bersih daerah. Rasio Ekuitas terhadap Total Aset meningkat dari 97,53% pada 2020 menjadi 98,67% pada 2024, mengindikasikan struktur pendanaan yang sangat konservatif dengan ketergantungan minimal pada utang.

Secara keseluruhan, neraca keuangan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kondisi keuangan yang sehat dengan trend pertumbuhan aset dan ekuitas yang solid, profil risiko yang sangat rendah, dan akumulasi kekayaan daerah yang signifikan. Namun, fluktuasi yang tinggi dalam Aset Lancar, penurunan tren dalam Investasi Jangka Panjang, dan akumulasi Aset Lancar yang besar pada 2024 mengindikasikan perlunya optimalisasi dalam pengelolaan portofolio aset dan diversifikasi strategi investasi untuk memaksimalkan return on assets. Peningkatan proporsi Aset Tetap mencerminkan komitmen pada pembangunan infrastruktur, namun juga mengindikasikan potensi biaya

pemeliharaan yang meningkat di masa depan yang perlu diantisipasi dalam perencanaan keuangan jangka panjang.

2.5.2 Proyeksi keuangan daerah Tahun Anggaran 2025-2030.

Kabupaten Barito Kuala merancang proyeksi pendapatan 2025-2030 dengan pendekatan strategis berdasarkan data historis dan pertumbuhan ekonomi rata-rata 3,65% per tahun. Proyeksi ini mempertimbangkan tren pertumbuhan pra-pandemi dan faktor-faktor ekonomi regional. Fokus proyeksi meliputi tiga komponen utama: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah.

Pajak Daerah diperkirakan meningkat dari Rp29,01 miliar (2025) menjadi Rp34,70 miliar (2030), didukung kebijakan perpajakan efektif dan pertumbuhan ekonomi lokal. Sejalan dengan pembaruan kebijakan keuangan berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022, proyeksi ini menganalisis sistem pendapatan dan belanja terintegrasi dengan kebutuhan fiskal dan sosial daerah. Pendapatan Transfer diperkirakan naik dari Rp1,47 triliun (2025) menjadi Rp1,75 triliun (2030), menjamin fondasi keuangan yang kuat.

Pengelolaan pembiayaan strategis menjadi kunci dalam mendukung kerjasama dan proyek infrastruktur. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Service Partnership* (PSP) membuka jalur pembiayaan alternatif yang melibatkan sektor swasta untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan. Melalui perencanaan cermat dan kolaborasi efektif, Kabupaten Barito Kuala menyajikan proyeksi pendapatan yang dapat diandalkan dan kebijakan ekonomi yang berdampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat jangka panjang.

2.5.2.1 Proyeksi Pendapatan

Analisis pertumbuhan pendapatan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren positif dengan rata-rata pertumbuhan 3,60% per tahun selama periode proyeksi 2026-2030. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan tumbuh dari Rp103,58 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp119,52 miliar pada tahun 2030, dengan total pertumbuhan 15,38% selama lima tahun. Pertumbuhan serupa juga terlihat pada Pendapatan Transfer yang meningkat dari Rp1,52 triliun (2026) menjadi Rp1,75 triliun (2030), menunjukkan

pertumbuhan total sebesar 15,12%. Total pendapatan daerah diproyeksikan tumbuh dari Rp1,63 triliun menjadi Rp1,88 triliun selama periode yang sama, mencerminkan pertumbuhan total 15,18%.

Tabel II-64
Proyeksi Pendapatan Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
Pendapatan Asli Daerah	112,617,357,440	103,584,858,670	107,362,513,763	111,275,208,015	115,325,738,867	119,517,045,874
Pajak Daerah	30,822,327,264	30,074,510,720	31,172,241,899	32,308,012,811	33,482,309,281	34,695,646,950
Retribusi Daerah	2,977,143,727	3,918,462,138	4,061,908,479	4,210,860,623	4,365,498,000	4,526,012,167
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	11,516,297,184	12,779,493,714	13,250,921,934	13,743,674,434	14,258,621,945	14,796,737,963
Lain-lain PAD yang Sah	67,301,589,265	56,812,392,098	58,878,441,451	61,016,660,146	63,228,909,641	65,517,148,794
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	112,617,357,440	103,584,858,670	107,362,513,763	111,275,208,015	115,325,738,867	119,517,045,874
Pendapatan Transfer	1,801,965,643,220	1,524,330,308,217	1,579,905,665,314	1,636,791,649,914	1,695,052,541,589	1,754,756,463,673
Dana Perimbangan	1,482,967,167,232	1,209,101,049,634	1,253,168,038,117	1,298,717,141,515	1,345,806,576,492	1,394,496,438,964
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1,658,977,093,232	172,767,010,778	179,073,980,168	185,616,673,636	192,404,930,142	199,449,073,412
Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi	142,988,549,988	142,462,247,806	147,663,647,029	153,060,948,764	158,661,034,955	164,470,951,297
Jumlah Pendapatan Transfer	1,801,965,643,220	1,524,330,308,217	1,579,905,665,314	1,636,791,649,914	1,695,052,541,589	1,754,756,463,673
Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	96,455,588	100,001,246	103,696,521	107,545,722	111,553,230
Pendapatan Hibah	-	96,296,496	99,828,328	103,509,244	107,344,934	111,341,231
Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah	-	96,455,588	100,001,246	103,696,521	107,545,722	111,553,230
TOTAL PENDAPATAN	1,914,583,000,660	1,628,011,622,474	1,687,269,180,324	1,748,170,554,450	1,810,784,745,177	1,875,241,062,777

Sumber : Bappeditbang Kab. Barito Kuala

Dari segi komposisi, pendapatan Kabupaten Barito Kuala didominasi oleh Pendapatan Transfer yang menyumbang 93,63% dari total pendapatan pada tahun 2026 dan sedikit menurun menjadi 93,57% pada tahun 2030. Kontribusi PAD terhadap total pendapatan relatif stabil, hanya meningkat sedikit dari 6,36% (2026) menjadi 6,37% (2030). Lain-lain Pendapatan yang Sah memberikan kontribusi minimal, yaitu 0,01% pada 2026 dan meningkat menjadi 0,06% pada 2030. Komposisi PAD sendiri didominasi

oleh Lain-lain PAD yang Sah (54,80%), diikuti oleh Pajak Daerah (29,03%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (12,38%), dan Retribusi Daerah (3,79%) pada tahun 2030.

Pendapatan Transfer diharapkan mengalami pertumbuhan signifikan dengan proyeksi dari Rp. 1,47 triliun pada 2025 menjadi sekitar Rp. 1,75 triliun pada 2030. Hal ini mencerminkan dukungan berkelanjutan dari pemerintah pusat dan provinsi melalui dana perimbangan. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi salah satu elemen penting dalam perencanaan dan proyeksi pendapatan. Undang-undang ini menetapkan hubungan keuangan agar dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel dan selaras, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1. Pasal-Pasal Penting meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 20 sebagai pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain yang sah.

Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) diatur dalam Pasal 106-107, yang menegaskan pembagian keuangan pemerintah pusat ke daerah, meliputi DBH, DAU, DAK, Dana Otonomi Khusus, dan Dana Desa. Pasal 124-125 menyebutkan bahwa pagu nasional DAU ditentukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pelayanan publik dan kapasitas fiskal daerah. DAU dialokasikan berdasarkan celah fiskal, yaitu selisih antara kebutuhan fiskal dan potensi pendapatan daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diatur dalam Pasal 4-5, mencakup jenis pajak yang dikenai oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta tata cara pemungutannya, dan Pasal 87-88 yang menguraikan jenis retribusi yang dibedakan menjadi Retribusi Jasa Umum, Jasa Usaha, dan Perizinan Tertentu. Undang-Undang ini mengarahkan agar pendapatan daerah, termasuk PAD, dapat semakin diperkuat guna mendukung otonomi daerah.

Analisis ketergantungan fiskal menunjukkan kondisi yang mengkhawatirkan dengan indeks ketergantungan konsisten di atas 93% selama periode proyeksi, meskipun terlihat sedikit penurunan dari 93,63% (2026) menjadi 93,57% (2030). Tingkat ketergantungan yang sangat tinggi ini mengindikasikan keterbatasan Kabupaten Barito Kuala dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi. Sejalan dengan itu, rasio kemandirian keuangan daerah juga menunjukkan angka yang sangat rendah, berkisar antara 6,79%-6,81% selama periode proyeksi, yang

mencerminkan kemampuan yang terbatas dalam membiayai kegiatan pemerintahan melalui PAD.

Efektivitas PAD menunjukkan proyeksi pertumbuhan yang moderat dengan peningkatan Pajak Daerah dari Rp30,07 miliar (2026) menjadi Rp34,70 miliar (2030) dan Retribusi Daerah dari Rp3,92 miliar menjadi Rp4,53 miliar pada periode yang sama. Analisis trend menunjukkan pendekatan proyeksi yang konservatif dan realistis dengan rata-rata pertumbuhan 3,60% yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi daerah sebesar 3,65%, mengindikasikan perencanaan keuangan yang hati-hati dan memperhitungkan faktor-faktor ekonomi regional.

Dengan mempertimbangkan implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, proyeksi pendapatan Kabupaten Barito Kuala 2026-2030 mencerminkan upaya penyesuaian terhadap perubahan kebijakan keuangan nasional. Undang-undang ini membawa perubahan signifikan pada struktur pendapatan daerah, terutama terkait Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Meskipun proyeksi menunjukkan peningkatan nominal pendapatan transfer, persentase ketergantungan yang tetap tinggi mengindikasikan perlunya strategi penguatan kapasitas fiskal daerah yang lebih inovatif.

Potensi peningkatan PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah perlu dieksplorasi lebih jauh, mengingat proporsi Pajak Daerah yang relatif kecil (29,03% dari PAD) dibandingkan dengan potensi ekonomi daerah. Tingginya komponen Lain-lain PAD yang Sah (54,80%) juga menunjukkan perlunya evaluasi terhadap struktur pendapatan daerah untuk mengidentifikasi sumber pendapatan yang lebih stabil dan berkelanjutan. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau *Public Service Partnership* (PSP) menjadi alternatif penting untuk mengatasi keterbatasan fiskal, terutama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur strategis yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah jangka panjang.

Transformasi pengelolaan keuangan daerah dengan pendekatan berbasis kinerja dan *value for money* perlu diprioritaskan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas. Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi dan transparan juga dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan dan memperkuat

tata kelola keuangan daerah. Pengembangan kapasitas aparatur pengelola keuangan daerah menjadi faktor kunci dalam mengimplementasikan strategi penguatan kapasitas fiskal daerah secara efektif.

2.5.2.2 Proyeksi Belanja

Analisis pertumbuhan belanja Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2026-2030 menunjukkan transformasi signifikan dalam pola belanja dengan pergeseran fokus dari belanja operasional ke belanja pembangunan. Total belanja diproyeksikan tumbuh dengan rata-rata 3,67% per tahun, meningkat dari Rp1,44 triliun pada tahun 2026 menjadi Rp1,66 triliun pada tahun 2030, dengan total pertumbuhan 15,53% selama lima tahun. Namun, di balik pertumbuhan keseluruhan yang moderat ini, terdapat perubahan struktural yang substansial dalam komposisi belanja, di mana Belanja Operasi justru menunjukkan tren penurunan dari Rp1,09 triliun (2026) menjadi Rp1,04 triliun (2030), dengan kontraksi sebesar 4,87%. Sebaliknya, Belanja Modal menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, meningkat dari Rp342,09 miliar menjadi Rp617,84 miliar dengan pertumbuhan total mencapai 80,61% atau rata-rata 15,96% per tahun.

Tabel II-65
Proyeksi Belanja Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI BELANJA				
		2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Pegawai	721.592.920.259	641.906.528.640	465.774.265.223	482.896.163.952	500.727.360.305	519.295.412.056
Belanja Barang dan Jasa	448.377.642.261	382.417.591.764	396.383.861.354	410.875.745.883	425.922.840.483	441.555.672.187
Hibah	78.535.761.402	62.381.797.135	64.658.202.482	67.014.454.682	69.454.811.255	71.983.446.265
Bantuan Sosial	1.316.433.343	4.633.990.292	4.804.245.901	4.981.620.483	5.166.707.185	5.360.121.917
Jumlah Belanja Operasi	1.249.822.757.265	1.091.339.907.831	931.620.574.960	965.767.985.000	1.001.271.719.228	1.038.194.652.425
Belanja Tanah	8.641.969.686	1.895.166.964	1.964.386.144	2.036.086.706	2.110.356.963	2.187.291.485
Belanja Peralatan dan Mesin	45.482.320.204	66.313.845.203	68.739.913.208	71.269.959.732	73.909.212.927	76.662.961.334
Belanja Gedung dan Bangunan	142.482.443.020	109.566.909.941	113.570.662.721	117.731.315.086	122.055.052.084	126.548.079.946
Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan	208.499.077.592	163.183.609.926	368.771.373.380	382.330.053.729	396.451.269.475	411.155.405.577
Belanja Aset Tetap Lainnya	423.108.025	1.134.903.064	1.170.442.842	1.207.362.343	1.245.709.427	1.285.533.372
Jumlah Belanja Modal	405.528.918.527	342.094.435.098	554.216.778.295	574.574.777.596	595.771.600.876	617.839.271.714

URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI BELANJA				
		2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Tidak Terduga	360.250.000	1.661.084.067	1.721.592.144	1.784.355.227	1.849.448.822	1.916.951.065
Jumlah Belanja Tidak Terduga	360.250.000	1.661.084.067	1.721.592.144	1.784.355.227	1.849.448.822	1.916.951.065
JUMLAH BELANJA	1.355.711.925.792	1.435.095.426.996	1.487.558.945.399	1.542.127.117.823	1.598.892.768.925	1.657.950.875.204

Sumber : Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Transformasi struktural dalam pola belanja tercermin dalam perubahan komposisi belanja yang signifikan selama periode proyeksi. Proporsi Belanja Operasi terhadap Total Belanja mengalami penurunan substansial dari 76,05% pada tahun 2026 menjadi 62,62% pada tahun 2030. Seiring dengan itu, proporsi Belanja Modal meningkat tajam dari 23,84% menjadi 37,26% dalam periode yang sama. Pergeseran ini mengindikasikan reorientasi kebijakan fiskal daerah yang signifikan dengan penekanan lebih besar pada investasi pembangunan infrastruktur. Belanja Tidak Terduga mempertahankan proporsi yang relatif stabil dan minimal pada kisaran 0,11-0,12% dari total belanja.

Komposisi internal Belanja Operasi juga mengalami perubahan dengan penurunan signifikan proporsi Belanja Pegawai dari 58,84% (dalam proyeksi sebelumnya) menjadi 50,02% dari total Belanja Operasi pada tahun 2030. Belanja Barang dan Jasa menyumbang 42,53%, sementara Hibah dan Bantuan Sosial masing-masing menyumbang 6,93% dan 0,52%. Dalam struktur Belanja Modal, alokasi terbesar dan semakin dominan diarahkan untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai 66,55% dari total Belanja Modal pada 2030, meningkat signifikan dari proyeksi sebelumnya. Belanja Gedung dan Bangunan menyumbang 20,48%, diikuti oleh Belanja Peralatan dan Mesin (12,41%), Belanja Tanah (0,35%), dan Belanja Aset Tetap Lainnya (0,21%).

Analisis rasio belanja menunjukkan perubahan struktural yang konsisten dengan menurunnya rasio Belanja Operasi terhadap Total Belanja dari 76,05% menjadi 62,62% dan meningkatnya rasio Belanja Modal terhadap Total Belanja dari 23,84% menjadi 37,26%. Penurunan signifikan juga terlihat pada rasio Belanja Pegawai terhadap Total Belanja dari 44,73% menjadi 31,32%. Perubahan-perubahan ini mengindikasikan reformasi struktural yang substantif dalam pola belanja pemerintah daerah, dengan

fokus pada pengendalian belanja operasional, khususnya belanja pegawai, dan peningkatan alokasi untuk belanja pembangunan.

Perbaikan signifikan terlihat dalam indikator efisiensi belanja, terutama rasio Belanja Pegawai terhadap PAD yang menurun drastis dari 619,69% pada 2026 menjadi 434,50% pada 2030, menunjukkan penurunan sebesar 29,89%. Meskipun masih tinggi, penurunan ini mengindikasikan upaya serius untuk mengendalikan beban belanja pegawai dan meningkatkan kemandirian fiskal. Rasio Belanja Modal terhadap Total Pendapatan meningkat signifikan dari 21,01% menjadi 32,95%, mencerminkan peningkatan alokasi sumber daya untuk pembangunan infrastruktur yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tampaknya menjadi katalis untuk transformasi struktural dalam pola belanja Kabupaten Barito Kuala. Reorientasi kebijakan fiskal dengan penekanan pada efisiensi belanja operasional dan penguatan belanja pembangunan sejalan dengan semangat undang-undang tersebut yang menekankan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Penurunan signifikan dalam proporsi Belanja Pegawai menunjukkan upaya reformasi birokrasi dan rasionalisasi struktur organisasi pemerintah daerah untuk meningkatkan efisiensi operasional.

Proyeksi keseimbangan anggaran tetap menunjukkan pola surplus yang konsisten sepanjang periode 2026-2030, dengan surplus anggaran sebesar Rp0,19 triliun (11,85% dari total pendapatan) pada 2026 dan meningkat menjadi Rp0,22 triliun (11,59% dari total pendapatan) pada 2030. Keberlanjutan surplus anggaran yang signifikan, meskipun dalam konteks peningkatan substansial dalam belanja modal, menunjukkan pengelolaan fiskal yang pruden dan keberlanjutan keuangan daerah yang baik. Surplus anggaran ini memberikan ruang fiskal yang memadai untuk pembiayaan pembangunan tambahan, pengelolaan utang daerah, dan pembentukan cadangan fiskal untuk kontinjensi.

Trend dan proyeksi belanja menunjukkan pendekatan transformatif dengan reorientasi belanja dari operasional ke pembangunan. Meskipun total belanja tumbuh dengan moderat (3,67% per tahun), terjadi pergeseran dramatis dalam alokasi belanja

dengan kontraksi Belanja Operasi (-1,25% per tahun) dan ekspansi signifikan Belanja Modal (15,96% per tahun). Pergeseran struktural ini mencerminkan reformasi kebijakan fiskal yang berorientasi pada efisiensi operasional dan akselerasi pembangunan infrastruktur.

Peningkatan dramatis dalam alokasi untuk Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai Rp411,16 miliar pada 2030 (meningkat dari Rp163,18 miliar pada 2026) mencerminkan prioritas pada pembangunan infrastruktur konektivitas dan produktivitas. Fokus pada infrastruktur dasar ini dapat memberikan multiplier effect yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan produktivitas sektor pertanian, dan perbaikan akses masyarakat terhadap layanan publik. Strategi ini sejalan dengan pendekatan pembangunan berbasis infrastruktur yang menekankan konektivitas sebagai prasyarat untuk pertumbuhan ekonomi inklusif.

Reformasi struktural dalam pola belanja ini memberikan fondasi yang lebih kuat untuk pembangunan berkelanjutan Kabupaten Barito Kuala. Pengendalian Belanja Operasi, terutama Belanja Pegawai, dapat meningkatkan ruang fiskal untuk belanja produktif dan responsivitas anggaran terhadap kebutuhan pembangunan yang dinamis. Peningkatan alokasi untuk Belanja Modal dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis yang menjadi katalis pertumbuhan ekonomi dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Surplus anggaran yang konsisten memberikan jaminan keberlanjutan fiskal dan fleksibilitas dalam menghadapi gejolak ekonomi.

Dalam konteks penguatan kapasitas fiskal jangka panjang, transformasi struktural dalam pola belanja ini perlu didukung dengan strategi komprehensif untuk meningkatkan kapasitas perencanaan, implementasi, dan monitoring program pembangunan. Penguatan koordinasi antarsektor dan antardaerah juga diperlukan untuk memaksimalkan dampak pembangunan infrastruktur dan menciptakan sinergi dalam pembangunan regional. Integrasi perencanaan pembangunan dan penganggaran melalui pendekatan tematik dan spasial dapat meningkatkan koherensi dan dampak program pembangunan daerah. Inovasi dalam mekanisme pembiayaan pembangunan, termasuk melalui skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), juga dapat mempercepat pembangunan infrastruktur strategis tanpa membebani anggaran daerah secara berlebihan.

2.5.2.3 Proyeksi Pembiayaan

Analisis pertumbuhan pembiayaan Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2026-2030 menunjukkan pola peningkatan yang moderat dan relatif stabil dengan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Neto sebesar 3,30% per tahun. Penerimaan Pembiayaan diproyeksikan tumbuh dari Rp315,32 miliar pada tahun 2026 menjadi Rp359,34 miliar pada tahun 2030, dengan total pertumbuhan sebesar 13,96% selama lima tahun. Pengeluaran Pembiayaan menunjukkan pertumbuhan yang sedikit lebih tinggi, meningkat dari Rp15,31 miliar menjadi Rp17,65 miliar dengan pertumbuhan total 15,35%. Pembiayaan Neto, yang merupakan selisih antara Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan, diproyeksikan meningkat dari Rp300,01 miliar menjadi Rp341,69 miliar, mencerminkan pertumbuhan total 13,89% atau rata-rata 3,30% per tahun.

Tabel II-66
Proyeksi Pembiayaan Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030

URAIAN	BASELINE 2024	PROYEKSI PEMBIAYAAN				
		2026	2027	2028	2029	2030
Penggunaan SILPA	221,164,744,955	307,014,613,451	317,207,899,897	327,721,086,051	338,560,848,680	349,734,059,421
Pencairan Dana Cadangan	-	8,303,804,654	8,608,295,235	8,924,878,057	9,253,968,156	9,595,989,003
Jumlah Penerimaan Pembiayaan	228,705,156,955	315,318,418,106	325,816,195,131	336,645,964,108	347,814,816,836	359,340,048,424
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	-	6,711,676,908	6,955,689,221	7,208,636,505	7,470,933,749	7,742,998,195
Pinjaman Angsuran Berjangka	7,581,681,000	8,594,073,307	8,906,801,421	9,230,448,740	9,565,299,630	9,911,644,466
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	7,581,681,000	15,305,750,215	15,862,490,642	16,439,085,245	17,036,233,379	17,654,642,661
Total PEMBIAYAAN NETO	221,123,475,955	300,012,667,891	309,953,704,489	320,206,878,863	330,778,583,457	341,685,405,764

Sumber : Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dari perspektif komposisi, struktur Penerimaan Pembiayaan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan ketergantungan yang sangat tinggi pada Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya, yang menyumbang 97,37% dari total Penerimaan Pembiayaan pada tahun 2026 dan tetap dominan pada 97,33% pada tahun 2030. Pencairan Dana Cadangan memberikan kontribusi minimal pada kisaran 2,63-2,67% selama periode proyeksi. Pada sisi Pengeluaran Pembiayaan, komposisi menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara Penyertaan Modal Pemerintah

Daerah (43,85-43,86%) dan Pinjaman Angsuran Berjangka (56,15-56,14%), dengan proporsi yang relatif stabil sepanjang periode proyeksi.

Analisis rasio pembiayaan menunjukkan stabilitas dalam pola pembiayaan Kabupaten Barito Kuala dengan rasio Pembiayaan Neto terhadap Total Pendapatan yang sedikit menurun dari 18,43% pada 2026 menjadi 18,22% pada 2030. Rasio Pengeluaran Pembiayaan terhadap Penerimaan Pembiayaan menunjukkan peningkatan marginal dari 4,85% menjadi 4,91%, mengindikasikan proporsi yang relatif stabil antara arus masuk dan keluar dalam struktur pembiayaan. Rasio Penyertaan Modal terhadap Total Pendapatan tetap stabil pada 0,41%, mencerminkan konsistensi dalam alokasi sumber daya untuk investasi pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Analisis keseimbangan anggaran Kabupaten Barito Kuala menunjukkan posisi fiskal yang sangat kuat dengan surplus anggaran yang konsisten (selisih antara pendapatan dan belanja) yang berkisar antara Rp0,19-0,22 triliun selama periode 2026-2030. Dengan mempertimbangkan Pembiayaan Neto yang positif dan signifikan (Rp0,30-0,34 triliun), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) diproyeksikan mencapai Rp0,49 triliun pada 2026 dan meningkat menjadi Rp0,56 triliun pada 2030. Akumulasi SILPA yang besar ini mengindikasikan potensi underutilization sumber daya keuangan yang tersedia dan adanya ruang fiskal yang sangat luas untuk meningkatkan belanja pembangunan atau melakukan diversifikasi dalam strategi pembiayaan.

Analisis keberlanjutan fiskal menunjukkan beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian, terutama ketergantungan yang sangat tinggi pada SILPA sebagai sumber pembiayaan (97,33-97,37%) dan rendahnya diversifikasi sumber pembiayaan. Meskipun proyeksi menunjukkan peningkatan moderat dalam Pinjaman Daerah dari Rp8,59 miliar (2026) menjadi Rp9,91 miliar (2030), proporsinya terhadap total pembiayaan relatif kecil. Struktur pembiayaan yang sangat bergantung pada SILPA dapat membatasi fleksibilitas dalam strategi pembiayaan jangka panjang dan mengurangi potensi leverage keuangan daerah untuk akselerasi pembangunan.

Trend dan proyeksi pembiayaan menunjukkan pendekatan yang konservatif dan berkelanjutan dengan rata-rata pertumbuhan Pembiayaan Neto (3,30%) yang sedikit di bawah proyeksi pertumbuhan pendapatan (3,60%). Konsistensi pertumbuhan di semua komponen pembiayaan mencerminkan perencanaan keuangan yang hati-hati dan

berorientasi pada stabilitas fiskal jangka panjang, meskipun juga menunjukkan potensi pengembangan strategi pembiayaan yang lebih inovatif dan diversifikatif.

Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa implikasi signifikan terhadap pengelolaan pembiayaan daerah. UU ini mengatur berbagai aspek pembiayaan daerah yang termuat dalam Bab V (Pasal 91-100) tentang Pembiayaan Daerah. Berdasarkan UU tersebut, pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan (penggunaan SiLPA, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan pembiayaan lainnya) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, penyertaan modal daerah, pembayaran cicilan pokok utang, pemberian pinjaman, dan pengeluaran pembiayaan lainnya).

UU No. 1 Tahun 2022 juga memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam akses terhadap pinjaman daerah, termasuk melalui penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah, yang dapat menjadi alternatif pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan yang bersifat produktif. Kabupaten Barito Kuala tampaknya belum sepenuhnya memanfaatkan fleksibilitas ini, tercermin dari minimnya diversifikasi sumber pembiayaan dan ketergantungan yang sangat tinggi pada SiLPA. Potensi penerbitan obligasi daerah atau peningkatan pinjaman daerah untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur produktif perlu dieksplorasi lebih lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang fiskal yang tersedia.

Selain itu, UU ini juga menekankan pentingnya pengelolaan dana cadangan yang efektif sebagai instrumen untuk membiayai kebutuhan pembangunan jangka menengah/panjang. Proyeksi Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pemanfaatan dana cadangan yang relatif minimal (2,63-2,67% dari total penerimaan pembiayaan), yang mengindikasikan potensi pengembangan strategi pengelolaan dana cadangan yang lebih optimal. Pembentukan dana cadangan untuk proyek-proyek strategis jangka panjang dapat meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan dan mengurangi ketergantungan pada volatilitas pendapatan tahunan.

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, yang diproyeksikan meningkat dari Rp6,71 miliar (2026) menjadi Rp7,74 miliar (2030), mencerminkan upaya untuk

memperkuat peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan ekonomi lokal. Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2022, penyertaan modal ini dapat diarahkan untuk BUMD yang bergerak di sektor-sektor strategis yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif. Evaluasi berkala terhadap kinerja investasi ini diperlukan untuk memastikan efektivitas dan kontribusinya terhadap penguatan kapasitas fiskal daerah jangka panjang.

2.5.2.4 Proyeksi Neraca Keuangan

Proyeksi neraca keuangan Kabupaten Barito Kuala untuk periode 2025-2030 menunjukkan tren pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan dengan total aset diproyeksikan meningkat dari Rp3,71 triliun pada 2025 menjadi Rp5,91 triliun pada 2030, mencerminkan pertumbuhan kumulatif sebesar 59,57% dalam enam tahun atau rata-rata pertumbuhan tahunan 9,80%. Peningkatan ini didasarkan pada tren historis, pertumbuhan ekonomi daerah, dan proyeksi belanja modal yang signifikan sebagaimana tercermin dalam proyeksi keuangan 2025-2030.

Struktur aset tetap mempertahankan dominasinya dengan kontribusi konsisten sekitar 76-77% dari total aset. Aset Tetap diproyeksikan tumbuh dari Rp2,84 triliun pada 2025 menjadi Rp4,57 triliun pada 2030, meningkat 61,05% selama periode proyeksi. Akselerasi pembangunan infrastruktur, terutama dalam Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang diproyeksikan tumbuh 151,97% dalam periode 2026-2030, menjadi pendorong utama peningkatan Aset Tetap ini.

Tabel II-67
Proyeksi Neraca Keuangan Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2030

N O	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	ASET						
	A. Aset Lancar	580.526.334.225,48	638.579.967.648,03	702.437.964.412,83	772.681.760.854,11	849.949.936.939,52	934.944.930.633,47
	B. Investasi Jangka Panjang	211.724.166.345,80	228.662.099.653,46	246.954.867.625,74	266.711.257.035,80	288.048.157.598,66	311.092.010.206,56
	C. Aset Tetap	2.839.072.665.384,79	3.122.979.931.923,27	3.435.277.925.115,60	3.778.805.717.627,16	4.156.686.289.389,87	4.572.354.918.328,86
	D. Aset Lainnya	75.274.593.699,80	79.038.323.384,79	82.990.239.553,03	87.139.751.531,68	91.496.739.108,26	96.071.576.063,68
	JUMLAH ASET	3.706.597.759.655,87	4.069.260.322.609,55	4.467.660.996.707,20	4.905.338.487.048,75	5.386.181.123.036,31	5.914.463.435.232,57

N O	URAIAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
2	KEWAJIBAN						
	A. Kewajiban Jangka Pendek	46.593.531.066,05	48.457.272.308,69	50.395.563.200,83	52.411.385.728,86	54.507.841.158,01	56.688.154.804,33
	B. Kewajiban Jangka Panjang	15.000.000.000,00	18.750.000.000,00	22.500.000.000,00	26.250.000.000,00	30.000.000.000,00	33.750.000.000,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	61.593.531.066,05	67.207.272.308,69	72.895.563.200,83	78.661.385.728,86	84.507.841.158,01	90.438.154.804,33
3	EKUITAS						
	Ekuitas	3.645.004.228.589,82	4.002.053.050.300,86	4.394.765.433.506,37	4.826.677.101.319,89	5.301.673.281.878,30	5.824.025.280.428,24
	JUMLAH EKUITAS	3.645.004.228.589,82	4.002.053.050.300,86	4.394.765.433.506,37	4.826.677.101.319,89	5.301.673.281.878,30	5.824.025.280.428,24
	JUMLAH KEWAJIBAN & EKUITAS	3.706.597.759.655,87	4.069.260.322.609,55	4.467.660.996.707,20	4.905.338.487.048,75	5.386.181.123.036,31	5.914.463.435.232,57

Sumber : Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Aset Lancar diproyeksikan mengalami pertumbuhan signifikan dari Rp580,53 miliar pada 2025 menjadi Rp934,94 miliar pada 2030, meningkat 61,05%. Proyeksi ini mempertimbangkan tren surplus anggaran yang konsisten dan akumulasi SILPA yang substansial sebagaimana tercermin dalam proyeksi pembiayaan. Meskipun mencerminkan likuiditas yang kuat, peningkatan signifikan ini juga mengindikasikan potensi underutilization sumber daya keuangan yang perlu diatasi melalui strategi pengelolaan kas yang lebih optimal.

Investasi Jangka Panjang diproyeksikan tumbuh dari Rp211,72 miliar pada 2025 menjadi Rp311,09 miliar pada 2030, meningkat 46,93%. Perubahan arah ini dibandingkan tren historis yang menurun mencerminkan asumsi revitalisasi strategi investasi daerah, termasuk peningkatan penyertaan modal pada BUMD dan diversifikasi portofolio investasi untuk mendukung pertumbuhan PAD jangka panjang.

Proyeksi kewajiban mencerminkan perubahan signifikan dalam strategi pembiayaan dengan dimasukkannya Kewajiban Jangka Panjang yang mulai dari Rp15 miliar pada 2025 dan meningkat secara bertahap menjadi Rp33,75 miliar pada 2030. Introduksi kewajiban jangka panjang ini mengasumsikan pemanfaatan instrumen

pembiayaan alternatif seperti obligasi daerah atau pinjaman jangka panjang untuk mendukung akselerasi pembangunan infrastruktur, sesuai dengan fleksibilitas yang diberikan oleh UU No. 1/2022.

Meskipun dengan introduksi Kewajiban Jangka Panjang, profil risiko keuangan Kabupaten Barito Kuala tetap sangat konservatif dengan total Kewajiban hanya mencapai 1,53% dari total Aset pada 2030. Rasio ini masih jauh di bawah batas prudensial dan mencerminkan pendekatan pengelolaan utang yang hati-hati. Kewajiban Jangka Pendek diproyeksikan tumbuh moderat dari Rp46,59 miliar pada 2025 menjadi Rp56,69 miliar pada 2030, mengikuti tren pertumbuhan belanja operasional.

Ekuitas Kabupaten Barito Kuala diproyeksikan meningkat dari Rp3,65 triliun pada 2025 menjadi Rp5,82 triliun pada 2030, mencerminkan pertumbuhan kumulatif 59,78%. Rasio Ekuitas terhadap Total Aset tetap tinggi pada kisaran 98,47-98,50%, menunjukkan struktur pendanaan yang sangat solid dan ketergantungan minimal pada utang. Pertumbuhan Ekuitas yang kuat ini mencerminkan akumulasi aset dan kekayaan daerah yang berkelanjutan serta manajemen keuangan yang pruden.

Secara keseluruhan, proyeksi neraca keuangan Kabupaten Barito Kuala 2025-2030 menunjukkan prospek keuangan yang sangat positif dengan pertumbuhan aset yang kuat, profil risiko yang minimal, dan struktur pendanaan yang solid. Namun, akumulasi Aset Lancar yang signifikan bersamaan dengan peningkatan dominasi Aset Tetap mengindikasikan perlunya strategi yang lebih optimal dalam alokasi sumber daya keuangan, pengelolaan aset, dan diversifikasi investasi. Introduksi Kewajiban Jangka Panjang secara bertahap mencerminkan potensi pemanfaatan leverage keuangan yang lebih baik untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur strategis, sekaligus tetap mempertahankan kesehatan keuangan daerah.

2.5.2.5 Analisis Manajemen Risiko berdasarkan Proyeksi Keuangan Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2030

Manajemen risiko fiskal merupakan komponen kritis dalam menjaga keberlanjutan keuangan daerah dan memastikan pencapaian target pembangunan. Berdasarkan pemetaan komprehensif terhadap proyeksi keuangan Kabupaten Barito Kuala 2025-2030, teridentifikasi beberapa risiko signifikan yang perlu dikelola secara

sistematis dan terstruktur. Risiko pendapatan menempati prioritas tertinggi dengan indeks risiko 0,70, didominasi oleh ketergantungan ekstrem terhadap Pendapatan Transfer yang mencapai 93,57% dari total pendapatan. Dengan nilai eksposur mencapai Rp1,75 triliun pada 2030 dan probabilitas gangguan 75%, potensi dampak negatif diperkirakan mencapai Rp350,95 miliar. Volatilitas kebijakan transfer pusat-daerah dan implementasi UU No. 1/2022 berpotensi menciptakan ketidakpastian dalam volume dan pola pendapatan transfer. Stagnasi pertumbuhan PAD dengan indeks risiko 0,65 juga menjadi perhatian serius, mengingat proyeksi pertumbuhan yang hanya mencapai 15,38% dalam lima tahun belum mencerminkan transformasi struktural dalam kapasitas fiskal daerah.

Tabel II-68
Penilaian Risiko Pendapatan Kabupaten Barito Kuala 2026-2030

Jenis Risiko	Nilai Eksposur (Rp miliar)	Probabilitas (%)	Potensi Dampak (Rp miliar)	Indeks Risiko	Tingkat Risiko
Ketergantungan Dana Transfer	1.754,76	75	350,95	0,85	Tinggi
Stagnasi Pertumbuhan PAD	119,52	60	35,86	0,65	Sedang-Tinggi
Volatilitas DAU/DAK	1.394,50	50	209,17	0,60	Sedang
Penurunan Hasil Kekayaan Daerah	14,80	30	2,96	0,25	Rendah-Sedang
Total Risiko Pendapatan	1.875,24	55	598,94	0,70	Tinggi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Transformasi dramatis dalam struktur belanja menyimpan risiko substansial dengan indeks risiko 0,68. Proyeksi penurunan Belanja Operasi sebesar 4,87% bersamaan dengan peningkatan Belanja Modal sebesar 80,61% menciptakan tantangan dalam kapasitas penyerapan anggaran dan manajemen proyek. Konsentrasi berlebihan pada Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan yang mencapai 66,55% dari total Belanja Modal pada 2030 memperbesar kerentanan terhadap volatilitas harga material konstruksi. Dengan probabilitas 70% dan potensi dampak Rp105 miliar, risiko volatilitas harga material menjadi faktor signifikan yang perlu dimitigasi. Kontraksi Belanja Pegawai sebesar 19,10% berpotensi menciptakan resistensi terhadap transformasi birokrasi dengan risiko dampak sebesar Rp67,43 miliar.

Tabel II-69
Penilaian Risiko Belanja Kabupaten Barito Kuala 2026-2030

Jenis Risiko	Nilai Eksposur (Rp miliar)	Probabilitas (%)	Potensi Dampak (Rp miliar)	Indeks Risiko	Tingkat Risiko
Transformasi Struktur Belanja	617,84	65	123,57	0,70	Sedang- Tinggi
Kontraksi Belanja Pegawai	122,61	55	67,43	0,60	Sedang
Konsentrasi Belanja Infrastruktur	411,16	60	82,23	0,65	Sedang- Tinggi
Volatilitas Harga Material	300,00	70	105,00	0,75	Tinggi
Total Risiko Belanja	1.657,95	60	378,23	0,68	Sedang- Tinggi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Risiko pembiayaan menunjukkan indeks tertinggi (0,75) dengan ketergantungan ekstrem pada SILPA yang mencapai 97,33% dari total Penerimaan Pembiayaan. Dengan probabilitas gangguan 80% dan nilai eksposur Rp349,73 miliar, potensi dampak negatif diperkirakan mencapai Rp104,92 miliar. Minimnya diversifikasi instrumen pembiayaan dan keterbatasan dalam memanfaatkan skema KPBU menciptakan opportunity cost signifikan dengan potensi dampak Rp85,42 miliar. Akumulasi SILPA yang berlebihan mencapai Rp560 miliar pada 2030 mencerminkan inefisiensi dalam pemanfaatan sumber daya keuangan.

Tabel II-70
Penilaian Risiko Pembiayaan Kabupaten Barito Kuala 2026-2030

Jenis Risiko	Nilai Eksposur (Rp miliar)	Probabilitas (%)	Potensi Dampak (Rp miliar)	Indeks Risiko	Tingkat Risiko
Ketergantungan SILPA	349,73	80	104,92	0,85	Tinggi
Minimnya Diversifikasi Pembiayaan	341,69	70	85,42	0,75	Tinggi
Akumulasi SILPA Berlebihan	560,00	50	84,00	0,55	Sedang
Keterbatasan Kapasitas KPBU	100,00	65	45,00	0,65	Sedang- Tinggi
Total Risiko Pembiayaan	359,34	70	319,34	0,75	Tinggi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Berdasarkan matriks risiko-dampak, ketergantungan terhadap Dana Transfer dan SILPA menempati prioritas mitigasi tertinggi dengan skor risiko 20, diikuti volatilitas harga material dan transformasi struktur belanja (skor 16). Strategi mitigasi prioritas sangat tinggi perlu difokuskan pada diversifikasi pendapatan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, serta pengembangan instrumen pembiayaan alternatif, termasuk obligasi daerah dan optimalisasi skema KPBU. Untuk risiko dengan prioritas tinggi, penguatan kapasitas perencanaan dan implementasi proyek infrastruktur serta mekanisme hedging terhadap volatilitas harga material menjadi kunci keberhasilan.

Tabel II-71
Matriks Risiko-Dampak dan Prioritas Mitigasi

Kategori Risiko	Probabilitas	Dampak	Skor Risiko	Prioritas Mitigasi
Ketergantungan Dana Transfer	4	5	20	Sangat Tinggi
Ketergantungan SILPA	5	4	20	Sangat Tinggi
Volatilitas Harga Material	4	4	16	Tinggi
Transformasi Struktur Belanja	4	4	16	Tinggi
Stagnasi Pertumbuhan PAD	3	4	12	Sedang
Minimnya Diversifikasi Pembiayaan	4	3	12	Sedang
Akumulasi SILPA Berlebihan	3	3	9	Sedang-Rendah
Penurunan Hasil Kekayaan Daerah	2	2	4	Rendah

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Implementasi manajemen risiko fiskal memerlukan kerangka institusional yang kuat, termasuk pembentukan Tim Manajemen Risiko Fiskal dengan representasi lintas OPD dan mandat yang jelas. Sistem peringatan dini dengan indikator dan threshold yang terdefinisi dengan baik akan memperkuat kapasitas monitoring dan respons. Integrasi manajemen risiko dalam siklus perencanaan dan penganggaran tahunan serta pengembangan instrumen kebijakan khusus akan memastikan keberlanjutan dan efektivitas pendekatan berbasis risiko dalam pengelolaan keuangan daerah.

2.6 Permasalahan dan Isu Strategis

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 merupakan tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih. Dalam rangka menyusun dokumen yang komprehensif dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, langkah awal yang krusial adalah mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Kuala. Permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah merupakan hasil dari analisis mendalam terhadap berbagai aspek, baik dari capaian pembangunan sebelumnya, tantangan eksternal dan internal, maupun dinamika sosial, ekonomi, dan lingkungan yang berkembang. Identifikasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan data empiris, kajian teknokratik, serta partisipasi pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat.

Perumusan isu strategis dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 didasarkan pada perumusan masalah krusial yang dihadapi daerah, serta berbagai dokumen perencanaan dan regulasi strategis, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Barito Kuala, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), serta Rencana Pembangunan Nasional (RPN) Tahun 2025-2029. Dengan pendekatan ini, isu strategis yang dirumuskan akan memiliki dasar yang kuat, kontekstual, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional serta kebutuhan daerah. Pembahasan ini akan menyoroti berbagai dimensi utama pembangunan, seperti kesejahteraan masyarakat, daya saing ekonomi, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, serta ketahanan lingkungan. Melalui pemetaan permasalahan dan isu strategis yang tepat, diharapkan RPJMD 2025-2029 dapat merumuskan strategi kebijakan dan program yang lebih terarah, efektif, dan berkelanjutan.

2.6.1 Permasalahan pembangunan daerah

Pembahasan permasalahan dalam dokumen ini dilakukan secara sistematis berdasarkan empat aspek utama. Aspek geografis dan demografi mencakup kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala, termasuk beberapa karakteristik geografis, topografi, serta tantangan yang berkaitan dengan bencana alam dan perubahan iklim. Selain itu,

beberapa dinamika demografi, seperti pertumbuhan penduduk, distribusi kependudukan, dan struktur usia, turut menjadi faktor yang berpengaruh terhadap kebijakan pembangunan daerah. Aspek kesejahteraan masyarakat menyoroti beberapa permasalahan terkait kesejahteraan sosial, seperti tingkat kemiskinan, ketimpangan sosial, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan, serta kondisi ketenagakerjaan. Faktor-faktor ini menjadi indikator utama dalam mengukur kualitas hidup masyarakat dan menentukan arah kebijakan pembangunan inklusif.

Selanjutnya, aspek daya saing daerah membahas beberapa kondisi ekonomi daerah, potensi unggulan yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala, serta tantangan dalam meningkatkan daya saing daerah, baik dalam sektor pertanian, perikanan, industri, maupun pariwisata. Selain itu, beberapa faktor terkait infrastruktur pendukung dan ekosistem investasi juga menjadi bagian dari kajian daya saing daerah. Aspek pelayanan umum mencakup beberapa permasalahan dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk aksesibilitas dan kualitas layanan pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Efektivitas tata kelola pemerintahan daerah dalam menyediakan pelayanan yang merata dan berkualitas menjadi faktor kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Permasalahan yang dibahas dalam bab ini didasarkan pada analisis terhadap berbagai data dan informasi yang telah diuraikan dalam sub-sub bab sebelumnya. Gambaran umum Kabupaten Barito Kuala yang telah dibahas mencakup beberapa kondisi geografis dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, serta pelayanan umum. Dengan demikian, perumusan permasalahan dalam RPJMD ini memiliki dasar yang kuat dan berbasis pada kondisi faktual yang terjadi di daerah.

Dengan menguraikan permasalahan berdasarkan keempat aspek tersebut, diharapkan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 dapat merumuskan strategi yang lebih komprehensif dan tepat sasaran dalam mengatasi berbagai tantangan pembangunan yang ada. Pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan ini juga menjadi dasar dalam merancang program dan kebijakan yang tidak hanya bersifat solutif, tetapi juga berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, analisis permasalahan yang sistematis dan berbasis data menjadi faktor penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah ke depan.

2.6.1.1 Permasalahan Aspek Geografis dan Demografis

2.6.1.1.1 Posisi dan Peran Strategis Daerah

Kabupaten Barito Kuala memiliki posisi strategis sebagai wilayah pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) dan penyangga antara pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, namun kontribusi ekonominya terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 4,82% pada tahun 2019 menjadi 3,92% pada tahun 2023. Hal ini mengindikasikan bahwa posisi strategis ini belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Kurangnya pengembangan konektivitas wilayah dan infrastruktur berkelanjutan yang menghubungkan 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala dengan wilayah sekitarnya, terutama dengan IKN di Kalimantan Timur, menjadi hambatan utama dalam memanfaatkan posisi strategis ini. Kondisi ini diperburuk dengan ketidakseimbangan pembangunan antar kecamatan, di mana terdapat variasi kondisi geografis yang signifikan, mulai dari kawasan padat penduduk hingga wilayah yang relatif jarang penduduk, yang memerlukan pendekatan berbeda dalam pengembangan infrastruktur.

Kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi antara Kabupaten Barito Kuala dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan juga semakin melebar, dengan rasio PDRB per kapita menurun dari 64,04% pada tahun 2019 menjadi 50,78% pada tahun 2023. Meskipun terjadi pertumbuhan ekonomi pasca-pandemi, akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tidak secepat yang terjadi di tingkat provinsi, dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten mencapai 5,34% pada tahun 2021 dan 7,55% pada tahun 2022, sementara pertumbuhan ekonomi provinsi mencapai 10,45% dan 26,96% pada periode yang sama. Situasi ini memperlihatkan adanya tantangan struktural dalam perekonomian Kabupaten Barito Kuala yang memerlukan reformulasi strategi pembangunan ekonomi yang lebih komprehensif dan transformatif, termasuk diversifikasi struktur ekonomi untuk mengurangi ketergantungan pada sektor-sektor tertentu yang rentan terhadap volatilitas.

Tabel II-72
Permasalahan pada posisi dan peran strategis Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Posisi Strategis	Belum optimalnya pemanfaatan posisi	Penurunan kontribusi terhadap PDRB Provinsi

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
		strategis Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah pendukung IKN dan penyangga antar provinsi	Kalimantan Selatan dari 4,82% (2019) menjadi 3,92% (2023)
2	Konektivitas dan Infrastruktur	Kurangnya pengembangan konektivitas wilayah dan infrastruktur berkelanjutan yang menghubungkan 17 kecamatan dengan wilayah sekitarnya, terutama dengan IKN	Ketidakseimbangan pembangunan antar kecamatan dengan variasi kondisi geografis yang signifikan
3	Kesenjangan Ekonomi	Semakin melebarnya kesenjangan tingkat kesejahteraan ekonomi antara Kabupaten Barito Kuala dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Selatan	Penurunan rasio PDRB per kapita dari 64,04% (2019) menjadi 50,78% (2023)
4	Pertumbuhan Ekonomi	Akselerasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala tidak secepat yang terjadi di tingkat provinsi	Pertumbuhan ekonomi kabupaten 5,34% (2021) dan 7,55% (2022), sementara pertumbuhan ekonomi provinsi 10,45% dan 26,96% pada periode yang sama
5	Ketergantungan Sektor	Ketergantungan berlebih pada sektor tertentu yang rentan terhadap volatilitas	Tantangan struktural dalam perekonomian yang memerlukan diversifikasi struktur ekonomi
6	Sektor Pertanian	Tantangan dalam sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi andalan daerah	Penurunan luas panen meskipun produksi padi meningkat; penurunan kontribusi subsektor tanaman perkebunan, jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan
7	Pascapanen dan Distribusi	Sistem pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian yang belum optimal untuk memanfaatkan surplus produksi	Surplus beras signifikan (123.510,21 ton) namun terkendala keterbatasan fasilitas pengolahan dan penyimpanan
8	Diversifikasi Produk	Rendahnya tingkat diversifikasi produk olahan berbasis hasil pertanian lokal	Sistem distribusi belum optimal dan rendahnya diversifikasi produk olahan berbasis beras

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang menjadi andalan Kabupaten Barito Kuala juga menghadapi beberapa tantangan, di antaranya adalah penurunan luas panen meskipun produksi padi mengalami peningkatan, penurunan kontribusi subsektor tanaman perkebunan, jasa pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta sistem pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian yang belum optimal untuk memanfaatkan surplus produksi. Kabupaten ini memiliki surplus beras yang signifikan mencapai 123.510,21 ton (lebih dari 4 kali lipat kebutuhan konsumsi lokal), namun keterbatasan fasilitas pengolahan dan penyimpanan, sistem distribusi yang belum optimal, serta rendahnya tingkat diversifikasi produk olahan berbasis beras menjadi kendala dalam mengoptimalkan potensi sektor pertanian untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.6.1.1.2 Potensi Sumber Daya Alam

Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama di sektor pertanian dengan lahan sawah mencapai 98.919,34 ha (40,66%) dan produksi padi mencapai 240.519 ton GKG, namun proporsi lahan alami yang hanya 11,32% dari total luas wilayah menjadi perhatian karena berperan sebagai penyangga ekologis yang penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Ekspansi perkebunan sawit yang menempati 59.985,28 ha atau 24,66% dari total lahan menimbulkan tekanan lingkungan dan dapat mengancam keberadaan hutan dan keanekaragaman hayati jika tidak dikelola dengan baik. Fragmentasi hutan dan hilangnya habitat alami akibat konversi lahan dapat mengancam keanekaragaman hayati dan memicu konflik satwa-manusia, sehingga perlindungan dan rehabilitasi lahan alami perlu menjadi prioritas untuk menjaga keberlanjutan lingkungan.

Tabel II-73
Permasalahan Sumber Data Alam Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Keseimbangan Ekologis	Proporsi lahan alami yang rendah menjadi perhatian karena perannya sebagai penyangga ekologis	Lahan alami hanya 11,32% dari total luas wilayah
2	Tekanan Lingkungan	Ekspansi perkebunan sawit menimbulkan tekanan lingkungan dan dapat	Perkebunan sawit menempati 59.985,28 ha (24,66%) dari total lahan

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
		mengancam hutan dan keanekaragaman hayati	
3	Keanekaragaman Hayati	Fragmentasi hutan dan hilangnya habitat alami akibat konversi lahan	Ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan pemicu konflik satwa-manusia
4	Pemanfaatan Potensi Perikanan	Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan	Tiga sungai utama (Barito, Kapuas, dan Negara) serta akses ke Laut Jawa belum dimanfaatkan secara optimal
5	Pengelolaan Hutan	Pemanfaatan potensi hutan produksi dan hutan lindung belum optimal	Hutan produksi lindung seluas 1.214,42 km ² dan hutan produksi seluas 417,11 km ² belum dimanfaatkan secara optimal
6	Energi Terbarukan	Minimnya kontribusi energi terbarukan dalam struktur energi daerah	Belum optimalnya pemanfaatan potensi pengembangan energi alternatif dari sektor pengolahan limbah (Rp 19,83 miliar)
7	Pengolahan Limbah	Pemanfaatan potensi pengolahan limbah pertanian dan biogas masih terbatas	Belum menjadi prioritas dalam pengembangan sektor energi daerah
8	Teknologi Pertanian	Kebutuhan akan teknologi modern dalam sektor pertanian	Belum optimalnya penerapan teknologi irigasi canggih dan pengolahan air tanah
9	Kapasitas SDM	Perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia	Belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya alam
10	Pengolahan Hasil Pertanian	Belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian	Rendahnya nilai tambah produk lokal dan terbatasnya jangkauan pasar

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Potensi perikanan yang besar dengan tiga sungai utama (Barito, Kapuas, dan Negara) serta akses langsung ke Laut Jawa belum dimanfaatkan secara optimal, demikian pula dengan potensi hutan produksi lindung seluas 1.214,42 km² dan hutan produksi seluas 417,11 km² yang berperan sebagai penyangga ekologis dan penyedia

layanan ekosistem. Minimnya kontribusi energi terbarukan juga menjadi permasalahan, sementara potensi pengembangan energi alternatif dari sektor pengolahan limbah yang mencapai Rp 19,83 miliar belum dioptimalkan secara maksimal. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi pengembangan energi terbarukan dari pengolahan limbah pertanian dan biogas, namun pemanfaatannya masih terbatas dan belum menjadi prioritas dalam pengembangan sektor energi daerah.

Tantangan utama dalam pengembangan potensi sumber daya alam adalah kebutuhan akan teknologi modern, khususnya dalam sektor pertanian, yang meliputi penerapan teknologi irigasi canggih dan pengolahan air tanah untuk meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya air. Pengembangan infrastruktur pendukung dan penguatan kapasitas sumber daya manusia juga diperlukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya alam yang ada, termasuk pengembangan industri pengolahan hasil pertanian untuk meningkatkan nilai tambah produk lokal dan memperluas jangkauan pasar. Dengan karakteristik geografis yang unik berupa dataran rendah dan rawa pasang surut, Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi untuk pengembangan varietas tanaman pangan adaptif yang dapat menjadi keunggulan komparatif daerah dalam memperkuat ketahanan pangan regional dan nasional.

2.6.1.1.3 Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Permasalahan utama terkait daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala adalah konversi lahan alami menjadi lahan terbangun dan lahan pertanian yang menekan kapasitas penyangga ekologis, dengan proporsi lahan alami yang hanya 11,32% dari total luas wilayah. Dominasi lahan produktif sebesar 79,34% menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi berbasis lahan yang menopang perekonomian kabupaten, namun juga menyebabkan tekanan ekologis yang signifikan. Fragmentasi hutan dan hilangnya habitat alami dapat mengancam keanekaragaman hayati dan memicu konflik satwa-manusia, sehingga upaya konservasi dan restorasi perlu diprioritaskan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan lingkungan.

Penurunan kecil pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dari 63,41 pada tahun 2022 menjadi 62,66 pada tahun 2023 menegaskan perlunya strategi yang lebih

komprehensif dalam pengelolaan lingkungan, meskipun nilai tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2020 (54,13). Nilai IKLH di kisaran 60-an mengindikasikan kondisi lingkungan yang sedang dan masih belum mencapai standar optimal yang dikaitkan dengan nilai di atas 70 untuk lingkungan yang berkualitas tinggi. Perluasan kawasan industri dan infrastruktur, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang dinamis, meningkatkan intensitas penggunaan sumber daya alam, yang jika tidak diimbangi dengan strategi pengelolaan lingkungan yang adaptif, berpotensi menurunkan kualitas lingkungan di masa depan.

Tabel II-74
Permasalahan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Konversi Lahan	Konversi lahan alami menjadi lahan terbangun dan pertanian menekan kapasitas penyangga ekologis	Proporsi lahan alami hanya 11,32% dari total luas wilayah
2	Tekanan Ekologis	Dominasi lahan produktif menyebabkan tekanan ekologis signifikan	Lahan produktif mencapai 79,34% dari total luas wilayah
3	Fragmentasi Habitat	Fragmentasi hutan dan hilangnya habitat alami	Potensi ancaman terhadap keanekaragaman hayati dan konflik satwa-manusia
4	Kualitas Lingkungan	Penurunan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Penurunan dari 63,41 (2022) menjadi 62,66 (2023)
5	Standar Lingkungan	IKLH masih belum mencapai standar optimal	Nilai IKLH masih di kisaran 60-an (standar optimal >70)
6	Intensitas Penggunaan SDA	Perluasan kawasan industri, infrastruktur, dan pertumbuhan penduduk meningkatkan intensitas penggunaan SDA	Potensi penurunan kualitas lingkungan di masa depan
7	Infrastruktur Pengelolaan Limbah	Keterbatasan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah dan drainase	Potensi peningkatan pencemaran lingkungan terutama di kawasan padat penduduk (Kec. Alalak)
8	Pengembangan Lahan Terbangun	Ekspansi lahan terbangun yang tidak terkendali	Lahan terbangun 4,36% (permukiman 9.828,65 ha dan kawasan industri 571,76 ha)
9	Urban Sprawl	Potensi fenomena urban sprawl akibat pengembangan lahan tidak terkendali	Peningkatan jejak karbon dan beban ekosistem

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
10	Perencanaan Tata Ruang	Belum optimalnya perencanaan tata ruang yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan	Perlunya penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Keterbatasan kapasitas infrastruktur pengelolaan limbah dan drainase menjadi permasalahan yang berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan, terutama di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Kecamatan Alalak. Lahan terbangun yang menempati 4,36% dari total wilayah, dengan dominasi permukiman (9.828,65 ha) dan kawasan industri (571,76 ha), masih memiliki ruang untuk pengembangan, namun perlu dikelola secara bijaksana untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Ekspansi lahan terbangun yang tidak terkendali dapat memicu fenomena urban sprawl, meningkatkan jejak karbon, dan menambah beban ekosistem, sehingga diperlukan perencanaan tata ruang yang baik serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

2.6.1.1.4 Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan ketahanan energi yang ditunjukkan oleh elastisitas energi yang tinggi (1,558), mengindikasikan inefisiensi dalam pemanfaatan energi di mana laju pertumbuhan konsumsi energi lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi. Tren peningkatan intensitas energi per 1000 rupiah PDRB dari 1,019 pada tahun 2020 menjadi 1,076 pada tahun 2023 menunjukkan menurunnya efisiensi penggunaan energi dalam menghasilkan output ekonomi. Investasi sektor listrik dan gas menunjukkan peningkatan dari Rp 9,84 miliar pada tahun 2020 menjadi Rp 12,09 miliar pada tahun 2023, namun rasio investasi ini terhadap PDRB masih relatif rendah, hanya mencapai 0,11%, mengindikasikan kebutuhan yang mendesak untuk ekspansi infrastruktur energi dan diversifikasi sumber energi, termasuk pengembangan energi terbarukan dari pengolahan limbah pertanian dan biogas.

Dalam aspek ketahanan air, meskipun Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi sumber daya air yang memadai melalui sistem tiga sungai utamanya (Barito, Kapuas,

dan Negara), tantangan utama terletak pada pengelolaan yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang terus meningkat. Proyeksi menunjukkan bahwa kebutuhan air minum akan meningkat dari 35.890.690 liter pada tahun 2023 menjadi 45.757.690 liter pada tahun 2045, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dari 326.279 jiwa menjadi 415.979 jiwa. Keterbatasan dalam pengelolaan sumber daya air untuk mengantisipasi peningkatan kebutuhan ini menjadi permasalahan yang perlu ditangani, terutama mengingat potensi kompetisi penggunaan sumber daya air antar daerah dan tantangan pengelolaan sumber daya air akibat perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ketersediaan dan kualitas air.

Tabel II-75
Permasalahan Ketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Inefisiensi Energi	Inefisiensi dalam pemanfaatan energi dengan laju pertumbuhan konsumsi energi lebih tinggi dibanding pertumbuhan ekonomi	Elastisitas energi tinggi (1,558)
2	Intensitas Energi	Menurunnya efisiensi penggunaan energi dalam menghasilkan output ekonomi	Peningkatan intensitas energi per 1000 rupiah PDRB dari 1,019 (2020) menjadi 1,076 (2023)
3	Investasi Energi	Rasio investasi sektor energi terhadap PDRB masih relatif rendah	Investasi sektor listrik dan gas hanya 0,11% dari PDRB (Rp 12,09 miliar pada 2023)
4	Infrastruktur Energi	Kebutuhan mendesak untuk ekspansi infrastruktur energi dan diversifikasi sumber energi	Keterbatasan pengembangan energi terbarukan dari pengolahan limbah pertanian dan biogas
5	Pengelolaan Air	Tantangan pengelolaan berkelanjutan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan yang meningkat	Proyeksi peningkatan kebutuhan air minum dari 35.890.690 liter (2023) menjadi 45.757.690 liter (2045)
6	Kompetisi Sumber Daya Air	Potensi kompetisi penggunaan sumber daya air antar daerah	Keterbatasan pengelolaan sumber daya air tiga sungai utama (Barito, Kapuas, dan Negara)
7	Perubahan Iklim	Tantangan pengelolaan sumber daya air akibat perubahan iklim	Potensi dampak pada ketersediaan dan kualitas air

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
8	Pengolahan Hasil Pertanian	Belum optimalnya sistem pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian	Surplus produksi beras yang belum dimanfaatkan secara optimal
9	Kesenjangan Produktivitas	Perbedaan produktivitas pertanian antar kecamatan	Kecamatan Marabahan hanya memproduksi 250 ton GKG dan Kecamatan Kuripan belum tercatat produksinya
10	Teknologi Pertanian	Kebutuhan teknologi dan pendekatan pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal	Belum optimalnya pemanfaatan karakteristik geografis untuk pengembangan varietas tanaman pangan adaptif

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Terkait kemandirian pangan, Kabupaten Barito Kuala memiliki surplus produksi beras yang signifikan, namun permasalahan terletak pada optimalisasi potensi ini melalui pengembangan sistem pengolahan dan penyimpanan hasil pertanian. Perbedaan produktivitas antar kecamatan juga menjadi permasalahan, dengan beberapa wilayah seperti Kecamatan Marabahan yang hanya memproduksi 250 ton GKG dan Kecamatan Kuripan yang belum tercatat produksinya. Perbedaan produktivitas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kondisi lahan, infrastruktur pertanian, dan kapasitas sumber daya manusia di masing-masing kecamatan. Karakteristik geografis yang unik dengan dataran rendah dan rawa pasang surut memberikan peluang untuk pengembangan varietas tanaman pangan adaptif, namun memerlukan dukungan teknologi dan pendekatan pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal untuk mengoptimalkan produktivitas lahan.

2.6.1.1.5 Lingkungan Hidup Berkualitas

Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) menunjukkan tren peningkatan dari 54,13 pada tahun 2020 ke 63,41 pada tahun 2022, namun mengalami penurunan marginal menjadi 62,66 pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan adanya tekanan dari sektor pembangunan dan pertumbuhan demografi yang semakin dinamis, di mana perluasan kawasan industri dan infrastruktur, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, dapat meningkatkan intensitas penggunaan sumber daya alam. Nilai IKLH di kisaran 60-an mengindikasikan kondisi lingkungan yang sedang dan masih belum mencapai standar

optimal, sehingga diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dalam pengelolaan lingkungan yang mengintegrasikan aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan konservasi lingkungan untuk mendorong kualitas lingkungan hidup yang lebih baik.

Tabel II-76
Permasalahan Lingkungan Hidup Berkualitas Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Tren Kualitas Lingkungan	Penurunan marginal IKLH setelah sebelumnya mengalami peningkatan	Penurunan dari 63,41 (2022) menjadi 62,66 (2023)
2	Standar Kualitas Lingkungan	IKLH masih dalam kategori sedang dan belum mencapai standar optimal	IKLH di kisaran 60-an (standar optimal >70)
3	Tekanan Lingkungan	Tekanan dari sektor pembangunan dan pertumbuhan demografi yang dinamis	Perluasan kawasan industri, infrastruktur, dan pertumbuhan penduduk
4	Kualitas Udara	Penurunan marginal IKU meskipun masih dalam kategori baik	Penurunan IKU pada tahun 2022 (92,63)
5	Kerentanan Kualitas Udara	Kualitas udara tetap rentan terhadap perubahan dan tekanan lingkungan	Fluktuasi nilai IKU yang masih terjadi
6	Kualitas Air	Kualitas air masih menjadi permasalahan utama dengan IKA pada level menengah	IKA berada pada level 57,39 (2024)
7	Standar Kualitas Air	Belum tercapainya standar kualitas air yang optimal	Nilai IKA masih jauh dari ideal meskipun meningkat dari 52,61 (2020)
8	Pengelolaan Limbah	Kebutuhan peningkatan sistem pengolahan limbah	IKA yang masih pada level menengah
9	Implementasi Regulasi	Perlu penguatan implementasi regulasi lingkungan terkait kualitas air	Belum optimalnya kualitas air meskipun ada peningkatan
10	Keberlanjutan Pengelolaan Air	Evaluasi dan penguatan kebijakan pengelolaan air secara berkelanjutan	Perlunya memperhatikan dinamika pembangunan dan pertumbuhan demografi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Indeks Kualitas Udara (IKU) Kabupaten Barito Kuala tergolong baik dengan nilai di kisaran 92 hingga 93, menunjukkan efektivitas berbagai kebijakan pengelolaan lingkungan seperti pengendalian emisi, peningkatan ruang terbuka hijau, dan penguatan

sistem pengawasan lingkungan. Namun, perlu diperhatikan penurunan marginal yang terjadi pada tahun 2022 (nilai 92,63), menunjukkan bahwa kualitas udara tetap rentan terhadap perubahan dan tekanan lingkungan, meskipun secara keseluruhan masih dalam kategori baik. Kondisi kualitas udara yang optimal ini memiliki implikasi signifikan terhadap kapasitas pembangunan daerah, di mana lingkungan dengan kualitas udara yang terjaga tidak hanya meningkatkan kesehatan dan produktivitas masyarakat, tetapi juga menjadi daya tarik tersendiri bagi investor dan pelaku industri, sehingga membuka peluang bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Berbeda dengan kualitas udara, kualitas air di Kabupaten Barito Kuala masih menjadi permasalahan utama dengan Indeks Kualitas Air (IKA) yang berada pada level menengah, meskipun menunjukkan peningkatan dari 52,61 pada tahun 2020 hingga 57,39 pada tahun 2024. Nilai-nilai tersebut mengindikasikan bahwa meskipun telah terjadi perbaikan, masih terdapat ruang untuk peningkatan guna mencapai standar kualitas air yang optimal. Tren peningkatan IKA mencerminkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan seperti peningkatan sistem pengolahan limbah, implementasi regulasi yang lebih ketat, serta peningkatan infrastruktur pengawasan telah mampu mengimbangi dampak negatif dari pembangunan dan industrialisasi, namun masih diperlukan evaluasi dan penguatan kebijakan pengelolaan air secara berkelanjutan, dengan memperhatikan dinamika pembangunan dan pertumbuhan demografi yang terus berkembang.

2.6.1.1.6 Resilensi Bencana dan Perubahan Iklim

Kabupaten Barito Kuala memiliki kerentanan terhadap bencana terutama banjir di kawasan Tabunganen, Alalak, Anjir Muara, dan Tamban, yang disebabkan oleh karakteristik geografis berupa mayoritas dataran rendah dengan ketinggian 0,2–3 m di atas permukaan laut. Data Indeks Risiko Bencana (IRB) menunjukkan fluktuasi signifikan, dengan penurunan dari 155,45 pada tahun 2018 menjadi 140,65 pada tahun 2020, namun kemudian meningkat kembali menjadi 149,60 pada tahun 2021, menunjukkan adanya tantangan baru dalam mengelola risiko bencana. Peningkatan risiko bencana ini dapat disebabkan oleh faktor-faktor seperti perubahan iklim, peningkatan intensitas curah hujan, atau kerawanan sosial-ekonomi yang meningkat, sehingga diperlukan pendekatan yang komprehensif dalam pengelolaan risiko bencana yang mengintegrasikan aspek mitigasi, kesiapsiagaan, dan respons bencana.

Jaringan saluran drainase yang belum optimal seperti Saluran Drainase Tamban dan Anjir Pasar meningkatkan risiko banjir di wilayah-wilayah yang terkoneksi, terutama pada musim hujan dengan intensitas tinggi. Variabilitas curah hujan tahunan (2.016–3.378 mm pada 2019–2023) mempengaruhi tingkat risiko banjir, dengan tahun-tahun yang memiliki curah hujan tinggi (seperti 2020 dengan 3.378 mm) meningkatkan risiko banjir besar. Keterbatasan kapasitas dalam menghadapi dinamika perubahan iklim dan fenomena cuaca ekstrem menjadi permasalahan yang semakin meningkat seiring dengan tren perubahan iklim global yang meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Barito Kuala.

Tabel II-77
Permasalahan Resilensi Bencana dan Perubahan Iklim Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Kerentanan Geografis	Kerentanan terhadap bencana banjir karena karakteristik geografis	Mayoritas wilayah berupa dataran rendah dengan ketinggian 0,2-3 m di atas permukaan laut
2	Fluktuasi Risiko Bencana	Indeks Risiko Bencana menunjukkan fluktuasi signifikan	Penurunan dari 155,45 (2018) ke 140,65 (2020), lalu meningkat kembali menjadi 149,60 (2021)
3	Faktor Pemicu Bencana	Perubahan iklim, intensitas curah hujan, dan kerawanan sosial-ekonomi	Peningkatan risiko bencana yang membutuhkan pendekatan komprehensif
4	Jaringan Drainase	Jaringan saluran drainase yang belum optimal	Saluran Drainase Tamban dan Anjir Pasar belum optimal
5	Variabilitas Curah Hujan	Variabilitas curah hujan tahunan mempengaruhi tingkat risiko banjir	Rentang curah hujan 2.016-3.378 mm (2019-2023)
6	Fenomena Cuaca Ekstrem	Keterbatasan kapasitas menghadapi dinamika perubahan iklim dan cuaca ekstrem	Tren perubahan iklim global meningkatkan frekuensi dan intensitas bencana alam
7	Kerentanan Sosial-Ekonomi	Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi lebih rentan terhadap dampak bencana	Anjir Muara dengan 6.892 jiwa penduduk miskin
8	Keterbatasan Akses	Keterbatasan akses sumber daya dan infrastruktur di daerah rentan bencana	Kaitan erat antara kerawanan sosial-ekonomi dengan kerentanan terhadap bencana

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
9	Kawasan Rawan Bencana	Kawasan rawan bencana perlu fokus perencanaan mitigasi risiko	Tabunganen, Alalak, dan Anjir Muara memiliki kombinasi risiko banjir, kerawanan sosial, dan infrastruktur yang belum memadai
10	Ketahanan Daerah	Perlunya pendekatan terpadu untuk meningkatkan ketahanan daerah	Kolaborasi pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan risiko bencana

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi (seperti Anjir Muara dengan 6.892 jiwa penduduk miskin) lebih rentan terhadap dampak bencana karena keterbatasan akses sumber daya dan infrastruktur, menunjukkan adanya kaitan erat antara kerawanan sosial-ekonomi dengan kerentanan terhadap bencana. Kawasan rawan bencana seperti Tabunganen, Alalak, dan Anjir Muara perlu menjadi fokus utama dalam perencanaan mitigasi risiko karena kombinasi risiko banjir, kerawanan sosial, dan infrastruktur yang belum memadai. Dengan pendekatan terpadu antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, risiko bencana dapat dikelola secara efektif untuk meningkatkan ketahanan daerah terhadap ancaman bencana dan dampak perubahan iklim, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

2.6.1.1.7 Demografi

Kabupaten Barito Kuala mengalami pertumbuhan populasi yang konsisten selama periode 2020–2024, dengan jumlah penduduk meningkat dari 313.595 jiwa pada tahun 2020 menjadi 326.740 jiwa pada tahun 2024, namun dengan laju pertumbuhan yang cenderung menurun, dari 1,52% pada tahun 2021–2022 menjadi 0,69% pada tahun 2023–2024. Kepadatan penduduk juga meningkat secara konsisten dari 104,65 jiwa/km² pada tahun 2020 menjadi 108,98 jiwa/km² pada tahun 2024, dengan pertumbuhan kepadatan tahunan berkisar antara 0,9%–1,3%. Pertumbuhan kepadatan penduduk mencerminkan dinamika sosial-ekonomi Kabupaten Barito Kuala, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti migrasi positif karena kesempatan ekonomi di sektor pertanian, perikanan, dan industri kecil, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan dan

pendidikan, serta implementasi program keluarga berencana yang berkontribusi pada penurunan angka kelahiran.

Permasalahan utama terkait demografi di Kabupaten Barito Kuala adalah ketidakmerataan distribusi penduduk antar kecamatan, dengan kepadatan tertinggi di Kecamatan Alalak (208,7 jiwa/km²) dan terendah di Kecamatan Kuripan (20,4 jiwa/km²). Ketidakmerataan ini dipengaruhi oleh faktor geografis dan infrastruktur, di mana kecamatan dengan kepadatan tinggi seperti Alalak menghadapi tantangan terkait tekanan pada infrastruktur dan layanan publik, sementara kecamatan dengan kepadatan rendah seperti Kuripan menghadapi tantangan terkait aksesibilitas dan efisiensi penyediaan layanan publik. Kondisi ini memerlukan pendekatan pembangunan yang diferensial untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik masing-masing wilayah, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan dan distribusi penduduk yang lebih seimbang.

Tabel II-78
Permasalahan Demografi Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	Laju pertumbuhan penduduk yang cenderung menurun	Penurunan dari 1,52% (2021-2022) menjadi 0,69% (2023-2024)
2	Pertumbuhan Kepadatan	Pertumbuhan kepadatan penduduk konsisten namun terkendali	Peningkatan dari 104,65 jiwa/km ² (2020) menjadi 108,98 jiwa/km ² (2024)
3	Ketidakmerataan Distribusi	Ketidakmerataan distribusi penduduk antar kecamatan	Kepadatan tertinggi di Kecamatan Alalak (208,7 jiwa/km ²) dan terendah di Kecamatan Kuripan (20,4 jiwa/km ²)
4	Faktor Geografis	Pengaruh faktor geografis terhadap distribusi penduduk	Perbedaan karakteristik geografis antar kecamatan
5	Tekanan Infrastruktur	Tekanan pada infrastruktur dan layanan publik di kecamatan padat penduduk	Kecamatan Alalak dengan kepadatan tinggi menghadapi tantangan terkait infrastruktur
6	Efisiensi Layanan Publik	Tantangan efisiensi penyediaan layanan publik di kecamatan dengan kepadatan rendah	Kecamatan Kuripan dengan kepadatan rendah menghadapi tantangan aksesibilitas

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
7	Pengelolaan Sumber Daya	Kebutuhan pengelolaan sumber daya berkelanjutan untuk mengantisipasi tekanan demografis	Penggunaan lahan pertanian dan sumber daya air yang berkelanjutan
8	Kesenjangan Pembangunan	Kesenjangan pembangunan antar wilayah	Kecamatan dengan pertumbuhan rendah seperti Jejangkit membutuhkan program pemberdayaan ekonomi
9	Kawasan Rawan Bencana	Kerentanan kawasan padat penduduk terhadap bencana	Kawasan Alalak dan Tabunganen memiliki risiko banjir dan tanah longsor tinggi
10	Strategi Pembangunan	Kebutuhan strategi pembangunan yang inklusif dan merata	Perlunya pendekatan diferensial untuk mengakomodasi kebutuhan spesifik tiap wilayah

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Pertumbuhan kepadatan penduduk yang terkendali tetapi tetap signifikan membutuhkan perencanaan holistik, termasuk pengelolaan sumber daya seperti penggunaan lahan pertanian dan sumber daya air yang berkelanjutan untuk mengantisipasi tekanan demografis. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di kecamatan dengan pertumbuhan rendah (seperti Jejangkit) menjadi prioritas untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah. Kawasan rawan seperti Alalak dan Tabunganen perlu dilengkapi dengan infrastruktur tanggap bencana, mengingat risiko banjir dan tanah longsor yang tinggi di wilayah tersebut. Dengan memanfaatkan potensi demografisnya melalui strategi pembangunan inklusif, Kabupaten Barito Kuala dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara merata, sekaligus mendukung perannya sebagai wilayah pendukung IKN dan pusat pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan.

2.6.1.2 Permasalahan Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.6.1.2.1 Kesejahteraan Ekonomi

2.6.1.2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia

Meskipun IPM Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari 68,65 pada tahun 2020 menjadi 74,28 pada tahun 2024, pola pertumbuhan yang tidak merata dengan akselerasi signifikan pada periode 2023-2024 (peningkatan 3,61 poin) menimbulkan permasalahan terkait keberlanjutan pembangunan manusia. Dalam jangka pendek, pertumbuhan IPM yang tidak konsisten menyebabkan kesulitan dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan, serta berpotensi menimbulkan alokasi sumber daya yang tidak efisien. Program-program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak terkoordinasi dengan baik dan tidak mencapai sasaran yang tepat karena didasarkan pada pola pertumbuhan yang fluktuatif.

Tabel II-79
Permasalahan pada capaian IPM Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Pola Pertumbuhan IPM	Pertumbuhan IPM tidak merata dengan akselerasi signifikan pada periode tertentu	Peningkatan signifikan 3,61 poin pada periode 2023-2024
2	Keberlanjutan Pembangunan	Permasalahan keberlanjutan pembangunan manusia akibat pola pertumbuhan yang tidak konsisten	Peningkatan IPM dari 68,65 (2020) menjadi 74,28 (2024) dengan pola tidak merata
3	Perencanaan Program	Kesulitan dalam perencanaan dan evaluasi program pembangunan	Pertumbuhan IPM yang tidak konsisten menyebabkan perencanaan tidak optimal
4	Alokasi Sumber Daya	Potensi alokasi sumber daya yang tidak efisien	Program peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi tidak terkoordinasi dengan baik
5	Kesenjangan Wilayah	Potensi kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam kabupaten	Beberapa kecamatan mengalami kemajuan lebih cepat sementara yang lain tertinggal
6	Daya Saing Regional	Ancaman terhadap posisi kabupaten dalam	Selisih dengan IPM provinsi semakin kecil (0,91 poin pada

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
		persaingan regional dan nasional	2024) namun berisiko kembali tertinggal
7	Transformasi Ekonomi	Potensi hambatan transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier	Membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi
8	Pengentasan Kemiskinan	Perlambatan kemajuan dalam pengentasan kemiskinan	Mempengaruhi peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dalam jangka menengah, ketidakkonsistenan ini dapat menyebabkan kesenjangan pembangunan antar wilayah dalam kabupaten, dimana beberapa kecamatan mengalami kemajuan lebih cepat sementara yang lain tertinggal. Masyarakat mengalami ketidakpastian dalam akses terhadap layanan dasar dan peluang ekonomi, yang pada gilirannya mempengaruhi kualitas hidup mereka secara keseluruhan. Kondisi ini juga dapat menghambat investasi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia karena tidak adanya kejelasan arah pembangunan.

Dalam jangka panjang, ketidakmampuan mempertahankan momentum peningkatan IPM dapat mengancam posisi Kabupaten Barito Kuala dalam persaingan regional dan nasional. Meskipun saat ini IPM kabupaten semakin dekat dengan rata-rata provinsi (selisih hanya 0,91 poin pada 2024), tanpa strategi pembangunan manusia yang berkelanjutan, kabupaten berisiko kembali tertinggal. Hal ini dapat menghambat transformasi ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier yang membutuhkan tenaga kerja dengan keterampilan dan pendidikan yang lebih tinggi, serta memperlambat kemajuan dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.6.1.2.1.2 Kondisi Ekonomi Regional

Permasalahan utama dalam kondisi ekonomi regional Kabupaten Barito Kuala adalah laju pertumbuhan ekonomi yang moderat (meningkat dari 3,17% pada tahun 2021 menjadi 3,91% pada tahun 2023) namun masih di bawah standar ideal 5% untuk daerah dengan karakteristik serupa. Dalam jangka pendek, laju pertumbuhan yang rendah ini menyebabkan terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru, rendahnya

penyerapan tenaga kerja, dan minimnya peningkatan pendapatan masyarakat. Pemerintah daerah menghadapi kendala dalam penggalangan pendapatan asli daerah, yang pada gilirannya membatasi kemampuan untuk berinvestasi dalam infrastruktur dan layanan publik yang berkualitas.

Tabel II-80
Permasalahan Kondisi Ekonomi Regional

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan ekonomi moderat namun masih di bawah standar ideal	Peningkatan dari 3,17% (2021) menjadi 3,91% (2023), masih di bawah standar ideal 5%
2	Penciptaan Lapangan Kerja	Terbatasnya penciptaan lapangan kerja baru	Rendahnya penyerapan tenaga kerja akibat pertumbuhan ekonomi moderat
3	Pendapatan Masyarakat	Minimnya peningkatan pendapatan masyarakat	Terbatasnya peningkatan kesejahteraan ekonomi
4	Pendapatan Asli Daerah	Kendala dalam penggalangan pendapatan asli daerah	Keterbatasan kemampuan investasi dalam infrastruktur dan layanan publik
5	Transformasi Struktural	Perlambatan transformasi dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi lebih beragam	Ketergantungan pada sektor primer dengan produktivitas dan nilai tambah rendah
6	Adaptasi Ekonomi	Kemampuan terbatas untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan regional	Kesulitan mengikuti dinamika perubahan ekonomi
7	Persaingan Regional	Tertinggalnya kabupaten dalam persaingan ekonomi regional	Melebarnya kesenjangan pembangunan dengan kabupaten lain di Kalimantan Selatan
8	Stagnasi Ekonomi	Risiko stagnasi ekonomi jangka panjang tanpa akselerasi pertumbuhan	Peningkatan PDRB per kapita dari Rp28.971,39 ribu (2021) menjadi Rp32.387,86 ribu (2023) namun berisiko stagnan

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dalam jangka menengah, pertumbuhan ekonomi yang lambat memperlambat transformasi struktural dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi yang lebih beragam. Hal ini menyebabkan Kabupaten Barito Kuala tetap bergantung pada sektor primer dengan produktivitas dan nilai tambah rendah, sementara kabupaten tetangga bergerak lebih cepat dalam mengembangkan sektor industri dan jasa yang lebih produktif. Kondisi ini juga menghambat investasi dalam teknologi dan inovasi yang

diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor unggulan, serta membatasi kemampuan daerah untuk beradaptasi dengan perubahan ekonomi global dan regional.

Dampak jangka panjang paling signifikan adalah tertinggalnya Kabupaten Barito Kuala dalam persaingan ekonomi regional dan melebarnya kesenjangan pembangunan dengan kabupaten-kabupaten lain di Kalimantan Selatan. Meskipun PDRB per kapita meningkat dari Rp28.971,39 ribu pada tahun 2021 menjadi Rp32.387,86 ribu pada tahun 2023, tanpa akselerasi pertumbuhan ekonomi, kabupaten ini berisiko mengalami stagnasi ekonomi jangka panjang. Upaya pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan menjadi semakin sulit, dan peran kabupaten sebagai wilayah pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak dapat dioptimalkan. Tanpa diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas, daya saing ekonomi kabupaten akan semakin melemah, mengurangi peluang untuk menarik investasi dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi baru yang dapat mendorong pertumbuhan berkualitas dan berkelanjutan.

2.6.1.2.1.3 Dinamika Tingkat Kemiskinan

Meskipun persentase penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren penurunan dari 4,51% pada 2020 menjadi 3,66% pada 2024, peningkatan garis kemiskinan dari Rp340.526 per kapita per bulan (2020) menjadi Rp437.579 (2024) mengindikasikan tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan. Dalam jangka pendek, peningkatan garis kemiskinan sebesar 28,5% ini menyebabkan tekanan pada rumah tangga berpendapatan rendah yang harus mengalokasikan lebih banyak sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kelompok yang berada sedikit di atas garis kemiskinan (near poor) berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan akibat guncangan ekonomi seperti yang terjadi pada 2021, ketika persentase penduduk miskin meningkat menjadi 5,11%.

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Peningkatan Garis Kemiskinan	Peningkatan signifikan garis kemiskinan menjadi tantangan serius dalam pengentasan kemiskinan	Kenaikan dari Rp340.526 per kapita per bulan (2020) menjadi Rp437.579 (2024), meningkat 28,5%
2	Tekanan Ekonomi	Tekanan pada rumah tangga berpendapatan rendah untuk memenuhi kebutuhan dasar	Alokasi sumber daya yang lebih besar untuk kebutuhan dasar

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
3	Kelompok Rentan	Kelompok slightly above poverty line (near poor) berisiko jatuh ke bawah garis kemiskinan	Peningkatan persentase penduduk miskin menjadi 5,11% pada 2021 akibat guncangan ekonomi
4	Fluktuasi Tingkat Kemiskinan	Ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan	Tren penurunan dari 4,51% (2020) menjadi 3,66% (2024) namun dengan fluktuasi di antaranya

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dalam jangka menengah, fluktuasi tingkat kemiskinan menyebabkan ketidakpastian dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Sumber daya dialokasikan secara tidak efisien, dan intervensi kebijakan tidak tepat sasaran. Masyarakat yang rentan mengalami kesulitan dalam membangun ketahanan ekonomi karena ketidakstabilan kondisi sosial-ekonomi. Mobilitas sosial terhambat, dan siklus kemiskinan intergenerasional sulit untuk diputus karena keluarga miskin menghadapi kendala dalam berinvestasi untuk pendidikan dan kesehatan anak-anak mereka.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah terbentuknya kantong-kantong kemiskinan kronis yang sulit dientaskan. Meskipun data menunjukkan jumlah penduduk miskin mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir yakni 11.958 ribu jiwa pada 2024, laju pengentasan kemiskinan sebesar 1,45 poin persentase dalam lima tahun tergolong moderat. Tanpa percepatan, upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan waktu yang sangat lama, sementara dampak perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, dan dinamika global lainnya dapat menciptakan tantangan baru bagi kelompok miskin dan rentan. Ketimpangan struktural semakin mengakar, akses terhadap sumber daya produktif semakin tidak merata, dan konflik sosial potensial meningkat akibat persepsi ketidakadilan dalam distribusi manfaat pembangunan. Kemiskinan kronis juga berimplikasi pada rendahnya produktivitas tenaga kerja dan terhambatnya pembangunan ekonomi secara keseluruhan, menciptakan lingkaran setan antara kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi yang lambat.

2.6.1.2.1.4 Pengangguran dan Ketimpangan Ekonomi

Permasalahan pengangguran di Kabupaten Barito Kuala ditandai dengan peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dari 2,93% pada 2020 menjadi puncaknya 3,63% pada 2022, sebelum sedikit menurun menjadi 3,41% pada 2024. Secara paralel, ketimpangan ekonomi yang diukur dengan Indeks Gini menunjukkan tren peningkatan dari 0,277 (2020) hingga 0,312 (2023), sebelum sedikit menurun menjadi 0,301 (2024). Dalam jangka pendek, peningkatan pengangguran dan ketimpangan ini menyebabkan tekanan sosial-ekonomi pada rumah tangga, berkurangnya daya beli, dan potensi konflik sosial. Masyarakat mengalami penurunan kesejahteraan secara langsung, dan kelompok rentan seperti perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas cenderung paling terdampak oleh kondisi pasar kerja yang memburuk.

Tabel II-81
Permasalahan Pengangguran dan Ketimpangan Ekonomi Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Peningkatan Pengangguran	Peningkatan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	Kenaikan dari 2,93% (2020) menjadi puncaknya 3,63% (2022), lalu sedikit menurun menjadi 3,41% (2024)
2	Ketimpangan Ekonomi	Tren peningkatan ketimpangan ekonomi	Indeks Gini meningkat dari 0,277 (2020) menjadi 0,312 (2023), sebelum sedikit menurun menjadi 0,301 (2024)

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dalam jangka menengah, kombinasi pengangguran dan ketimpangan yang meningkat menciptakan polarisasi sosial-ekonomi yang lebih luas. Ketidaksesuaian keterampilan (skill mismatch) antara pencari kerja dan kebutuhan pasar tenaga kerja menyebabkan pengangguran struktural yang sulit diatasi dengan kebijakan jangka pendek. Kelompok berpendidikan rendah semakin tertinggal dalam persaingan pasar kerja yang semakin menuntut keterampilan tinggi dan adaptabilitas terhadap perubahan teknologi. Asinkronisasi antara TPT dan Indeks Gini, di mana ketimpangan terus meningkat meskipun pengangguran mulai menurun (seperti pada 2023), menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi tidak terdistribusi secara merata, dan kelompok berpendapatan rendah tidak mendapatkan bagian yang proporsional dari pemulihan ekonomi.

Dampak jangka panjang paling serius adalah terjadinya fragmentasi sosial dan ekonomi yang semakin dalam dalam masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Ketimpangan yang persisten (meskipun dalam kategori rendah dengan Indeks Gini $< 0,4$) menciptakan ketidaksetaraan kesempatan dalam pendidikan, kesehatan, dan akses terhadap layanan dasar lainnya. Mobilitas sosial terhambat, dan kesenjangan antargenerasi cenderung melebar. Pengangguran jangka panjang menyebabkan depresiasi modal manusia, di mana keterampilan pekerja menganggur menjadi usang dan semakin sulit untuk kembali ke pasar kerja. Dalam konteks transformasi ekonomi regional dan nasional, ketimpangan pendapatan dan keterampilan dapat menyebabkan Kabupaten Barito Kuala tertinggal semakin jauh dari daerah-daerah yang lebih maju. Peran kabupaten sebagai wilayah pendukung IKN juga terhambat karena keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan kesenjangan ekonomi regional. Tanpa intervensi yang tepat, kondisi ini dapat menciptakan lingkaran setan di mana pengangguran dan ketimpangan saling memperkuat, sehingga menghambat pembangunan inklusif dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

2.6.1.2.2 Kesehatan Untuk Semua

2.6.1.2.2.1 Angka Harapan Hidup

Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan konsisten dalam Angka Harapan Hidup (AHH) dari 71,37 tahun pada 2020 menjadi 72,52 tahun pada 2024, dengan pertambahan sebesar 1,15 tahun selama lima tahun. Meski menunjukkan tren positif, pola peningkatan AHH menampilkan ketidakseragaman dengan fluktuasi pertumbuhan tahunan yang mencapai puncak 0,53% pada periode 2021-2022 dan menurun hingga 0,33% pada 2023-2024. Ketidakkonsistenan ini mencerminkan adanya permasalahan dalam implementasi kebijakan kesehatan yang tidak merata.

Tabel II-82
Permasalahan Angka Harapan Hidup Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Ketidakkonsistenan Peningkatan	Pola peningkatan AHH yang tidak seragam	Fluktuasi pertumbuhan tahunan dari puncak 0,53% (2021-2022) menurun hingga 0,33% (2023-2024)

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
2	Implementasi Kebijakan	Permasalahan dalam implementasi kebijakan kesehatan yang tidak merata	Peningkatan AHH sebesar 1,15 tahun selama lima tahun (2020-2024) tapi dengan pola tidak konsisten
3	Disparitas Akses	Kesenjangan akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan	AHH Barito Kuala (72,52 tahun) tertinggal dari kabupaten perkotaan seperti Banjarmasin (73,8) dan Banjarbaru (74,2)
4	Transisi Demografis	Sistem kesehatan belum siap menghadapi aging population	Peningkatan proporsi penduduk lanjut usia dari 6,2% menjadi 7,5% dalam lima tahun terakhir
5	Target Nasional	Risiko tidak tercapainya target nasional AHH 75 tahun pada 2030	Perlu akselerasi peningkatan menjadi 0,35 tahun per tahun dari proyeksi saat ini yang hanya mencapai 73,45 tahun pada 2027

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dalam jangka pendek, ketidakmerataan peningkatan AHH berdampak pada sulitnya mengukur efektivitas program kesehatan yang sedang berjalan, mengakibatkan inefisiensi alokasi sumber daya dan ketidaktepatan intervensi kebijakan. Program-program kesehatan seperti pembangunan puskesmas pembantu di daerah terpencil dan layanan jemput bola tidak terimplementasi secara konsisten, menyebabkan variasi kualitas layanan kesehatan antar kecamatan. Disparitas akses terhadap layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan pedesaan juga memperburuk situasi, sehingga capaian AHH Barito Kuala (72,52 tahun) masih tertinggal dibandingkan kabupaten dengan karakteristik perkotaan seperti Banjarmasin (73,8 tahun) dan Banjarbaru (74,2 tahun).

Dalam jangka menengah, kesenjangan AHH antara Barito Kuala dengan kabupaten lain mengakibatkan ketimpangan pembangunan kesehatan regional. Ketidakmampuan mengejar ketertinggalan membuat masyarakat Barito Kuala menghadapi risiko kesehatan yang lebih tinggi. Transisi demografis dengan meningkatnya proporsi penduduk lanjut usia dari 6,2% menjadi 7,5% dalam lima tahun terakhir menambah beban pada sistem kesehatan yang belum siap menghadapi aging population. Keterbatasan fasilitas geriatri dan tenaga kesehatan spesialis

mengakibatkan pelayanan kesehatan untuk penduduk lanjut usia tidak optimal, sementara sistem rujukan terintegrasi yang menghubungkan fasilitas kesehatan primer, sekunder, dan tersier masih lemah.

Dalam jangka panjang, permasalahan AHH yang belum optimal berisiko menghambat produktivitas ekonomi daerah dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Untuk mencapai target nasional AHH 75 tahun pada 2030, Barito Kuala perlu mengakselerasi peningkatan menjadi 0,35 tahun per tahun dari proyeksi saat ini yang hanya mencapai 73,45 tahun pada 2027. Tanpa akselerasi ini, Kabupaten Barito Kuala akan semakin tertinggal dalam pembangunan kesehatan. Keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, terutama di daerah terpencil, akan mengakibatkan beban penyakit yang lebih tinggi. Kondisi ini diperparah dengan rendahnya cakupan program skrining dan deteksi dini penyakit kronis non-komunikabel, sehingga peningkatan kasus penyakit tidak menular akan membebani sistem kesehatan di masa depan dan menurunkan produktivitas masyarakat usia produktif.

2.6.1.2.2.2 Prevalensi Stunting

Permasalahan prevalensi stunting di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan pola fluktuatif yang ekstrem selama periode 2020-2024, dengan nilai berkisar dari 15,2% pada 2020, menurun menjadi 14,56% pada 2021, melonjak drastis hingga 33,6% pada 2022, kemudian menurun signifikan menjadi 15,9% pada 2023 dan mencapai 10,39% pada 2024. Fluktuasi dramatis ini, terutama lonjakan ekstrem pada 2022, mengindikasikan adanya inkonsistensi dalam metodologi pengukuran dan sistem pendataan yang berpotensi mengganggu perencanaan dan evaluasi program penanggulangan stunting.

Tabel II-83
Permasalahan Prevalensi Stunting

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Fluktuasi Data	Pola fluktuatif ekstrem dalam prevalensi stunting	Nilai berkisar dari 15,2% (2020), 14,56% (2021), 33,6% (2022), 15,9% (2023), dan 10,39% (2024)
2	Inkonsistensi Metodologi	Inkonsistensi dalam metodologi pengukuran dan sistem pendataan	Lonjakan ekstrem pada 2022 yang tidak konsisten dengan tren tahun-tahun lainnya

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
3	Sistem Surveilans	Kelemahan sistem surveilans gizi	Ketidakmampuan mendeteksi kasus stunting secara komprehensif, terutama di daerah terpencil
4	Ketepatan Intervensi	Intervensi tidak tepat sasaran akibat ketidakakuratan data	Keraguan apakah penurunan drastis pada 2023-2024 mencerminkan perbaikan nyata atau koreksi metodologis
5	Disparitas Spasial	Ketidakmerataan implementasi program antar kecamatan	Kecamatan dengan aksesibilitas baik mencatat penurunan >60%, sementara kecamatan kepulauan dan rawa hanya 30-45%
6	Faktor Penyebab	Distribusi faktor penyebab stunting tidak ditangani secara komprehensif	Akses pangan tetap menjadi tantangan (9%) meskipun faktor kesadaran gizi dan praktik pemberian makan membaik

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dalam jangka pendek, fluktuasi data stunting menciptakan kebingungan dalam penentuan prioritas intervensi dan alokasi sumber daya. Lonjakan data pada 2022 yang mencapai lebih dari dua kali lipat angka tahun sebelumnya menunjukkan kelemahan sistem surveilans gizi yang tidak mampu mendeteksi kasus stunting secara komprehensif, terutama di daerah terpencil. Ketidakakuratan data mengakibatkan intervensi yang tidak tepat sasaran, sehingga meskipun terjadi penurunan drastis pada 2023-2024, terdapat keraguan apakah penurunan tersebut mencerminkan perbaikan nyata atau hanya koreksi metodologis. Disparitas spasial dalam penurunan prevalensi, di mana kecamatan dengan aksesibilitas baik seperti Alalak, Mandastana, dan Wanaraya mencatat penurunan lebih dari 60% sementara kecamatan dengan karakteristik kepulauan dan rawa seperti Tabunganen dan Belawang hanya 30-45%, menunjukkan ketidakmerataan implementasi program.

Dalam jangka menengah, permasalahan distribusi faktor penyebab stunting yang tidak ditangani secara komprehensif berpotensi menghambat keberlanjutan penurunan prevalensi stunting. Meskipun intervensi edukasi dan promosi kesehatan berhasil menurunkan kontribusi faktor kesadaran gizi dari 37% menjadi 18% dan praktik pemberian makan tidak adekuat dari 29% menjadi 15%, akses pangan tetap menjadi tantangan (9%). Ketahanan pangan keluarga yang lemah, terutama di masa pandemi dan pasca-pandemi, membatasi kemampuan keluarga untuk menyediakan makanan

bergizi. Keberhasilan penurunan prevalensi stunting hingga 10,39% pada 2024 juga berisiko menciptakan kesan bahwa masalah stunting sudah teratasi, padahal tanpa upaya pemantapan dan integrasi program, prevalensi stunting bisa kembali meningkat.

Dalam jangka panjang, permasalahan stunting yang tidak ditangani secara berkelanjutan akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala. Meskipun capaian prevalensi 10,39% pada 2024 menempatkan Barito Kuala dalam kategori prevalensi rendah menurut WHO dan mencapai target nasional lebih cepat, tantangan keberlanjutan program pencegahan stunting tetap ada. Ketergantungan pada pendekatan konvergensi lintas sektor tanpa institusionalisasi yang kuat berisiko melemahkan sistem pencegahan stunting jika terjadi perubahan prioritas kebijakan. Perubahan iklim yang mengancam ketahanan pangan, ketidaksiapan sistem jaminan sosial bagi keluarga rentan, dan kelemahan sistem surveilans gizi terintegrasi hingga tingkat desa berpotensi menghambat upaya mempertahankan prevalensi stunting di bawah 10%. Tanpa penguatan sistem pencegahan stunting yang terintegrasi dalam sistem kesehatan dasar, capaian positif saat ini tidak akan berlanjut, mengakibatkan generasi masa depan Barito Kuala tetap berisiko mengalami gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang berdampak pada produktivitas dan daya saing daerah dalam jangka panjang.

2.6.1.2.3 Pendidikan Berkualitas yang Merata

2.6.1.2.3.1 Rata-rata Lama Sekolah

Kabupaten Barito Kuala mencatat peningkatan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dari 7,34 tahun pada 2020 menjadi 7,74 tahun pada 2023, dengan penambahan total 0,40 tahun dalam kurun waktu empat tahun. Meskipun menunjukkan tren positif, RLS Barito Kuala yang hanya 7,74 tahun masih berada di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Selatan (8,42 tahun) dan nasional (8,69 tahun), mengindikasikan adanya permasalahan struktural dalam sistem pendidikan di daerah ini.

Tabel II-84
Permasalahan pada Rata-rata Lama Sekolah Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Rendahnya RLS	Rata-rata Lama Sekolah masih rendah dibanding rata-rata provinsi dan nasional	RLS Barito Kuala 7,74 tahun vs provinsi 8,42 tahun dan nasional 8,69 tahun (2023)
2	Lambatnya Peningkatan	Laju kenaikan RLS terlalu lambat untuk mencapai target nasional	Peningkatan hanya 0,133 tahun per tahun, membutuhkan 9,5 tahun untuk mencapai target nasional 9 tahun
3	Disparitas Antar Kecamatan	Kesenjangan RLS antar kecamatan yang signifikan	Selisih hingga 2,1 tahun antara kecamatan tertinggi (Alalak: 8,67) dan terendah (Tabunganen: 6,57)
4	Rendahnya Transisi Pendidikan	Rendahnya tingkat transisi dari SMP ke SMA/SMK	Tingkat transisi hanya 68,4% pada 2023
5	Kualitas Pendidikan	Peningkatan kuantitas (RLS) tidak diimbangi dengan kualitas	Hasil Asesmen Nasional 2023 menunjukkan literasi dan numerasi masih di bawah rata-rata nasional
6	Kesenjangan Gender	Meskipun membaik, masih ada kesenjangan gender dalam pendidikan	RLS perempuan meningkat lebih cepat (0,46 tahun) dibandingkan laki-laki (0,34 tahun) selama 2020-2023
7	Implikasi Ekonomi	Risiko ketidakmampuan daerah beradaptasi dengan ekonomi berbasis pengetahuan	Korelasi rendahnya RLS dengan produktivitas tenaga kerja dan terbatasnya inovasi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Permasalahan jangka pendek, laju kenaikan RLS sebesar 0,133 tahun per tahun terlalu lambat untuk mencapai target nasional 9 tahun pada 2025. Dengan laju pertumbuhan saat ini, Barito Kuala memerlukan waktu sekitar 9,5 tahun untuk mencapai target tersebut, jauh melampaui tenggat waktu yang ditetapkan. Disparitas RLS antar kecamatan yang cukup besar, dengan selisih hingga 2,1 tahun antara kecamatan tertinggi (Alalak: 8,67 tahun) dan terendah (Tabunganen: 6,57 tahun), menunjukkan ketidakmerataan distribusi sumber daya pendidikan dan akses yang tidak setara. Rendahnya transisi dari SMP ke SMA/SMK (hanya 68,4% pada 2023) menjadi bottleneck utama dalam peningkatan RLS, mengakibatkan banyak siswa tidak

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan berdampak langsung pada rendahnya rata-rata lama sekolah.

Dalam jangka menengah, kesenjangan RLS yang persisten dengan rata-rata provinsi dan nasional membuat Kabupaten Barito Kuala tertinggal dalam kompetisi sumber daya manusia. Keterbatasan infrastruktur pendidikan menengah atas dan kejuruan serta faktor sosio-kultural yang masih mempengaruhi persepsi terhadap nilai pendidikan formal membuat upaya peningkatan RLS semakin kompleks. Meski terjadi peningkatan kuantitas (RLS), dimensi kualitas pendidikan masih menjadi tantangan serius. Hasil Asesmen Nasional 2023 menunjukkan bahwa literasi dan numerasi siswa Barito Kuala masih berada di bawah rata-rata nasional, mengindikasikan bahwa tambahan tahun bersekolah tidak serta merta meningkatkan kompetensi siswa. Kesenjangan gender dalam pendidikan, meskipun sudah menunjukkan tren penyempitan dengan RLS perempuan meningkat lebih cepat (0,46 tahun) dibandingkan laki-laki (0,34 tahun) selama 2020-2023, tetap memerlukan upaya konsisten untuk memberikan akses pendidikan yang setara.

Dalam jangka panjang, rendahnya RLS berisiko menciptakan ketidakmampuan daerah untuk beradaptasi dengan tuntutan ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi. Keterbelakangan pendidikan berkorelasi dengan rendahnya produktivitas tenaga kerja, terbatasnya inovasi, dan kesulitan untuk keluar dari perangkap ekonomi berpendapatan rendah. Ketergantungan pada sektor primer dengan nilai tambah rendah akan semakin sulit diubah tanpa peningkatan signifikan dalam tingkat pendidikan rata-rata masyarakat. Tanpa akselerasi dan inovasi untuk mengatasi tantangan struktural dalam sistem pendidikan, Kabupaten Barito Kuala berisiko semakin tertinggal dalam pembangunan sumber daya manusia dibandingkan daerah lain. Kesenjangan pendidikan yang berujung pada kesenjangan ekonomi dan sosial ini akan semakin sulit diatasi seiring berjalannya waktu, menciptakan polarisasi masyarakat dan memperlambat pembangunan daerah secara keseluruhan.

2.6.1.2.3.2 Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan gradual dari 12,39 tahun pada 2020 menjadi 12,56 tahun pada 2024, dengan total pertambahan hanya 0,17 tahun dalam kurun waktu lima tahun. Pola

pertumbuhan HLS menunjukkan tiga fase berbeda: fase pertama (2020-2021) dengan peningkatan minimal 0,01 tahun akibat dampak pandemi COVID-19, fase kedua (2021-2022) dengan lompatan signifikan 0,14 tahun saat pemulihan pascapandemi, dan fase ketiga (2022-2024) dengan stabilisasi pada peningkatan marginal 0,01-0,02 tahun per tahun. Tren peningkatan yang sangat lambat ini menunjukkan adanya permasalahan serius dalam ekspektasi lamanya pendidikan yang akan diperoleh anak-anak di daerah ini.

Dalam jangka pendek, perlambatan peningkatan HLS pada periode 2022-2024 mengindikasikan keterbatasan inovasi kebijakan pendidikan dan belum optimalnya koordinasi lintas sektor. Kesenjangan wilayah dengan disparitas HLS antar kecamatan mencapai 2,3 tahun, diperparah oleh konsentrasi fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan dan keterbatasan akses di wilayah kepulauan dan rawa, menciptakan ketidakadilan dalam akses pendidikan. Kualitas pembelajaran yang masih menjadi tantangan dengan rasio guru berkualifikasi S1 yang baru mencapai 82%, keterbatasan laboratorium dan perpustakaan, serta infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, menyebabkan banyak siswa tidak mendapatkan pengalaman pendidikan yang optimal dan berpotensi mendorong putus sekolah yang lebih awal dari yang diharapkan.

Tabel II-85
Permasalahan pada Harapan Lama Sekolah Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Lambatnya Peningkatan HLS	Pertumbuhan HLS sangat lambat	Peningkatan hanya 0,17 tahun dalam kurun waktu lima tahun (2020-2024)
2	Fase Pertumbuhan Tidak Merata	Pola pertumbuhan HLS menunjukkan tiga fase berbeda dengan ketidakstabilan	Fase 1 (2020-2021): minimal 0,01 tahun; Fase 2 (2021-2022): signifikan 0,14 tahun; Fase 3 (2022-2024): stagnan 0,01-0,02 tahun per tahun
3	Disparitas Wilayah	Kesenjangan HLS antar kecamatan yang signifikan	Disparitas HLS antar kecamatan mencapai 2,3 tahun
4	Konsentrasi Fasilitas	Konsentrasi fasilitas pendidikan di wilayah perkotaan	Keterbatasan akses di wilayah kepulauan dan rawa
5	Kualitas Pembelajaran	Tantangan kualitas pembelajaran yang	Rasio guru berkualifikasi S1 baru mencapai 82%;

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
		mempengaruhi retensi siswa	keterbatasan laboratorium, perpustakaan, dan infrastruktur TI
6	Aksesibilitas Pendidikan	Tantangan aksesibilitas terutama di daerah terpencil	Meskipun ada penurunan jarak tempuh (dari 3,5 km menjadi 2,8 km), masih menjadi hambatan
7	Stagnasi Ekspektasi	HLS hanya sekitar 12,5 tahun mengindikasikan ekspektasi hanya sampai sedikit di atas SMA/SMK	Rendahnya ekspektasi melanjutkan ke pendidikan tinggi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dalam jangka menengah, keberlanjutan program pendidikan menghadapi kendala berupa ketergantungan tinggi pada APBD, fluktuasi anggaran pendidikan, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal. Kondisi ini membatasi kemampuan daerah untuk mengembangkan program-program inovatif yang dapat meningkatkan retensi siswa dalam sistem pendidikan dan mengakselerasi pertumbuhan HLS. Permasalahan aksesibilitas pendidikan, meskipun telah ada penurunan rata-rata jarak tempuh ke sekolah dari 3,5 km menjadi 2,8 km dan peningkatan layanan transportasi sekolah di 8 kecamatan, tetap menjadi hambatan serius terutama bagi siswa di daerah terpencil. Ketidakmampuan untuk menyediakan akses pendidikan yang mudah dan terjangkau bagi semua anak usia sekolah berdampak langsung pada rendahnya ekspektasi lama sekolah.

Dalam jangka panjang, stagnasi HLS pada angka sekitar 12,5 tahun mengindikasikan bahwa rata-rata anak di Kabupaten Barito Kuala hanya diharapkan menyelesaikan pendidikan sedikit di atas jenjang SMA/SMK, tanpa melanjutkan ke pendidikan tinggi. Keterbatasan ekspektasi ini akan berdampak pada kualitas sumber daya manusia daerah, yang pada gilirannya mempengaruhi daya saing ekonomi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan global. Tanpa reorientasi kebijakan pendidikan sebagaimana ditekankan oleh Sudrajat (2024), meliputi revitalisasi sekolah di daerah terpencil, pengembangan model pembelajaran adaptif, diversifikasi pembiayaan pendidikan, penguatan kemitraan pemerintah-swasta, dan pengembangan pendidikan vokasi berbasis potensi lokal, Kabupaten Barito Kuala akan kesulitan meningkatkan HLS secara signifikan. Kegagalan dalam mengakselerasi peningkatan

ekspektasi lama sekolah ini akan mengakibatkan daerah terjebak dalam siklus rendahnya kualitas pendidikan, terbatasnya kesempatan ekonomi, dan berlanjutnya kesenjangan sosial, yang semakin sulit diputus seiring berjalannya waktu.

2.6.1.2.4 Perlindungan Sosial yang Adaptif

2.6.1.2.4.1 Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan serius dalam kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) yang menunjukkan stagnasi selama periode 2020-2022. Data menunjukkan bahwa jumlah peserta hanya meningkat dari 9.988 orang pada tahun 2020 menjadi 10.007 orang pada 2021 (pertumbuhan 0,19%), dan kembali turun ke 9.988 orang pada 2022. Permasalahan ini diperburuk dengan penurunan proporsi kepesertaan dibandingkan tingkat provinsi, dari 3,38% pada tahun 2020 menjadi 3,27% pada 2022, mengindikasikan pertumbuhan sektor formal yang lebih lambat di Barito Kuala dibandingkan kabupaten/kota lain di Kalimantan Selatan.

Dampak jangka pendek dari rendahnya pertumbuhan kepesertaan Jamsostek yang jauh di bawah rata-rata provinsi mengakibatkan tenaga kerja di Kabupaten Barito Kuala memiliki perlindungan sosial yang minim. Sekitar 90% pekerja di Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua, sehingga meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga pekerja dalam menghadapi risiko-risiko tersebut. Pekerja yang tidak terlindungi Jamsostek mengalami kesulitan finansial ketika menghadapi kecelakaan kerja, harus mengeluarkan biaya pengobatan sendiri, dan tidak memiliki tabungan hari tua yang memadai.

Tabel II-86
Permasalahan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Stagnasi Kepesertaan	Kepesertaan Jamsostek menunjukkan stagnasi bahkan penurunan	Peningkatan minimal dari 9.988 orang (2020) menjadi 10.007 orang (2021), lalu turun kembali ke 9.988 orang (2022)
2	Proporsi Kepesertaan	Penurunan proporsi kepesertaan dibandingkan tingkat provinsi	Penurunan dari 3,38% (2020) menjadi 3,27% (2022)

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
3	Minimnya Perlindungan Sosial	Sebagian besar pekerja tidak memiliki perlindungan sosial dasar	Sekitar 90% pekerja tidak memiliki jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, dan jaminan hari tua
4	Kerentanan Ekonomi	Peningkatan kerentanan ekonomi rumah tangga pekerja	Kesulitan finansial saat menghadapi kecelakaan kerja dan tidak adanya tabungan hari tua
5	Kesenjangan Kesejahteraan	Ketimpangan antara pekerja formal dan informal	Terbentuknya dua kelompok masyarakat pekerja dengan tingkat kesejahteraan berbeda signifikan
6	Penurunan Produktivitas	Penurunan produktivitas akibat ketidakpastian perlindungan	Penurunan produktivitas sekitar 15-20% karena kekhawatiran terhadap risiko tidak terlindungi
7	Risiko Kemiskinan Masa Tua	Risiko kemiskinan di masa tua akibat tidak memiliki jaminan pensiun	Diperkirakan 40-50% tenaga kerja akan menghadapi risiko kemiskinan di masa tua
8	Beban Fiskal	Peningkatan beban fiskal pemerintah untuk menangani kemiskinan lansia	Potensi peningkatan beban fiskal pemerintah daerah hingga 25-30%
9	Daya Tarik Investasi	Penurunan daya tarik investasi daerah	Penurunan daya tarik investasi hingga 20-25%

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka menengah dari ketidakmerataan perlindungan jaminan sosial menciptakan kesenjangan kesejahteraan yang semakin lebar antara pekerja formal yang terlindungi dengan pekerja informal yang tidak terlindungi. Hal ini mengakibatkan terbentuknya dua kelompok masyarakat pekerja dengan tingkat kesejahteraan yang berbeda signifikan. Produktivitas tenaga kerja menurun sekitar 15-20% karena pekerja yang tidak memiliki jaminan sosial cenderung kurang produktif akibat kekhawatiran terhadap risiko yang tidak terlindungi, dan enggan berinvestasi dalam peningkatan keterampilan karena tidak adanya jaminan kontinuitas pekerjaan. Selain itu, terjadi peningkatan kasus keluarga jatuh miskin akibat kepala keluarga mengalami kecelakaan kerja atau meninggal tanpa perlindungan jaminan sosial yang memadai.

Dampak jangka panjang dari stagnasi kepesertaan Jamsostek berdampak pada sistem perlindungan sosial yang tidak berkelanjutan dan kesenjangan kesejahteraan antargenerasi. Diperkirakan 40-50% tenaga kerja di Kabupaten Barito Kuala akan

menghadapi risiko kemiskinan di masa tua akibat tidak memiliki jaminan pensiun, meningkatkan beban fiskal pemerintah daerah hingga 25-30% untuk menangani kemiskinan lansia. Daya tarik investasi daerah menurun hingga 20-25% karena investor cenderung memilih lokasi dengan pasar tenaga kerja yang memiliki sistem perlindungan sosial yang baik. Tanpa peningkatan signifikan dalam kepesertaan Jamsostek, Kabupaten Barito Kuala akan terus tertinggal dalam pengembangan sistem perlindungan sosial yang komprehensif, membatasi potensi pengembangan ekonomi daerah hingga 15-20%, dan mempersulit upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang

2.6.1.2.4.2 Bantuan Sosial Pangan

Implementasi program Bantuan Sosial Pangan (Bansos Pangan) di Kabupaten Barito Kuala periode 2020-2023 menunjukkan fluktuasi dalam perencanaan dan realisasi, dengan permasalahan utama pada ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi penerima manfaat serta anggaran program. Pada tahun 2020, terjadi realisasi berlebih dengan capaian 16.507 KPM dari target 15.372 KPM (107,38%), sementara pada tahun 2021 terjadi penurunan realisasi menjadi 13.487 KPM dari rencana 14.611 KPM (92,31%). Situasi paling problematik terjadi pada 2022 dengan kesenjangan besar antara rencana mencapai 101.354 KPM dengan realisasi hanya 88.023 KPM (86,85%), sebelum mengalami stabilisasi pada 2023 dengan realisasi 79.132 KPM dari rencana 81.655 KPM (96,91%).

Dampak jangka pendek dari ketidakakuratan perencanaan mengakibatkan terjadinya exclusion error di mana masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak terjangkau program. Deviasi tertinggi pada 2022 menunjukkan bahwa sekitar 13.331 keluarga rentan tidak mendapatkan bantuan pangan yang menjadi hak mereka. Dampak langsung yang dirasakan adalah peningkatan kerawanan pangan bagi sekitar 10-15% rumah tangga miskin dan rentan, penurunan status gizi pada balita dan ibu hamil dari keluarga tidak terjangkau program sebesar 7-10%, serta peningkatan beban ekonomi rumah tangga miskin hingga 20-25% untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar.

Tabel II-87
Permasalahan Bantuan Sosial Pangan Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Ketidaksesuaian Perencanaan dan Realisasi	Fluktuasi antara rencana dan realisasi penerima manfaat	Realisasi berlebih tahun 2020 (107,38%), penurunan tahun 2021 (92,31%), kesenjangan besar tahun 2022 (86,85%), stabilisasi tahun 2023 (96,91%)
2	Exclusion Error	Masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tidak terjangkau program	Sekitar 13.331 keluarga rentan tidak mendapatkan bantuan pada 2022
3	Kerawanan Pangan	Peningkatan kerawanan pangan akibat tidak terjangkaunya bantuan	Peningkatan 10-15% pada rumah tangga miskin dan rentan
4	Status Gizi	Penurunan status gizi pada kelompok rentan	Penurunan 7-10% pada balita dan ibu hamil dari keluarga tidak terjangkau program
5	Ketergantungan Program	Ketergantungan kronis terhadap bantuan tanpa peningkatan kapasitas ekonomi	25-30% penerima bantuan mengalami ketergantungan kronis
6	Kebocoran Dana	Ketidakefisienan dalam sistem penyaluran	Kebocoran dana hingga 10-15%
7	Konflik Sosial	Sosialisasi perubahan kriteria penerima yang tidak baik	Konflik sosial di 15-20% desa/kelurahan penerima program
8	Erosi Nilai Bantuan	Penurunan nilai riil bantuan akibat inflasi	Penggerusan nilai bantuan hingga 15-20% tanpa penyesuaian nominal
9	Ketahanan Pangan Jangka Panjang	Risiko melemahnya ketahanan pangan masyarakat rentan	35-40% penerima bantuan terus bergantung pada program tanpa peningkatan kesejahteraan mandiri
10	Perangkap Kemiskinan	Ketiadaan strategi pemberdayaan yang terintegrasi	"Perangkap kemiskinan" bagi 25-30% populasi penerima bantuan
11	Monitoring dan Evaluasi	Kelemahan sistem monitoring dan evaluasi program	Potensi penurunan efektivitas program hingga 30-35%

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka menengah dari permasalahan dalam implementasi Bansos Pangan mengakibatkan ketidakpastian perlindungan sosial bagi masyarakat rentan dan menciptakan ketergantungan yang tidak berkelanjutan. Diperkirakan 25-30% penerima bantuan mengalami ketergantungan kronis terhadap program tanpa peningkatan

kapasitas ekonomi. Meskipun rata-rata realisasi anggaran mencapai 93,87% dari perencanaan, ketidakefisienan dalam sistem penyaluran menyebabkan kebocoran dana hingga 10-15%. Perubahan kriteria penerima manfaat yang tidak disosialisasikan dengan baik menimbulkan konflik sosial di 15-20% desa/kelurahan penerima program, menurunkan kohesi sosial, dan menciptakan stigmatisasi terhadap penerima bantuan. Terjadi pula penurunan efektivitas program akibat inflasi yang menggerus nilai bantuan hingga 15-20% tanpa adanya penyesuaian nilai nominal bantuan.

Dampak jangka panjang dari ketidakefektifan program Bansos Pangan berisiko memperlemah ketahanan pangan masyarakat rentan dan menciptakan ketergantungan kronis terhadap bantuan sosial. Tanpa integrasi program pemberdayaan, diperkirakan 35-40% penerima bantuan akan terus bergantung pada program tanpa mampu meningkatkan kesejahteraan secara mandiri, menciptakan beban fiskal jangka panjang bagi pemerintah. Implementasi sistem informasi terpadu telah menurunkan tingkat exclusion error dari 12,3% (2021) menjadi 3,1% (2023), namun tanpa perbaikan berkelanjutan, diperkirakan kesalahan dalam penargetan akan kembali meningkat hingga 8-10% dalam beberapa tahun ke depan. Ketiadaan strategi pemberdayaan yang terintegrasi dengan bantuan sosial menciptakan "perangkap kemiskinan" bagi 25-30% populasi penerima bantuan, menciptakan generasi baru yang bergantung pada bantuan sosial, dan menghambat pengembangan ekonomi lokal. Tanpa monitoring dan evaluasi program yang diperkuat, efektivitas program Bansos Pangan akan menurun hingga 30-35% akibat perubahan karakteristik kemiskinan dan kerawanan pangan yang tidak teridentifikasi dengan baik

2.6.1.2.5 Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

Meskipun Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan dari 65,66 pada tahun 2021 menjadi 73,53 pada tahun 2023, dengan total kenaikan sebesar 7,87 poin dalam tiga tahun, masih terdapat beberapa permasalahan mendasar dalam aspek agama dan kebudayaan yang perlu mendapat perhatian. Analisis terhadap data tersebut mengungkapkan bahwa meskipun terjadi peningkatan, nilai IKUB sebesar 73,53 masih menunjukkan adanya ruang untuk perbaikan signifikan dalam mencapai kerukunan umat beragama yang optimal.

Tabel II-88
Permasalahan Beragama Masalah dan Berkebudayaan Maju Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Kerukunan Umat Beragama	Nilai IKUB masih belum optimal meskipun mengalami peningkatan	IKUB meningkat dari 65,66 (2021) menjadi 73,53 (2023) dengan kenaikan 7,87 poin
2	Kasus Intoleransi	Masih terdapat kasus intoleransi meskipun menurun	Penurunan kasus intoleransi dari 12 kasus (2021) menjadi 3 kasus (2023)
3	Program Desa Rukun	Implementasi Program Desa Rukun belum merata	Kesenjangan tingkat kerukunan antarwilayah dalam kabupaten

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari nilai IKUB yang belum optimal adalah masih adanya potensi konflik berbasis agama, meskipun terjadi penurunan kasus intoleransi dari 12 kasus pada 2021 menjadi 3 kasus pada 2023. Tiga kasus yang masih terjadi mengindikasikan adanya kelompok masyarakat yang belum sepenuhnya terintegrasi dalam lingkungan harmonis antaragama. Selain itu, masih terdapat ketegangan laten di beberapa wilayah, terutama saat momen-momen keagamaan besar atau peristiwa politik yang memicu sentimen agama. Implementasi "Program Desa Rukun" juga masih belum merata di seluruh kecamatan, menyebabkan kesenjangan tingkat kerukunan antarwilayah dalam Kabupaten Barito Kuala.

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini adalah terhambatnya pengembangan potensi ekonomi berbasis kearifan lokal dan nilai agama. Kegiatan pariwisata berbasis budaya dan agama yang seharusnya dapat menjadi pengungkit ekonomi belum berkembang optimal karena belum terintegrasinya nilai-nilai agama dan budaya secara harmonis. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di beberapa kecamatan masih menghadapi kendala kapasitas dalam deteksi dini dan mediasi konflik, serta keterbatasan sumber daya untuk menjalankan program-program berkesinambungan. Selain itu, kurikulum pendidikan multikultural yang mengintegrasikan nilai-nilai kemaslahatan agama dengan kemajuan budaya belum terstandarisasi dan diterapkan secara menyeluruh di lembaga pendidikan Kabupaten Barito Kuala.

Dampak jangka panjang dari nilai IKUB yang belum mencapai level optimal adalah terhambatnya pembentukan identitas kolektif Kabupaten Barito Kuala sebagai

daerah yang beragama maslahat dan berkebudayaan maju. Integrasi sosial yang belum sempurna berpotensi menciptakan segregasi komunitas berdasarkan agama dalam jangka panjang, yang akan mempersulit pembangunan kohesi sosial. Program pemberdayaan ekonomi lintas agama yang belum maksimal mengakibatkan kesenjangan ekonomi antarkelompok agama, yang pada gilirannya dapat memicu kecemburuan sosial dan konflik. Pelestarian warisan budaya lokal yang memiliki nilai-nilai universal juga terancam memudar karena kurangnya sinergi antara nilai agama dan ekspresi budaya. Jika tidak ditangani, situasi ini dapat mengurangi daya tarik Kabupaten Barito Kuala sebagai destinasi yang mengedepankan harmoni agama dan budaya, serta menghambat potensi investasi yang mempertimbangkan stabilitas sosial sebagai faktor penting.

Penguatan kapasitas FKUB dalam deteksi dini dan mediasi konflik, perluasan program pemberdayaan ekonomi lintas agama, dan pengembangan kurikulum pendidikan multikultural menjadi langkah-langkah penting yang harus ditempuh secara komprehensif dan berkelanjutan untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan pendekatan yang holistik, Kabupaten Barito Kuala dapat meningkatkan nilai IKUB secara lebih signifikan dan mewujudkan masyarakat yang benar-benar beragama maslahat dan berkebudayaan maju.

2.6.1.2.6 Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif

2.6.1.2.6.1 Kesetaraan Gender

Kabupaten Barito Kuala mencatat peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dari 78,03 pada tahun 2020 menjadi 79,24 pada tahun 2023, dengan total kenaikan 1,21 poin dalam empat tahun. Meskipun menunjukkan tren positif, laju peningkatan IPG yang hanya 0,40 poin per tahun terlalu lambat untuk mencapai kesetaraan gender yang substansial dalam jangka menengah. Peningkatan moderat sebesar 0,14 poin pada periode 2020-2021, diikuti 0,63 poin pada 2021-2022, dan 0,44 poin pada 2022-2023 menunjukkan adanya inkonsistensi dalam implementasi program-program pemberdayaan perempuan.

Tabel II-89
Permasalahan Kesetaraan Gender Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Indeks Pemberdayaan Gender	Laju peningkatan IPG terlalu lambat	IPG meningkat dari 78,03 (2020) menjadi 79,24 (2023), dengan kenaikan rata-rata hanya 0,40 poin per tahun
2	Inkonsistensi Implementasi	Inkonsistensi dalam implementasi program pemberdayaan perempuan	Peningkatan bervariasi: 0,14 poin (2020-2021), 0,63 poin (2021-2022), dan 0,44 poin (2022-2023)
3	Ketimpangan Upah	Kesenjangan upah gender masih signifikan	Ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan sekitar 15% (2023), turun dari 18% (2020)
4	Representasi Politik	Keterwakilan perempuan dalam jabatan legislatif masih rendah	Peningkatan dari 15% menjadi 22%, namun masih jauh dari representasi ideal
5	UMKM Perempuan	Kendala akses kredit, teknologi, dan pasar bagi UMKM perempuan	Pertumbuhan UMKM yang dikelola perempuan sebesar 25% selama periode tersebut
6	Dampak Ekonomi	Hilangnya potensi kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi	Diperkirakan mencapai 20-30% dari potensi PDB regional

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari lambatnya peningkatan IPG adalah masih berlangsungnya ketimpangan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Ketimpangan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan setara masih tercatat sekitar 15%, meskipun mengalami perbaikan dari 18% pada tahun 2020. Hal ini mengakibatkan ketidakadilan ekonomi yang langsung dirasakan oleh perempuan pekerja, membatasi kemampuan ekonomi mereka, dan menghambat kontribusi optimal perempuan terhadap ekonomi daerah. Meskipun proporsi perempuan dalam jabatan legislatif meningkat dari 15% menjadi 22%, angka ini masih jauh dari representasi ideal, sehingga kepentingan perempuan belum terakomodasi secara memadai dalam pengambilan keputusan publik.

Dampak jangka menengah dari permasalahan kesetaraan gender ini adalah berlanjutnya disparitas gender dalam pendidikan tinggi dan pasar kerja formal. Kesenjangan pendidikan menyebabkan perempuan kesulitan bersaing dalam pasar kerja

berkualitas, sementara diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi karir membatasi mobilitas vertikal perempuan dalam struktur kerja dan organisasi. Program "Perempuan Berdaya, Barito Kuala Maju" belum sepenuhnya berhasil mengatasi hambatan struktural dalam kesetaraan gender, karena fokus lebih pada intervensi praktis daripada perubahan norma sosial dan budaya yang mendasari ketidaksetaraan. Pertumbuhan UMKM yang dikelola perempuan sebesar 25% selama periode tersebut menunjukkan kemajuan, namun masih terkendala akses terbatas terhadap kredit usaha, teknologi, dan jaringan pasar.

Dampak jangka panjang dari rendahnya laju peningkatan IPG adalah terhambatnya pembangunan sosial-ekonomi daerah secara keseluruhan. Ketidaksetaraan gender yang berkelanjutan menyebabkan hilangnya potensi kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi daerah, diperkirakan mencapai 20-30% dari potensi PDB regional. Selain itu, terjadi pelanggaran siklus ketidaksetaraan antargenerasi, di mana anak perempuan menginternalisasi ekspektasi peran gender terbatas yang mereka amati. Program pengembangan kapasitas dan kepemimpinan perempuan belum terintegrasi secara sistematis dalam kerangka pembangunan daerah, menciptakan kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Tanpa penguatan program pendidikan dan pelatihan kerja yang responsif gender, perluasan akses perempuan terhadap kredit usaha dan teknologi, serta peningkatan keterwakilan perempuan dalam posisi-posisi strategis, Kabupaten Barito Kuala akan kesulitan mencapai target kesetaraan gender yang bermakna dan komprehensif.

2.6.1.2.6.2 Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak (IPA) Kabupaten Barito Kuala menunjukkan peningkatan dari 72,5 pada tahun 2020 menjadi 78,3 pada tahun 2023, dengan total kenaikan 5,8 poin dalam empat tahun. Meskipun tren ini positif, nilai IPA sebesar 78,3 mengindikasikan bahwa masih terdapat sekitar 22% aspek perlindungan anak yang belum terpenuhi secara optimal. Pola peningkatan yang tidak konsisten, dengan kenaikan 2,3 poin pada periode 2020-2021, menurun menjadi 1,3 poin pada 2021-2022, dan kembali meningkat menjadi 2,2 poin pada 2022-2023, menunjukkan adanya fluktuasi dalam efektivitas program perlindungan anak.

Tabel II-90
Permasalahan Perlindungan Anak Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Indeks Perlindungan Anak	Masih terdapat aspek perlindungan anak yang belum terpenuhi	IPA meningkat dari 72,5 (2020) menjadi 78,3 (2023), berarti masih ada 22% aspek yang belum optimal
2	Inkonsistensi Peningkatan	Pola peningkatan IPA tidak konsisten	Kenaikan bervariasi: 2,3 poin (2020-2021), 1,3 poin (2021-2022), dan 2,2 poin (2022-2023)
3	Kekerasan Terhadap Anak	Program Desa Ramah Anak belum sepenuhnya mengatasi kekerasan terhadap anak	Penurunan kasus kekerasan sebesar 35%, berarti 65% kasus masih terjadi
4	Identitas Hukum	Masih ada anak yang tidak memiliki akte kelahiran	Peningkatan cakupan dari 85% menjadi 96%, masih ada 4% anak tanpa identitas hukum
5	Angka Putus Sekolah	Kasus putus sekolah masih signifikan meski mengalami penurunan	Penurunan sebesar 45%, berarti lebih dari setengah kasus masih terjadi
6	Program Pengasuhan	Belum semua keluarga terjangkau program pengasuhan positif	Peningkatan partisipasi orang tua sebesar 65%, masih ada 35% keluarga yang tidak terjangkau
7	Layanan Perlindungan	Disparitas layanan perlindungan anak antar wilayah	Anak-anak di daerah terpencil masih kesulitan mendapatkan layanan perlindungan yang memadai

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari belum optimalnya IPA adalah masih adanya anak-anak yang belum terlindungi secara menyeluruh dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Program "Desa Ramah Anak" yang diimplementasikan di 50 desa berhasil menurunkan angka kekerasan terhadap anak sebesar 35%, namun ini berarti 65% kasus masih terjadi dan belum tertangani dengan baik. Disparitas layanan perlindungan anak antar wilayah juga menciptakan ketidakmerataan akses, di mana anak-anak di daerah terpencil atau marginal masih kesulitan mendapatkan layanan perlindungan yang memadai. Meskipun terjadi peningkatan cakupan akte kelahiran dari 85% menjadi 96%, masih terdapat 4% anak yang tidak memiliki identitas hukum, membatasi akses mereka terhadap layanan dasar dan perlindungan hukum.

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini adalah ketidakoptimalan sistem perlindungan anak secara keseluruhan. Keterbatasan sumber daya manusia terlatih di bidang perlindungan anak menyebabkan penanganan kasus yang tidak profesional dan komprehensif. Belum optimalnya sistem data terpadu kasus anak menciptakan kesulitan dalam melacak, menangani, dan mencegah berbagai bentuk pelanggaran hak anak secara sistematis. Meskipun terjadi penurunan angka putus sekolah sebesar 45%, hal ini berarti lebih dari setengah kasus putus sekolah masih terjadi, yang berdampak pada terbatasnya kesempatan anak untuk mengembangkan potensi mereka secara optimal dan meningkatkan kerentanan terhadap berbagai bentuk eksploitasi dan kekerasan.

Dampak jangka panjang dari tidak teratasinya secara penuh permasalahan perlindungan anak adalah hilangnya potensi generasi masa depan untuk berkembang secara optimal dan berkontribusi positif pada pembangunan daerah. Anak-anak yang mengalami kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran berisiko menghadapi masalah kesehatan mental, ketidakmampuan beradaptasi sosial, dan produktivitas rendah saat dewasa. Sistem perlindungan anak yang belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan menciptakan kerentanan terhadap perubahan prioritas kebijakan dan anggaran, mengancam keberlanjutan capaian yang telah diraih. Meskipun terjadi peningkatan partisipasi orang tua dalam program pengasuhan positif sebesar 65%, masih terdapat 35% keluarga yang tidak terjangkau program, menciptakan kesenjangan dalam kualitas pengasuhan dan perlindungan anak di tingkat keluarga. Tanpa penguatan kapasitas petugas perlindungan anak di tingkat desa, pengembangan sistem informasi manajemen kasus berbasis teknologi, dan peningkatan anggaran program perlindungan anak berbasis bukti, Kabupaten Barito Kuala akan menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan perlindungan anak yang komprehensif dan berkelanjutan.

2.6.1.3 Permasalahan Aspek Daya Saing

2.6.1.3.1 Daya Saing Sumber Daya Manusia

2.6.1.3.1.1 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Kabupaten Barito Kuala menghadapi situasi kritis dalam perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dengan penurunan drastis dari 75,48% pada 2021

menjadi 70,74% pada 2022 - kemunduran signifikan sebesar 4,74 poin persentase. Penurunan ini bukan sekadar fluktuasi normal, melainkan sinyal peringatan terhadap transformasi struktural dalam basis ekonomi daerah yang tidak terkelola dengan baik.

Tabel II-91
Permasalahan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Penurunan TPAK	Penurunan drastis Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	Penurunan dari 75,48% (2021) menjadi 70,74% (2022), turun 4,74 poin persentase
2	Modernisasi Pertanian	Disrupsi penyerapan tenaga kerja akibat modernisasi pertanian	Mekanisasi dan teknologi pertanian modern tidak diimbangi dengan program <i>reskilling</i> dan <i>upskilling</i>
3	Pengembangan Kawasan Industri	Belum optimalnya kawasan industri Jelapat	Investasi terbatas dan infrastruktur pendukung yang belum memadai
4	Migrasi Tenaga Kerja	Fenomena brain drain ke wilayah perkotaan	Kekosongan tenaga kerja produktif berusia 20-35 tahun yang mengurus modal SDM
5	Balai Latihan Kerja	Kebutuhan pengembangan BLK Komunitas	Dibutuhkan di lima kecamatan strategis untuk intervensi cepat

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Modernisasi di sektor pertanian telah menciptakan disrupsi serius dalam penyerapan tenaga kerja tradisional. Jika mekanisasi dan penggunaan teknologi pertanian modern tidak diimbangi dengan program *reskilling* dan *upskilling* yang agresif, Kabupaten Barito Kuala akan menghadapi krisis pengangguran terselubung dalam 3-5 tahun ke depan. Ketidakmampuan angkatan kerja lokal beradaptasi dengan tuntutan keterampilan baru akan menciptakan fenomena "teknologi tanpa pekerjaan" yang berujung pada marginalisasi ekonomi kelompok pekerja pertanian tradisional.

Kegagalan mengoptimalkan kawasan industri Jelapat akan semakin memperparah situasi ketenagakerjaan. Jika investasi terbatas dan infrastruktur pendukung tidak segera ditingkatkan, kawasan ini akan menjadi "*white elephant*" - proyek ambisius tanpa dampak ekonomi riil. Ketidakmampuan menyerap kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian akan memperburuk pengangguran struktural dan menciptakan ketegangan sosial-ekonomi yang berpotensi menghambat pembangunan jangka panjang.

Fenomena migrasi tenaga kerja ke wilayah perkotaan jika tidak diatasi akan mengakibatkan "*brain drain*" permanen yang menguras modal SDM Barito Kuala. Kekosongan tenaga kerja produktif berusia 20-35 tahun akan menciptakan *demographic burden* dimana tenaga kerja yang tersisa didominasi oleh pekerja dengan produktivitas rendah dan kelompok usia non-produktif. Dalam jangka panjang, ini akan melumpuhkan kapasitas daerah untuk berinovasi dan berkompetisi dalam ekonomi regional.

Tanpa intervensi cepat melalui pengembangan Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas di lima kecamatan strategis, penguatan kemitraan industri pengolahan hasil pertanian, dan revitalisasi UMKM, Barito Kuala berisiko mengalami kemunduran ekonomi jangka panjang. Ketidakmampuan menciptakan ekosistem wirausaha dan lapangan kerja baru akan menjebak daerah ini dalam siklus kemiskinan struktural dan ketergantungan pada bantuan pemerintah yang tidak berkelanjutan.

2.6.1.3.1.2 Dinamika Angkatan Kerja

Struktur ketenagakerjaan Kabupaten Barito Kuala menghadapi krisis inklusivitas yang mengancam kohesi sosial dan keberlanjutan ekonomi. Disparitas TPAK gender yang mencapai 30,57 poin persentase (86,09% untuk laki-laki dan hanya 55,52% untuk perempuan) bukan sekadar ketimpangan statistik, tetapi refleksi dari marginalisasi sistemik perempuan dalam ruang ekonomi formal. Jika kesenjangan ini tidak diatasi, Barito Kuala akan kehilangan hampir setengah potensi produktif populasinya. Ketika 44.376 perempuan terjebak dalam pekerjaan domestik tanpa nilai ekonomi terukur, daerah ini melepaskan kapasitas inovasi, kewirausahaan, dan produktivitas yang vital untuk daya saing regional. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan mengintegrasikan perempuan ke dalam angkatan kerja akan memperlebar kesenjangan pendapatan antar gender, meningkatkan kerentanan ekonomi rumah tangga, dan membatasi mobilitas sosial-ekonomi intergenerasi.

Tabel II-92
Permasalahan Dinamika Angkatan Kerja Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Disparitas TPAK Gender	Kesenjangan signifikan partisipasi angkatan kerja antara laki-laki dan perempuan	Perbedaan 30,57 poin persentase (86,09% untuk laki-laki dan 55,52% untuk perempuan)

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
2	Marginalisasi Perempuan	Perempuan terjebak dalam pekerjaan domestik tanpa nilai ekonomi terukur	44.376 perempuan berada di luar angkatan kerja formal
3	Konsentrasi Sektor	Ketergantungan berlebih pada sektor tertentu	45% pekerja di sektor pertanian dan 23% di sektor perdagangan
4	Sistem Pelatihan	Absennya program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi terstandarisasi	Ketidaksesuaian kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar
5	Sistem Informasi Ketenagakerjaan	Ketiadaan database pencari kerja terintegrasi dan platform informasi lowongan	Memperpanjang durasi pengangguran dan meningkatkan biaya pencarian kerja

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Konsentrasi berlebih pada sektor pertanian (45%) dan perdagangan (23%) menciptakan kerentanan ekstrem terhadap guncangan eksternal. Ketergantungan pada sektor primer dengan nilai tambah rendah akan menghambat pertumbuhan upah riil dan menjebak pekerja dalam siklus kemiskinan. Tanpa diversifikasi ekonomi menuju sektor manufaktur dan jasa bernilai tinggi, Barito Kuala akan kehilangan momentum dalam kompetisi ekonomi regional dan mengalami stagnasi jangka panjang dalam peningkatan standar hidup masyarakat.

Absennya program pelatihan keterampilan berbasis kompetensi yang terstandarisasi mengakibatkan ketidaksesuaian kronis antara kualifikasi pencari kerja dengan kebutuhan pasar. Jika sistem pendidikan dan pelatihan vokasi tetap berjalan seperti saat ini, kesenjangan keterampilan akan semakin melebar, menciptakan paradoks dimana pengangguran dan kekosongan posisi kerja terjadi bersamaan. Perusahaan akan mengalami kesulitan menemukan tenaga kerja terampil sementara angka pengangguran tetap tinggi, menciptakan inefisiensi pasar kerja yang merugikan pertumbuhan ekonomi daerah.

Ketiadaan database pencari kerja terintegrasi dan platform informasi lowongan kerja daerah memperpanjang durasi pengangguran dan meningkatkan biaya pencarian kerja. Tanpa sistem penyalarsan penawaran dan permintaan tenaga kerja yang efektif, Barito Kuala akan mengalami friksi pasar kerja berkelanjutan yang membebani

produktivitas regional dan menurunkan efisiensi alokasi sumber daya manusia. Kondisi ini akan memperburuk daya saing daerah dalam menarik investasi baru dan mempertahankan bisnis yang telah beroperasi. Hanya dengan implementasi strategi komprehensif yang mengatasi akar permasalahan struktural ini, Kabupaten Barito Kuala dapat menghindari krisis ketenagakerjaan dan membangun fondasi SDM yang tangguh untuk menghadapi disrupsi ekonomi masa depan. Tanpa tindakan cepat dan terukur, potensi SDM daerah ini akan terus tererosi, melemahkan posisi kompetitifnya dalam lansekap ekonomi regional yang semakin menantang.

2.6.1.3.2 Iptek dan Inovasi dalam Produktivitas Ekonomi

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan serius dalam transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi, yang tercermin dari kontradiksi dalam pola perkembangan sektor-sektor ekonomi berbasis IPTEK. Meskipun terjadi peningkatan nilai nominal PDRB total dari Rp8.710,47 miliar pada 2020 menjadi Rp10.567,48 miliar pada 2023, komposisi sektoral menunjukkan ketidakseimbangan fundamental yang mengancam keberlanjutan pertumbuhan ekonomi daerah. Paradoks pertumbuhan dalam sektor industri pengolahan - yang secara nominal meningkat dari Rp1.372,33 miliar menjadi Rp1.535,28 miliar namun mengalami penurunan kontribusi dari 15,75% menjadi 14,53% - mengindikasikan kegagalan modernisasi teknologi dalam sektor manufaktur. Kondisi ini menciptakan kesenjangan produktivitas yang semakin melebar dibandingkan dengan daerah lain yang telah mengadopsi teknologi produksi modern, menempatkan Barito Kuala pada posisi kompetitif yang semakin lemah dalam rantai nilai industri regional.

Permasalahan mendasar terletak pada rendahnya investasi teknologi di sektor industri pengolahan yang merupakan tulang punggung transformasi ekonomi berbasis nilai tambah. Stagnasi teknologi menyebabkan sektor ini tidak mampu menciptakan efisiensi produksi, diversifikasi produk, dan peningkatan kualitas yang diperlukan untuk bertahan dalam persaingan pasar regional dan nasional. Kapasitas absorpsi teknologi yang rendah di kalangan pelaku industri lokal, terbatasnya akses terhadap teknologi baru, dan lemahnya insentif untuk inovasi teknologi telah menciptakan hambatan struktural bagi perkembangan industri pengolahan. Jika tidak diatasi, kondisi ini akan mengakibatkan deindustrialisasi prematur dimana sektor industri mengalami kontraksi

sebelum mencapai tahap kematangan, menghambat transisi ekonomi Barito Kuala menuju struktur yang lebih maju dan berdaya saing tinggi.

Tabel II-93
Permasalahan Iptek dan Inovasi dalam Produktivitas Ekonomi Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Kontribusi Industri Pengolahan	Penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	Penurunan dari 15,75% (2020) menjadi 14,53% (2023) meskipun nilai nominal meningkat dari Rp1.372,33 miliar menjadi Rp1.535,28 miliar
2	Modernisasi Teknologi	Kegagalan modernisasi teknologi dalam sektor manufaktur	Kesenjangan produktivitas yang semakin melebar dibandingkan daerah lain
3	Investasi Teknologi	Rendahnya investasi teknologi di sektor industri pengolahan	Stagnasi teknologi yang menyebabkan inefisiensi produksi
4	Jasa Perusahaan	Minimnya kontribusi jasa perusahaan terhadap PDRB	Hanya meningkat dari 0,16% menjadi 0,17% (2020-2023), jauh di bawah rata-rata nasional 1,5-2%
5	Ekosistem Bisnis	Terbatasnya ekosistem bisnis pendukung transfer teknologi	Ketersediaan layanan konsultasi teknologi, jasa R&D, dan solusi TI yang terbatas
6	Sektor Informasi dan Komunikasi	Peningkatan kontribusi masih di bawah potensi optimal	Meningkat dari 2,16% menjadi 2,27%, dengan nilai nominal dari Rp188,05 miliar menjadi Rp239,88 miliar
7	Kesenjangan Digital	Kesenjangan digital antara wilayah perkotaan dan pedesaan	Hambatan serius bagi penetrasi teknologi informasi secara merata
8	Infrastruktur Pendukung	Ketiadaan infrastruktur pendukung inovasi	Tidak tersedianya technopark, inkubator bisnis teknologi, dan pusat inovasi daerah

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Keterlambatan adopsi teknologi juga terlihat dari minimnya kontribusi jasa perusahaan terhadap PDRB, yang hanya meningkat dari 0,16% menjadi 0,17% selama periode 2020-2023. Angka ini sangat rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 1,5-2%, mengindikasikan terbatasnya ekosistem bisnis yang mendukung transfer teknologi dan difusi inovasi. Ketersediaan layanan konsultasi teknologi, jasa penelitian dan pengembangan, serta penyedia solusi teknologi informasi yang terbatas

menyulitkan pelaku usaha lokal untuk meningkatkan kapasitas teknologi mereka. Ketiadaan infrastruktur pendukung inovasi seperti technopark, inkubator bisnis teknologi, dan pusat inovasi daerah semakin memperburuk situasi, menutup jalur akses pelaku usaha lokal terhadap teknologi terkini dan praktik terbaik dalam penerapannya.

Meskipun sektor informasi dan komunikasi menunjukkan peningkatan kontribusi dari 2,16% menjadi 2,27%, dengan nilai nominal bertumbuh dari Rp188,05 miliar menjadi Rp239,88 miliar, angka ini masih jauh di bawah potensi optimal. Kesenjangan digital yang masih lebar antara wilayah perkotaan dan pedesaan di Barito Kuala menciptakan hambatan serius bagi penetrasi teknologi informasi secara merata. Infrastruktur telekomunikasi yang belum memadai di beberapa kecamatan, rendahnya literasi digital masyarakat, dan terbatasnya layanan berbasis teknologi informasi menghambat digitalisasi ekonomi secara komprehensif. Banyak pelaku usaha mikro dan kecil masih beroperasi secara konvensional, menutup peluang mereka untuk memanfaatkan efisiensi dan jangkauan pasar yang ditawarkan platform digital.

Konsekuensi jangka panjang dari keterlambatan transformasi teknologi ini akan sangat merugikan perekonomian Barito Kuala. Produktivitas yang rendah akan menekan pertumbuhan pendapatan dan upah riil, menciptakan jebakan pendapatan menengah yang sulit diatasi. Daya saing produk lokal akan semakin tergerus, mengakibatkan hilangnya pangsa pasar dan kesempatan ekspor. Ketergantungan pada industri padat karya dengan nilai tambah rendah akan memaksa Barito Kuala bersaing dalam "race to the bottom" berbasis upah rendah, bukannya bergerak naik dalam rantai nilai global. Ketidakmampuan menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi berbasis teknologi akan mendorong brain drain, dimana talenta lokal terbaik memilih bermigrasi ke daerah dengan kesempatan kerja yang lebih menjanjikan.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan intervensi sistemik dan komprehensif yang menysar akar masalah adaptasi teknologi. Pembangunan infrastruktur digital yang menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, menjadi prasyarat untuk mendemokratisasi akses terhadap teknologi informasi. Penguatan kolaborasi triple helix antara pemerintah, perguruan tinggi, dan industri akan menciptakan ekosistem inovasi yang mendukung penciptaan, difusi, dan adopsi teknologi. Program peningkatan keterampilan digital dan teknologi bagi angkatan kerja akan meningkatkan kapasitas absorpsi teknologi di tingkat industri dan bisnis. Insentif

fiskal dan non-fiskal untuk investasi teknologi akan mempercepat modernisasi industri pengolahan dan sektor-sektor produktif lainnya. Tanpa akselerasi transformasi teknologi ini, Kabupaten Barito Kuala berisiko mengalami marginalisasi ekonomi dalam konteks kompetisi regional dan global yang semakin ketat.

2.6.1.3.3 Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

2.6.1.3.3.1 Ekonomi Hijau

Kabupaten Barito Kuala menunjukkan perkembangan dalam adopsi paradigma ekonomi hijau, namun masih menghadapi permasalahan fundamental yang menghambat transformasi komprehensif menuju model pembangunan berkelanjutan. Meskipun terdapat inisiatif intensifikasi berkelanjutan di sektor pertanian yang meningkatkan frekuensi panen dan ketahanan pangan regional, implementasinya masih bersifat parsial dan tidak merata di seluruh wilayah kabupaten. Kesenjangan penerapan praktik pertanian berkelanjutan antara petani skala kecil dan besar menciptakan dualisme dalam sektor pertanian, dimana sebagian besar petani subsisten tetap menggunakan metode konvensional yang berdampak negatif pada lingkungan. Keterbatasan akses terhadap teknologi ramah lingkungan, input organik, dan pengetahuan agronomis modern menjadi hambatan utama bagi petani kecil untuk beralih ke praktik pertanian berkelanjutan, menciptakan risiko marginalisasi ekonomi bagi kelompok ini dalam transisi menuju ekonomi hijau.

Dampak jangka pendek dari permasalahan ini adalah ketidakmerataan manfaat ekonomi dari inisiatif pertanian berkelanjutan, dengan petani kecil menghadapi produktivitas dan pendapatan yang lebih rendah dibandingkan petani yang mampu mengadopsi praktik ramah lingkungan. Pembangunan infrastruktur berkelanjutan yang menjadi komponen integral ekonomi hijau masih terhambat oleh keterbatasan kapasitas kelembagaan dan defisit anggaran pembangunan. Sistem transportasi yang mengintegrasikan pertimbangan ekologis masih terbatas pada area-area strategis, meninggalkan sebagian besar wilayah dengan infrastruktur konvensional yang tidak memperhatikan dampak lingkungan. Ketersediaan investasi yang tidak memadai menjadi kendala serius dalam mengakselerasi pembangunan infrastruktur hijau, menciptakan risiko ketergantungan pada pendekatan pembangunan tradisional yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang.

Tabel II-94
Permasalahan Ekonomi Hijau Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Implementasi Pertanian Berkelanjutan	Implementasi intensifikasi berkelanjutan masih parsial dan tidak merata	Kesenjangan penerapan praktik pertanian berkelanjutan antara petani skala kecil dan besar
2	Akses Teknologi Ramah Lingkungan	Keterbatasan akses teknologi dan pengetahuan agronomis modern	Marginalisasi ekonomi petani kecil dalam transisi menuju ekonomi hijau
3	Infrastruktur Berkelanjutan	Pembangunan infrastruktur berkelanjutan terhambat	Keterbatasan kapasitas kelembagaan dan defisit anggaran pembangunan
4	Sistem Transportasi Ekologis	Sistem transportasi yang mengintegrasikan pertimbangan ekologis masih terbatas	Hanya tersedia di area-area strategis, sebagian besar wilayah masih menggunakan infrastruktur konvensional
5	Diversifikasi Ekonomi	Terhambatnya diversifikasi melalui pariwisata berkelanjutan dan agrowisata	Lemahnya koordinasi multipihak dan belum adanya kerangka regulasi kondusif
6	Model Pengembangan Kolaboratif	Model kolaborasi multipihak belum terimplementasi efektif	Masih sebatas konsep dan belum terwujud di lapangan
7	Konservasi Lingkungan	Konservasi sering dikorbankan untuk keuntungan jangka pendek	Konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam
8	Transisi Energi	Terhambatnya transisi energi terbarukan	Eksplorasi potensi energi terbarukan masih pada tahap awal dengan skala implementasi terbatas
9	Kesiapan Teknologi	Kesiapan teknologi energi terbarukan masih rendah	Keterbatasan keahlian teknis lokal dan belum optimalnya kerangka regulasi
10	Ketergantungan Energi Fosil	Ketergantungan pada energi berbasis fosil tetap tinggi	Mempengaruhi ketahanan energi daerah dan emisi karbon tinggi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka menengah terlihat dari terhambatnya diversifikasi ekonomi daerah melalui potensi pariwisata berkelanjutan dan agrowisata. Meskipun diidentifikasi sebagai pengungkit potensial, pengembangan sektor ini terkendala oleh lemahnya koordinasi multipihak dan belum adanya kerangka regulasi yang kondusif. Model pengembangan kolaboratif yang melibatkan pemerintah, masyarakat, dan sektor

swasta masih sebatas konsep dan belum terimplementasi secara efektif di lapangan. Konservasi lingkungan sering kali dikorbankan demi keuntungan ekonomi jangka pendek, terutama ketika terjadi konflik kepentingan dalam pemanfaatan lahan dan sumber daya alam. Tantangan ini mengakibatkan hilangnya peluang untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal dan diversifikasi basis ekonomi daerah.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah terhambatnya transisi energi sebagai komponen krusial ekonomi hijau di Barito Kuala. Eksplorasi potensi energi terbarukan seperti pengolahan limbah, mikro hidro, biomassa, energi surya, dan energi angin masih pada tahap awal dengan skala implementasi yang terbatas. Kesiapan teknologi yang rendah, keterbatasan keahlian teknis lokal, dan belum optimalnya kerangka regulasi untuk energi terbarukan menciptakan hambatan signifikan dalam akselerasi transisi energi. Ketergantungan pada energi berbasis fosil tetap tinggi, mempengaruhi ketahanan energi daerah dan berkontribusi pada emisi karbon yang tinggi. Ketidakmampuan mengintegrasikan potensi konversi sumber daya alam menjadi energi listrik dalam perencanaan pembangunan daerah berdampak pada hilangnya peluang untuk memperkuat resiliensi ekonomi dan upaya mitigasi perubahan iklim dalam jangka panjang.

2.6.1.3.3.2 Ekonomi Biru

Kabupaten Barito Kuala, dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh perairan, menghadapi tantangan signifikan dalam mengoptimalkan potensi ekonomi biru akibat kondisi infrastruktur perairan yang tidak memadai. Dari total 44 pelabuhan di seluruh kabupaten, hanya 23 (52,3%) yang berada dalam kondisi baik, sementara 12 (27,3%) dalam kondisi rusak sedang dan 9 (20,5%) dalam kondisi rusak berat. Ketidakmerataan distribusi pelabuhan berkategori baik antar kecamatan menciptakan disparitas akses terhadap infrastruktur perairan, dengan Kecamatan Tabunganen memiliki 9 pelabuhan kondisi baik (81,8% dari total pelabuhan di kecamatan tersebut), sementara Kecamatan Alalak tidak memiliki satupun pelabuhan dalam kondisi baik. Kondisi ini mengakibatkan hambatan serius dalam mobilitas ekonomi berbasis perairan dan efisiensi rantai pasok produk perikanan di beberapa kecamatan.

Tabel II-95
Permasalahan Ekonomi Biru Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Infrastruktur Pelabuhan	Kondisi infrastruktur perairan yang tidak memadai	Dari 44 pelabuhan, hanya 23 (52,3%) dalam kondisi baik, 12 (27,3%) rusak sedang, dan 9 (20,5%) rusak berat
2	Disparitas Infrastruktur	Ketidakmerataan distribusi pelabuhan berkondisi baik	Kecamatan Tabunganen memiliki 9 pelabuhan kondisi baik (81,8%), sementara Kecamatan Alalak tidak memiliki satupun
3	Biaya Logistik	Inefisiensi sistem logistik dan transportasi	Peningkatan biaya distribusi produk perikanan hingga 25-30% di wilayah dengan infrastruktur buruk
4	Produktivitas Perikanan	Penurunan produktivitas di kecamatan dengan infrastruktur buruk	Produktivitas 10-15% di bawah rata-rata kabupaten di kecamatan dengan infrastruktur buruk
5	Modernisasi Armada	Terhambatnya modernisasi armada dan alat tangkap ramah lingkungan	Terbatasnya akses ke pelabuhan dengan fasilitas memadai
6	Akuakultur Terintegrasi	Belum optimalnya pengembangan akuakultur di lahan pasang surut	Keterbatasan infrastruktur pendukung, termasuk sistem distribusi dan cold storage
7	Pariwisata Bahari	Sulit merealisasikan potensi pariwisata bahari	Infrastruktur transportasi perairan yang buruk
8	Konektivitas Ekonomi	Transportasi perairan belum menjadi tulang punggung konektivitas	Kondisi dermaga yang buruk di beberapa titik strategis menciptakan bottleneck
9	Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap masih di bawah potensi optimal	Peningkatan dari 8.812,23 ton (2019) menjadi 9.727,73 ton (2023), pertumbuhan 10,39%

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari permasalahan infrastruktur perairan terlihat dari inefisiensi sistem logistik dan transportasi pada wilayah dengan infrastruktur buruk, meningkatkan biaya distribusi produk perikanan hingga 25-30%. Nelayan dan pelaku usaha perikanan di kecamatan dengan infrastruktur buruk seperti Alalak menghadapi kesulitan dalam mengakses pasar, mengakibatkan penurunan nilai jual dan pendapatan. Produktivitas perikanan tangkap di kecamatan-kecamatan tersebut menunjukkan angka

10-15% di bawah rata-rata kabupaten, membuktikan korelasi langsung antara kondisi infrastruktur dengan hasil ekonomi. Ketidakmampuan mengatasi masalah ini secara cepat berdampak pada hilangnya peluang peningkatan pendapatan nelayan dan menurunnya daya saing produk perikanan lokal.

Dampak jangka menengah terlihat dari terhambatnya pengembangan sektor-sektor potensial dalam ekonomi biru. Modernisasi armada dan alat tangkap ramah lingkungan untuk perikanan tangkap berkelanjutan terkendala oleh terbatasnya akses ke pelabuhan dengan fasilitas memadai. Akuakultur terintegrasi yang memanfaatkan lahan pasang surut tidak berkembang optimal karena keterbatasan infrastruktur pendukung, termasuk sistem distribusi dan cold storage. Potensi pariwisata bahari yang memanfaatkan keunikan ekosistem sungai dan rawa sulit direalisasikan tanpa perbaikan menyeluruh pada infrastruktur transportasi perairan. Transportasi perairan yang seharusnya menjadi tulang punggung konektivitas ekonomi di sepanjang aliran sungai tidak efisien akibat kondisi dermaga yang buruk di beberapa titik strategis, menciptakan bottleneck dalam arus barang dan jasa antar wilayah.

Dampak jangka panjang dari ketidakmampuan mengatasi permasalahan infrastruktur perairan adalah stagnansi dalam pengembangan ekonomi biru secara keseluruhan. Meskipun produksi perikanan tangkap menunjukkan tren peningkatan dari 8.812,23 ton pada 2019 menjadi 9.727,73 ton pada 2023 (pertumbuhan 10,39%), angka ini masih jauh di bawah potensi optimal jika infrastruktur pendukung berfungsi dengan baik. Tanpa revitalisasi infrastruktur pelabuhan, pengembangan sentra pengolahan hasil perikanan, penguatan kapasitas nelayan dalam praktik penangkapan ikan berkelanjutan, dan diversifikasi ekonomi perairan, Kabupaten Barito Kuala berisiko kehilangan keunggulan komparatifnya dalam ekonomi berbasis perairan. Ketergantungan pada produk primer dengan nilai tambah rendah akan tetap tinggi, membatasi potensi peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian daerah secara keseluruhan.

2.6.1.3.4 Transformasi Digital

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan transformasi digital yang merata dan inklusif, meskipun telah mencatat kemajuan dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Kesenjangan digital yang signifikan antar

wilayah menjadi permasalahan utama, dengan disparitas jumlah menara telekomunikasi yang sangat kontras antara Kecamatan Alalak (26 menara) dan kecamatan dengan infrastruktur terbatas seperti Tabukan (3 menara). Ketimpangan ini tidak hanya mencerminkan ketidakseimbangan dalam distribusi infrastruktur fisik, tetapi juga menciptakan ketimpangan sistemik dalam akses terhadap peluang ekonomi digital, layanan publik online, dan sumber daya pendidikan berbasis teknologi. Meskipun penetrasi internet kabupaten secara keseluruhan meningkat dari 45,3% (2019) menjadi 68,7% (2023), angka ini menyembunyikan variasi ekstrem di tingkat kecamatan, dengan Alalak mencapai 83,7% sementara Tabukan hanya 42,3%.

Tabel II-96
Permasalahan Transformasi Digital Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Disparitas Infrastruktur	Kesenjangan distribusi menara telekomunikasi antar kecamatan	Kecamatan Alalak (26 menara) vs Kecamatan Tabukan (3 menara)
2	Penetrasi Internet	Variasi ekstrem penetrasi internet di tingkat kecamatan	Penetrasi kabupaten meningkat dari 45,3% (2019) ke 68,7% (2023); Alalak 83,7% vs Tabukan 42,3%
3	Adopsi Layanan Digital	Perbedaan dramatis dalam penggunaan layanan pemerintah online	28% penduduk di kecamatan berpenetrasi rendah vs 71% di kecamatan dengan infrastruktur memadai
4	Digitalisasi Pendidikan	Kesenjangan adopsi pembelajaran digital di sekolah	36% sekolah di wilayah infrastruktur terbatas vs 84% di wilayah cakupan sinyal kuat
5	Pertumbuhan UMKM Digital	Ketimpangan pertumbuhan ekonomi digital	Kecamatan Alalak mencatat pertumbuhan UMKM digital 47% dalam 3 tahun vs rata-rata kabupaten 23%
6	Transaksi E-commerce	Kesenjangan nilai transaksi e-commerce	Peningkatan 156% di wilayah dengan kepadatan menara tinggi, mencapai Rp12,4 miliar (2023)
7	Kecepatan Internet	Perbedaan kualitas layanan internet	Kecepatan unduh wilayah perkotaan 21,7 Mbps vs pedesaan 8,3 Mbps (2023)
8	Produktivitas Sektor	Kesenjangan peningkatan produktivitas di sektor jasa dan perdagangan	Peningkatan 18,5% dalam 5 tahun terakhir di wilayah dengan infrastruktur memadai
9	Cakupan Sinyal	Tantangan perluasan jaringan	Rencana peningkatan cakupan sinyal 4G dari 76% menjadi 92%

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
10	Investasi Infrastruktur	Alokasi sumber daya untuk infrastruktur digital	wilayah pemukiman (2023-2025) Investasi Rp48 miliar dengan proyeksi penghematan biaya transaksi Rp16,5 miliar per tahun

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari kesenjangan digital ini terlihat dari perbedaan dramatis dalam adopsi layanan digital. Hanya 28% penduduk di kecamatan berpenetrasi rendah yang menggunakan layanan pemerintah online, dibandingkan 71% di kecamatan dengan infrastruktur memadai. Hal ini mengakibatkan inefisiensi administratif, meningkatkan biaya transaksi bagi masyarakat pedesaan, dan membatasi efektivitas layanan publik. Dalam sektor pendidikan, hanya 36% sekolah di wilayah dengan infrastruktur terbatas yang telah mengadopsi pembelajaran digital, jauh di bawah 84% di wilayah dengan cakupan sinyal kuat. Ketimpangan ini semakin memperburuk kesenjangan kualitas pendidikan dan kesiapan digital antara anak-anak di wilayah perkotaan dan pedesaan, menciptakan siklus ketidaksetaraan yang sulit diputus.

Dampak jangka menengah dari ketidakmerataan transformasi digital termanifestasi dalam bentuk ketimpangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah. Kecamatan Alalak dengan 26 menara telah mencatat pertumbuhan UMKM digital sebesar 47% dalam tiga tahun terakhir, jauh di atas rata-rata kabupaten yang hanya 23%. Transaksi e-commerce di wilayah dengan kepadatan menara tinggi (>10 menara per kecamatan) meningkat 156% sejak 2020, mencapai nilai Rp 12,4 miliar pada 2023. Ketidakmampuan kecamatan lain untuk berpartisipasi setara dalam ekonomi digital ini memperlebar kesenjangan pendapatan dan peluang ekonomi antar wilayah. Kecepatan unduh rata-rata yang berbeda jauh antara wilayah perkotaan (21,7 Mbps) dan pedesaan (8,3 Mbps) pada 2023 semakin mempersulit pelaku usaha di wilayah pedesaan untuk bersaing dalam ekosistem digital, akses terhadap pasar online, dan pemanfaatan teknologi untuk efisiensi operasional.

Dampak jangka panjang dari permasalahan transformasi digital yang tidak merata akan menghasilkan polarisasi ekonomi dan sosial yang semakin dalam. Wilayah dengan infrastruktur digital yang terbatas akan mengalami marginalisasi ekonomi

berkelanjutan, dengan produktivitas yang stagnan dan kehilangan daya saing regional. Sektor jasa dan perdagangan di wilayah dengan infrastruktur memadai telah mencatat peningkatan produktivitas sebesar 18,5% dalam lima tahun terakhir, menciptakan kesenjangan pertumbuhan yang semakin melebar dengan wilayah tertinggal. Laju inovasi dan adopsi teknologi juga akan terhambat di wilayah berpenetrasi rendah, mengakibatkan hilangnya peluang untuk diversifikasi ekonomi dan penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi berbasis pengetahuan dan teknologi.

Meskipun terdapat rencana penambahan 32 menara baru untuk periode 2023-2025 yang diharapkan dapat meningkatkan cakupan sinyal 4G dari 76% menjadi 92% wilayah pemukiman, tantangan implementasi tetap signifikan. Karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala yang sebagian besar terdiri dari lahan basah dan aliran sungai menciptakan kompleksitas teknis dalam pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Investasi sebesar Rp 48 miliar dalam infrastruktur ini memang diprediksi akan menghasilkan penghematan biaya transaksi sebesar Rp 16,5 miliar per tahun dan meningkatkan produktivitas UMKM hingga 25%, namun tanpa pendekatan yang memprioritaskan wilayah tertinggal, kesenjangan digital berisiko tetap berlanjut. Pembangunan kapasitas digital masyarakat, dukungan ekosistem inovasi lokal, dan kebijakan inklusi digital yang komprehensif harus berjalan seiring dengan ekspansi infrastruktur untuk memastikan transformasi digital yang merata dan berkelanjutan di seluruh Kabupaten Barito Kuala.

2.6.1.3.5 Pembangunan Ekonomi Daerah

2.6.1.3.5.1 Integrasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah

Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kemajuan dalam integrasi ekonomi dan peningkatan daya saing regional, namun masih menghadapi permasalahan struktural yang menghambat optimalisasi potensi pengembangannya. Meskipun terdapat pertumbuhan signifikan pada Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dengan ekspansi sektor konstruksi sebesar 22,2% dari Rp781,44 miliar (2020) menjadi Rp954,95 miliar (2023), peningkatan kapasitas produktif ini belum sepenuhnya didukung oleh penguatan sektor industri pengolahan yang hanya tumbuh moderat sebesar 5,4% dari Rp901,26 miliar menjadi Rp949,97 miliar selama periode yang sama. Ketidakseimbangan ini mengindikasikan bahwa investasi fisik yang besar belum berhasil mentransformasi

kapasitas produktif daerah secara proporsional, menciptakan risiko inefisiensi alokasi sumber daya dan rendahnya pengembalian investasi dalam jangka panjang.

Tabel II-97
Permasalahan Integrasi Ekonomi dan Daya Saing Daerah Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Ketidakseimbangan Investasi	Investasi fisik belum mentransformasi kapasitas produktif secara proporsional	PMTB/sector konstruksi tumbuh 22,2% (Rp781,44 miliar ke Rp954,95 miliar, 2020-2023) vs industri pengolahan hanya 5,4% (Rp901,26 miliar ke Rp949,97 miliar)
2	Pertumbuhan Sektor Primer	Rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan	Pertumbuhan hanya 3,8% dalam empat tahun (Rp1.595,86 miliar menjadi Rp1.656,44 miliar)
3	Pergeseran Struktural	Transformasi struktur ekonomi belum didukung peningkatan produktivitas	Penurunan proporsi sektor primer dari 27,7% ke 25,9% dan peningkatan sektor tersier dari 37,7% ke 39,5% (2020-2023)
4	Ketimpangan Ekonomi	Manfaat integrasi ekonomi belum terdistribusi merata	Peningkatan Indeks Gini dari 0,277 menjadi 0,312
5	Instabilitas Pasar Kerja	Dinamika pasar kerja tidak stabil akibat perubahan struktural ekonomi	Fluktuasi tingkat pengangguran: 2,93% (2020), 3,63% (2022), 3,42% (2023)
6	Sektor Teknologi	Manfaat adopsi teknologi belum optimal untuk produktivitas sektor strategis	Sektor informasi dan komunikasi tumbuh 22,3% (Rp145,46 miliar menjadi Rp177,86 miliar)
7	Pengembangan SDM	Peningkatan kualitas SDM belum memenuhi kebutuhan ekonomi knowledge-intensive	Indeks Pembangunan Manusia meningkat dari 73,09 menjadi 74,66
8	Infrastruktur Konektivitas	Penguatan infrastruktur belum didukung pengembangan digital komprehensif	Sektor transportasi dan pergudangan tumbuh 10,7% (Rp196,42 miliar menjadi Rp217,42 miliar)

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari ketidakseimbangan ini terlihat dari rendahnya pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya mencapai 3,8%

dalam empat tahun, dari Rp1.595,86 miliar menjadi Rp1.656,44 miliar. Sektor primer yang menjadi basis ekspor tradisional Kabupaten Barito Kuala ini menghadapi tantangan daya saing di pasar global yang kompetitif, terutama karena rendahnya nilai tambah dan minimnya adopsi teknologi modern dalam proses produksi. Meskipun terjadi pergeseran struktural dengan menurunnya proporsi sektor primer terhadap PDRB dari 27,7% (2020) menjadi 25,9% (2023) dan meningkatnya sektor tersier dari 37,7% menjadi 39,5%, transformasi ini belum didukung oleh peningkatan produktivitas dan efisiensi yang signifikan dalam rantai nilai produksi. Akibatnya, produk lokal menghadapi kesulitan dalam memenuhi standar kualitas global dan menembus pasar ekspor yang lebih menguntungkan.

Dampak jangka menengah dari permasalahan integrasi ekonomi tercermin dalam meningkatnya ketimpangan ekonomi dengan Indeks Gini yang naik dari 0,277 menjadi 0,312. Fenomena ini mengindikasikan bahwa manfaat dari integrasi global dan pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata di kalangan masyarakat Barito Kuala. Kelompok yang memiliki akses terhadap modal, teknologi, dan keterampilan menikmati keuntungan lebih besar dari proses integrasi ekonomi, sementara kelompok marginal semakin tertinggal. Fluktuasi tingkat pengangguran (2,93% pada 2020, mencapai 3,63% pada 2022, dan turun ke 3,42% pada 2023) mencerminkan dinamika pasar kerja yang tidak stabil akibat perubahan struktural ekonomi dan tekanan kompetitif global. Ketidakmampuan sektor industri pengolahan untuk tumbuh secara signifikan membatasi penciptaan lapangan kerja berkualitas tinggi yang diperlukan untuk mengakomodasi transisi tenaga kerja dari sektor primer ke sektor dengan nilai tambah lebih tinggi.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah risiko Kabupaten Barito Kuala terjebak dalam posisi subordinat dalam rantai nilai global. Meskipun sektor informasi dan komunikasi menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 22,3% dari Rp145,46 miliar menjadi Rp177,86 miliar, manfaat dari adopsi teknologi ini belum dioptimalkan untuk meningkatkan produktivitas sektor-sektor strategis. Tanpa peningkatan nilai tambah produk unggulan daerah melalui inovasi dan adopsi teknologi yang relevan dengan standar global, Kabupaten Barito Kuala akan terus menjadi pemasok bahan mentah dan produk bernilai tambah rendah dalam rantai nilai global.

Posisi ini akan membatasi pengembalian ekonomi dari proses integrasi dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia dari 73,09 menjadi 74,66 menunjukkan kemajuan dalam pengembangan sumber daya manusia, namun belum cukup untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin knowledge-intensive. Pertumbuhan sektor transportasi dan pergudangan sebesar 10,7% dari Rp196,42 miliar menjadi Rp217,42 miliar menunjukkan penguatan infrastruktur konektivitas, namun perlu didukung dengan pengembangan infrastruktur digital yang lebih komprehensif untuk memfasilitasi akses ke pasar global dengan biaya transaksi minimal. Tanpa strategi pengembangan kluster industri yang mengintegrasikan produsen lokal ke dalam rantai nilai global dan peningkatan kualitas dan relevansi keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar global, Kabupaten Barito Kuala akan kesulitan meningkatkan daya saingnya dalam ekonomi regional dan global yang semakin kompetitif.

2.6.1.3.5.2 Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Kabupaten Barito Kuala mengalami transformasi struktural ekonomi dengan meningkatnya kontribusi sektor tersier dalam PDRB, namun masih menghadapi ketidakseimbangan pertumbuhan antar sektor yang menghambat pengembangan pusat perdagangan dan jasa yang benar-benar maju, inklusif, dan berkelanjutan. Meskipun sektor perdagangan besar dan eceran menunjukkan pertumbuhan impresif sebesar 17,28% selama periode 2020-2023 (dari Rp689,11 miliar menjadi Rp808,17 miliar) dan kontribusinya terhadap PDRB ADHK meningkat dari 11,96% menjadi 12,63%, pergeseran struktural ini belum didukung oleh fondasi ekonomi produktif yang kokoh. Pertumbuhan sektor industri pengolahan yang hanya 5,41% (dari Rp901,26 miliar menjadi Rp949,97 miliar) selama periode yang sama menciptakan ketimpangan dalam rantai nilai ekonomi lokal, di mana aktivitas perdagangan belum didukung oleh kapasitas produksi yang memadai.

Tabel II-98
Permasalahan Pusat Pertumbuhan Ekonomi Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Ketidakseimbangan Pertumbuhan	Pertumbuhan sektor tersier tidak didukung	Perdagangan tumbuh 17,28% (Rp689,11-808,17 miliar) vs industri pengolahan hanya

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
		fondasi ekonomi produktif yang kokoh	5,41% (Rp901,26-949,97 miliar), 2020-2023
2	Nilai Tambah Lokal	Terbatasnya nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian lokal	Aktivitas perdagangan lebih mengandalkan produk luar daerah
3	Sektor Jasa	Kontribusi sektor jasa belum optimal	Kontribusi kolektif sektor jasa baru 21,76% terhadap PDRB ADHK (2023)
4	Ekosistem Pendukung Bisnis	Ekosistem pendukung bisnis belum berkembang	Sektor jasa perusahaan tumbuh 19,25% (Rp19,68-23,46 miliar) namun kontribusi terhadap PDRB stagnan di 0,16%
5	Akses Hunian Layak	Keterbatasan akses hunian layak	Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak hanya meningkat dari 43,47% ke 44,34% (2020-2023)
6	Biaya Konstruksi	Peningkatan biaya konstruksi	Indeks Kemahalan Konstruksi meningkat dari 102,44 menjadi 112,96 (kenaikan 10,27%)
7	Akses Air Minum	Fluktuasi akses air minum layak	Penurunan dari 65,42% (2020) menjadi 62,93% (2021), lalu meningkat ke 66,35% (2023)
8	Akses Sanitasi	Peningkatan moderat akses sanitasi	Akses sanitasi layak hanya meningkat dari 67,6% menjadi 69,37% (2020-2023)
9	Sistem Logistik	Sektor transportasi tidak mengimbangi ekspansi perdagangan	Sektor transportasi dan pergudangan hanya tumbuh 10,69% (Rp196,42-217,42 miliar)
10	Ekonomi Hospitality	Pengembangan ekonomi hospitality belum terintegrasi	Sektor akomodasi dan makan minum tumbuh 18,65% (Rp145,46-172,58 miliar) namun belum didukung strategi pariwisata terintegrasi

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari ketidakseimbangan ini adalah terbatasnya nilai tambah yang tercipta dalam perekonomian lokal, di mana aktivitas perdagangan lebih banyak mengandalkan produk dari luar daerah daripada produksi lokal. Meskipun sektor jasa menunjukkan dinamika positif dengan jasa pendidikan meningkat 14,23% (dari

Rp362,69 miliar menjadi Rp414,30 miliar), jasa kesehatan 21,46% (dari Rp86,61 miliar menjadi Rp105,20 miliar), dan real estate 19,99% (dari Rp231,68 miliar menjadi Rp277,99 miliar), kontribusi kolektif sektor jasa yang baru mencapai 21,76% terhadap PDRB ADHK pada 2023 masih belum cukup untuk mendorong transformasi Barito Kuala menjadi pusat jasa regional yang kompetitif. Sektor jasa perusahaan, meskipun tumbuh 19,25% (dari Rp19,68 miliar menjadi Rp23,46 miliar), kontribusinya terhadap PDRB tetap stagnan di 0,16%, mengindikasikan ekosistem pendukung bisnis yang belum berkembang dan membatasi daya tarik Barito Kuala sebagai pusat perdagangan dan jasa.

Dampak jangka menengah dari permasalahan struktural ini adalah terhambatnya pengembangan lingkungan perkotaan yang berkelanjutan akibat ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak hanya meningkat tipis dari 43,47% pada 2020 menjadi 44,34% pada 2023, sementara Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) meningkat signifikan dari 102,44 menjadi 112,96 (kenaikan 10,27%). Kesenjangan ini menciptakan tekanan affordability dalam penyediaan perumahan, terutama bagi kelompok berpendapatan rendah dan menengah. Akses terhadap air minum layak menunjukkan pola fluktuatif, dengan penurunan dari 65,42% pada 2020 menjadi 62,93% pada 2021 sebelum meningkat kembali menjadi 66,35% pada 2023, menggambarkan tantangan dalam memastikan kontinuitas layanan infrastruktur dasar. Akses sanitasi layak juga hanya meningkat moderat dari 67,6% pada 2020 menjadi 69,37% pada 2023, jauh dari standar universal access yang menjadi indikator kota berkelanjutan.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah terbentuknya struktur ekonomi yang tidak resilient terhadap guncangan eksternal akibat ketidakseimbangan pertumbuhan sektor dan infrastruktur pendukung. Sektor transportasi dan pergudangan yang hanya tumbuh 10,69% (dari Rp196,42 miliar menjadi Rp217,42 miliar) tidak mampu mengimbangi ekspansi sektor perdagangan, menciptakan bottleneck dalam sistem logistik yang pada akhirnya akan membatasi kapasitas Barito Kuala sebagai hub perdagangan regional. Pertumbuhan sektor penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 18,65% (dari Rp145,46 miliar menjadi Rp172,58 miliar) memang mengindikasikan berkembangnya ekonomi hospitality, namun belum didukung oleh strategi pengembangan pariwisata terintegrasi

yang mampu menciptakan multiplier effect signifikan. Ketergantungan berlebih pada sektor tersier tanpa penguatan basis produksi menciptakan ekonomi yang rentan terhadap fluktuasi permintaan dan perubahan pola konsumsi.

Ketidakseimbangan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur ini akan semakin mempersulit Kabupaten Barito Kuala untuk berkembang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang maju, inklusif, dan berkelanjutan. Keterbatasan akses terhadap hunian layak, air bersih, dan sanitasi akan menekan kualitas hidup penduduk dan menurunkan daya tarik daerah bagi investasi dan tenaga kerja terampil. Lemahnya keterkaitan antara sektor perdagangan dengan sektor industri menghambat penciptaan nilai tambah lokal dan diversifikasi ekonomi yang diperlukan untuk pertumbuhan jangka panjang. Tanpa akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung, penguatan ekonomi digital, dan penguatan jasa keuangan sebagai katalisator aktivitas perdagangan dan investasi, Kabupaten Barito Kuala akan kesulitan mentransformasi struktur ekonominya menjadi lebih produktif, inklusif, dan berkelanjutan.

2.6.1.4 Permasalahan Aspek Pelayanan Umum

2.6.1.4.1 Tata Kelola Pemerintahan

2.6.1.4.1.1 Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan serius dalam pengembangan kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) meskipun terjadi pergeseran struktur pendidikan ke arah yang lebih baik. Analisis data menunjukkan penurunan jumlah ASN secara konsisten dari 4.769 personel pada 2020 menjadi 4.328 personel pada 2023, atau pengurangan 9,25% dalam kurun waktu empat tahun. Struktur pendidikan ASN memang menunjukkan perbaikan dengan berkurangnya ASN berkualifikasi pendidikan dasar dan menengah - ASN dengan kualifikasi SD menurun dari 38 orang (0,80%) menjadi 23 orang (0,53%), SLTP dari 91 orang (1,91%) menjadi 68 orang (1,57%), dan SLTA dari 804 orang (16,86%) menjadi 495 orang (11,44%). Namun, masih terdapat 586 orang ASN (13,54%) dengan kualifikasi di bawah pendidikan tinggi yang menjalankan fungsi pelayanan publik, menciptakan kesenjangan kompetensi yang menghambat implementasi prinsip-prinsip New Public Management dalam birokrasi.

Tabel II-99
Permasalahan Tingkat Pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Penurunan Jumlah ASN	Penurunan konsisten jumlah ASN tanpa peningkatan kualitas yang proporsional	Pengurangan dari 4.769 personel (2020) menjadi 4.328 personel (2023), turun 9,25% dalam empat tahun
2	ASN Kualifikasi Rendah	Masih banyak ASN dengan kualifikasi di bawah pendidikan tinggi	586 orang ASN (13,54%) dengan kualifikasi SD, SLTP, dan SLTA yang menjalankan fungsi pelayanan publik
3	Kesenjangan Kompetensi	Kesenjangan kompetensi menghambat implementasi New Public Management	ASN dengan kualifikasi SD (0,53%), SLTP (1,57%), dan SLTA (11,44%) masih menjalankan pelayanan publik
4	Keterbatasan Kapasitas Riset	Lemahnya kapasitas riset dan pengembangan kebijakan berbasis ilmiah	Hanya 2 orang ASN (0,05%) dengan kualifikasi S-3 yang stagnan sejak 2020
5	Komposisi Pendidikan Tinggi	Komposisi pendidikan tinggi belum optimal untuk transformasi digital	Peningkatan proporsi ASN S-1 dari 53,37% menjadi 59,66% dan S-2 dari 5,64% menjadi 6,72% masih belum mencukupi
6	Fluktuasi ASN S-1	Ketidakstabilan dalam pengembangan kapasitas organisasi	ASN S-1 meningkat dari 2.545 orang (2020) menjadi 2.643 (2022), lalu menurun menjadi 2.582 (2023)
7	Dominasi Orientasi Vokasi	Tingginya proporsi ASN dengan kualifikasi vokasi tanpa dukungan kapasitas analitis	Proporsi ASN dengan kualifikasi D-III/Akademi mencapai 15,66% (2023)

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari permasalahan ini adalah terhambatnya proses pengambilan keputusan berbasis bukti (evidence-based decision making) dan inovasi pelayanan publik. Meskipun terjadi peningkatan proporsi ASN berkualifikasi S-1 dari 53,37% pada 2020 menjadi 59,66% pada 2023 dan S-2 dari 5,64% menjadi 6,72%, komposisi ini belum optimal untuk mendorong transformasi digital dan inovasi dalam pelayanan publik. Keberadaan hanya 2 orang ASN (0,05%) dengan kualifikasi S-3 yang stagnan sejak 2020 mengindikasikan lemahnya kapasitas riset dan pengembangan kebijakan berbasis ilmiah dalam birokrasi Kabupaten Barito Kuala. Kemampuan analisis data, perencanaan strategis, dan evaluasi kebijakan yang seharusnya didukung oleh

kualifikasi pendidikan tinggi menjadi terbatas, menciptakan inefisiensi dalam pengelolaan sumber daya dan implementasi program pembangunan.

Dampak jangka menengah dari struktur pendidikan ASN yang belum optimal adalah terhambatnya modernisasi birokrasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan. Fluktuasi jumlah ASN berkualifikasi S-1 yang meningkat dari 2.545 orang pada 2020 menjadi 2.643 orang pada 2022, kemudian menurun menjadi 2.582 orang pada 2023, mengindikasikan ketidakstabilan dalam pengembangan kapasitas organisasi. Proporsi ASN dengan kualifikasi D-III/Akademi yang relatif tinggi (15,66% pada 2023) mencerminkan dominasi orientasi vokasi dalam birokrasi tanpa dukungan kapasitas analitis dan strategis yang memadai. Penurunan jumlah ASN secara keseluruhan tanpa peningkatan signifikan dalam struktur pendidikan menciptakan risiko gap kompetensi, di mana beban kerja semakin meningkat namun tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas yang proporsional.

Dampak jangka panjang yang paling krusial adalah terbatasnya kapasitas birokrasi untuk menjadi agen transformasi dalam pembangunan daerah. Ketidakmampuan membangun sistem pembelajaran organisasi yang mengoptimalkan diversitas tingkat pendidikan akan menciptakan fragmentasi pengetahuan dan menghambat kolaborasi antar unit. Tanpa peningkatan proporsi ASN berkualifikasi tinggi dalam bidang-bidang strategis seperti perencanaan pembangunan, analisis kebijakan, dan manajemen publik, Kabupaten Barito Kuala akan kesulitan merespons tantangan pembangunan yang semakin kompleks. Dominasi pendekatan administratif yang konvensional akan menghambat inovasi dan kreativitas dalam penyelesaian masalah publik, menciptakan birokrasi yang reaktif daripada antisipatif terhadap perubahan.

2.6.1.4.1.2 Reformasi Birokrasi

Kabupaten Barito Kuala mencatat kemajuan signifikan dalam implementasi reformasi birokrasi dengan peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) dari 52,47 pada 2020 menjadi 68,54 pada 2023, dengan penambahan 16,07 poin atau 30,63% dalam empat tahun. Namun, di balik capaian positif ini, masih terdapat tantangan substansial yang perlu diatasi. Nilai IRB 68,54 pada 2023 masih berada dalam kategori "baik" dan belum mencapai kategori "sangat baik" (>80) sesuai standar nasional, mengindikasikan

masih terdapat kesenjangan dalam implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh.

Tabel II-100
Permasalahan Reformasi Birokrasi Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Belum Optimalnya IRB	Nilai IRB masih dalam kategori "baik" belum mencapai "sangat baik"	IRB meningkat dari 52,47 (2020) menjadi 68,54 (2023), masih di bawah standar kategori "sangat baik" (>80)
2	Inkonsistensi Peningkatan	Laju peningkatan IRB tidak konsisten	Periode 2020-2021: +1,41 poin (2,69%), 2021-2022: +2,83 poin (5,25%), 2022-2023: +11,83 poin (20,86%)
3	Implementasi Sporadis	Belum terjadinya internalisasi sistematis prinsip-prinsip reformasi birokrasi	Pola peningkatan IRB yang tidak konsisten menunjukkan implementasi bersifat sporadis
4	Pendekatan Formalistik	Kecenderungan pada pemenuhan indikator formal dibanding perubahan substantif	Kesenjangan antara nilai IRB dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat
5	Budaya Birokrasi	Penguatan sistem manajemen kinerja terhambat budaya birokrasi formalistik	Budaya kerja yang masih cenderung prosedural menghambat orientasi pada hasil
6	Risiko Stagnasi	Risiko IRB mengalami plateau atau penurunan di masa mendatang	Tanpa pendekatan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang sistematis
7	Adopsi Inovasi	Adopsi inovasi dalam tata kelola pemerintahan belum merata	Kesenjangan kapasitas antar unit organisasi yang menghambat integrasi pelayanan

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari belum optimalnya reformasi birokrasi terlihat dari inkonsistensi laju peningkatan IRB. Periode 2020-2021 hanya mencatat peningkatan moderat sebesar 1,41 poin (2,69%), diikuti dengan peningkatan 2,83 poin (5,25%) pada 2021-2022. Meskipun terjadi lonjakan signifikan sebesar 11,83 poin (20,86%) pada periode 2022-2023, pola ini menunjukkan belum terjadinya internalisasi sistematis prinsip-prinsip reformasi birokrasi dalam tata kelola pemerintahan sehari-hari. Implementasi yang bersifat sporadis mengakibatkan inefisiensi dalam alokasi sumber daya dan hambatan dalam transformasi pelayanan publik. Pendekatan yang lebih

cenderung pada pemenuhan indikator formal dibandingkan perubahan substantif menciptakan kesenjangan antara nilai IRB dan kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat.

Dampak jangka menengah dari reformasi birokrasi yang belum optimal adalah terbatasnya peningkatan efisiensi dan efektivitas tata kelola pemerintahan. Meskipun terjadi peningkatan akuntabilitas dan transparansi sebagai komponen penting dalam penilaian IRB, hal ini belum sepenuhnya berkorelasi dengan perbaikan kualitas pelayanan publik melalui simplifikasi prosedur dan standarisasi pelayanan. Penguatan sistem manajemen kinerja yang berorientasi pada hasil masih terhambat oleh budaya birokrasi yang masih cenderung formalistik dan prosedural. Pengembangan profesionalisme aparatur melalui peningkatan kompetensi dan integritas belum mencapai tahap kritis yang mampu mendorong transformasi budaya kerja secara menyeluruh.

Dampak jangka panjang yang paling signifikan adalah risiko stagnasi dalam proses reformasi. Tanpa pendekatan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) yang sistematis, capaian IRB berisiko mengalami plateau atau bahkan penurunan di masa mendatang. Adopsi inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang belum merata di semua unit organisasi menciptakan kesenjangan kapasitas dan menghambat integrasi pelayanan. Keberhasilan mencapai lonjakan IRB pada 2022-2023 yang mengindikasikan tercapainya "titik kritis" (critical mass) dalam difusi inovasi tata kelola pemerintahan perlu didukung dengan penguatan mekanisme institusionalisasi dan keberlanjutan. Tanpa sistem insentif yang memadai untuk mendukung perubahan perilaku birokrasi secara berkelanjutan, transformasi yang telah dicapai berisiko tidak berkelanjutan. Keberlanjutan reformasi birokrasi memerlukan pendekatan sistemik yang mengintegrasikan aspek struktural, prosedural, dan kultural dalam satu kerangka transformasi yang komprehensif.

2.6.1.4.2 Urusan Wajib Pelayanan Dasar

2.6.1.4.2.1 Urusan Pendidikan

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan serius dalam pemerataan akses dan kualitas pendidikan antar wilayah, meskipun secara umum telah memiliki

rasio siswa-guru yang relatif baik. Analisis terhadap distribusi fasilitas pendidikan mengungkapkan ketimpangan spasial yang signifikan, dengan Kecamatan Alalak memiliki konsentrasi fasilitas pendidikan tertinggi (37 TK, 34 SD, 10 SMP, dan 3 SMA), sementara Kecamatan Cerbon sama sekali tidak memiliki SMA. Ketidakmerataan ini menciptakan kesenjangan akses pendidikan yang sistemik, terutama pada jenjang pendidikan menengah yang krusial bagi pengembangan kualitas sumber daya manusia daerah. Dari total 19 SMA yang tersedia untuk 17 kecamatan, distribusinya tidak proporsional dengan kebutuhan populasi dan sebaran geografis, mengakibatkan sebagian masyarakat harus menempuh jarak yang jauh untuk mengakses pendidikan menengah atau bahkan terpaksa tidak melanjutkan pendidikan.

Dampak jangka pendek dari ketimpangan akses pendidikan ini adalah terbatasnya kesempatan bagi anak-anak di daerah dengan fasilitas minim untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tercermin dari kesenjangan dalam rasio siswa-sekolah, di mana kecamatan seperti Marabahan memiliki rasio siswa-sekolah SMA mencapai 673 siswa per sekolah, sementara Belawang hanya 139 siswa per sekolah. Ketimpangan ini mengindikasikan tekanan berlebih pada fasilitas di beberapa wilayah dan pemanfaatan yang tidak optimal di wilayah lain. Kondisi ini diperburuk dengan disparitas kualitas, di mana beberapa kecamatan seperti Jejangkit memiliki rata-rata hanya 3 guru per TK, yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengembangan anak usia dini secara komprehensif. Keterbatasan tenaga pengajar berkualitas di wilayah-wilayah tertentu menciptakan kesenjangan kualitas pembelajaran yang berdampak langsung pada capaian akademik siswa.

Tabel II-101
Permasalahan Urusan Pendidikan Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Ketimpangan Distribusi Fasilitas	Kesenjangan spasial fasilitas pendidikan antar kecamatan	Kecamatan Alalak memiliki 37 TK, 34 SD, 10 SMP, dan 3 SMA vs Kecamatan Cerbon tidak memiliki SMA
2	Ketidakmerataan SMA	Distribusi SMA tidak proporsional dengan kebutuhan populasi	Total 19 SMA untuk 17 kecamatan dengan distribusi tidak merata
3	Rasio Siswa-Sekolah	Kesenjangan rasio siswa-sekolah antar kecamatan	Marabahan memiliki rasio 673 siswa per SMA vs Belawang hanya 139 siswa per SMA

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
4	Keterbatasan Tenaga Pengajar	Disparitas jumlah guru di beberapa kecamatan	Kecamatan Jejangkit memiliki rata-rata hanya 3 guru per TK
5	Disparitas Rasio Guru-Sekolah	Kesenjangan jumlah guru per sekolah di jenjang SMA	Marabahan memiliki rata-rata 45 guru per SMA vs Jejangkit dan Belawang hanya 17 guru per SMA
6	Akses Pendidikan Menengah	Keterbatasan akses ke jenjang pendidikan menengah di beberapa kecamatan	Kecamatan Cerbon tidak memiliki SMA, memaksa siswa berpindah atau tidak melanjutkan pendidikan
7	Kualitas Pembelajaran	Kesenjangan kualitas pembelajaran akibat disparitas tenaga pengajar	Perbedaan jumlah dan kualitas guru mempengaruhi capaian akademik siswa

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka menengah dari permasalahan pendidikan di Kabupaten Barito Kuala adalah terhambatnya pembentukan modal manusia (human capital) yang merata. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan menciptakan siklus ketidaksetaraan kesempatan yang sulit diputus. Wilayah dengan akses pendidikan terbatas seperti Kecamatan Cerbon yang tidak memiliki SMA akan menghasilkan generasi dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah, sementara wilayah dengan fasilitas memadai seperti Alalak akan terus menghasilkan lulusan dengan kualifikasi lebih tinggi. Disparitas dalam rasio guru-sekolah, di mana Marabahan memiliki rata-rata 45 guru per SMA sementara Jejangkit dan Belawang hanya 17 guru per SMA, menciptakan kesenjangan dalam kualitas pembelajaran dan pengembangan kompetensi siswa. Kondisi ini berdampak pada ketidaksetaraan kesempatan kerja dan ekonomi dalam jangka menengah, memperlebar kesenjangan sosial-ekonomi antar wilayah dalam kabupaten.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya deprivasi relatif dan perpindahan modal manusia (brain drain) dari wilayah dengan fasilitas pendidikan terbatas ke wilayah yang lebih maju. Ketimpangan akses pendidikan menengah akan menciptakan pola migrasi internal di mana generasi muda dari kecamatan seperti Cerbon terpaksa berpindah ke wilayah lain untuk melanjutkan pendidikan, dan seringkali tidak kembali. Hal ini akan menguras potensi pengembangan wilayah-wilayah tertinggal dan semakin memperkuat konsentrasi sumber daya manusia berkualitas di wilayah yang sudah maju seperti Alalak. Dalam jangka panjang,

kesenjangan pendidikan akan bertransformasi menjadi kesenjangan pembangunan yang sistemik, di mana wilayah dengan akses pendidikan terbatas akan terus tertinggal dalam produktivitas ekonomi, kualitas hidup, dan daya tarik investasi.

Ketidakmerataan distribusi fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar tidak hanya mencerminkan kegagalan dalam memenuhi prinsip keadilan distributif dalam pelayanan publik, tetapi juga mengancam kohesi sosial dan keberlanjutan pembangunan Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Tanpa intervensi kebijakan yang komprehensif untuk mengatasi kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, pola ketimpangan akan terus berlanjut dan bahkan melebar, menciptakan fragmentasi sosial-ekonomi yang semakin sulit diatasi dalam jangka panjang. Pendekatan yang terintegrasi dalam perencanaan dan implementasi kebijakan pendidikan menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan pemerataan kesempatan dan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

2.6.1.4.2.2 Urusan Kesehatan

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan serius dalam distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata secara geografis dan ketidakseimbangan komposisi jenis tenaga kesehatan, mengancam pemenuhan standar pelayanan minimal bidang kesehatan bagi 322.178 penduduk. Rasio tenaga medis (dokter) terhadap populasi di kabupaten ini hanya mencapai 1:3.790 jiwa, jauh di bawah standar WHO yang merekomendasikan 1:1.000 jiwa. Ketimpangan distribusi spasial tenaga kesehatan sangat mencolok dengan Kecamatan Marabahan, sebagai pusat pemerintahan, memiliki konsentrasi 32 tenaga medis (37,6% dari total kabupaten), 116 tenaga keperawatan (33%), dan 63 tenaga kebidanan (16,4%), sementara kecamatan-kecamatan seperti Kuripan, Bakumpai, dan Tabukan hanya memiliki masing-masing 1 tenaga medis. Ketidakseimbangan komposisi tenaga kesehatan juga terlihat dari dominasi tenaga kebidanan (38,1%) dan keperawatan (34,9%) dari total tenaga kesehatan yang tersedia, sementara jenis tenaga kesehatan lain seperti tenaga keterampilan fisik sangat terbatas.

Tabel II-102
Permasalahan Urusan Kesehatan Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Rasio Tenaga Medis	Rasio dokter terhadap populasi jauh di bawah standar	Rasio 1:3.790 jiwa, jauh di bawah standar WHO (1:1.000 jiwa)
2	Ketimpangan Distribusi	Konsentrasi tenaga kesehatan di pusat pemerintahan	Kecamatan Marabahan memiliki 32 tenaga medis (37,6%), 116 tenaga keperawatan (33%), dan 63 tenaga kebidanan (16,4%)
3	Kekurangan Tenaga Medis	Beberapa kecamatan memiliki sangat sedikit tenaga medis	Kecamatan Kuripan, Bakumpai, dan Tabukan masing-masing hanya memiliki 1 tenaga medis
4	Ketidakseimbangan Komposisi	Dominasi jenis tenaga kesehatan tertentu	Tenaga kebidanan (38,1%) dan keperawatan (34,9%) mendominasi, sementara jenis lain sangat terbatas
5	Kesenjangan Rasio per Populasi	Rasio tenaga medis per populasi sangat bervariasi antar kecamatan	Tamban (0,41 per 10.000 penduduk), Bakumpai (0,92), dan Kuripan (0,94)
6	Ketiadaan Spesialisasi Tertentu	Tidak tersedianya beberapa jenis tenaga kesehatan di seluruh kabupaten	Tidak ada tenaga psikolog klinis, tenaga kesehatan tradisional, dan ahli teknisi laboratorium medik di seluruh kabupaten
7	Keterbatasan Tenaga Khusus	Minimnya tenaga kesehatan khusus dan terkonsentrasi di satu lokasi	Hanya 3 tenaga keterampilan fisik yang seluruhnya bertugas di Kecamatan Marabahan
8	Kesenjangan Tenaga per Fasilitas	Rendahnya rasio tenaga medis per fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan	Kecamatan Tamban hanya memiliki rata-rata 0,5 tenaga medis per Puskesmas
9	Ketiadaan Tenaga Preventif	Beberapa kecamatan tidak memiliki tenaga untuk layanan preventif	Tenaga kesehatan masyarakat tidak tersedia di Kecamatan Belawang dan Bakumpai
10	Keterbatasan Kapasitas Diagnostik	Beberapa kecamatan tidak memiliki tenaga untuk layanan diagnostik	Kecamatan Wanaraya tidak memiliki tenaga keteknisan medis dan teknis biomedika

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari ketimpangan distribusi tenaga kesehatan adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, terutama di kecamatan-kecamatan dengan rasio tenaga medis rendah seperti Tamban (0,41 per 10.000 penduduk), Bakumpai (0,92), dan Kuripan (0,94). Masyarakat di wilayah-wilayah ini menghadapi hambatan signifikan dalam mengakses layanan kesehatan kuratif yang memadai, mengakibatkan penundaan penanganan, peningkatan komplikasi, dan potensi kematian yang sebenarnya dapat dicegah. Ketiadaan tenaga psikolog klinis di seluruh kecamatan dan minimnya tenaga keterampilan fisik (hanya 3 orang yang seluruhnya bertugas di Kecamatan Marabahan) menciptakan gap pelayanan kesehatan mental dan rehabilitatif yang krusial. Keterbatasan ini juga tercermin dari tidak adanya tenaga kesehatan tradisional dan ahli teknisi laboratorium medik di seluruh kabupaten, mengakibatkan kapasitas diagnostik terbatas dan integrasi sistem kesehatan tradisional dengan modern yang tidak optimal.

Dampak jangka menengah dari ketidakseimbangan tenaga kesehatan adalah terbentuknya pola pelayanan kesehatan yang cenderung terfragmentasi dan tidak holistik. Pendekatan kesehatan masyarakat komprehensif yang mencakup aspek preventif, promotif, kuratif, dan rehabilitatif sulit diwujudkan karena ketidakseimbangan komposisi tenaga kesehatan. Ketiadaan tenaga kesehatan di beberapa kecamatan untuk spesialisasi tertentu, seperti tenaga kesehatan masyarakat yang tidak tersedia di Kecamatan Belawang dan Bakumpai, serta tenaga kesehatan lingkungan yang tidak ada di Kecamatan Tabukan, mengakibatkan aspek preventif dan promotif kesehatan menjadi terabaikan. Kecamatan Wanaraya yang tidak memiliki tenaga keteknisan medis dan teknis biomedika menghadapi hambatan dalam kapasitas diagnostik, mengakibatkan keterlambatan diagnosis dan penanganan penyakit kronis. Ketidakmampuan sistem kesehatan kabupaten untuk memberikan layanan komprehensif akan meningkatkan beban penyakit dan biaya kesehatan dalam jangka menengah.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah memburuknya indikator kesehatan masyarakat dan meluasnya kesenjangan kesehatan antar wilayah. Konsentrasi tenaga kesehatan di pusat pemerintahan (Marabahan) dan wilayah perkotaan (Alalak) menciptakan ketimpangan sistemik dalam pelayanan kesehatan. Masyarakat di kecamatan dengan keterbatasan tenaga kesehatan akan mengalami

hambatan struktural dalam mengakses layanan kesehatan, mengakibatkan perbedaan status kesehatan yang semakin lebar antar wilayah. Rendahnya rasio tenaga kesehatan per fasilitas kesehatan dasar, di mana beberapa kecamatan seperti Tamban hanya memiliki rata-rata 0,5 tenaga medis per Puskesmas, menunjukkan bahwa kapasitas sistem kesehatan untuk memberikan respons terhadap peningkatan kebutuhan kesehatan sangat terbatas. Ketidakmampuan membangun kapasitas sistem kesehatan yang merata dan komprehensif akan mendorong peningkatan disparitas kesehatan yang berkorelasi dengan kesenjangan sosial-ekonomi dalam jangka panjang, menciptakan siklus kemiskinan dan penyakit yang sulit diputus.

Ketimpangan distribusi dan komposisi tenaga kesehatan di Kabupaten Barito Kuala mencerminkan ketidakefektifan strategi pengembangan sumber daya kesehatan yang ada. Konsentrasi tenaga kesehatan di pusat pemerintahan mengisyaratkan perlunya kebijakan desentralisasi dan insentif yang lebih kuat untuk mendorong pemerataan tenaga kesehatan. Ketidakeimbangan komposisi jenis tenaga kesehatan menunjukkan kurangnya perencanaan strategis dalam pengembangan kapasitas sistem kesehatan yang komprehensif. Tanpa intervensi sistemik untuk mengatasi ketimpangan ini, kesenjangan dalam akses dan kualitas pelayanan kesehatan akan semakin melebar, mengancam pencapaian tujuan pembangunan kesehatan secara keseluruhan.

2.6.1.4.2.3 Urusan Pekerjaan Umum

Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan infrastruktur jalan meskipun telah menunjukkan peningkatan kuantitas yang signifikan. Data menunjukkan ekspansi total panjang jalan dari 628,13 km pada 2022 menjadi 781,77 km pada 2023, dengan penambahan 153,64 km (24,46%) dalam setahun. Namun, di balik pertumbuhan ini, masih terdapat kesenjangan kualitas yang signifikan. Meskipun proporsi jalan beraspal meningkat dari 53,9% (2022) menjadi 54,2% (2023), hampir separuh jaringan jalan kabupaten masih berupa jalan kerikil, tanah, dan lainnya yang memiliki ketahanan dan kualitas lebih rendah. Pertumbuhan jalan tanah yang sangat drastis sebesar 119,87% (dari 29,95 km menjadi 65,86 km) mengindikasikan pendekatan kuantitas yang belum diimbangi dengan peningkatan kualitas yang setara.

Tabel II-103
Permasalahan Urusan Pekerjaan Umum Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Kesenjangan Kualitas Jalan	Hampir separuh jaringan jalan masih berkualitas rendah	Jalan beraspal hanya 54,2% (2023), sisanya 45,8% berupa jalan kerikil, tanah, dan lainnya
2	Pertumbuhan Jalan Tanah	Peningkatan drastis jalan tanah tanpa peningkatan kualitas	Pertumbuhan jalan tanah 119,87% (dari 29,95 km menjadi 65,86 km)
3	Kondisi Jalan Rusak	Tingginya proporsi jalan dalam kondisi rusak-rusak berat	Proporsi jalan rusak-rusak berat mencapai 32,89% pada 2018
4	Laju Perbaikan Lambat	Kecepatan perbaikan jalan yang tidak signifikan	Penurunan jalan rusak-rusak berat hanya 1,36% dalam tiga tahun (2016-2018)
5	Ketidakseimbangan Ekspansi	Pendekatan memprioritaskan kuantitas dibanding kualitas	Panjang jalan bertambah 153,64 km (24,46%) dalam setahun (2022-2023) tanpa peningkatan kualitas sebanding
6	Aksesibilitas Musiman	Jalan non-aspal sulit dilalui pada musim hujan	45,8% jalan non-aspal membatasi aksesibilitas kawasan potensial pada musim hujan
7	Biaya Logistik Tinggi	Kondisi jalan buruk meningkatkan biaya logistik	Menurut World Bank, biaya logistik dapat mencapai 25-30% dari harga produk di negara berkembang

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari permasalahan ini adalah tingginya biaya operasional kendaraan dan waktu tempuh yang lebih lama pada ruas-ruas jalan berkualitas rendah. Meskipun data kondisi jalan terbaru tidak tersedia (hanya tersedia data 2016-2018), proporsi jalan berkondisi rusak-rusak berat yang mencapai 32,89% pada 2018 menciptakan hambatan mobilitas yang signifikan bagi masyarakat. Jalan dengan kondisi rusak meningkatkan risiko kecelakaan dan kerusakan kendaraan, serta menghambat akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Ekspansi jaringan jalan yang tidak disertai dengan peningkatan kualitas dan pemeliharaan yang memadai mengakibatkan investasi infrastruktur menjadi kurang optimal dalam mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat.

Dampak jangka menengah dari ketidakseimbangan antara ekspansi kuantitas dan peningkatan kualitas infrastruktur jalan adalah terhambatnya pengembangan ekonomi wilayah. Kabupaten Barito Kuala dengan karakteristik geografis yang didominasi oleh dataran rendah dan aliran sungai memerlukan infrastruktur transportasi darat yang handal untuk mengimbangi ketergantungan pada transportasi air. Masih tingginya proporsi jalan non-aspal (45,8% pada 2023) membatasi aksesibilitas kawasan-kawasan potensial untuk pengembangan ekonomi, terutama di musim hujan ketika jalan tanah dan kerikil menjadi sulit dilalui. Kondisi ini menghalangi investasi di kawasan-kawasan tersebut, membatasi diversifikasi aktivitas ekonomi, dan pada akhirnya memperlebar ketimpangan spasial dalam pembangunan.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah menurunnya daya saing regional Kabupaten Barito Kuala akibat kualitas infrastruktur yang tidak optimal. Infrastruktur transportasi yang baik merupakan keunggulan kompetitif yang memperkuat daya tarik investasi, namun tingginya proporsi jalan berkualitas rendah menciptakan hambatan struktural dalam rantai nilai dan distribusi. Biaya logistik yang lebih tinggi akibat kondisi jalan yang tidak optimal, yang menurut World Bank dapat mencapai 25-30% dari harga produk di negara berkembang, mengurangi competitiveness produk lokal. Kendala konektivitas pada jaringan transportasi sekunder dan tersier membatasi integrasi ekonomi pedesaan dengan pusat-pusat pertumbuhan, menghalangi pengembangan kawasan-kawasan ekonomi baru dan diversifikasi sumber pertumbuhan.

Meski terdapat penurunan proporsi jalan rusak-rusak berat dari 34,25% (2016) menjadi 32,89% (2018), laju perbaikan yang sangat lambat (hanya 1,36 poin persentase dalam tiga tahun) menunjukkan ketidakefektifan strategi pemeliharaan infrastruktur. Tanpa pendekatan pengelolaan proaktif dalam pemeliharaan infrastruktur, investasi publik dalam ekspansi jaringan jalan tidak akan menghasilkan nilai ekonomi optimal dalam jangka panjang. Penambahan panjang jalan tanah dan kerikil yang signifikan tanpa strategi peningkatan kualitas yang jelas akan menciptakan beban pemeliharaan yang semakin besar di masa depan. Pendekatan pembangunan infrastruktur yang lebih menekankan kuantitas daripada kualitas dan keberlanjutan berisiko menciptakan aset infrastruktur yang tidak produktif dan membebani anggaran daerah dalam jangka panjang.

2.6.1.4.2.4 Urusan Perumahan dan Permukiman

Hunian Layak dan Terjangkau

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan serius dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau dengan lebih dari separuh rumah tangga (55,66%) masih belum memiliki akses ke hunian yang memenuhi standar kelayakan dan keterjangkauan pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan proporsi rumah tangga dengan akses hunian layak dari 40,06% pada 2019 menjadi 44,34% pada 2023, laju pertumbuhan yang sangat lambat dan tidak konsisten menunjukkan adanya hambatan struktural dalam pengembangan sektor perumahan. Setelah peningkatan signifikan sebesar 3,41 poin persentase (8,51%) pada periode 2019-2020, momentum ini tidak dapat dipertahankan dengan pertumbuhan yang melambat drastis menjadi 1,24% pada 2020-2021, stagnasi penuh (0%) pada 2021-2022, dan peningkatan marginal 0,75% pada 2022-2023.

Dampak jangka pendek dari rendahnya akses hunian layak dan terjangkau adalah buruknya kualitas hidup bagi mayoritas penduduk Kabupaten Barito Kuala. Ketiadaan hunian yang memenuhi standar kelayakan berdampak langsung pada kesehatan fisik dan mental, khususnya bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Hunian yang tidak layak meningkatkan risiko penyakit pernafasan, penyakit bawaan air, dan infeksi kulit yang berkorelasi dengan tingginya beban kesehatan masyarakat. Dari aspek ekonomi, hunian yang tidak memadai menurunkan produktivitas kerja, meningkatkan pengeluaran untuk perawatan kesehatan, dan mengurangi kapasitas tabungan rumah tangga untuk investasi produktif. Stagnasi akses hunian layak pada periode 2021-2022 mencerminkan kombinasi dari keterbatasan lahan, tantangan pembiayaan, kapasitas konstruksi lokal yang terbatas, dan implementasi kebijakan yang belum efektif.

Tabel II-104
Permasalahan Hunian Layak dan Terjangkau Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Akses Hunian Layak	Mayoritas rumah tangga belum memiliki akses hunian layak	55,66% rumah tangga belum memiliki akses ke hunian yang memenuhi standar kelayakan (2023)
2	Lambatnya Peningkatan	Laju pertumbuhan akses hunian layak sangat lambat	Peningkatan dari 40,06% (2019) menjadi 44,34% (2023);

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
			rata-rata 0,22 poin persentase per tahun
3	Inkonsistensi Pertumbuhan	Ketidakkonsistenan dalam laju peningkatan akses	Pertumbuhan: 8,51% (2019-2020), 1,24% (2020-2021), 0% (2021-2022), 0,75% (2022-2023)
4	Stagnasi	Periode tanpa peningkatan akses hunian layak	Stagnasi penuh (0%) pada periode 2021-2022
5	Ketercapaian Target	Keterlambatan signifikan dalam pencapaian target perumahan	Dengan laju saat ini, pencapaian proporsi 50% memerlukan waktu sekitar 26 tahun
6	Dampak Kesehatan	Hunian tidak layak meningkatkan risiko penyakit	Peningkatan risiko penyakit pernafasan, penyakit bawaan air, dan infeksi kulit
7	Hambatan Struktural	Kendala dalam pengembangan sektor perumahan	Keterbatasan lahan, tantangan pembiayaan, kapasitas konstruksi terbatas, implementasi kebijakan belum efektif

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini adalah semakin tertinggalnya Kabupaten Barito Kuala dalam pencapaian target perumahan nasional dan Sustainable Development Goals. Dengan rata-rata peningkatan hanya 0,22 poin persentase per tahun (jika mengesampingkan lonjakan 2019-2020), pencapaian proporsi 50% akan memerlukan waktu sekitar 26 tahun, jauh melampaui target pembangunan yang ditetapkan. Kesenjangan akses hunian layak juga berkontribusi pada disparitas sosial-ekonomi, dengan kelompok berpendapatan rendah terus terjebak dalam lingkaran kemiskinan akibat beban biaya perumahan yang tinggi relatif terhadap pendapatan mereka. Fenomena penghunian informal dan permukiman kumuh akan terus berkembang sebagai respons terhadap keterbatasan akses perumahan formal, menciptakan tantangan baru dalam penataan ruang dan penyediaan infrastruktur dasar.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah terhambatnya pembangunan sosial-ekonomi Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan. Hunian merupakan basis untuk pengembangan modal manusia dan produktivitas ekonomi. Tanpa akselerasi dalam penyediaan hunian layak dan terjangkau, kabupaten ini akan menghadapi

kendala sistemik dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing ekonomi. Dengan laju pertumbuhan akses saat ini, kesenjangan perumahan akan terus melebar, menciptakan segregasi spasial berdasarkan status sosial-ekonomi yang sulit dikoreksi dalam jangka panjang. Keterbatasan akses hunian layak juga akan memperburuk dampak perubahan iklim dan bencana alam, mengingat hunian yang tidak layak umumnya lebih rentan terhadap guncangan eksternal, mengakibatkan kerugian ekonomi dan sosial yang lebih besar saat bencana terjadi.

Sumber Air Minum Layak

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan signifikan dalam penyediaan akses air minum layak yang ditandai dengan pola pertumbuhan yang fluktuatif dan cenderung melambat. Meskipun terjadi peningkatan akses air minum layak dari 61,97% pada 2019 menjadi 66,35% pada 2023, capaian ini masih meninggalkan sekitar sepertiga populasi (33,65%) tanpa akses terhadap air minum yang memenuhi standar kelayakan. Pola pertumbuhan yang tidak stabil terlihat dari fluktuasi signifikan, dengan penurunan tajam sebesar 2,49 poin persentase (-3,80%) pada 2021, diikuti pemulihan 3,15 poin persentase (5,00%) pada 2022, dan kembali melambat drastis menjadi hanya 0,27 poin persentase (0,41%) pada 2023.

Tabel II-105
Permasalahan Sumber Air Minum Layak Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Akses Air Minum Layak	Masih banyak penduduk tanpa akses air minum layak	33,65% populasi belum memiliki akses air minum layak (2023)
2	Fluktuasi Pertumbuhan Akses	Pola pertumbuhan akses air minum layak tidak stabil	Penurunan 2,49 poin (-3,80%) pada 2021, kenaikan 3,15 poin (5,00%) pada 2022, melambat menjadi 0,27 poin (0,41%) pada 2023
3	Perlambatan Signifikan	Pelambatan drastis pertumbuhan akses pada tahun terakhir	Pertumbuhan hanya 0,27 poin persentase (0,41%) pada 2023
4	Kerentanan Sistem	Sistem penyediaan air rentan terhadap guncangan eksternal	Penurunan akses 3,80% pada 2021 saat pandemi COVID-19
5	Beban Ekonomi	Ketimpangan biaya air bagi masyarakat tanpa akses	Rumah tangga tanpa akses pipa dapat membayar 5-10 kali lebih tinggi per liter

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
6	Tantangan Struktural	Hambatan mendasar dalam sistem penyediaan air	Keterbatasan sumber air baku, infrastruktur distribusi belum memadai, kendala pendanaan
7	Jangka Waktu Pencapaian	Pencapaian akses universal memerlukan waktu sangat lama	Dengan laju pertumbuhan 0,41%, pencapaian akses universal memerlukan puluhan tahun

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari keterbatasan akses air minum layak adalah meningkatnya risiko kesehatan akibat konsumsi air yang tidak memenuhi standar. Penyakit bawaan air seperti diare, tifus, dan infeksi parasit tetap menjadi ancaman kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak dan kelompok rentan. Rumah tangga yang tidak memiliki akses air minum layak menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga untuk mengumpulkan air, mengurangi produktivitas ekonomi dan waktu untuk aktivitas produktif lainnya. Fluktuasi akses, seperti yang terjadi pada 2021 dengan penurunan 3,80%, menggambarkan kerentanan sistem penyediaan air terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19, yang mempengaruhi alokasi anggaran, implementasi program, dan operasional layanan.

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini adalah terhambatnya pencapaian target pembangunan berkelanjutan terkait air bersih. Perlambatan pertumbuhan akses pada 2023 (hanya 0,41%) mengindikasikan adanya tantangan struktural yang lebih mendasar dalam sistem penyediaan air minum, seperti keterbatasan sumber air baku, infrastruktur distribusi yang belum memadai, atau kendala pendanaan untuk ekspansi layanan. Kesenjangan akses juga menciptakan beban ekonomi yang tidak proporsional bagi kelompok berpendapatan rendah yang harus mengeluarkan porsi lebih besar dari pendapatan mereka untuk mendapatkan air minum layak. Penelitian global menunjukkan bahwa rumah tangga tanpa akses air pipa dapat membayar 5-10 kali lebih tinggi per liter dibandingkan mereka yang memiliki akses, menciptakan "poverty premium" yang memperburuk ketimpangan ekonomi.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah risiko krisis air yang akan semakin parah seiring dengan perubahan iklim, pertumbuhan populasi, dan peningkatan aktivitas ekonomi. Tanpa peningkatan signifikan dalam infrastruktur dan sistem pengelolaan air, Kabupaten Barito Kuala berisiko mengalami kelangkaan air

kronis yang akan membatasi pembangunan ekonomi dan memperburuk konflik penggunaan air antar sektor. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air dasar bagi seluruh masyarakat juga akan berdampak pada aspek kehidupan lainnya, termasuk pendidikan, kesehatan, dan produktivitas ekonomi, menciptakan hambatan sistemik bagi pembangunan human capital dan pengentasan kemiskinan dalam jangka panjang. Dengan pola pertumbuhan akses yang melambat drastis pada 2023 (0,41%), pencapaian akses universal akan memerlukan waktu puluhan tahun, menciptakan generasi yang kehilangan potensi produktif akibat keterbatasan akses terhadap sumber daya dasar ini.

Sanitasi Layak

Kabupaten Barito Kuala masih menghadapi kesenjangan signifikan dalam penyediaan sanitasi layak dengan 30,63% penduduk belum memiliki akses pada tahun 2023, meskipun telah terjadi peningkatan dari 63,82% pada 2019 menjadi 69,37% pada 2023. Pola peningkatan akses menunjukkan tren yang menurun dan tidak stabil, dengan kenaikan signifikan pada periode awal (5,92% pada 2019-2020 dan 3,24% pada 2020-2021), diikuti penurunan -0,90% pada 2022, dan pemulihan yang sangat lemah sebesar 0,30% pada 2023. Pola ini mengindikasikan fenomena "implementation gap" di mana momentum awal program sanitasi tidak dapat dipertahankan akibat keterbatasan kapasitas teknis, kendala pendanaan berkelanjutan, dan kejenuhan intervensi pada kelompok masyarakat yang lebih mudah dijangkau.

Tabel II-106
Permasalahan Sanitasi Layak Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Akses Sanitasi Layak	Masih banyak penduduk tanpa akses sanitasi layak	30,63% penduduk belum memiliki akses sanitasi layak (2023)
2	Pola Peningkatan Tidak Stabil	Tren peningkatan akses menurun dan fluktuatif	Kenaikan 5,92% (2019-2020), 3,24% (2020-2021), penurunan - 0,90% (2022), pemulihan lemah 0,30% (2023)
3	Implementation Gap	Momentum awal program sanitasi tidak dapat dipertahankan	Penurunan signifikan laju peningkatan setelah periode awal
4	Degradasi Sistem	Penurunan akses mengindikasikan degradasi sistem yang ada	Penurunan akses 0,90% pada 2022 menunjukkan ketidakmampuan memelihara infrastruktur

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
5	Pemulihan Lambat	Pemulihan sangat lambat setelah penurunan	Pemulihan hanya 0,30% pada 2023 setelah penurunan pada 2022
6	Kesenjangan Akses	Strategi yang ada belum menjangkau kelompok "last mile"	Kelompok dengan karakteristik geografis menantang, keterbatasan ekonomi, atau hambatan sosial-budaya
7	Dampak Ekonomi	Kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk	Studi Bank Dunia mengestimasi kerugian 1-2% dari PDB melalui biaya kesehatan, kehilangan produktivitas, dan dampak pada sektor lain
8	Capaian Universal Access	Masih jauh dari target akses universal	Capaian 69,37% (2023) masih dalam level "substantial progress" belum mencapai "universal access"

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari keterbatasan akses sanitasi layak adalah tingginya prevalensi penyakit terkait sanitasi seperti diare, kolera, dan infeksi parasit. Riset global menunjukkan bahwa sanitasi buruk berkontribusi terhadap 80% penyakit di negara berkembang, dengan dampak paling parah pada anak-anak. Kontaminasi lingkungan akibat praktik sanitasi tidak layak juga mempengaruhi kualitas air tanah dan air permukaan, menciptakan siklus penularan penyakit yang sulit diputus. Penurunan akses sanitasi sebesar 0,90% pada 2022 mengindikasikan adanya degradasi dalam sistem sanitasi existing atau ketidakmampuan memelihara infrastruktur yang telah dibangun, menciptakan risiko mundurnya capaian yang telah diraih sebelumnya.

Dampak jangka menengah dari permasalahan sanitasi meliputi peningkatan beban ekonomi akibat biaya kesehatan, kehilangan produktivitas, dan penurunan kualitas lingkungan. Studi Bank Dunia mengestimasi bahwa kerugian ekonomi akibat sanitasi buruk dapat mencapai 1-2% dari PDB suatu wilayah melalui biaya kesehatan, kehilangan waktu produktif, dan dampak pada sektor lain seperti pariwisata dan perikanan. Pemulihan yang sangat lambat pada 2023 (hanya 0,30%) mencerminkan fase "stabilization and re-acceleration" yang belum efektif, di mana strategi yang ada belum mampu menjangkau kelompok "last mile" yang umumnya memiliki karakteristik spesifik seperti geografis yang menantang, keterbatasan ekonomi, atau hambatan sosial-

budaya. Tanpa pendekatan yang lebih terarah dan terdiferensiasi, kesenjangan akses sanitasi ini akan terus bertahan.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah terhambatnya pembangunan human capital dan daya saing ekonomi daerah. Sanitasi yang buruk selama periode anak-anak berdampak pada perkembangan kognitif dan fisik, menciptakan defisit modal manusia yang irreversible dan akan terbawa hingga dewasa. Dengan capaian 69,37% pada 2023 dan kecenderungan pertumbuhan yang melambat, Kabupaten Barito Kuala berada pada level "substantial progress" namun masih jauh dari "universal access" yang menjadi target global. Merujuk pada "Sanitation Ladder Model" yang dikembangkan oleh WHO-UNICEF, pencapaian akses universal memerlukan pendekatan terintegrasi yang menggabungkan intervensi infrastruktur, perubahan perilaku, dan penguatan sistem, yang saat ini belum terlihat dalam implementasi program sanitasi di Kabupaten Barito Kuala. Tanpa akselerasi signifikan, kesenjangan sanitasi akan terus mempengaruhi kesehatan publik, kualitas lingkungan, dan produktivitas ekonomi dalam jangka panjang.

2.6.1.4.2.5 Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kemajuan dalam penanganan kriminalitas, namun masih menghadapi tantangan signifikan dalam penyelesaian perkara kejahatan. Meskipun terjadi penurunan konsisten dalam jumlah kejahatan dari 350 kasus pada 2019 menjadi 265 kasus pada 2023 (penurunan 24,29%), tingkat penyelesaian perkara masih berada pada 70% pada 2023, mengindikasikan bahwa 30% kasus kejahatan tidak terselesaikan. Persentase penyelesaian perkara memang mengalami peningkatan dari 63% pada 2019, dengan lonjakan terbesar terjadi antara 2022-2023 (dari 62% menjadi 70%), namun capaian ini masih belum mencapai standar optimal dan menyisakan permasalahan yang perlu ditangani.

Tabel II-107
Permasalahan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakatn Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Penyelesaian Perkara	Tingkat penyelesaian perkara masih belum optimal	30% kasus kejahatan tidak terselesaikan (tingkat penyelesaian 70% pada 2023)

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
2	Stagnasi Penyelesaian	Tingkat penyelesaian perkara relatif stagnan selama beberapa tahun	Stagnan pada 62-63% selama 2019-2022, baru meningkat menjadi 70% pada 2023
3	Clearance Rate Paradox	Peningkatan persentase penyelesaian lebih disebabkan penurunan jumlah kejahatan	Penurunan kejahatan 24,29% (350 menjadi 265 kasus) lebih cepat dari penurunan kapasitas penyelesaian
4	Kapasitas Investigasi	Kapasitas investigasi dan penuntutan menghadapi tantangan	Tidak mampu mencapai tingkat penyelesaian di atas 80% (standar internasional)
5	Risiko Viktimisasi	Stabilitas risiko penduduk terkena kejahatan menyembunyikan variasi penting	Risiko konsisten pada angka 1 selama lima tahun, namun dengan distribusi risiko tidak merata
6	Ketidakefisienan Alokasi	Ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya keamanan dan penegakan hukum	Pola penurunan kejahatan tidak diimbangi peningkatan proporsional kapasitas penyelesaian

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari belum optimalnya penyelesaian perkara adalah terjadinya defisit kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana. Dengan 30% kasus yang tidak terselesaikan, korban kejahatan dan keluarganya mengalami ketidakpastian keadilan, menciptakan persepsi impunitas bagi pelaku kejahatan. Situasi ini mendorong underreporting kejahatan, di mana masyarakat cenderung tidak melaporkan kejadian kejahatan karena skeptisisme terhadap kemampuan aparat dalam menuntaskan kasus. Meskipun risiko penduduk terkena kejahatan konsisten pada angka 1 selama lima tahun berturut-turut, stabilitas relatif ini dapat menyembunyikan variasi penting dalam distribusi risiko berdasarkan karakteristik sosio-demografis dan geografis. Kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat berpenghasilan rendah menghadapi risiko viktimisasi yang lebih tinggi namun kurang terlindungi oleh sistem peradilan.

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini adalah persistennya pola kejahatan tertentu yang sulit diselesaikan. Penurunan jumlah penyelesaian kejahatan dari 220 kasus pada 2019 menjadi 185 kasus pada 2023 (pengurangan 15,91%)

menunjukkan adanya tantangan dalam kapasitas investigasi dan penuntutan. Meskipun persentase penyelesaian meningkat, hal ini lebih disebabkan oleh penurunan volume kejahatan yang lebih cepat dibandingkan penurunan kapasitas penyelesaian, menciptakan fenomena "Clearance Rate Paradox". Tanpa peningkatan kapasitas absolut dalam penyelesaian perkara, sistem peradilan pidana akan menghadapi kesulitan menangani lonjakan kejahatan jika tren penurunan berbalik di masa mendatang. Situasi ini menciptakan kerentanan struktural dalam sistem keamanan daerah, di mana kapasitas penyelesaian perkara tidak berkembang secara proporsional dengan dinamika kriminalitas.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah terhambatnya pembentukan "Virtuous Cycle in Criminal Justice", di mana peningkatan efektivitas penyelesaian kasus seharusnya berkontribusi pada penurunan kejahatan lebih lanjut. Dengan tingkat penyelesaian yang stagnan pada 62-63% selama 2019-2022 dan hanya meningkat menjadi 70% pada 2023, momentum untuk akselerasi perbaikan sistem keamanan dan peradilan belum tercipta secara optimal. Ketidakmampuan mencapai tingkat penyelesaian perkara di atas 80% yang menjadi standar internasional untuk sistem peradilan yang efektif akan menghambat pembentukan deterrence effect yang diperlukan untuk menekan angka kejahatan secara signifikan dan berkelanjutan. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan menegakkan keadilan secara konsisten juga akan melemahkan norma kepatuhan hukum dalam masyarakat, menciptakan budaya ketidaktaatan yang sulit dikoreksi.

Pola penurunan kejahatan yang tidak diimbangi dengan peningkatan proporsional dalam kapasitas penyelesaian perkara juga mencerminkan ketidakefisienan dalam alokasi sumber daya keamanan dan penegakan hukum. Peningkatan persentase penyelesaian kejahatan pada 2023 mencerminkan penerapan "Strategic Policing Initiative", namun peningkatan ini perlu dikonsolidasikan dan diperluas untuk menciptakan sistem peradilan pidana yang benar-benar efektif dan responsif. Tanpa pendekatan integratif yang memperkuat seluruh komponen sistem peradilan pidana, dari pencegahan hingga penuntutan dan rehabilitasi, tren positif yang tercatat selama 2019-2023 berisiko tidak berkelanjutan, dan Kabupaten Barito Kuala akan menghadapi tantangan baru dalam menjaga keamanan dan ketertiban umum di masa mendatang.

2.6.1.4.2.6 Urusan Sosial

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan serius berupa ketimpangan kesejahteraan yang sangat mencolok antar kecamatan, tercermin dari disparitas ekstrem dalam distribusi keluarga prasejahtera dan sejahtera. Dengan koefisien variasi (CV) sebesar 0,75 untuk persentase keluarga sejahtera antar kecamatan, tingkat ketimpangan spasial di kabupaten ini jauh melampaui ambang batas 0,5 yang mengindikasikan ketimpangan substansial. Kesenjangan paling dramatis terlihat dari rentang proporsi keluarga prasejahtera yang sangat lebar, dari hanya 4,98% di Kecamatan Tamban hingga 71,53% di Kecamatan Kuripan. Disparitas yang mencolok juga tercermin dari rasio keluarga sejahtera terhadap prasejahtera yang berkisar dari 19,09:1 di Tamban hingga hanya 0,40:1 di Kuripan, menunjukkan kesenjangan kesejahteraan yang mencapai hampir 50 kali lipat antar kecamatan.

Dampak jangka pendek dari ketimpangan ekstrem ini adalah terhambatnya efektivitas program pengentasan kemiskinan akibat distribusi sumber daya yang tidak sesuai dengan kebutuhan riil setiap wilayah. Kecamatan Anjir Muara dengan 6.947 keluarga prasejahtera (40,46% dari total keluarga prasejahtera kabupaten) dan tingkat kemiskinan 69,70% memerlukan intervensi yang jauh lebih intensif dibandingkan kecamatan lain. Fenomena konsentrasi kemiskinan ekstrem ini menciptakan "poverty trap" di mana rendahnya investasi infrastruktur, terbatasnya akses layanan publik, dan kurangnya peluang ekonomi saling menguatkan, mempersulit upaya pengentasan kemiskinan. Begitu pula di Kecamatan Kuripan dengan proporsi keluarga prasejahtera mencapai 71,53%, kondisi ini mengklasifikasikannya sebagai "extreme poverty hotspot" yang memerlukan pendekatan multi-dimensi dan komprehensif, bukan sekadar program bantuan konvensional. Bantuan sosial standar tidak akan efektif mengatasi kemiskinan kronis di kedua kecamatan ini tanpa disertai transformasi struktural dalam perekonomian lokal.

Tabel II-108
Permasalahan Urusan Sosial Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Ketimpangan Kesejahteraan	Disparitas ekstrem dalam distribusi keluarga prasejahtera dan	Koefisien variasi (CV) 0,75 untuk persentase keluarga sejahtera (jauh di atas ambang batas 0,5)

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
		sejahtera antar kecamatan	
2	Kesenjangan Proporsi Prasejahtera	Rentang proporsi keluarga prasejahtera sangat lebar antar kecamatan	Dari 4,98% di Kecamatan Tamban hingga 71,53% di Kecamatan Kuripan
3	Disparitas Rasio Kesejahteraan	Rasio keluarga sejahtera terhadap prasejahtera sangat bervariasi	Dari 19,09:1 di Tamban hingga hanya 0,40:1 di Kuripan (kesenjangan hampir 50 kali lipat)
4	Konsentrasi Kemiskinan	Konsentrasi keluarga prasejahtera di kecamatan tertentu	Kecamatan Anjir Muara dengan 6.947 keluarga prasejahtera (40,46% dari total keluarga prasejahtera kabupaten)
5	Poverty Hotspot	Beberapa kecamatan mengalami kemiskinan ekstrem	Kecamatan Kuripan dengan proporsi keluarga prasejahtera 71,53%
6	Klusterisasi Spasial	Pola kluster kecamatan berdasarkan tingkat kesejahteraan	Kecamatan dengan keluarga sejahtera tinggi (Tamban, Tabunganen, dan Mandastana dengan >90% keluarga sejahtera) cenderung berkelompok
7	Korelasi Negatif	Hubungan kuat antara jumlah keluarga prasejahtera dan rasio keluarga sejahtera	Korelasi negatif $r = -0,92$
8	Beban Demografis	Proporsi keluarga prasejahtera yang masih tinggi di tingkat kabupaten	32,23% keluarga di Kabupaten Barito Kuala masih dalam kategori prasejahtera

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka menengah dari ketimpangan kesejahteraan adalah terpolarisasinya pembangunan spasial kabupaten yang semakin memperlebar kesenjangan antar wilayah. Analisis distribusi spasial menunjukkan pola kluster yang mengkhawatirkan, di mana kecamatan dengan persentase keluarga sejahtera tinggi (Tamban, Tabunganen, dan Mandastana dengan >90% keluarga sejahtera) cenderung berkelompok, begitu pula dengan kecamatan berpenduduk prasejahtera tinggi. Fenomena "spatial contagion" ini menciptakan dualisme ekonomi dalam satu kabupaten, di mana wilayah sejahtera terus berkembang melalui efek spillover positif, sementara wilayah miskin terjebak dalam lingkaran setan kemiskinan. Korelasi negatif

yang kuat ($r = -0,92$) antara jumlah keluarga prasejahtera dan rasio keluarga sejahtera mengkonfirmasi bahwa beban demografis kemiskinan terakumulasi di wilayah-wilayah tertentu dan menjadi faktor penghambat pembangunan yang semakin sulit diatasi seiring waktu. Kesenjangan infrastruktur dan layanan publik akan semakin melebar mengikuti polarisasi kesejahteraan ini, menciptakan dua realitas pembangunan yang kontras dalam satu kabupaten.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah terhambatnya pembangunan kabupaten secara keseluruhan akibat inefisiensi alokasi sumber daya dan hilangnya potensi produktif dari wilayah-wilayah tertinggal. Perbedaan mendasar dalam struktur ekonomi antara kecamatan dengan tingkat kesejahteraan tinggi seperti Tamban (yang memiliki diversifikasi ekonomi lebih baik dengan kontribusi sektor jasa dan perdagangan yang signifikan) dan kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi seperti Anjir Muara dan Kuripan (yang masih didominasi oleh sektor pertanian subsisten) menunjukkan tantangan struktural yang dihadapi. Tanpa transformasi struktural ekonomi di kecamatan-kecamatan tertinggal, kesenjangan kesejahteraan akan semakin melebar dan menciptakan ketimpangan yang semakin sulit diatasi. Dengan 32,23% keluarga di Kabupaten Barito Kuala masih berada dalam kategori prasejahtera, kabupaten ini menghadapi "demographic burden of poverty" yang signifikan, membatasi kapasitas fiskal, menghambat pembentukan pasar lokal yang kuat, dan mengurangi potensi pengembangan modal manusia untuk pembangunan jangka panjang.

Disparitas kesejahteraan yang ekstrem ini mencerminkan kegagalan mekanisme redistribusi dan pemerataan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala. Pola pembangunan yang tidak berimbang telah menciptakan kantong-kantong kemiskinan yang persisten, terutama di kecamatan-kecamatan dengan aksesibilitas terbatas dan ketergantungan tinggi pada sektor pertanian subsisten. Tanpa intervensi komprehensif yang mengatasi akar struktural ketimpangan, termasuk diversifikasi ekonomi, pengembangan infrastruktur penghubung, dan peningkatan kapasitas produktif masyarakat di wilayah tertinggal, kesenjangan kesejahteraan akan menjadi fitur permanen dalam lanskap pembangunan Kabupaten Barito Kuala, membatasi potensi pembangunan daerah secara keseluruhan dalam jangka panjang.

2.6.1.4.3 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

2.6.1.4.3.1 Tenaga Kerja

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan kompleks dalam aspek ketenagakerjaan meskipun data menunjukkan peningkatan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari 70,74% pada tahun 2022 menjadi 71,89% pada tahun 2023. Peningkatan sebesar 1,15 poin persentase atau 1,63% ini memang melebihi rata-rata peningkatan TPAK nasional yang hanya 0,82 poin persentase pada periode yang sama, namun angka ini menyembunyikan struktural dalam pasar tenaga kerja daerah. Keterbatasan data yang hanya tersedia untuk dua tahun (2022-2023) membatasi analisis tren jangka panjang dan menghalangi pemahaman komprehensif tentang dinamika ketenagakerjaan di kabupaten ini.

Dampak jangka pendek dari keterbatasan ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi apakah peningkatan TPAK merepresentasikan tren positif berkelanjutan atau hanya pemulihan temporer dari penurunan sebelumnya. Analisis data ketenagakerjaan dari tahun-tahun sebelumnya (jika tersedia) sangat diperlukan untuk memberikan konteks yang lebih lengkap. Tanpa informasi historis yang memadai, pengambilan kebijakan ketenagakerjaan berisiko tidak tepat sasaran dan tidak responsif terhadap pola siklus ekonomi daerah. Peningkatan TPAK juga tidak memberikan gambaran tentang kualitas pekerjaan yang tersedia dan tingkat kesesuaian keterampilan angkatan kerja dengan kebutuhan pasar. Meskipun lebih banyak orang berpartisipasi dalam pasar kerja, permasalahan underemployment, ketidaksesuaian keterampilan, dan kondisi kerja yang tidak layak tetap persisten.

Tabel II-109
Permasalahan Tenaga Kerja Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Keterbatasan Data	Data ketenagakerjaan hanya tersedia dua tahun, membatasi analisis tren	Hanya tersedia data TPAK 2022-2023
2	Konteks Peningkatan TPAK	Sulit menentukan apakah peningkatan TPAK merupakan tren positif atau pemulihan temporer	Peningkatan TPAK 1,15 poin persentase (1,63%) dari 70,74% (2022) menjadi 71,89% (2023)

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
3	Kualitas Pekerjaan	TPAK tidak memberikan gambaran tentang kualitas pekerjaan	Tidak ada data tentang underemployment, kesesuaian keterampilan, dan kondisi kerja
4	Distribusi Sektoral	Ketidakjelasan distribusi sektoral tenaga kerja dan produktivitasnya	Meskipun TPAK 71,89% (2023) di atas rata-rata nasional (69,47%) dan provinsi (70,32%)
5	Kesenjangan Inklusivitas	Ketidakmampuan menganalisis kesenjangan gender dan usia	Tidak ada data demografis terkait partisipasi angkatan kerja
6	Penyerapan Tenaga Kerja	Tidak ada informasi tentang kemampuan pasar menyerap tambahan angkatan kerja secara produktif	Tambahan angkatan kerja dari peningkatan TPAK 1,15 poin persentase
7	Strategi Ketenagakerjaan	Kesulitan mengembangkan strategi ketenagakerjaan jangka panjang berbasis bukti	Ketidaklengkapan data tentang pengangguran, jenis pekerjaan, dan produktivitas
8	Pemanfaatan Peluang IKN	Risiko ketidaksiapan memanfaatkan peluang terkait pembangunan IKN	Keterbatasan pemahaman tentang dinamika ketenagakerjaan

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka menengah dari ketidaklengkapan pemahaman tentang dinamika ketenagakerjaan adalah kesulitan dalam merencanakan pengembangan sektor ekonomi yang tepat untuk menyerap tenaga kerja secara produktif. Meskipun TPAK Kabupaten Barito Kuala pada 2023 yang mencapai 71,89% berada di atas rata-rata nasional (69,47%) dan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan (70,32%), angka ini tidak memberikan informasi tentang distribusi sektoral tenaga kerja dan produktivitasnya. Tanpa memahami struktur sektoral ketenagakerjaan, kabupaten ini kesulitan mengidentifikasi sektor mana yang memerlukan investasi dan pengembangan keterampilan untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas. Ketidakmampuan menganalisis kesenjangan gender dan usia dalam partisipasi angkatan kerja juga menghambat pengembangan kebijakan inklusif yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah risiko keberlanjutan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Meskipun teori "Economic Growth and Labor Market Dynamics" menyatakan bahwa peningkatan TPAK sebesar 1,15 poin persentase berpotensi berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sebesar 0,35-0,58 poin persentase, asumsi ini hanya valid jika tambahan angkatan kerja dapat diserap secara produktif oleh pasar. Tanpa informasi tentang tingkat pengangguran, jenis pekerjaan yang tersedia, dan produktivitas tenaga kerja, sulit menentukan apakah peningkatan partisipasi angkatan kerja benar-benar diterjemahkan menjadi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Ketidakmampuan mengembangkan strategi ketenagakerjaan jangka panjang berbasis bukti akan menghambat diversifikasi ekonomi dan peningkatan daya saing regional Kabupaten Barito Kuala dalam konteks transformasi ekonomi Kalimantan.

Dalam konteks posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai wilayah pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), keterbatasan pemahaman tentang dinamika ketenagakerjaan menciptakan risiko ketidaksiapan dalam memanfaatkan peluang ekonomi terkait pembangunan IKN. Tanpa strategi pengembangan tenaga kerja yang terarah, kabupaten ini berisiko hanya menjadi pemasok tenaga kerja tidak terampil dengan nilai tambah rendah, sementara posisi strategis dengan nilai ekonomi tinggi diisi oleh tenaga kerja dari daerah lain. Kegagalan mengoptimalkan potensi demografis akan membatasi kontribusi kabupaten dalam rantai nilai ekonomi regional yang terbentuk seiring pembangunan IKN dan menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

2.6.1.4.3.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pemberdayaan Gender

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan serius dalam pencapaian kesetaraan gender meskipun data menunjukkan tren peningkatan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) dari 78,35 pada 2019 menjadi 79,24 pada 2023. Peningkatan sebesar 0,89 poin atau 1,14% selama lima tahun ini sangat lambat, menandakan adanya hambatan struktural dalam pencapaian kesetaraan gender yang substansial. Setelah mengalami penurunan dari 78,35 pada 2019 menjadi 78,03 pada 2020 (-0,32 poin atau -0,41%), pemulihan IPG terjadi dengan sangat lambat dan tidak

konsisten, dengan peningkatan tahunan yang bervariasi dari 0,14 poin (0,18%) pada 2020-2021, 0,63 poin (0,81%) pada 2021-2022, dan kembali melambat menjadi 0,44 poin (0,56%) pada 2022-2023.

Tabel II-110
Permasalahan Capaian Indeks Pemberdayaan Gender

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Lambatnya Peningkatan IPG	Peningkatan IPG sangat lambat selama periode lima tahun	Peningkatan hanya 0,89 poin (1,14%) dari 78,35 (2019) menjadi 79,24 (2023)
2	Penurunan Awal	Penurunan IPG pada awal periode pengamatan	Penurunan 0,32 poin (-0,41%) dari 78,35 (2019) menjadi 78,03 (2020)
3	Pemulihan Tidak Konsisten	Pemulihan IPG terjadi dengan lambat dan tidak konsisten	Peningkatan bervariasi: 0,18% (2020-2021), 0,81% (2021-2022), dan 0,56% (2022-2023)
4	Kerentanan Terhadap Guncangan	Kesetaraan gender rentan terhadap guncangan eksternal	Penurunan 0,41% pada periode 2019-2020 akibat pandemi COVID-19
5	Perlambatan Momentum	Laju pertumbuhan yang melambat pada periode terakhir	Penurunan laju pertumbuhan dari 0,81% (2021-2022) menjadi 0,56% (2022-2023)
6	Hambatan Pencapaian Target	Lambatnya pencapaian kategori "kesetaraan gender tinggi"	Dengan laju pertumbuhan rata-rata 0,52% per tahun, perlu waktu 1,8 tahun untuk mencapai IPG 80
7	Hambatan Pertumbuhan Ekonomi	Potensi pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat kesenjangan gender	Peningkatan kesetaraan gender 1 poin dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi 0,3-0,5%

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari lambatnya peningkatan IPG ini adalah bertahannya kesenjangan partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan di Kabupaten Barito Kuala. Meskipun nilai 79,24 pada 2023 tergolong dalam kategori "kesetaraan gender sedang tinggi" dan berada di atas rata-rata nasional (78,91) dan rata-rata provinsi Kalimantan Selatan (78,86), laju pertumbuhan yang sangat lambat mengindikasikan ketidakmampuan untuk membuat terobosan signifikan dalam mengatasi hambatan struktural bagi partisipasi perempuan. Penurunan pada periode 2019-2020 sebesar 0,41% menunjukkan bagaimana kemajuan kesetaraan gender sangat rentan terhadap guncangan eksternal seperti pandemi COVID-19, di mana beban ganda

perempuan meningkat, akses terhadap layanan dasar terbatas, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan publik menurun.

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini tercermin dalam pola pertumbuhan IPG yang tidak stabil. Meskipun terjadi pemulihan pasca-pandemi, laju pertumbuhan yang melambat pada 2022-2023 (0,56%) dibandingkan periode 2021-2022 (0,81%) menunjukkan bahwa momentumnya tidak dapat dipertahankan. Pola "curvilinear recovery pattern" ini mengindikasikan adanya hambatan sistemik yang belum teratasi, mengakibatkan kesulitan untuk mempertahankan akselerasi perbaikan kesetaraan gender. Dengan laju pertumbuhan rata-rata hanya 0,52% per tahun (periode 2020-2023), pencapaian IPG 80 (batas bawah kategori "kesetaraan gender tinggi") akan memerlukan waktu sekitar 1,8 tahun, yang terlalu lambat untuk mengubah dinamika pembangunan secara signifikan. Kesenjangan partisipasi yang bertahan ini membatasi kontribusi perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial daerah, mengurangi potensi pertumbuhan inklusif.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah hilangnya potensi pembangunan akibat tidak optimalnya partisipasi perempuan dalam berbagai sektor. Studi global menunjukkan bahwa peningkatan kesetaraan gender sebesar 1 poin dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 0,3-0,5%, yang berarti lambatnya peningkatan IPG di Kabupaten Barito Kuala telah menghambat potensi pertumbuhan daerah. Ketidakmampuan untuk mengatasi akar masalah kesetaraan gender secara komprehensif juga menciptakan lingkaran setan, di mana rendahnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan membatasi advokasi untuk kebijakan yang responsif gender, yang pada gilirannya semakin melanggengkan kesenjangan gender. Tanpa terobosan signifikan, Kabupaten Barito Kuala berisiko mengalami stagnasi jangka panjang dalam pembangunan inklusif, serta tidak mampu memanfaatkan potensi demografis secara optimal untuk mendorong pembangunan daerah.

Indeks Ketimpangan Gender

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan kompleks dalam kesetaraan gender yang tercermin dari fluktuasi signifikan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) selama periode 2019-2023. Meskipun Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) menunjukkan peningkatan stabil 0,28% per tahun, IKG mengalami volatilitas tinggi dengan koefisien variasi mencapai 0,050, jauh di atas variabilitas IPG (0,005). Fluktuasi IKG dari 0,530

(2019) meningkat menjadi 0,553 (2020), turun drastis menjadi 0,483 (2021), kemudian kembali meningkat menjadi 0,509 (2022) dan 0,516 (2023) menunjukkan ketidakstabilan pencapaian kesetaraan gender dan kerentanannya terhadap faktor eksternal.

Tabel II-111
Permasalahan Capaian Indeks Ketimpangan Gender Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Volatilitas IKG	Fluktuasi signifikan Indeks Ketimpangan Gender	Koefisien variasi IKG mencapai 0,050, jauh di atas variabilitas IPG (0,005)
2	Fluktuasi Nilai	Nilai IKG sangat berfluktuasi selama periode pengamatan	IKG: 0,530 (2019) → 0,553 (2020) → 0,483 (2021) → 0,509 (2022) → 0,516 (2023)
3	Kerentanan Terhadap Krisis	Krisis memperburuk kesenjangan gender	Peningkatan ketimpangan 4,34% pada fase awal pandemi (2019-2020)
4	Ketidakberlanjutan Perbaikan	Momentum perbaikan tidak dapat dipertahankan	Penurunan IKG 12,65% pada 2021 diikuti peningkatan kembali 5,38% (2022) dan 1,38% (2023)
5	Kontras IPG-IKG	Ketidakselarasan antara stabilitas IPG dan volatilitas IKG	Korelasi negatif moderat (-0,58) antara IKG dan IPG
6	Inefektivitas Intervensi	Intervensi kesetaraan gender bersifat temporer	Kenaikan kembali IKG setelah fase pemulihan awal (2021)
7	Hambatan Struktural	Kebijakan belum mengatasi faktor struktural ketimpangan gender	Proyeksi IPG mencapai nilai 80 dalam 2,8 tahun belum diimbangi stabilitas IKG

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari volatilitas IKG adalah inkonsistensi dalam program dan kebijakan kesetaraan gender di Kabupaten Barito Kuala. Peningkatan ketimpangan gender pada fase awal pandemi (2019-2020) sebesar 4,34% menunjukkan bagaimana krisis dapat memperburuk kesenjangan gender melalui peningkatan beban perawatan tidak berbayar, peningkatan kerentanan ekonomi perempuan, dan berkurangnya akses terhadap layanan esensial. Meskipun terjadi perbaikan drastis pada 2021 dengan penurunan IKG sebesar 12,65%, momentum ini tidak dapat dipertahankan, dengan IKG kembali meningkat 5,38% pada 2022 dan 1,38% pada 2023. Ketidakstabilan ini menciptakan kesulitan dalam perencanaan program pemberdayaan perempuan dan

perlindungan sosial yang responsif gender, serta menghambat alokasi sumber daya yang efektif untuk mengatasi kesenjangan gender.

Dampak jangka menengah terlihat dari kontras antara stabilitas IPG dan volatilitas IKG, yang menunjukkan bahwa kebijakan dan program pemberdayaan gender di Kabupaten Barito Kuala belum berhasil mengatasi faktor-faktor struktural yang mempertahankan ketimpangan gender. Korelasi negatif moderat (-0,58) antara IKG dan IPG mengkonfirmasi bahwa meskipun ada upaya pemberdayaan, hasilnya belum secara efektif mengurangi ketimpangan. Kenaikan kembali IKG setelah fase pemulihan awal (2021) menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan cenderung bersifat temporer dan tidak berkelanjutan, mencerminkan prioritas dan sumber daya untuk program kesetaraan gender yang berkurang seiring dengan normalisasi pasca-krisis. Kegagalan mempertahankan momentum perbaikan kesetaraan gender ini membatasi akses perempuan terhadap sumber daya dan peluang, menghambat kontribusi mereka dalam pembangunan daerah.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah berlanjutnya ketimpangan struktural antara laki-laki dan perempuan yang menghambat pembangunan inklusif. Meskipun IPG diproyeksikan mencapai nilai 80 dalam waktu sekitar 2,8 tahun, fluktuasi IKG menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif untuk mengatasi akar permasalahan ketimpangan gender. Tanpa intervensi struktural, kesenjangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi akan terus berlanjut, menciptakan siklus ketidaksetaraan antargenerasi. Ketidakstabilan pencapaian kesetaraan gender juga mengancam keberlanjutan capaian pembangunan daerah, mengingat penelitian global telah membuktikan bahwa tingkat ketimpangan gender yang tinggi berkorelasi negatif dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia secara keseluruhan. Dalam jangka panjang, ketidakmampuan Kabupaten Barito Kuala untuk mengatasi volatilitas indikator kesetaraan gender akan membatasi kapasitas daerah untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang inklusif dan berkeadilan.

Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak

Kabupaten Barito Kuala menghadapi permasalahan serius dalam perlindungan dan pemenuhan hak anak, dengan Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) sebesar 73,56 yang menempatkannya pada peringkat ke-10 dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan

Selatan dan 4,33 poin di bawah rata-rata provinsi (77,89) pada tahun 2023. Permasalahan utama terletak pada ketidakseimbangan pencapaian antar komponen IPHA, dengan koefisien variasi (CV) mencapai 0,18 yang menunjukkan variabilitas tinggi antar dimensi pemenuhan hak anak. Kesenjangan ekstrem terlihat antara keunggulan luar biasa dalam aspek tumbuh kembang (67,97, tertinggi di provinsi) dengan kelemahan signifikan dalam aspek partisipasi (77,35, terendah di provinsi) dan perlindungan (55,73, peringkat ke-9).

Tabel II-112
Permasalahan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	IPHA Kabupaten Barito Kuala di bawah rata-rata provinsi	IPHA 73,56 (peringkat ke-10 dari 13 kabupaten/kota), 4,33 poin di bawah rata-rata provinsi (77,89) pada 2023
2	Ketidakseimbangan Komponen	Variabilitas tinggi antar dimensi pemenuhan hak anak	Koefisien variasi (CV) mencapai 0,18
3	Kesenjangan Antar Dimensi	Kontras ekstrem antara komponen terbaik dan terburuk	Tumbuh kembang (67,97, tertinggi di provinsi) vs partisipasi (77,35, terendah di provinsi) dan perlindungan (55,73, peringkat ke-9)
4	Komponen Perlindungan	Kelemahan dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan	Nilai komponen Perlindungan 55,73, di bawah rata-rata provinsi (58,06)
5	Komponen Partisipasi	Keterbatasan kesempatan anak terlibat dalam pengambilan keputusan	Partisipasi hanya 77,35 (9,15 poin di bawah rata-rata provinsi) dengan z-score -1,82
6	Komponen Identitas	Masih ada anak tanpa dokumentasi identitas legal	Komponen Identitas 72,53, sedikit di bawah rata-rata provinsi (72,88)
7	IKKA Kelangsungan Hidup	Meskipun di atas rata-rata, perlu dukungan komponen lain	IKKA Kelangsungan Hidup 88,05, di atas rata-rata provinsi (89,41)

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari ketidakseimbangan ini adalah terhambatnya pemenuhan hak anak secara holistik di Kabupaten Barito Kuala. Rendahnya nilai

komponen Perlindungan (55,73) yang berada di bawah rata-rata provinsi (58,06) mencerminkan kelemahan dalam sistem pencegahan dan penanganan kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak. Anak-anak di kabupaten ini menghadapi risiko perlindungan yang lebih tinggi dengan jangkauan layanan yang terbatas dan koordinasi antar pemangku kepentingan yang tidak optimal. Komponen Partisipasi yang hanya mencapai 77,35 (9,15 poin di bawah rata-rata provinsi) dengan z-score -1,82 menunjukkan bahwa anak-anak di Kabupaten Barito Kuala memiliki kesempatan yang sangat terbatas untuk terlibat dalam pengambilan keputusan dan aktivitas sosial-budaya, menghambat pengembangan kepercayaan diri dan keterampilan kepemimpinan mereka.

Dampak jangka menengah dari pola "uneven development" dalam pemenuhan hak anak ini adalah terhambatnya pengembangan potensi anak secara optimal. Meskipun Kabupaten Barito Kuala unggul dalam aspek tumbuh kembang (67,97, tertinggi di provinsi), keunggulan ini tidak dapat dioptimalkan tanpa dukungan aspek perlindungan dan partisipasi yang memadai. Anak-anak yang mendapatkan stimulasi tumbuh kembang yang baik namun minim perlindungan dan partisipasi akan mengalami hambatan dalam mengaktualisasikan potensi mereka secara penuh. Komponen Identitas yang mencapai 72,53, sedikit di bawah rata-rata provinsi (72,88), menunjukkan masih adanya anak-anak yang tidak memiliki dokumentasi identitas legal, membatasi akses mereka terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Ketidakseimbangan ini juga menciptakan kesenjangan pemenuhan hak antar kelompok anak, di mana sebagian menerima intervensi yang komprehensif sementara yang lain tertinggal.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah tidak tercapainya pembangunan sumber daya manusia yang optimal di Kabupaten Barito Kuala. Tanpa pendekatan yang lebih seimbang dan terintegrasi dalam pemenuhan hak anak, kabupaten ini berisiko gagal mengembangkan generasi muda yang tangguh dan kompetitif. Kelemahan dalam aspek perlindungan dan partisipasi akan menghasilkan generasi yang rentan terhadap eksploitasi dan kurang mampu berpartisipasi aktif dalam pembangunan masyarakat. Meskipun IKKA Kelangsungan Hidup mencapai 88,05, menempatkannya di atas rata-rata provinsi (89,41), capaian ini tidak akan berkelanjutan tanpa penguatan komponen lainnya. Dalam jangka panjang, ketidakseimbangan ini akan

menciptakan hambatan struktural bagi pembangunan kabupaten, mengingat kualitas sumber daya manusia merupakan determinan kunci daya saing dan kemajuan daerah. Tanpa intervensi komprehensif untuk menyeimbangkan seluruh komponen IPHA, Kabupaten Barito Kuala akan kesulitan mengoptimalkan "bonus demografi" dan menghadapi tantangan dalam menciptakan masyarakat yang produktif, inklusif, dan berketahanan tinggi.

2.6.1.4.3.3 Lingkungan Hidup

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan kompleks dalam pengelolaan kualitas lingkungan hidup, tercermin dari fluktuasi signifikan nilai IKLH selama periode 2019-2023. Meskipun terdapat peningkatan neto sebesar 4,68 poin atau 8,07% selama lima tahun (dari 57,98 pada 2019 menjadi 62,66 pada 2023), pola perubahan yang tidak stabil mengindikasikan adanya permasalahan fundamental dalam pengelolaan lingkungan. Setelah mengalami penurunan tajam sebesar 6,64% pada 2020 (menjadi 54,13) akibat dampak pandemi COVID-19, IKLH mengalami lonjakan dramatis sebesar 16,79% pada 2021 (menjadi 63,21), diikuti stabilisasi sebesar 0,32% pada 2022 (menjadi 63,41), kemudian kembali menurun sebesar 1,18% pada 2023 (menjadi 62,66) dan pada tahun 2024 meningkat menjadi 64,02.

Tabel II-113
Permasalahan Lingkungan Hidup Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Fluktuasi Nilai IKLH	Ketidakstabilan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan neto 4,68 poin (8,07%) dari 57,98 (2019) menjadi 62,66 (2023), namun dengan pola yang tidak stabil
2	Pola Perubahan Tidak Stabil	Pola perubahan IKLH yang tidak konsisten	Penurunan 6,64% pada 2020, lonjakan 16,79% pada 2021, stabilisasi 0,32% pada 2022, penurunan 1,18% pada 2023
3	Ketidakcapaian Kategori "Baik"	IKLH masih dalam kategori "cukup baik" belum mencapai "baik"	Nilai IKLH 62,66 (2023) masih jauh dari kategori "baik" (rentang 70-90)
4	Tingkat Fluktuasi Signifikan	Tingkat fluktuasi yang bermakna dalam konteks indikator lingkungan	Standar deviasi 3,89 dan koefisien variasi 0,064
5	Pola "Boom-and-Bust"	Ketidakmampuan mempertahankan momentum perbaikan	Pertumbuhan melambat drastis dari 16,79% (2021)

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
			menjadi 0,32% (2022) dan -1,18% (2023)
6	Kompleksitas Ekosistem	Karakteristik geografis menciptakan kompleksitas pengelolaan lingkungan	Dominasi lahan gambut dan dataran rendah yang memiliki sensitivitas tinggi
7	Degradasi Kualitas Air dan Tanah	Praktik pertanian intensif berkontribusi pada degradasi lingkungan	Penggunaan pestisida dan pupuk kimia di lahan pasang surut

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari fluktuasi IKLH ini adalah ketidakstabilan kondisi lingkungan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat dan keberlanjutan ekosistem lokal. Meskipun nilai 62,66 pada 2023 masih tergolong dalam kategori "cukup baik" menurut klasifikasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (rentang 50-70), posisi ini masih jauh dari kategori "baik" (rentang 70-90). Penurunan pada periode 2022-2023 sebesar 1,18% menunjukkan bagaimana kemajuan kualitas lingkungan sangat rentan terhadap tekanan eksternal dan internal, termasuk intensifikasi aktivitas ekonomi pasca-pandemi dan tantangan pengelolaan ekosistem spesifik seperti lahan gambut dan dataran rendah yang mendominasi wilayah Barito Kuala. Ketidakstabilan ini juga tercermin dari standar deviasi sebesar 3,89 dan koefisien variasi 0,064, yang menunjukkan tingkat fluktuasi yang cukup berarti dalam konteks indikator lingkungan.

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini tercermin dalam pola pertumbuhan IKLH yang tidak konsisten. Meskipun terjadi pemulihan signifikan pasca-pandemi pada 2021, momentum ini tidak dapat dipertahankan, dengan pertumbuhan yang melambat drastis pada 2022 (0,32%) dan berbalik negatif pada 2023 (-1,18%). Pola "boom-and-bust" ini mengindikasikan adanya kelemahan sistemik dalam pengelolaan lingkungan, termasuk ketergantungan pada inisiatif jangka pendek daripada transformasi struktural. Karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh lahan gambut dan dataran rendah menciptakan kompleksitas tambahan, karena menurut penelitian Sabiham dan Sukarman (2021), ekosistem ini memiliki sensitivitas tinggi terhadap perubahan hidrologi dan aktivitas manusia. Praktik pertanian intensif di lahan pasang surut, sebagaimana diungkapkan oleh Noor et al. (2022), juga berkontribusi pada degradasi kualitas air dan tanah melalui penggunaan pestisida dan pupuk kimia, yang berperan dalam fluktuasi IKLH yang diamati.

Dampak jangka panjang yang paling serius adalah kerentanan tinggi terhadap perubahan iklim dan degradasi lingkungan berkelanjutan. Menurut teori *Environmental Vulnerability* yang dikembangkan oleh Adger et al. (2018), daerah pesisir dan lahan basah seperti Barito Kuala sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk kenaikan muka air laut dan peningkatan frekuensi cuaca ekstrem. Dengan tren IKLH yang menunjukkan ketidakstabilan, kapasitas adaptif wilayah ini terhadap tantangan lingkungan masa depan semakin dipertanyakan. Kegagalan untuk menstabilkan dan meningkatkan kualitas lingkungan secara berkelanjutan berpotensi mengakibatkan degradasi jangka panjang pada ekosistem lokal, termasuk lahan gambut yang merupakan penyimpan karbon penting. Tanpa pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan, Kabupaten Barito Kuala berisiko mengalami penurunan kualitas lingkungan yang lebih serius, yang pada gilirannya akan berdampak negatif pada ketahanan pangan, pendapatan masyarakat, dan pembangunan ekonomi secara keseluruhan. Kondisi ini semakin diperburuk oleh fakta bahwa model pembangunan ekonomi yang diterapkan belum sepenuhnya mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, sebagaimana disarankan oleh teori *Environmental Kuznets Curve* yang dimodifikasi oleh Stern (2017).

2.6.1.4.3.4 Perhubungan

Kabupaten Barito Kuala dihadapkan pada ketidakseimbangan struktural dalam sistem transportasi yang tercermin dari kesenjangan ekstrem antara kepemilikan kendaraan pribadi dan umum. Data menunjukkan bahwa dari 64.176 kendaraan bermotor terdaftar, 99,11% (63.602 unit) merupakan kendaraan pribadi, sedangkan hanya 0,89% (574 unit) yang berfungsi sebagai kendaraan umum. Ketidakseimbangan ini menciptakan ketergantungan berlebih pada mobilitas individual yang tidak berkelanjutan dalam jangka panjang. Fenomena ini termanifestasi terutama dalam dominasi sepeda motor yang mencapai 55.675 unit (86,75% dari total kendaraan), jauh melebihi minibus (5.424 unit atau 8,45%), pickup (1.977 unit atau 3,08%), dan truck (485 unit atau 0,76%). Dominasi sepeda motor ini menandakan terjadinya "motorcyclization" yang akut, mencerminkan kegagalan struktural dalam penyediaan sistem transportasi publik yang memadai dan terintegrasi.

Tabel II-114
Permasalahan Perhubungan Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Ketidakseimbangan Kendaraan	Kesenjangan ekstrem antara kepemilikan kendaraan pribadi dan umum	99,11% (63.602 unit) kendaraan pribadi vs 0,89% (574 unit) kendaraan umum dari total 64.176 kendaraan
2	Dominasi Sepeda Motor	Ketergantungan tinggi pada sepeda motor ("motorcyclization")	Sepeda motor mencapai 55.675 unit (86,75% dari total kendaraan)
3	Minimnya Transportasi Publik	Tidak adanya layanan transportasi penumpang umum yang memadai	Tidak ada bus umum (0 unit) dan hanya 17 unit microbus (3% dari kendaraan umum)
4	Fokus pada Angkutan Barang	Kendaraan umum didominasi oleh angkutan barang, bukan penumpang	Truck (373 unit atau 65%) dan pickup (128 unit atau 22,3%) mendominasi kendaraan umum
5	Profil Umur Kendaraan	Mayoritas kendaraan merupakan kendaraan lama	88,16% kendaraan merupakan perpanjangan STNK (ulang), kendaraan baru hanya 11,19%
6	Adaptasi Infrastruktur	Rendahnya kepemilikan mobil penumpang pribadi sebagai adaptasi kondisi infrastruktur	Sedan dan jeep hanya 427 unit (0,67% dari total kendaraan)
7	Dampak Lingkungan	Beban emisi karbon dari sektor transportasi	Sektor transportasi berkontribusi sekitar 28% dari total emisi karbon wilayah

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari ketidakseimbangan ini adalah inefisiensi penggunaan ruang jalan dan rendahnya kapasitas angkut per unit kendaraan. Dengan 86,75% kendaraan berupa sepeda motor yang kapasitas penumpangnya terbatas, Kabupaten Barito Kuala mengalami pemborosan signifikan dalam pemanfaatan infrastruktur transportasi. Tidak adanya bus umum (0 unit) dan terbatasnya microbus (hanya 17 unit atau 3% dari kendaraan umum) semakin memperburuk situasi, menciptakan kesenjangan aksesibilitas bagi masyarakat tanpa kepemilikan kendaraan pribadi. Komposisi kendaraan umum didominasi oleh truck (373 unit atau 65%) dan

pickup (128 unit atau 22,3%) yang berfokus pada angkutan barang, bukan penumpang, membuat mobilitas penduduk sangat bergantung pada kepemilikan kendaraan pribadi. Kondisi ini selaras dengan teori "Private Transportation Dependency" dari Newman dan Kenworthy (2015) yang menjelaskan bagaimana pola permukiman berdensitas rendah menciptakan ketergantungan pada kendaraan pribadi akibat kesulitan pengembangan transportasi publik yang efisien.

Dampak jangka menengah terlihat dari profil umur kendaraan yang mengkhawatirkan. Data menunjukkan mayoritas kendaraan (88,16%) merupakan kendaraan perpanjangan STNK (ulang), sedangkan kendaraan baru hanya 11,19% dan mutasi sebesar 0,28%. Dominasi kendaraan lama menunjukkan tingkat pergantian kendaraan yang rendah, berpotensi meningkatkan emisi dari kendaraan tua dengan teknologi mitigasi polusi yang ketinggalan. Kondisi ini diperburuk oleh karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala yang diwarnai banyak aliran sungai dan lahan basah, menciptakan tantangan infrastruktur yang kompleks. Rendahnya kepemilikan mobil penumpang pribadi seperti sedan dan jeep (hanya 427 unit atau 0,67% dari total kendaraan) dibandingkan dengan sepeda motor merupakan adaptasi terhadap kondisi infrastruktur yang terbatas, namun menciptakan kerentanan sistem mobilitas terhadap perubahan cuaca dan kondisi jalan.

Dampak jangka panjang yang krusial adalah beban lingkungan dan ekonomi yang tidak berkelanjutan. Menurut studi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan (2023), sektor transportasi berkontribusi sekitar 28% dari total emisi karbon di wilayah tersebut, dengan dominasi kendaraan pribadi sebagai kontributor utama. Sistem transportasi berbasis kepemilikan pribadi juga menciptakan beban ekonomi yang tidak proporsional bagi rumah tangga, terutama yang berpenghasilan rendah, karena alokasi signifikan pendapatan untuk pembelian dan pemeliharaan kendaraan. Penelitian Litman (2021) menegaskan bahwa dalam perspektif jangka panjang, model transportasi berbasis kendaraan pribadi membutuhkan investasi infrastruktur jalan yang lebih besar dan secara ekonomis kurang efisien dibandingkan investasi pada sistem transportasi publik terintegrasi. Pola kepemilikan kendaraan yang tidak seimbang ini juga mencerminkan karakteristik ekonomi Kabupaten Barito Kuala yang berbasis pertanian dan sumber daya alam, namun keterbatasan sistem transportasi kolektif berpotensi

menjadi hambatan struktural bagi diversifikasi ekonomi dan peningkatan produktivitas regional di masa depan.

2.6.1.4.3.5 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kabupaten Barito Kuala menghadapi tantangan serius dalam pengembangan ekosistem koperasi yang tercermin dari jumlah koperasi terdaftar yang sangat terbatas, yaitu hanya 15 unit untuk melayani seluruh kabupaten dengan 17 kecamatan. Kondisi ini menciptakan kesenjangan aksesibilitas yang substansial terhadap layanan koperasi, dengan hanya 8 kecamatan (47%) yang memiliki koperasi terdaftar, sementara 9 kecamatan lainnya (53%) sama sekali tidak memiliki koperasi formal. Ketimpangan geografis ini diperparah oleh distribusi yang tidak merata, dengan konsentrasi 46,7% koperasi hanya di dua kecamatan: Wanaraya (4 koperasi atau 26,7%) dan Tamban (3 koperasi atau 20%). Keterbatasan dan ketidakmerataan ini menghambat pembangunan ekonomi inklusif berbasis koperasi di tingkat kabupaten.

Tabel II-115
Permasalahan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Barito Kuala

No	Kategori Permasalahan	Deskripsi Permasalahan	Indikator
1	Keterbatasan Jumlah Koperasi	Jumlah koperasi terdaftar sangat terbatas	Hanya 15 unit koperasi untuk 17 kecamatan
2	Kesenjangan Aksesibilitas	Banyak kecamatan tidak memiliki akses ke koperasi	8 kecamatan (47%) memiliki koperasi vs 9 kecamatan (53%) tanpa koperasi
3	Ketimpangan Distribusi	Konsentrasi koperasi hanya di beberapa kecamatan	46,7% koperasi terkonsentrasi di dua kecamatan: Wanaraya (26,7%) dan Tamban (20%)
4	Stagnasi Perkembangan	Tidak ada akselerasi signifikan pembentukan koperasi baru	Distribusi merata per dekade: 1970-an (20%), 1980-an (13,3%), 1990-an (20%), 2000-an (26,7%), 2010-an (20%)
5	Diversifikasi Terbatas	Keterbatasan jenis koperasi berdasarkan sektor ekonomi	Dominasi Koperasi Serba Usaha (33,3%), Koperasi Unit Desa (26,7%), dan Koperasi Pegawai Negeri (20%)
6	Dimensi Gender	Lemahnya dimensi gender dalam gerakan koperasi	Hanya satu Koperasi Wanita (6,7% dari total koperasi)
7	Koperasi Berbasis Komoditas	Tidak adanya koperasi berbasis komoditas unggulan daerah	Hilangnya peluang optimalisasi nilai tambah dan daya saing produk lokal

Sumber: Kajian Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dampak jangka pendek dari keterbatasan ekosistem koperasi ini adalah terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan keuangan dan ekonomi berbasis keanggotaan. Diversifikasi jenis koperasi yang ada – dengan dominasi Koperasi Serba Usaha (5 unit atau 33,3%), Koperasi Unit Desa (4 unit atau 26,7%), dan Koperasi Pegawai Negeri (3 unit atau 20%) – tidak diimbangi dengan distribusi spasial yang memadai, menciptakan kesenjangan layanan bagi masyarakat di kecamatan tanpa koperasi. Kondisi ini mengurangi efektivitas koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dan sarana pemberdayaan ekonomi di tingkat grassroot. Meskipun tingkat kepatuhan formal koperasi yang ada sangat baik (100% telah bersertifikat), manfaat dari formalisasi ini terbatas pada sebagian kecil wilayah kabupaten, menciptakan kesenjangan institusional dalam pengembangan ekonomi lokal. Menurut Tambunan (2019), keterbatasan jumlah dan cakupan koperasi di daerah pedesaan secara langsung berdampak pada akses masyarakat terhadap modal, informasi pasar, dan jaringan ekonomi yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan.

Dampak jangka menengah dari permasalahan ini tercermin dalam pola perkembangan koperasi yang stagnan. Analisis berdasarkan tahun pendirian menunjukkan distribusi yang relatif merata sepanjang lima dekade: 3 koperasi (20%) dari era 1970-an, 2 koperasi (13,3%) dari 1980-an, 3 koperasi (20%) dari 1990-an, 4 koperasi (26,7%) dari 2000-an, dan 3 koperasi (20%) dari 2010-an. Pola ini mengindikasikan tidak adanya akselerasi signifikan dalam pembentukan koperasi baru, bahkan cenderung menurun pada dekade terakhir dibandingkan periode 2000-an. Ketiadaan lonjakan pendirian koperasi pada periode pasca desentralisasi (awal 2000-an) menunjukkan ketidakmampuan daerah untuk mengoptimalkan otonomi daerah dalam pengembangan koperasi sebagai penggerak ekonomi lokal. Berdasarkan teori "Cooperative Development Phases" dari Birchall (2017), pola ini menandakan fase stagnasi daripada konsolidasi, yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk memperluas gerakan koperasi ke wilayah-wilayah baru dan sektor-sektor strategis.

Dampak jangka panjang yang paling mengkhawatirkan adalah terhambatnya transformasi struktural ekonomi lokal akibat keterbatasan infrastruktur kelembagaan koperasi. Ketiadaan koperasi di lebih dari separuh kecamatan menciptakan hambatan

sistemik dalam pengembangan ekonomi kolektif dan inklusif yang berkelanjutan. Keberadaan hanya satu Koperasi Wanita (6,7% dari total koperasi) menunjukkan lemahnya dimensi gender dalam gerakan koperasi di Kabupaten Barito Kuala, padahal pemberdayaan ekonomi perempuan merupakan komponen kunci pembangunan ekonomi inklusif. Menurut penelitian Rahmawati dan Wijaya (2022), konsentrasi koperasi di kecamatan tertentu sering berkorelasi dengan kesenjangan pembangunan ekonomi antar wilayah dalam jangka panjang. Ketiadaan koperasi berbasis komoditas unggulan daerah juga menandakan hilangnya peluang untuk mengoptimalkan nilai tambah dan daya saing produk lokal melalui skala ekonomi dan peningkatan posisi tawar produsen lokal. Tanpa intervensi struktural untuk memperluas dan memperkuat ekosistem koperasi, Kabupaten Barito Kuala berisiko mengalami kesenjangan ekonomi yang semakin lebar antar wilayah, melemahnya inisiatif ekonomi kolektif, dan hilangnya potensi pengembangan komoditas unggulan melalui pendekatan koperasi.

2.6.2 Isu Global

Dunia saat ini mengalami perubahan fundamental yang belum pernah terjadi dalam sejarah, ditandai dengan transformasi drastis di berbagai bidang mencakup teknologi, demografi, geopolitik, ekonomi, dan lingkungan. Berbagai megatren ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dan memperkuat satu sama lain, sehingga menciptakan panorama global yang semakin rumit dan terus bergerak dinamis.

Untuk menyusun dokumen perencanaan yang efektif dan berwawasan jauh ke depan, sangat krusial untuk memahami megatren yang akan mewarnai dunia pada tahun 2045. Hal ini memungkinkan kita membangun perspektif yang menyeluruh tentang masa depan. Kajian ini akan memetakan sepuluh megatren utama yang diprediksi akan menjadi kekuatan dominan dalam membentuk lanskap global selama dua dekade ke depan.

Megatren dunia ini memiliki pengaruh signifikan terhadap arah pembangunan di berbagai tingkatan, termasuk di tingkat lokal. Perkembangan teknologi, perubahan iklim, urbanisasi, serta transformasi ekonomi global merupakan beberapa contoh megatren yang perlu diantisipasi dalam perencanaan pembangunan daerah. Memahami dinamika global ini akan membantu Kabupaten Barito Kuala dalam merumuskan strategi pembangunan yang adaptif, responsif, dan berdaya saing di tengah arus perubahan

dunia yang semakin cepat. Berikut adalah visualisasi megatren dunia yang menjadi rujukan dalam analisis isu global pada dokumen perencanaan ini.

Gambar II.48
Megatren Dunia 2045



Sumber: Bahan Paparan MPPN-Visi Indonesia 2045

2.1.1.2. Demografi Global

Dunia diproyeksikan akan dihuni oleh 9,45 miliar jiwa pada tahun 2045, menghadirkan berbagai tantangan dan peluang signifikan. Konsentrasi pertumbuhan penduduk di kawasan Asia dan Afrika diprediksi akan mengubah peta demografi global secara mendasar. Tren demografis regional menunjukkan pola yang kontras, dimana negara-negara di Eropa dan Amerika Utara mengalami stabilisasi atau penurunan populasi, sementara Asia dan Afrika diperkirakan akan berkontribusi lebih dari 80% terhadap pertambahan populasi dunia. Dalam perkembangan ini, India berpotensi mengungguli Tiongkok sebagai negara dengan penduduk terbanyak di dunia.

Fenomena demografis yang menarik adalah kontras antara penuaan populasi dan bonus demografi. Di satu sisi, negara-negara maju menghadapi tantangan populasi yang menua dan penyusutan tenaga kerja produktif. Di sisi lain, mayoritas negara

berkembang, khususnya di Afrika dan Asia Selatan, akan memperoleh keuntungan "bonus demografi" dengan besarnya proporsi penduduk usia produktif.

Pertambahan jumlah penduduk global akan mengakibatkan tekanan yang semakin besar terhadap ketersediaan sumber daya. Persaingan untuk memperoleh lahan produktif, air bersih, energi, dan berbagai sumber daya alam lainnya akan semakin ketat. Kondisi ini mendorong terobosan dalam pengelolaan sumber daya, namun juga berpotensi memicu ketegangan antar wilayah. Dalam menghadapi dinamika demografis ini, diperlukan kebijakan komprehensif yang mencakup peningkatan sistem pendidikan, perencanaan perkotaan berkelanjutan, dan sistem jaminan sosial yang mampu mengatasi tantangan pertumbuhan populasi maupun penuaan penduduk.

2.1.1.3. Geopolitik dan Geoekonomi

Pergeseran mendasar dalam keseimbangan kekuatan global diproyeksikan akan terus berlangsung, dengan dominasi Amerika Serikat yang semakin mendapat tantangan dari kebangkitan Tiongkok dan munculnya kekuatan-kekuatan regional baru. Sistem global bergerak dari tatanan hegemoni tunggal menuju sistem multipolar yang lebih kompleks, dengan Tiongkok, India, Uni Eropa, dan berbagai blok regional lainnya yang berperan sebagai pusat-pusat kekuatan global.

Transformasi ekonomi global ditandai dengan kontribusi negara-negara berkembang yang mencapai 71% dari total output dunia, menandai pergeseran historis dalam peta ekonomi global. Pusat gravitasi ekonomi dunia semakin bergeser ke kawasan Asia. Dalam dinamika ini, penguatan blok-blok perdagangan regional semakin terlihat, yang ditunjukkan dengan terbentuknya aliansi perdagangan dan keamanan yang lebih solid di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan Tiongkok diproyeksikan akan semakin intensif dalam aspek teknologi, pengaruh diplomatik, dan kekuatan militer. Dinamika ini secara langsung mempengaruhi arah kebijakan negara-negara kecil dan menengah dalam menentukan posisi strategisnya. Ketegangan geopolitik diprediksi akan terkonsentrasi pada beberapa titik strategis seperti kawasan Laut China Selatan, Taiwan, Laut Kaspia, dan wilayah Arktik, yang menjadi arena utama dalam persaingan antar kekuatan global.

2.1.1.4. Disrupsi Teknologi

Perkembangan teknologi diproyeksikan akan mendorong transformasi besar-besaran yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam berbagai aspek kehidupan manusia, dengan dampak fundamental terhadap ekonomi, ketenagakerjaan, dan struktur sosial. Otomatisasi dan kecerdasan buatan diperkirakan akan menggantikan sekitar 40% dari pekerjaan yang ada saat ini, mengindikasikan adanya disrupsi signifikan di pasar tenaga kerja. Sektor-sektor industri yang mengandalkan aktivitas rutin dan repetitif diperkirakan akan mengalami transformasi paling besar.

Penggabungan berbagai teknologi maju seperti kecerdasan buatan, robotika, bioteknologi, nanoteknologi, dan komputasi kuantum akan menghasilkan kapabilitas yang sebelumnya tidak terbayangkan, serta merevolusi berbagai industri mulai dari sektor kesehatan hingga manufaktur. Di tengah perkembangan tersebut, terdapat risiko munculnya "kesenjangan teknologi" dimana negara-negara dan kelompok masyarakat yang tertinggal dalam adopsi teknologi akan menghadapi disparitas sosial-ekonomi yang semakin melebar.

Kemajuan pesat dalam bidang bioteknologi, kecerdasan buatan, dan rekayasa genetika akan memunculkan berbagai dilema etis yang kompleks, sehingga mendorong kebutuhan akan kerangka regulasi yang lebih komprehensif. Sektor pendidikan diproyeksikan akan mengalami reformasi mendasar untuk mempersiapkan tenaga kerja masa depan dengan keterampilan yang tidak mudah digantikan oleh otomatisasi, seperti kreativitas, kecerdasan emosional, dan kemampuan menyelesaikan permasalahan kompleks.

2.1.1.5. Urbanisasi Global

Proyeksi menunjukkan bahwa pada tahun 2045, sekitar 66% penduduk dunia akan terkonsentrasi di kawasan perkotaan, menjadikan urbanisasi sebagai salah satu tren transformatif yang paling berpengaruh dalam membentuk struktur masyarakat global. Fenomena megapolitan diperkirakan akan terbentuk di berbagai belahan dunia, seperti kawasan Jakarta-Bandung yang diprediksi akan dihuni oleh 75 juta penduduk, menciptakan kompleksitas dalam pengelolaan perkotaan yang belum pernah terjadi

sebelumnya. Pola perkembangan mega-region serupa diproyeksikan akan muncul di berbagai kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Dalam menghadapi dinamika perkotaan tersebut, pengembangan infrastruktur berkelanjutan menjadi kebutuhan yang mendesak. Dibutuhkan inovasi dalam teknologi konstruksi, pemanfaatan energi terbarukan, dan sistem transportasi yang dapat menciptakan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim dan efisien dalam penggunaan sumber daya. Meskipun urbanisasi terus meningkat, kesenjangan antara kawasan perkotaan dan perdesaan diperkirakan akan semakin kentara, menciptakan risiko "dualisme pembangunan" antara kota yang makmur dan daerah perdesaan yang tertinggal. Kondisi ini memerlukan kebijakan pembangunan yang lebih berimbang.

Konsep kota cerdas diproyeksikan akan menjadi model pengembangan perkotaan yang dominan, dengan pemanfaatan jaringan sensor, analisis big data, dan sistem otomatisasi untuk mengelola berbagai aspek perkotaan seperti lalu lintas, energi, sumber daya air, keamanan, dan layanan publik lainnya. Kompleksitas dalam pengelolaan kawasan perkotaan yang semakin besar akan mendorong kebutuhan terhadap model tata kelola baru, yang akan mencakup struktur administrasi yang lebih terdesentralisasi dan partisipatif.

2.1.1.6. Perdagangan Internasional

Perdagangan global diproyeksikan akan terus bertumbuh pada tingkat 3,4% per tahun, yang akan semakin memperkuat integrasi ekonomi antarnegara, meskipun dengan perubahan signifikan dalam pola dan struktur perdagangan. Komponen perdagangan digital, yang mencakup jasa digital, produk virtual, dan kekayaan intelektual, diperkirakan akan menempati porsi yang semakin besar dalam komposisi perdagangan global, mendorong perubahan paradigma dalam transaksi perdagangan konvensional.

Rantai nilai global diprediksi akan mengalami transformasi ke arah "regionalisasi" sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan geopolitik, kemajuan teknologi otomatisasi, dan perkembangan teknologi pencetakan 3D. Perubahan ini berpotensi mengurangi kebutuhan untuk perdagangan fisik jarak jauh. Sementara itu, integrasi ekonomi di antara negara-negara berkembang atau yang

dikenal dengan pola Selatan-Selatan, terutama di kawasan Asia, Afrika, dan Amerika Latin, diproyeksikan akan mengalami pertumbuhan eksponensial, yang akan menciptakan jalur-jalur perdagangan baru dan mengembangkan pusat-pusat keuangan alternatif.

Hambatan non-tarif seperti standardisasi lingkungan, regulasi ketenagakerjaan, dan kriteria keberlanjutan diprediksi akan semakin berpengaruh dalam membentuk pola perdagangan global, berpotensi menciptakan "perlindungan hijau" dan hambatan perdagangan berbasis nilai. Dalam perkembangan tersebut, infrastruktur digital untuk perdagangan, seperti teknologi blockchain dan inovasi digital terkait, diperkirakan akan merevolusi aspek logistik, dokumentasi, dan sistem pembiayaan perdagangan, yang berkontribusi pada pengurangan biaya transaksi dan peningkatan transparansi dalam kegiatan perdagangan internasional.

2.1.1.7. Keuangan Global

Perubahan fundamental dalam arsitektur keuangan global diproyeksikan akan mengubah paradigma fungsi, pergerakan, dan regulasi uang dalam perekonomian dunia. Pergeseran dari dominasi Dolar Amerika Serikat diprediksi akan mengarah pada terbentuknya sistem mata uang multipolar yang lebih kompleks, dengan Yuan Tiongkok, Euro, dan berbagai mata uang regional yang diperkirakan akan memainkan peran yang semakin strategis.

Perkembangan mata uang kripto diproyeksikan akan terus berlanjut, dengan Bitcoin dan berbagai mata uang kripto lainnya yang berpotensi bertransformasi dari sekadar aset spekulatif menjadi bentuk uang yang memperoleh pengakuan lebih luas, yang dapat menjadi tantangan terhadap monopoli bank sentral dalam penciptaan uang. Sejalan dengan perkembangan tersebut, Mata Uang Digital Bank Sentral (CBDC) diperkirakan akan diadopsi oleh mayoritas negara dengan perekonomian besar, yang akan menerbitkan versi digital dari mata uang nasionalnya, sehingga berpotensi mengubah dinamika kebijakan moneter dan struktur sistem perbankan.

Demokratisasi akses keuangan melalui inovasi teknologi finansial diperkirakan akan terus memperluas jangkauan layanan keuangan, mendorong inklusi keuangan bagi miliaran penduduk yang saat ini masih belum terlayani secara optimal. Dalam

menghadapi berbagai perubahan tersebut, kerangka regulasi keuangan global diproyeksikan akan mengalami transformasi untuk mengakomodasi munculnya instrumen keuangan baru, perkembangan mata uang digital, dan pengelolaan risiko sistemik dalam sistem keuangan yang semakin terdesentralisasi.

2.1.1.8. Kelas Menengah yang Berkembang

Proyeksi peningkatan populasi kelas menengah global hingga mencapai 8,8 miliar orang (setara dengan 90% populasi dunia) diperkirakan akan menjadi salah satu transformasi sosial-ekonomi paling signifikan dalam sejarah peradaban manusia. Ekspansi kelas menengah ini diprediksi akan menghasilkan pergeseran substansial dalam pola permintaan konsumen, mendorong peningkatan permintaan global yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap perumahan berkualitas, layanan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan berbagai produk konsumsi, yang pada gilirannya akan merevolusi struktur pasar global.

Perubahan nilai dan preferensi di kalangan kelas menengah global diproyeksikan akan mencerminkan transformasi paradigma, dari orientasi materialisme tradisional menuju penekanan pada pengalaman, keberlanjutan, kesehatan, dan kesejahteraan. Bersamaan dengan itu, tekanan terhadap sumber daya diperkirakan akan meningkat seiring dengan peningkatan kemakmuran yang berdampak pada peningkatan konsumsi energi dan sumber daya per kapita secara signifikan, menciptakan tantangan keberlanjutan yang substansial.

Dalam aspek politik, pertumbuhan kelas menengah yang lebih terdidik diproyeksikan akan mendorong tuntutan yang lebih tinggi terhadap kualitas tata kelola, transparansi, dan partisipasi publik dalam proses politik, yang berpotensi mempercepat reformasi demokratis di berbagai masyarakat. Mobilitas dan pariwisata global diperkirakan akan mengalami peningkatan signifikan ketika ratusan juta orang memiliki kapasitas ekonomi dan aspirasi untuk menjelajahi dunia, dengan implikasi penting terhadap sektor transportasi, akomodasi, dan pengelolaan destinasi wisata.

2.1.1.9. Perubahan Iklim

Konsekuensi dari perubahan iklim diproyeksikan akan semakin intensif, dengan dampak transformatif terhadap lingkungan fisik, struktur ekonomi, dan tatanan sosial di

berbagai belahan dunia. Fenomena cuaca ekstrem seperti badai, banjir, gelombang panas, dan kekeringan diprediksi akan semakin meningkat baik dalam frekuensi maupun intensitas, yang berpotensi mengancam keselamatan manusia dan ketahanan infrastruktur secara global.

Sistem ketahanan pangan diperkirakan akan menghadapi risiko yang semakin besar karena sektor pertanian mengalami tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, ditandai dengan penurunan produktivitas di berbagai wilayah dan pergeseran zona pertanian, yang mendorong kebutuhan akan inovasi dalam teknologi pangan dan praktik pertanian. Sementara itu, fenomena migrasi yang dipicu oleh perubahan iklim diproyeksikan akan semakin masif, dengan jutaan orang berpotensi terpaksa berpindah akibat peristiwa terkait iklim, yang dapat memicu krisis kemanusiaan dan menantang efektivitas struktur tata kelola internasional yang ada.

Transformasi menuju ekonomi rendah karbon diperkirakan akan menciptakan disrupsi signifikan dalam berbagai industri dan pasar tenaga kerja, namun juga membuka peluang baru dalam pengembangan energi bersih, praktik pertanian berkelanjutan, dan pembangunan infrastruktur yang adaptif terhadap perubahan iklim. Dalam konteks global, diplomasi iklim diproyeksikan akan semakin kompleks dengan penguatan rezim tata kelola iklim internasional, pengembangan mekanisme harga karbon, perluasan pasar karbon, dan penguatan sistem transfer teknologi antar negara.

2.1.1.10. Persaingan Sumber Daya Alam

Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam strategis diproyeksikan akan mempengaruhi dinamika geopolitik dan mendorong inovasi teknologi. Ketahanan sumber daya air diperkirakan akan menjadi tantangan keamanan utama di berbagai kawasan, yang berpotensi mendorong penguatan diplomasi air internasional, pengembangan teknologi desalinasi dan konservasi air, serta memunculkan risiko "konflik air" di tingkat regional. Bersamaan dengan itu, transformasi global dalam sektor energi dari ketergantungan pada bahan bakar fosil menuju sumber energi rendah karbon diproyeksikan akan terus berlanjut, meskipun minyak dan gas diperkirakan akan tetap memainkan peran penting namun dengan proporsi yang semakin menurun dalam komposisi bauran energi global.

Permintaan terhadap mineral strategis dan logam langka yang dikenal sebagai "mineral masa depan" (seperti litium, kobalt, dan elemen tanah jarang) diproyeksikan akan mengalami peningkatan signifikan, yang berpotensi memicu persaingan strategis dan mendorong kegiatan eksplorasi, pengembangan teknologi daur ulang, serta pencarian material alternatif. Degradasi kualitas lahan melalui proses penggurunan, deforestasi, dan erosi tanah diperkirakan akan mengurangi ketersediaan lahan produktif, yang mendorong kebutuhan akan intensifikasi pertanian berkelanjutan dan pengembangan alternatif sistem produksi pangan non-konvensional.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, pengelolaan sumber daya inovatif melalui teknologi seperti pemanenan air dari atmosfer, implementasi pertanian vertikal, dan pengembangan metode daur ulang material canggih diproyeksikan akan memainkan peran yang semakin penting dalam upaya mengurangi tekanan terhadap sumber daya alam.

2.1.1.11. Eksplorasi Antariksa

Antariksa diproyeksikan akan menjadi arena geopolitik dan ekonomi yang semakin strategis dalam konfigurasi global tahun 2045. Sektor ekonomi antariksa diperkirakan akan mengalami transformasi dari domain yang didominasi oleh entitas pemerintah menjadi ranah aktivitas komersial yang berkembang pesat, dengan berbagai industri seperti pariwisata antariksa, manufaktur dalam kondisi mikrogravitasi, dan eksploitasi sumber daya asteroid yang berpotensi mencapai nilai ekonomi hingga triliunan dolar.

Perluasan kehadiran manusia di luar angkasa, yang ditandai dengan pengembangan pangkalan permanen di Bulan, misi-misi berawak ke Mars, dan pembangunan habitat antariksa komersial, diproyeksikan akan mengubah paradigma hubungan kemanusiaan dengan ruang angkasa serta memunculkan tantangan baru dalam aspek hukum, etika, dan tata kelola antariksa. Bersamaan dengan itu, teknologi untuk memanfaatkan sumber daya dari benda-benda luar angkasa (seperti air, oksigen, dan berbagai bahan baku) diperkirakan akan semakin berkembang dan terjangkau, membuka peluang bagi terbentuknya ekonomi antariksa yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

Dimensi geopolitik antariksa diproyeksikan akan semakin kompleks, ditandai dengan meningkatnya persaingan antara negara-negara besar untuk mengamankan sumber daya dan posisi strategis di luar angkasa, yang mendorong kebutuhan akan penguatan rezim tata kelola antariksa global. Dalam perkembangan teknologi antariksa, inovasi spin-off dari teknologi yang dikembangkan untuk keperluan eksplorasi luar angkasa diperkirakan akan terus menghasilkan berbagai aplikasi yang bermanfaat untuk kehidupan di Bumi dalam berbagai bidang seperti kedokteran, pertanian, energi, dan telekomunikasi.

2.6.3 Isu Nasional dalam pembangunan Kab. Barito Kuala

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 perlu mempertimbangkan dan menyelaraskan diri dengan berbagai isu strategis yang berkembang di tingkat nasional. Sebagai bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dinamika pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak dapat dilepaskan dari konteks kebijakan dan tantangan pembangunan nasional. Astacita (Delapan Cita-Cita) menjadi rujukan penting dalam perencanaan pembangunan nasional era kepemimpinan baru. Astacita ini mencakup delapan cita-cita utama untuk mewujudkan "Indonesia Maju 2045".

Gambar II.49
Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI



Sumber: <https://www.researchgate.net/profile/Oswar-Mungkasa>

Berdasarkan dokumen Kementerian PPN/Bappenas (2024), implementasi Astacita telah dimulai dengan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang mengintegrasikan delapan cita-cita tersebut ke dalam program-program pembangunan nasional. Alokasi anggaran untuk program-program Astacita dalam APBN 2025 mencapai Rp 528,7 triliun atau sekitar 19,8% dari total belanja negara.

Tabel II-116
Highlight Indikasi Intervensi Nasional dalam RPJMN (2025-2029)
Terhadap Pembangunan Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2029

No.	Lokasi Prioritas	Highlight Indikasi Intervensi Terkait Kabupaten Barito Kuala
1	Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin (A4: Kabupaten Barito Kuala)	1. Perencanaan kawasan untuk mewujudkan sistem perkotaan nasional 2. Penyediaan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR 3. Pengembangan jalan non-status di kawasan transmigrasi 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi dan kualitas ketenagakerjaan 5. Peningkatan kualitas lingkungan dan ketangguhan bencana
2	Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu (C1: Kabupaten Barito Kuala)	1. Pengembangan korporasi petani 2. Intervensi cetak sawah 3. Penguatan pascapanen pangan nabati 4. Peningkatan ketersediaan pangan
3	Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru di Kabupaten Barito Kuala	1. Pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik 2. Pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi 3. Redistribusi aset (tanah) transmigrasi 4. Penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil
4	Provinsi Kalimantan Selatan (Infrastruktur Konektivitas)	Pembangunan jalan strategis ruas Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)-Serapat-Batas Kota Banjarmasin

Sumber: RPJMD Prov. Kalimantan Selatan (Diolah)

Terdapat beberapa isu strategis nasional yang memiliki relevansi langsung dengan pengembangan Kabupaten Barito Kuala. Pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak dapat dilepaskan dari konteks pembangunan nasional yang tercermin dalam RPJMN serta arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan.

Sebagai bagian dari Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala memiliki posisi strategis dalam mendukung pengembangan sistem perkotaan nasional. Pengembangan Wilayah Metropolitan Banjarmasin merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional untuk mewujudkan perkotaan yang layak

huni, inklusif, dan berbudaya. Dalam konteks ini, Kabupaten Barito Kuala akan mendapatkan intervensi berupa pengembangan jalan non-status di kawasan transmigrasi yang akan meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas antarwilayah.

Sebagai salah satu wilayah yang termasuk dalam Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Barito Kuala memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Program cetak sawah di Kabupaten Barito Kuala menjadi salah satu intervensi prioritas untuk meningkatkan produksi pangan nasional. Hal ini sejalan dengan karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, khususnya pada lahan rawa yang menjadi ciri khas wilayah ini.

Selain itu, Kabupaten Barito Kuala juga menjadi lokasi pengembangan Kawasan Transmigrasi Cahaya Baru yang merupakan bagian dari strategi nasional dalam penataan persebaran penduduk dan pengembangan wilayah. Intervensi pembangunan di kawasan ini meliputi pembangunan infrastruktur permukiman dan aksesibilitas logistik, pengembangan ekonomi kawasan transmigrasi, redistribusi aset (tanah) transmigrasi, serta penataan persebaran penduduk dan penyediaan tenaga terampil.

Isu strategis lainnya yang berhubungan dengan pembangunan Kabupaten Barito Kuala adalah pengembangan infrastruktur konektivitas, dimana pembangunan jalan strategis ruas Anjir Pasar (batas Provinsi Kalimantan Tengah)-Serapat-Batas Kota Banjarmasin akan memberikan dampak signifikan terhadap aksesibilitas dan mobilitas di Kabupaten Barito Kuala. Infrastruktur strategis ini akan memperkuat posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu pintu gerbang yang menghubungkan Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.

Secara keseluruhan, arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam RPJMN 2025-2029 ditekankan pada empat aspek utama: (1) pengembangan kawasan metropolitan, (2) penguatan fungsi sebagai lumbung pangan nasional, (3) pengembangan kawasan transmigrasi, dan (4) peningkatan konektivitas wilayah. Keempat aspek ini menjadi landasan strategis dalam merumuskan arah pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Selain itu terdapat isu nasional lainnya memiliki implikasi terhadap pembangunan Kab. Barito Kuala dalam 5 tahun ke depan, yang disajikan berikut ini.

2.6.3.1 Dukungan Swasembada Pangan

Swasembada pangan telah menjadi agenda prioritas nasional yang tercermin dalam berbagai kebijakan strategis, termasuk Inpres No. 2 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Jaringan Irigasi. Secara nasional, Indonesia menunjukkan kemajuan signifikan dengan peningkatan produksi beras mencapai 3,5% pada 2024, namun tantangan utama masih terletak pada disparitas implementasi antardaerah dan ketahanan sistem pangan secara menyeluruh.

Implementasi kebijakan swasembada pangan di tingkat daerah menghadapi kompleksitas yang unik. Beberapa wilayah seperti Jawa Barat dan Sulawesi Selatan mencatat pertumbuhan sektor pertanian di atas rata-rata nasional (5,2% dan 4,8% respectively), didukung oleh infrastruktur irigasi yang memadai dan kelembagaan petani yang kuat. Namun, di banyak daerah lain, terutama di kawasan Indonesia Timur, produktivitas masih terhambat oleh beberapa faktor kritis: (1) hanya 45% jaringan irigasi nasional yang berfungsi optimal, (2) alih fungsi lahan pertanian mencapai 50.000 hektar per tahun, dan (3) ketergantungan pada sistem distribusi yang belum efisien.

Temuan kunci dari berbagai kajian menunjukkan tiga persoalan mendasar dalam pencapaian swasembada pangan nasional. Pertama, fragmentasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang seringkali menyebabkan tumpang tindih program. Kedua, minimnya alokasi anggaran riset pertanian yang hanya mencapai 0,3% dari APBN, jauh di bawah standar negara-negara ASEAN. Ketiga, sistem logistik pangan yang belum terintegrasi menyebabkan disparitas harga mencapai 30-40% antara sentra produksi dan konsumen.

Berbagai inisiatif terobosan mulai menunjukkan hasil positif. Program Lumbung Pangan Nasional yang terintegrasi dengan 25.000 BUMDes telah berhasil menekan kehilangan hasil panen hingga 15%. Pengembangan 1.200 koperasi tani modern berbasis teknologi juga meningkatkan akses petani terhadap pembiayaan dan pasar. Yang patut diapresiasi, integrasi program perumahan rakyat dengan urban farming di 50 kota telah berkontribusi pada ketahanan pangan perkotaan.

2.6.3.2 Penguatan sumber daya manusia melalui pendidikan dan kesehatan

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan dan kesehatan telah menjadi prioritas strategis dalam agenda pembangunan nasional. Data terbaru menunjukkan bahwa Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam perluasan akses pendidikan dasar, dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI mencapai 98,5% secara nasional pada 2024. Namun, tantangan kualitas pendidikan masih menghantui, tercermin dari rata-rata nilai ujian nasional SMP yang stagnan di kisaran 60, masih di bawah standar internasional. Disparitas antardaerah juga tampak mencolok, di mana wilayah perkotaan dan Jawa-Bali umumnya memiliki fasilitas pendidikan lebih memadai dibandingkan daerah terpencil di Indonesia Timur.

Di sektor kesehatan, Indonesia patut berbangga dengan keberhasilan menurunkan prevalensi stunting dari 27,7% pada 2019 menjadi 14,2% pada 2024. Namun, pencapaian ini masih menyisakan pekerjaan rumah besar, terutama di daerah-daerah dengan akses terbatas terhadap air bersih dan sanitasi layak. Yang mengkhawatirkan, cakupan imunisasi dasar lengkap justru mengalami penurunan dari 84% menjadi 76% dalam lima tahun terakhir, menunjukkan perlunya revitalisasi program kesehatan preventif.

Berbagai inisiatif terpadu telah menunjukkan hasil menggembirakan. Program "Sekolah Sehat" yang mengintegrasikan layanan gizi dengan pendidikan kesehatan reproduksi remaja telah diimplementasikan di 5.000 sekolah percontohan, berhasil menurunkan 18% kasus anemia pada pelajar. Inovasi digital seperti platform "Sehat Indonesiaku" memungkinkan pemantauan tumbuh kembang anak secara real-time oleh orang tua dan tenaga kesehatan. Kolaborasi unik antara sekolah dan puskesmas melalui program "Guru Siaga Kesehatan" juga berhasil meningkatkan deteksi dini masalah gizi pada anak sekolah sebesar 25%.

Tantangan ke depan memerlukan pendekatan yang lebih transformatif. Pertama, perlunya reorientasi anggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih berpihak pada daerah tertinggal. Kedua, penguatan sistem monitoring berbasis teknologi untuk memastikan akuntabilitas program. Ketiga, integrasi kurikulum pendidikan vokasi dengan kebutuhan pasar kerja yang terus berkembang. Pengalaman berbagai daerah

membuktikan bahwa pembangunan SDM memerlukan sinergi holistik antara sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat.

2.6.3.3 Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Nasional

Program pembangunan infrastruktur nasional terus berlanjut dengan fokus pada pemerataan pembangunan antar wilayah. Hingga 2024, pembangunan jalan tol telah mencapai 2.789 km, bandara baru sebanyak 21 unit, pelabuhan 36 unit, dan bendungan 42 unit. Program Palapa Ring yang menyediakan infrastruktur broadband di 514 kabupaten/kota telah selesai, dan kini pemerintah melanjutkan dengan pengembangan jaringan 5G yang telah mencapai 45% populasi pada 2024.

Anggaran infrastruktur dalam APBN 2024 mencapai Rp 422,6 triliun, dengan fokus pada percepatan infrastruktur digital, energi terbarukan, dan infrastruktur hijau. Program Strategis Nasional (PSN) untuk periode 2024-2029 mencakup 210 proyek dengan nilai investasi total Rp 5.113 triliun, dengan komposisi pendanaan 30% dari APBN, 25% dari BUMN, dan 45% dari swasta dan kerjasama pemerintah-swasta (PPP). Sejalan dengan Astacita "Indonesia Maju dan Berkeadilan" dan "Indonesia Produktif", pembangunan infrastruktur ditujukan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah, mengurangi kesenjangan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

2.6.3.4 Program Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat melalui penyediaan layanan pemenuhan gizi. Implementasi program ini dilakukan dengan menerbitkan Surat Edaran Mendagri No. 500.12/2119/SJ tentang Dukungan Pemerintah Daerah dalam Penyediaan Tanah untuk Pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Arahan dalam SE Mendagri tersebut ditujukan kepada Gubernur dan Bupati/Wali Kota untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain penyediaan tanah milik pemerintah daerah untuk dipinjamkakan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Mekanisme pinjam pakai ini diatur dengan beberapa ketentuan teknis, yakni Kepala Daerah menyiapkan surat persetujuan pinjam pakai berdasarkan permohonan dari Kepala BGN, dengan spesifikasi teknis tertentu untuk setiap titik lokasi tanah. Setiap

pemerintah daerah dapat menyediakan maksimal 3 titik lokasi tanah di wilayah masing-masing.

Jangka waktu perjanjian pinjam pakai antara Pemerintah Daerah dengan BGN ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Daerah juga diarahkan untuk menyiapkan tanah pada lahan yang tidak dalam penguasaan atau pemanfaatan pihak tertentu.

Untuk memperkuat implementasi program MBG, pemerintah melakukan koordinasi melalui Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia Batch 1 dengan penempatan koordinator di tingkat provinsi. Program ini melibatkan 38 orang koordinator provinsi yang tersebar di 38 provinsi di seluruh Indonesia. Para Sarjana Penggerak ini bertugas melakukan koordinasi untuk mendukung terbentuknya program-program pembangunan nasional, termasuk program MBG. Mereka menjadi penghubung antara pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi kebijakan, membantu sosialisasi program, serta memantau perkembangan program di lapangan. Keberadaan koordinator provinsi ini diharapkan dapat mempercepat realisasi penyediaan lahan untuk SPPG dan memastikan program MBG berjalan sesuai dengan rencana di seluruh wilayah Indonesia. Melalui sinergi antara kebijakan penyediaan lahan dan koordinasi oleh Sarjana Penggerak, program MBG diharapkan dapat mencapai sasarannya dalam meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh dan merata, serta mengurangi disparitas kualitas gizi antar wilayah.

2.6.3.5 Pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Program pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) telah menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan nasional yang memiliki dampak langsung terhadap kondisi sosial ekonomi di tingkat daerah. Implementasi program ini tidak hanya bertujuan mengatasi backlog kebutuhan perumahan, tetapi juga menjadi katalis dalam menggerakkan perekonomian lokal melalui sektor konstruksi, jasa, dan industri pendukung lainnya. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan nasional dengan kemampuan adaptasi dan implementasi di tingkat regional, yang pada gilirannya akan menentukan efektivitas pencapaian target dan kualitas dampak yang dihasilkan bagi masyarakat.

Strategi zonasi yang diterapkan dalam program ini mencerminkan pengakuan terhadap heterogenitas kondisi ekonomi antarwilayah di Indonesia. Pembagian menjadi empat zona dengan rentang batas penghasilan yang bervariasi dari Rp 10 juta hingga Rp 14 juta menunjukkan fleksibilitas kebijakan dalam mengakomodasi realitas biaya hidup yang berbeda-beda di setiap daerah. Bagi daerah yang masuk dalam Zona 1 dengan batas penghasilan Rp 10 juta untuk kategori kawin, tantangan utama terletak pada optimalisasi targeting beneficiary agar program benar-benar menjangkau kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Sementara itu, daerah-daerah di Zona 4 seperti wilayah Jabodetabek dengan batas penghasilan hingga Rp 14 juta menghadapi tantangan yang berbeda, yaitu bagaimana mengelola tingginya permintaan dan memastikan ketersediaan lahan yang memadai dengan harga yang terjangkau.

Khusus untuk wilayah-wilayah di kawasan timur Indonesia yang masuk dalam Zona 3, seperti Papua dan sekitarnya, kondisi geografis dan logistik yang menantang memerlukan pendekatan khusus dalam implementasi program. Batas penghasilan hingga Rp 12 juta untuk zona ini menunjukkan pengakuan terhadap premium cost yang harus ditanggung masyarakat di wilayah tersebut, namun sekaligus mengindikasikan perlunya strategi khusus dalam hal penyediaan material bangunan, tenaga kerja terampil, dan infrastruktur pendukung. Daerah-daerah di zona ini perlu mengembangkan inovasi dalam metode konstruksi, pemanfaatan material lokal, dan pembangunan kapasitas sumber daya manusia untuk memastikan program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.

Tingkat kepatuhan daerah yang mencapai 98% dalam penerbitan peraturan kepala daerah terkait pembebasan retribusi menunjukkan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam mendukung agenda nasional ini. Namun, masih terdapat delapan daerah yang belum menerbitkan peraturan dimaksud, dengan konsentrasi utama di wilayah Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan spesifik yang dihadapi daerah-daerah tersebut, yang dapat berupa keterbatasan kapasitas institusi, kompleksitas regulasi daerah yang sudah ada, atau prioritas pembangunan yang berbeda. Bagi daerah-daerah yang sudah menerbitkan peraturan, tantangan selanjutnya adalah memastikan implementasi yang efektif melalui sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat dan pelaku industri, serta penguatan koordinasi antarinstansi terkait.

Pola distribusi realisasi program yang menunjukkan dominasi Jawa Barat dengan 4.412 unit rumah, diikuti Sulawesi Tenggara dengan 3.549 unit, memberikan pembelajaran penting bagi daerah lain. Keberhasilan Jawa Barat dapat dikaitkan dengan ekosistem industri konstruksi yang sudah matang, ketersediaan lembaga pembiayaan, dan dukungan infrastruktur yang memadai. Sementara itu, capaian Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa daerah di luar Pulau Jawa memiliki potensi besar untuk mereplikasi kesuksesan tersebut dengan strategi yang tepat. Bagi daerah-daerah dengan realisasi yang masih rendah, analisis terhadap faktor-faktor penghambat seperti ketersediaan lahan, akses pembiayaan, kapasitas developer lokal, dan efektivitas sosialisasi program menjadi krusial untuk dilakukan.

Fenomena belum terealisasinya pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) meski telah ada 782 kasus pembebasan retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) menjadi tantangan serius yang perlu segera diatasi di tingkat daerah. Kondisi ini dapat mengindikasikan adanya gap dalam koordinasi antara instansi yang menangani retribusi dengan yang mengelola BPHTB, atau kemungkinan adanya kendala teknis dalam mekanisme pembebasan. Mengingat BPHTB merupakan komponen biaya yang signifikan dalam proses kepemilikan rumah, keterlambatan implementasi pembebasan ini berpotensi mengurangi daya tarik program bagi masyarakat target dan menghambat pencapaian target secara keseluruhan.

Kerangka regulasi yang membatasi pembebasan hanya untuk satu kali transaksi per individu memberikan implikasi penting bagi strategi pengembangan program di daerah. Pembatasan ini mendorong perlunya optimalisasi dalam seleksi beneficiary dan pengembangan mekanisme monitoring yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan. Di sisi lain, daerah-daerah perlu mulai memikirkan strategi keberlanjutan program pasca pencapaian target, termasuk pengembangan skema pembiayaan alternatif, program upgrading perumahan, dan penciptaan ekosistem perumahan yang mendukung mobilitas ekonomi masyarakat.

Cakupan berbagai jenis hak atas tanah dalam program pembebasan BPHTB, mulai dari hak milik hingga hak pengelolaan, memberikan fleksibilitas bagi daerah-daerah dengan karakteristik kepemilikan tanah yang beragam. Namun, keragaman ini juga menuntut peningkatan kapasitas aparatur daerah dalam memahami berbagai skema hukum pertanahan dan implikasinya terhadap implementasi program. Daerah-

daerah dengan tingkat kompleksitas status tanah yang tinggi perlu mengembangkan standar operasional prosedur yang jelas dan melakukan koordinasi intensif dengan Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan kelancaran proses.

Untuk mengoptimalkan implementasi program di tingkat daerah, diperlukan beberapa strategi adaptif yang disesuaikan dengan kondisi lokal. Pertama, daerah-daerah perlu melakukan pemetaan komprehensif terhadap demand dan supply perumahan di wilayahnya, termasuk identifikasi lokasi-lokasi strategis yang dapat dikembangkan dengan biaya yang efisien. Kedua, pengembangan partnership dengan sektor swasta, khususnya developer dan lembaga pembiayaan lokal, menjadi krusial untuk mempercepat realisasi program. Ketiga, peningkatan kapasitas institusi lokal dalam hal perencanaan, monitoring, dan evaluasi program perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan efektivitas implementasi. Keempat, daerah-daerah perlu mengembangkan inovasi dalam hal teknologi konstruksi dan pemanfaatan material lokal untuk menekan biaya pembangunan tanpa mengorbankan kualitas. Kelima, penguatan sistem informasi dan database beneficiary menjadi penting untuk memastikan akurasi targeting dan mencegah duplikasi penerima manfaat. Terakhir, pengembangan skema insentif tambahan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang berpartisipasi dalam program dapat menjadi strategi untuk meningkatkan antusiasme dan percepatan implementasi di tingkat lokal.

2.6.3.6 Pengembangan UMKM

Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah menjadi prioritas strategis pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang 61,07% PDB nasional dan menyerap 97% tenaga kerja, menjadikannya tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, di balik kontribusi besarnya, sektor ini masih menghadapi tantangan kompleks yang menghambat pertumbuhannya.

Untuk memperkuat sektor UMKM di tingkat Masyarakat bawah, pemerintah telah meluncurkan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai instrumen strategis. Berdasarkan data terkini per 13 April 2025, Indonesia memiliki 75.266 desa dan 83.762 desa/kelurahan yang menjadi target pembentukan koperasi ini. Program ini menunjukkan progres signifikan dengan 83.199 desa/kelurahan (89%) telah

tersosialisasi dan 77.809 desa/kelurahan (93%) telah melaksanakan Musyawarah Desa (Musdes). Lebih menggembirakan, 10.937 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah berbadan hukum, menandakan fondasi kelembagaan yang kuat untuk pemberdayaan ekonomi desa.

Salah satu tantangan utama UMKM adalah akses pembiayaan yang terbatas. Hanya 19% UMKM yang memiliki akses ke kredit perbankan, sementara sebagian besar masih bergantung pada pendanaan informal dengan bunga tinggi. Kehadiran Koperasi Merah Putih menjadi solusi strategis karena dari 175.008 koperasi di Indonesia, baru 5.297 Koperasi Unit Desa (KUD) yang terbentuk, sementara 52.381 desa belum memiliki lembaga keuangan mikro seperti KUD, Kopinkra, maupun KSP/Kospin. Ini menunjukkan potensi besar Koperasi Merah Putih dalam mengisi kekosongan akses pembiayaan di tingkat desa.

Meskipun program Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah membantu, penyalurannya belum merata, terutama di daerah terpencil. Data menunjukkan kesenjangan regional yang signifikan dalam pembentukan Koperasi Merah Putih. Jawa Timur memimpin dengan 3.248 koperasi berbadan hukum, diikuti Jawa Tengah (1.303) dan Jawa Barat (934), sementara daerah timur Indonesia seperti Papua Barat, Papua Tengah, dan Papua Selatan masih memiliki angka yang sangat rendah (0-2 koperasi). Kesenjangan ini mencerminkan tantangan infrastruktur dan akses yang masih perlu diatasi.

Khusus untuk wilayah Kalimantan, data menunjukkan perkembangan yang bervariasi antar provinsi. Kalimantan Selatan memiliki 2.015 desa/kelurahan yang telah tersosialisasi dengan 2.015 yang telah melaksanakan Musdes, namun baru 14 Koperasi Merah Putih yang berbadan hukum. Angka ini relatif rendah dibandingkan potensi yang ada, terutama mengingat Kalimantan Selatan memiliki 4 Satgas Kabupaten/Kota yang seharusnya dapat mempercepat pembentukan koperasi. Kondisi serupa terlihat di Kalimantan Tengah dengan 1.571 desa tersosialisasi namun hanya 141 koperasi berbadan hukum, Kalimantan Timur dengan 1.038 desa tersosialisasi dan 49 koperasi berbadan hukum, serta Kalimantan Utara dengan 2.145 desa tersosialisasi tetapi hanya 56 koperasi berbadan hukum.

Rendahnya pembentukan koperasi berbadan hukum di Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan, menjadi tantangan tersendiri dalam konteks RPJMD Barito Kuala

yang menempatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai prioritas. Padahal, sektor unggulan Barito Kuala seperti pertanian padi, perikanan, dan perkebunan kelapa sawit sangat cocok untuk dikembangkan melalui skema koperasi. Potensi 65.966 kelompok masyarakat strategis yang berpotensi menjadi anggota, termasuk Gapoktan (64.701 kelompok), seharusnya dapat dioptimalkan untuk memperkuat rantai nilai komoditas unggulan daerah.

Digitalisasi yang belum merata menjadi kendala lain. Sekitar 64% UMKM sudah mulai go digital, tetapi hanya 28% yang benar-benar memanfaatkan platform e-commerce secara optimal. Koperasi Merah Putih dapat menjadi hub digitalisasi UMKM di desa dengan memanfaatkan kelompok masyarakat strategis yang sudah memiliki struktur organisasi matang. Di Kalimantan, tantangan konektivitas internet dan literasi digital masih menjadi hambatan, sehingga peran koperasi sebagai fasilitator transformasi digital menjadi sangat penting.

Persaingan dengan produk impor murah, terutama dari China, juga mengancam daya saing UMKM lokal. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah telah membentuk struktur koordinasi yang komprehensif dengan 10 Satgas Provinsi dan 60 Satgas Kabupaten/Kota untuk memfasilitasi pembentukan Koperasi Merah Putih. Di Kalimantan Selatan, koordinasi lintas wilayah ini penting untuk membangun jejaring pasar produk unggulan seperti beras, ikan, dan produk olahan kelapa sawit.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang mengoptimalkan peran Koperasi Merah Putih. Dengan target 16.500 desa/kelurahan yang sedang dalam proses pengurusan dokumen ke notaris, diproyeksikan akan ada tambahan signifikan koperasi berbadan hukum dalam waktu dekat. Khusus untuk Barito Kuala, akselerasi pembentukan koperasi menjadi krusial mengingat rendahnya angka koperasi berbadan hukum di Kalimantan Selatan secara keseluruhan.

Perluasan akses pembiayaan melalui optimalisasi program KUR dengan melibatkan Koperasi Merah Putih sebagai channeling agent menjadi langkah krusial, mengingat masih ada 63.968 desa yang belum memiliki Koperasi Unit Desa. Di Kalimantan, potensi sektor perkebunan dan perikanan dapat menjadi pendorong pertumbuhan koperasi, terutama dalam mendukung petani dan nelayan kecil yang selama ini kesulitan mengakses pembiayaan formal.

Program pembentukan Koperasi Merah Putih telah menunjukkan momentum positif dengan adanya Kepres tentang Satgas Koperasi Merah Putih dan Perkada yang diterbitkan di seluruh provinsi. Tim koordinasi fasilitas pembentukan koperasi yang terdiri dari 16 posisi strategis, mulai dari pengarah hingga anggota kesekretariatan, memastikan implementasi program berjalan sistematis dan terkoordinasi. Untuk Kalimantan Selatan, sinergi dengan RPJMD Barito Kuala dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat mempercepat pembentukan koperasi sekaligus mendukung pengembangan sektor unggulan daerah.

Peningkatan daya saing UMKM melalui Koperasi Merah Putih juga memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan. Dengan melibatkan kelompok-kelompok strategis seperti Gapoktan, Pokdakan, dan kelompok lainnya, koperasi ini dapat menjadi platform inkubasi bisnis yang mengintegrasikan UMKM dalam rantai nilai yang lebih komprehensif. Di Barito Kuala, integrasi ini dapat mendukung pengembangan agribisnis terpadu mulai dari hulu hingga hilir, sesuai dengan arahan RPJMD yang menekankan pada peningkatan nilai tambah produk pertanian dan perikanan.

Sertifikasi halal, SNI, dan standardisasi produk dapat difasilitasi melalui jaringan koperasi yang tersebar di seluruh nusantara. Untuk produk unggulan Kalimantan seperti beras premium dan produk perikanan, standarisasi ini penting untuk menembus pasar yang lebih luas, termasuk ekspor ke negara-negara ASEAN.

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih telah menunjukkan capaian menggembirakan dengan tingkat sosialisasi 89% dan pelaksanaan Musdes 93%. Namun, gap antara sosialisasi dan pembentukan koperasi berbadan hukum, terutama di Kalimantan, perlu mendapat perhatian khusus. Kolaborasi dengan program existing seperti "BUMN Hadir untuk UMKM" dan platform digital dapat diperkuat melalui jaringan Koperasi Merah Putih yang kini telah mencapai 10.937 unit berbadan hukum.

Dengan dukungan infrastruktur kelembagaan yang kuat dan distribusi geografis yang merata, Koperasi Merah Putih berpotensi menjadi game changer dalam ekosistem UMKM Indonesia. Khususnya di Kalimantan Selatan dan Barito Kuala, percepatan pembentukan koperasi berbadan hukum dapat menjadi katalis pertumbuhan ekonomi desa yang berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian target RPJMD dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan sektor unggulan daerah.

2.6.3.7 Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Indonesia terus menunjukkan ketahanan dengan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 4,87% pada Triwulan I tahun 2025. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di kawasan Asia Tenggara, bahkan mengungguli beberapa negara maju seperti Malaysia (4,4%) dan Singapura (3,9%). Namun, pertumbuhan ini belum merata secara geografis, di mana beberapa provinsi seperti Maluku Utara (34,58%) dan Papua Barat (25,53%) mencatat pertumbuhan spektakuler, sementara daerah lain masih berjuang untuk mengejar ketertinggalan.

Sektor industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian tetap menjadi penyumbang utama pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi ketiga sektor ini sangat vital dalam menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Namun demikian, tantangan struktural seperti ketergantungan pada impor bahan baku, infrastruktur logistik yang belum memadai, serta kesenjangan digital masih menjadi hambatan serius yang perlu segera diatasi.

Pemerintah telah merespons tantangan ini dengan berbagai kebijakan strategis. Program swasembada pangan terus digenjot melalui pembangunan infrastruktur irigasi dan lumbung pangan nasional. Di sektor digital, upaya peningkatan literasi dan adopsi teknologi bagi UMKM menjadi prioritas, mengingat baru 28% pelaku usaha yang benar-benar memanfaatkan platform digital secara optimal. Pembangunan Mal Pelayanan Publik di berbagai daerah juga diharapkan dapat mempermudah iklim berusaha dan menarik lebih banyak investasi.

Tantangan ke depan adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Beberapa langkah krusial yang perlu diperkuat antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan transformasi digital, serta penyelesaian berbagai proyek infrastruktur strategis. Dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan sektor swasta, serta didukung oleh kebijakan yang tepat sasaran, Indonesia memiliki peluang besar untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus mengurangi kesenjangan antardaerah.

Pembangunan yang berkelanjutan dan merata akan menjadi kunci untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar kelima di dunia

pada tahun 2045. Untuk mencapai target ambisius ini, dibutuhkan komitmen semua pihak dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kompetitif, inovatif, dan berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.6.3.8 Pemerataan Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan

Upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan pembangunan terus menjadi fokus utama pemerintah. Data BPS menunjukkan tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2024 berada pada level 9,21%, turun dari 10,19% pada September 2020 di masa pandemi. Koefisien Gini yang mengukur kesenjangan ekonomi juga menurun menjadi 0,378 pada Maret 2024. Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 486,2 triliun untuk perlindungan sosial dalam APBN 2024, termasuk untuk Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjangkau 10,5 juta keluarga, Kartu Sembako untuk 18,8 juta keluarga, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan berbagai program pemberdayaan masyarakat.

Pembangunan daerah tertinggal juga mendapat perhatian khusus dengan fokus pada 62 kabupaten tertinggal berdasarkan Perpres No. 63/2020. Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 2024 mencapai Rp 942,3 triliun, dengan Dana Desa sebesar Rp 91,7 triliun yang dialokasikan untuk 74.961 desa di Indonesia. Sejalan dengan Astacita "Indonesia Maju dan Berkeadilan", pemerataan pembangunan ditujukan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah dan antar kelompok masyarakat, serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.6.3.9 Pengelolaan Lingkungan dan Mitigasi Bencana

Indonesia terus memperkuat upaya pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana. Program Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional (PRGMN) menargetkan restorasi 2,67 juta hektar lahan gambut dan 600.000 hektar mangrove hingga 2024. Berdasarkan data Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM), hingga 2024 telah berhasil direstorasi sebanyak 2,2 juta hektar lahan gambut dan 450.000 hektar mangrove. Upaya penurunan deforestasi menunjukkan hasil positif dengan laju deforestasi menurun menjadi 115.460 hektar pada periode 2022-2023, turun signifikan dari 462.460 hektar pada periode 2018-2019. Moratorium permanen penerbitan izin baru di hutan primer dan lahan gambut telah diperpanjang dan diperkuat melalui Instruksi Presiden No. 5/2023.

Untuk mitigasi bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran Rp 24,5 triliun dalam APBN 2024 untuk penguatan sistem peringatan dini, infrastruktur mitigasi bencana, dan tanggap darurat. Pembangunan 155 bendungan untuk pengendalian banjir dan suplai air terus dipercepat, dengan 42 bendungan telah selesai hingga 2024. Sejalan dengan Astacita "Indonesia Lestari", pengelolaan lingkungan dan mitigasi bencana menjadi fondasi penting untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

2.6.3.10 Pengendalian Inflasi Daerah

Inflasi di Indonesia menunjukkan kinerja yang terkendali dengan tingkat inflasi nasional sebesar 1,6% (year-on-year) pada Mei 2025. Pencapaian ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan inflasi terendah di dunia, yakni peringkat 50 dari 186 negara sekaligus peringkat ke-4 terendah di ASEAN. Namun, disparitas inflasi antardaerah masih menjadi tantangan serius. Beberapa wilayah, seperti Jayawijaya (5,75%) dan Luwuk (4,28%), mengalami tekanan inflasi lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, menunjukkan perlunya penanganan khusus untuk mengurangi ketimpangan tersebut.

Faktor utama yang memengaruhi inflasi daerah berasal dari kelompok bahan makanan, transportasi, dan perumahan. Di tingkat provinsi, Papua Barat mencatat inflasi tertinggi sebesar 5,75%, sementara Nusa Tenggara Barat (NTB) berhasil menjaga inflasi pada level 1,63% yang relatif lebih terkendali. Komoditas penyumbang inflasi di daerah didominasi oleh cabai rawit, bawang merah, dan beras, yang harganya seringkali fluktuatif akibat faktor musim dan distribusi yang tidak merata. Kondisi ini memerlukan intervensi kebijakan yang tepat untuk memastikan stabilitas harga.

Pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk mengendalikan inflasi daerah, antara lain melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berperan memantau dan menstabilkan harga komoditas pokok. Selain itu, program seperti pasar murah dan operasi pasar digelar untuk menjamin ketersediaan barang dengan harga terjangkau. Perluasan jaringan logistik juga terus dilakukan guna mengurangi disparitas harga antardaerah, terutama di wilayah terpencil. Di sisi moneter, pemerintah berkoordinasi dengan Bank Indonesia untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan suku bunga agar tidak memberi tekanan tambahan pada inflasi.

Di tingkat daerah, upaya pengendalian inflasi didukung oleh kebijakan fiskal, seperti pembebasan retribusi pasar bagi pedagang kecil dan pemberian insentif bagi produsen pangan lokal. Provinsi NTB, misalnya, berhasil menekan inflasi melalui intervensi tepat sasaran, termasuk distribusi bantuan pangan dan penguatan cadangan beras daerah. Langkah-langkah seperti ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi inflasi.

Ke depan, tantangan utama pengendalian inflasi daerah meliputi ketahanan pangan, efisiensi distribusi, dan dampak perubahan iklim yang berpotensi memicu gejolak harga. Untuk itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas harga. Dengan pendekatan terintegrasi, Indonesia tidak hanya dapat mempertahankan inflasi yang rendah dan stabil, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di seluruh wilayah.

2.6.3.11 Percepatan Pencegahan Stunting dan Kemiskinan Ekstrem

Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan dalam penurunan angka stunting dan kemiskinan ekstrem, namun tantangan besar masih tersisa. Berdasarkan data terbaru, prevalensi stunting nasional turun menjadi 21,6%, sementara kemiskinan ekstrem berhasil ditekan ke level 0,83% atau setara dengan 2,33 juta orang pada Maret 2024. Pemerintah menargetkan angka stunting di bawah 14% dan kemiskinan ekstrem 0% pada 2026, yang memerlukan akselerasi program intervensi. Strategi percepatan penanganan difokuskan pada tiga pendekatan utama:

1. Intervensi gizi spesifik melalui program makanan bergizi gratis untuk balita dan ibu hamil di 514 kabupaten/kota prioritas. Program ini didukung oleh pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah mencapai 15.000 unit di seluruh Indonesia.
2. Pemberdayaan ekonomi keluarga melalui perluasan akses permodalan UMKM, pelatihan keterampilan, dan integrasi dengan program padat karya. Khusus untuk daerah tertinggal, pemerintah mengalokasikan Rp10 triliun untuk program keluarga harapan yang ditargetkan menjangkau 10 juta penerima manfaat.

3. Konvergensi program pusat-daerah dengan memastikan 100% kabupaten/kota memiliki regulasi dan anggaran khusus penanganan stunting. Hingga Juni 2025, baru 75% daerah yang memiliki Perda khusus penanganan stunting.

Hasil sementara menunjukkan progres menggembirakan. Program "Indonesia Pintar" telah menjangkau 19,3 juta anak sekolah dari keluarga miskin, sementara bantuan pangan nontunai menyentuh 18,7 juta keluarga. Di sektor kesehatan, cakupan imunisasi dasar lengkap meningkat menjadi 92% dan pemberian makanan tambahan mencapai 87% balita di daerah prioritas.

2.1.1.12. Percepatan Pembangunan Melalui Tata Ruang, Hunian Terjangkau, dan Pendidikan

Perencanaan tata ruang yang komprehensif, program perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah, dan inisiatif sekolah rakyat menjadi tiga isu strategis nasional yang mendapat perhatian pemerintah pada tahun 2025. Data terkini menunjukkan capaian signifikan sekaligus tantangan yang perlu diatasi untuk mencapai target pembangunan nasional.

Hingga pertengahan 2025, penyelesaian dokumen RTRW di tingkat provinsi menunjukkan bahwa dari 38 provinsi, baru 22 provinsi yang telah menetapkan Perda RTRW, 6 provinsi dalam proses penyusunan revisi, 4 provinsi dalam proses persetujuan substansi, 2 provinsi dalam proses evaluasi Kemendagri, dan 4 provinsi belum memiliki Perda RTRW. Di tingkat kabupaten/kota, pencapaian lebih baik dengan 503 dari 508 daerah telah menyelesaikan RTRW-nya, dengan rincian 132 Perda memasuki PK, 201 RTRW dalam proses revisi, 167 telah menetapkan Perda, dan 7 melalui proses dan Permen ATR/BPN. Hanya 2 kabupaten yang belum menetapkan Perda RTRW, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Buton Selatan.

Penyusunan RDTR masih menghadapi tantangan besar dengan tercapai 602 RDTR dari target 1.838 dalam RPJMN 2020-2024. Dari 602 RDTR yang telah ditetapkan, 72 melalui PERDA (dengan 19 Perda RDTR telah dicabut oleh Perda RTRW), 529 melalui PERKADA, 1 melalui PERMEN ATR/BPN, dan 328 terintegrasi dalam sistem OSS. Penyelesaian dokumen RTRW dan RDTR menjadi fondasi penting untuk menciptakan kepastian investasi, memudahkan investor mengetahui lokasi-lokasi yang dapat

dikembangkan sesuai peruntukannya, dan memastikan pembangunan yang berkelanjutan dan terarah.

Keberadaan RTRW dan RDTR memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha yang menjadi faktor krusial dalam keputusan investasi. Dengan adanya dokumen tata ruang yang lengkap dan terintegrasi, investor dapat melakukan analisis kelayakan lokasi (site feasibility) dengan lebih akurat, meminimalkan risiko perubahan peruntukan di masa depan, dan memperoleh landasan yang jelas untuk proses perizinan. Hal ini dibuktikan dengan kecenderungan peningkatan investasi di daerah-daerah yang telah memiliki RDTR yang terintegrasi dengan sistem OSS, karena proses perizinan menjadi lebih cepat, transparan, dan prediktif.

Bukti empiris menunjukkan bahwa daerah dengan dokumen tata ruang yang lengkap dan terintegrasi sistem, seperti di beberapa kota di Jawa Timur dan Sulawesi Selatan, mengalami pertumbuhan ekonomi di atas rata-rata nasional. Sebagai contoh, dari data pertumbuhan ekonomi TW I 2025, Jawa Timur dengan 8 lokasi RDTR terbaru mencatatkan pertumbuhan 5,00%, dan Sulawesi Selatan dengan 3 lokasi RDTR baru mencatatkan 5,78%, keduanya di atas pertumbuhan nasional 4,87%. Hal ini mengindikasikan korelasi positif antara kepastian tata ruang dengan daya tarik investasi.

Selain itu, integrasi 328 RDTR dalam sistem OSS memungkinkan penyederhanaan prosedur perizinan berusaha melalui pendekatan risk-based approach, di mana kegiatan usaha dengan risiko rendah dan menengah dapat langsung memperoleh izin tanpa perlu kajian mendalam karena sudah sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam RDTR. Ini bukan hanya meningkatkan efisiensi birokrasi, tetapi juga secara langsung mengurangi biaya transaksi dan ketidakpastian bagi investor, yang merupakan faktor determinan dalam pengambilan keputusan investasi.

Program 3 Juta Rumah untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) menunjukkan perkembangan dengan 501 dari 509 daerah telah menerbitkan Perkada tentang pembebasan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung, pengganti IMB) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan). Pembebasan atau keringanan biaya perizinan dan pajak ini menjadi instrumen penting dalam mendorong percepatan penyediaan rumah bagi kelompok MBR. Namun, masih terdapat 8 daerah yang belum

menerbitkan regulasi terkait pembebasan PBG dan BPHTB ini, yang dapat menghambat pemerataan akses perumahan terjangkau di daerah-daerah tersebut.

Inisiatif Sekolah Rakyat sebagai upaya pemerataan pendidikan telah mencatat progres dengan penetapan 100 titik lokasi pada 2025, terbagi menjadi Tahap 1a (63 titik) yang sudah berkontrak dan Tahap 1b (37 titik) yang masih dalam proses survei oleh KemenPU. Dari 37 titik lokasi Sekolah Rakyat Tahap 1b, persebaran terbanyak ada di Jawa Timur (8 lokasi), Sulawesi Selatan (3 lokasi), dan Riau (3 lokasi). Lokasi-lokasi tersebut memanfaatkan berbagai tipe fasilitas seperti lembaga pendidikan yang sudah ada (SMP, SMK), Badan Latihan Kerja (BLK), gedung pemerintah daerah, dan beberapa hotel atau asrama. Program Sekolah Rakyat ini ditunjang oleh peran sarjana penggerak yang berkontribusi dalam mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas pendidikan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah-daerah prioritas.

Ketiga isu strategis ini diimplementasikan dalam konteks ekonomi Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 4,87% pada Triwulan I 2025. Meski belum mencapai target pertumbuhan ekonomi rata-rata 5,7-6,0% per tahun dalam RPJMN 2020-2024, tren positif ini memberikan landasan yang lebih baik untuk percepatan pembangunan, termasuk dalam penyelesaian dokumen tata ruang, perumahan terjangkau, dan pemerataan akses pendidikan melalui Sekolah Rakyat.

Tantangan utama dalam implementasi ketiga isu strategis ini mencakup keterbatasan kapasitas fiskal daerah, koordinasi lintas sektor yang belum optimal, dan keterbatasan sumber daya manusia. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam pemberian keringanan fiskal dan pemanfaatan program sarjana penggerak, menjadi kunci dalam mengatasi tantangan dan mempercepat pencapaian target pembangunan nasional.

2.6.4 Isu Regional (Prov. Kalimantan Selatan)

Kabupaten Barito Kuala merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang posisinya strategis karena berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi dan merupakan pintu gerbang menuju Kalimantan Tengah. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten

Barito Kuala periode 2025-2029, penting untuk mempertimbangkan isu-isu strategis di tingkat regional Kalimantan Selatan.

Tabel II-117
Arahan Rencana Pola Ruang Terkait Kabupaten Barito Kuala

No.	Pola Ruang	Arahan Rencana Pola Ruang di Kabupaten Barito Kuala
1	Kawasan Ekosistem Mangrove	Kawasan ekosistem mangrove di Kabupaten Barito Kuala
2	Kawasan Hutan Produksi	Kawasan hutan produksi di Kabupaten Barito Kuala
3	Kawasan Konservasi	1. Suaka Margasatwa Kuala Lupak di Kabupaten Barito Kuala 2. Suaka Margasatwa Pulau Kaget di Kabupaten Barito Kuala 3. Taman Wisata Alam Pulau Kembang di Kabupaten Barito Kuala
4	Kawasan Permukiman	Kawasan permukiman di seluruh Kabupaten Barito Kuala
5	Kawasan Pertambangan dan Energi	Kawasan pertambangan dan energi di Kabupaten Barito Kuala
6	Kawasan Pertanian	Optimalisasi lahan rawa di Kabupaten Barito Kuala
7	Kawasan Peruntukan Industri	Kawasan peruntukan industri di Kabupaten Barito Kuala
8	Kawasan Transportasi	Kawasan transportasi di Kabupaten Barito Kuala
9	Kawasan Perlindungan	1. Hutan lindung di Kabupaten Barito Kuala 2. Kawasan lindung gambut di Kabupaten Barito Kuala

Sumber: RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan (diolah)

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Barito Kuala termasuk dalam Klaster Banjarbakula yang memiliki arahan pengembangan pola ruang yang spesifik. Arahan ini menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan terintegrasi. Beberapa arahan rencana pola ruang yang terkait dengan Kabupaten Barito Kuala meliputi:

Kabupaten Barito Kuala memiliki kawasan ekosistem mangrove yang perlu dijaga kelestariannya sebagai bagian dari upaya perlindungan ekosistem pesisir. Selain itu, terdapat kawasan hutan produksi yang menjadi sumber daya ekonomi potensial bagi daerah, namun tetap harus dikelola secara berkelanjutan.

Dari aspek konservasi, Kabupaten Barito Kuala memiliki beberapa kawasan konservasi strategis seperti Suaka Margasatwa Kuala Lupak, Suaka Margasatwa Pulau Kaget, dan Taman Wisata Alam Pulau Kembang. Kawasan-kawasan ini memiliki nilai ekologis tinggi dan berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta keanekaragaman hayati di wilayah tersebut.

Untuk mendukung aktivitas ekonomi, Kabupaten Barito Kuala diarahkan untuk pengembangan kawasan pertambangan dan energi, kawasan pertanian dengan optimalisasi lahan rawa, kawasan peruntukan industri, serta kawasan transportasi. Pengembangan multi-sektor ini sejalan dengan upaya diversifikasi ekonomi daerah yang tidak hanya bergantung pada satu sektor saja.

Pola ruang Kabupaten Barito Kuala juga mencakup kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, khususnya hutan lindung dan kawasan lindung gambut. Keberadaan kawasan lindung gambut sangat penting mengingat karakteristik geografis Kabupaten Barito Kuala yang memiliki ekosistem gambut yang luas. Arah pola ruang ini menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang menyeimbangkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Implementasi yang konsisten terhadap arahan ini akan mendukung terwujudnya pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Barito Kuala, dimana arahan ini berimbas kepada isu lainnya yang di bahas di bawah ini.

2.6.4.1 Pengembangan Kawasan Metropolitan Banjarmasin-Banjarbaru-Barito Kuala (Banjar Bakula)

Pengembangan Kawasan Metropolitan Banjar Bakula menjadi isu strategis utama dalam pembangunan regional Kalimantan Selatan. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Kawasan Metropolitan Banjar Bakula merupakan salah satu dari 10 kawasan metropolitan yang diprioritaskan pengembangannya di Indonesia. Kawasan Metropolitan Banjar Bakula mencakup Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, sebagian Kabupaten Banjar, dan sebagian Kabupaten Barito Kuala. Menurut Master Plan Kawasan Metropolitan Banjar Bakula 2020-2045 yang disusun oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, kawasan ini diproyeksikan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru dengan target penduduk 2,5 juta jiwa dan kontribusi terhadap PDRB Kalimantan Selatan sebesar 65% pada tahun 2045. Pembangunan infrastruktur pendukung kawasan metropolitan terus dilakukan, termasuk pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Banjarmasin sepanjang 99,35 km dan Jembatan Pulau Balang yang menghubungkan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur. Hingga 2024, progres pembangunan jalan tol tersebut telah mencapai 85% dan ditargetkan beroperasi penuh pada tahun 2025.

2.6.4.2 Transformasi Ekonomi Regional Berbasis Sumber Daya

Provinsi Kalimantan Selatan sedang mengalami perubahan fundamental dalam struktur perekonomiannya, bergerak dari ketergantungan yang tinggi pada sektor pertambangan batubara menuju diversifikasi ekonomi yang lebih berkelanjutan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pergeseran signifikan dimana kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB Kalimantan Selatan mengalami penurunan dari 21,54% pada tahun 2018 menjadi 18,2% pada tahun 2023. Pada waktu yang sama, sektor industri pengolahan menunjukkan tren positif dengan peningkatan kontribusi dari 13,85% menjadi 15,7% dalam periode yang sama.

Untuk mengakselerasi transformasi ekonomi ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun Roadmap Transformasi Ekonomi Kalimantan Selatan 2023-2045 yang berfokus pada tiga sektor strategis: (1) industrialisasi hasil tambang dan komoditas perkebunan, (2) pengembangan ekonomi hijau dan pariwisata berkelanjutan, dan (3) penguatan ekonomi digital dan kreatif. Salah satu proyek unggulan dalam mendukung transformasi ini adalah pengembangan Kawasan Industri Batulicin (KIB) di Kabupaten Tanah Bumbu dengan luas 570 hektar dan nilai investasi mencapai Rp 4,8 triliun, yang ditargetkan mampu menyerap 12.000 tenaga kerja dan menarik investasi hingga Rp 25 triliun pada tahun 2030.

Bagi Kabupaten Barito Kuala, transformasi ekonomi di tingkat provinsi ini memiliki implikasi strategis mengingat karakteristik wilayahnya yang berbeda dengan kabupaten penghasil tambang. Sebagai daerah dengan potensi pertanian yang besar, khususnya lahan rawa yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Lumbung Pangan Rawa Batang Banyu, Kabupaten Barito Kuala memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dalam rantai nilai industri pengolahan berbasis pertanian dan perkebunan.

Dengan adanya pergeseran fokus ekonomi provinsi dari sektor ekstraktif menuju sektor berkelanjutan, Kabupaten Barito Kuala dapat mengoptimalkan potensi ekonomi hijau melalui pengembangan pertanian organik, agroforestri, dan ekowisata berbasis rawa dan ekosistem mangrove. Hal ini sejalan dengan arah pengembangan pola ruang di Kabupaten Barito Kuala yang mencakup kawasan ekosistem mangrove, kawasan konservasi, dan optimalisasi lahan rawa untuk pertanian.

Sebagai bagian dari Kawasan Wilayah Metropolitan Banjarmasin, Kabupaten Barito Kuala juga berpotensi mendapat manfaat dari pengembangan infrastruktur dan konektivitas yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi baru di Kalimantan Selatan. Pengembangan kawasan peruntukan industri di Barito Kuala yang telah diarahkan dalam RTRW Provinsi dapat disinergikan dengan roadmap transformasi ekonomi provinsi, terutama untuk industrialisasi berbasis komoditas pertanian dan perkebunan yang menjadi keunggulan daerah.

Dengan demikian, transformasi ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan membuka peluang bagi Kabupaten Barito Kuala untuk memposisikan diri sebagai bagian integral dalam ekosistem ekonomi regional yang lebih berkelanjutan, tidak hanya sebagai penyedia bahan baku pertanian tetapi juga sebagai lokasi pengembangan industri hilir dan ekonomi hijau yang sejalan dengan karakteristik wilayah dan keunggulan komparatif yang dimiliki.

2.6.4.3 Kalimantan Selatan sebagai Lumbung Pangan Nasional

Kalimantan Selatan memiliki peran strategis sebagai salah satu lumbung pangan nasional, terutama untuk komoditas beras. Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Selatan, pada tahun 2023 produksi padi mencapai 2,41 juta ton GKG (setara 1,53 juta ton beras), dengan surplus beras mencapai 870.000 ton yang didistribusikan ke provinsi lain, termasuk Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan sebagian Pulau Sulawesi. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah meluncurkan program "Kalsel Lumbung Pangan 2030" yang menargetkan peningkatan produksi padi menjadi 3 juta ton GKG per tahun melalui peningkatan produktivitas dan perluasan areal tanam. Fokus utama pengembangan kawasan lumbung pangan berada di tiga kabupaten, yaitu Barito Kuala, Banjar, dan Tapin yang secara kolektif menyumbang 55% dari total produksi padi provinsi. Pengembangan *food estate* di Kabupaten Barito Kuala menjadi program strategis dengan target pengembangan kawasan pertanian terintegrasi seluas 10.000 hektar hingga tahun 2030. Hingga 2024, sebanyak 3.500 hektar telah dikembangkan dengan dukungan infrastruktur pertanian modern, termasuk irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pasca panen.

2.6.4.4 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Mitigasi Bencana Banjir

Kalimantan Selatan memiliki 65 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan DAS Barito sebagai yang terbesar dan melintasi beberapa kabupaten, termasuk Barito Kuala. Pengelolaan DAS yang berkelanjutan menjadi isu krusial mengingat bencana banjir besar yang melanda Kalimantan Selatan pada Januari 2021 yang mengakibatkan kerugian ekonomi mencapai Rp 5,3 triliun dan mempengaruhi 11 dari 13 kabupaten/kota. Berdasarkan Kajian Risiko Bencana Kalimantan Selatan 2021-2025, sebanyak 1,2 juta jiwa berada pada zona risiko tinggi banjir, dengan 70% di antaranya berada di kawasan DAS Barito, termasuk wilayah Kabupaten Barito Kuala. Deforestasi di hulu DAS Barito mencapai 32.500 hektar per tahun selama periode 2018-2022, berkontribusi pada peningkatan limpasan permukaan dan erosi.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Barito telah meluncurkan Program Terpadu Pengelolaan DAS Barito 2022-2026 dengan anggaran Rp 3,75 triliun, mencakup kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, pembangunan infrastruktur pengendali banjir, dan sistem peringatan dini. Hingga 2024, telah dilakukan rehabilitasi hutan seluas 45.000 hektar dan pembangunan 15 waduk retensi banjir.

2.6.4.5 Restorasi Lahan Gambut dan Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan

Kalimantan Selatan memiliki lahan gambut seluas 331.629 hektar atau sekitar 8,8% dari total luas wilayah provinsi, dengan sebagian besar berada di Kabupaten Barito Kuala (136.585 hektar) dan Kabupaten Banjar (108.352 hektar). Restorasi lahan gambut menjadi prioritas setelah kebakaran hutan dan lahan besar pada tahun 2019 yang membakar lebih dari 120.000 hektar lahan, di mana 40% di antaranya adalah lahan gambut.

Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (BRGM) telah menetapkan target restorasi 250.000 hektar lahan gambut di Kalimantan Selatan hingga 2024, dengan fokus pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) Barito Kuala-Banjar, KHG Barito-Kapuas, dan KHG Barito-Seruyan. Hingga 2024, telah berhasil direstorasi seluas 172.500 hektar atau sekitar 69% dari target. Program Desa Peduli Gambut telah dikembangkan di 87 desa

yang berada di kawasan gambut di Kalimantan Selatan, dengan dukungan dana sebesar Rp 43,5 miliar untuk kegiatan rewetting (pembasahan kembali), revegetasi, dan revitalisasi ekonomi masyarakat. Sistem Pemantauan Tinggi Muka Air gambut secara real-time telah dipasang di 125 titik pantau yang tersebar di seluruh KHG.

2.6.4.6 Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Regional

Pengembangan infrastruktur konektivitas menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan di Kalimantan Selatan. Proyek strategis nasional di Kalimantan Selatan mencakup Bendungan Tapin, Pelabuhan Patimban, Jalan Tol Banjarmasin-Balikpapan, dan pengembangan Bandara Syamsudin Noor. Pembangunan Jalan Tol Balikpapan-Banjarmasin sepanjang 99,35 km dengan nilai investasi Rp 15,7 triliun, ditargetkan selesai pada 2025. Hingga 2024, progres pembangunan mencapai 85%. Jalan tol ini akan memperpendek waktu tempuh Banjarmasin-Balikpapan dari 12 jam menjadi 4 jam.

Pengembangan Bandara Syamsudin Noor tahap II dengan nilai investasi Rp 2,1 triliun telah selesai pada 2023, meningkatkan kapasitas penumpang dari 3,8 juta menjadi 7 juta penumpang per tahun. Terminal baru seluas 77.000 m² ini menjadikan Bandara Syamsudin Noor sebagai bandara terbesar ketiga di Kalimantan setelah Balikpapan dan Pontianak. Pembangunan Jaringan Kereta Api Kalimantan juga telah dimulai dengan rute awal Banjarmasin-Banjarbaru-Martapura sepanjang 37 km. Proyek dengan nilai investasi Rp 5,6 triliun ini ditargetkan beroperasi pada 2027 dan akan menjadi jalur kereta api pertama di Kalimantan.

2.6.4.7 Pengembangan Energi Terbarukan Regional

Kalimantan Selatan memiliki potensi energi terbarukan yang besar, terutama energi surya, biomassa, dan mikrohidro. Roadmap Energi Terbarukan Kalimantan Selatan 2020-2030 menargetkan peningkatan bauran energi terbarukan menjadi 23% pada 2025 dan 31% pada 2030, dari sekitar 12% pada 2023. Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Terapung di Bendungan Riam Kanan dengan kapasitas 13 MW (megawatt) menjadi proyek percontohan dengan nilai investasi Rp 260 miliar yang telah beroperasi sejak 2023. PLTS ini merupakan PLTS terapung terbesar ketiga di Indonesia setelah Cirata (Jawa Barat) dan Batang Toru (Sumatera Utara).

Pengembangan listrik tenaga biomassa dari limbah kelapa sawit juga dikembangkan dengan dukungan sektor swasta. Hingga 2024, terdapat 7 pembangkit listrik tenaga biomassa dengan total kapasitas 42 MW yang tersebar di Kabupaten Kotabaru, Tanah Bumbu, dan Tanah Laut. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bekerjasama dengan PT PLN (Persero) telah meluncurkan Program Kalimantan Selatan Terang 2025 yang menargetkan rasio elektrifikasi 100% pada 2025. Hingga 2023, rasio elektrifikasi Kalimantan Selatan telah mencapai 99,2%, meningkat dari 95,8% pada 2019.

2.6.4.8 Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemerataan Akses Pendidikan

Pengembangan sumber daya manusia menjadi prioritas untuk meningkatkan daya saing regional. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Selatan pada 2023 mencapai 71,51, masih di bawah rata-rata nasional (72,91), dengan disparitas IPM antar kabupaten/kota yang cukup tinggi. Kota Banjarmasin memiliki IPM tertinggi (79,75), sementara Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki IPM terendah (65,84). Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah meluncurkan program "Kalsel Cerdas 2030" yang berfokus pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan. Program ini mencakup pemberian beasiswa bagi 5.000 mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu melalui program Beasiswa Urang Banua dan pengembangan 13 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Unggulan yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.

Pengembangan ekosistem pendidikan vokasi yang link and match dengan industri menjadi prioritas. Pada tahun 2023, telah terbentuk 25 kerja sama antara SMK dengan industri dalam bentuk program magang, penyerapan lulusan, dan pengembangan kurikulum industri. Program Sekolah Penggerak juga telah diimplementasikan di 156 sekolah di seluruh Kalimantan Selatan dengan dukungan anggaran Rp 125 miliar.

2.6.4.9 Pengembangan Pariwisata Regional

Kalimantan Selatan memiliki potensi pariwisata yang beragam, mulai dari wisata alam, budaya, hingga kuliner. Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPPDA) Kalimantan Selatan 2019-2025 mengidentifikasi 6 Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP), yaitu KSPP Banjarmasin-Banjarbaru-Banjar, KSPP Loksado,

KSPP Pagatan, KSPP Kotabaru, KSPP Balangan, dan KSPP Tabalong. Jumlah kunjungan wisatawan ke Kalimantan Selatan pada tahun 2023 mencapai 2,8 juta orang, meningkat signifikan dari 1,2 juta orang pada tahun 2021 saat pandemi. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kalimantan Selatan mencapai 4,7% pada 2023, meningkat dari 3,2% pada 2019.

Program "Banua Borneo" telah diluncurkan sebagai branding pariwisata Kalimantan Selatan, dengan fokus pada pengembangan desa wisata, wisata sungai, dan ekowisata. Hingga 2024, telah dikembangkan 65 desa wisata yang tersebar di 13 kabupaten/kota dengan dukungan anggaran Rp 65 miliar. Pengembangan wisata sungai di Banjarmasin dan sekitarnya, termasuk Barito Kuala, menjadi fokus utama. Program revitalisasi kawasan tepian sungai Martapura dan Barito dengan nilai investasi Rp 350 miliar telah dimulai pada 2022 dan ditargetkan selesai pada 2025.

2.6.4.10 Kesiapan Menghadapi Dampak Pemindahan IKN

Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur memiliki implikasi signifikan bagi Kalimantan Selatan. Studi yang dilakukan oleh Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan (2023) memproyeksikan bahwa pemindahan IKN berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan sebesar 0,5-1,0% per tahun melalui peningkatan arus barang, jasa, dan mobilitas penduduk.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan telah menyusun "Rencana Aksi Merespons Pemindahan IKN 2023-2030" yang mencakup strategi pengembangan koridor ekonomi Banjarmasin-IKN, penguatan konektivitas, dan pengembangan ekonomi pendukung IKN. Rencana pengembangan Pelabuhan Hub Tanah Kuning di perbatasan Kalimantan Selatan-Kalimantan Timur dengan nilai investasi Rp 7,5 triliun menjadi proyek strategis untuk mendukung konektivitas dengan IKN. Pemindahan IKN juga diproyeksikan akan meningkatkan permintaan produk pangan dari Kalimantan Selatan, khususnya beras, sayuran, dan produk peternakan. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mempersiapkan pengembangan sentra produksi pangan terintegrasi di tiga kabupaten, yaitu Barito Kuala, Banjar, dan Tanah Laut dengan target produksi 1,5 juta ton beras per tahun untuk memenuhi kebutuhan IKN dan sekitarnya.

2.6.5 Isu Strategis Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Barito Kuala disusun sebagai instrumen untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. KLHS dilakukan untuk memastikan bahwa isu dan masalah lingkungan hidup telah dipertimbangkan dalam penyusunan atau evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam konteks Kabupaten Barito Kuala, terdapat beberapa isu strategis lingkungan hidup yang perlu mendapat perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan daerah.

Isu strategis pertama yang menjadi perhatian utama adalah pengelolaan sumber daya air yang menghadapi berbagai tantangan kompleks. Potensi pencemaran sungai akibat aktivitas pertanian dan pemukiman telah menjadi ancaman serius bagi kualitas air di wilayah ini. Sedimentasi di daerah aliran sungai (DAS) semakin memperparah kondisi ini, ditambah dengan adanya konflik pemanfaatan air antara sektor pertanian, perikanan, dan domestik. Pengelolaan air pasang surut yang belum optimal turut memperburuk situasi pengelolaan sumber daya air. Dampak dari permasalahan ini sangat signifikan, meliputi penurunan kualitas air baku untuk konsumsi masyarakat, terganggunya ekosistem perairan dan biodiversitas, serta menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan. Untuk mengatasi isu ini, diperlukan implementasi sistem pengelolaan DAS terpadu, pembangunan infrastruktur pengolahan limbah, penerapan teknologi ramah lingkungan dalam kegiatan pertanian, dan pengembangan sistem monitoring kualitas air yang berkelanjutan.

Isu strategis kedua yang tidak kalah penting adalah pengelolaan lahan dan penggunaan lahan yang menghadapi tekanan dari berbagai sektor pembangunan. Konversi lahan pertanian produktif menjadi permukiman telah menjadi tren yang mengkhawatirkan, diperparah oleh degradasi lahan akibat praktik pertanian yang tidak berkelanjutan. Fragmentasi habitat alami dan konflik tata ruang antara kepentingan ekonomi dan konservasi semakin memperumit permasalahan pengelolaan lahan. Dampak dari isu ini mencakup kehilangan lahan pertanian produktif, penurunan produksi pangan lokal, hilangnya habitat satwa dan tumbuhan endemik, serta meningkatnya risiko bencana ekologis. Strategi penanganan yang diperlukan meliputi penegakan rencana tata ruang wilayah secara konsisten, implementasi praktik pertanian

berkelanjutan, pengembangan kawasan konservasi dan koridor ekologis, serta pembatasan konversi lahan pertanian produktif.

Pengelolaan persampahan dan limbah menjadi isu strategis ketiga yang memerlukan perhatian serius mengingat sistem pengelolaan sampah yang belum memadai di Kabupaten Barito Kuala. Minimnya fasilitas pengolahan limbah organik dan anorganik telah menyebabkan pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah yang tidak terkontrol. Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah turut memperparah kondisi ini. Dampak yang ditimbulkan meliputi pencemaran tanah, air, dan udara, penyebaran penyakit berbasis lingkungan, degradasi kualitas estetika lingkungan, serta kerugian ekonomi dari sektor pariwisata. Solusi yang diperlukan mencakup pengembangan sistem pengelolaan sampah terpadu dengan prinsip *reduce*, *reuse*, dan *recycle*, pembangunan infrastruktur pengolahan sampah modern, penguatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan sampah, dan implementasi regulasi pengelolaan limbah yang ketat.

Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim merupakan isu strategis keempat yang semakin mendesak untuk ditangani. Meningkatnya frekuensi dan intensitas banjir, kekeringan pada musim kemarau yang berkepanjangan, perubahan pola curah hujan yang mempengaruhi produktivitas pertanian, serta rendahnya kapasitas adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim menjadi tantangan utama. Dampak yang ditimbulkan sangat luas, meliputi kerugian ekonomi akibat gagal panen dan kerusakan infrastruktur, gangguan terhadap ketahanan pangan daerah, meningkatnya risiko kesehatan masyarakat, dan eksodus penduduk dari daerah rawan bencana. Rekomendasi strategis yang diperlukan mencakup pengembangan sistem peringatan dini bencana iklim, pembangunan infrastruktur adaptasi perubahan iklim, diversifikasi varietas tanaman yang tahan iklim ekstrem, dan penguatan kelembagaan pengelolaan risiko bencana.

Konservasi keanekaragaman hayati menjadi isu strategis kelima yang tidak boleh diabaikan dalam perencanaan pembangunan. Tekanan terhadap habitat alami akibat ekspansi pembangunan, eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam, introduksi spesies invasif yang mengancam ekosistem lokal, serta minimnya area konservasi yang efektif telah mengancam kelestarian biodiversitas lokal. Dampak yang dikhawatirkan meliputi kepunahan spesies endemik lokal, hilangnya jasa ekosistem yang vital,

menurunnya resiliensi ekosistem terhadap gangguan, dan kerugian potensi ekonomi dari ekowisata. Strategi penanganan yang diperlukan mencakup penetapan kawasan konservasi berbasis masyarakat, pengembangan koridor ekologis untuk konektivitas habitat, implementasi program restorasi ekosistem yang terdegradasi, dan penguatan penegakan hukum lingkungan.

Implementasi KLHS memerlukan dukungan kebijakan yang komprehensif, meliputi kebijakan regulatif melalui penyusunan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penetapan standar baku mutu lingkungan yang sesuai dengan kondisi lokal, dan regulasi insentif serta disinsentif untuk kegiatan ramah lingkungan. Kebijakan struktural diperlukan melalui penguatan kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup, alokasi anggaran yang memadai untuk program lingkungan, dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang lingkungan. Sementara itu, kebijakan kultural perlu dikembangkan melalui program edukasi dan penyuluhan lingkungan hidup, pengembangan budaya masyarakat yang peduli lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan.

2.6.6 Isu Strategis Daerah.

Dalam penentuan Isu Strategis Daerah Kabupaten Barito Kuala, dilakukan melalui pertimbangan mendalam terhadap dokumen-dokumen terkait (RPJMN, RPJPD, RTRW, KLHS), dan melihat keterkaitan pengaruh antar variabel yang teridentifikasi dari isu global, nasional dan regional. Proses identifikasi ini tidak hanya berfokus pada analisis internal daerah, tetapi juga mempertimbangkan dinamika eksternal yang berpotensi mempengaruhi arah pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dalam jangka panjang.

Pendekatan holistik dalam menganalisis isu strategis menjadi sangat penting, mengingat kompleksitas tantangan pembangunan daerah di era globalisasi. Perubahan iklim, transformasi digital, ketahanan pangan, serta ketimpangan ekonomi dan sosial merupakan beberapa isu global yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kondisi daerah. Sementara itu, pada tingkat nasional, kebijakan desentralisasi, otonomi daerah, pengembangan infrastruktur nasional, dan reformasi birokrasi turut membentuk lansekap pembangunan daerah.

Kabupaten Barito Kuala, dengan karakteristik geografisnya yang unik sebagai daerah delta sungai dengan lahan rawa dan gambut yang luas, menghadapi tantangan spesifik yang memerlukan pendekatan khusus. Kondisi ini membentuk kerentanan sekaligus potensi pengembangan yang membutuhkan strategi pengelolaan yang cermat dan berkelanjutan. Analisis keterkaitan antar sektor menjadi kunci dalam mengidentifikasi isu-isu strategis yang mampu mendorong pembangunan daerah secara komprehensif.

Dalam konteks regional, posisi Kabupaten Barito Kuala yang berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Selatan, membuka peluang sekaligus tantangan dalam hal interaksi sosial-ekonomi dan pengembangan wilayah peri-urban. Dinamika regional ini turut dipertimbangkan dalam merumuskan isu strategis daerah, dengan memperhatikan aspek keterpaduan dan kesinambungan pembangunan antar wilayah di Kalimantan Selatan.

Melalui serangkaian analisis mendalam terhadap berbagai dokumen perencanaan, konsultasi publik, dan kajian teknis, berhasil diidentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Isu-isu ini menjadi landasan penting dalam penyusunan arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen RPJMD, dengan tetap menyelaraskan pada koridor pembangunan jangka panjang sebagaimana tercantum dalam RPJPD.

Untuk kajian yang mendalam dan mendasar, maka dipakai analisis MICMAC (*Matrix of Cross Impact Multiplications Applied to Classification*) yang merupakan metode analisis struktural yang digunakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci dalam sistem kompleks berdasarkan pengaruh dan ketergantungan antar variabel. Analisis ini sangat bermanfaat dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala karena mampu memetakan prioritas intervensi kebijakan berdasarkan karakteristik variabel dalam sistem pembangunan daerah.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dari 271 variabel pada identifikasi awal, terpilih 40 variabel penting telah diklasifikasikan ke dalam empat kuadran. Variabel Pengaruh (Kuadran I) memiliki pengaruh tinggi namun ketergantungan rendah, menjadikannya sebagai penggerak utama sistem, seperti posisi strategis daerah (PS1),

proporsi lahan alami (KLL1), dan kerentanan banjir (RB2). Variabel Penghubung (Kuadran II) dengan pengaruh dan ketergantungan tinggi berfungsi sebagai penguat sistem, termasuk produksi beras (KP1), laju pertumbuhan ekonomi (EK1), dan konektivitas wilayah (PS3). Variabel Tergantung (Kuadran III) memiliki pengaruh rendah namun ketergantungan tinggi, menjadi indikator hasil, seperti indeks kualitas lingkungan hidup (KLL3) dan kontribusi ekonomi (PS2). Variabel Otonom (Kuadran IV) dengan pengaruh dan ketergantungan rendah relatif terpisah dari dinamika sistem utama, termasuk perbedaan produktivitas antar kecamatan (KP2) dan distribusi penduduk (DM4).

Tabel II-118
Klasifikasi variabel penentuan Isu Strategis Kab. Barito Kuala Tahun 2026-2030

Kuadran	Karakteristik	Variabel Kunci	Deskripsi
I. Variabel Pengaruh	Pengaruh tinggi, Ketergantungan rendah	Posisi strategis daerah (PS1)	Penggerak utama sistem, kedekatan dengan IKN
		Proporsi lahan alami (KLL1)	Hanya 11,32% lahan alami, mempengaruhi ekosistem
		Kerentanan banjir (RB2)	Mempengaruhi berbagai aspek pembangunan
		Kerukunan Umat Beragama (KUB1)	Nilai IKUB meningkat dari 65,66 (2021) menjadi 73,53 (2023), menjadi penggerak stabilitas sosial dan pembangunan
II. Variabel Penghubung	Pengaruh tinggi, Ketergantungan tinggi	Produksi beras (KP1)	Surplus 4x lipat kebutuhan lokal
		Laju pertumbuhan ekonomi (EK1)	3,91%, berpengaruh ke berbagai aspek
		Konektivitas wilayah (PS3)	Menghubungkan 17 kecamatan
		Program Desa Rukun (KUB3)	Menghubungkan program kerukunan dengan dinamika pembangunan wilayah
III. Variabel Tergantung	Pengaruh rendah, Ketergantungan tinggi	Indeks kualitas lingkungan hidup (KLL3)	Indikator hasil dari berbagai intervensi
		Kontribusi ekonomi (PS2)	Tergantung pada faktor penggerak lain
		Kasus Intoleransi (KUB2)	Menurun dari 12 kasus (2021) menjadi 3 kasus (2023), tergantung pada

Kuadran	Karakteristik	Variabel Kunci	Deskripsi
			upaya-upaya peningkatan kerukunan
IV. Variabel Otonom	Pengaruh rendah, Ketergantungan rendah	Perbedaan produktivitas antar kecamatan (KP2)	Relatif terpisah dari dinamika sistem utama
		Distribusi penduduk (DM4)	Relatif terpisah dari dinamika sistem utama

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Dari hasil proses analisis MICMAC terhadap variabel penghubung dan ketergantungan antar variabel pada 4 kuadran, telah teridentifikasi sebelas isu strategis prioritas yang perlu menjadi fokus dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala. Kesebelas isu strategis ini merupakan hasil pemetaan dan analisis mendalam terhadap keterkaitan antar variabel dalam sistem pembangunan daerah. Pembahasan isu-isu strategis ini akan memberikan dasar yang kuat bagi perumusan strategi dan program pembangunan yang efektif dan tepat sasaran untuk Kabupaten Barito Kuala ke depan. Berikut adalah pembahasan 11 isu strategis hasil kajian dengan menggunakan analisis MICMAC.

2.6.6.1 Optimalisasi Produksi dan Nilai Tambah Pangan

Kabupaten Barito Kuala memiliki surplus beras hingga 4 kali lipat dari kebutuhan lokal, menjadikannya potensi besar untuk pengembangan ekonomi daerah melalui hilirisasi dan diversifikasi produk. Sebagai variabel penghubung, kebijakan yang tepat pada produksi beras akan menghasilkan efek pengganda pada aspek ekonomi lainnya. Pengembangan industri pengolahan beras bernilai tambah tinggi, penguatan rantai pasok dan sistem logistik pangan, serta pengembangan kapasitas petani dalam penerapan teknologi pertanian modern menjadi implikasi kebijakan yang perlu diprioritaskan untuk mengoptimalkan potensi ini.

2.6.6.2 Pemanfaatan Posisi Strategis sebagai Wilayah Pendukung IKN

Posisi strategis daerah (PS1) sebagai variabel pengaruh menjadi faktor penggerak utama pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Dukungan swasembada membuka peluang signifikan bagi daerah ini untuk menjadi wilayah penyangga dan pendukung. Penyusunan rencana tata ruang yang terintegrasi dengan pengembangan

IKN, pengembangan kawasan khusus pendukung IKN, dan penguatan terhadap pertanian dan perkebunan untuk dukungan terhadap swasembada pangan merupakan langkah strategis yang perlu diimplementasikan untuk memanfaatkan keunggulan geografis ini secara optimal dan memperkuat posisi Kabupaten Barito Kuala dalam konteks pengembangan wilayah nasional.

2.6.6.3 Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Laju pertumbuhan ekonomi (EK1) Kabupaten Barito Kuala yang saat ini hanya 3,91% perlu diakselerasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebagai variabel penghubung, peningkatan laju pertumbuhan ekonomi akan memberikan efek pada berbagai aspek pembangunan lainnya. Diversifikasi ekonomi daerah melalui pengembangan sektor non-pertanian, peningkatan investasi dan penciptaan iklim usaha kondusif, serta pengembangan sektor UMKM dan ekonomi kreatif menjadi strategi kunci untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan potensi dan keunggulan kompetitif yang dimiliki Kabupaten Barito Kuala.

2.6.6.4 Mitigasi Kerentanan Banjir

Kerentanan banjir (RB2) sebagai variabel pengaruh memerlukan perhatian serius, terutama di kawasan rawan seperti Tabunganen dan Alalak. Banjir dapat menghambat berbagai aspek pembangunan sehingga mitigasinya menjadi prasyarat bagi keberhasilan program pembangunan lainnya. Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang komprehensif, pengembangan sistem peringatan dini bencana, serta pengembangan infrastruktur tahan banjir dan adaptif perlu diprioritaskan. Pendekatan mitigasi banjir harus bersifat holistik dengan mengintegrasikan aspek teknis, sosial, dan lingkungan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dan infrastruktur terhadap bencana banjir yang kerap melanda wilayah ini.

2.6.6.5 Penguatan Pembangunan Kebudayaan

Kerukunan Umat Beragama (KUB1) Kabupaten Barito Kuala yang telah mengalami peningkatan signifikan dari nilai IKUB 65,66 (2021) menjadi 73,53 (2023) perlu terus diperkuat untuk menjaga stabilitas social yang tumbuh berdasarkan nilai-

nilai kebudayaan di Kabupaten Barito Kuala. Sebagai variabel pengaruh, kerukunan umat beragama menjadi fondasi bagi berbagai aspek pembangunan lainnya. Penguatan forum kerukunan antar umat beragama, pengembangan Program Desa Rukun yang lebih merata di 17 kecamatan, merupakan kunci sukses penguatan terhadap kebudayaan yang agamis di Kabupaten Barito Kuala. Integrasi keagamaan dalam perencanaan tata ruang dan pembangunan fasilitas publik yang inklusif akan mendukung terciptanya kebudayaan yang membawa kepada dampak yang kondusif dan meningkatkan daya adaptasi masyarakat terhadap perubahan, sehingga menjamin pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.

2.6.6.6 Pengembangan Infrastruktur Jalan

Dengan 45,8% jalan di Kabupaten Barito Kuala masih berupa jalan kerikil dan tanah, pengembangan infrastruktur jalan menjadi prioritas untuk meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah. Peningkatan kualitas jalan penghubung antar kecamatan, pembangunan jalan strategis penunjang aktivitas ekonomi, dan peningkatan sistem pemeliharaan infrastruktur jalan merupakan intervensi penting untuk membuka isolasi wilayah dan mendorong integrasi ekonomi. Infrastruktur jalan yang memadai akan mempercepat distribusi barang dan jasa, menurunkan biaya logistik, dan mempermudah akses masyarakat terhadap pelayanan publik, sehingga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.

2.6.6.7 Pengelolaan Lahan Alami dan Terbangun

Proporsi lahan alami (KLL1) Kabupaten Barito Kuala yang hanya 11,32% menunjukkan pentingnya kebijakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Penyusunan regulasi pengelolaan lahan yang berkelanjutan, perlindungan dan rehabilitasi kawasan konservasi, serta pengembangan kawasan terbangun yang ramah lingkungan menjadi langkah strategis yang perlu diimplementasikan. Pengelolaan lahan yang baik akan mendukung fungsi ekologis vital seperti pengaturan tata air, penyerapan karbon, dan perlindungan keanekaragaman hayati, sekaligus meminimalkan risiko bencana alam dan dampak perubahan iklim yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan daerah.

2.6.6.8 Peningkatan Konektivitas Antar 17 Kecamatan

Konektivitas wilayah (PS3) yang menghubungkan 17 kecamatan di Kabupaten Barito Kuala merupakan variabel penghubung penting untuk mendorong pemerataan pembangunan dan integrasi ekonomi wilayah. Pengembangan sistem transportasi publik antar kecamatan, peningkatan infrastruktur digital penghubung antar kecamatan, dan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan perlu diprioritaskan untuk mengatasi kesenjangan pembangunan. Konektivitas yang baik akan memfasilitasi pergerakan orang, barang, dan informasi, mendorong sinergi antar wilayah, dan membuka akses pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal, sehingga berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah secara keseluruhan.

2.6.6.9 Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran

Meskipun persentase kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala relatif rendah (3,66%), fokus pada kantong-kantong kemiskinan di beberapa kecamatan tetap diperlukan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif. Pemetaan dan identifikasi kantong kemiskinan secara detail, pengembangan program pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar bagi masyarakat miskin menjadi implikasi kebijakan yang penting. Pendekatan pengentasan kemiskinan harus bersifat komprehensif dan tepat sasaran, dengan mempertimbangkan karakteristik dan akar penyebab kemiskinan di masing-masing wilayah, serta mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan keberlanjutan hasil yang dicapai.

2.6.6.10 Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum merata di seluruh kecamatan Kabupaten Barito Kuala memerlukan strategi peningkatan kualitas SDM terutama di kecamatan tertinggal. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, pengembangan fasilitas kesehatan yang merata, dan peningkatan program pelatihan dan keterampilan masyarakat menjadi prioritas untuk membangun modal manusia yang berkualitas. Pembangunan manusia yang berkelanjutan akan memperkuat kapasitas masyarakat dalam memanfaatkan peluang ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan berpartisipasi

aktif dalam proses pembangunan, sehingga menjadi fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan peningkatan daya saing daerah dalam jangka panjang.

2.6.6.11 Pemerataan Infrastruktur Digital

Kesenjangan digital antar kecamatan di Kabupaten Barito Kuala perlu diatasi untuk mendukung transformasi ekonomi digital dan peningkatan pelayanan publik. Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal, pengembangan pusat-pusat layanan digital di setiap kecamatan, dan peningkatan literasi digital masyarakat menjadi langkah strategis yang perlu diimplementasikan. Infrastruktur digital yang merata akan membuka akses masyarakat terhadap informasi, layanan, dan pasar yang lebih luas, mempercepat difusi inovasi, dan menciptakan peluang ekonomi baru, sehingga berkontribusi pada percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Barito Kuala.

BAB III

VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Perencanaan pembangunan daerah merupakan proses strategis yang menentukan arah dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam kurun waktu 2025-2029. Sebagai landasan strategis, dokumen perencanaan ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran yang disusun secara sistematis dan komprehensif berdasarkan analisis kondisi daerah, potensi, permasalahan, serta aspirasi masyarakat.

Visi sebagai gambaran masa depan yang diharapkan merupakan cita-cita bersama yang ingin diwujudkan dalam lima tahun ke depan. Visi ini kemudian dijabarkan ke dalam misi yang menjadi rumusan umum upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Selanjutnya, misi dioperasionalkan menjadi tujuan yang lebih konkret dan terukur. Tujuan tersebut diturunkan ke dalam sasaran-sasaran strategis yang menjadi target capaian pembangunan dengan indikator yang jelas.

Perumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kabupaten Barito Kuala ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk karakteristik wilayah yang didominasi lahan basah, potensi unggulan daerah di sektor pertanian dan perkebunan, kondisi sosial-budaya masyarakat yang religius, serta posisi strategis Barito Kuala dalam konteks pembangunan regional dan nasional. Keselarasan antara visi daerah dengan arah pembangunan nasional juga menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa pembangunan Kabupaten Barito Kuala berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Dokumen perencanaan ini disusun melalui proses partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk unsur pemerintah, masyarakat, akademisi, dan pelaku usaha, sehingga mencerminkan kebutuhan dan aspirasi seluruh elemen masyarakat Barito Kuala. Melalui rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang jelas, diharapkan terwujud sinergi dan keselarasan langkah dalam pelaksanaan pembangunan yang akan di-*cascade* ke perangkat daerah sebagai pelaksana operasional untuk mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

3.1.1 Visi

Visi Kabupaten Barito Kuala 2025-2029 adalah "**Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas**", dimana Visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 mengandung rumusan yang komprehensif dan fundamental sebagai arah pembangunan daerah. Visi ini tidak hanya menjadi cita-cita, tetapi juga gambaran masa depan yang ingin diwujudkan melalui langkah-langkah pembangunan yang terencana dan terarah. Kata kunci dalam visi tersebut adalah "**Barito Kuala SATU**" yang menjadi landasan filosofis pembangunan daerah, dimana hal ini sangat sejalan untuk mewujudkan visi Kab. Barito Kuala 20 tahun ke depan yaitu Maju, Berkelanjutan dan Berbasis Agrobisnis. **SATU** merupakan akronim yang mengandung makna filosofis mendalam sebagai cita-cita pembangunan Kabupaten Barito Kuala, yaitu:

1. Sejahtera:

- Bermakna tercapainya taraf hidup masyarakat Barito Kuala yang makmur secara ekonomi. Kabupaten Barito Kuala memiliki potensi agraris yang sangat besar dengan lahan persawahan yang luas dan subur di sepanjang aliran Sungai Barito. Kesejahteraan bagi masyarakat Barito Kuala bermakna pemberdayaan potensi pertanian dan perkebunan yang menjadi tulang punggung ekonomi mayoritas penduduk, sehingga hasil produksi pertanian dapat memberi nilai tambah optimal bagi petani lokal.
- Mengandung semangat pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan pendapatan masyarakat. Karakteristik geografis Barito Kuala yang didominasi oleh lahan basah dan rawa pasang surut menuntut penanganan khusus dalam pemenuhan kebutuhan dasar, terutama akses terhadap air bersih, sanitasi, dan infrastruktur dasar. Peningkatan kesejahteraan juga bermakna diversifikasi ekonomi lokal melalui pengembangan agroindustri dan produk turunan pertanian yang sesuai dengan kondisi khas Barito Kuala.
- Mencerminkan kondisi dimana seluruh lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya ekonomi dan kesempatan yang merata. Penduduk Barito Kuala yang tersebar di berbagai kecamatan dengan tingkat konektivitas yang beragam memerlukan pendekatan

pembangunan yang memastikan distribusi kesejahteraan tidak terpusat pada satu kawasan saja. Ini termasuk penjaminan akses pasar bagi produk lokal, fasilitas kredit mikro bagi usaha kecil, dan program pemberdayaan ekonomi yang menyentuh hingga kawasan perdesaan terpencil di daerah aliran sungai.

2. Agamis:

- Merepresentasikan masyarakat Barito Kuala yang menjunjung tinggi nilai-nilai religius. Penduduk Barito Kuala memiliki karakteristik religius yang kuat dengan mayoritas beragama Islam, tercermin dari banyaknya rumah ibadah dan lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren dan madrasah yang tersebar di seluruh kabupaten. Penguatan karakter agamis berarti memperkuat peran lembaga-lembaga keagamaan ini sebagai pusat pembinaan moral dan etika masyarakat, serta memastikan nilai-nilai keagamaan terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari.
- Pengembangan kehidupan beragama yang harmonis dan toleran sebagai landasan moral pembangunan. Meskipun mayoritas beragama Islam, masyarakat Barito Kuala juga dihuni oleh pemeluk agama lain yang hidup berdampingan secara harmonis. Karakteristik sosial-budaya masyarakat Barito Kuala yang dipengaruhi oleh budaya Banjar dan Dayak telah membentuk pola interaksi sosial yang menjunjung tinggi toleransi dan gotong royong. Nilai-nilai ini perlu diperkuat sebagai modal sosial dalam pembangunan daerah.
- Penguatan nilai-nilai spiritual yang menjadi karakteristik dan identitas masyarakat Barito Kuala. Tradisi keagamaan seperti Maulid Nabi, Haul, dan berbagai ritual keagamaan lainnya telah menjadi bagian dari identitas kultural masyarakat Barito Kuala. Nilai-nilai spiritual ini juga tercermin dalam kearifan lokal dalam mengelola lahan pasang surut dan rawa melalui sistem "handil" yang mengatur pengairan sawah. Pelestarian dan penguatan nilai-nilai ini menjadi penting sebagai penyeimbang terhadap modernisasi dan pembangunan ekonomi.

3. Terpadu:

- Mewujudkan pembangunan yang terintegrasi dan saling mendukung antar sektor dan wilayah. Karakteristik geografis Barito Kuala yang terdiri dari kawasan hulu, tengah, dan hilir dengan perbedaan tantangan pembangunan yang signifikan memerlukan pendekatan pembangunan terpadu. Kawasan hulu yang berbatasan dengan Kabupaten Banjar memiliki potensi perkebunan, kawasan tengah dengan potensi pertanian padi, dan kawasan hilir yang berbatasan dengan laut memiliki potensi perikanan dan tambak. Pendekatan terpadu berarti mengintegrasikan seluruh potensi ini dalam satu kesatuan pembangunan yang saling mendukung.
- Menciptakan konektivitas yang menghubungkan seluruh wilayah Barito Kuala sehingga tidak ada daerah yang terisolasi. Tantangan utama Barito Kuala adalah karakteristik wilayahnya yang membelah oleh Sungai Barito dan banyaknya anak sungai yang menyulitkan aksesibilitas darat. Banyak desa yang masih sangat bergantung pada transportasi air. Pembangunan terpadu berarti mengembangkan sistem transportasi multimodal yang mengintegrasikan transportasi darat dan air, sehingga seluruh wilayah dapat terhubung secara efektif.
- Pembangunan yang sinergis antara aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Kondisi ekosistem Barito Kuala yang didominasi lahan basah memerlukan pendekatan pembangunan yang mempertimbangkan keseimbangan ekologi. Pembangunan infrastruktur dan ekonomi harus memperhatikan karakteristik lahan gambut dan rawa yang rentan, serta pola kehidupan masyarakat yang telah beradaptasi dengan kondisi ini selama berabad-abad. Sinergi ini juga berarti mengintegrasikan pengetahuan lokal dengan teknologi modern dalam pembangunan daerah.

4. Unggul:

- Mewujudkan Barito Kuala yang kompetitif dan memiliki keunggulan komparatif. Barito Kuala memiliki keunggulan komparatif dalam produksi padi pasang surut dan buah-buahan lokal seperti jeruk siam yang khas.

Letak geografisnya yang strategis berbatasan langsung dengan Kota Banjarmasin dan relatif dekat dengan rencana Ibu Kota Nusantara merupakan potensi besar untuk pengembangan kawasan penyangga dan pendukung logistik. Keunggulan ini perlu dikembangkan melalui peningkatan nilai tambah produk lokal dan pengembangan sentra-sentra ekonomi strategis yang menonjolkan karakteristik khas Barito Kuala.

- Pengembangan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi. Penduduk Barito Kuala yang didominasi oleh usia produktif memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi SDM unggul. Tantangan utamanya adalah tingkat pendidikan dan keterampilan yang masih perlu ditingkatkan. Keunggulan SDM Barito Kuala perlu dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik lokal, seperti keterampilan dalam budidaya pertanian pasang surut, pengolahan hasil pertanian, dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan rawa yang dapat diintegrasikan dengan pengetahuan modern.
- Peningkatan layanan publik yang berkualitas dan inovatif. Kondisi geografis Barito Kuala dengan banyaknya wilayah yang sulit dijangkau memerlukan inovasi dalam penyediaan layanan publik. Layanan kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan perlu dirancang dengan mempertimbangkan keterbatasan transportasi darat dan infrastruktur di beberapa kawasan. Inovasi seperti layanan terapung atau bergerak dan pemanfaatan teknologi digital menjadi kunci untuk mewujudkan layanan publik yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat di berbagai pelosok Barito Kuala.
- Pemantapan sistem dan kelembagaan yang efektif dan efisien. Karakteristik masyarakat Barito Kuala yang masih kuat memegang sistem nilai tradisional memerlukan pendekatan kelembagaan yang mengintegrasikan struktur formal pemerintahan dengan lembaga-lembaga informal dan kearifan lokal. Sistem pengelolaan "handil" (sistem irigasi tradisional) dan kelembagaan adat perlu diperkuat dan diintegrasikan dengan sistem pemerintahan formal untuk menciptakan tata kelola yang efektif, efisien, dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Frasa **"Menuju Indonesia Emas"** memiliki makna bahwa pembangunan Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian integral dari cita-cita besar Indonesia. Ini mengandung arti:

- Kontribusi nyata Kabupaten Barito Kuala dalam mewujudkan kejayaan Indonesia di masa depan. Dengan potensi sebagai lumbung pangan nasional dan kawasan penyangga pembangunan Ibu Kota Nusantara, Barito Kuala memiliki peran strategis dalam mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wilayah di Kalimantan. Karakteristik khas Barito Kuala sebagai daerah penghasil padi dengan teknologi budidaya pasang surut yang unik dapat menjadi model pengembangan lahan marginal di seluruh Indonesia, memberikan kontribusi nyata bagi inovasi pertanian nasional.
- Pembangunan daerah yang mempersiapkan Barito Kuala menjadi bagian strategis dalam peta pembangunan nasional. Letak geografis Barito Kuala yang berada pada jalur strategis transportasi sungai Barito dan dekat dengan rencana pengembangan wilayah Kalimantan, menempatkan Barito Kuala pada posisi penting dalam konektivitas regional. Pengembangan infrastruktur dan sistem logistik di Barito Kuala akan berdampak pada penguatan konektivitas nasional, terutama untuk kawasan Kalimantan.
- Optimisme bahwa kemajuan Barito Kuala akan turut mendorong kemajuan Indonesia secara keseluruhan. Pembangunan Barito Kuala yang berhasil dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dengan modernisasi, serta mampu mengelola ekosistem rawa secara berkelanjutan, dapat menjadi model pembangunan untuk kawasan-kawasan serupa di Indonesia. Keberhasilan ini akan memberikan sumbangsih terhadap pencapaian visi Indonesia sebagai negara maju yang tetap mempertahankan kearifan lokal dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, penggunaan kata **"SATU"** juga mengandung filosofi persatuan dan keutuhan. Ini mencerminkan:

- Kesatuan tekad dan langkah seluruh elemen masyarakat Barito Kuala dalam pembangunan. Masyarakat Barito Kuala yang terdiri dari berbagai

kelompok etnis (Banjar, Dayak, Jawa pendatang) telah hidup berdampingan dengan harmonis. Filosofi "SATU" menegaskan pentingnya persatuan dalam keberagaman ini sebagai modal sosial utama pembangunan. Karakteristik masyarakat Barito Kuala yang mengedepankan musyawarah dan gotong-royong merupakan perwujudan nilai kesatuan yang telah tertanam dalam kehidupan sosial sehari-hari.

- Integrasi berbagai potensi daerah menjadi satu kekuatan bersama. Kabupaten Barito Kuala memiliki keragaman potensi alam yang luar biasa, mulai dari lahan pertanian, perkebunan, perikanan, hingga potensi wisata berbasis rawa dan sungai. Filosofi "SATU" menggambarkan upaya mengintegrasikan seluruh potensi ini menjadi satu kesatuan pembangunan yang saling memperkuat. Pengembangan potensi pertanian tidak boleh mengorbankan kelestarian lingkungan, demikian pula pembangunan infrastruktur harus mendukung pengembangan potensi ekonomi lokal.
- Harmonisasi pembangunan yang mencakup aspek material (ekonomi, infrastruktur) dan immaterial (spiritual, sosial-budaya). Masyarakat Barito Kuala memiliki kekayaan nilai-nilai spiritual dan kultural yang telah menjadi panduan hidup selama berabad-abad. Filosofi "SATU" menegaskan bahwa pembangunan fisik dan ekonomi harus selaras dengan penguatan nilai-nilai spiritual dan kultural. Kemajuan teknologi dan modernisasi harus dapat diintegrasikan dengan kearifan lokal, sehingga tercipta pembangunan yang utuh dan berkelanjutan.

Visi Terwujudnya "**Barito Kuala SATU**" menuju Indonesia Emas, merupakan landasan konseptual yang komprehensif dan fundamental, yang dijadikan panduan dalam perumusan misi, strategi, dan program pembangunan daerah. Setiap komponen SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) memiliki spektrum luas yang dapat dijabarkan ke dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari ekonomi, sosial, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan publik, dengan tetap menekankan nilai-nilai religius dan kearifan lokal sebagai fondasi.

3.1.2 Misi

Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Sebagai penjabaran operasional dari visi "Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas", misi Kabupaten Barito Kuala 2025-2029 disusun dengan mempertimbangkan potensi dan permasalahan daerah, serta memperhatikan kondisi aktual dan tantangan yang dihadapi.

Misi berfungsi sebagai penghubung antara visi yang bersifat ideal dengan program-program pembangunan yang lebih konkret. Melalui rumusan misi yang jelas, seluruh pemangku kepentingan dapat memahami arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Kuala dalam lima tahun ke depan. Perumusan misi juga mempertimbangkan asas kesinambungan pembangunan dengan tetap membuka ruang untuk inovasi dan terobosan baru sesuai dinamika kebutuhan masyarakat.

Berikut adalah misi Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 yang ditetapkan untuk mewujudkan visi daerah:

1. Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur.
2. Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis Inovasi melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri.
3. Mengembangkan Konektivitas Wilayah melalui Infrastruktur Berkelanjutan dan ketahanan Pangan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara.
4. Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital.
5. Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana.

3.1.1.1. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan Asta Cita

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 menunjukkan keselarasan yang komprehensif dengan delapan agenda prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Keselarasan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah dapat berkontribusi pada pencapaian visi pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Gambar III.1
Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan Asta Cita



Sumber: Bappelitbang Barito Kuala (Diolah)

Misi pertama RPJMD Barito Kuala yang berfokus pada memperkokoh sumber daya manusia yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur memiliki keterkaitan yang erat dengan Asta Cita ke-1 tentang memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia, serta Asta Cita ke-4 mengenai memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, dan kesetaraan gender. Penekanan pada aspek religius dan berkarakter dalam pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan upaya memperkokoh nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa, sekaligus membangun fondasi SDM yang berkualitas melalui pendidikan dan kesehatan yang komprehensif. Pengembangan karakter dan budaya luhur menjadi landasan penting dalam menciptakan masyarakat yang beriman, bertakwa, dan memiliki integritas tinggi sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Misi kedua RPJMD mengenai mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri menunjukkan keselarasan signifikan dengan Asta Cita ke-2 tentang memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru, Asta Cita ke-3 tentang meningkatkan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur, serta Asta Cita ke-6 mengenai pembangunan dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan manusia.

Misi ketiga RPJMD tentang mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara menunjukkan keselarasan dengan Asta Cita ke-3 tentang meningkatkan lapangan kerja berkualitas, kewirausahaan, industri kreatif, dan infrastruktur, serta Asta Cita ke-6 mengenai membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Penekanan pada infrastruktur berkelanjutan mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya membangun sistem konektivitas yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan. Peran strategis Barito Kuala sebagai pendukung Ibu Kota Nusantara memberikan peluang besar untuk mengembangkan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan, sekaligus berkontribusi pada upaya pemerataan pembangunan melalui pendekatan membangun dari desa dan dari bawah.

Misi keempat RPJMD yang berfokus pada membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital memiliki keterkaitan dengan Asta Cita ke-5 tentang menjadikan birokrasi yang profesional dan berorientasi kepada pelayanan dan melindungi, serta Asta Cita ke-7 mengenai memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta pencegahan korupsi dan narkoba. Modernisasi pelayanan publik melalui sistem digital berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi dan pencegahan korupsi. Fokus pada pendidikan unggul dan kesehatan komprehensif juga mendukung upaya membangun SDM berkualitas yang menjadi modal utama pembangunan berkelanjutan. Integrasi teknologi dalam tata kelola pemerintahan mencerminkan

komitmen untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Misi kelima RPJMD mengenai mengembangkan ketangguhan wilayah dalam mitigasi bencana menunjukkan keselarasan yang kuat dengan Asta Cita ke-6 tentang membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Fokus pada ketangguhan wilayah dan mitigasi bencana mencerminkan kesadaran terhadap tantangan perubahan iklim dan komitmen untuk membangun resiliensi daerah yang berkelanjutan. Pendekatan pemberdayaan masyarakat perdesaan yang inklusif sejalan dengan semangat membangun dari bawah dalam memperkuat ekonomi rakyat dan mengurangi kesenjangan. Pengembangan ketangguhan wilayah juga berkaitan erat dengan upaya memantapkan sistem pertahanan dan keamanan dalam menghadapi berbagai ancaman non-militer seperti bencana alam dan perubahan iklim. Upaya ini juga berkontribusi pada penciptaan kehidupan yang harmonis melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penguatan modal sosial di tingkat komunitas.

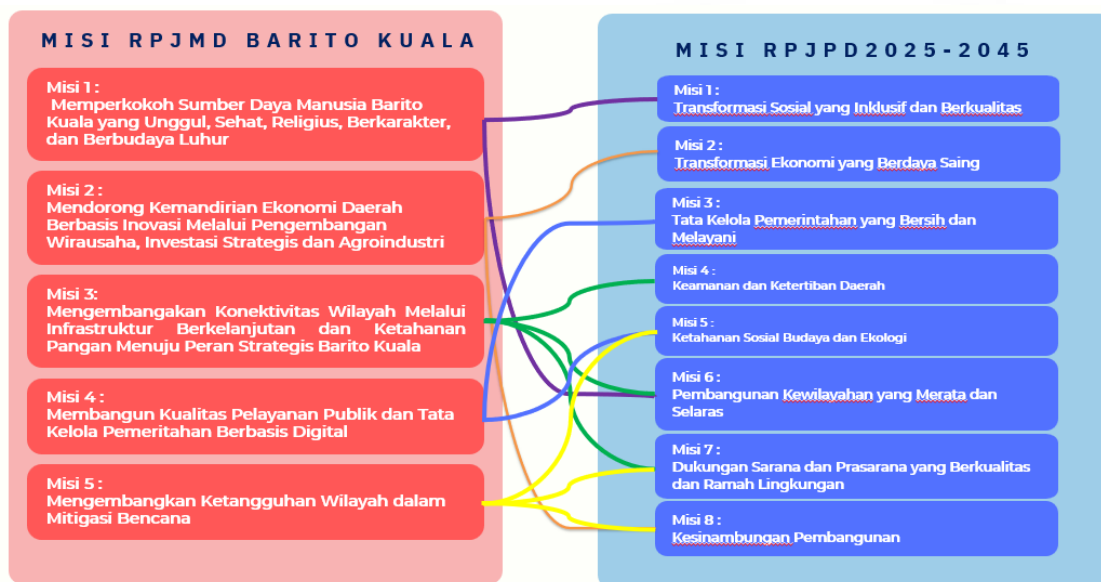
Keselarasan antara misi-misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala dengan Asta Cita ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang holistik dan terintegrasi dengan agenda nasional. Pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan kebutuhan spesifik wilayah tetapi juga mengintegrasikan perspektif nasional dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan Kabupaten Barito Kuala untuk berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan nasional sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan lokal berjalan selaras dengan visi Indonesia yang maju, adil, dan sejahtera. Implementasi RPJMD yang selaras dengan Asta Cita juga berpotensi membuka akses terhadap dukungan dan sinergi program nasional, memperkuat posisi daerah dalam kancah pembangunan nasional, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat mencapai visi pembangunannya sambil berkontribusi pada agenda nasional yang lebih luas, khususnya dalam konteks pengembangan Ibu Kota Nusantara dan pencapaian Indonesia yang berkelanjutan dan berkeadilan.

3.1.1.2. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan RPJPD Kab. Barito Kuala 2025-2045

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala menunjukkan adanya keselarasan yang kuat antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Keterkaitan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam memastikan bahwa program jangka menengah merupakan bagian integral dari visi pembangunan jangka panjang.

Misi pertama RPJMD tentang memperkuat sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur memiliki keterkaitan yang erat dengan misi 1 RPJPD tentang transformasi sosial yang inklusif dan berkualitas serta misi 6 mengenai pembangunan kewilayahan yang merata dan selaras. Hubungan ini menunjukkan bahwa penguatan SDM yang unggul, sehat, dengan nilai-nilai religius dan budaya merupakan langkah awal dalam menciptakan transformasi sosial yang inklusif dan pembangunan di Barito Kuala yang merata dan berkelanjutan.

Gambar III.2
Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan
RPJPD Kab. Barito Kuala 2025-2045



Sumber: Bappelitbang Barito Kuala (Diolah)

Misi kedua RPJMD yang mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri secara langsung mendukung pencapaian misi 2 RPJPD tentang transformasi ekonomi yang

berdaya saing. Keselarasan ini menggambarkan strategi pembangunan ekonomi yang konsisten, dimana upaya jangka menengah untuk mengembangkan kemandirian ekonomi lokal menjadi landasan bagi transformasi ekonomi yang lebih luas dan berdaya saing dalam jangka panjang.

Misi ketiga RPJMD mengenai mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara memiliki keterkaitan dengan misi 4 RPJPD tentang keamanan dan ketertiban daerah, 6 RPJPD tentang pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, serta misi 7 mengenai dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan. Hal ini menandakan bahwa pembangunan infrastruktur dalam jangka menengah dirancang tidak hanya untuk mendukung Ibu Kota Nusantara, tetapi juga sebagai bagian dari strategi pemerataan pembangunan wilayah dan penyediaan prasarana yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Misi keempat RPJMD yang berfokus pada membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital berkorelasi kuat dengan misi 3 tentang transformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani, serta misi 5 tentang ketahanan sosial budaya dan ekologi. Hubungan ini menekankan peran tata kelola pemerintahan digital sebagai komponen penting dalam menciptakan transformasi sosial dan reformasi tata kelola dalam jangka panjang.

Misi kelima RPJMD mengenai mengembangkan ketangguhan wilayah dalam mitigasi bencana memiliki keterkaitan dengan misi 5, 7 dan 8 RPJPD tentang ketahanan sosial budaya dan ekologi, dan pembangunan kewilayahan yang merata serta berkesinambungan. Keselarasan ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan ketangguhan wilayah dalam jangka menengah merupakan elemen penting dalam membangun ketahanan dan pemerataan pembangunan wilayah dalam jangka panjang.

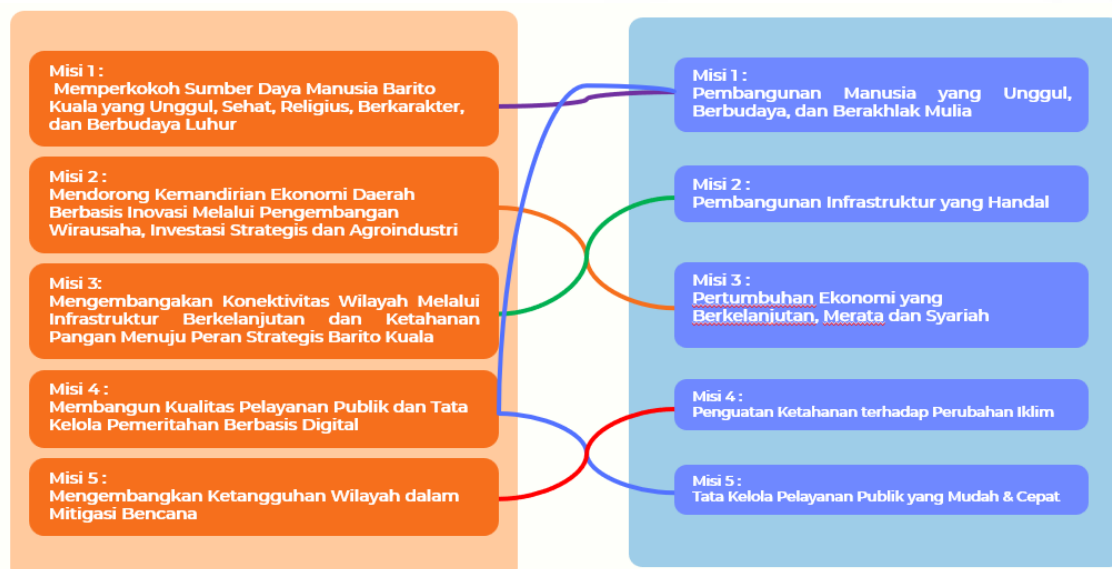
Sebagai pengikat seluruh keterkaitan tersebut, semua misi RPJMD secara kolektif mendukung misi 8 RPJPD tentang kesinambungan pembangunan. Hal ini menegaskan bahwa seluruh program pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala dirancang dengan memperhatikan keberlanjutan dan kesinambungan dalam perspektif jangka panjang. Keselarasan antara RPJMD dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala ini

mencerminkan pendekatan perencanaan yang komprehensif dan terintegrasi, di mana program pembangunan lima tahunan tidak hanya bertujuan untuk mencapai target jangka pendek, tetapi juga diposisikan sebagai tahapan strategis dalam mewujudkan visi pembangunan jangka panjang. Implementasi RPJMD 2025-2029 yang selaras dengan RPJPD 2025-2045 diharapkan dapat memastikan konsistensi arah pembangunan dan mempercepat pencapaian visi Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

3.1.1.3. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala menunjukkan keselarasan yang signifikan dengan arah pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan, tercermin dalam keterkaitan antara misi-misi RPJMD kedua wilayah administratif tersebut. Keterkaitan ini mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memastikan sinergi dan harmonisasi program pembangunan, sehingga dapat mendukung pencapaian visi kolektif di tingkat provinsi.

Gambar III.3
Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan



Sumber: Bappelitbang Barito Kuala (Diolah)

Misi pertama Kabupaten Barito Kuala yang berfokus pada memperkuat sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya

luhur memiliki keselarasan yang kuat dengan misi pertama Provinsi Kalimantan Selatan tentang pembangunan manusia yang unggul, berbudaya, dan berakhlak mulia. Kedua misi ini sama-sama menekankan pentingnya dimensi spiritual, karakter, dan nilai-nilai budaya dalam pembangunan sumber daya manusia, yang menjadi fondasi bagi kemajuan masyarakat dan daerah.

Misi kedua Kabupaten Barito Kuala mengenai mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri berkaitan erat dengan misi ketiga Provinsi Kalimantan Selatan yang memprioritaskan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, merata, dan syaria. Hubungan ini menunjukkan bahwa upaya penguatan ekonomi lokal Barito Kuala melalui wirausaha dan inovasi agroindustri merupakan bagian integral dari strategi ekonomi provinsi yang mengedepankan prinsip inklusif, berkelanjutan, dan ramah lingkungan.

Misi ketiga Kabupaten Barito Kuala tentang mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara selaras dengan misi kedua Provinsi Kalimantan Selatan mengenai pembangunan infrastruktur yang handal. Keduanya menekankan pentingnya penyediaan infrastruktur yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkuat konektivitas antar wilayah, dengan implikasi strategis pada posisi Kalimantan Selatan sebagai gerbang logistik nasional.

Misi keempat Kabupaten Barito Kuala yang memfokuskan pada membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital memiliki keterkaitan dengan dua misi Provinsi Kalimantan Selatan, yaitu misi pertama tentang pembangunan manusia unggul dan misi kelima mengenai tata kelola pelayanan publik yang mudah dan cepat. Hubungan ini mencerminkan komitmen bersama untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan layanan pendidikan, kesehatan, serta modernisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital.

Misi kelima Kabupaten Barito Kuala tentang mengembangkan ketangguhan wilayah dalam mitigasi bencana berkorelasi kuat dengan misi keempat Provinsi Kalimantan Selatan mengenai penguatan ketahanan terhadap perubahan iklim.

Keduanya memiliki perhatian pada aspek keberlanjutan lingkungan dan resiliensi daerah terhadap tantangan perubahan iklim dan bencana alam.

Keselarasan antara misi-misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan ini mencerminkan koordinasi dan sinergi yang baik dalam perencanaan pembangunan daerah. Kabupaten Barito Kuala tidak hanya memperhatikan kebutuhan dan potensi spesifik wilayahnya, tetapi juga menyelaraskan arah pembangunannya dengan prioritas pembangunan di tingkat provinsi. Hal ini memungkinkan terjadinya pembangunan yang lebih terintegrasi dan terpadu, dengan distribusi peran dan tanggung jawab yang jelas antara pemerintah kabupaten dan provinsi. Implementasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala yang selaras dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat mendorong terciptanya efisiensi dalam penggunaan sumber daya pembangunan, mengurangi duplikasi program, serta memaksimalkan dampak positif bagi masyarakat. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Barito Kuala juga akan berkontribusi pada pencapaian sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan secara keseluruhan, memperkuat posisi provinsi ini dalam konteks pembangunan nasional, terutama terkait dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan.

3.1.1.4. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

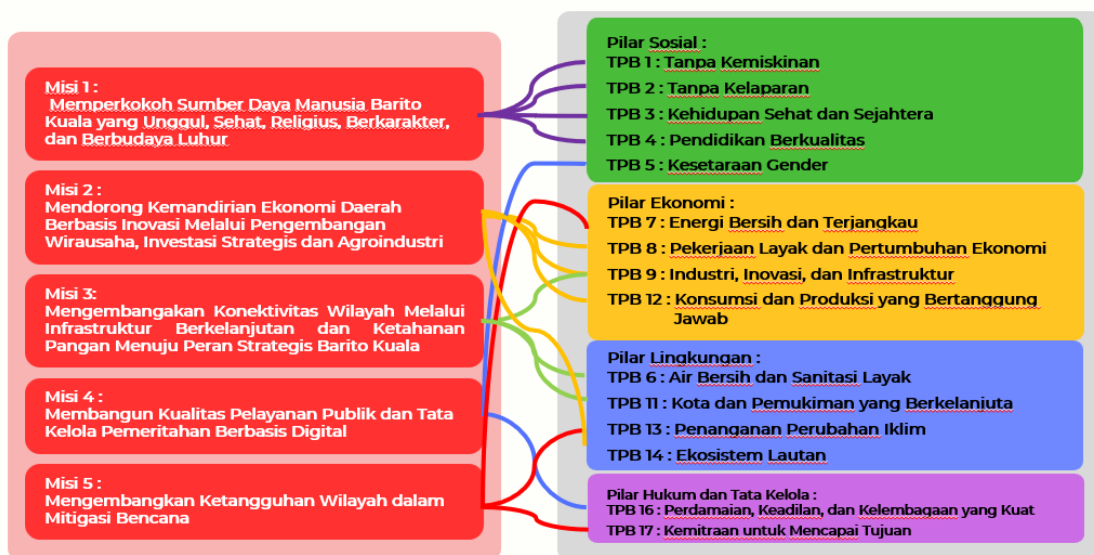
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 menunjukkan keselarasan yang komprehensif dengan agenda global Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Keselarasan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam perencanaan strategis lokal, sekaligus berkontribusi pada pencapaian target global.

Misi pertama RPJMD Barito Kuala yang berfokus pada memperkuat sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur memiliki keterkaitan erat dengan beberapa tujuan dalam pilar sosial TPB, khususnya TPB 1 (Tanpa Kemiskinan), TPB 2 (Tanpa Kelaparan), TPB 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera) dan TPB 4 (Pendidikan Berkualitas). Penekanan pada aspek unggul, sehat, religius dan berkarakter dalam pengembangan sumber daya manusia sejalan dengan

upaya membangun fondasi sosial yang kuat melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, yang pada gilirannya akan mendukung kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Misi kedua RPJMD mengenai mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri menunjukkan keselarasan signifikan dengan tujuan-tujuan dalam pilar ekonomi TPB, terutama TPB 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur), TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggungjawab) dan Pilar Lingkungan di TPB 14 (Ekosistem Kelautan). Fokus pada wirausaha dan agroindustri inovatif merupakan strategi konkret untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif. Pengembangan sektor ekonomi berbasis inovasi juga sejalan dengan semangat TPB 9 dalam membangun infrastruktur yang tangguh dan mempromosikan industrialisasi berkelanjutan. Selain itu, pendekatan agroindustri yang ditekankan dalam misi ini berpotensi mendukung TPB 12 (Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab) dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam aktivitas produksi dan pengolahan hasil pertanian serta TPB 14 terkait keberlanjutan aktivitas produksi perikanan tangkap.

Gambar III.4
Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala dengan
Tujuan Pembangunan Berkelanjutan



Sumber: Bappelitbang Barito Kuala (Diolah)

Misi ketiga RPJMD tentang mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara menunjukkan keselarasan dengan TPB 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak), TPB 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) serta TPB 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Penekanan pada infrastruktur berkelanjutan mencerminkan kesadaran terhadap pentingnya membangun sistem konektivitas yang tidak hanya mendukung aktivitas ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek lingkungan. Pendekatan ini berkontribusi pada pengembangan permukiman yang lebih inklusif, aman, dan berkelanjutan yang didukung dengan tersedianya air bersih dan sanitasi yang layak, sesuai dengan aspirasi TPB 6 dan 11.

Misi keempat RPJMD yang berfokus pada membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital memiliki keterkaitan dengan TPB 5 dalam pilar social (Kesetaraan Gender) serta TPB 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Kuat) dalam pilar hukum dan tata kelola. Modernisasi pelayanan publik melalui sistem digital berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pemerintahan, sejalan dengan semangat TPB 5 dan 16 dalam membangun kelembagaan yang efektif dan akuntabel serta setara.

Misi kelima RPJMD mengenai mengembangkan ketangguhan wilayah dalam mitigasi bencana menunjukkan keselarasan yang kuat dengan TPB 13 (Penanganan Perubahan Iklim) dalam pilar lingkungan, serta TPB 7 (Energi Bersih dan Terjangkau) dalam pilar ekonomi serta TPB 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) pada pilar Hukum dan Tata Kelola. Melalui aspek pemberdayaan masyarakat yang inklusif. Fokus pada ketangguhan wilayah dan mitigasi bencana mencerminkan kesadaran terhadap tantangan perubahan iklim dan komitmen untuk membangun resiliensi daerah. Pendekatan pemberdayaan masyarakat yang inklusif juga sejalan dengan semangat TPB 13 dalam pemberdayaan masyarakat yang sadar terhadap perubahan iklim.

Keselarasan antara misi-misi RPJMD Kabupaten Barito Kuala dengan agenda TPB/SDGs ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Pemerintah daerah tidak hanya memperhatikan kebutuhan spesifik wilayah, tetapi juga mengintegrasikan perspektif global dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan ini memungkinkan Kabupaten Barito Kuala untuk berkontribusi pada pencapaian target-target pembangunan berkelanjutan sekaligus memastikan bahwa proses pembangunan

lokal berjalan selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan. Implementasi RPJMD yang selaras dengan TPB/SDGs juga berpotensi membuka akses terhadap kerjasama dan dukungan internasional, memperkuat posisi daerah dalam kancah global, serta memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan membawa manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Melalui pendekatan ini, Kabupaten Barito Kuala diharapkan dapat mencapai visi pembangunannya sambil berkontribusi pada agenda berkelanjutan yang lebih luas.

3.1.1.5. Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal di Barito Kuala

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 menunjukkan keselarasan yang strategis dengan implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah Penerapan SPM Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029. Keselarasan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan bahwa program pembangunan jangka menengah dapat mendukung pencapaian standar minimal pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

Misi pertama RPJMD yang berfokus pada memperkuat sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur memiliki keterkaitan langsung dengan SPM bidang Pendidikan dan SPM bidang Kesehatan. Penekanan pada pengembangan SDM yang unggul dan sehat sejalan dengan strategi SPM pendidikan untuk meningkatkan kualitas satuan pendidikan, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, hingga pendidikan nonformal dan kesetaraan. SPM bidang Kesehatan untuk meningkatkan kualitas Kesehatan masyarakat. Upaya memperkuat karakter dan nilai-nilai budaya luhur dalam misi pertama RPJMD menjadi landasan fundamental bagi peningkatan kualitas pendidikan yang tidak hanya berfokus pada aspek akademis dan kesehatan tetapi juga pada pembentukan karakter peserta didik.

Misi ketiga RPJMD mengenai mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara memiliki keterkaitan erat dengan

SPM bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Pengembangan infrastruktur berkelanjutan dalam misi ini sejalan dengan strategi SPM pekerjaan umum untuk meningkatkan akses penduduk terhadap air minum dan pelayanan sanitasi yang layak. Fokus pada konektivitas wilayah juga mendukung implementasi SPM perumahan rakyat dalam menyediakan rumah layak huni bagi korban bencana atau relokasi akibat program pemerintah, karena infrastruktur yang baik menjadi prasyarat bagi pengembangan perumahan yang berkualitas. Pendekatan infrastruktur berkelanjutan dalam misi ini juga memastikan bahwa pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Misi keempat RPJMD tentang membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital menunjukkan keselarasan yang komprehensif dengan SPM bidang pendidikan dan kesehatan. Fokus pada pelayanan publik dalam misi ini secara langsung mendukung pencapaian SPM pendidikan dalam meningkatkan kualitas satuan pendidikan dan jumlah guru serta tenaga kependidikan. Sementara itu, aspek pelayanan publik juga selaras dengan SPM urusan kesehatan yang bertujuan meningkatkan pemenuhan upaya kesehatan perorangan (UKP) dan upaya kesehatan masyarakat (UKM), termasuk upaya menurunkan kasus kematian ibu dan bayi, meningkatkan kesehatan masyarakat, serta penanganan penyakit menular dan tidak menular. Modernisasi tata kelola pemerintahan berbasis digital juga mendukung efektivitas pelaksanaan seluruh SPM melalui sistem pelayanan yang lebih efisien dan transparan.

Gambar III.5
Keselarasan Misi RPJMD Kab. Barito Kuala terhadap Pelaksanaan SPM di Barito Kuala



Sumber: Bappelitbang Barito Kuala (Diolah)

Misi kelima RPJMD tentang mengembangkan ketangguhan wilayah dalam mitigasi bencana menunjukkan keselarasan yang kuat dengan SPM bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, serta SPM pelayanan dasar urusan sosial. Fokus pada mitigasi bencana dalam misi ini secara langsung mendukung pencapaian SPM kebencanaan yang meliputi peningkatan pelayanan informasi rawan bencana, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Aspek ketangguhan wilayah dalam misi ini juga selaras dengan SPM bidang sosial yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial bagi berbagai kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, anak terlantar, lanjut usia, dan korban bencana. Pendekatan ketangguhan wilayah menjadi strategi penting dalam memastikan bahwa layanan sosial dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Keselarasan antara misi-misi RPJMD dengan SPM ini menunjukkan pendekatan pembangunan yang terintegrasi dan berfokus pada pemenuhan hak dasar masyarakat. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tidak hanya merumuskan visi dan misi pembangunan yang ambisius, tetapi juga memastikan bahwa implementasinya dapat memberikan manfaat konkret melalui pencapaian standar minimal pelayanan publik. Pendekatan ini memungkinkan terjadinya sinergi antara program pembangunan strategis dengan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat, sehingga pembangunan yang

dilaksanakan dapat memberikan dampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui keselarasan ini, implementasi RPJMD Kabupaten Barito Kuala diharapkan tidak hanya mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga Barito Kuala dapat mengakses pelayanan publik yang berkualitas sesuai dengan standar minimal yang telah ditetapkan pemerintah pusat, sekaligus berkontribusi pada pencapaian visi daerah untuk menjadi kabupaten yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

3.1.3 Tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

3.1.3.1 Tujuan RPJMD Tahun 2025-2029

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan-tujuan ini disusun dengan mempertimbangkan potensi, permasalahan, serta karakteristik khas Kabupaten Barito Kuala, sehingga benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Setiap tujuan memiliki indikator kinerja yang terukur dan target capaian yang jelas, sehingga memudahkan proses evaluasi dan penilaian keberhasilan. Pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak hanya diarahkan pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pada aspek sosial, budaya, lingkungan, dan tata kelola pemerintahan. Pendekatan holistik ini memastikan bahwa pembangunan yang dilaksanakan bersifat inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Tujuan-tujuan pembangunan ini juga diselaraskan dengan arah pembangunan nasional dan regional, terutama dalam konteks dukungan terhadap Ibu Kota Nusantara. Posisi strategis Kabupaten Barito Kuala memberikan peluang besar untuk berperan aktif dalam konstelasi pembangunan nasional. Selain itu, tujuan-tujuan ini juga memperhatikan isu-isu strategis kontemporer seperti revolusi digital, perubahan iklim, dan ketahanan pangan. Dengan demikian, pembangunan Kabupaten Barito Kuala tidak hanya berorientasi pada masa kini, tetapi juga mempersiapkan daerah menghadapi tantangan masa depan. Berikut adalah tujuan-tujuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029:

1. Tujuan pembangunan pertama Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 adalah terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, sehat, religius,

berkarakter, dan berbudaya luhur yang kokoh. Tujuan ini merupakan pengejawantahan dari Misi 1 untuk memperkuat SDM Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur. Keberhasilan pencapaian tujuan ini akan diukur melalui dua indikator utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target meningkat dari 72 pada tahun 2025 menjadi 75,5 pada tahun 2030, dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) yang ditargetkan meningkat dari 74,26 pada tahun 2025 menjadi 76,77 pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan fokus pada empat sasaran strategis: meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan target peningkatan Usia Harapan Hidup dari 74,4 tahun menjadi 76,15 tahun; meratanya kualitas pendidikan yang diukur melalui Indeks Pendidikan dengan target dari 62,40 menjadi 66,40; menguatnya nilai keagamaan dan karakter masyarakat yang tercermin dalam Indeks Harmoni Indonesia; serta meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat melalui Indeks Kesejahteraan Sosial yang ditargetkan meningkat dari 72,50 menjadi 78,75 dan penurunan tingkat kemiskinan dari 4% menjadi 3,37%.

2. Tujuan kedua pembangunan Kabupaten Barito Kuala adalah terwujudnya sektor ekonomi yang berdaya saing dan inovatif, yang merupakan manifestasi dari Misi 2 untuk mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi melalui pengembangan wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri. Keberhasilan tujuan ini akan diukur melalui dua indikator utama yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) yang ditargetkan meningkat dari 5,1% pada tahun 2025 menjadi 5,5% pada tahun 2030, dan Indeks Daya Saing yang meningkat dari 3,54 menjadi 3,8. Terdapat empat sasaran strategis utama yang akan mendukung pencapaian tujuan ini. Pertama, meningkatnya produktivitas PDRB sektor unggulan yang diukur dengan rasio PDRB sektor unggulan terhadap total PDRB dengan target dari 41,50% menjadi 45,25%. Kedua, meningkatnya kewirausahaan, investasi daerah dan agroindustri yang inovatif yang diukur dengan PDRB Per Kapita yang ditargetkan meningkat dari 35,5 juta rupiah menjadi 43 juta rupiah. Ketiga, meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan ekonomi dengan target Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dari 73,5% menjadi 74%. Keempat,

meningkatnya inovasi daerah yang diukur dengan Indeks Inovasi Daerah dari 40 menjadi 46.

3. Tujuan ketiga pembangunan Kabupaten Barito Kuala adalah meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN), yang sejalan dengan Misi 3 untuk mengembangkan konektivitas wilayah melalui infrastruktur berkelanjutan dan ketahanan pangan menuju peran strategis Barito Kuala sebagai kabupaten pendukung Ibu Kota Nusantara. Indikator utama pencapaian tujuan ini adalah Indeks Infrastruktur yang ditargetkan meningkat dari 69,50 pada tahun 2025 menjadi 77,00 pada tahun 2030. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan satu sasaran strategis yaitu meningkatnya kualitas infrastruktur yang diukur dengan Pilar Infrastruktur dengan target dari 70 menjadi 80. Sasaran ini didukung oleh dua outcome yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur konektivitas dengan indikator persentase jalan dalam kondisi baik yang ditargetkan meningkat dari 45,71% menjadi 58,2%, dan meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar dengan fokus pada persentase wilayah dengan akses air bersih, listrik, dan internet.
4. Tujuan keempat pembangunan Kabupaten Barito Kuala adalah memperkuat ketahanan pangan dalam mendukung Ibu Kota Nusantara, yang juga merupakan bagian dari Misi 3. Indikator utama keberhasilan tujuan ini adalah Indeks Ketahanan Pangan yang ditargetkan meningkat dari 84,6 pada tahun 2025 menjadi 93 pada tahun 2030. Untuk mencapai tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan dua sasaran strategis. Pertama, tercukupinya kebutuhan pangan yang diukur dengan prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan dengan target penurunan dari 4,2% menjadi 3,2%. Kedua, terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat yang diukur dengan laju inflasi yang dipertahankan stabil pada 1,98%.
5. Tujuan kelima pembangunan Kabupaten Barito Kuala adalah terwujudnya tata kelola pemerintah berorientasi layanan, yang merupakan implementasi dari Misi 4 untuk membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital. Indikator utama pencapaian tujuan ini adalah Indeks Reformasi Birokrasi yang ditargetkan meningkat dari 71,2 pada tahun 2025 menjadi 75 pada

tahun 2030. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan enam sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut. Pertama, meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah yang diukur dengan nilai SAKIP dengan target dari 72,00 menjadi 80,00. Kedua, optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik yang diukur dengan Indeks SPBE dari 2,64 menjadi 3. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah yang diukur dengan opini BPK yang dipertahankan WTP. Keempat, meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara yang diukur dengan Indeks Profesionalitas ASN dari 70 menjadi 82,5. Kelima, terwujudnya layanan publik prima yang diukur dengan Indeks Pelayanan Publik dari 4,35 menjadi 4,7. Keenam, terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel yang diukur dengan Indeks Persepsi Korupsi dari 76,36 menjadi 81,25.

6. Tujuan keenam pembangunan Kabupaten Barito Kuala adalah meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah terhadap bencana, yang merupakan pengejawantahan dari Misi 5 untuk mengembangkan ketangguhan wilayah dan mitigasi bencana. Pencapaian tujuan ini diukur melalui dua indikator utama yaitu Indeks Risiko Bencana yang ditargetkan menurun dari 129 pada tahun 2025 menjadi 110,25 pada tahun 2030, dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang meningkat dari 66,36 menjadi 67,42. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pemerintah Kabupaten Barito Kuala menetapkan dua sasaran strategis. Pertama, meningkatnya penguatan sistem mitigasi bencana yang diukur dengan tingkat kesiapsiagaan bencana yang dipertahankan pada level 100. Kedua, terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup yang diukur dengan tingkat pencemaran lingkungan dengan target peningkatan pengelolaan dari 75,7 menjadi 85.

3.1.3.2 Sasaran RPJMD Tahun 2025-2029

Sasaran pembangunan merupakan target konkret yang harus dicapai dalam kurun waktu tertentu sebagai penjabaran dari tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sasaran-sasaran ini dirumuskan melalui proses cascading atau penurunan secara bertahap dari visi, misi, dan tujuan yang terkandung dalam RPJMD Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2029. Dari 6 (enam) tujuan yang telah dirumuskan, dilakukan identifikasi capaian-capaian spesifik yang perlu diwujudkan untuk memastikan tujuan-

tujuan tersebut terpenuhi. Sasaran-sasaran ini bersifat lebih operasional, spesifik, terukur, dan memiliki jangka waktu pencapaian yang jelas. Masing-masing sasaran memiliki indikator keberhasilan yang menjadi tolok ukur dalam evaluasi pencapaian sasaran.

Proses perumusan sasaran ini mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk kondisi eksisting daerah, potensi dan kendala yang dihadapi, serta ketersediaan sumber daya. Dengan demikian, sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 merupakan target yang realistis dan dapat dicapai melalui program-program prioritas yang terencana dengan baik. Berikut adalah sasaran-sasaran pembangunan Kabupaten Barito Kuala:

1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul dan sehat, peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi sasaran prioritas. Indikator utama sasaran ini adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang ditargetkan meningkat dari 74,4 tahun pada tahun 2025 menjadi 76,15 tahun pada tahun 2030. Sasaran ini didukung oleh tiga outcome strategis: meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan target penurunan Angka Kematian Ibu dan Bayi dari ≤ 10 menjadi ≤ 5 ; meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan dengan rasio daya tampung RS terhadap jumlah penduduk yang meningkat dari 0,59 menjadi 0,64; dan meningkatnya status gizi masyarakat dengan target penurunan prevalensi stunting dari 9,5% menjadi 4,5%.
2. Meratanya kualitas pendidikan. Pendidikan berkualitas adalah hak setiap anak Barito Kuala, terlepas dari kondisi ekonomi keluarga. Sasaran ini diukur melalui Indeks Pendidikan yang ditargetkan meningkat dari 62,40 pada tahun 2025 menjadi 66,40 pada tahun 2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah meningkatnya akses dan kualitas pendidikan, yang diukur melalui dua indikator: Rata-rata Lama Sekolah yang meningkat dari 8 tahun menjadi 9,16 tahun, dan Harapan Lama Sekolah yang meningkat dari 12,96 tahun menjadi 13,54 tahun. Ini adalah investasi jangka panjang untuk menciptakan SDM Barito Kuala yang unggul dan berdaya saing.

3. Menguatnya nilai keagamaan dan karakter masyarakat. Dalam kehidupan masyarakat Barito Kuala, lembaga keagamaan bukan sekadar tempat ibadah—mereka adalah jantung kehidupan sosial dan moral. Sasaran ini diukur melalui Indeks Harmoni Indonesia yang ditargetkan meningkat dari 85 pada tahun 2025 menjadi 92,5 pada tahun 2030. Dua outcome mendukung pencapaian sasaran ini: meningkatnya kelembagaan keagamaan dengan target persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan fasilitasi dari pemerintah meningkat dari 84% menjadi 100%; dan meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan dengan target persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan meningkat dari 75% menjadi 90%.
4. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan. Pemberdayaan masyarakat, terutama kelompok rentan, menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di Barito Kuala. Sasaran ini memiliki dua indikator utama: Indeks Kesejahteraan Sosial yang meningkat dari 72,50 menjadi 78,75, dan tingkat kemiskinan yang menurun dari 4% menjadi 3,37%. Tiga outcome strategis mendukung sasaran ini: meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan target persentase peningkatan nilai tambah produk lokal dari 55% menjadi 80%; meningkatnya kapasitas masyarakat desa dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa dari 70% menjadi 95%; dan menurunnya jumlah penduduk miskin dengan persentase keluarga miskin yang naik status kesejahteraan dari 55% menjadi 80%.
5. Meningkatnya produktivitas PDRB sektor unggulan. Untuk mewujudkan sektor ekonomi yang berdaya saing dan inovatif, peningkatan produktivitas sektor unggulan menjadi sasaran strategis. Sasaran ini diukur melalui rasio PDRB sektor unggulan terhadap total PDRB yang ditargetkan meningkat dari 41,50% pada tahun 2025 menjadi 45,25% pada tahun 2030. Dua outcome mendukung sasaran ini: meningkatnya produktivitas sektor pertanian dengan nilai tambah produk pertanian yang meningkat dari 356.624 menjadi 367.249; dan meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan tingkat ketersediaan pangan dari 96,8% menjadi 99%.
6. Meningkatnya kewirausahaan, investasi daerah dan agroindustri yang inovatif. Barito Kuala dengan letak strategisnya memiliki potensi besar untuk menarik

investasi, terutama di sektor agroindustri dan pendukung IKN. Sasaran ini diukur melalui PDRB Per Kapita yang ditargetkan meningkat dari 35,5 juta rupiah pada tahun 2025 menjadi 43 juta rupiah pada tahun 2030. Tiga outcome strategis mendukung sasaran ini: meningkatnya pengembangan kewirausahaan masyarakat dengan jumlah wirausahawan baru dari 42% menjadi 45%; meningkatnya kekuatan ekosistem UMKM dengan kontribusi UMKM terhadap PDRB dari 1,26% menjadi 2,9%; dan berkembangnya agroindustri berbasis komoditas unggulan dengan persentase produk pertanian yang diolah melalui agroindustri dari 15,28% menjadi 19,42%.

7. Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan ekonomi. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi merupakan kunci keberhasilan pembangunan yang inklusif. Sasaran ini diukur melalui Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang ditargetkan meningkat dari 73,5% pada tahun 2025 menjadi 74% pada tahun 2030. Dua outcome mendukung sasaran ini: meningkatnya kesempatan kerja dengan ketersediaan lowongan kerja dari 87,8% menjadi 95%; dan meningkatnya ekonomi masyarakat desa dengan pertumbuhan ekonomi desa dari 75% menjadi 90%.
8. Meningkatnya inovasi daerah. Inovasi menjadi kunci dalam meningkatkan daya saing daerah. Sasaran ini diukur melalui Indeks Inovasi Daerah yang ditargetkan meningkat dari 40 pada tahun 2025 menjadi 46 pada tahun 2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah berkembangnya sistem inovasi daerah dengan jumlah inovasi pelayanan publik yang meningkat dari 15 menjadi 30 inovasi.
9. Meningkatnya kualitas infrastruktur. Sebagai kabupaten pendukung IKN, Barito Kuala perlu mempersiapkan infrastruktur yang modern dan berkelanjutan. Sasaran ini diukur melalui Pilar Infrastruktur yang ditargetkan meningkat dari 70 pada tahun 2025 menjadi 80 pada tahun 2030. Dua outcome mendukung sasaran ini: meningkatnya pembangunan infrastruktur konektivitas dengan persentase jalan dalam kondisi baik dari 45,71% menjadi 58,2%; dan meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar dengan persentase wilayah yang memiliki akses air bersih dari 67,8% menjadi 70,8%, akses listrik dipertahankan 100%, dan akses internet dari 64,5% menjadi 67%.

10. Tercukupinya kebutuhan pangan. Ketahanan pangan merupakan aspek penting dalam mendukung IKN. Sasaran ini diukur melalui prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan yang ditargetkan menurun dari 4,2% pada tahun 2025 menjadi 3,2% pada tahun 2030. Tiga outcome mendukung sasaran ini: meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan dengan tingkat produksi pangan dari 356.624 menjadi 367.249; meningkatnya produktivitas lahan pangan dengan luas lahan pangan produktif dari 115.574 ha menjadi 117.080 ha; dan meningkatnya ketahanan pangan desa dengan prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan menurun dari 10% menjadi 5%.
11. Terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat. Stabilitas harga pangan menjadi faktor penting dalam ketahanan pangan. Sasaran ini diukur melalui laju inflasi yang dipertahankan stabil pada 1,98% sepanjang periode 2025-2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah terkendalinya harga dan pasokan pangan dengan stabilitas harga pangan yang meningkat dari 55% pada tahun 2025 menjadi 80% pada tahun 2030.
12. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah. Akuntabilitas menjadi prinsip penting dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran ini diukur melalui nilai SAKIP yang ditargetkan meningkat dari 72,00 pada tahun 2025 menjadi 80,00 pada tahun 2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan persentase capaian kinerja yang meningkat dari 85% menjadi 100%.
13. Optimalnya tata kelola pemerintah berbasis elektronik. Era digital membuka peluang untuk transformasi pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Sasaran ini diukur melalui Indeks SPBE yang ditargetkan meningkat dari 2,64 pada tahun 2025 menjadi 3 pada tahun 2030. Dua outcome mendukung sasaran ini: berkembangnya sistem layanan publik terpadu dengan jumlah layanan publik terintegrasi dari 11 menjadi 16; dan berkembangnya sistem informasi sektoral dengan jumlah sistem dari 11 menjadi 60.
14. Meningkatnya akuntabilitas keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel menjadi prasyarat bagi tata kelola pemerintahan yang baik. Sasaran ini diukur melalui opini BPK yang dipertahankan WTP sepanjang periode

2025-2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah yang meningkat dari 72,6 menjadi 85.

15. Meningkatnya profesionalitas Aparatur Sipil Negara. ASN yang profesional menjadi tulang punggung pemerintahan yang efektif. Sasaran ini diukur melalui Indeks Profesionalitas ASN yang ditargetkan meningkat dari 70 pada tahun 2025 menjadi 82,5 pada tahun 2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN dengan persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi dari 80% menjadi 92,5%.
16. Terwujudnya layanan publik prima. Di era yang semakin digital dan masyarakat yang makin kritis, pelayanan publik bukan sekadar tugas administratif pemerintah, tetapi barometer kepercayaan rakyat terhadap penyelenggara negara. Sasaran ini diukur melalui Indeks Pelayanan Publik yang ditargetkan meningkat dari 4,35 pada tahun 2025 menjadi 4,7 pada tahun 2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah meluasnya jangkauan pelayanan publik dengan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat dari 75 menjadi 90.
17. Terwujudnya tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel. Integritas menjadi nilai utama dalam pemerintahan yang bersih. Sasaran ini diukur melalui Indeks Persepsi Korupsi yang ditargetkan meningkat dari 76,36 pada tahun 2025 menjadi 81,25 pada tahun 2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah meningkatnya pengawasan dan reformasi birokrasi dengan Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP) yang meningkat dari 4,35 menjadi 4,7.
18. Meningkatnya penguatan sistem mitigasi bencana. Barito Kuala dengan karakteristik geografisnya yang didominasi rawa dan aliran sungai memiliki kerentanan tinggi terhadap bencana seperti banjir dan kebakaran lahan. Sasaran ini diukur melalui tingkat kesiapsiagaan bencana yang dipertahankan pada level 100 sepanjang periode 2025-2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah berkembangnya sistem penanggulangan bencana dengan jumlah desa/kelurahan tangguh bencana yang meningkat dari 0,4 menjadi 0,9.

19. Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi prasyarat bagi kehidupan yang sehat dan berkelanjutan. Sasaran ini diukur melalui tingkat pencemaran lingkungan dengan target peningkatan pengelolaan dari 75,7 pada tahun 2025 menjadi 85 pada tahun 2030. Outcome utama yang mendukung sasaran ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan Indeks Kualitas Air yang meningkat dari 65,16 menjadi 66,16 dan Indeks Kualitas Udara dari 71,48 menjadi 72,98.

Tujuan dan sasaran yang telah dihasilkan dari serangkaian metode *cascade*, dikaji lagi dengan berbagai ketersediaan sumber data, program kinerja dan kemampuan fiskal daerah untuk penetapan target setiap indikator tujuan dan sasaran yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel III-1
Misi, Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja RPJMD
Kabupaten Barito Kuala 2025-2030

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
M1: Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur	M1.1. Terwujudnya Sumber daya manusia yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur yang kokoh			Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	72; 74.26	72,7; 74.76	73,3; 75.26	74; 75.76	74,7; 76.27	75,5; 76.77
		M1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	74.4	74.75	75.1	75.45	75.8	76.15
			M1.1.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu dan Bayi	≤10; ≤10	≤9; ≤9	≤8; ≤8	≤7; ≤7	≤6; ≤6	≤5; ≤5
			M1.1.1.2 Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0.59	0.6	0.61	0.62	0.63	0.64
			M1.1.1.3 Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi stunting	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5	4.5
		M1.1.2 Meratanya kualitas pendidikan		Indeks Pendidikan	62,40	63,20	64,00	64,80	65,60	66,40
			M1.1.2.1 Meningkatnya akses dan	Rata-rata Lama Sekolah dan	8; 12.96	8.13; 13.07	8.39; 13.19	8.65; 13.31	8.9; 13.42	9.16; 13.54

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
			kualitas pendidikan	Harapan Lama Sekolah						
		M1.1.3 Menguatnya nilai keagamaan dan karakter masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia	85	86.5	88	89.5	91	92.5
			M1.1.3.1 Meningkatnya kelembagaan keagamaan	Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan fasilitasi kegiatan dari pemerintah daerah	84	86	92	96	100	100
			M1.1.3.2 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan (bakti sosial, santunan, dll)	75	80	82.5	85	87.5	90
		M1.1.4 Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial Masyarakat serta menurunnya Tingkat kemiskinan		Indeks Kesejahteraan Sosial; Tingkat kemiskinan	72,50; 4	73,75; 3.88	75,00; 3.75	76,25; 3.63	77,50; 3.5	78,75; 3.37
			M1.1.4.1 Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan nilai tambah produk lokal hasil pemberdayaan masyarakat	55	60	65	70	75	80
			M1.1.4.2 Meningkatnya kapasitas masyarakat desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	70	75	80	85	90	95
			M1.1.4.3 Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase keluarga miskin yang naik status kesejahteraan	55	60	65	70	75	80
M2: Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis Inovasi melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri	M2.1. Terwujudnya sektor ekonomi yang berdaya saing dan Inovatif			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Daya Saing	5,1; 3.54	5,2; 3.59	5,28; 3.64	5,35; 3.7	5,43; 3.75	5,5; 3.8
		M2.1.1 Meningkatnya produktivitas PDRB sektor unggulan		Rasio PDRB sektor unggulan terhadap total PDRB	41,50	42,25	43,00	43,75	44,50	45,25

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
			M2.1.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Nilai tambah produk pertanian	356624	358615	360674	362801	364997	367249
			M2.1.1.2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	96.8	97	97.5	98	98.5	99
		M2.1.2 Meningkatnya kewirausahaan , Investasi daerah dan Agro Industri yang inovatif		PDRB Per Kapita	35.5	37	38.5	40	41.5	43
			M2.1.2.1 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan masyarakat	Jumlah wirausahawan baru	42	42.5	43	43.5	44	45
			M2.1.2.2 Meningkatnya kekuatan ekosistem UMKM	Kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah	1.26	1.59	1.92	2.24	2.57	2.9
			M2.1.2.3 Berkembangny a agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah	Persentase produk pertanian yang diolah melalui agroindustri	15.28	16.11	16.94	17.76	18.59	19.42
		M2.1.3 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dalam Pembangunan Ekonomi		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74
			M2.1.3.1 Meningkatnya kesempatan kerja	Ketersediaan Lowongan Kerja	87.8	89	90.5	92	93.5	95
			M2.1.3.2 Meningkatnya ekonomi masyarakat desa	Pertumbuhan ekonomi desa	75	80	82.5	85	87.5	90
		M2.1.4 Meningkatnya Inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah	40	41	42	42	44	46
			M2.1.4.1 Berkembangny a sistem inovasi daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	15	18	21	24	27	30
M3: Mengembangk an Konektivitas Wilayah melalui Infrastruktur Berkelanjutan dan ketahanan Pangan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten	M3.1. Meningkatka n konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung IKN			Indeks Infrastruktur	69,50	71,00	72,50	74,00	75,50	77,00

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
Pendukung Ibu Kota Nusantara										
		M3.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur		Pilar Infrastruktur	70	72	74	76	78	80
			M3.1.1.1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur konektivitas	Persentase jalan dalam kondisi baik	45.71	48.2	50.7	53.2	55.7	58.2
			M3.1.1.2 Meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar	Persentase wilayah dengan akses air bersih, listrik, dan internet	67.8; 100; 64.5	68.4; 100; 65	69; 100; 65.5	69.6; 100; 66	70.2; 100; 66.5	70.8; 100; 67
	M3.2. Memperkuat ketahanan pangan dalam mendukung IKN			Indeks Ketahanan Pangan	84.6	86.35	88.1	89.85	91.6	93
		M3.2.1 Tercukupinya Kebutuhan Pangan		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	4.2	4	3.8	3.6	3.4	3.2
			M3.2.1.1 Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan	Tingkat produksi pangan	356624	358615	360674	362801	364997	367249
			M3.2.1.2 Meningkatnya produktivitas lahan pangan	Luas lahan pangan produktif	115.574	115.875	116.176	116.477	116.778	117.080
			M3.2.1.3 Meningkatnya ketahanan pangan desa	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan	10	9	8	7	6	5
		M3.2.2 Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat		Laju Inflasi	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98	1.98
			M3.2.2.1 Terkendalinya harga dan pasokan pangan	Stabilitas harga pangan	55	60	65	70	75	80
M4: Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital	M4.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan			Indeks Reformasi Birokrasi	71.2	71.5	72.2	73.4	74.1	75
		M4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai SAKIP	72.00	73.50	75.00	76.50	78.00	80.00
			M4.1.1.1 Meningkatnya	Persentase capaian kinerja	85	90	92.5	95	97.5	100

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
			akuntabilitas kinerja							
		M4.1.2 Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik		Indeks SPBE Indeks PEMDI	2.64 N/A	3.7 N/A	N/A 1,5	N/A 1,7	N/A 1,8	N/A 2,1
			M4.1.2.1 Berkembangnya sistem layanan publik terpadu	Jumlah layanan publik terintegrasi	11	12	13	14	15	16
			M4.1.2.2 Berkembangnya sistem informasi sektoral	Jumlah sistem informasi sektoral	11	20	30	40	50	60
		M4.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
			M4.1.3.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	72.6	75	77.5	80	82.5	85
		M4.1.4 Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas ASN	70	72.5	75	77.5	80	82.5
			M4.1.4.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	80	82.5	85	87.5	90	92.5
		M4.1.5 Terwujudnya Layanan Publik Prima		Indeks Pelayanan Publik	4.35	4.42	4.49	4.56	4.63	4.7
			M4.1.5.1 Meluasnya jangkauan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	75	80	82.5	85	87.5	90
		M4.1.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel		Indeks Persepsi Korupsi	76.36	77.34	78.31	79.29	80.27	81.25
			M4.1.6.1 Meningkatnya pengawasan dan reformasi birokrasi	Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)	4.35	4.42	4.49	4.56	4.63	4.7
M5: Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dan Mitigasi Bencana	M5.1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah terhadap bencana			Indeks Risiko Bencana; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	129; 66.36	125.25; 66.57	121.5; 66.79	117.75; 67	114; 67.21	110.25; 67.42

MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	TARGET 2025	TARGET 2026	TARGET 2027	TARGET 2028	TARGET 2029	TARGET 2030
		M5.1.1 Meningkatnya Penguatan sistem mitigasi bencana		Tingkat kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100	100	100
			M5.1.1.1 Berkembangnya sistem penanggulangan bencana	Jumlah desa/kelurahan tanggub bencana	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
		M5.1.2 Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup		Tingkat Pencemaran Lingkungan	75.7	77	79	81	83	85
			M5.1.2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	65.16; 71.48	65.36; 71.78	65.56; 72.08	65.76; 72.39	65.96; 72.68	66.16; 72.98

Sumber: Bapelitangda Barito Kuala (Diolah)

3.2 Arah Kebijakan, Strategi dan Program Prioritas Pembangunan Daerah

3.2.1 Arah Kebijakan dan Strategi daerah

Arah kebijakan Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 dirumuskan sebagai tindak lanjut dari visi "Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas" dan merupakan turunan dari perwujudan arah kebijakan periode pertama pada RPJPD Kabupaten barito Kuala Tahun 2025-2045 yaitu penguatan pondasi transformasi, yang merupakan hasil penyelarasan terhadap Tema Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan. Penyusunan arah kebijakan ini memperhatikan berbagai faktor untuk mendukung penguatan trasnformasi, seperti penguatan terhadap kondisi eksisting daerah, memperhatikan permasalahan utama, serta tantangan yang dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Arah kebijakan Kabupaten Barito Kuala periode 2025-2029 dirumuskan sebagai tindak lanjut dari visi "Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas" dan merupakan turunan dari perwujudan arah kebijakan periode pertama pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2045 yaitu penguatan pondasi transformasi. Penyusunan arah kebijakan ini memperhatikan berbagai faktor untuk mendukung penguatan transformasi, seperti penguatan terhadap

kondisi eksisting daerah, memperhatikan permasalahan utama, serta tantangan yang dihadapi dalam lima tahun ke depan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan yang tepat perlu diterapkan dalam setiap bidang pembangunan. Strategi ini menjadi panduan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan yang lebih spesifik, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya.

Tabel III-2
Arah Kebijakan dan Strategi Daerah Kab. Barito Kuala Tahun 2025-2029

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1.	M1: Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur		
1.1		Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang merata dan berkualitas dengan target pencapaian Usia Harapan Hidup 75 tahun	Mengembangkan sistem pelayanan kesehatan terpadu berbasis komunitas dengan memprioritaskan layanan mobile untuk menjangkau daerah terpencil dan intervensi pencegahan stunting
1.2		Pemerataan akses dan kualitas pendidikan dengan target peningkatan Indeks Pendidikan melalui program beasiswa dan penguatan sarana pembelajaran	Mentransformasi sistem pendidikan menjadi lebih inklusif dan berkualitas melalui bantuan pendidikan terintegrasi dan standardisasi fasilitas pendidikan
1.3		Penguatan nilai keagamaan dan karakter masyarakat	Memperkuat peran lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		melalui pemberdayaan lembaga keagamaan dan pengembangan kampung religius	karakter dengan memberikan insentif dan dukungan program keagamaan berbasis masyarakat
1.4		Peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera dengan target peningkatan nilai tambah produk lokal	Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan keluarga prasejahtera dengan pendekatan keterampilan dan akses permodalan
2.	M2: Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis Inovasi melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri		
2.1		Peningkatan produktivitas PDRB sektor unggulan melalui modernisasi pertanian, penguatan ketahanan pangan, dan pembangunan infrastruktur konektivitas	Mengoptimalkan nilai ekonomi sektor pertanian melalui intensifikasi pertanian modern, stabilisasi pasokan pangan, dan peningkatan akses pasar
2.2		Pengembangan kewirausahaan dan investasi daerah melalui penguatan ekosistem UMKM, peningkatan kualitas tenaga kerja, dan	Menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui pengembangan wirausaha lokal, pelatihan vokasi industri, dan pembangunan kawasan ekonomi khusus

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
		pengembangan kawasan industri strategis	
2.3		Pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui sentra agroindustri terpadu	Membangun rantai nilai agroindustri yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan teknologi modern dan standar kualitas internasional
3.	M3: Mengembangkan Konektivitas Wilayah melalui Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara		
3.1		Peningkatan kualitas infrastruktur kota melalui rehabilitasi infrastruktur vital dan pembangunan jalan strategis untuk mendukung peran sebagai pendukung IKN	Membangun infrastruktur konektivitas strategis yang menghubungkan Barito Kuala dengan IKN dan pusat ekonomi regional melalui pendekatan pembangunan berkelanjutan
3.2		Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan melalui program jalan beton dan desa terintegrasi dengan target 60% desa mandiri pada tahun 2030	Memperkuat konektivitas desa-kota melalui pembangunan infrastruktur yang tahan terhadap kondisi geografis lahan basah dan rawa

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
3.3		Penguatan ketahanan pangan dalam mendukung IKN melalui peningkatan produksi pertanian berkelanjutan dan optimalisasi lahan pertanian	Mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan teknologi ramah lingkungan
3.4		Pengembangan pemberdayaan masyarakat dan ketahanan pangan desa melalui program tanah bengkok, ATM beras, dan BUMDes mandiri	Memperkuat ekonomi dan ketahanan pangan desa melalui pengelolaan aset kolektif dan inovasi distribusi pangan berbasis teknologi
4.	M4: Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital		
4.1		Pengembangan sistem inovasi pelayanan publik melalui riset dan inovasi untuk meningkatkan efektivitas pelayanan dengan target 30 inovasi pada tahun 2030	Membangun budaya inovasi dalam birokrasi melalui kompetisi inovasi dan implementasi teknologi dalam pelayanan publik
4.2		Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah melalui integrasi perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dengan target nilai SAKIP 80	Mengembangkan sistem manajemen kinerja terintegrasi berbasis hasil dengan penerapan reward and punishment yang konsisten

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
4.3		Optimalisasi tata kelola pemerintah berbasis elektronik melalui sistem layanan terpadu dan digitalisasi sistem informasi sektoral	Mentransformasi pelayanan publik menjadi digital-first dengan memprioritaskan kemudahan akses dan respons cepat
4.4		Peningkatan akuntabilitas manajemen keuangan daerah melalui penguatan sistem pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel	Membangun sistem keuangan daerah yang transparan dan akuntabel melalui teknologi informasi dan penguatan pengawasan internal
4.5		Pengembangan profesionalitas ASN melalui peningkatan kompetensi berbasis kebutuhan organisasi dan pemetaan talenta	Menciptakan aparatur yang kompeten dan berintegritas melalui pengembangan kompetensi berkelanjutan dan manajemen karier berbasis merit
4.6		Perwujudan layanan publik prima melalui standardisasi pelayanan dan peningkatan kepuasan masyarakat dengan target IKM 4.22	Menghadirkan pelayanan publik yang melampaui ekspektasi masyarakat melalui simplifikasi prosedur dan penerapan teknologi
4.7		Perwujudan tata kelola pemerintah yang bersih dan akuntabel melalui reformasi birokrasi dan zona integritas	Membangun budaya integritas dan bebas korupsi melalui pendekatan bottom-up dan sistem pengawasan yang efektif

NO	MISI	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
5.	M5: Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana		
5.1		Penguatan sistem mitigasi bencana melalui pengembangan desa tangguh bencana dengan target 82.5% tingkat kesiapsiagaan bencana pada tahun 2030	Membangun ketahanan daerah terhadap bencana melalui pendekatan berbasis masyarakat dengan penguatan kapasitas lokal dan sistem peringatan dini
5.2		Peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pengelolaan lingkungan berkelanjutan dengan target IKLH 66.81 pada tahun 2030	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui konservasi ekosistem dan penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan daerah

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Misi Pertama yang berfokus pada memperkuat sumber daya manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur diwujudkan melalui empat arah kebijakan strategis. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat menjadi prioritas utama dengan target pencapaian Usia Harapan Hidup 75 tahun, yang diimplementasikan melalui strategi pengembangan sistem pelayanan kesehatan terpadu berbasis komunitas dengan memprioritaskan layanan mobile untuk menjangkau daerah terpencil. Pemerataan akses dan kualitas pendidikan ditempuh melalui program beasiswa yang transformatif, sementara penguatan nilai keagamaan dan karakter masyarakat diwujudkan melalui pemberdayaan lembaga keagamaan sebagai pusat pembinaan karakter. Aspek kesejahteraan sosial diperkuat melalui program pemberdayaan ekonomi keluarga prasejahtera yang berfokus pada peningkatan nilai tambah produk lokal.

Misi Kedua dalam mendorong kemandirian ekonomi daerah berbasis inovasi dijabarkan ke dalam tiga arah kebijakan yang saling melengkapi. Peningkatan

produktivitas PDRB sektor unggulan melalui modernisasi pertanian dan penguatan ketahanan pangan diimplementasikan dengan strategi optimalisasi nilai ekonomi sektor pertanian melalui intensifikasi pertanian modern dan stabilisasi pasokan pangan. Pengembangan kewirausahaan dan investasi daerah diwujudkan melalui strategi penciptaan iklim investasi yang kondusif dengan penguatan ekosistem UMKM dan pembangunan kawasan ekonomi khusus. Aspek agroindustri dikembangkan melalui strategi pembangunan rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dengan teknologi modern dan standar kualitas internasional.

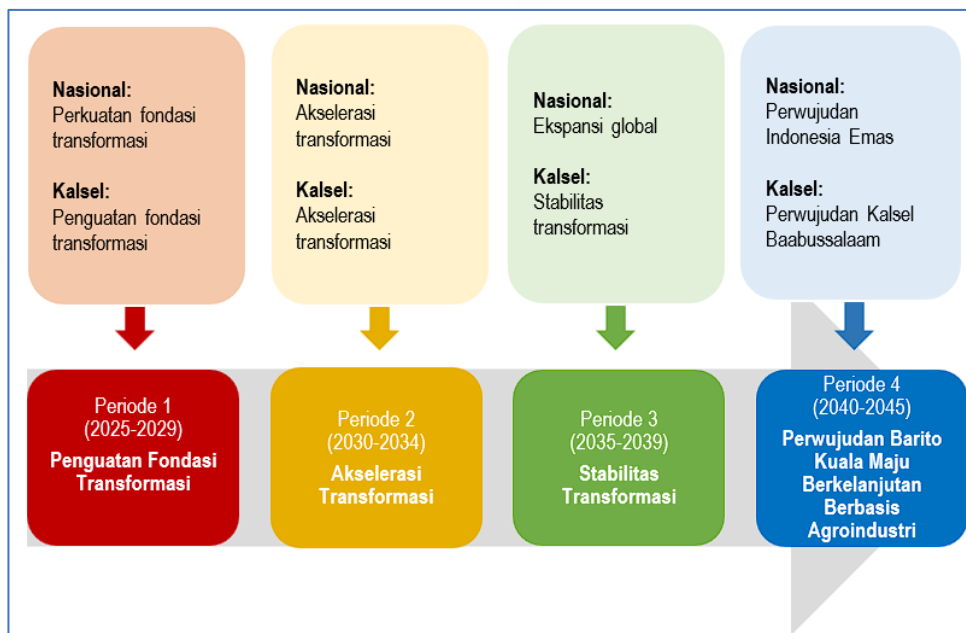
Misi Ketiga yang mengembangkan konektivitas wilayah untuk mendukung peran strategis sebagai kabupaten pendukung IKN diimplementasikan melalui empat arah kebijakan komprehensif. Peningkatan kualitas infrastruktur kota dilaksanakan melalui strategi pembangunan infrastruktur konektivitas strategis yang menghubungkan Barito Kuala dengan IKN dan pusat ekonomi regional. Pengembangan infrastruktur dasar perdesaan ditempuh dengan strategi penguatan konektivitas desa-kota yang tahan terhadap kondisi geografis lahan basah dan rawa. Penguatan ketahanan pangan diwujudkan melalui strategi intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian dengan teknologi ramah lingkungan, sementara pemberdayaan masyarakat diperkuat melalui strategi pengelolaan aset kolektif dan inovasi distribusi pangan berbasis teknologi.

Misi Keempat dalam membangun kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan berbasis digital dijabarkan ke dalam tujuh arah kebijakan yang mencakup seluruh aspek transformasi birokrasi. Pengembangan sistem inovasi pelayanan publik diimplementasikan melalui strategi pembangunan budaya inovasi dalam birokrasi dengan kompetisi inovasi dan penerapan teknologi. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah diwujudkan melalui strategi pengembangan sistem manajemen kinerja terintegrasi berbasis hasil. Optimalisasi tata kelola berbasis elektronik ditempuh dengan strategi transformasi pelayanan menjadi digital-first, sementara akuntabilitas keuangan daerah diperkuat melalui strategi pembangunan sistem keuangan yang transparan. Profesionalitas ASN dikembangkan melalui strategi pengembangan kompetensi berkelanjutan berbasis merit, pelayanan publik prima diwujudkan melalui strategi simplifikasi prosedur dan penerapan teknologi, dan tata kelola yang bersih diimplementasikan melalui strategi pembangunan budaya integritas dan sistem pengawasan yang efektif.

Misi Kelima dalam mengembangkan ketangguhan wilayah dalam mitigasi bencana diwujudkan melalui dua arah kebijakan yang saling mendukung. Penguatan sistem mitigasi bencana diimplementasikan melalui strategi pembangunan ketahanan daerah berbasis masyarakat dengan penguatan kapasitas lokal dan sistem peringatan dini. Peningkatan kualitas lingkungan hidup diwujudkan melalui strategi pembangunan berkelanjutan dengan konservasi ekosistem dan penerapan prinsip ekonomi hijau dalam pembangunan daerah.

Keseluruhan arah kebijakan dan strategi ini dirancang dengan mempertimbangkan karakteristik unik Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah dengan kondisi geografis lahan basah dan rawa, potensi agraris yang besar, serta posisi strategis sebagai pendukung IKN. Pendekatan yang digunakan mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, lingkungan, dan tata kelola dalam satu kesatuan pembangunan yang holistik dan berkelanjutan. Strategi-strategi yang dirumuskan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kuantitatif, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas dan keberlanjutan pembangunan untuk mewujudkan Barito Kuala yang sejahtera, agamis, terpadu, dan unggul menuju Indonesia Emas.

Gambar III.6
Penyelarasan Tema Pembangunan RPJPN, RPJPD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJPD Kabupaten Barito Kuala



Sumber: RPJPD Kab. Barito Kuala 2025-2045

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan yang tepat perlu diterapkan dalam setiap bidang pembangunan. Strategi ini menjadi panduan dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Setiap misi pembangunan yang telah ditetapkan akan dijabarkan ke dalam strategi dan arah kebijakan yang lebih spesifik, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki pedoman yang jelas dalam pelaksanaannya. Guna pedoman yang jelas, maka tabel berikut ini memuat tahapan pembangunan lima tahun dengan tema besar "Penguatan Fondasi Transformasi" yang diejawantahkan melalui lima tahapan tahunan yang berkesinambungan.

Setiap tahapan memiliki fokus strategis yang berbeda namun saling melengkapi untuk memastikan pembangunan yang terarah dan terukur. Tahapan ini disusun secara sekuensial dengan mempertimbangkan prioritas pembangunan, ketersediaan sumber daya, serta kebutuhan untuk membangun fondasi yang kuat bagi perkembangan Kabupaten Barito Kuala di masa depan.

Tabel III-3
Tema dan Penahapan Pembangunan RPJMD Barito Kuala Tahun 2026-2030

TEMA 5 TAHUN: PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI				
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS	PENGUATAN INVESTASI DENGAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRASI	PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN	PEMANTAPAN INVESTASI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA	PERWUJUDAN BATOLA SATU
Misi 1: 1. Penguatan peran lembaga keagamaan dan majelis taklim sebagai pusat pembinaan karakter masyarakat 2. Meningkatkan kompetensi pendidik keagamaan 3. Mengembangkan program kampung religius	Misi 1: 1. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan 2. Modernisasi pendidikan keagamaan 3. Pengembangan dialog konstruktif antar kelompok agama	Misi 1: 1. Mendorong pembinaan dan sertifikasi tenaga pendidik agama 2. Penguatan peran agama dalam pembangunan karakter 3. Pengembangan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial	Misi 1: 1. Memfasilitasi pelestarian seni dan budaya lokal berbasis nilai religius 2. Memperkuat integrasi nilai agama dalam kehidupan sosial-ekonomi 3. Perluasan forum kerukunan umat beragama di tingkat desa	Misi 1: 1. Membangun harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama 2. Evaluasi dan penguatan program pendidikan karakter berbasis agama 3. Pelembagaan nilai-nilai religius dalam tata kehidupan masyarakat
Misi 2: 1. Meningkatkan investasi daerah dan pengembangan kawasan industri strategis 2. Pengembangan program UMKM Baiman	Misi 2: 1. Perluasan kawasan industri terintegrasi 2. Memperkuat daya saing UMKM dan wirausaha baru 3. Pengembangan sistem tata kelola tanah bengkok	Misi 2: 1. Mengembangkan inkubasi bisnis dan inovasi teknologi 2. Peningkatan akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM 3. Perluasan partisipasi petani dalam program tanah bengkok	Misi 2: 1. Integrasi kawasan industri dengan sistem logistik 2. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah, termasuk tanah bengkok	Misi 2: 1. Evaluasi dan penguatan daya saing kawasan industri 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola aset daerah

TEMA 5 TAHUN: PENGUATAN FONDASI TRANSFORMASI				
TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
PENINGKATAN DAYA SAING SDM DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR BERKUALITAS	PENGUATAN INVESTASI DENGAN INFRASTRUKTUR TERINTEGRASI	PEMANTAPAN INFRASTRUKTUR KONEKTIVITAS MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN	PEMANTAPAN INVESTASI DAERAH DAN PELAYANAN PUBLIK PRIMA	PERWUJUDAN BATOLA SATU
3. Inisiasi program tanah bengkok untuk pemanfaatan lahan tidak produktif			3. Pengembangan sistem informasi aset tanah bengkok	3. Evaluasi dampak sosial-ekonomi program ekonomi kerakyatan
Misi 3: 1. Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi umum 2. Pengembangan program jalan beton 3. Pemetaan dan perencanaan infrastruktur pendukung IKN	Misi 3: 1. Pengembangan sistem transportasi publik yang efisien dan terintegrasi 2. Inisiasi program Barito Trans 3. Pengembangan transportasi multimoda	Misi 3: 1. Membangun infrastruktur strategis pendukung peran Barito Kuala sebagai daerah penyangga IKN 2. Pengembangan konektivitas strategis antar wilayah 3. Implementasi sistem monitoring infrastruktur strategis	Misi 3: 1. Pemantapan sistem transportasi terpadu 2. Mengoptimalkan program kesiapan tenaga kerja dan sistem informasi pasar kerja 3. Pengembangan terminal terpadu dan sistem logistik	Misi 3: 1. Evaluasi dan penguatan infrastruktur strategis untuk mendukung peran Barito Kuala sebagai daerah penyangga IKN 2. Integrasi penuh sistem transportasi darat dan air 3. Optimalisasi peran sebagai kabupaten pendukung IKN
Misi 4: 1. Memperluas akses pendidikan berkualitas melalui program Kartu Beasiswa 2. Pengembangan layanan kesehatan mobile 3. Inisiasi transformasi <i>e-government</i>	Misi 4: 1. Pengembangan sekolah inklusif 2. Meningkatkan sistem layanan kesehatan berbasis komunitas 3. Perluasan jangkauan program jaminan kesehatan daerah	Misi 4: 1. Peningkatan mutu pendidikan dan standarisasi sarana pembelajaran 2. Pengembangan sistem kesehatan terintegrasi 3. Mempercepat transformasi digital dalam pelayanan publik	Misi 4: 1. Pengembangan program pendidikan unggulan daerah 2. Optimalisasi layanan kesehatan komprehensif 3. Meningkatkan kapasitas ASN dalam menghadapi era digital	Misi 4: 1. Evaluasi dan penguatan sistem pendidikan unggulan 2. Pemantapan sistem kesehatan yang merata dan berkualitas 3. Evaluasi dan penguatan sistem <i>e-government</i> yang terintegrasi 4. Pengembangan pelayanan publik prima berstandar internasional
Misi 5: 1. Memperkuat sistem mitigasi bencana dan kesiapsiagaan daerah 2. Pengembangan program desa tangguh bencana 3. Inisiasi program desa peduli stunting	Misi 5: 1. Pengembangan sistem peringatan dini bencana 2. Meningkatkan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan 3. Perluasan program pupuk subsidi dan ATM beras	Misi 5: 1. Penguatan kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana 2. Mengembangkan program penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat 3. Pengembangan desa mandiri pangan	Misi 5: 1. Pemantapan infrastruktur mitigasi bencana 2. Memperkuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan kewirausahaan desa 3. Perluasan program pemberdayaan ekonomi keluarga	Misi 5: 1. Evaluasi dan penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana 2. Evaluasi dan penguatan program pemberdayaan masyarakat perdesaan 3. Pemantapan ketahanan pangan dan ekonomi mandiri perdesaan

Sumber: Bappelitbang Barito Kuala (Diolah)

Dengan tema besar "Penguatan Fondasi Transformasi", perencanaan ini mengarah pada visi Kabupaten Barito Kuala 2025-2029: "Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas". Visi ini merupakan fondasi filosofis yang komprehensif dan fundamental yang menjadi arah pembangunan

daerah. "Barito Kuala SATU" tidak hanya menjadi akronim, tetapi juga mencerminkan kesatuan tujuan dalam mewujudkan Barito Kuala yang sejahtera secara ekonomi, kuat dalam nilai-nilai religius, terpadu dalam pembangunan wilayahnya, dan unggul dalam berbagai aspek pembangunan. Pentahapan RPJMD ini juga mendukung visi jangka panjang Kabupaten Barito Kuala 20 tahun ke depan sebagai daerah yang Maju, Berkelanjutan dan Berbasis Agrobisnis.

Pembangunan Barito Kuala periode 2026-2030 mengusung tema "Penguatan Fondasi Transformasi" yang dilaksanakan dalam lima tahapan sistematis. Tahap I (2026) difokuskan pada penguatan peran lembaga keagamaan dan majelis taklim sebagai pusat pembinaan karakter masyarakat, peningkatan kompetensi pendidik keagamaan, serta pengembangan program kampung religius. Pada aspek ekonomi, tahap ini menginisiasi peningkatan investasi daerah dan pengembangan kawasan industri strategis, pengembangan program UMKM Baiman, serta inisiasi program tanah bengkok untuk pemanfaatan lahan tidak produktif. Infrastruktur dikembangkan melalui peningkatan jalan dan transportasi umum, pengembangan program jalan beton, serta pemetaan dan perencanaan infrastruktur pendukung IKN. Pelayanan publik diperkuat melalui perluasan akses pendidikan berkualitas dengan program Kartu Beasiswa Batola, pengembangan layanan kesehatan mobile, dan inisiasi transformasi e-government. Untuk ketangguhan wilayah, dilakukan penguatan sistem mitigasi bencana, pengembangan program desa tangguh bencana, dan inisiasi program desa peduli stunting.

Tahap II (2027) menekankan pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan keagamaan, modernisasi pendidikan keagamaan, dan pengembangan dialog konstruktif antar kelompok agama. Sektor ekonomi diperkuat melalui perluasan kawasan industri terintegrasi, penguatan daya saing UMKM dan wirausaha baru, serta pengembangan sistem tata kelola tanah bengkok. Infrastruktur transportasi dikembangkan menjadi sistem transportasi publik yang efisien dan terintegrasi. Pelayanan publik ditingkatkan melalui pengembangan sekolah inklusif, peningkatan sistem layanan kesehatan berbasis komunitas, dan perluasan jangkauan program jaminan kesehatan daerah. Ketangguhan wilayah diperkuat dengan pengembangan sistem peringatan dini bencana, peningkatan ketahanan pangan dan ekonomi perdesaan, serta perluasan program pupuk subsidi dan ATM beras.

Tahap III (2028) fokus pada pembinaan dan sertifikasi tenaga pendidik agama, penguatan peran agama dalam pembangunan karakter, serta pengembangan nilai-nilai toleransi dalam kehidupan sosial. Ekonomi daerah dikembangkan melalui inkubasi bisnis dan inovasi teknologi, peningkatan akses pasar dan pembiayaan bagi UMKM, serta perluasan partisipasi petani dalam program tanah bengkok. Infrastruktur strategis dibangun untuk mendukung peran Barito Kuala sebagai daerah penyangga IKN dengan pengembangan konektivitas strategis antar wilayah dan implementasi sistem monitoring infrastruktur strategis. Mutu pendidikan ditingkatkan dengan standarisasi sarana pembelajaran, sistem kesehatan dikembangkan secara terintegrasi, dan transformasi digital dipercepat dalam pelayanan publik. Kapasitas Tim Reaksi Cepat Bencana diperkuat, program penanggulangan stunting dan perbaikan gizi masyarakat dikembangkan, serta desa mandiri pangan mulai dikembangkan.

Tahap IV (2029) memfasilitasi pelestarian seni dan budaya lokal berbasis nilai religius, memperkuat integrasi nilai agama dalam kehidupan sosial-ekonomi, serta memperluas forum kerukunan umat beragama di tingkat desa. Kawasan industri diintegrasikan dengan sistem logistik, pemanfaatan aset daerah termasuk tanah bengkok dioptimalkan, dan sistem informasi aset tanah bengkok dikembangkan. Sistem transportasi terpadu dimantapkan, program kesiapan tenaga kerja dan sistem informasi pasar kerja dioptimalkan, serta terminal terpadu dan sistem logistik dikembangkan. Program pendidikan unggulan daerah dikembangkan, layanan kesehatan komprehensif dioptimalkan, dan kapasitas ASN ditingkatkan dalam menghadapi era digital. Infrastruktur mitigasi bencana dimantapkan, BUMDes dan kewirausahaan desa diperkuat, serta program pemberdayaan ekonomi keluarga diperluas.

Tahap V (2030) merupakan tahap evaluasi dan penguatan yang membangun harmoni sosial dan toleransi antarumat beragama, mengevaluasi dan memperkuat program pendidikan karakter berbasis agama, serta melembagakan nilai-nilai religius dalam tata kehidupan masyarakat. Daya saing kawasan industri dievaluasi dan diperkuat, efisiensi dan transparansi tata kelola aset daerah ditingkatkan, serta dampak sosial-ekonomi program ekonomi kerakyatan dievaluasi. Infrastruktur strategis dievaluasi dan diperkuat untuk mendukung peran sebagai daerah penyangga IKN, sistem transportasi darat dan air diintegrasikan penuh, dan peran sebagai kabupaten pendukung IKN dioptimalkan. Sistem pendidikan unggulan dievaluasi dan diperkuat,

sistem kesehatan yang merata dan berkualitas dimantapkan, sistem e-government terintegrasi dievaluasi dan diperkuat, serta pelayanan publik prima berstandar internasional dikembangkan. Ketangguhan daerah terhadap bencana dievaluasi dan diperkuat, program pemberdayaan masyarakat perdesaan dievaluasi dan diperkuat, serta ketahanan pangan dan ekonomi mandiri perdesaan dimantapkan.

3.2.2 Program prioritas daerah

Program Prioritas Daerah merupakan penjabaran operasional dari strategi pembangunan yang telah dirumuskan berdasarkan kajian mendalam terhadap isu-isu strategis Kabupaten Barito Kuala. Program prioritas ini lahir melalui serangkaian proses analisis yang sistematis, dimulai dari identifikasi isu-isu strategis melalui analisis MICMAC, perumusan arah kebijakan sebagai kerangka umum penanganan isu, hingga penetapan strategi sebagai pendekatan dalam mengatasi permasalahan pembangunan.

Sebagai tahap akhir dari rantai perencanaan strategis, program prioritas menjembatani kesenjangan antara perencanaan strategis yang bersifat makro dengan implementasi yang bersifat operasional. Program prioritas ini dirancang secara spesifik, terukur, dan berorientasi pada hasil untuk memastikan efektivitas pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Program prioritas daerah juga mempertimbangkan aspek kesinambungan dan keterpaduan antar program, kesesuaian dengan kapasitas fiskal daerah, serta partisipasi multi-pihak dalam implementasinya. Melalui pendekatan yang komprehensif dan terpadu, program prioritas ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan Kabupaten Barito Kuala menuju visi SATU untuk menjadi daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing tinggi di tingkat regional.

Dalam implementasinya, program prioritas akan menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah daerah, alokasi anggaran daerah, serta koordinasi dan sinergi dengan program-program pemerintah pusat dan provinsi. Program prioritas juga menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana strategis dan rencana kerja tahunan, sehingga terwujud keterpaduan pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah di Kabupaten Barito Kuala.

3.2.2.1 Program-program prioritas pada penjabaran Misi Pertama

Misi Pertama Kabupaten Barito Kuala yaitu "Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur" memiliki tujuan utama untuk mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur yang kokoh. Keberhasilan pencapaian tujuan ini diukur melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) sebagai indikator komprehensif yang menggambarkan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Barito Kuala.

Tabel III-4
Program Priotas pada Penjabaran Misi Pertama

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
M1: Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur	M1.1. Terwujudnya Sumber daya manusia yang Unggul, Sehat, Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur yang kokoh			Indeks Pembangunan Manusia (IPM); Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	
		M1.1.1 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	
			M1.1.1.1 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan	Angka Kematian Ibu dan Bayi	Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat
			M1.1.1.2 Meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	LAYANAN MOBIL KELILING DAN PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN
			M1.1.1.3 Meningkatnya status gizi masyarakat	Prevalensi stunting	DESA PEDULI STUNTING
		M1.1.2 Meratanya		Indeks Pendidikan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		kualitas Pendidikan			
			M1.1.2.1 Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah	KARTU BEASISWA BATOLA
		M1.1.3 Menguatnya nilai keagamaan dan karakter masyarakat		Indeks Harmoni Indonesia	
			M1.1.3.1 Meningkatnya kelembagaan keagamaan	Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan fasilitasi kegiatan dari pemerintah daerah	INSENTIF KAUM MESJID & GURU TPA
			M1.1.3.2 Meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan	Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan (bakti sosial, santunan, dll)	Event – event Sosial Keagamaan
		M1.1.4 Meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial Masyarakat serta menurunnya Tingkat kemiskinan		Indeks Kesejahteraan Sosial; Tingkat kemiskinan	
			M1.1.4.1 Meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat	Persentase peningkatan nilai tambah produk lokal hasil pemberdayaan masyarakat	Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			M1.1.4.2 Meningkatnya kapasitas masyarakat desa	Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
			M1.1.4.3 Menurunnya jumlah penduduk miskin	Persentase keluarga miskin yang naik status kesejahteraan	Program Bantuan Sosial Terpadu

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan empat sasaran yang saling mendukung. Sasaran pertama adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat yang diukur melalui indikator Usia Harapan Hidup (UHH). Peningkatan UHH ini diupayakan melalui tiga outcome yang lebih spesifik. Outcome pertama adalah meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan dengan indikator Angka Kematian Ibu dan Bayi, yang ditunjang oleh Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat. Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi melalui perbaikan status gizi masyarakat, terutama pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan anak-anak.

Outcome kedua dalam bidang kesehatan adalah meningkatnya aksesibilitas pelayanan kesehatan yang diukur melalui Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk. Untuk mencapai outcome ini, Kabupaten Barito Kuala mengimplementasikan program LAYANAN MOBIL KELILING DAN PENGEMBANGAN FASILITAS KESEHATAN yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang sulit mengakses fasilitas kesehatan permanen. Dengan adanya layanan kesehatan mobile ini dan pengembangan fasilitas kesehatan, diharapkan seluruh lapisan masyarakat dapat menerima pelayanan kesehatan yang memadai. Target layanan mobil keliling Kesehatan sampai dengan tahun 2029 adalah 500 layanan dan 1329 layanan kependudukan sampai dengan tahun 2029.

Outcome ketiga dalam bidang kesehatan adalah meningkatnya status gizi masyarakat dengan indikator Prevalensi stunting. Untuk mengatasi masalah stunting yang masih menjadi tantangan utama di bidang kesehatan, Kabupaten Barito Kuala

menerapkan program DESA PEDULI STUNTING. Program ini mengintegrasikan berbagai intervensi yang terfokus pada pencegahan dan penanganan stunting melalui pendekatan berbasis desa, melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam upaya menurunkan prevalensi stunting secara berkelanjutan. Program ini ditargetkan sampai dengan tahun 2029 bisa mencakup 201 Desa/Kelurahan

Sasaran kedua dari Misi Pertama adalah meratanya kualitas pendidikan yang diukur melalui Indeks Pendidikan. Untuk mencapai peningkatan Indeks Pendidikan ini, ditetapkan outcome yaitu meningkatnya akses dan kualitas pendidikan dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Program prioritas yang dikembangkan untuk mencapai outcome ini adalah KARTU BEASISWA BATOLA, yang memberikan dukungan finansial kepada masyarakat Barito Kuala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan angka partisipasi sekolah dan mengurangi angka putus sekolah, sehingga rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah masyarakat Barito Kuala dapat meningkat secara signifikan. Akan tetapi secara khusus program ini bertujuan untuk meningkatkan SDM di Desa/Kelurahan terutama untuk mempersiapkan calon penggerak di Desa/Kelurahan dengan target sampai dengan tahun 2029 sebanyak 201 mahasiswa serta sebanyak 17 mahasiswa di 17 kecamatan untuk menjadi DAI.

Sasaran ketiga adalah menguatnya nilai keagamaan dan karakter masyarakat yang diukur melalui Indeks Harmoni Indonesia. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan dua outcome. Outcome pertama adalah meningkatnya kelembagaan keagamaan dengan indikator Persentase lembaga keagamaan yang mendapatkan fasilitasi kegiatan dari pemerintah daerah. Program prioritas yang dikembangkan adalah INSENTIF KAUM MESJID & GURU TPA, yang memberikan dukungan finansial kepada para imam, guru mengaji, dan pengelola lembaga keagamaan. Program ini bertujuan untuk memperkuat peran lembaga keagamaan dalam membentuk karakter masyarakat dan menanamkan nilai-nilai religiusitas. Target program ini sampai dengan tahun 2029 ada sebanyak 1500 orang yang terdiri dari 201 orang kaum masjid dan 1500 orang Guru TPA dan Madrasah.

Outcome kedua dalam penguatan nilai keagamaan adalah meningkatnya partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan social keagamaan, dengan indikator Persentase masyarakat yang terlibat dalam kegiatan sosial keagamaan. Program yang dikembangkan adalah event – event social keagamaan, yang menciptakan ekosistem

permukiman yang kental dengan nilai-nilai religius dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan dan sosial. Program ini tidak hanya berfokus pada ritual keagamaan, tetapi juga pada implementasi nilai-nilai agama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Sasaran keempat adalah meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan sosial masyarakat serta menurunnya tingkat kemiskinan yang diukur melalui Indeks Kesejahteraan Sosial dan Tingkat kemiskinan. Untuk mencapai peningkatan indeks ini, ditetapkan tiga outcome. Outcome pertama adalah meningkatnya pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan indikator Persentase peningkatan nilai tambah produk lokal hasil pemberdayaan masyarakat. Program prioritas yang dikembangkan adalah Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera, yang berfokus pada peningkatan kapasitas ekonomi keluarga prasejahtera melalui pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

Outcome kedua adalah meningkatnya kapasitas masyarakat desa dengan indikator Tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, yang didukung oleh Program Pemberdayaan Masyarakat Desa. Outcome ketiga adalah menurunnya jumlah penduduk miskin dengan indikator Persentase keluarga miskin yang naik status kesejahteraan, yang didukung oleh Program Bantuan Sosial Terpadu. Ketiga outcome ini saling melengkapi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan sosial dan menurunkan tingkat kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala.

Melalui implementasi keempat sasaran beserta program-program prioritasnya, Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk mewujudkan Misi Pertama yaitu memperkokoh sumber daya manusia yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur. Pendekatan komprehensif yang mencakup aspek kesehatan, pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan sosial ini diharapkan dapat meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Barito Kuala secara signifikan dan berkelanjutan.

3.2.2.2 Program-program prioritas pada penjabaran Misi Kedua

Kemandirian ekonomi daerah menjadi fokus utama Misi Kedua Kabupaten Barito Kuala yang diformulasikan sebagai "Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis

Inovasi melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri". Fondasi misi ini bertumpu pada pencapaian tujuan strategis berupa terwujudnya sektor ekonomi yang berdaya saing dan inovatif, dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Indeks Daya Saing sebagai parameter keberhasilan yang utama.

Tabel III-5
Program Priotas pada Penjabaran Misi Kedua

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
M2: Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah berbasis Inovasi melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri	M2.1. Terwujudnya sektor ekonomi yang berdaya saing dan Inovatif			Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Indeks Daya Saing	
		M2.1.1 Meningkatnya produktivitas PDRB sektor unggulan		Rasio PDRB sektor unggulan terhadap total PDRB	
			M2.1.1.1 Meningkatnya produktivitas sektor pertanian	Nilai tambah produk pertanian	Program Intensifikasi Pertanian Modern
			M2.1.1.2 Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat	Tingkat ketersediaan pangan	PUPUK SUBSIDI DAN ATM BERAS
		M2.1.2 Meningkatnya kewirausahaan, Investasi daerah dan Agro Industri yang inovatif		PDRB Per Kapita	
			M2.1.2.1 Meningkatnya pengembangan kewirausahaan masyarakat	Jumlah wirausahawan baru	Program Pengembangan Wirausaha Lokal
			M2.1.2.2 Meningkatnya kekuatan	Kontribusi UMKM	UMKM BAIMAN

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			ekosistem UMKM	terhadap PDRB daerah	
			M2.1.2.3 Berkembangnya agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah	Persentase produk pertanian yang diolah melalui agroindustri	Program Pengembangan Sentra Agroindustri
		M2.1.3 Meningkatnya Partisipasi Angkatan Kerja dalam Pembangunan Ekonomi		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	
			M2.1.3.1 Meningkatnya kesempatan kerja	Ketersediaan Lowongan Kerja	KARTU SIAP KERJA BATOLA
			M2.1.3.2 Meningkatnya ekonomi masyarakat desa	Pertumbuhan ekonomi desa	MENCIPTAKAN KAWASAN INDUSTRI KHUSUS
		M2.1.4 Meningkatnya Inovasi daerah		Indeks Inovasi Daerah	
			M2.1.4.1 Berkembangnya sistem inovasi daerah	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	Program Pengembangan Inovasi Daerah

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Guna merealisasikan tujuan tersebut, Kabupaten Barito Kuala mengembangkan empat sasaran yang saling melengkapi. Sasaran pertama berfokus pada peningkatan produktivitas PDRB sektor unggulan yang tercermin melalui Rasio PDRB sektor unggulan terhadap total PDRB. Dalam upaya meningkatkan kontribusi sektor unggulan, terdapat dua outcome yang dijalankan secara simultan. Outcome pertama adalah peningkatan produktivitas sektor pertanian dengan indikator Nilai tambah produk pertanian. Untuk mencapai outcome ini, Program Intensifikasi Pertanian Modern diimplementasikan guna mengoptimalkan hasil pertanian melalui pendekatan teknologi dan metode budidaya yang lebih efisien, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah produk pertanian lokal.

Berkaitan dengan ketahanan pangan, outcome kedua dirancang untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat yang diukur melalui Tingkat ketersediaan pangan. Program prioritas yang dikembangkan adalah PUPUK SUBSIDI DAN ATM BERAS, sebuah inovasi yang memadukan kemudahan akses terhadap sarana produksi pertanian dan distribusi bahan pangan pokok. Program ini tidak hanya menjamin ketersediaan input pertanian berkualitas dengan harga terjangkau, tetapi juga mempermudah akses masyarakat terhadap bahan pangan pokok melalui sistem distribusi yang modern dan efisien. Target pelaksanaan program ini sampai dengan tahun 2029 adalah sebanyak 201 Koperasi Desa Merah Putih yang mampu mendistribusikan Pupuk Bersubsidi dan 50 ATM beras yang tersebar di seluruh Kecamatan.

Sasaran kedua dari Misi Kedua adalah peningkatan kewirausahaan, investasi daerah dan agroindustri yang inovatif, dengan PDRB Per Kapita sebagai indikator utama. Dalam sasaran ini, terdapat tiga outcome yang saling mendukung. Outcome pertama adalah peningkatan pengembangan kewirausahaan masyarakat dengan indikator Jumlah wirausahawan baru. Program Pengembangan Wirausaha Lokal dijalankan untuk mendorong tumbuhnya wirausahawan baru melalui pelatihan, pendampingan, dan akses terhadap permodalan. Program ini menjadi katalisator lahirnya usaha-usaha baru yang berdaya saing dan mampu menyerap tenaga kerja lokal.

Outcome kedua adalah peningkatan kekuatan ekosistem UMKM dengan indikator Kontribusi UMKM terhadap PDRB daerah. Program UMKM BAIMAN dikembangkan sebagai sistem pendukung komprehensif bagi UMKM lokal, mencakup aspek produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Melalui program ini, UMKM di Barito Kuala diharapkan dapat tumbuh lebih kuat dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian daerah dengan target sampai tahun 2029 adalah 168 UMKM informal menjadi formal.

Outcome ketiga adalah pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah, dengan indikator Persentase produk pertanian yang diolah melalui agroindustri. Program Pengembangan Sentra Agroindustri menjadi prioritas untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian melalui proses pengolahan. Program ini menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dari produk pertanian, sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi petani dan pelaku agroindustri lokal.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam pembangunan ekonomi dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Sasaran ini memiliki dua outcome. Outcome pertama adalah meningkatnya kesempatan kerja dengan indikator Ketersediaan Lowongan Kerja. Program KARTU SIAP KERJA BATOLA dikembangkan untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal yang terampil dan siap pakai sesuai kebutuhan pasar. Program ini menjembatani kesenjangan antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan industri, sehingga mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal di berbagai sektor ekonomi. Untuk program ini ditargetkan sampai dengan tahun 2029 mampu mengakomodir 512 orang penerima Kartu Siap Kerja.

Outcome kedua adalah meningkatnya ekonomi masyarakat desa dengan indikator Pertumbuhan ekonomi desa. Program MENCIPTAKAN KAWASAN INDUSTRI KHUSUS dirancang untuk menghadirkan zona-zona ekonomi yang terintegrasi, dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan kemudahan investasi. Kawasan ini diharapkan dapat menarik investasi strategis yang mampu menggerakkan perekonomian desa dan daerah secara signifikan. Target program ini sampai dengan tahun 2029 adalah sudah ditetapkannya Revisi Perda RTRW.

Sasaran keempat adalah meningkatnya inovasi daerah dengan indikator Indeks Inovasi Daerah. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan outcome berkembangnya sistem inovasi daerah dengan indikator Jumlah Inovasi Pelayanan Publik. Program Pengembangan Inovasi Daerah diimplementasikan untuk mendorong terciptanya inovasi-inovasi yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Melalui implementasi keempat sasaran beserta program-program prioritasnya, Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk mewujudkan kemandirian ekonomi daerah yang berbasis inovasi. Pendekatan komprehensif yang mencakup aspek produktivitas sektor unggulan, kewirausahaan, partisipasi angkatan kerja, dan inovasi daerah diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Barito Kuala secara merata.

3.2.2.3 Program-program prioritas pada penjabaran Misi Ketiga

Posisi Kabupaten Barito Kuala sebagai salah satu daerah yang mendukung pelaksanaan program nasional untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) tercermin dalam Misi Ketiga yaitu "Mengembangkan Konektivitas Wilayah melalui Infrastruktur Berkelanjutan dan Ketahanan Pangan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara". Misi ini dijabarkan ke dalam dua tujuan utama yang saling melengkapi untuk mempersiapkan Barito Kuala mengambil peran strategis dalam konstelasi pengembangan IKN.

Tujuan pertama berfokus pada peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung IKN dengan Indeks Infrastruktur sebagai tolok ukur keberhasilan. Dalam mewujudkan tujuan ini, Kabupaten Barito Kuala mengembangkan sasaran peningkatan kualitas infrastruktur yang diukur melalui Pilar Infrastruktur. Untuk mencapai sasaran ini, dikembangkan dua outcome yang saling terintegrasi.

Tabel III-6
Program Priotas pada Penjabaran Misi Ketiga

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
M3: Mengembangkan Konektivitas Wilayah melalui Infrastruktur Berkelanjutan dan ketahanan Pangan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara	M3.1. Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah sebagai pendukung IKN			Indeks Infrastruktur	
		M3.1.1 Meningkatnya kualitas infrastruktur		Pilar Infrastruktur	
			M3.1.1.1 Meningkatnya pembangunan infrastruktur konektivitas	Persentase jalan dalam kondisi baik	JALANAN BETON
			M3.1.1.2 Meningkatnya cakupan	Persentase wilayah dengan akses air bersih,	Program Desa Terintegrasi

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			layanan infrastruktur dasar	listrik, dan internet	
	M3.2. Memperkuat ketahanan pangan dalam mendukung IKN			Indeks Ketahanan Pangan	
		M3.2.1 Tercukupinya Kebutuhan Pangan		Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan	
			M3.2.1.1 Meningkatkan produksi dan ketersediaan pangan	Tingkat produksi pangan	Program Peningkatan Produksi Pertanian Berkelanjutan
			M3.2.1.2 Meningkatkan produktivitas lahan pangan	Luas lahan pangan produktif	Program Optimalisasi Lahan Pertanian
			M3.2.1.3 Meningkatkan ketahanan pangan desa	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan	TANAH BENGKOK
		M3.2.2 Terkendalinya Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat		Laju Inflasi	
			M3.2.2.1 Terkendalinya harga dan pasokan pangan	Stabilitas harga pangan	Program Stabilisasi Harga Pangan

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Outcome pertama memfokuskan pada peningkatan pembangunan infrastruktur konektivitas dengan indikator Persentase jalan dalam kondisi baik. Program JALANAN BETON menjadi program unggulan yang dikembangkan untuk memastikan akses transportasi yang andal. Penggunaan material beton dipilih karena ketahanannya terhadap kondisi geografis Barito Kuala yang sebagian besar berupa lahan basah,

sehingga memastikan konektivitas yang berkelanjutan. Program ini tidak hanya memperbaiki jalan yang ada tetapi juga membangun jalan baru yang menghubungkan simpul-simpul ekonomi penting di Kabupaten Barito Kuala, sekaligus memperlancar konektivitas dengan IKN dan wilayah sekitarnya. Target pelaksanaan pembangunan program JALAN BETON sampai dengan tahun 2029 adalah terbangunnya 120 Km jalan beton di Kabupaten Barito Kuala.

Outcome kedua adalah meningkatnya cakupan layanan infrastruktur dasar dengan indikator Persentase wilayah dengan akses air bersih, listrik, dan internet. Program Desa Terintegrasi diimplementasikan untuk memastikan pemenuhan infrastruktur dasar secara holistik di setiap wilayah. Program ini mengintegrasikan pembangunan berbagai infrastruktur dasar, sehingga setiap wilayah memiliki akses terhadap utilitas penting yang menjadi prasyarat pengembangan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Tujuan kedua dari Misi Ketiga adalah memperkuat ketahanan pangan dalam mendukung IKN, dengan Indeks Ketahanan Pangan sebagai indikator utama. Dalam mewujudkan tujuan ini, dikembangkan dua sasaran yang komprehensif. Sasaran pertama adalah tercukupinya kebutuhan pangan yang diukur melalui Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan tiga outcome yang saling melengkapi.

Outcome pertama dalam pemenuhan kebutuhan pangan adalah meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan dengan indikator Tingkat produksi pangan. Program Peningkatan Produksi Pertanian Berkelanjutan dilaksanakan untuk mengoptimalkan hasil pertanian dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan. Program ini menerapkan teknologi dan metode budidaya yang ramah lingkungan, sehingga mampu meningkatkan produktivitas tanpa mengorbankan daya dukung lingkungan untuk produksi pangan di masa depan.

Outcome kedua adalah meningkatnya produktivitas lahan pangan dengan indikator Luas lahan pangan produktif. Program Optimalisasi Lahan Pertanian dikembangkan untuk memaksimalkan pemanfaatan lahan yang tersedia untuk produksi pangan. Program ini mencakup upaya intensifikasi pada lahan yang sudah ada,

pemanfaatan lahan tidur, serta penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan hasil per satuan luas lahan.

Outcome ketiga adalah meningkatnya ketahanan pangan desa dengan indikator Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan. Program TANAH BENGKOK dikembangkan sebagai solusi inovatif untuk memastikan akses pangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Program ini menghadirkan teknologi modern dalam distribusi beras, sehingga masyarakat dapat mengakses bahan pangan pokok dengan mudah, cepat, dan dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. TANAH BENGKOK menjadi terobosan dalam sistem distribusi pangan yang efisien dan tepat sasaran dengan target sampai tahun 2029 terdapat 5000 ha TANAH BENGKOK di seluruh Kabupaten Barito Kuala yang dapat dimanfaatkan sebagai lahan pertanian.

Sasaran kedua dalam penguatan ketahanan pangan adalah terkendalinya harga kebutuhan pokok masyarakat dengan indikator Laju Inflasi. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan outcome terkendalinya harga dan pasokan pangan dengan indikator Stabilitas harga pangan. Program Stabilisasi Harga Pangan diimplementasikan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan, sehingga harga tetap stabil dan terjangkau oleh masyarakat. Program ini mencakup intervensi pasar, pengaturan distribusi, dan pengendalian stok pangan, yang menjadi semakin penting dalam konteks Barito Kuala sebagai pendukung IKN.

Melalui implementasi kedua tujuan utama beserta sasaran-sasaran dan outcome-nya, Kabupaten Barito Kuala mempersiapkan diri untuk menjadi pendukung strategis IKN dari aspek konektivitas infrastruktur dan ketahanan pangan. Pendekatan komprehensif yang mencakup pembangunan infrastruktur konektivitas, pemenuhan infrastruktur dasar, peningkatan produksi dan akses pangan, serta stabilisasi harga pangan diharapkan dapat memperkuat posisi Barito Kuala dalam ekosistem regional IKN sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

3.2.2.4 Program-program prioritas pada penjabaran Misi Keempat

Transformasi pelayanan publik berbasis digital menjadi landasan kuat Misi Keempat Kabupaten Barito Kuala yaitu "Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital". Orientasi pada pelayanan masyarakat

diwujudkan melalui tujuan strategis berupa terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan, dengan Indeks Reformasi Birokrasi sebagai parameter keberhasilan yang terukur.

Dalam mengimplementasikan misi tersebut, Kabupaten Barito Kuala mengembangkan enam sasaran yang saling terintegrasi. Sasaran pertama adalah meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah yang diukur melalui Nilai SAKIP. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan outcome meningkatnya akuntabilitas kinerja dengan indikator Persentase capaian kinerja. Program Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja menjadi tulang punggung sasaran ini. Inovasi dalam program ini terletak pada pendekatan terintegrasi yang menyelaraskan siklus perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dalam satu sistem yang koheren, memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran daerah

Tabel III-7
Program Priotas pada Penjabaran Misi Keempat

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
M4: Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital	M4.1. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Berorientasi Layanan			Indeks Reformasi Birokrasi	
		M4.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah		Nilai SAKIP	
			M4.1.1.1 Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Persentase capaian kinerja	Program Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja
		M4.1.2 Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik		Indeks SPBE Indeks PEMDI	
			M4.1.2.1 Berkembangnya	Jumlah layanan publik terintegrasi	BATOLA RESPON CEPAT

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			sistem layanan publik terpadu		
			M4.1.2.2 Berkembangnya sistem informasi sektoral	Jumlah sistem informasi sektoral	SIMFONI PPA (SISTEM INFORMASI ONLINE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)
		M4.1.3 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah		Opini BPK	
			M4.1.3.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah
		M4.1.4 Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara		Indeks Profesionalitas ASN	
			M4.1.4.1 Meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi	Program Pengembangan Kompetensi ASN
		M4.1.5 Terwujudnya Layanan Publik Prima		Indeks Pelayanan Publik	
			M4.1.5.1 Meluasnya jangkauan pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
		M4.1.6 Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel		Indeks Persepsi Korupsi	
			M4.1.6.1 Meningkatnya pengawasan dan	Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP)	Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
			reformasi birokrasi		

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Sasaran kedua adalah Optimalnya Tata Kelola Pemerintah Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks SPBE. Sasaran ini memiliki dua outcome yang saling melengkapi. Outcome pertama adalah berkembangnya sistem layanan publik terpadu dengan indikator Jumlah layanan publik terintegrasi. Program unggulan BATOLA RESPON CEPAT dikembangkan untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik dalam satu platform digital yang responsif, mudah diakses, dan transparan. Keunggulan program ini terletak pada sistem respons cepat terhadap pengaduan dan kebutuhan masyarakat, dengan target waktu penyelesaian yang terukur. Target Program ini sampai dengan tahun 2029 adalah kegiatan Santunan Kematian, santunan perkawinan, santuan khitanan sebanyak 12.951 santunan dan persalinan sebanyak 24.437 santunan.

Outcome kedua adalah berkembangnya sistem informasi sektoral dengan indikator Jumlah sistem informasi sektoral. Program SIMFONI PPA (SISTEM INFORMASI ONLINE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) dikembangkan sebagai solusi spesifik untuk permasalahan perlindungan perempuan dan anak. Program ini tidak hanya menyediakan database komprehensif, tetapi juga memfasilitasi koordinasi antar-lembaga dalam penanganan kasus, sehingga mempercepat proses respons dan meningkatkan akurasi intervensi. Program ini menjadi model digitalisasi layanan sektoral yang dapat direplikasi untuk sektor-sektor lainnya. Dengan target sampai tahun 2029 yaitu tertanganinya seluruh kasus sebesar 100%.

Sasaran ketiga adalah meningkatnya Akuntabilitas Keuangan Daerah dengan indikator Opini BPK. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan outcome meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Program Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah mengimplementasikan sistem keuangan terintegrasi berbasis teknologi informasi, disertai dengan penguatan kapasitas pengelola keuangan dan pengawasan internal yang efektif.

Sasaran keempat adalah meningkatnya Profesionalitas Aparatur Sipil Negara dengan indikator Indeks Profesionalitas ASN. Outcome yang ditetapkan adalah

meningkatnya kompetensi dan kinerja ASN dengan indikator Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi. Program Pengembangan Kompetensi ASN menerapkan pendekatan pengembangan kompetensi yang komprehensif, mencakup assessment kompetensi, pendidikan formal, pelatihan teknis, dan pengembangan kepemimpinan, disesuaikan dengan kebutuhan jabatan. Inovasi dalam program ini terletak pada integrasi pengembangan kompetensi dengan manajemen kinerja dan sistem karier.

Sasaran kelima adalah terwujudnya Layanan Publik Prima dengan indikator Indeks Pelayanan Publik. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan outcome meluasnya jangkauan pelayanan publik dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mengimplementasikan standarisasi pelayanan, simplifikasi prosedur, dan penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, dengan penekanan pada aspek kecepatan, kemudahan, dan kepastian layanan.

Sasaran keenam adalah terwujudnya Tata Kelola Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel dengan indikator Indeks Persepsi Korupsi. Outcome yang ditetapkan adalah meningkatnya pengawasan dan reformasi birokrasi dengan indikator Indeks Persepsi Pelayanan Publik (IPP). Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menciptakan role model unit kerja yang berkomitmen terhadap reformasi birokrasi dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Keunggulan program ini terletak pada pendekatan bottom-up yang melibatkan seluruh pegawai dalam perubahan budaya kerja, didukung oleh sistem pengawasan internal yang efektif.

Melalui implementasi keenam sasaran beserta program prioritasnya, Kabupaten Barito Kuala berupaya untuk mentransformasi tata kelola pemerintahan menjadi lebih berorientasi pada layanan, transparan, akuntabel, dan berbasis digital. Sinergi antar-program menciptakan efek multiplier dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, sehingga masyarakat Barito Kuala dapat merasakan manfaat nyata dari reformasi birokrasi dan transformasi digital pemerintahan. Keberhasilan implementasi Misi Keempat ini tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintahan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, yang menjadi modal sosial penting dalam pembangunan daerah secara keseluruhan.

3.2.2.5 Program-program prioritas pada penjabaran Misi Kelima

Ketangguhan menghadapi bencana menjadi fokus strategis Misi Kelima Kabupaten Barito Kuala yang dirumuskan sebagai "Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dan Mitigasi Bencana". Visi antisipatif ini dikonkretkan melalui tujuan utama yaitu meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah terhadap bencana, dengan Indeks Risiko Bencana dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai parameter komprehensif untuk mengukur tingkat keberhasilan implementasi.

Kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang didominasi oleh lahan basah dan terletak di wilayah yang rentan terhadap perubahan iklim menjadi latar belakang pentingnya pengembangan program-program prioritas dalam mitigasi bencana dan pengelolaan lingkungan. Untuk mewujudkan misi ini, Kabupaten Barito Kuala mengembangkan dua sasaran yang saling melengkapi, masing-masing dirancang untuk mengatasi aspek yang berbeda namun saling berkaitan dalam penguatan ketangguhan wilayah.

Tabel III-8
Program Priotas pada Penjabaran Misi Kelima

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
M5: Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dan Mitigasi Bencana	M5.1. Meningkatnya kualitas lingkungan dan ketahanan daerah terhadap bencana			Indeks Risiko Bencana; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	
		M5.1.1 Meningkatnya Penguatan sistem mitigasi bencana		Tingkat kesiapsiagaan bencana	
			M5.1.1.1 Berkembangnya sistem penanggulangan bencana	Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana	Program Desa Tangguh Bencana
		M5.1.2 Terwujudnya kelestarian fungsi		Tingkat Pencemaran Lingkungan	

VISI/MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS
		lingkungan hidup			
			M5.1.2.1 Meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara	Program Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Sasaran pertama adalah meningkatnya penguatan sistem mitigasi bencana dengan indikator Tingkat kesiapsiagaan bencana. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan outcome berkembangnya sistem penanggulangan bencana dengan indikator Jumlah desa/kelurahan tangguh bencana. Program Desa Tangguh Bencana menjadi ujung tombak implementasi sasaran ini. Program ini mengadopsi pendekatan berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, menempatkan komunitas lokal sebagai aktor utama dalam upaya mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

Inovasi Program Desa Tangguh Bencana terletak pada pemberdayaan kapasitas lokal melalui pembentukan dan penguatan Forum Pengurangan Risiko Bencana Desa, penyusunan peta risiko bencana partisipatif, pengembangan sistem peringatan dini berbasis kearifan lokal, dan pelatihan tim siaga bencana desa. Keunggulan program ini adalah pendekatannya yang komprehensif, mencakup aspek struktural dan non-struktural dalam pengurangan risiko bencana.

Dari sisi struktural, program ini memfasilitasi pembangunan infrastruktur mitigasi bencana skala desa seperti tanggul sederhana, sistem drainase, dan jalur evakuasi. Dari sisi non-struktural, program ini memperkuat kapasitas masyarakat melalui edukasi, simulasi bencana rutin, dan integrasi pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan desa. Target ambisius program ini adalah mewujudkan peningkatan jumlah desa tangguh bencana secara signifikan, sehingga menurunkan Indeks Risiko Bencana di tingkat kabupaten.

Sasaran kedua adalah terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dengan indikator Tingkat Pencemaran Lingkungan. Untuk mencapai sasaran ini, ditetapkan outcome meningkatnya kualitas pengelolaan lingkungan hidup dengan indikator Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara. Program Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan

dikembangkan untuk mendukung sasaran ini. Program ini menerapkan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan lingkungan, mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam.

Keunikan Program Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan terletak pada harmonisasi antara upaya konservasi lingkungan dan kebutuhan pembangunan ekonomi, dengan penekanan pada praktik-praktik ramah lingkungan di berbagai sektor pembangunan. Komponen utama program ini mencakup rehabilitasi ekosistem kritis seperti lahan gambut dan kawasan riparian, pengendalian pencemaran air dan udara, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pengembangan energi terbarukan.

Program ini juga memperkuat sistem pemantauan kualitas lingkungan melalui penerapan teknologi dan partisipasi masyarakat, sehingga memberikan data akurat untuk pengambilan kebijakan berbasis bukti. Inovasi dalam program ini adalah integrasi mitigasi perubahan iklim dalam pengelolaan lingkungan, mencakup inventarisasi emisi gas rumah kaca, adaptasi perubahan iklim di sektor pertanian, dan pengembangan ekonomi rendah karbon.

Pendekatan ini menjadikan Program Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan tidak hanya bermanfaat bagi keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata. Target program ini adalah mencapai perbaikan signifikan untuk Indeks Kualitas Air dan Indeks Kualitas Udara, yang akan berkontribusi pada penurunan risiko bencana ekologis seperti banjir, longsor, dan kebakaran lahan.

Sinergi antara kedua sasaran dan program prioritasnya menciptakan pendekatan komprehensif dalam mengembangkan ketangguhan wilayah menghadapi bencana. Program Desa Tangguh Bencana memperkuat kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana, sementara Program Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan mengurangi risiko bencana melalui perbaikan kualitas lingkungan. Kombinasi ini menghasilkan strategi mitigasi bencana yang holistik, mencakup aspek pencegahan, kesiapsiagaan, dan pengurangan dampak bencana.

Implementasi kedua program prioritas tersebut tidak hanya memperkuat ketangguhan wilayah terhadap bencana dan melestarikan fungsi lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kabupaten Barito Kuala secara

keseluruhan. Lingkungan yang sehat dan masyarakat yang tangguh bencana menjadi fondasi bagi pembangunan berkelanjutan, mendukung tercapainya visi Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah yang maju, sejahtera, dan berketahanan. Melalui pendekatan yang partisipatif dan berbasis ekosistem, Misi Kelima ini menjadi contoh nyata implementasi pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal, yang memberikan manfaat jangka panjang bagi generasi saat ini dan mendatang.

3.1.1.6. Dukungan Program prioritas daerah Kab. Barito Kuala terhadap program prioritas nasional

Sinergi pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional. Kabupaten Barito Kuala, melalui lima misi strategisnya, telah mengembangkan berbagai program prioritas yang secara substansial mendukung implementasi program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden. Analisis berikut menjabarkan kontribusi program prioritas Kabupaten Barito Kuala terhadap 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat (Quick Wins) Nasional.

Program prioritas Kabupaten Barito Kuala memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian swasembada pangan nasional melalui serangkaian program yang terintegrasi. Program Intensifikasi Pertanian Modern pada Misi Kedua dirancang untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dengan penerapan teknologi dan metode budidaya yang lebih efisien. Program ini secara langsung mendukung upaya nasional dalam mencapai swasembada pangan melalui optimalisasi hasil pertanian lokal. Penguatan ketahanan pangan juga diwujudkan melalui Program PUPUK SUBSIDI DAN ATM BERAS yang menjamin ketersediaan sarana produksi pertanian dan distribusi bahan pangan pokok. Program ini sejalan dengan Program Prioritas Nasional ke-12 yaitu "Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani" dan Program Hasil Terbaik Cepat ke-3 "Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional". Program Desa Peduli Stunting pada Misi Pertama yang fokus pada peningkatan status gizi masyarakat berkontribusi pada Program Hasil Terbaik Cepat ke-1 "Memberi makanan dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil", dengan memastikan

anak-anak dan ibu hamil di Barito Kuala mendapatkan asupan gizi yang memadai untuk mencegah stunting.

Misi Keempat Kabupaten Barito Kuala yaitu "Membangun Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan berbasis Digital" secara komprehensif mendukung Program Prioritas Nasional ke-3 "Reformasi politik, hukum, dan birokrasi" dan ke-4 "Pencegahan dan pemberantasan korupsi". Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas menjadi ujung tombak dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, dengan target perbaikan Indeks Persepsi Korupsi dan Indeks Persepsi Pelayanan Publik. Program ini mengimplementasikan perubahan budaya kerja dan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah praktik korupsi di tingkat daerah. Program Integrasi Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja turut mendukung reformasi birokrasi melalui pendekatan terintegrasi yang meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Sementara itu, Program Penguatan Akuntabilitas Keuangan Daerah mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang sejalan dengan upaya pencegahan korupsi di tingkat nasional.

Gambar III.7
Dukungan Program prioritas daerah Kab. Barito Kuala terhadap program prioritas nasional



Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

Upaya pemberantasan kemiskinan di Kabupaten Barito Kuala diwujudkan melalui berbagai program prioritas yang mendukung Program Prioritas Nasional ke-5 "Pemberantasan kemiskinan" dan ke-14 "Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM". Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Prasejahtera pada Misi Pertama berfokus pada penurunan tingkat kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan target peningkatan nilai tambah produk lokal hasil pemberdayaan masyarakat. Program ini sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat ke-5 "Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut". Penguatan UMKM diwujudkan melalui Program UMKM BAIMAN pada Misi Kedua yang menyediakan dukungan komprehensif bagi UMKM lokal, mencakup aspek produksi, pemasaran, dan pengelolaan usaha. Program ini berkontribusi pada pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan melalui penguatan sektor UMKM sebagai penggerak ekonomi rakyat. Program KARTU SIAP KERJA BATOLA dan Program Pengembangan Wirausaha Lokal pada Misi Kedua juga mendukung upaya pengentasan kemiskinan melalui peningkatan kualitas tenaga kerja dan pengembangan kewirausahaan masyarakat. Kedua program ini menciptakan peluang ekonomi baru yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan.

Misi Pertama Kabupaten Barito Kuala dengan fokus pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat memberikan kontribusi signifikan terhadap Program Prioritas Nasional ke-7 "Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia" dan Program Hasil Terbaik Cepat ke-2 "Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten". Program Peningkatan Status Gizi Masyarakat dan LAYANAN MOBIL KELILING mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan bagi seluruh masyarakat Barito Kuala. Terutama program LAYANAN MOBIL KELILING yang menjangkau daerah-daerah terpencil, sejalan dengan upaya nasional untuk memastikan akses kesehatan yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembangunan infrastruktur pada Misi Ketiga dengan Program Pembangunan Jalan Strategis dan Program JALANAN BETON mendukung Program Hasil Terbaik Cepat ke-7 "Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan". Kedua program ini memastikan konektivitas yang

baik antara desa dan pusat ekonomi, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi di pedesaan.

Program KARTU BEASISWA BATOLA pada Misi Pertama memberikan dukungan terhadap Program Prioritas Nasional ke-8 "Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi" dan Program Hasil Terbaik Cepat ke-4 "Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi". Program beasiswa ini memberikan kesempatan kepada masyarakat Barito Kuala untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah. Peningkatan pendidikan ini menjadi fondasi bagi pengembangan sains, teknologi, dan digitalisasi di tingkat daerah yang mendukung upaya nasional. Program Pengembangan Kompetensi ASN pada Misi Keempat juga berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di sektor publik, yang sejalan dengan Program Hasil Terbaik Cepat ke-6 "Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara". Program ini memastikan aparatur pemerintah memiliki kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dengan profesional.

Program SIMFONI PPA (SISTEM INFORMASI ONLINE PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK) pada Misi Keempat memberikan dukungan langsung terhadap Program Prioritas Nasional ke-10 "Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas". Program ini menghadirkan platform digital terintegrasi untuk penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, sekaligus menjadi sistem koordinasi antar-lembaga dalam upaya perlindungan. Digitalisasi dalam perlindungan perempuan dan anak ini meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan kasus, sehingga memperkuat upaya nasional dalam perlindungan kelompok rentan.

Misi Kelima Kabupaten Barito Kuala "Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana" memberikan kontribusi signifikan terhadap Program Prioritas Nasional ke-11 "Menjamin pelestarian lingkungan hidup". Program Pengelolaan Lingkungan Berkelanjutan mengimplementasikan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan lingkungan, dengan komponen utama rehabilitasi ekosistem kritis, pengendalian pencemaran, pengelolaan sampah berbasis masyarakat, dan pengembangan energi terbarukan. Program ini secara langsung mendukung upaya

nasional dalam pelestarian lingkungan hidup dan adaptasi perubahan iklim. Program Desa Tangguh Bencana melengkapi upaya pelestarian lingkungan dengan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana. Program ini menerapkan pendekatan berbasis masyarakat dalam pengurangan risiko bencana, yang sejalan dengan strategi nasional dalam membangun ketangguhan terhadap dampak perubahan iklim dan bencana alam.

Program prioritas pada Misi Pertama yang berfokus pada penguatan nilai keagamaan dan karakter masyarakat memberikan kontribusi terhadap Program Prioritas Nasional ke-16 "Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah" dan ke-17 "Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif, dan peningkatan prestasi olahraga". Program INSENTIF KAUM MESJID & GURU TPA dan Program Kampung Religius Barito Kuala memperkuat kelembagaan keagamaan dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan keagamaan. Kedua program ini tidak hanya memperkuat nilai-nilai religius, tetapi juga memfasilitasi dialog dan kerjasama antarkelompok agama untuk memperkuat toleransi dan harmoni sosial, yang sejalan dengan upaya nasional dalam memastikan kerukunan antar umat beragama.

Program prioritas pada Misi Kedua dengan fokus pada pengembangan agroindustri memberikan kontribusi terhadap Program Prioritas Nasional ke-15 "Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA, termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi". Program Pengembangan Sentra Agroindustri dan Program MENCIPTAKAN KAWASAN INDUSTRI KHUSUS mendukung hilirisasi produk pertanian dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. Kedua program ini menciptakan rantai nilai yang lebih panjang dari produk pertanian dan membuka lapangan kerja baru, sehingga mendukung upaya nasional dalam mewujudkan keadilan ekonomi melalui industrialisasi berbasis SDA.

Program prioritas pada Misi Keempat dengan fokus pada peningkatan akuntabilitas keuangan daerah secara tidak langsung mendukung Program Prioritas Nasional ke-2 "Penyempurnaan sistem penerimaan negara" dan Program Hasil Terbaik Cepat ke-8 "Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) ke 23 persen". Program Penguatan

Akuntabilitas Keuangan Daerah mengimplementasikan sistem keuangan terintegrasi dan penguatan pengawasan internal yang efektif. Program ini meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan potensial meningkatkan penerimaan daerah, yang pada gilirannya berkontribusi pada peningkatan penerimaan negara secara keseluruhan. Hal ini menunjukkan bahwa program prioritas Kabupaten Barito Kuala yang terangkum dalam lima misi strategis memiliki keselarasan yang kuat dalam mendukung program prioritas nasional. Dari 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat Nasional, sebagian besar mendapatkan dukungan dari program prioritas daerah Kabupaten Barito Kuala, baik secara langsung maupun tidak langsung. Keselarasan ini mengindikasikan adanya sinergi yang baik antara perencanaan pembangunan di tingkat daerah dan nasional, yang menjadi prasyarat bagi tercapainya tujuan pembangunan secara efektif dan efisien. Dengan menyelaraskan program prioritas daerahnya dengan program prioritas nasional, Kabupaten Barito Kuala tidak hanya berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional, tetapi juga memastikan bahwa pembangunan daerah mendapatkan dukungan dan sumber daya yang memadai dari pemerintah pusat. Ke depan, penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat perlu terus ditingkatkan untuk memastikan implementasi program prioritas berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan program prioritas daerah dan kontribusinya terhadap pencapaian target nasional juga perlu dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang perbaikan, sehingga sinergi pembangunan pusat dan daerah dapat terus diperkuat untuk mewujudkan Indonesia yang maju, sejahtera, dan berkeadilan.

BAB IV

PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1. Indikator program, target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Bagian ini menguraikan indikator program, target, serta pagu indikatif yang akan menjadi dasar perencanaan dan pelaksanaan program Perangkat Daerah pada periode 2025-2029. Indikator program digunakan untuk mengukur capaian setiap program, sementara target yang ditetapkan mencerminkan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Pagu indikatif program berfungsi sebagai acuan alokasi sumber daya dalam rangka memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.

Penentuan indikator, target, dan pagu indikatif program dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk prioritas pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta ketersediaan anggaran. Dengan pendekatan ini, program-program yang disusun dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Selain itu, keberhasilan pencapaian target program akan menjadi tolok ukur kinerja Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Pembagian bobot anggaran dalam dokumen ini didasarkan pada ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022 serta karakteristik wilayah Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah pertanian dan perairan. Penetapan bobot anggaran mempertimbangkan kebutuhan infrastruktur dasar yang masih perlu ditingkatkan dan keseimbangan antara urusan wajib pelayanan dasar dengan urusan lainnya. Perlu diketahui bahwa total belanja yang dialokasikan ke program perangkat daerah ini merupakan total belanja yang sudah mengeluarkan belanja pegawai dan belanja tidak terduga, sehingga anggaran tersebut sepenuhnya difokuskan untuk pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Urusan Wajib Pelayanan Dasar mendapatkan porsi terbesar dengan total bobot 66% dari total belanja APBD, melebihi ketentuan minimal 60% untuk memperkuat pelayanan dasar masyarakat. Urusan Pendidikan mendapatkan bobot tertinggi sebesar 22% dengan fokus pada peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta

peningkatan kompetensi tenaga pendidik. Urusan Kesehatan dengan bobot 17% diprioritaskan untuk peningkatan layanan kesehatan dasar dan rujukan, serta penanganan stunting yang menjadi perhatian khusus. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan bobot 13% difokuskan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, jembatan, dan drainase sebagai penunjang aktivitas ekonomi masyarakat.

Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman (5%) serta Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat (5%) mendapat perhatian untuk penyediaan air bersih, sanitasi, penataan permukiman, serta penguatan mitigasi bencana banjir dan kebakaran lahan yang sering terjadi di wilayah ini. Urusan Sosial dengan bobot 4% difokuskan pada bantuan sosial dan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Urusan Wajib Non-Pelayanan Dasar mendapatkan total bobot 15% dari total belanja, yang terdiri dari berbagai urusan strategis. Urusan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (2,0%) serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (2,0%) mendapat perhatian khusus untuk peningkatan keterampilan tenaga kerja lokal dan penguatan kapasitas pemerintahan desa. Urusan Pangan serta Kelautan dan Perikanan (2,0%) menjadi prioritas mengingat potensi wilayah dalam pengembangan produksi pangan dan perikanan.

Urusan Pilihan dengan total bobot 7% difokuskan pada pengembangan sektor unggulan daerah. Urusan Pertanian mendapat porsi terbesar (4% untuk tanaman pangan dan hortikultura, 3% untuk perkebunan dan peternakan) sebagai prioritas pengembangan pertanian padi untuk mendukung program lumbung pangan nasional dan pengembangan komoditas unggulan perkebunan serta peternakan.

Urusan Penunjang Pemerintahan dengan total bobot 12% dialokasikan untuk mendukung fungsi administratif dan koordinasi pemerintahan. Sekretariat Daerah (2,5%) berperan dalam koordinasi perangkat daerah, Keuangan (2,0%) untuk pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta Kecamatan (1,5%) untuk pelayanan publik di tingkat kecamatan.

Pembagian bobot dan alokasi anggaran ini mencerminkan strategi pembangunan Kabupaten Barito Kuala yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya,

dengan fokus utama pada pelayanan dasar masyarakat terutama pendidikan dan kesehatan, penguatan infrastruktur, serta pengembangan sektor pertanian dan perikanan sebagai sektor unggulan daerah. Implementasi pembagian anggaran ini juga memperhatikan pemenuhan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2022, dimana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total belanja APBD dan belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil/transfer.

Tabel IV-1
Target dan pagu indikatif program Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 berdasarkan urusan pemerintahan

BIDANG URUSAN / PROGRAM	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2026		2027		2028		2029		2030		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN													
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B ; 1	BB; 1	212,635,959,7 53	BB; 1	208,841,706,0 80	BB; 1	218,303,198,9 79	BB; 1	228,133,122,3 44	BB; 1	238,346,293,5 02	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	92.91	93.01	21,312,292,55 3	93.06	25,121,928,66 6	93.11	25,765,821,17 1	93.16	26,693,702,94 9	93.21	27,682,104,75 2	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	97.41	97.51	64,109,899,74 7	97.56	71,374,067,66 6	97.61	72,698,422,89 9	97.66	73,832,800,75 4	97.71	75,007,323,75 8	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	85.81	85.91	7,275,000,000	85.96	8,942,000,000	86.01	9,142,970,000	86.06	9,350,973,950	86.11	9,566,258,052	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	62.01	64.51	950,000,000	67.01	1,254,000,000	69.51	1,297,890,000	72.01	1,343,316,150	74.51	1,390,332,216	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	55.01	57.91	950,000,000	60.81	1,254,000,000	63.71	1,297,890,000	66.61	1,343,316,150	69.51	1,390,332,216	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA

	Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	71.03	72.13	750,000,000	73.23	990,000,000	74.33	1,024,436,500	75.43	1,060,512,750	76.53	1,097,630,696	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	62.40	63.90	750,000,000	65.4	990,000,000	66.9	1,024,436,500	68.4	1,060,512,750	69.9	1,097,630,696	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	62.11	69.51	2,989,270,458	73.89	3,945,837,004	79.72	4,083,941,300	87.02	4,226,879,245	95.78	4,374,820,019	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	65.05	64.69	200,000,000	65.44	264,000,000	66.19	273,240,000	66.94	282,803,400	67.69	292,701,519	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SD	76.95	77.85	333,333,333	78.75	386,666,667	79.65	394,366,667	80.55	402,336,167	81.45	410,584,599	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Indeks iklim keamanan sekolah jenjang SMP	72.52	74.02	250,000,000	75.52	330,000,000	77.02	341,550,000	78.52	353,504,250	80.02	365,876,899	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SD	71.14	72.14	333,333,333	73.14	386,666,667	74.14	394,366,667	75.14	402,336,167	76.14	410,584,599	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Indeks iklim kebinekaan sekolah jenjang SMP	70.34	71.34	250,000,000	72.34	330,000,000	73.34	341,550,000	74.34	353,504,250	75.34	365,876,899	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SD	59.78	62.28	333,333,333	64.78	386,666,667	67.28	394,366,667	69.78	402,336,167	72.28	410,584,599	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
	Indeks iklim inklusivitas sekolah jenjang SMP	59.32	61.72	250,000,000	64.12	330,000,000	66.52	341,550,000	68.92	353,504,250	71.32	365,876,899	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Tingkat Implementasi Kurikulum Merdeka	100	100	1,400,000,000	100	1,400,000,000	100	1,400,000,000	100	1,400,000,000	100	1,400,000,000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA

1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Persentase Pendidik Tersertifikasi	59.01	59.1	100,000,000	59.2	100,000,000	59.3	100,000,000	59.4	100,000,000	59.5	100,000,000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Satuan Pendidikan Berizin	100	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	100	20,000,000	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	Tingkat Literasi Bahasa dan Sastra	66.52	68.32	528,571,429	70.12	615,428,571	71.92	627,968,571	73.72	640,947,471	75.52	654,380,625	DINAS PENDIDIKAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						-		-		-		-	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	13,247,365,887	BB; 1	13,731,656,625	BB; 1	14,235,375,425	BB; 1	14,759,379,150	BB; 1	15,304,544,529	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Jumlah Kematian Ibu	-	≤10	15,321,078,779	≤9	15,881,179,301	≤8	16,463,749,110	≤7	17,069,779,201	≤6	17,700,283,544	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	10,39	9,5	11,978,741,529	8,5	12,416,654,517	7,5	12,872,135,052	6,5	13,345,957,942	5,5	13,838,915,955	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	92,097	93	13,832,884,821	94	14,338,580,675	95	14,864,563,289	96	15,411,727,400	97	15,980,988,486	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	99,113	99,2	15,003,922,689	99,3	15,552,428,774	99,4	16,122,939,017	99,5	16,716,423,899	99,6	17,333,876,400	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	98,677	98,8	12,783,830,064	98,9	13,251,175,086	99	13,737,268,366	99,1	14,242,936,786	99,2	14,769,026,396	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase pelayanan	86,194	87	11,612,792,195	88	12,037,326,986	89	12,478,892,637	90	12,938,240,286	91	13,416,138,482	DINAS KESEHATAN

	kesehatan balita sesuai standar												KAB. BARITO KUALA
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	97,739	98	15,906,597,71 3	98,2	16,488,103,35 1	98,4	17,092,936,97 4	98,6	17,722,127,45 1	98,8	18,376,727,50 1	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	84,71	85,5	14,369,610,51 1	86,5	14,894,927,72 0	87,5	15,441,318,83 1	88,5	16,009,713,29 5	89,5	16,601,062,11 3	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	90,013	90,5	10,563,737,43 8	91	10,949,921,39 7	91,5	11,351,597,71 4	92	11,769,449,67 2	92,5	12,204,176,39 2	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100	100	14,735,559,84 4	100	15,274,255,25 1	100	15,834,561,24 6	100	16,417,430,95 1	100	17,023,839,58 7	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100	100	13,930,471,31 0	100	14,439,734,68 3	100	14,969,427,93 3	100	15,520,452,10 8	100	16,093,729,14 6	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	100	100	11,173,652,99 5	100	11,582,133,94 9	100	12,007,001,73 9	100	12,448,979,09 9	100	12,908,805,51 4	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	100	100	15,589,441,62 3	100	16,159,352,82 4	100	16,752,126,88 1	100	17,368,772,14 9	100	18,010,320,35 7	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA

	Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100	100	12,491,070,59 ₇	100	12,947,713,06 ₁	100	13,422,674,43 ₄	100	13,916,762,66 ₁	100	14,430,804,41 ₈	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	-	80	14,589,180,11 ₁	82,5	15,122,524,23 ₉	85	15,677,264,28 ₀	87,5	16,254,343,88 ₉	90	16,854,728,59 ₇	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ketersediaan Obat Esensial	-	90	11,832,361,79 ₆	92	12,264,923,50 ₅	94	12,714,838,08 ₆	96	13,182,870,88 ₀	98	13,669,804,96 ₆	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif	-	80	15,003,922,68 ₉	82,5	15,552,428,77 ₄	85	16,122,939,01 ₇	87,5	16,716,423,89 ₉	90	17,333,876,40 ₀	DINAS KESEHATAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG													
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	22,014,363,85 ₀	BB; 1	22,819,154,22 ₂	BB; 1	23,656,229,98 ₇	BB; 1	24,527,015,07 ₅	BB; 1	25,432,966,42 ₆	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	54,283	58	11,753,431,54 ₇	62	12,183,107,76 ₃	66	12,630,021,09 ₅	70	13,094,931,77 ₇	74	13,578,617,66 ₈	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

	Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	-	10	10,820,619,520	20	11,216,194,448	30	11,627,638,468	40	12,055,651,478	50	12,500,949,599	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	74,118	76	11,380,306,736	78	11,796,342,437	80	12,229,068,044	82	12,679,219,658	84	13,147,550,440	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
	Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	-	75	10,634,057,114	77,5	11,022,811,785	80	11,427,161,943	82,5	11,847,795,418	85	12,285,415,985	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	73,17	75	11,566,869,142	77	11,989,725,100	79	12,429,544,570	81	12,887,075,718	83	13,363,084,054	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Pengurangan Sampah Regional	-	20	11,007,181,925	25	11,409,577,111	30	11,828,114,994	35	12,263,507,538	40	12,716,483,213	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	78,758	80	11,193,744,331	82	11,602,959,774	84	12,028,591,519	86	12,471,363,598	88	12,932,016,827	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Genangan yang Tertangani	-	60	10,447,494,70 ₉	65	10,829,429,12 ₃	70	11,226,685,41 ₈	75	11,639,939,35 ₈	80	12,069,882,37 ₁	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	100	100	10,820,619,52 ₀	100	11,216,194,44 ₈	100	11,627,638,46 ₈	100	12,055,651,47 ₈	100	12,500,949,59 ₉	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan Gedung Hijau	-	15	11,380,306,73 ₆	20	11,796,342,43 ₇	25	12,229,068,04 ₄	30	12,679,219,65 ₈	35	13,147,550,44 ₀	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	67,5	70	10,634,057,11 ₄	72,5	11,022,811,78 ₅	75	11,427,161,94 ₃	77,5	11,847,795,41 ₈	80	12,285,415,98 ₅	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	74,716	76	11,007,181,92 ₅	78	11,409,577,11 ₁	80	11,828,114,99 ₄	82	12,263,507,53 ₈	84	12,716,483,21 ₃	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	100	100	11,753,431,54 ₇	100	12,183,107,76 ₃	100	12,630,021,09 ₅	100	13,094,931,77 ₇	100	13,578,617,66 ₈	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA

1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	-	14	10,260,932,30 3	12	10,636,046,46 0	10	11,026,208,89 2	8	11,432,083,29 8	7	11,854,348,75 8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	-	80	9,887,807,492	82,5	10,249,281,13 4	85	10,625,255,84 2	87,5	11,016,371,17 8	90	11,423,281,53 0	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN				-		-		-		-		-	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	10,001,180,03 1	BB; 1	10,366,798,29 0	BB; 1	10,747,083,88 4	BB; 1	11,142,683,70 7	BB; 1	11,554,259,64 9	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	100	100	8,467,063,019	100	8,776,597,778	100	9,098,549,995	100	9,433,467,337	100	9,781,910,164	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	100	100	8,969,346,419	100	9,297,243,409	100	9,638,294,486	100	9,993,079,806	100	10,362,192,97 0	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	-	25,51	9,830,403,675	44,13	10,189,778,77 6	62,75	10,563,570,75 7	81,38	10,952,415,46 7	100	11,356,963,49 5	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA

	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	13,786	20	8,825,836,876	25	9,148,487,514	30	9,484,081,775	35	9,833,190,529	40	10,196,397,88 ₃	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan	-	3,06	8,538,817,791	5,29	8,850,975,725	7,52	9,175,656,351	9,76	9,513,411,975	11,99	9,864,807,707	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	57,996	62	9,184,610,733	66	9,520,377,251	70	9,869,613,554	74	10,232,913,72 ₁	78	10,610,885,60 ₁	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
1.04.06 - PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Pelaku Usaha Perumahan Tersertifikasi	-	75	8,467,063,019	80	8,776,597,778	85	9,098,549,995	90	9,433,467,337	95	9,781,910,164	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				-		-		-		-		-	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	4,893,675,406	BB; 1	5,072,576,004	BB; 1	5,258,653,472	BB; 1	5,452,224,342	BB; 1	5,653,612,484	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang	100	100	5,123,290,674	100	5,310,585,435	100	5,505,393,811	100	5,708,047,185	100	5,918,884,624	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA

	dilaksanakan oleh Satpol PP												
	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	100	4,276,584,372	100	4,432,925,657	100	4,595,538,811	100	4,764,700,451	100	4,940,693,608	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	Jumlah PPNS pada Satpol PP	-	5	4,829,096,112	6	5,005,635,851	7	5,189,257,751	8	5,380,274,167	9	5,579,004,695	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	Presentase SOP yang tersedia dalam penegakan Perda dan perkada serta Penyelenggaraan Tibumtranmas	-	90	5,230,922,831	92,5	5,422,152,356	95	5,621,053,344	97,5	5,827,964,143	100	6,043,230,940	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	Persentase Jumlah Sarana prasarana minimal yang digunakan sebagai penunjang dalam penegakan perda dan perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat	-	80	4,671,235,615	85	4,842,004,367	90	5,019,623,769	95	5,204,395,963	100	5,396,630,099	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
	Persentase jumlah anggota Satpol PP yang telah mengikuti diklat dasar	-	85	4,577,954,412	87,5	4,745,313,036	90	4,919,385,506	92,5	5,100,467,933	95	5,288,863,292	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	100	5,345,730,466	100	5,541,157,072	100	5,744,423,514	100	5,955,875,564	100	6,175,867,010	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA

	Persentase warga negara dan aparaturnya yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	100	4,212,005,078	100	4,365,985,505	100	4,526,143,091	100	4,692,750,277	100	4,866,085,819	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	100	4,979,781,132	100	5,161,829,541	100	5,351,181,099	100	5,548,157,908	100	5,753,089,537	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
	Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	100	90	5,510,766,440	92,5	5,712,226,350	95	5,921,768,132	97,5	6,139,748,233	100	6,366,531,361	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
	Persentase penanganan pra bencana	100	85	4,441,620,347	87,5	4,603,994,936	90	4,772,883,430	92,5	4,948,573,120	95	5,131,357,959	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
	Persentase penanganan pasca bencana	100	85	4,742,990,386	87,5	4,916,382,315	90	5,096,730,124	92,5	5,284,340,601	95	5,479,527,643	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	-	80	4,118,723,875	85	4,269,294,173	90	4,425,904,828	95	4,588,822,247	100	4,758,319,012	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KAB. BARITO KUALA
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	4,800,394,203	100	4,975,884,672	100	5,158,415,209	100	5,348,296,312	100	5,545,845,678	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL				-		-		-		-		-	

1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	9,930,860,355	BB; 1	10,293,907,902	BB; 1	10,671,519,655	BB; 1	11,064,337,961	BB; 1	11,473,020,056	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang Meningkatkan Kapasitasnya	-	70	2,755,383,220	75	2,856,113,175	80	2,960,884,066	85	3,069,874,116	90	3,183,265,680	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	3,272,017,574	100	3,391,634,396	100	3,516,049,829	100	3,645,475,513	100	3,780,127,995	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	2,812,787,037	100	2,915,615,533	100	3,022,569,151	100	3,133,829,827	100	3,249,583,715	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	3,501,632,842	100	3,629,643,827	100	3,762,790,167	100	3,901,298,356	100	4,045,400,135	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	100	3,099,806,122	100	3,213,127,322	100	3,330,994,574	100	3,453,608,381	100	3,581,173,890	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase sarana prasarana yang disediakan sesuai standar untuk pelayanan sosial di luar panti	-	80	3,329,421,391	85	3,451,136,753	90	3,577,734,913	95	3,709,431,224	100	3,846,446,030	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase Pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di	-	75	3,559,036,659	80	3,689,146,185	85	3,824,475,252	90	3,965,254,067	95	4,111,718,171	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA

	luar panti sesuai standar												
	Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	-	85	3,042,402,305	87,5	3,153,624,964	90	3,269,309,490	92,5	3,389,652,670	95	3,514,855,855	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	-	80	3,386,825,208	82,5	3,510,639,111	85	3,639,419,998	87,5	3,773,386,935	90	3,912,764,065	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100	100	2,640,575,586	100	2,737,108,460	100	2,837,513,897	100	2,941,962,695	100	3,050,629,610	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	-	60	3,157,209,939	65	3,272,629,680	70	3,392,679,659	75	3,517,564,092	80	3,647,491,925	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Jumlah pemutahiran data fakir miskin dan kelompok rentan yang dilakukan selama satu tahun	-	2	3,673,844,293	2	3,808,150,900	2	3,947,845,422	2	4,093,165,488	2	4,244,354,241	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap	100	100	2,927,594,671	100	3,034,620,249	100	3,145,939,320	100	3,261,741,249	100	3,382,219,785	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA

	darurat bencana kabupaten/kota												
	Persentase sarana prasarana bagi korban bencana kabupaten/kota yang disediakan sesuai standar	-	90	3,214,613,756	92,5	3,332,132,038	95	3,454,364,744	97,5	3,581,519,802	100	3,713,809,960	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
	Persentase pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana kabupaten/kota pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai standar	-	85	3,099,806,122	87,5	3,213,127,322	90	3,330,994,574	92,5	3,453,608,381	95	3,581,173,890	DINAS SOSIAL KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				-		-		-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA				-		-		-		-		-	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	5,693,023,559	BB; 1	5,901,146,336	BB; 1	6,117,618,276	BB; 1	6,342,807,614	BB; 1	6,577,091,122	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100	100	3,427,007,880	100	3,552,290,762	100	3,682,599,557	100	3,818,155,932	100	3,959,186,690	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA

2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	4,354	6	3,601,371,974	8	3,733,029,173	10	3,869,968,002	12	4,012,421,404	15	4,160,627,721	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUAL
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	3.840.435.85 4,70	4.000.000. 000	3,919,963,159	4.200.000. 000	4,063,267,259	4.400.000. 000	4,212,320,222	4.600.000. 000	4,367,375,598	4.800.000. 000	4,528,692,816	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUAL
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	87,669	89	3,157,927,487	90,5	3,273,373,459	92	3,393,450,723	93,5	3,518,363,538	95	3,648,320,901	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUAL
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	78,049	80	3,579,845,543	82	3,710,715,789	84	3,846,836,095	86	3,988,438,012	88	4,135,758,458	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUAL
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK				-		-		-		-		-	
2.08.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	2,202,871,480	BB; 1	2,283,402,981	BB; 1	2,367,165,126	BB; 1	2,454,300,400	BB; 1	2,544,954,593	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA

2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	-	92	853,164,231	93	884,353,793	94	916,794,572	95	950,541,751	96	985,651,795	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
	Persentase ARG Daerah	12,103	15	907,697,858	17,5	940,881,033	20	975,395,402	22,5	1,011,299,676	25	1,048,653,929	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	1,021,070,396	100	1,058,398,190	100	1,097,223,444	100	1,137,612,205	100	1,179,632,048	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Indeks Kualitas Keluarga	-	75	826,614,966	77,5	856,833,953	80	888,265,220	82,5	920,962,235	85	954,979,704	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA

2.08.05 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase Data Terpilah Gender	-	70	938,552,409	75	972,863,550	80	1,008,551,135	85	1,045,675,871	90	1,084,299,872	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	-	85	885,453,878	87,5	917,823,869	90	951,492,432	92,5	986,516,838	95	1,022,955,690	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100	100	776,386,626	100	804,769,389	100	834,290,771	100	865,000,988	100	896,951,423	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				-		-		-		-		-	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	10,372,869,746	BB; 1	10,752,076,057	BB; 1	11,146,494,808	A : 1	11,556,796,934	A : 1	11,983,668,926	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	-	80	5,151,992,583	82,5	5,340,336,614	85	5,536,236,353	87,5	5,740,025,040	90	5,952,043,642	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA

2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	96,632	97	4,425,834,297	97,5	4,587,631,788	98	4,755,920,031	98,5	4,930,985,299	99	5,113,120,499	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
	Skor Pola Pangan Harapan Kabupaten/Kota	90.43	91	5,358,646,324	91.20	5,554,545,102	91.45	5,758,302,658	91.70	5,970,265,599	91.90	6,190,788,568	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	11.94	10.45	4,273,714,182	9.26	4,429,950,539	8.07	4,592,454,557	6.88	4,761,502,666	5.69	4,937,377,706	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu keamanan pangan	75	78	4,790,348,535	80	4,965,471,760	82	5,147,620,319	84	5,337,104,063	85	5,534,240,021	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN				-		-		-		-		-	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENKGETA TANAH GARAPAN	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	-	50	947,880,530	60	982,532,683	70	1,018,574,961	80	1,056,068,674	90	1,095,076,553	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Ganti Kerugian yang Diselesaikan	-	80	1,112,916,504	85	1,153,601,962	90	1,195,919,580	95	1,239,941,342	100	1,285,740,904	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA

2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Luas tanah yang ditetapkan menjadi Tanah Objek Landreform dari Tanah Kelebihan maksimum/Absentee dan jumlah subjek yang ditetapkan pada tahun anggaran	100	100	462,818,275	100	479,737,760	100	497,335,995	100	515,642,918	100	534,689,157	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
	Luas tanah potensi TORA untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah dan jumlah potensi subjek penerima manfaat yang dapat ditindaklanjuti dengan penataan akses melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat pada tahun anggaran	100	100	517,351,901	100	536,265,000	100	555,936,826	100	576,400,843	100	597,691,291	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
	Luas tanah yang ditetapkan ganti kerugian untuk ditindaklanjuti kegiatan redistribusi tanah pada tahun anggaran	100	100	583,366,291	100	604,692,711	100	626,874,673	100	649,949,911	100	673,957,031	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	100	100	482,909,611	100	500,563,585	100	518,925,775	100	538,027,417	100	557,900,470	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA

2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	Luas Tanah Ulayat yang Ditetapkan	-	80	542,466,071	85	562,297,281	90	582,924,051	95	604,381,467	100	626,705,431	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	-	70	599,152,341	75	621,055,860	80	643,838,072	85	667,537,731	90	692,194,490	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	-	75	440,574,296	80	456,680,596	85	473,433,025	90	490,860,080	95	508,990,919	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	96,381	97	503,718,495	97,5	522,133,190	98	541,286,618	98,5	561,211,362	99	581,940,757	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	-	85	452,772,607	87,5	469,324,847	90	486,541,106	92,5	504,450,669	95	523,083,501	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				-		-		-		-		-	
2.11.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	1,416,439,186	BB; 1	1,468,220,679	BB; 1	1,522,079,465	BB; 1	1,578,107,163	BB; 1	1,636,397,514	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA

2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Dokumen Lingkungan yang Tersusun	-	80	1,208,350,350	85	1,252,524,632	90	1,298,471,033	95	1,346,267,711	100	1,395,994,637	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	64,02	66	1,367,645,942	68	1,417,643,675	70	1,469,647,143	72	1,523,744,809	75	1,580,027,184	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Indeks Keanekaragaman Hayati	-	70	1,257,143,594	72,5	1,303,101,636	75	1,350,903,355	77,5	1,400,630,066	80	1,452,364,967	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Limbah B3 yang Dikelola	-	80	1,321,722,888	85	1,370,041,789	90	1,420,299,076	95	1,472,580,240	100	1,526,972,756	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	-	70	2,558,746	75	2,652,317,600	80	2,749,612,651	85	2,850,825,807	90	2,956,126,410	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Masyarakat Peduli Lingkungan	-	70	1,282,975,312	75	1,329,877,697	80	1,378,661,643	85	1,429,410,135	90	1,482,208,082	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Jumlah Penghargaan Lingkungan yang Diberikan	-	3	1,343,249,320	4	1,392,355,173	5	1,443,430,982	6	1,496,563,632	7	1,551,842,019	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	-	90	1,229,876,781	92,5	1,274,838,016	95	1,321,602,940	97,5	1,370,251,103	100	1,420,863,900	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA

2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	75,326	77	1,364,775,751	79	1,414,668,557	81	1,466,562,889	83	1,520,547,023	85	1,576,711,282	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL				-		-		-		-		-	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	848,858,945	BB; 1	879,891,116	BB; 1	912,168,190	BB; 1	945,745,073	BB; 1	980,677,943	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	91,50%	92,00%	694,586,187	93,00%	719,978,530	95,00%	746,389,525	97,00%	773,864,100	100%	802,448,224	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	6,50%	30,00%	817,286,846	32,00%	847,164,819	34,00%	878,241,394	36,00%	910,569,432	38,00%	944,203,023	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	57,84%	100%	926,354,098	100%	960,219,299	100%	995,443,055	100%	1,032,085,282	100%	1,070,207,290	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
	Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	34,90%	100%	771,363,792	100%	799,562,933	100%	828,893,326	100%	859,404,863	100%	891,148,595	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
	Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	80,00%	100%	734,768,859	100%	761,630,180	100%	789,569,084	100%	818,633,098	100%	848,870,848	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA

	Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	95,93%	100%	901,957,476	100%	934,930,797	100%	969,226,894	100%	1,004,904,105	100%	1,042,022,125	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Pemanfaatan SIAK	100%	100%	858,187,065	100%	889,560,249	100%	922,192,016	100%	956,137,876	100%	991,454,623	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	100%	100%	622,113,868	100%	644,856,803	100%	668,512,106	100%	693,120,015	100%	718,721,704	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				-		-		-		-		-	
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	3,714,026,965	BB; 1	3,849,802,551	BB; 1	3,991,024,981	BB; 1	4,137,934,486	BB; 1	4,290,776,865	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase peningkatan status desa mandiri	79,245	81	3,260,536,810	83	3,379,733,924	85	3,503,712,812	87	3,632,684,371	90	3,766,864,388	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
	Persentase Fasilitas Penataan Desa	100	100	3,897,719,180	100	4,040,210,096	100	4,188,417,252	100	4,342,592,760	100	4,502,994,577	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
	Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	-	80	3,493,022,269	85	3,620,718,473	90	3,753,537,405	95	3,891,705,000	100	4,035,452,430	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA

2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Jumlah Kerjasama Antar Desa	-	10	3,366,733,872	12	3,489,813,286	15	3,617,830,218	18	3,751,002,436	20	3,889,552,753	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Tata Kelola Baik	-	75	3,966,603,760	80	4,111,612,925	85	4,262,439,354	90	4,419,339,613	95	4,582,576,219	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	-	80	3,056,753,260	85	3,168,500,554	90	3,284,730,761	95	3,405,641,598	100	3,531,435,364	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	-	75	3,946,512,424	80	4,090,787,100	85	4,240,849,574	90	4,396,955,115	95	4,559,364,907	DINAS PEMBERDAYAA N MASYARAKAT DAN DESA KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA				-		-		-		-		-	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2,28	2,25	1,136,595,578	2,2	1,178,146,685	2,15	1,221,364,677	2,1	1,266,323,073	2,05	1,313,097,093	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAA N PEREMPUAN DAN PERLINDUNGA N ANAK KAB. BARITO KUALA

	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	-	35	1,331,768,556	33	1,380,454,701	31	1,431,093,965	29	1,483,772,490	27	1,538,578,412	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	84,706	86	1,178,213,346	87,5	1,221,285,894	89	1,266,086,364	90,5	1,312,690,963	92	1,361,177,669	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	7,238	6,5	1,060,535,521	6	1,099,306,061	5,5	1,139,631,940	5	1,181,581,756	4,5	1,225,225,697	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	-	75	1,232,029,424	77,5	1,277,069,355	80	1,323,916,131	82,5	1,372,649,442	85	1,423,350,826	DINAS PENGENDALIA N PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				-		-		-		-		-	

2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B ; 1	B ; 1	3,081,149,882	B ; 1	3,193,789,056	BB; 1	3,310,946,922	BB; 1	3,432,822,775	BB; 1	3,559,620,529	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,89	0,92	2,715,200,548	0,94	2,814,461,525	0,96	2,917,704,507	0,98	3,025,105,119	1	3,136,843,056	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase kelengkapan Jalan yang telah terpasang terhadap kondisi ideal pada jalan Kabupaten/Kota	0,37	45	2,921,854,289	50	3,028,670,013	55	3,139,770,812	60	3,255,345,678	65	3,375,587,982	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	-	70	2,847,229,327	75	2,951,316,948	80	3,059,580,202	85	3,172,203,254	90	3,289,374,536	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
2.15.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Tingkat Keselamatan Pelayaran	-	85	2,785,520,224	87,5	2,887,351,913	90	2,993,268,736	92,5	3,103,450,864	95	3,218,082,649	DINAS PERHUBUNGAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				-		-				-		-	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	1,918,005,038	BB; 1	1,988,122,531	BB; 1	2,061,052,893	BB; 1	2,136,920,186	BB; 1	2,215,851,345	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	100	1,735,030,371	100	1,798,458,765	100	1,864,431,685	100	1,933,061,358	100	2,004,462,608	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA

2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	-	85	1,859,883,673	87,5	1,927,876,393	90	1,998,596,745	92,5	2,072,165,029	95	2,148,704,334	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	10,127	20	1,662,558,052	30	1,723,337,038	40	1,786,554,266	50	1,852,317,273	60	1,920,736,089	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				-		-		-		-		-	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B; 1	BB; 1	2,961,319,414	BB; 1	3,069,577,884	BB; 1	3,182,179,308	BB; 1	3,299,315,229	BB; 1	3,421,181,631	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2.17.02 - PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase Koperasi Simpan Pinjam Berizin	-	80	675,929,946	85	700,640,263	90	726,341,872	95	753,078,494	100	780,894,862	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi yang Diawasi	-	75	809,393,821	80	838,983,245	85	869,759,694	90	901,775,522	95	935,084,294	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase KSP/USP Sehat	62,5	65	642,922,751	67,5	666,426,408	70	690,872,949	72,5	716,303,960	75	742,761,992	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIA N DAN PERDAGANGAN

													KAB. BARITO KUALA
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Pengurus Koperasi Terlatih	-	70	754,142,647	75	781,712,226	80	810,387,800	85	840,218,150	90	871,253,185	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Koperasi Aktif	-	70	708,219,593	75	734,110,340	80	761,039,733	85	789,053,581	90	818,198,757	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase UMKM yang Diberdayakan	-	60	835,943,086	65	866,503,086	70	898,289,046	75	931,355,038	80	965,756,385	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	-	5	598,434,793	7,5	620,312,080	10	643,067,008	12,5	666,738,285	15	691,365,515	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	48,825	52	731,181,120	56	757,911,283	60	785,713,767	64	814,635,866	68	844,725,971	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
	Pertumbuhan Wirausaha	-	8	649,380,681	10	673,120,423	12	697,812,521	14	723,498,978	16	750,222,771	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL													
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B; 1	BB; 1	1,070,581,189	BB; 1	1,109,718,973	BB; 1	1,150,426,830	BB; 1	1,192,774,006	BB; 1	1,236,831,353	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	6,373	7	952,903,364	7	987,739,140	7	1,023,972,406	7	1,061,664,799	7	1,100,879,381	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
	Realisasi Total terhadap Target Investasi	33	80	1,124,397,267	85	1,165,502,434	90	1,208,256,597	95	1,252,732,484	100	1,299,004,511	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Investor yang Tertarik	8	10	899,804,833	12	932,699,459	15	966,913,703	18	1,002,505,766	20	1,039,535,199	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin Investasi	5	5	1,032,551,160	5	1,070,298,661	5	1,109,560,461	5	1,150,403,347	5	1,192,895,655	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kepatuhan Investor	80	85	1,135,878,030	87,5	1,177,402,905	90	1,220,593,614	92,5	1,265,523,627	95	1,312,268,118	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA

2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data Investasi Terintegrasi	75	80	959,361,293	90	994,433,155	95	1,030,911,978	100	1,068,859,816	100	1,108,340,160	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				-		-		-		-		-	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	3,747,392,934	BB; 1	3,884,388,296	BB; 1	4,026,879,436	BB; 1	4,108,743	BB; 1	4,329,324,223	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	1,693	3	1,860,601,221	4,5	1,928,620,173	6	1,999,367,808	7,5	2,072,964,475	9	2,149,533,310	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	10	12	1,684,084,484	15	1,745,650,422	18	1,809,686,173	20	1,876,300,664	25	1,945,605,352	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Persentase Gugus Depan Aktif	4,459	50	1,846,967,815	60	1,914,488,363	70	1,984,717,601	80	2,057,774,994	90	2,133,782,776	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				-		-		-		-		-	
2.20.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	70,94	71,5	-	72,2	-	73,4	-	74,1	-	75	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

													KAB. BARITO KUALA
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.31	2.6	-	2.8	-	3.0	-	3.4	-	3.6	-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				-		-		-		-		-	
2.21.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	70,94	71,5	1,680,496,745	72,2	1,741,931,525	73,4	1,805,830,855	74,1	1,872,303,432	75	1,941,460,475	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	60,93	65	1,907,241,822	70	1,976,965,838	75	2,049,486,940	80	2,124,928,490	85	2,203,416,713	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				-		-		-		-		-	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	100	100	1,095,695,359	100	1,135,751,255	100	1,177,414,054	100	1,220,754,629	100	1,265,845,493	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase Jumlah Tenaga Kebudayaan yang memperoleh sertifikasi profesi dibidang kebudayaan	-	60	1,266,471,714	65	1,312,770,769	70	1,360,927,181	75	1,411,022,869	80	1,463,141,647	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB. BARITO KUALA
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase Situs Sejarah yang Terpelihara	-	80	1,068,428,545	85	1,107,487,635	90	1,148,113,639	95	1,190,375,666	100	1,234,344,427	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA

													KAB BARITO KUALA
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	-	75	1,301,631,552	80	1,349,215,963	85	1,398,709,296	90	1,450,195,741	95	1,503,761,444	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	Jumlah Pengunjung Museum	-	5000	1,228,441,686	6000	1,273,350,457	7000	1,320,060,813	8000	1,368,652,210	10000	1,419,205,949	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN													
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B ; 1	BB; 1	1,854,860,839	BB; 1	1,922,669,937	BB; 1	1,993,199,300	BB; 1	2,066,568,904	BB; 1	2,142,901,506	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	68,24	70	886,888,974	72	919,311,428	74	953,034,559	76	988,115,731	78	1,024,613,641	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	76,57	78	937,834,862	80	972,119,771	82	1,007,780,071	84	1,044,876,424	86	1,083,470,897	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	-	10	852,087,910	12	883,238,124	15	915,637,976	18	949,342,582	20	984,408,332	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				-		-		-		-		-	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	75,43	78	859,622,161	80	891,047,808	82	923,734,144	84	957,736,769	86	993,112,574	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	Persentase Arsip Vital yang Terlindungi	100	100	903,392,571	100	936,418,356	100	970,769,021	100	1,006,502,998	100	1,043,680,076	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
2.24.04 - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	Persentase Layanan Arsip Tepat Waktu	-	90	880,789,818	92,5	912,989,303	95	946,480,519	97,5	981,320,437	100	1,017,567,350	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				-		-		-		-		-	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				-		-		-		-		-	
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap	9,176.61	9,364	6,124,987,282	9,366	6,348,901,579	9,368	6,581,798,539	9,37	6,824,074,338	9,372	7,076,134,335	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budi Daya	11,94	12,04	5,430,401,096	12,09	5,628,923,049	12,14	5,835,409,014	12,19	6,050,210,238	12,24	6,273,686,112	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	-	80	5,892,501,823	85	6,107,917,030	90	6,331,973,946	95	6,565,053,709	100	6,807,546,294	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA

3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Angka Konsumsi Ikan	67,86	67,93	5,582,521,211	67,99	5,786,604,298	68,06	5,998,874,488	68,13	6,219,692,871	68,2	6,449,428,905	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				-		-		-		-		-	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	-	5	689,922,127	7,5	715,143,963	10	741,377,612	12,5	768,667,699	15	797,059,883	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	-32,5	5	773,516,435	10	801,794,272	15	831,206,517	20	861,803,202	25	893,635,522	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	-	30	663,372,861	35	687,624,123	40	712,848,260	45	739,088,182	50	766,387,792	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi	-	100	712,166,106	150	738,201,127	200	765,280,582	250	793,450,537	300	822,758,122	DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, BUDAYA DAN PARIWISATA KAB BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				-		-		-		-		-	
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	A ; 1	A ; 1	8,769,868,154	A ; 1	9,090,472,715	A ; 1	9,423,938,817	A ; 1	9,770,833,711	A ; 1	10,131,737,798	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA

3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan produksi tanaman pangan	354,674	358615	9,583,567,261	360674	9,933,918,637	362801	10,298,324,893	364997	10,677,405,911	367249	11,071,795,945	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
	Peningkatan Produksi Hortikultura	0.02	0.69	8,297,721,759	0.70	8,601,065,822	0.71	8,916,578,995	0.72	9,244,797,990	0.73	9,586,271,960	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	-	8	9,955,256,977	10	10,319,196,404	12	10,697,735,816	14	11,091,519,138	16	11,501,205,221	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
	Peningkatan Produksi komoditas Perkebunan	-	6	8,508,680,787	8	8,819,736,987	10	9,143,271,682	12	9,479,835,227	14	9,829,990,739	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveyance penyakit dari 5 PHMS)	-199	95	8,428,315,443	96	8,736,433,686	97	9,056,912,563	98	9,390,297,232	99	9,737,145,490	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang Berfungsi	75	80	8,860,279,166	85	9,184,188,929	90	9,521,092,825	95	9,871,563,955	100	10,236,188,704	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA

3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Hewan Ternak yang Sehat	-	90	9,694,069,609	92,5	10,048,460,676	95	10,417,068,681	97,5	10,800,520,654	100	11,199,458,162	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	115	115	9,221,923,214	116	9,559,053,783	116	9,909,708,859	116	10,274,484,933	117	10,653,992,324	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
3.27.06 - PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Usaha Pertanian Berizin	-	75	9,412,790,906	80	9,756,899,123	85	10,114,811,766	90	10,487,137,671	95	10,874,499,790	DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN KAB. BARITO KUALA
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Petani yang Terlayani Penyuluhan	88.62	100	9,724,206,613	100	10,079,699,414	100	10,449,453,350	100	10,834,097,402	100	11,234,230	DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN				-		-		-		-		-	
3.30.02 - PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	-	500.000.000	1,093,542,715	550.000.000	1,133,519,916	600.000.000	1,100,864	650.000.000	1,218,356,290	700.000.000	1,263,358,567	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Pasar Rakyat yang Revitalisasi	-	60	1,042,596,828	65	1,080,711,574	70	1,120,355,351	75	1,161,595,597	80	1,204,501,311	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA

3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Tingkat Stabilitas Harga Bahan Pokok	41,505	50	924,919,003	60	958,731,740	70	993,900,927	80	1,030,486,390	90	1,068,549,339	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Daerah	-	100.000.000	1,072,733,832	120.000.000	1,111,950,312	140.000.000	1,152,740,021	160.000.000	1,195,172,345	180.000.000	1,239,318,279	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	100	962,231,484	100	997,408,273	100	1,033,996,233	100	1,072,057,602	100	1,111,656,062	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Produk Dalam Negeri di Pasar Modern	-	70	1,092,107,620	75	1,132,032,357	80	1,173,558,737	85	1,216,757,397	90	1,261,700,616	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				-		-		-		-		-	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	72,3	75	1,244,945,283	77,5	1,290,457,385	80	1,337,795,275	82,5	1,387,039,477	85	1,438,272,384	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	6,993	8	1,142,335,960	10	1,184,096,921	12	1,227,533,186	14	1,272,718,644	16	1,319,728,897	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA

	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah menindaklanjuti hasil rekomendasi pengawasan dibandingkan dengan jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang telah dilakukan pengawasan	100	100	1,165,297,487	100	1,207,897,864	100	1,252,207,220	100	1,298,300,928	100	1,346,256,111	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang memiliki tingkat kepatuhan minimal 'Baik' dibandingkan seluruh jumlah Perusahaan Industri dan Kawasan Industri yang sudah dilakukan pembinaan	-	70	1,279,387,573	75	1,326,158,800	80	1,374,806,326	85	1,425,412,903	90	1,478,063,205	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	125	100	1,139,465,769	100	1,181,121,803	100	1,224,448,932	100	1,269,520,859	100	1,316,412,995	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. BARITO KUALA
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				-		-		-		-		-	
3.32.02 - PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	100	1	1,747,946,230	1	1,811,846,795	1	1,878,310,830	1	1,947,451,393	1	2,019,384,166	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA

3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	-	1	1,907,241,822	1	1,976,965,838	1	2,049,486,940	1	2,124,928,490	1	2,203,416,713	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
3.32.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Kawasan Transmigrasi Berkembang	-	60	1,667,580,886	65	1,728,543,495	70	1,791,951,711	75	1,857,913,397	80	1,926,538,917	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KAB. BARITO KUALA
UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN				-		-		-		-		-	
SEKRETARIAT DAERAH				-		-		-		-		-	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	12,295,180,071	BB; 1	12,744,661,265	BB; 1	13,212,174,082	BB; 1	13,698,513,798	A ; 1	14,204,494,123	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Indeks Kesejahteraan Masyarakat	34,47	70	11,800,072,148	72,5	12,231,453,429	75	12,680,140,226	77,5	13,146,895,792	80	13,632,501,071	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,02	5,5	11,782,133,456	6	12,212,858,942	6,5	12,660,863,637	7	13,126,909,633	7,5	13,611,776,685	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
SEKRETARIAT DPRD				-		-		-		-		-	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B; 1	BB; 1	2,421,723,533	BB; 1	2,510,255,720	BB; 1	2,602,339,511	BB; 1	2,698,131,548	BB; 1	2,797,792,102	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	-	100	2,451,142,989	100	2,540,750,679	100	2,633,953,117	100	2,730,908,849	100	2,831,780,095	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA
	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	-	100	2,302,610,613	100	2,386,788,328	100	2,474,342,961	100	2,565,423,448	100	2,660,182,179	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO KUALA
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				-		-		-		-		-	
PERENCANAAN				-		-		-		-		-	

5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	8,209,463,390	BB; 1	8,509,580,947	BB; 1	8,821,738,178	A; 1	9,146,466,085	A; 1	9,484,307,982	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	70,94	71,5	8,209,463,390	72,2	8,509,580,947	73,4	8,821,738,178	74,1	9,146,466,085	75	9,484,307,982	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	100	85	3,864,036,646	87,5	5,193,307,801	90	4,963,203,602	92,5	5,581,992,105	95	5,788,173,463	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
	Persentase Target Kinerja Sasaran Daerah yang Tercapai	85	90	3,715,419,852	95	2,663,234,769	98	3,181,540,771	100	2,862,560,054	100	2,968,294,084	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Tingkat Sinkronisasi Perencanaan	85	90	6,955,189,987	95	7,209,454,429	98	7,473,919,077	100	7,749,033,805	100	8,035,258,917	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
KEUANGAN						-		-		-		-	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	3,292,108,910	BB; 1	3,412,460,221	BB; 1	3,537,639,608	BB; 1	3,667,860,012	BB; 1	3,803,339,308	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA

5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	16,2	15	3,094,065,741	14	3,207,177,086	13	3,324,826,066	12	3,447,212,810	11	3,574,542,087	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	5,882	7	3,487,281,888	8,5	3,614,768,237	10	3,747,368,896	11,5	3,885,309,428	13	4,028,820,627	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	-	90	2,850,099,518	92,5	2,954,292,066	95	3,062,664,456	97,5	3,175,401,039	100	3,292,690,438	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA
	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	100	100	3,404,046,353	100	3,528,489,818	100	3,657,925,523	100	3,792,573,648	100	3,932,659,476	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA
	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	-	25	2,953,426,389	27,5	3,061,396,310	30	3,173,697,608	32,5	3,290,521,318	35	3,412,062,901	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA
	Persentase Penurunan SILPA	-	10	3,627,921,239	15	3,760,549,014	20	3,898,497,354	25	4,042,000,920	30	4,191,299,813	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase BMD yang Tersertifikasi	-	80	2,729,551,502	85	2,829,337,114	90	2,933,125,778	95	3,041,094,046	100	3,153,422,565	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KAB BARITO KUALA
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	70,94	71,5	8,230,757,917	72,2	9,039,015,095	73,4	9,927,357,061	74,1	10,903,755,246	75	11,976,976,373	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA

5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Target Pendapatan yang Tercapai	72,3	75	3,263,407,001	77,5	3,382,709,042	80	3,506,797,066	82,5	3,635,882,157	85	3,770,180,290	BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KAB. BARITO KUALA
KEPEGAWAIAN				-		-		-		-		-	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	BB; 1	BB; 1	3,438,632,153	BB; 1	3,564,339,989	BB; 1	3,695,090,787	BB; 1	3,831,106,964	BB; 1	3,972,616,092	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB BARITO KUALA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	-	3,5	3,287,086,076	4	3,407,253,764	4,2	3,532,242,163	4,4	3,662,263,887	4,5	3,797,536,480	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB BARITO KUALA
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN				-		-		-		-		-	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	125	80	1,745,076,039	85	1,808,871,678	90	1,875,226,575	95	1,944,253,607	100	2,016,068,264	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KAB BARITO KUALA
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				-		-		-		-		-	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	-	75	1,174,266,833	80	1,217,195,107	85	1,261,845,514	90	1,308,294,008	95	1,356,618,304	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KAB. BARITO KUALA
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat,	-	60	1,195,793,265	65	1,239,508,491	70	1,284,977,421	75	1,332,277,400	80	1,381,487,567	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

	Industri, dan Badan Usaha di Daerah												PENGEMBANG AN KAB. BARITO KUALA
UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN				-		-		-		-		-	
INSPEKTORAT DAERAH				-		-		-		-		-	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B ; 1	BB; 1	2,106,720,087	BB; 1	2,183,736,532	BB; 1	2,263,842,609	A; 1	2,347,174,585	A; 1	2,433,871,885	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	9	4	1,901,501,441	4	1,971,015,603	4	2,043,318,431	4	2,118,532,919	4	2,196,784,910	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3	4	2,214,352,244	4	2,295,303,453	4	2,379,502,143	5	2,467,091,542	5	2,558,218,200	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	4,46	4,5	1,861,318,769	4,6	1,929,363,952	4,7	2,000,138,872	4,8	2,073,763,921	4,9	2,150,362,285	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
	Manajemen Risiko Indeks	-	3,5	2,032,095,125	4	2,106,383,467	4,2	2,183,651,999	4,4	2,264,032,161	4,5	2,347,658,439	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N- 1	-	90	2,266,015,679	92,5	2,348,855,575	95	2,435,018,719	97,5	2,524,651,682	100	2,617,904,432	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Persentase OPD yang Difasilitasi	-	85	1,968,950,926	87,5	2,040,930,873	90	2,115,798,406	92,5	2,193,680,879	95	2,274,708,601	INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
UNSUR KEWILAYAHAN				-		-		-		-		-	
KECAMATAN				-		-		-		-		-	

7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B ; 1	B ; 1	3,758,514,923	B ; 1	3,895,916,878	B ; 1	4,038,830,922	BB; 1	4,187,500,162	BB; 1	4,342,173,342	17 KECAMATAN DI BARITO KUALA
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat	91	80	3,407,634,091	82,5	3,532,208,716	85	3,661,780,841	87,5	3,796,570,880	90	3,936,804,353	17 KECAMATAN DI BARITO KUALA
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Desa/Kelurahan Berdaya	-	75	3,640,119,551	80	3,773,193,265	85	3,911,605,434	90	4,055,591,508	95	4,205,392,395	17 KECAMATAN DI BARITO KUALA
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Angka Gangguan Ketertiban Umum	-	5	3,220,354,138	4	3,338,082,273	3	3,460,533,252	2	3,587,915,373	1	3,720,441,764	17 KECAMATAN DI BARITO KUALA
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penanganan Urusan Pemerintahan Umum	-	90	3,922,115,802	92,5	4,065,498,598	95	4,214,633,413	97,5	4,369,773,937	100	4,531,179,742	17 KECAMATAN DI BARITO KUALA
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Akuntabilitas Baik	-	80	3,577,692,900	85	3,708,484,451	90	3,844,522,905	95	3,986,039,673	100	4,133,271,532	17 KECAMATAN DI BARITO KUALA
UNSUR PEMERINTAHAN UMUM				-		-		-		-		-	
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK				-		-		-		-		-	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah; Jumlah Inovasi	B ; 1	BB; 1	1,186,823,918	BB; 1	1,230,211,248	BB; 1	1,275,339,126	BB; 1	1,322,284,320	BB; 1	1,371,125,374	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Indeks Karakter Pancasila	74,3	80	1,283,692,859	82,5	1,330,621,477	85	1,379,432,707	87,5	1,430,209,582	90	1,483,037,058	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN	Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	76	75	1,124,397,267	77,5	1,165,502,434	80	1,208,256,597	82,5	1,252,732,484	85	1,299,004,511	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA

PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK													
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Ormas yang Dibina	80	80	1,308,089,482	85	1,355,909,979	90	1,405,648,868	95	1,457,390,759	100	1,511,222,223	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	75	75	1,105,741,027	77,5	1,146,164,167	80	1,188,208,944	82,5	1,231,946,878	85	1,277,451,149	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITA	Indeks Kewaspadaan Nasional	78,84	80	1,166,732,582	82,5	1,209,385,423	85	1,253,749,347	87,5	1,299,899,821	90	1,347,914,062	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. BARITO KUALA
	TOTAL			1,435,095,426,996		1,487,558,945,399		1,542,127,117,823		1,598,892,768,925		1,657,950,875,204	

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala (Diolah)

4.2 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

4.2.1 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perumusan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Barito Kuala untuk periode RPJMD 2025-2029 dilakukan melalui pendekatan sistematis dan komprehensif yang mengacu pada prinsip-prinsip manajemen kinerja yang baik. Proses penetapan IKU dimulai dengan analisis mendalam terhadap cascade kinerja yang telah disusun, meliputi 5 misi strategis dengan 6 tujuan dan 21 sasaran yang menghasilkan total 27 indikator. Dari keseluruhan indikator tersebut, dilakukan proses seleksi ketat untuk mengidentifikasi indikator yang paling strategis, representatif, dan memiliki dampak sistemik yang luas.

Kriteria utama dalam penetapan IKU meliputi representativitas terhadap semua misi strategis, dimana setiap IKU yang dipilih harus mampu mewakili minimal satu misi strategis pembangunan daerah. Kriteria kedua adalah dampak sistemik tinggi, yaitu indikator yang memiliki efek multiplier dan dapat mempengaruhi pencapaian indikator-indikator lainnya. Kriteria ketiga adalah relevansi kontekstual, khususnya kesesuaian dengan peran Kabupaten Barito Kuala sebagai daerah pendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Kriteria keempat adalah kemudahan pengukuran dan pemantauan, memastikan bahwa data untuk setiap IKU dapat diperoleh secara akurat, tepat waktu, dan berkelanjutan. Kriteria kelima adalah tingkat ambisi yang realistis, dimana target yang ditetapkan menunjukkan peningkatan signifikan namun tetap dapat dicapai melalui upaya pembangunan yang terukur.

Proses seleksi menghasilkan enam IKU strategis yang dipilih berdasarkan analisis komprehensif terhadap indikator-indikator dalam cascade kinerja. Dari 6 indikator level tujuan, 5 diantaranya dipilih sebagai IKU karena sifatnya yang outcome-oriented dan mencerminkan hasil akhir pembangunan. Satu IKU tambahan dipilih dari level sasaran, yaitu PDRB Per Kapita, karena kemampuannya mengukur kesejahteraan ekonomi riil masyarakat yang tidak tercakup secara spesifik dalam indikator level tujuan. Penetapan jumlah 6 IKU didasarkan pada praktik terbaik manajemen kinerja yang menyarankan fokus pada 5-7 indikator utama untuk memastikan efektivitas pemantauan dan akuntabilitas kinerja.

Validasi pemilihan IKU dilakukan melalui penilaian terhadap keterkaitan dan sinergi antar indikator, memastikan bahwa keenam IKU tersebut saling mendukung dan tidak tumpang tindih dalam cakupan pengukurannya. Analisis gap juga dilakukan untuk memastikan tidak ada aspek strategis pembangunan yang terlewatkan dari cakupan IKU. Hasil validasi menunjukkan bahwa keenam IKU yang ditetapkan telah mencakup seluruh dimensi pembangunan prioritas dan mampu memberikan gambaran komprehensif tentang kemajuan pembangunan Kabupaten Barito Kuala.

Penetapan target untuk setiap IKU dilakukan dengan mempertimbangkan baseline kinerja, tren pencapaian historis, dan kapasitas sumber daya yang tersedia. Target ditetapkan dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*) dan mencerminkan ambisi yang tinggi namun realistis untuk dicapai dalam periode RPJMD 2025-2029. Setiap target juga diselaraskan dengan target-target pembangunan nasional dan regional untuk memastikan kontribusi optimal Kabupaten Barito Kuala terhadap pencapaian tujuan pembangunan yang lebih luas.

Tabel IV-2
Indikator Kinerja Utama

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Base Line 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,4	72	72,7	73,3	74	74,7	75,5
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	Persen	5,02	5,1	5,2	5,28	5,35	5,43	5,5
3	Indeks Infrastruktur	Angka	-	69,5	71	72,5	74	75,5	77
4	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75,1
5	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	82,85	84,6	86,35	88,1	89,85	91,6	93
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	34,29	35,5	37	38,5	40	41,5	43

Sumber: Bappelitbang Barito Kuala

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditetapkan sebagai IKU utama yang mencerminkan kualitas sumber daya manusia secara holistik. Target IPM yang ambisius

dari 75,76 pada tahun 2025 meningkat menjadi 83,60 pada tahun 2030 menunjukkan komitmen kuat pemerintah daerah dalam membangun manusia Barito Kuala yang unggul, sehat, religius, berkarakter, dan berbudaya luhur. Peningkatan IPM ini diharapkan dapat dicapai melalui sinergi pembangunan di bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan daya beli masyarakat. Capaian target ini akan menempatkan Barito Kuala pada kategori IPM tinggi secara nasional dan menjadi modal utama dalam mendukung pembangunan IKN.

Dimensi ekonomi diwakili oleh dua IKU strategis, yaitu Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan PDRB Per Kapita. Target LPE yang konsisten meningkat dari 4,73% pada tahun 2025 menjadi 6,33% pada tahun 2030 mencerminkan optimisme yang tinggi terhadap dinamika perekonomian daerah. Pertumbuhan ekonomi ini diharapkan dapat dicapai melalui pengembangan sektor-sektor unggulan, peningkatan investasi, dan penguatan industri kreatif berbasis kearifan lokal. Sementara itu, target PDRB per kapita yang meningkat dari 35,5 juta rupiah pada tahun 2025 menjadi 43 juta rupiah pada tahun 2030 menunjukkan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan riil masyarakat. Pencapaian kedua indikator ekonomi ini akan memperkuat daya saing Barito Kuala dan memposisikannya sebagai daerah dengan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutan.

Indeks Infrastruktur menjadi IKU yang sangat strategis mengingat peran Barito Kuala sebagai daerah pendukung IKN. Target peningkatan dari 69,50 pada tahun 2025 menjadi 77,00 pada tahun 2030 mencerminkan prioritas tinggi pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan. Pembangunan infrastruktur ini tidak hanya meliputi infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, tetapi juga infrastruktur digital dan infrastruktur pendukung lainnya yang akan memperkuat konektivitas wilayah. Pencapaian target ini akan memastikan Barito Kuala memiliki daya dukung infrastruktur yang memadai untuk menjalankan fungsinya sebagai penyangga dan pendukung operasional IKN.

Aspek tata kelola pemerintahan diwakili oleh Indeks Reformasi Birokrasi yang menargetkan peningkatan bertahap dari 70,94 pada tahun 2025 menjadi 74,1 pada tahun 2029, dengan target akhir 71,5 pada tahun 2030. Meskipun target 2030 mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2029, hal ini menunjukkan pendekatan yang realistis dalam menjaga kualitas reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Target ini mencerminkan tekad untuk mewujudkan birokrasi yang

profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima melalui tahapan yang terukur dan konsisten. Reformasi birokrasi ini mencakup peningkatan kapasitas aparatur sipil negara, penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik, penguatan sistem akuntabilitas, dan penciptaan budaya kerja yang inovatif. Pencapaian target reformasi birokrasi akan menjadi fondasi yang kokoh bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan mendukung iklim investasi yang kondusif.

Indeks Ketahanan Pangan ditetapkan sebagai IKU yang mencerminkan kemampuan daerah dalam menjamin ketersediaan, aksesibilitas, dan kualitas pangan bagi masyarakat. Target peningkatan dari 68,50 pada tahun 2025 menjadi 76,00 pada tahun 2030 menunjukkan komitmen untuk memperkuat ketahanan pangan regional yang akan mendukung kebutuhan pangan IKN. Pencapaian target ini akan diwujudkan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pengembangan sistem distribusi pangan yang efisien, diversifikasi pangan lokal, dan penguatan kelembagaan petani. Ketahanan pangan yang kuat akan menjadi salah satu keunggulan kompetitif Barito Kuala dalam mendukung ketahanan nasional.

Keenam IKU yang ditetapkan memiliki keterkaitan sistemik yang saling memperkuat dalam mencapai visi pembangunan Kabupaten Barito Kuala. Peningkatan kualitas sumber daya manusia akan mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan daerah dalam membangun infrastruktur dan memperkuat ketahanan pangan. Sementara itu, reformasi birokrasi akan menjadi enabler bagi pencapaian seluruh target pembangunan melalui tata kelola yang efektif dan efisien.

4.2.2 Target penyelenggaraan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah (IKD)

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala telah menetapkan berbagai target capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk periode 2025-2029. Target ini dirumuskan berdasarkan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD) yang mencakup berbagai aspek pembangunan, termasuk

geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, daya saing daerah, pelayanan umum, serta indikator kinerja kunci di berbagai sektor.

IKD berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengukur kinerja pembangunan daerah secara kuantitatif dan kualitatif. Setiap indikator mencerminkan pencapaian tujuan pembangunan yang telah dirancang dalam dokumen perencanaan daerah, serta menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Dengan adanya target yang terukur, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat.

Pada periode 2025-2029, berbagai indikator utama yang menjadi fokus dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), pengendalian laju pertumbuhan penduduk, peningkatan indeks pembangunan manusia (IPM), penurunan tingkat pengangguran terbuka, serta optimalisasi reformasi birokrasi melalui peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu, aspek daya saing daerah juga menjadi perhatian utama, dengan target peningkatan investasi, penguatan ketahanan pangan, serta peningkatan konektivitas wilayah.

Target-target yang telah ditetapkan dalam berbagai aspek pembangunan ini akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Berikut adalah tabel yang menyajikan target penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2025-2029 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan:

Tabel IV-3
Indikator Kinerja Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2030

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI								
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Angka	64,02	66,36	66,57	66,79	67	67,21	67,42
Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Angka	0.02	0.02	0.11	0.2	0.29	0.38	0.47
Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	-	74,97	75,35	76,70	78,05	79,39	80,36
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Kumulatif	Ton CO2 eq	-	1.104.809,10	1.203.112,98	1.305.820,58	1.412.547,34	1.522.288,20	1.637.854,07
Penurunan Emisi GRK (Ton CO2 eq) - Tahunan	Ton CO2 eq	-	96.847,25	98.323,66	102.727,32	106.744,99	109.758,07	115.589,69
Indeks Risiko Bencana (IRB)	Angka	156,15	129	125.25	121.5	117.75	114	110.25
Konsumsi Listrik per Kapita	kWh	-	215,88	224,02	232,15	240,29	248,42	256,56
Kapasitas Air Baku	m/detik	-	5,79	5,81	5,83	5,85	5,87	5,90
Akses Air Siap Minum Perpipaan	%	-	25	29,69	34,38	39,06	43,75	48,44

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	11,01	13	14,5	16	17,5	19	20,5
Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	86,35	94	94,5	95	95,5	96	96,5
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,1	5,2	5,28	5,35	5,42	5,5
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,41	3,39	3,3	3,25	3,2	3,15	3,1
Indeks Gini	Angka	0,272	0,257	0,242	0,227	0,212	0,197	0,182
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka	71,4	72	72,7	73,3	74	74,7	75,5
Angka Harapan Hidup (UHH)	Tahun	67,07	74,4	74,75	75,1	75,45	75,8	76,15
Prevalensi Stunting	%	10,39	9,5	8,5	7,5	6,5	5,5	4,5
Proporsi penduduk dengan aktivitas fisik cukup	%		28	31	34	37	40	43
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,92	8	8,13	8,39	8,65	8,9	9,16
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	12,56	12,96	13,07	13,19	13,31	13,42	13,54
Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Angka	73,53	74,26	74,76	75,26	75,76	76,27	76,77
Indeks Ketimpangan Gender	Angka	0,51	0,46	0,44	0,42	0,4	0,38	0,36
Tingkat kemiskinan	%	4,36	4	3,88	3,75	3,63	3,5	3,37
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	-	9,37	9,47	9,57	9,67	9,76	9,86
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Angka	-	55,57	56,36	57,15	57,94	58,72	59,51
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	-	53,78	55,28	56,78	58,28	59,78	61,28
Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	%	98,96	99	99,2	99,4	99,6	99,8	100
Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100.000 kelahiran hidup	127	≤10	≤9	≤8	≤7	≤6	≤5
Jumlah Kematian Balita	Per 1.000 kelahiran hidup	12	≤10	≤9	≤8	≤7	≤6	≤5
Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	%	45,73	90	90,63	91,25	91,88	92,5	93,13
Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	%	81,5	90	90,63	91,25	91,88	92,5	93,13
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca	%	66,52	40,52	43,51	46,49	49,48	52,48	55,47
Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi	%	58,71	20,36	23,42	26,47	29,53	33,49	37,45
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	-	44,1	47,59	51,07	54,56	57,95	61,34
Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal Kab/Kota	%	-	30	31,88	33,75	35,63	37,5	39,38
ASPEK DAYA SAING DAERAH								

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	73,46	73.5	73.6	73.7	73.8	73.9	74
Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	%	-	33.28	33.52	33.76	34.01	34.26	34.51
Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	-	1.4	1.42	1.44	1.46	1.48	1.5
Tingkat Inflasi di Barito Kuala	%	1,98	1,90	1,82	1,74	1,66	1,58	1,50
Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak	%	35,19	35,49	35,8	36,1	36,41	36,71	37,01
Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	14,29	15.28	16.11	16.94	17.76	18.59	19.42
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	-	2.5	2.57	2.65	2.72	2.79	2.87
Jumlah tamu wisatawan (hotel/Orang)	Orang	-	350.000	478.125	606.250	734.375	862.500	990.625
Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Kab/Kota	%	-	4.8	4.88	4.96	5.04	5.12	5.2
Proporsi Jumlah Usaha Mikro Non Pertanian pada Level Kab/Kota	%	11,25	11.73	12.11	12.48	12.86	13.24	13.62
Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Kab/Kota	%	1,07	1.3	1.53	1.77	2	2.23	2.46
Rasio Kewirausahaan Daerah Kab/Kota	%	1,82	2	2.19	2.38	2.56	2.75	2.94
Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB	%	0,93	1.26	1.59	1.92	2.24	2.57	2.9
Return on Asset (RoA) BUMD	%	-	0.10	0,25	0,40	0,60	0,80	1,00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (TPAK Perempuan)	%	57,66	58,12	58.44	59.49	60.55	61.61	62.67
Indeks Inovasi Daerah	Angka	39,4	40	41	42	42	44	46
Kontribusi Sektor PDRB diluar Sektor Pertambangan dan Penggalian	%	-	99.91	99.92	99.93	99.93	99.93	99.94
Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Angka	-	6.36	6.45	6.55	6.64	6.74	6.84
Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	Angka	-	7.28	7.13	6.97	6.82	6.66	6.51
Ekspor barang dan jasa	%	-	-17.28	-16.92	-16.56	-16.2	-15.84	-15.48
Proporsi Kontribusi PDRB Kab/Kota terhadap PDRB Kawasan Metropolitan Banjarbakula	%	-	12.52	17.69	22.87	28.04	33.21	38.38
Kredit UMKM ke bank umum/PDRB	%	-	14.36	15	15.64	16.22	16.79	17.36
Inklusi Keuangan	%	-	87.98	88.64	89.29	89.94	90.59	91.24
Indeks Daya Saing Daerah	Angka	-	3.54	3.59	3.64	3.7	3.75	3.8
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Indeks Reformasi Birokrasi	Angka	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75,1
Indeks Demokrasi Indonesia	Angka	80,44	81,5	82,4	83,3	84,2	85,1	86
Indeks Reformasi Hukum	Angka	96.28	96,88	97,48	98,08	98,68	99,28	99,88
Indeks SPBE	Angka	2,59	2.64	2,7				
Indeks PEMDI	Angka	-	-	-	1,5	1,7	1,8	2,1
Indeks Pelayanan Publik	Angka	4.28	4,35	4,42	4,49	4,56	4,63	4,7
Indeks Integritas Nasional	Angka	73,2	76.36	77.34	78.31	79.29	80.27	81.25
Maturitas SPIP	Nilai	3.29	3,3	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55
Nilai SPI	Nilai	73,2	75.22	76.15	77.07	78	78.92	80
Persentase konflik sosial yang tertangani	%	-	90	90.63	91.25	91.88	92.5	93.13
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	-	62.62	63.83	65.05	66.26	67.47	68.68

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR								
A. PENDIDIKAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Jumlah anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan (APS)	%	92,91	93.2	94	94	95	97	98
Jumlah anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (APS)	%	97,41	98.65	98.8	98.8	99	99.4	99.5
Jumlah anak usia 7-18 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan (APS)	%	85,81	86.2	87	87	88	90	91
Rata-rata kemampuan literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,01	68.5	75	75	77.5	82.5	85
Rata-rata kemampuan numerasi SD berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	55,01	68.5	70	70	72.5	77.5	80
Rata-rata kemampuan literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	71,03	68.5	72	72	74.5	79.5	82
Rata-rata kemampuan numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional	Nilai	62,4	68.5	68	68	70.5	75.5	78
Proporsi jumlah satuan PAUD yang mendapatkan minimal akreditasi B	%	62,11	85	60	60	65	75	80
Proporsi Guru PAUD Formal dengan kualifikasi S1/D IV	%	65,05	85	70	70	72.5	77.5	80
Tingkat Implementasi Kurikulum Merdeka	%	100	90	80	80	85	95	100
Persentase Pendidik Tersertifikasi	%	59,01	85	85	85	87.5	92.5	95
Persentase Satuan Pendidikan Berizin	%	100	90	90	90	92.5	97.5	100
Tingkat Literasi Bahasa dan Sastra	Nilai	66,52	68.5	75	75	77.5	82.5	85
Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	%	92,91	93.2	93.5	93.8	94.1	94.4	94.7
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	%	98,6	98.65	98.7	98.75	98.8	98.85	98.9
Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	%	95,16	95.4	95.65	95.9	96.15	96.4	96.65
Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	85,81	86.2	86.6	87	87.4	87.8	88.2
Persentase guru yang memenuhi kualifikasi	%	59.01	85	87	89	91	93	95
Persentase satuan pendidikan berizin	%	100	90	92	94	96	98	100
Nilai literasi membaca	Nilai	66.52	68.5	68.75	69	69.25	69.5	69.75
B. KESEHATAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Jumlah Kematian Ibu	Jumlah	5	≤10	≤9	≤8	≤7	≤6	≤5

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Prevalensi Stunting (Pendek Dan Sangat Pendek) Pada Balita	%	10,39	9.5	8.5	7.5	6.5	5.5	4.5
Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	%	92,097	93	94	95	96	97	98
Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	%	99,113	99.2	99.3	99.4	99.5	99.6	99.7
Persentase Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	%	98,677	98.8	98.9	99	99.1	99.2	99.3
Cakupan imunisasi bayi lengkap	%	85,2	87	89	91	93	95	97
Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,194	87	88	89	90	91	92
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	%	97,739	98	98.2	98.4	98.6	98.8	99
Persentase Pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	%	84,71	85.5	86.5	87.5	88.5	89.5	90.5
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,013	90.5	91	91.5	92	92.5	93
Persentase Pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan penemuan pemeriksaan kesehatan ginjal	%	32,5	35	38	42	46	50	55
Persentase pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Tenaga Kesehatan yang Memenuhi Standar	%	98	80	82.5	85	87.5	90	92.5
Persentase Ketersediaan Obat Esensial	%	99,68	100	100	100	100	100	100
Persentase Desa/Kelurahan Siaga Aktif	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	Rasio	0,58	0.59	0.6	0.61	0.62	0.63	0.64
Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	92,1	92.3	92.5	92.7	92.9	93.1	93.3
Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	99,11	99.15	99.2	99.25	99.3	99.35	99.4
Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	98,68	98.75	98.8	98.85	98.9	98.95	99

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	86,19	86.5	86.8	87.1	87.4	87.7	88
Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	97,74	97.8	97.85	97.9	97.95	98	98.05
Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	84,71	85	85.3	85.6	85.9	86.2	86.5
Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	90,01	90.2	90.4	90.6	90.8	91	91.2
Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ODGI berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase tenaga kesehatan yang memenuhi standar kompetensi	%	98	80	82	84	86	88	90
Persentase ketersediaan obat dan alat kesehatan sesuai standar	%	100	85	87	89	91	93	95
C. PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	%	41,4	41,92	42,4	42,9	43,4	43,9	44,4
Persentase peningkatan perlindungan Kawasan dari abrasi dan banjir rob kewenangan Kabupaten/Kota	%	-	-	-	-	-	-	-
Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan kab/kota	%	64,5	65,32	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5
Persentase Kondisi irigasi kewenangan kab/kota	%	67,1	69,06	71,1	73,1	75,1	77,1	79,1
Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	%	73,17	74,00	75,00	77,00	79,00	81,00	83,00
Persentase Pengurangan Sampah Regional	%	2	15	20	25	30	35	40

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	78,76	79,00	80,00	82,00	84,00	86,00	88,00
Persentase Genangan yang Tertangani	%	-	55	60	65	70	75	80
Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Bangunan Gedung Hijau	%	-	10	15	20	25	30	35
Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	%	41,72	45,71	48,2	50,7	53,2	55,7	58,2
Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis	%	74,716	77	79	81	83	85	87
Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	%	50	60	62	64	66	68	70
Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	%	27,8	39,8	51,9	63,9	75,9	88	100
Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir	%	54,28	55	56	57	58	59	60
Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi	%	0	2	4	6	8	10	12
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	74,12	74.5	75	75.5	76	76.5	77
Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM	%	67,2	67.8	68.4	69	69.6	70.2	70.8
Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	70,5	71	71.5	72	72.5	73	73.5
Rasio kepatuhan IMB kab/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	67,86	68.2	68.6	69	69.4	69.8	70.2
Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	%	74,72	75.2	75.7	76.2	76.7	77.2	77.7
Rasio proyek yang menjadi kewangannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	75,33	75.7	76.1	76.5	76.9	77.3	77.7
Cakupan layanan sistem drainase	%	-	65	67.5	70	72.5	75	77.5
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	%	45,1	46	47	48	49	50	51
Indeks Kualitas Lingkungan Permukiman	Indeks	-	60	62	64	66	68	70

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	43,99	44,01	44,02	90	90,01	90,02	90,04
D. PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100	100	100	100
persentase Luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha yang ditangani	%	-	6.89	25.51	44.13	62.75	81.38	100
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Tertangani	%	13,786	12.5	20	25	30	35	40
Persentase Kawasan Kumuh yang Ditingkatkan	%	-	0.83	0.36	5.29	7.52	9.76	11.99
Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	57,996	59	62	66	70	74	78
Persentase Pelaku Usaha Perumahan Tersertifikasi	%	-	70	75	80	85	90	95
Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Fasilitas hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di Kab/Kota yang ditangani	%	-	6.89	25.51	44.13	62.75	81.38	100
Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	13,79	12.5	11.2	9.9	8.6	7.3	6
Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU	%	58	59	60	61	62	63	64
Indeks Kualitas Permukiman	Indeks	-	65	67	69	71	73	75
Persentase bangunan perumahan berizin	%	-	75	78	81	84	87	90
E. KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase warga negara dan aparatur yang memperoleh layanan pencegahan dan	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
kesiapsiagaan terhadap bencana								
Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penyelesaian dokumen kebencanaan sampai dengan dinyatakan sah/legal	%	100	85	90	92.5	95	97.5	100
Persentase penanganan pra bencana	%	100	80	85	87.5	90	92.5	95
Persentase penanganan pasca bencana	%	100	80	85	87.5	90	92.5	95
Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	0,31	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	6,82	6.7	6.5	6.3	6.1	5.9	5.7
Proporsi Penduduk yang Merasa Aman	%	-	70	72	74	76	78	80
Tingkat Kesiapsiagaan Bencana	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
F. SOSIAL								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase PSKS yang Meningkat Kapasitasnya	%	60	65	70	75	80	85	90
Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	31,6	80	85	87.5	90	92.5	95
Persentase Potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) perorangan sosial yang melaksanakan pelayanan sosial sesuai standar	%	72	75	80	82.5	85	87.5	90
Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	100	100	100	100	100	100	100
Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	%	43,39	55	60	65	70	75	80
Persentase korban bencana alam, sosial dan non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase korban tindak kekerasan yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	100
Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan	%	-	45	48	51	54	57	60
Tingkat kelayakan taman makam pahlawan	%	85	85	87	89	91	93	95
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								
A. TENAGA KERJA								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	4,354	4.7	6	8	10	12	15
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	3.840.43 5.854	3.887.881 .212	3.993.37 1.260	4.106.84 3.825	4.230.75 2.544	4.365.11 3.388	4.509.47 4.821
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah Kabupaten	%	87,669	87.8	89	90.5	92	93.5	95
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	%	78,049	78.5	8000%	82	84	86	88

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak	%	78,05	78.5	7900%	79.5	80	80.5	81
Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan melalui mekanisme layanan Antar Kerja	%	87,67	87.8	88	88.2	88.4	88.6	88.8
B. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kualitas Keluarga	Indeks	69	70	75	77.5	80	82.5	85
Persentase Data Terpilah Gender	%	60	65	70	75	80	85	90
Persentase Kabupaten/Kota Layak Anak	%	75	80	85	87.5	90	92.5	95
Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	12,1	12.5	13	13.5	14	14.5	15
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	Per 100.000	18,44	18	17.5	17	16.5	16	15.5
Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	64	65	67	69	71	73	75
Persentase pemenuhan hak anak	%	78	80	82.5	85	87.5	90	92.5
C. PANGAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Tingkat Kemandirian Pangan Daerah	%	-	75	80	82.5	85	87.5	90
Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	%	96,632	96.8	97	97.5	98	98.5	99
Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	11,94	10	9	8	7	6	5
Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	%	96,63	96.8	97	97.2	97.4	97.6	97.8
Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan	%	4,69	4.2	4	3.8	3.6	3.4	3.2
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Skor	90,43	85	87	89	91	93	95
Persentase daerah rawan pangan yang tertangani	%	70	80	82.5	85	87.5	90	92.5
D. PERTANAHAN								
Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	%	0	5	50	60	70	80	90
Persentase Ganti Kerugian yang Diselesaikan	%	-	75	80	85	90	95	100
Luas Tanah Ulayat yang Ditetapkan	%	-	70	80	85	90	95	100

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Ditetapkan Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	-	70	75	80	85	90	95
Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	%	-	80	85	87.5	90	92.5	95
Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	96,38	96.5	96.7	96.9	97.1	97.3	97.5
Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Tersedianya tanah untuk masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
Penanganan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	0	5	10	15	20	25	30
Persentase ganti kerugian yang terealisasi	%	-	85	87.5	90	92.5	95	97.5
Luas tanah ulayat (tanah bengkok) yang ditetapkan	Ha	-	50	75	100	125	150	175
Jumlah izin pembukaan tanah	Izin	-	25	30	35	40	45	50
Persentase bidang tanah bersertifikat	%	-	70	73	76	79	82	85
Persentase tanah yang terpetakan	%	-	75	78	81	84	87	90
Persentase SDM pertanahan yang kompeten	%	-	80	82.5	85	87.5	90	92.5
Persentase wilayah pesisir yang tertata	%	-	60	65	70	75	80	85
Persentase informasi pertanahan terintegrasi	%	-	70	75	80	85	90	95
Persentase konflik pertanahan yang terselesaikan	%	-	75	78	81	84	87	90
E. LINGKUNGAN HIDUP								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase Dokumen Lingkungan yang Tersusun	%	70	75	80	85	90	95	100
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) kabupaten/Kota	Indeks	64,02	66,36	66,57	66,79	67	67,21	67,42
Indeks Keanekaragaman Hayati	Indeks	60	65	70	72.5	75	77.5	80
Persentase Limbah B3 yang Dikelola	%	70	75	80	85	90	95	100
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Masyarakat Peduli Lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah Penghargaan Lingkungan yang Diberikan	Jumlah	0	1	2	3	4	5	6
Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	75,326	75.7	77	79	81	83	85

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKA (Indeks Kualitas Air)	Indeks	51,82	65,16	65,36	65,56	65,76	65,96	66,16
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKU (Indeks Kualitas Udara)	Indeks	96,63	71,48	71,78	72,08	72,39	72,68	72,98
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) - IKL (Indeks Kualitas Lahan)	Indeks	24,64	58,96	59,03	59,1	59,17	59,24	59,31
Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	75,33	75,7	76,1	76,5	76,9	77,3	77,7
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pengendalian pencemaran air	%	68	70	73	76	79	82	85
Persentase pengelolaan limbah B3	%	72	75	78	81	84	87	90
Jumlah MHA yang terlindungi haknya	Jumlah	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah kelompok masyarakat peduli lingkungan	Jumlah	2	2	4	6	8	10	12
Jumlah penghargaan lingkungan hidup yang diberikan	Jumlah	0	1	2	3	4	5	6
Persentase pengaduan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti	%	100	100	100	100	100	100	100
F. ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase Akta Kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	6,5	28	30	32	34	36	38
Persentase Akta kelahiran yang diterbitkan	%	91,5	91,5	92	93	95	97	100
Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	%	80	100	100	100	100	100	100
Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital	%	95,93	100	100	100	100	100	100
Persentase Akta Perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	57,84	100	100	100	100	100	100
Persentase Akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	%	34,9	100	100	100	100	100	100
Persentase Pemanfaatan SIAK	%	60	100	100	100	100	100	100
Jumlah Data Profil Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100	100	100	100
Perekaman KTP elektronik	%	99,28	99,35	99,4	99,45	99,5	99,55	99,6
Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	91,93	92,2	92,5	92,8	93,1	93,4	94
Kepemilikan akta kelahiran	%	95,93	96,1	96,3	96,5	96,7	96,9	97,1
Jumlah Perangkat Daerah (PD) yang telah memanfaatkan data kependudukan	%	13,33	100	100	100	100	100	100
Ketersediaan data penduduk yang akurat	%	-	100	100	100	100	100	100
G. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase peningkatan status desa mandiri	%	79,245	79.5	81	83	85	87	90
Persentase Fasilitas Kerjasama Desa	%	-	75	80	85	90	95	100
Persentase pengentasan desa tertinggal	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah kerja sama antar desa	Jumlah	-	15	18	21	24	27	30
Persentase desa dengan administrasi yang tertib	%	80	85	87.5	90	92.5	95	97.5
Persentase lembaga masyarakat yang aktif	%	75	80	82.5	85	87.5	90	92.5
H. PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA								
Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Angka	2,35	2,3	2.25	2.2	2.15	2,12	2,1
Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	Angka	24,7	24,6	24,5	24,4	24,3	24,2	24,1
Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	84,706	84.8	86	87.5	89	5	92
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,238	7.1	6.5	6	5.5	2.18	4.5
TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2,28	2.26	2.24	2.22	2.2	85.6	2.16
Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (mCPR)	%	84,71	84.8	85	85.2	85.4	-	85.8
Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	7,24	7.1	6.95	6.8	6.65	6.5	6.35
I. PERHUBUNGAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60,25	61.5	65	67.5	70	72.5	75
Konektivitas Kabupaten/Kota	Rasio	0,89	0.9	0.92	0.94	0.96	0.98	1
Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	-	65	70	75	80	85	90
Tingkat Keselamatan Pelayaran	%	99.99	80	85	87.5	90	92.5	95
Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,89	0.9	0.91	0.92	0.93	0.94	0.95
Kinerja lalu lintas kabupaten/kota (V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota)	Rasio	0,37	0.36	0.36	0.35	0.35	0.34	0.34
Jumlah trayek pelayaran yang terlayani	Jumlah	21	8	10	12	14	16	18
J. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	-	80	85	87.5	90	92.5	95

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	%	10,127	11	20	30	40	50	60
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	10,13	11	12	13	14	15	16
Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	%	64,04	64.5	65	65.5	66	66.5	67
K. KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase Koperasi Simpan Pinjam Berizin	%	100	75	80	85	90	95	100
Persentase Koperasi yang Diawasi	%	100	70	75	80	85	90	95
Persentase KSP/USP Sehat	%	62,5	63	65	67.5	70	72.5	75
Persentase Pengurus Koperasi Terlatih	%	18	65	70	75	80	85	90
Persentase Koperasi Aktif	%	45	65	70	75	80	85	90
Persentase UMKM yang Diberdayakan	%	49	55	60	65	70	75	80
Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	1,09	3	5	7.5	10	12.5	15
Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	48,825	49.5	52	56	60	64	68
Pertumbuhan Wirausaha	%	41,88	42	42,5	43	43,5	44	45
Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	62,5	63	63.5	64	64.5	65	65.5
Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirausaha	%	48,83	49.5	50	50.5	51	51.5	52
Jumlah koperasi yang berizin	Jumlah	126	45	50	55	60	65	70
Jumlah pengurus koperasi yang terlatih	Jumlah	30	150	175	200	225	250	275
Tingkat Pengembangan UMKM	%	41,88	70	72.5	75	77.5	80	82.5
Persentase koperasi berbadan hukum	%	100	85	87.5	90	92.5	95	97.5
L. PENANAMAN MODAL								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	6,373	6.6	8	10	12	14	16
Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	33	75	80	85	90	95	100
Jumlah Investor yang Tertarik	Jumlah	8	8	10	12	15	18	20
Rata-rata Waktu Penyelesaian Izin Investasi	Hari	5	5	5	5	5	5	5
Persentase Kepatuhan Investor	%	80	80	85	87.5	90	92.5	95
Persentase Data Investasi Terintegrasi	%	75	75	80	90	95	100	100
Jumlah kegiatan promosi investasi	Jumlah	6	12	15	18	21	24	27
Rata-rata waktu penyelesaian perizinan (hari)	Hari	5	5	5	5	5	5	5

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase realisasi investasi terhadap komitmen	%	40	80	82.5	85	87.5	90	92.5
Persentase keterpaduan data penanaman modal	%	70	75	80	85	90	95	100
M. KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	60,25	61.5	65	67.5	70	72.5	75
Persentase Pemuda yang pernah mengikuti pelatihan/kursus/training dan memperoleh sertifikat	%	1,693	1.8	3	4.5	6	7.5	9
Persentase Atlet yang berasal dari kab/kota yang masuk Pelatda Provinsi	%	10	11	12	15	18	20	25
Persentase Gugus Depan Aktif	%	4,459	25	50	60	70	80	90
Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,69	1.8	1.95	2.1	2.25	2.4	2.55
Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	%	4,46	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6
Peningkatan Prestasi Olahraga	Medali	10	11	12	13	14	15	16
Jumlah anggota pramuka aktif	Orang	-	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
N. STATISTIK								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Indeks	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
O. PERSANDIAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah	Indeks	60,93	61.5	65	70	75	80	85
Tingkat keamanan informasi pemerintah	Indeks	60,93	61.5	62	62.5	63	63.5	64
P. KEBUDAYAAN								
Persentase Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Situs Sejarah yang Terpelihara	%	70	75	80	85	90	95	100
Persentase Jumlah Cagar budaya dan warisan budaya tak benda yang didaftarkan	%	65	70	75	80	85	90	95
Jumlah Pengunjung Museum	Orang	-	-	-	-	-	-	-
Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah sanggar seni tradisional	Jumlah	20	25	30	35	40	45	50
Jumlah situs sejarah yang terdata	Jumlah	14	15	18	21	24	27	30
Jumlah kunjungan museum	Orang	-	-	-	-	-	-	-
Q. PERPUSTAKAAN								

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai	68,24	68.5	70	72	74	76	78
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,57	76.8	78	80	82	84	86
Jumlah Naskah Kuno yang Dilestarikan	Jumlah	-	8	10	12	15	18	20
Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	68,24	68.5	68.8	69.1	69.4	69.7	70
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	76,57	76.8	77.1	77.4	77.7	78	78.3
Jumlah naskah kuno yang didigitalisasi	Jumlah	-	20	25	30	35	40	45
R. KEARSIPAN								
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Indeks	75,43	75.8	78	80	82	84	86
Persentase Arsip Vital yang Terlindungi	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Layanan Arsip Tepat Waktu	%	-	85	90	92.5	95	97.5	100
Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja	%	75,43	75.8	76.2	76.6	77	77.4	77.8
Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban	%	100	100	100	100	100	100	100
Jumlah penggunaan arsip yang terdata	Jumlah	-	150	175	200	225	250	275
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN URUSAN PILIHAN								
A. KELAUTAN DAN PERIKANAN								
Produksi Perikanan Tangkap	Ribu Ton	9,17	9.8	10	10.3	10.6	10.9	11.2
Produksi Perikanan Budi Daya	Ribu Ton	11,94	7.5	8	8.5	9	9.5	10
Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perikanan	%	-	75	80	85	90	95	100
Nilai Ekspor Hasil Perikanan	Kg/Kap/Tahun	67,86	67,93	67,99	68,06	68,13	68,2	68,27
Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota	%	97,48	97.6	97.75	97.9	98.05	98.2	98.35
Produksi perikanan budidaya (ton)	Ton	11.940	15	16,5	18	19,5	21	22,5
Persentase penanganan pelanggaran	%	-	85	87.5	90	92.5	95	97.5
Nilai ekspor produk perikanan (miliar)	Miliar Rupiah	-	50	60	70	80	90	100
B. PARIWISATA								
Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	-	3	5	7.5	10	12.5	15
Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang non Bintang)	%	-32,5	-30	5	10	15	20	25
Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	-	25	30	35	40	45	50
Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tersertifikasi	Orang	-	80	100	150	200	250	300
Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	-32,5	-28	-24	-20	-16	-12	-8

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	1,85	2	2.2	2.4	2.6	2.8	3
Tingkat hunian akomodasi	%	18,69	19	19.5	20	20.5	21	21.5
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,57	2.6	2.65	2.7	2.75	2.8	2.85
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	2,72	2.75	2.8	2.85	2.9	2.95	3
Jumlah SDM pariwisata tersertifikasi	Orang	-	200	250	300	350	400	450
C. PERTANIAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Peningkatan produksi tanaman pangan	Ribu Ton	354674	356624	358615	360674	362801	364997	367249
Peningkatan Produksi Hortikultura	%	0.02	0.69	0.69	0.70	0.71	0.72	0.73
Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	4.00	4.10	6.00	8.00	10.00	12.00	14.00
Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana DPI Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	2.5	6	8	10	12	14	16
Persentase Prasarana Pertanian yang Berfungsi	Ha	115.042	115.574	115.875	116.176	116.477	116.778	117.080
Persentase Hewan Ternak yang Sehat	%	70	75	80	85	90	95	100
Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari survey lance penyakit dari 5 PHMS)	%	85	87.5	90	92.5	95	97.5	100
Persentase Usaha Pertanian Berizin	%	93	94	95	96	97	98	99
Persentase Petani yang Terlayani Penyuluhan	%	70.00	75.00	80.00	85.00	90.00	95.00	100.00
Produktivitas pertanian per hektar per tahun	ton	355,74	386,09	416,44	446,79	477,14	507,49	537,83
Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	88,62	100	100	100	100	100	100
Tingkat ketersediaan prasarana pertanian	Ton/Ha/Tahun	42.50	42.72	42.73	42.74	42.75	42.76	3.86
Persentase penanganan bencana pertanian	%	-0,2	-0.15	-0.1	-0.05	0	0.05	0.1
Jumlah usaha pertanian berizin	%	77.5	80	82.5	85	87.5	90	92.5
Jumlah petani yang mendapat penyuluhan	%	80	85	87.5	90	92.5	95	97.5
D. KEHUTANAN								
Luas hutan adat yang ditetapkan (Ha)	Jumlah	-	300	350	400	450	500	550
	Orang	1316	1485	1485	1485	1485	1485	1485
E. PERDAGANGAN								
Nilai Total Penjualan Perdagangan Antar Wilayah pada kab/kota	Ha	-	80	100	150	200	250	300
Persentase Pasar Rakyat yang Revitalisasi	Rupiah	0	450.000.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
Tingkat Stabilitas Harga Bahan Pokok	%	50	55	60	65	70	75	80
Nilai Ekspor Daerah	%	41,505	45	50	60	70	80	90
Persentase alat ukur takaran timbangan dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	Rupiah	0	80.000.000	100.000.000	120.000.000	140.000.000	160.000.000	180.000.000

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Persentase Produk Dalam Negeri di Pasar Modern	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan	%	0	65	70	75	80	85	90
Persentase kinerja realisasi pupuk	%	72,97	73.5	74	74.5	75	75.5	76
Persentase alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah	%	41,5	42.5	43.5	44.5	45.5	46.5	47.5
Koefisien harga antar wilayah tingkat kabupaten	%	100	100	100	100	100	100	100
Ekspor barang dan jasa	Angka	0	7.2	7	6.8	6.6	6.4	6.2
Proporsi produk lokal di pasar	%	0	-16	-15	-14	-13	-12	-11
F. PERINDUSTRIAN	%	0	45	47.5	50	52.5	55	57.5
Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah	%	72,3	72.6	75	77.5	80	82.5	85
Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	6,993	7.1	8	10	12	14	16
Tersedianya informasi industri secara lengkap, akurat, dan terkini	%	125	122	100	100	100	100	100
Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	6,99	7.1	7.25	7.4	7.55	7.7	7.85
Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri	%	72,3	72.6	73	73.4	73.8	74.2	74.6
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI)	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPIU)	%	0	90	92	94	96	98	100
Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI)	%	0	85	87.5	90	92.5	95	97.5
Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	125	120	115	110	105	100	100
G. TRANSMIGRASI								
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Direncanakan	Unit	100	1	1	1	1	1	1
Jumlah Kawasan Transmigrasi yang Dibangun	Unit	-	0.5	1	1	1	1	1
Persentase Kawasan Transmigrasi Berkembang	%	-	55	60	65	70	75	80
Jumlah unit permukiman transmigrasi yang dibangun	Unit	-	5	7	9	11	13	15
Tingkat kemandirian kawasan transmigrasi	%	-	70	73	76	79	82	85
INDIKATOR OUTCOME BERDASARKAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								
A. SEKRETARIAT DAERAH								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Indeks Kesejahteraan Masyarakat	Indeks	34,47	65	70	72.5	75	77.5	80
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,02	5,1	5,2	5,28	5,35	5,43	5,5
Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
B. SEKRETARIAT DPRD								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Perda yang ditetapkan tepat waktu	%	80	85	87.5	90	92.5	95	97.5
C. PERENCANAAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	82,5	85	87.5	90	92.5	95
Tingkat Sinkronisasi Perencanaan	%	100	87	90	95	98	100	100
Kesesuaian dokumen perencanaan dengan dokumen anggaran	%	-	90	92	94	96	98	100
Tingkat keselarasan perencanaan pusat, provinsi dan kabupaten	%	-	85	87.5	90	92.5	95	97.5
D. KEUANGAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	16,2	15.5	15	14	13	12	11
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	5,882	6.5	7	8.5	10	11.5	13
Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	80	85	90	92.5	95	97.5	100
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	100	100	100	100	100	100	100
Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	47,85	20	25	27.5	30	32.5	35
Persentase Penurunan SILPA	%	2,7	5	10	15	20	25	30
Persentase BMD yang Tersertifikasi	%	73	75	80	85	90	95	100
Persentase Target Pendapatan yang Tercapai	%	72,3	72.6	75	77.5	80	82.5	85
Opini BPK atas laporan keuangan	Status	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Persentase aset daerah yang terdokumentasi	%	90	90	92.5	95	97.5	100	100
Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum	%	60,30	60,75	60,99	61,22	61,46	61,70	61,94
Deviasi realisasi belanja terhadap total dalam APBD	%	16,87	19,62	22,37	25,12	27,87	30,63	33,38
Deviasi realisasi PAD terhadap PAD dalam APBD	%	24,96	28,64	31,92	35,21	38,49	41,78	45,06
Manajemen Aset	Nilai	4	4	4	4	4	4	4
Rasio Anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	%	13,64	17,04	20,42	23,81	27,19	30,57	33,96
E. KEPENGAWAIAAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Nilai Indeks Implementasi NSPK manajemen ASN	Nilai	3	3.2	3.5	4	4.2	4.4	4.5

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	66,5	70	72,5	75	77,5	80	82,5
Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	70,23	72,61	74,98	77,36	79,74	82,11	84,49
Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	22,25	23,64	25,03	26,42	27,81	29,20	30,59
Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga Kesehatan)	%	34,42	35,12	35,81	36,51	37,20	37,90	38,59
F. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN								
Persentase ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	%	125	80	80	85	90	95	100
Persentase ASN yang telah mengikuti diklat	%	80	80	82,5	85	87,5	90	92,5
G. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN								
Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	-	55	60	65	70	75	80
Jumlah penelitian yang dimanfaatkan	Jumlah	-	15	18	21	24	27	30
H. INSPEKTORAT DAERAH								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Opini Laporan Keuangan (10 tahun terakhir)	Angka	9	4	4	4	4	4	4
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,29	3,3	3,35	3,40	3,45	3,50	3,55
Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,00	3,10	3,20	3,30	3,40	3,50	3,60
Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,87	3,2	3,5	4	4,2	4,4	4,5
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	95,31	85	90	92,5	95	97,5	100
Persentase OPD yang Difasilitasi	%	-	80	85	87,5	90	92,5	95
Nilai SPI	Nilai	73,2	75,22	76,15	77,07	78	78,92	80
I. KECAMATAN								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	-	75	80	82,5	85	87,5	90
Persentase Desa/Kelurahan Berdaya	%	-	70	75	80	85	90	95
Angka Gangguan Ketertiban Umum	Angka	-	6	5	4	3	2	1
Persentase Penanganan Urusan Pemerintahan Umum	%	-	85	90	92,5	95	97,5	100
Persentase Desa dengan Akuntabilitas Baik	%	-	75	80	85	90	95	100
Indeks Pelayanan Publik	Indeks	-	3,9	4	4,1	4,2	4,3	4,4
Persentase Desa Mandiri	%	-	25	30	35	40	45	50
Indeks Transformasi Digital Pemerintahan	Indeks	-	2,5	2,75	3	3,25	3,5	3,75
Indeks Pembangunan Desa (IPD)	Indeks	-	65	67,5	70	72,5	75	77,5
J. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK								
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75
Indeks Karakter Pancasila	Indeks	74,3	75	80	82,5	85	87,5	90

Indikator	Satuan	Base Line 2024	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Target 2030
Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat	%	76	78	80	82	84	86	88
Persentase Ormas yang Dibina	%	80	84	86	92	96	100	100
Indeks Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Indeks	75	70	75	77.5	80	82.5	85
Indeks Kewaspadaan Nasional	Indeks	78,84	79	80	82.5	85	87.5	90
Indeks Keharmonisan Kehidupan Beragama	Indeks	84,26	85	86,5	88	89,5	91	92,5
Jumlah organisasi masyarakat yang aktif & terdaftar	Jumlah	40	150	165	180	195	210	225
Indeks Pembangunan Kebudayaan	Indeks	58,55	59	60	61	62	64	66
K. PENGADAAN								
Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama	%	0	0	0	0	0	0	0
Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	83,15	89,86	96,57	100	100	100	100
Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	38,13	41,80	45,46	49,13	52,79	56,46	60,12
Peningkatan penggunaan produk dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah	%	27,18	31,37	35,56	39,75	43,94	48,13	52,32
L. TRANSPARANSI DAN PARTISIPASI PUBLIK								
Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	%	97,22	97,68	98,15	98,61	99,07	99,54	100
Akses public terhadap informasi keuangan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
INDIKATOR REFORMASI BIROKRASI PERANGKAT DAERAH (SEMUA URUSAN)								
Indeks reformasi birokrasi perangkat daerah	Indeks	70,94	71,2	71,5	72,2	73,4	74,1	75,1

Sumber: Bappelitbang Kab. Barito Kuala

BAB V PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan daerah selama lima tahun ke depan. Bab ini memuat kesimpulan penting secara substansial, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Secara substansial, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 telah merumuskan visi "Terwujudnya Barito Kuala SATU (Sejahtera, Agamis, Terpadu, Unggul) Menuju Indonesia Emas" dengan 5 (lima) misi yang akan menjadi arah pembangunan. Misi-misi tersebut mencakup penguatan sumber daya manusia yang religius, berkarakter, dan berbudaya luhur; pengembangan ekonomi daerah berbasis wirausaha, investasi strategis, dan agroindustri inovatif; peningkatan konektivitas dan infrastruktur berkelanjutan; peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pendidikan unggul, kesehatan komprehensif, dan tata kelola pemerintahan digital; serta pengembangan ketangguhan wilayah melalui mitigasi bencana dan pemberdayaan masyarakat perdesaan. Untuk mencapai visi dan misi tersebut, telah ditetapkan berbagai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program prioritas yang diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan dan isu strategis daerah.

Dalam pelaksanaannya, RPJMD ini akan diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah, serta program dan kegiatan prioritas beserta pendanaannya. Selanjutnya, RKPD akan menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Keterkaitan dokumen perencanaan dan penganggaran ini akan memastikan konsistensi dalam implementasi program dan kegiatan pembangunan.

Kaidah pelaksanaan yang menjadi landasan dalam implementasi RPJMD meliputi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipatif, efisien, efektif, dan berorientasi pada hasil. Pelaksanaan RPJMD juga harus memperhatikan aspek keberlanjutan, keadilan, dan pemerataan, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Koordinasi dan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antar tingkatan pemerintahan, serta dengan pihak swasta dan masyarakat menjadi kunci keberhasilan implementasi RPJMD.

Pengendalian terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan melalui mekanisme pemantauan dan supervisi yang terstruktur dan sistematis. Pemantauan dilakukan untuk mengamati perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi permasalahan yang muncul, serta mengantisipasi dan mengatasi permasalahan tersebut. Supervisi dilakukan untuk menjamin pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hasil pemantauan dan supervisi akan menjadi bahan untuk melakukan tindakan korektif jika terjadi penyimpangan.

Evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkala, meliputi evaluasi pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pascapelaksanaan. Evaluasi pada tahap perencanaan dilakukan untuk menilai kesesuaian antara rancangan RPJMD dengan RPJPD dan RTRW, serta tingkat keterukuran dan ketercapaian target yang telah ditetapkan. Evaluasi pada tahap pelaksanaan dilakukan untuk menilai kemajuan implementasi program dan kegiatan dibandingkan target yang ditetapkan. Evaluasi pascapelaksanaan dilakukan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan serta mendapatkan umpan balik bagi perencanaan pembangunan berikutnya.

Berbagai indikator kinerja telah ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (IKD). Indikator ini mencakup aspek-aspek seperti kesejahteraan ekonomi, nilai-nilai keagamaan, pembangunan infrastruktur terpadu, daya saing sumber daya manusia, pelayanan publik berkualitas, serta ketangguhan wilayah terhadap bencana. Target indikator menjadi acuan dalam menilai keberhasilan pembangunan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 tidak hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, swasta, akademisi, dan organisasi kemasyarakatan. Sinergi dan kolaborasi antar pihak ini akan memperkuat upaya pencapaian visi dan misi pembangunan daerah. Dengan komitmen bersama dan implementasi yang konsisten, diharapkan RPJMD ini dapat mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang lebih maju, sejahtera, agamis, terpadu, dan unggul menuju Indonesia Emas pada tahun 2029.

Sebagai penutup, dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025-2029 merupakan dokumen hidup yang adaptif terhadap perubahan dan dinamika pembangunan. Revisi dan penyesuaian dapat dilakukan sepanjang tidak mengubah visi, misi, dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, serta memperhatikan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, RPJMD ini diharapkan menjadi panduan yang efektif dan relevan dalam mengarahkan pembangunan Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun ke depan.

Daftar Pustaka

Buku:

- Aghion, P., & Howitt, P. (1998). *Endogenous Growth Theory*. MIT Press.
- Becker, G. S. (1993). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education (3rd ed.)*. University of Chicago Press.
- Burns, J. M. (1978). *Leadership*. Harper & Row.
- Deming, W. E. (1986). *Out of the Crisis*. MIT Center for Advanced Engineering Study.
- Hirschman, A. O. (1958). *The Strategy of Economic Development*. Yale University Press.
- Merton, R. K. (1968). *Social Theory and Social Structure*. Free Press.
- Nonaka, I., & Takeuchi, H. (1995). *The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies Create the Dynamics of Innovation*. Oxford University Press.
- North, D. C. (1990). *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge University Press.
- Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*. Addison-Wesley.
- Rawls, J. (1971). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Romer, P. M. (1994). *The Origins of Endogenous Growth*. Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3-22.
- Schick, A. (2016). *A Contemporary Approach to Public Expenditure Management*. World Bank Institute.
- Sen, A. (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press.
- Simon, H. A. (1976). *Administrative Behavior: A Study of Decision-Making Processes in Administrative Organization (3rd ed.)*. Free Press.
- Senge, P. M. (1990). *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. Doubleday.
- Weber, M. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. University of California Press.

Jurnal:

- Alkire, S., & Foster, J. (2011). Counting and multidimensional poverty measurement. *Journal of Public Economics*, 95(7-8), 476-487.
- Blanchard, O. J., & Summers, L. H. (1986). Hysteresis and the European unemployment problem. *NBER Macroeconomics Annual*, 1, 15-78.
- Bourguignon, F. (2018). Spreading the wealth. *Finance & Development*, 55(1), 22-24.
- Preston, S. H. (1975). The changing relation between mortality and level of economic development. *Population Studies*, 29(2), 231-248.
- Rodrik, D. (2018). Structural change, fundamentals, and growth: A framework and case studies. *Journal of Economic Growth*, 23(3), 259-293.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development (13th ed.)*. Pearson.

Laporan dan Peraturan Pemerintah:

- Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian. (2023). *Laporan Konsumsi Beras Nasional 2023*. Kementerian Pertanian Republik Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2020). *Peraturan BPS No. 3 Tahun 2020 tentang Konversi Gabah ke Beras*.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2023*.
- Kementerian Kesehatan. (2021). *Analisis Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Program Gizi Masyarakat*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2018). *Pedoman Penentuan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup*.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2023). *Profil Anak Indonesia 2023*.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. (2023). *Strategi Pengembangan Ekonomi Wilayah di Era Transformasi Digital*.
- Peraturan Menteri LHK No. P.67/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup.
- Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Laporan dan Publikasi Organisasi Internasional:

- FAO. (2018). *Sustainable Food Systems - Concept and Framework*.
- International Labour Organization. (2022). *World Employment and Social Outlook: Trends 2022*. ILO.
- UNDP. (2022). *Human Development Report 2021-22: Uncertain Times, Unsettled Lives: Shaping Our Future in a Transforming World*.
- UN-Habitat. (2022). *World Cities Report 2022: Envisaging the Future of Cities*.
- UNICEF. (2022). *Situation Analysis of Children in Indonesia*.
- WHO-UNICEF Joint Monitoring Programme. (2021). *Progress on Household Drinking Water, Sanitation and Hygiene 2000-2020: Five Years into the SDGs*.
- World Bank. (2018). *Logistics Performance Index 2018*. The World Bank Group.
- World Bank. (2019). *Lifelines: The Resilient Infrastructure Opportunity*. The World Bank Group.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Prospects: Improving Housing Affordability*. The World Bank Group.
- World Economic Forum. (2023). *Global Gender Gap Report 2023*.

Dokumen Pemerintah Daerah:

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala. (2023). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Teknokratik Tahun 2025-2029*. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala. (2025). *Kabupaten Barito Kuala Dalam Angka 2025*. BPS Kabupaten Barito Kuala.

- Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. (2024). *Pemetaan Geospasial Prevalensi Stunting Kabupaten Barito Kuala 2020-2024*. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- Dinas PUPRP Kabupaten Barito Kuala. (2024). *Laporan Kinerja Tahunan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan 2024*. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Lampiran

Penyesuaian Misi

Aspek	Misi Sebelum Penyesuaian	Misi Setelah Penyesuaian	Alasan Penyesuaian
Jumlah Misi	12 Misi	5 Misi	Mengurangi kompleksitas cascading kinerja dan efisiensi penganggaran
Fokus SDM	Misi 1: Membentuk Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Agamis, Tertib dan Berbudaya; Misi 6: Meningkatkan kualitas pendidikan Putra-Putri Daerah Barito Kuala; Misi 7: Menyediakan pelatihan dan lapangan kerja; Misi 10: Meningkatkan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Barito Kuala	Misi 1: Memperkokoh Sumber Daya Manusia Barito Kuala yang Religius, Berkarakter, dan Berbudaya Luhur	Memperluas cakupan pembangunan karakter dan integrasi isu gender, pelatihan, dan pendidikan
Fokus Ekonomi	Misi 2: Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Barito Kuala melalui Pemberdayaan Wirausaha & Keterbukaan Investasi Berskala Nasional – Internasional; Misi 3: Meningkatkan hasil Agro Industri Daerah melalui inovasi pengetahuan dan teknologi; Misi 11:	Misi 2: Mendorong Kemandirian Ekonomi Daerah melalui Pengembangan Wirausaha, Investasi Strategis, dan Agroindustri Berbasis Inovasi	Penekanan pada kemandirian ekonomi, inovasi, dan pemberdayaan ekonomi desa

Aspek	Misi Sebelum Penyesuaian	Misi Setelah Penyesuaian	Alasan Penyesuaian
	Meningkatkan kesejahteraan Pemerintah Desa & Bumdes se Barito Kuala		
Konektivitas & Infrastruktur	Misi 4: Mempercepat konektivitas antarwilayah dan peningkatan penyediaan infrastruktur daerah; Misi 12: Menjadikan Barito Kuala sebagai Kabupaten Penopang Ibukota Nusantara (IKN)	Misi 3: Mengembangkan Konektivitas Wilayah—Infrastruktur Berkelanjutan Menuju Peran Strategis Barito Kuala sebagai Kabupaten Pendukung Ibu Kota Nusantara	Integrasi pengembangan infrastruktur dengan peran strategis wilayah
Pelayanan Publik	Misi 5: Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Barito Kuala; Misi 8: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang unggul, berbasis digital serta kolaboratif	Misi 4: Membangun Kualitas Pelayanan Publik melalui Pendidikan Unggul, Kesehatan Komprehensif, dan Tata Kelola Pemerintahan Digital	Holistik dan komprehensif dalam pelayanan publik, mengintegrasikan kesehatan dan tata kelola
Ketangguhan Wilayah	Misi 9: Menyiapkan kesiagaan daerah dalam pencegahan dan penanggulangan bencana	Misi 5: Mengembangkan Ketangguhan Wilayah dalam Mitigasi Bencana dan Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan	Memperluas fokus mitigasi dengan pemberdayaan masyarakat

Analisis MICMAC untuk Isu Strategis Kabupaten Barito Kuala dalam RPJMD

Tabel 1: Hasil Analisis MICMAC - Klasifikasi Variabel

Kuadran	Karakteristik	Variabel Kunci	Deskripsi
I. Variabel Pengaruh	Pengaruh tinggi, Ketergantungan rendah	Posisi strategis daerah (PS1)	Penggerak utama sistem, kedekatan dengan IKN
		Proporsi lahan alami (KLL1)	Hanya 11,32% lahan alami, mempengaruhi ekosistem
		Kerentanan banjir (RB2)	Mempengaruhi berbagai aspek pembangunan
II. Variabel Penghubung	Pengaruh tinggi, Ketergantungan tinggi	Produksi beras (KP1)	Surplus 4x lipat kebutuhan lokal
		Laju pertumbuhan ekonomi (EK1)	Saat ini 3,91%, berpengaruh ke berbagai aspek
		Konektivitas wilayah (PS3)	Menghubungkan 17 kecamatan
III. Variabel Tergantung	Pengaruh rendah, Ketergantungan tinggi	Indeks kualitas lingkungan hidup (KLL3)	Indikator hasil dari berbagai intervensi
		Kontribusi ekonomi (PS2)	Tergantung pada faktor penggerak lain
IV. Variabel Otonom	Pengaruh rendah, Ketergantungan rendah	Perbedaan produktivitas antar kecamatan (KP2)	Relatif terpisah dari dinamika sistem utama
		Distribusi penduduk (DM4)	Relatif terpisah dari dinamika sistem utama

Tabel 2: Isu Strategis Prioritas dan Implikasi Kebijakan

No	Isu Strategis	Status & Potensi	Implikasi Kebijakan
1	Optimalisasi Produksi dan Nilai Tambah Pangan	Surplus beras 4x lipat kebutuhan lokal	• Pengembangan industri pengolahan beras bernilai tambah tinggi; • Penguatan rantai pasok dan sistem logistik pangan; • Pengembangan kapasitas petani dalam teknologi pertanian modern
2	Pemanfaatan Posisi Strategis sebagai Wilayah Pendukung IKN	Posisi geografis dekat dengan IKN	• Penyusunan rencana tata ruang terintegrasi dengan IKN; • Pengembangan kawasan khusus pendukung IKN; • Pembangunan infrastruktur konektivitas ke IKN
3	Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah	Laju pertumbuhan ekonomi saat ini 3,91%	• Diversifikasi ekonomi daerah; • Peningkatan investasi dan iklim usaha kondusif; • Pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif
4	Mitigasi Kerentanan Banjir	Daerah rawan banjir di Tabunganen dan Alalak	• Pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase; • Pengembangan sistem peringatan dini bencana; • Pengembangan infrastruktur tahan banjir dan adaptif
5	Pengembangan Infrastruktur Jalan	45,8% jalan masih berupa kerikil dan tanah	• Peningkatan kualitas jalan penghubung antar kecamatan; • Pembangunan jalan strategis penunjang ekonomi; • Peningkatan sistem pemeliharaan infrastruktur jalan
6	Pengelolaan Lahan Alami dan Terbangun	Proporsi lahan alami hanya 11,32%	• Penyusunan regulasi pengelolaan lahan berkelanjutan; • Perlindungan dan rehabilitasi kawasan konservasi; • Pengembangan kawasan terbangun ramah lingkungan
7	Peningkatan Konektivitas Antar 17 Kecamatan	Konektivitas antar kecamatan belum optimal	• Pengembangan sistem transportasi publik antar kecamatan; • Peningkatan infrastruktur

			digital penghubung; • Pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi di setiap kecamatan
8	Pengentasan Kemiskinan Tepat Sasaran	Persentase kemiskinan 3,66%, fokus pada kantong kemiskinan	• Pemetaan dan identifikasi kantong kemiskinan; • Program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal; • Peningkatan akses layanan dasar bagi masyarakat miskin
9	Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia	IPM belum merata di seluruh kecamatan	• Peningkatan akses dan kualitas pendidikan; • Pengembangan fasilitas kesehatan merata; • Program pelatihan dan keterampilan masyarakat
10	Pemerataan Infrastruktur Digital	Kesenjangan digital antar kecamatan	• Pembangunan infrastruktur telekomunikasi di daerah tertinggal; • Pengembangan pusat layanan digital di setiap kecamatan; • Peningkatan literasi digital masyarakat

Tabel 3: Strategi Intervensi

No	Strategi	Tujuan	Program Utama
1	Pengembangan Hilirisasi Pangan	Mengoptimalkan potensi produksi beras melalui pendekatan terintegrasi	• Pembangunan kawasan industri pengolahan hasil pertanian; • Pengembangan produk turunan beras bernilai tambah tinggi; • Penguatan kemitraan petani dan industri pengolahan; • Peningkatan penelitian dan inovasi produk pangan lokal
2	Peningkatan Konektivitas dan Infrastruktur	Memperkuat integrasi antar wilayah melalui pendekatan komprehensif	• Pengembangan jalan strategis penghubung pusat ekonomi; • Pembangunan infrastruktur digital terintegrasi; • Pengembangan sistem transportasi multimoda; • Peningkatan kapasitas infrastruktur pendukung logistik pangan
3	Penguatan Mitigasi Bencana	Mengurangi kerentanan terhadap banjir melalui pendekatan holistik	• Pembangunan sistem drainase terintegrasi; • Pengembangan tanggul dan infrastruktur pengendali banjir; • Penguatan sistem peringatan dini dan tanggap darurat; • Peningkatan kesadaran dan kapasitas masyarakat
4	Pengembangan Ekonomi Inklusif	Memanfaatkan posisi strategis untuk pertumbuhan ekonomi inklusif	• Penciptaan iklim investasi kondusif; • Pengembangan kawasan ekonomi khusus pendukung IKN; • Penguatan UMKM dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal; • Program pemberdayaan ekonomi masyarakat di kantong kemiskinan
5	Pengelolaan Sumber Daya Alam Berkelanjutan	Menjaga keseimbangan ekosistem melalui pendekatan terpadu	• Penetapan dan perlindungan kawasan konservasi; • Pengembangan praktik pertanian berkelanjutan; • Pengelolaan sumber daya air terintegrasi; • Rehabilitasi lahan kritis dan pencegahan degradasi lingkungan

RANCANGAN AKHIR

RPJMD

KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025-2029



KABUPATEN BARITO KUALA

RANCANGAN AKHIR

RPJMD

KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2025-2029



KABUPATEN
BARITO KUALA